



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (**L K P J**) WALIKOTA CILEGON TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Cilegon Tahun 2019 ini dapat disusun dan disampaikan tepat waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Penyusunan LKPJ Walikota Cilegon Tahun 2019 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cilegon Tahun 2019 merupakan representasi dari pencapaian kinerja dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Cilegon dalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2019. Adapun evaluasi hasil kinerja dalam LKPJ didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2019 yang merupakan turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021.

Sistematika dokumen LKPJ Wali Kota Cilegon Tahun 2019 ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/479/Otda tahun 2020 tentang Format Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), yang substansinya terdiri dari visi, misi dan data umum daerah, kebijakan dan hasil pengelolaan keuangan daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, serta penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas-tugas umum pemerintahan.

Kami berharap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan Kota Cilegon tahun 2019 yang tertuang dalam dokumen LKPJ ini tergambarkan dengan baik dan digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah Kota Cilegon di masa mendatang, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 DASAR HUKUM.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	3
1.2.2 VISI DAN MISI (Periode RPJMD 2016-2021).....	3
1.2.3 Visi Kota Cilegon.....	3
1.2.4 Misi Kota Cilegon Tahun 2016-2021.....	4
1.2.2 STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	4
1) Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah RPJMD Kota Cilegon 2016-2021	4
2) Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Memantapkan Lingkungan Kota yang Asri dan Lestari.....	6
3) Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	8
4) Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota.....	10
5) Strategi dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.....	11
1.2.3 PRIORITAS DAERAH (RKPD KOTA CILEGON TAHUN 2019).....	16
1.3 DATA UMUM DAERAH.....	19
1.3.2 Kondisi Geografis Daerah.....	19
A. Luas Wilayah	21
1.3.3 Kondisi Demografis Daerah.....	22
A. Jumlah Penduduk & Laju Pertumbuhan Penduduk.....	22
B. Tingkat Kepadatan Penduduk	24
C. Penduduk Menurut Jenis Kelamin	25
1.3.4 Kondisi Ekonomi	26
A. Struktur PDRB Kota Cilegon	26
B. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	28
C. PDRB Per Kapita	32
D. Perkembangan Investasi	32
E. Tingkat Inflasi	35
F. Ketenagakerjaan	37
1.3.5 Kondisi Kesejahteraan Sosial.....	39
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	39
a) Indeks Angka Harapan Hidup (AHH).....	42
b) Indeks Pendidikan.....	43



c) Indeks Tingkat Daya Beli.....	46
B. Kemiskinan	48
BAB II KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	50
2.1 KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CILEGON.....	50
2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....	51
2.2.1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah.....	52
2.2.2 Deskripsi Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019.....	52
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH.....	53
1. Hasil Pajak Daerah	55
2. Hasil Retribusi Daerah	57
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	62
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	63
B. DANA PERIMBANGAN	68
1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69
2. Dana Alokasi Umum	71
3. Dana Alokasi Khusus.....	71
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	72
2.2.3 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH	80
A. INTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2019.....	80
Intensifikasi Pajak Daerah.....	81
Intensifikasi Retribusi Daerah.....	83
Intensifikasi Perusahaan Milik Daerah.....	86
Intensifikasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87
B. INTENSIFIKASI DANA PERIMBANGAN TAHUN 2019.....	87
A. Intensifikasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	87
Intensifikasi Dana Alokasi Umum (DAU)	88
Intensifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK).....	88
C. INTENSIFIKASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN 2019	88
A. Pendapatan Hibah.....	89
B. Bagi Hasil Pajak Provinsi	89
C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.....	89
D. Bantuan Keuangan Provinsi Banten	89
D. EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019	90
A. EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH.....	90
B. EKSTENSIFIKASI DANA PERIMBANGAN.....	93
C. EKSTENSIFIKASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LAINNYA.....	93
2.2.4 PERMASALAHAN DAN SOLUSI	93
A. PERMASALAHAN	93
B. SOLUSI	98
2.3 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.....	102



2.3.1	Kebijakan Umum Belanja Daerah	102
2.3.2	Target dan Realisasi Belanja	102
	A. Belanja Tidak Langsung	103
	A.1 Belanja Pegawai	104
	A.2 Belanja Hibah	105
	A.3 Belanja Bantuan Sosial.....	106
	A.4 Belanja Bantuan Keuangan	108
	A.5 Belanja Tidak Terduga	108
	B. Belanja Langsung	108
	B.1. Belanja Langsung berdasar Jenis Belanja	109
	B.2. Belanja Langsung bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan.....	110
2.3.3	Permasalahan dan Solusi.....	113
	A. Permasalahan.....	113
	B. Solusi	114
2.4	PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	114
2.5	RINGKASAN REALISASI KEUANGAN DAERAH	115
BAB III	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	116
3.1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR.....	116
3.1.1	Bidang Urusan Pendidikan	116
	A. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan.....	116
	A.1 Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal 116	
	A.2 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar	123
	A.3 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama 129	
	A.4 Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan	138
	A.5 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Pendidikan)	142
	B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	143
	B.1 Permasalahan.....	143
	B.2 Solusi.....	144
3.1.2	Bidang Urusan Kesehatan	145
	A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	145
	A.1 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat.....	145
	A.2 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.....	159
	A.3 Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.....	177
	A.4 Program Peningkatan Pelayanan RSUD (RSUD).....	190
	A.5 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Kesehatan dan RSUD)	193
	B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	194
	B.1 Permasalahan.....	194



B.2 Solusi.....	195
3.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	197
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	197
A.1 Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase Dan Pengelolaan Sumber Daya Air	197
A.2 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.....	204
A.3 Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan Dan Pengendalian Reklame	209
A.4 Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi.....	211
A.5 Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 213	
A.6 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	214
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	215
B.1. Permasalahan.....	215
B.2 Solusi.....	216
3.1.4 Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	217
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	217
A.1 Program Penataan Perumahan dan Permukiman	217
A.2 Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota	220
A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman).....	223
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	223
B.1 Permasalahan.....	223
B.2 Solusi.....	223
3.1.5 Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	224
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	224
A.1 Program Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	224
A.2 Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Pemadam Kebakaran)	225
A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).....	226
A.4 Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah (Satpol PP)	228
A.5 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP)	228
A.6 Program Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)	229
A.7 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Satpol PP) 230	



3.1.6	Bidang Urusan Sosial.....	231
A.	REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	231
A.1	Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial	231
A.2	Program Pemberdayaan Sosial	234
A.3	Program Perlindungan Jaminan Sosial	237
A.4	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Sosial)	241
B.	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	241
B.1	Permasalahan.....	241
B.2	Solusi.....	241
3.2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	242
3.2.1	Bidang Urusan Tenaga Kerja.....	242
A.	REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	242
A.1	Program peningkatan kualitas, produktivitas, serta kompetensi tenaga kerja	242
A.2	Program peningkatan hubungan industrial.....	253
A.3	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Tenaga Kerja)	256
B.	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	257
B.1	Permasalahan.....	257
B.2	Solusi.....	257
3.2.2	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	258
A.	REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	258
A.1	Program Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (DP3AKB)	258
A.2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	264
A.3	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas PP, PA dan KB).....	266
B.	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	267
B.1	Permasalahan.....	267
B.2	Solusi.....	267
3.2.3	Bidang Urusan Pangan.....	268
A.	REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	268
A.1	Program Konsumsi, Diversifikasi Dan Keamanan Pangan	268
A.2	Program Peningkatan Distribusi Dan Cadangan Pangan	271
A.3	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)	273
B.	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	273
B.1	Permasalahan.....	273
B.2	Solusi.....	274



3.2.4	Bidang Urusan Pertanahan.....	275
	A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	275
	A.1 Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah (Dinas Pekerjaan Umum)	275
	B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	275
	B.1 Permasalahan.....	275
	B.2 Solusi.....	275
3.2.5	Bidang Urusan Lingkungan Hidup	276
	A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	276
	A.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	276
	A.2 Program Penataan Lingkungan.....	279
	A.3 Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.....	281
	A.4 Program Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3.....	283
	A.5 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Lingkungan Hidup)	286
	B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	286
	B.1 Permasalahan.....	286
	B.2 Solusi.....	287
3.2.6	Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	288
	A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	288
	A.1 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	288
	A.2 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.....	291
	A.3 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.....	294
	A.4 Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	295
	A.5 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	296
	B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	296
	B.1 Permasalahan.....	296
	B.2 Solusi.....	297
3.2.7	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	298
	A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	298
	A.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Dinas Sosial)	298
	B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	299
	B.1 Permasalahan.....	299
	B.2 Solusi.....	299
3.2.8	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	300



A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	300
A.1 Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.....	300
A.2 Program Bina Keluarga Sejahtera	303
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	306
B.1 Permasalahan.....	306
B.2 Solusi.....	306
3.2.9 Bidang Urusan Perhubungan.....	307
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	307
A.1 Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	307
A.2 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	310
A.3 Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut	314
A.4 Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas.....	316
A.5 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Perhubungan)	317
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	317
B.1 Permasalahan.....	317
B.2 Solusi.....	318
3.2.10 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika	319
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	319
A.1 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi	319
A.2 Program Pengembangan Komunikasi Dan Pengelolaan Informasi Daerah	323
A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Kominfo, Sandi dan Statistik)	327
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	327
B.1 Permasalahan.....	327
B.2 Solusi.....	327
3.2.11 Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	328
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	328
A.1 Program Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro & Kecil	328
A.2 Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan	333
A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Koperasi dan UMK)	337
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	337
B.1 Permasalahan.....	337
B.2 Solusi.....	338
3.2.12 Bidang Urusan Penanaman Modal	339
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	339
A.1 Program Promosi Dan Pengembangan Penanaman Modal	



A.2 Program Peningkatan Pelayanan Informasi Dan Pengaduan	340
A.3 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	343
A.4 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DPMPTSP)	344
B. PERMASALAHAN & SOLUSI	345
B.1 Permasalahan.....	345
B.2 Solusi.....	345
3.2.13 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	346
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	346
A.1 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	346
A.2 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.....	348
A.3 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda	352
A.4 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Pemuda dan Olahraga)	354
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	354
B.1 Permasalahan :	354
B.2 Solusi :	354
3.2.14 Bidang Urusan Statistik.....	355
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	355
A.1 Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah (Dinas Kominfo, Sandi dan Statistik)	355
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	356
B.1 Permasalahan.....	356
B.2 Solusi.....	356
3.2.15 Bidang Urusan Persandian	357
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	357
A.1 Program Penyelenggaraan Persandian (Dinas Kominfo, Sandi dan Statistik)	357
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	358
B.1 Permasalahan.....	358
B.2 Solusi.....	358
3.2.16 Bidang Urusan Kebudayaan	359
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	359
A.1 Program Pembinaan Dan Pelestarian Seni, Budaya Dan Sejarah Daerah.....	359
B.1 Permasalahan.....	367
B.2 Solusi.....	367
3.2.17 Bidang Urusan Kearsipan.....	368
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	368
A.1 Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	368



A.2 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah)	372
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	372
B.1 Permasalahan.....	372
B.2 Solusi.....	373
3.2.18 Bidang Urusan Perpustakaan	374
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	374
A.1 Program Pengembangan Perpustakaan Daerah	374
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	379
B.1 Permasalahan.....	379
B.2 Solusi.....	379
3.3 URUSAN PILIHAN.....	380
3.3.1 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan	380
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	380
A.1 Program Pengembangan Perikanan.....	380
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	381
B.1 Permasalahan.....	381
B.2 Solusi.....	382
3.3.2 Bidang Urusan Pariwisata.....	383
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	383
A.1 Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 383	
A.2 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).....	385
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	385
B.1 Permasalahan.....	385
B.2 Solusi.....	385
3.3.3 Bidang Urusan Pertanian.....	386
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	386
A.1 Program Pengembangan Pertanian	386
A.2 Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan.....	390
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	393
B.1 Permasalahan.....	393
B.2 Solusi.....	394
3.3.4 Bidang Urusan Perdagangan.....	395
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	395
A.1 Program Pengendalian Perdagangan	395
A.2 Program Pembinaan Dan Pengelolaan Pasar	398
A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	400
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	401
B.1 Permasalahan.....	401
B.2 Solusi.....	401



3.3.5	Bidang Urusan Perindustrian	402
A.	REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	402
A.1	Program Pengembangan Kemitraan Industri	402
B.	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	404
B.1	Permasalahan	404
B.2	Solusi	404
3.4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	405
3.4.1	Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan	405
A.	REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	405
A.1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan (Setda Bagian Pemerintahan)	405
A.2	Program Penataan dan Pengembangan Produk hukum Daerah (Setda Bagian Hukum dan HAM)	408
A.3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (Setda Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi)	412
A.4	Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan (Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat)	431
A.5a	Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Setda Bagian Perekonomian dan Pembangunan) 436	
A.5b	Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan (Setda Bagian Perekonomian dan Pembangunan)	441
A.6a	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa (Badan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) 445	
A.6b	Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa (Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	447
A.7	Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (Setda Bagian Sosial dan Kemasyarakatan)	450
A.8a	Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan (Setda Bagian Keuangan)	457
A.8b	Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan (Sekretariat DPRD)	463
A.9	Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah (Sekretariat DPRD)	464
A.10	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (Seluruh Kecamatan)	467
A.10a	KECAMATAN CILEGON	467
A.10b	KECAMATAN CIBEKER	477
A.10c	KECAMATAN GROGOL	491
A.10d	KECAMATAN PULOMERAK	502



A.10e KECAMATAN CIWANDAN	513
A.10f KECAMATAN CITANGKIL	523
A.10g KECAMATAN JOMBANG	534
A.10h KECAMATAN PURWAKARTA	546
A.11 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Badan Kesbangpol)	556
A.12 Program Peningkatan LSM dan ORMAS (Badan Kesbangpol)	561
A.13 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	566
A.14 Program Kedaruratan dan Logistik (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	568
A.15 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	569
A.18 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Seluruh Kecamatan/Kelurahan, Bag. Umum, Sekretariat DPRD, Badan Kesbangpol, BPBD)	571
3.4.2 Bidang Urusan Pengawasan	580
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	580
A.1 Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah (Inspektorat)	580
A.2 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Inspektorat)	581
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	582
B.1 Permasalahan	582
B.2 Solusi	582
3.4.3 Bidang Urusan Perencanaan	583
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	583
A.1 Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi	583
A.2 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan	587
A.3 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan	590
A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (BAPPEDA) 594	
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	594
B.1 Permasalahan	594
B.2 Solusi	594
3.4.4 Bidang Urusan Keuangan	595
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	595
A.1 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	595
A.2 Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	597



A.3 Program Peningkatan Pajak Daerah	602
A.4 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah	610
A.5 Program Perbendaharaan Keuangan Daerah.....	613
A.6 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (BPKAD)	618
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	618
B.1 Permasalahan.....	618
B.2 Solusi.....	619
3.4.5 Bidang Urusan Kepegawaian	620
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	620
A.1 Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA) (BKPP)	620
A.2 Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara (BKPP)	623
A.3 Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN (Sekretariat KORPRI).....	626
A.4 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (BKPP dan Sekretariat KORPRI).....	628
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	629
B.1 Permasalahan.....	629
B.2 Solusi.....	629
3.4.6 Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan.....	630
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	630
A.1 Program Diklat Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara (BKPP)	630
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	632
B.1 Permasalahan.....	632
B.2 Solusi.....	632
3.4.7 Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	633
A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	633
A.1 Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	633
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	634
B.1 Permasalahan.....	634
B.2 Solusi.....	634
3.5 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP CAPAIAN LKPJ TAHUN 2019	635
3.5.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	635
3.5.2 Penyelenggaraan Urusan Kesejahteraan Masyarakat	637
3.5.3 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang Infrastruktur, Penataan Ruang dan Permukiman	647



3.5.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang Perencanaan Pembangunan.....	655
3.5.5	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Empatik dan Bertanggung Jawab	657
3.5.6	Penyelenggaraan Urusan bidang Budaya, Agama dan Sosial	661
3.5.7	Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.....	665
3.5.8	Saran-saran Lainnya.....	668
BAB IV	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	671
4.1	TUGAS PEMBANTUAN	671
4.2	TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	672
4.2.1	KERJASAMA DAERAH	672
4.2.2	INOVASI DAERAH	674
4.2.3	PEMBINAAN BATAS WILAYAH	677
4.2.4	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	678
A.	Bencana yang Terjadi dan Penanggulangnya	678
B.	Sumber dan Jumlah Anggaran	691
C.	Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 692	
4.2.5	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	694
A.	Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)	694
B.	Organisasi Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	694
C.	Sumber dan Jumlah Anggaran	695
D.	Penanggulangan dan Kendalanya	695
E.	Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan....	698
BAB V	PENUTUP	699



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Strategi dan arah kebijakan misi ke-1 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021	5
Tabel 1.2 Strategi dan arah kebijakan misi ke-2 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021	7
Tabel 1.3 Strategi dan arah kebijakan misi ke-3 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021	8
Tabel 1.4 Strategi dan arah kebijakan misi ke-4 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021	11
Tabel 1.5 Strategi dan arah kebijakan misi ke-5 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021	12
Tabel 1.6 Prioritas Daerah Kota Cilegon Tahun 2019	18
Tabel 1.7 Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan	22
Tabel 1.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2018 dan 2019	23
Tabel 1.9 Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Cilegon Tahun 2018 dan 2019	24
Tabel 1.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Cilegon Tahun 2019	25
Tabel 1.11 Peningkatan Nilai PDRB Kota Cilegon Tahun 2016-2019	28
Tabel 1.11 PDRB Per Kapita Tahun 2015-2019	32
Tabel 1.12. IHK, Inflasi, Laju Inflasi Tahun Kalender Kota Cilegon Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2019	35
Tabel 1.13 Sumbangan kelompok pengeluaran terhadap inflasi Kota Cilegon bulan Desember 2019 (%)	36
Tabel 1.14 Statistik Ketenagakerjaan Kota Cilegon	37
Tabel 1.15 Perkembangan Komponen IPM Kota Cilegon Tahun 2011 – 2019	39
Tabel 1.16 Perkembangan IPM Kota Cilegon dan Banten Tahun 2012-2019	41
Gambar 1.19 IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019	41
Tabel 1.17. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cilegon Tahun 2010 – 2019	42
Tabel 1.18 Perkembangan Harapan lama sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cilegon Tahun 2012 – 2019	45
Tabel 1.19 Perkembangan Daya Beli Penduduk Kota Cilegon Tahun 2012 – 2019	46
Tabel 2.1 Tabel Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah	52
Tabel 2.2 Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	53
Tabel 2.3 Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	54
Tabel 2.6 Rencana dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	56
Tabel 2.7 Rencana dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kota Cilegon Tahun 2019	59



Tabel 2.8 Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	62
Tabel 2.9 Rencana dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	64
Tabel 2.10 Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	68
Tabel 2.11 Rencana dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	70
Tabel 2.12 Rencana dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	73
Tabel 2.13 Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	74
Tabel 2.14a Rencana dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	102
Tabel 2.14b Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	103
Tabel 2.15 Rencana dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	105
Tabel 2.16 Rencana dan Realisasi Belanja Hibah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	106
Tabel 2.17 Rencana dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	107
Tabel 2.18 Rencana dan Realisasi Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	108
Tabel 2.19 Realisasi kegiatan yang bersumber dari Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2019	111
Tabel 2.20.a Target dan Realisasi Keg. yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019	112
Tabel 2.20b Target dan Realisasi Keg. yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2019	113
Tabel 2.21 Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	114
Tabel 3.19 Ringkasan Rencana dan Realisasi APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	115
Tabel 3.1.1a Target dan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal Tahun Anggaran 2019	116
Tabel 3.1.1b Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2019	123
Tabel 3.1.1c Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2019	129
Tabel 3.1.1c-1 Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMPN) Tahun Anggaran 2019	134
Tabel 3.1.1d Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2019	138
Tabel 3.1.1e Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan... Tahun Anggaran 2019 (Dinas Pendidikan)	142



Tabel 3.1.2a Target dan Realisasi Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2019.....	145
Tabel 3.1.2b Target dan Realisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2019	159
Tabel 3.1.2c Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Tahun Anggaran 2019.....	177
Tabel 3.1.2d Program Peningkatan Pelayanan RSUD (RSUD) Tahun Anggaran 2019	190
Tabel 3.1.2d Program Dukungan Layanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Kesehatan dan RSUD).....	193
Tabel 3.1.3a Target dan Realisasi Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2019.....	197
Tabel.3.1.3a.1	199
Data Dasar Lokasi Banjir dan Genangan Kota Cilegon.....	199
Tabel.3.1.3a.2 Lokasi dan Luas Penanganan Genangan Banjir.....	200
Tabel.3.1. 3a.3 Lokasi kegiatan pemeliharaan saluran/drainase.....	201
Tabel.3.1.3a.4 Lokasi kegiatan Normalisasi saluran/drainase.....	203
Tabel 3.1.3b Target dan Realisasi Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2019.....	204
Tabel 3.1.3c Target dan Realisasi Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan Dan Pengendalian Reklame Tahun Anggaran 2019	209
Tabel 3.1.3d Target dan Realisasi Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun 2019	211
Tabel 3.1.3d.1 Bobot 7 Layanan Informasi.....	212
Tabel 3.1.3e Target dan Realisasi Program Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Tahun Anggaran 2019.....	213
Tabel 3.1.3f Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan.....	214
Tahun Anggaran 2019 (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang).....	214
Tabel 3.1.4a Target dan Realisasi Program Penataan Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2019.....	217
Tabel 3.1.4b Target dan Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota Tahun 2019.....	220
Tabel 3.1.4c Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun 2019 (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman).....	223
Tabel 3.1.5a Target dan Realisasi Program Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran Tahun 2019	224
Tabel 3.1.5b Target dan Realisasi Program Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran Tahun 2019	225
Tabel 3.1.5c Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	226
Tabel 3.1.5d Target dan Realisasi Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah.....	228



Tabel 3.1.5e Target dan Realisasi Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2019.....	228
Tabel 3.1.5f Target dan Realisasi Program Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2019.....	229
Tabel 3.1.5g Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Satpol PP).....	230
Tabel 3.1.6a Target dan Realisasi Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Tahun Anggaran 2019.....	231
Tabel 4.1.6b Target dan Realisasi Program Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2019.....	234
Tabel 3.1.6c Target dan Realisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2019.....	237
Tabel 3.1.6d Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Sosial).....	241
Tabel 3.2.1a Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas serta Kompetensi Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2019.....	242
Tabel 3.2.1b Target dan Realisasi Program Peningkatan Hubungan Industrial Tahun Anggaran 2019.....	253
Tabel 3.2.1c Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Tenaga Kerja).....	256
Tabel 3.2.2a Target dan Realisasi Program Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2019.....	258
Tabel 3.2.2b Target dan Realisasi Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2019.....	264
Tabel 3.2.2c Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas PP, PA dan KB).....	266
Tabel 3.2.3a Realisasi Program Konsumsi, Diversifikasi Dan Keamanan Pangan 2019.....	268
Tabel 4.2.3b Realisasi Program Peningkatan Distribusi Dan Cadangan Pangan 2019.....	271
Tabel 3.2.3c Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun 2019 (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian).....	273
Tabel 3.2.4a Target dan Realisasi Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah Tahun Anggaran 2019.....	275
Tabel 3.2.5a Target dan Realisasi Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019.....	276
Tabel 3.2.5b Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Program Penataan Lingkungan.....	279
Tabel 3.2.5c Target dan Realisasi Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019.....	281
Tabel 3.2.5d Target dan Realisasi Program Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 Tahun 2019.....	283



Tabel 3.2.5e Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Lingkungan Hidup).....	286
Tabel 3.2.6a Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun Anggaran 2019	288
Tabel 3.2.6b Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019.....	291
Tabel 3.2.6c Target dan Realisasi Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019.....	294
Tabel 3.2.6d Target dan Realisasi Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Tahun Anggaran 2019.....	295
Tabel 3.2.6e Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	296
Tabel 3.2.7a Target dan Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun 2019.....	298
Tabel 3.2.8a Target dan Realisasi Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Tahun Anggaran 2019.....	300
Tabel 3.2.8b Target dan Realisasi Program Bina Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2019	303
Tabel 3.2.9a Target dan Realisasi Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun Anggaran 2019	307
Tabel 4.2.9a.1Cakupan Penunjang Sistem Angkutan Massal	309
Tabel 4.2.9a.2 Jumlah Trayek dan Angkutan Kota.....	309
Tabel 4.2.9a.3 Jumlah Angkutan Non Trayek.....	310
Tabel 3.2.9b Target dan Realisasi Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun Anggaran 2018	310
Tabel 3.2.9c Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019.....	314
Tabel 3.2.9d Target dan Realisasi Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas Tahun Anggaran 2019.....	316
Tabel 3.2.9e Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Perhubungan)	317
Tabel 3.2.10a Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2019	319
Tabel 3.2.10b Target dan Realisasi Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Daerah Tahun Anggaran 2019	323
Tabel 3.2.10c Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Kominfo, Sandi dan Statistik)	327
Tabel 3.2.11a Target dan Realisasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2019	328
Tabel 3.2.11b Target dan Realisasi Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2019	333
Tabel 3.2.11c Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Koperasi dan UMK).....	337



Tabel 3.2.12a Target & Realisasi Program Promosi Dan Pengembangan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2019.....	339
Tabel 3.2.12b Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Tahun Anggaran 2019	340
Tabel 3.2.12c Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2019.....	343
Tabel 3.2.12d Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (DPMPTSP).....	344
Tabel 3.2.13a Target dan Realisasi Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2018.....	346
Tabel 3.2.13b Target dan Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tahun Anggaran 2019.....	348
Tabel 3.2.13c Target dan Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Tahun Anggaran 2019.....	352
Tabel 3.2.13d Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Pemuda dan Olahraga)	354
Tabel 3.2.14 Target dan Realisasi Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah Tahun Anggaran 2019.....	355
Tabel 3.2.15 Target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Persandian Tahun Anggaran 2019	357
Tabel 3.2.16a Target dan Realisasi Program Pembinaan Dan Pelestarian Seni, Budaya Dan Sejarah Daerah Tahun Anggaran 2019	359
Tabel 3.2.17a Target dan Realisasi Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2019.....	368
Tabel 3.2.17b Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah).....	372
Tabel 3.2.18 Target dan Realisasi Program Pengembangan Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019.....	374
Tabel 3.3.1 Target dan Realisasi Program Pengembangan Perikanan Tahun 2019.....	380
Tabel 3.3.2a Target dan Realisasi Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2019	383
Tabel 3.3.2b Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	385
Tabel 3.3.3a Target dan Realisasi Program Pengembangan Pertanian Tahun Anggaran 2019	386
Tabel 3.3.3b Target dan Realisasi Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan.....	390
Tabel 3.3.4 a Target dan Realisasi Program Pengendalian Perdagangan Tahun Anggaran 2019	395
Tabel 3.3.4 b Target dan Realisasi Program Pembinaan Dan Pengelolaan Pasar Tahun Anggaran 2019	398
Tabel 4.3.4 c Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	400



Tabel 3.3.5 Target dan Realisasi Program Pengembangan Kemitraan Industri Tahun Anggaran 2019	402
Tabel 3.4.1a Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Setda Bag. Pemerintahan).....	405
Tabel 3.4.1b Target dan Realisasi Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2019	408
Tabel 3.4.1c Target dan Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019.....	412
Tabel 3.4.1d Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan Tahun Anggaran 2019	431
Tabel 3.4.1e Target dan Realisasi Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2019	436
Tabel 3.4.1f Target dan Realisasi Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2019.....	441
Tabel 3.4.1g Target dan Realisasi Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2019.....	445
Tabel 3.4.1h Target dan Realisasi Program Peningkatan Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2019.....	447
Tabel 3.4.1i Target dan Realisasi Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2019	450
Tabel 3.4.1j Target dan Realisasi Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2019.....	457
Tabel 3.4.1k Target dan Realisasi Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2019.....	463
Tabel 3.1.20l Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah Tahun Anggaran 2019	464
Tabel B.10a Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Cilegon beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019	467
Tabel B.10a.1 Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWKel Tahun 2019 Tahun Kecamatan Cilegon	474
Tabel B.10b Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Cibeber beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019	477
Tabel B.10b.1 Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWKel 2017-2019 Kecamatan Cibeber.....	489
Tabel B.10c Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Grogol beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019	491
Tabel B.10c.1 Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWKel 2019 Kecamatan Grogol	500
Tabel B.10d Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pulomerak beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019	502
Tabel B.10d.1 Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWKel 2019 Kecamatan Pulomerak.....	511
Tabel B.10e Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Ciwandan beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019	513



Tabel B.10e.1 Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWKel 2019 Kecamatan Ciwandan	520
Tabel B.10f Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Citangkil beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019.....	523
Tabel B.10f.1 Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWKel 2019 Kecamatan Citangkil	532
Tabel B.10g Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jombang beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019.....	534
Tabel B.10g.1 Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWKel 2019 Kecamatan Jombang.....	543
Tabel B.10h Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Purwakarta beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019	546
Tabel B.10h.1 Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWKel 2019 Kecamatan Purwakarta	553
Tabel 3.4.1m Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tahun Anggaran 2019	556
Tabel 3.4.1n Target dan Realisasi Program Peningkatan LSM dan ORMAS Tahun Anggaran 2019	561
Tabel 4.4.1o Target dan Realisasi Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun Anggaran 2019.....	566
Tabel 4.4.1p Target dan Realisasi Program Kedaruratan dan Logistik Tahun Anggaran 2019	568
Tabel 4.4.1q Target dan Realisasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2019	569
Tabel 4.4.1r Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 Seluruh Kecamatan/Kelurahan, Bag. Umum, Sekretariat DPRD, Badan Kesbangpol, BPBD)	571
Tabel 3.4.2a Target dan Realisasi Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019	580
Tabel 3.4.2b Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Inspektorat).....	581
Tabel 3.4.3a Target dan Realisasi Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Tahun Anggaran 2019	583
Tabel 3.4.3b Target dan Realisasi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019.....	587
Tabel 3.4.3c Target dan Realisasi Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2019	590
Tabel 3.4.3d Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (BAPPEDA).....	594
Tabel 3.4.4 a Target dan Realisasi Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah Tahun Anggaran 2019.....	595
Tabel 3.4.4 b Target dan Realisasi Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019	597



Tabel 3.4.4 c Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pajak daerah Tahun Anggaran 2019	602
Tabel 3.4.4 d Target dan Realisasi Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.....	610
Tabel 3.4.4e Target dan Realisasi Program perbendaharaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2019	613
Tabel 3.4.4f Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun 2019 (BPKAD)	618
Tabel 3.4.5b Target dan Realisasi Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019.....	623
Tabel 3.4.5c Target dan Realisasi Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN Tahun Anggaran 2019	626
Tabel 3.4.5d Target dan Realisasi Program Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (BKPP dan Sekretariat KORPRI)...	628
Tabel 4.2 Rekapitulasi Rincian Kejadian Bencana di Kota Cilegon Tahun 2019	680
Tabel 6.3 Data Rekapitulasi Kejadian Kebakaran berdasarkan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon Tahun 2018.....	688
Tabel 6.4 Data Rekapitulasi Penyebab Kebakaran Di Kota Cilegon Tahun 2019.....	690
Tabel 6.5 Distribusi Personil Satpol PP Kota Cilegon Berdasarkan Eselon dan Pendidikan	694
Tabel 6.6 Rekapitulasi Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Tahun 2019	695
Tabel 6.7 Cakupan Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2019	697
Tabel 6.8 Cakupan Rasio Petugas Linmas di Kota Cilegon Tahun 2019.....	697



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1. Peta Administratif Kota Cilegon	21
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kota Cilegon Tahun 2016-2019	22
Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2018-2019	23
Gambar 1.4 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Cilegon Tahun 2019 menurut kecamatan	24
Gambar 1.5 Penduduk Kota Cilegon Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2019	25
Gambar 1.6 Perbandingan Kontribusi Sektor PDRB antara ADHK dan ADHB	26
Gambar 1.7 Perbandingan Kontribusi per Kategori Sektor antara Cilegon, Banten dan Nasional	27
Gambar 1.8 Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon 2015-2019	28
Gambar 1.9 Perbandingan Realisasi LPE antara Cilegon, Banten dan Nasional Tahun 2015-2019	29
Gambar 1.10 Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2014-2019 (laju dalam %)	30
Gambar 1.11 Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2014-2019 (laju dalam %)	31
Gambar 1.12 Perkembangan PDRB Sektor Jasa Tahun 2014-2019 (laju dalam %)	31
Gambar 1.13 Realisasi Investasi sampai dengan tahun 2019 di Kota Cilegon	33
Gambar 1.14 Dinamika Laju Peningkatan Investasi Kota Cilegon 2015 -2019	33
Gambar 1.15 Nilai Investasi PMA & PMDN di Kota Cilegon 2017 - 2019	34
Gambar 1.15 Inflasi Kota Cilegon dibandingkan dengan Banten & Nasional	36
Gambar 1.16 Statistik Ketengakerjaan Kota Cilegon Tahun 2015-2019	37
Gambar 1.17 Piramida Penduduk Kota Cilegon Tahun 2019	38
Gambar 1.18 Perkembangan IPM Kota Cilegon Tahun 2011-2019 beserta Indeks Kompositnya	40
Gambar 1.20. IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional ..	41
Gambar 1.21 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cilegon Tahun 2010 – 2019	42
Gambar 1.22 Perkembangan Indeks Pendidikan Tahun 2010-2019	43
Gambar 1.23 Grafik Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kota Cilegon Tahun 2012-2019	45
Gambar 1.23 Grafik Perkembangan Daya Beli Penduduk Kota Cilegon Tahun 2010-2019 (per kapita per tahun) (dalam juta rupiah)	46
Gambar 1.24 Perbandingan Capaian Indeks Daya Beli dan Pengeluaran Perkapita 2010-2019	47
Gambar 1.25 Perbandingan Tingkat Kemiskinan terhadap Garis Kemiskinan	48
Gambar 1.26. Urutan Tingkat Kemiskinan se Provinsi Banten Tahun 2019	49
Gambar 1.27 Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara Banten dan Cilegon	49
Gambar 2.1 Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2019	53
Gambar 2.2 Capaian Pendapatan Asli Daerah beserta Komponennya	54



Gambar 2.3 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	55
Gambar 2.4 Capaian Komponen Pendapatan Pajak Daerah	56
Gambar 2.5 Kontribusi Realisasi Pajak Daerah	57
Gambar 2.6 Capaian Komponen Retribusi Daerah Tahun 2019	60
Gambar 2.7 Capaian Retribusi Jasa Umum	60
Gambar 2.8 Capaian Retribusi Jasa Usaha	61
Gambar 2.9 Capaian Retribusi Perizinan Tertentu	61
Gambar 2.10 Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	63
Gambar 2.10a Realisasi Komponen Lain-lain PAD yang Sah	65
Gambar 2.10b Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	66
Gambar 2.10c Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	67
Gambar 2.10d Realisasi Total Pendapatan BLUD	67
Gambar 2.11 Capaian Komponen Dana Perimbangan	69
Gambar 2.12 Target & Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	70
Gambar 2.13a Target dan Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak	71
Gambar 2.13b Target dan Realisasi Komponen Bagi Hasil Bukan Pajak	71
Gambar 2.14 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus	72
Gambar 2.15 Target & Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73
Gambar 2.16 Target & Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten	74
Gambar 2.16a Diagram Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan daerah Kota Cilegon Tahun 2019	78
Gambar 2.16b Diagram Presentase Capaian Realisasi Komponen Pendapatan daerah Kota Cilegon Tahun 2019	79
Gambar 2.16c Diagram Rasio Realisasi Komponen Pendapatan Daerah	80
Gambar 2.17 Rencana dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 ..	103
Gambar 3.18 Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	104
Gambar 2.19 Realisasi Komponen Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Sumber: LRA Kota Cilegon 2019 (Unaudited)	105 106
Gambar 2.20 Rencana dan Realisasi Belanja Hibah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	106
Gambar 2.21 Rencana dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	107
Gambar 2.22 Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019	109
Gambar 2.23 Realisasi Komponen Belanja Modal	110
Gambar 6.1 Jumlah Bencana berdasarkan Jenis Bencana di Kota Cilegon Tahun 2019	687
Gambar 6.2 Proporsi Lokasi Kejadian Bencana di Kota Cilegon Tahun 2019	688
Gambar 6.3 Rekapitulasi Kebakaran Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2019	689
Gambar 6.4 Penyebab Kebakaran Di Kota Cilegon Tahun 2019	690
Gambar 6.4 Jumlah Kasus Kebakaran per Kecamatan di Kota Cilegon Tahun 2019	691

BAB I PENDAHULUAN



Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai respon terhadap wewenang DPRD untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara rinci pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik tahunan maupun lima tahunan saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Walikota Cilegon sebagai kepala daerah Kota Cilegon berkewajiban menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2019, serta menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon selambat-lambatnya 3 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran 2019.

Pemerintah Kota Cilegon menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota sebagai representasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang akan dibahas oleh DPRD. Hasil pembahasan akan ditetapkan menjadi keputusan DPRD yang bersifat rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya. Ruang lingkup LKPJ sekurang-kurangnya meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Adapun hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya

1.1 DASAR HUKUM

LKPJ Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :



BAB I - PENDAHULUAN

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 3858);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7);



14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 4).
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2019
18. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 54 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2019
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/479/Otda tahun 2020 tentang Format Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1.2 GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.2.2 VISI DAN MISI (Periode RPJMD 2016-2021)

1.2.3 Visi Kota Cilegon

Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021 merupakan perwujudan dari tahapan ke 3 RPJPD kota Cilegon. Merujuk kepada dokumen RPJPD kota Cilegon tahun 2005-2025 pada Periode ketiga (2016-2020), arah kebijakan pencapaian visi jangka panjang diletakan pada upaya penguatan kapasitas keunggulan daerah melalui optimalisasi fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah, peningkatan kompetensi SDM, dan akselerasi potensi ekonomi daerah berbasis industri, perdagangan, dan jasa, disertai penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka Visi kota Cilegon untuk RPJMD 2016-2021 adalah **“TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA”**.

Visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 yaitu: “CILEGON PUSAT INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA TERDEPAN DI PULAU JAWA”, serta juga merupakan kelanjutan perwujudan dari visi pembangunan RPJMD Kota Cilegon periode sebelumnya (RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015).

Adapun indikasi wujud pencapaian **sasaran strategis visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021** adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;

Menurunnya kemiskinan; Menurunnya pengangguran; Meningkatnya kinerja dan kualitas perekonomian; serta Meningkatnya pelayanan publik.

1.2.4 Misi Kota Cilegon Tahun 2016-2021

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya - upaya dan tahapan-tahapan yang harus dilalui yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Bertitik tolak dari visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021 maka dirumuskan “misi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021” adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah;
2. Memantapkan Lingkungan Kota Yang Asri dan Lestari;
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
4. Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota;
5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan;

1.2.2 STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

1) Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah RPJMD Kota Cilegon 2016-2021

Rumusan kebijakan tahunan selama periode 2016-2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi ke-1 Melalui misi ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mengembangkan dan memperkuat perekonomiannya agar memiliki daya saing secara nasional maupun global dengan menggunakan seluruh potensi yang ada yang berorientasi kepada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis pada industri, perdagangan dan jasa. Misi ke-1 ini selanjutnya dituangkan dalam Agenda Pembangunan yang pertama, yaitu **Agenda Cilegon Mandiri** yang berfokus pada **pengembangan dan penguatan kemandirian perekonomian daerah** sehingga mampu bertahan di perekonomian nasional maupun global dengan menggunakan seluruh potensi yang ada yang **berorientasi kepada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif** berbasis pada industri, perdagangan dan jasa

Dalam rangka mencapai sasaran misi ke-1, yaitu memantapkan kemandirian perekonomian daerah maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program sebagai berikut:

Tabel 1.1
Strategi dan arah kebijakan misi ke-1 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

No.	Strategi Misi I	Arah Kebijakan Misi I	Program Misi I
1	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Hubungan Industrial
2	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Pelayanan dan Aksesibilitas Informasi Ketenagakerjaan	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Optimalisasi Fungsi BLK dan meningkatkan Aksesibilitas Informasi Ketenagakerjaan dan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja
3	Peningkatan pembinaan, fasilitasi peningkatan kualitas SDM, kapasitas kelembagaan dan manajemen, akses permodalan, pemasaran produk dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. bagi UMKM dan koperasi	Memberdayakan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan serta pemanfaatan teknologi yang dimanifestasikan dalam konsep science and technopark dengan memberdayakan interaksi pemerintah, masyarakat, civitas perguruan tinggi, dan pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi serta menjalin konektivitas hasil produksi UMKM dengan rantai produksi industri menengah di Kota Cilegon	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
		Memberdayakan usaha Koperasi melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan
4	Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui aspek pemanfaatan teknologi dan kelembagaan/komunitas	Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) yang dimanifestasikan dalam wadah interaksi antar kelompok usaha bersama/kelembagaan swadaya masyarakat, civitas perguruan tinggi, dan pelaku industri di Kota Cilegon	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
5	Peningkatan daya saing SDM dan pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, serta pemberdayaan berbasis komunitas.	Program Pengembangan Pertanian
		Meningkatkan produktivitas peternakan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta pemberdayaan masyarakat atau komunitas pelaku usaha sektor peternakan	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatkan produktivitas perikanan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, serta pemberdayaan	Program Pengembangan Perikanan

No.	Strategi Misi I	Arah Kebijakan Misi I	Program Misi I
		masyarakat atau komunitas pelaku usaha sektor perikanan	
6	Peningkatan tata kelola ketahanan pangan	Meningkatkan upaya-upaya diversifikasi dan keamanan pangan	Program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan
		Meningkatkan tata kelola distribusi pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan
7	Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah	Mendorong industri kecil dan menengah dalam pemenuhan standar/regulasi dan meningkatkan konektivitas rantai produksi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap rantai produksi industri besar	Program Pengembangan Kemitraan Industri
8	Peningkatan tata kelola dan pengembangan sarana & prasarana perdagangan perkotaan	Mengembangkan fungsi dan pengelolaan pasar	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar
		Meningkatkan pengawasan aktivitas perdagangan dalam upaya melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga barang pokok dan barang penting	Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan
9	Pengembangan sektor pariwisata	Pengembangan destinasi wisata daerah serta pembinaan, fasilitasi usaha kepariwisataan, dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatkan upaya promotif Kota Cilegon sebagai tujuan investasi pada skala nasional dan internasional	Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal
		Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Berbagai kebijakan yang diperlukan untuk mendukung Kemandirian Daerah diantaranya kebijakan investasi padat karya, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, peningkatan peran industri mikro, kecil, menengah dan koperasi, peningkatan produktifitas pertanian, serta pembangunan pelabuhan daerah dan optimalisasi wilayah pesisir guna mencapai **Ketahanan ekonomi masyarakat**.

2) Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Memantapkan Lingkungan Kota yang Asri dan Lestari

Melalui misi kedua ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga daya dukung dan fungsi lingkungan, serta menjaga rasio keseimbangan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rumusan kebijakan tahunan selama periode 2016-2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi ke-2, dituangkan lebih lanjut dalam Agenda Pembangunan yang kedua, yaitu **Agenda Cilegon Bersih dan Asri**. Dalam Agenda ini diharapkan, Kota Cilegon **mampu mengelola** sumber daya daerah dan **kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**, menjaga daya dukung dan fungsi lingkungan, serta **menjaga rasio keseimbangan ruang** yang serasi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Dalam rangka mencapai sasaran misi ke-2, yaitu Memantapkan Lingkungan Kota yang Asri dan Lestari maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program sebagai berikut:

Tabel 1.2
Strategi dan arah kebijakan misi ke-2 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

No.	Strategi Misi II	Arah Kebijakan Misi II	Program Misi II
1	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang dan bangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang	Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang	Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah
		Meningkatkan pengendalian tata bangunan, reklame, dan pengembangan gedung negara	Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame
		Mewujudkan kualitas Data Perencanaan Tata Ruang dan Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi
2	Peningkatan pelayanan persampahan	Meningkatkan pelayanan persampahan melalui pengembangan sarana dan prasarana persampahan serta pengelolaan sampah berbasis komunitas	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3	Peningkatan ketersediaan taman publik untuk menunjang keberadaan ruang terbuka hijau	Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan taman sebagai ruang publik yang terpadu	Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota
		Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana arsitektur perkotaan	
4	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman secara terpadu	Mewujudkan penanganan kawasan kumuh secara terpadu serta meningkatkan kualitas penataan, pengembangan dan pengendalian kawasan permukiman dan perumahan	Program Penataan Perumahan dan Permukiman
		Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
5	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dan air	Meningkatkan pengawasan pencemaran sungai dan udara serta mengendalikan limbah industri sesuai dengan regulasi lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Mewujudkan perencanaan tata kelola lingkungan dan upaya-upaya promotif pengelolaan lingkungan berbasis komunitas	Program Penataan Lingkungan
6	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan, serta melestarikan vegetasi	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan dan lingkungan, serta meningkatkan daya dukung lingkungan melalui pelestarian vegetasi	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Agenda Cilegon Bersih dan Asri juga mensyaratkan kondisi penataan perkotaan yang berkualitas, terjaganya ketertiban dan keindahan kota, terciptanya kondisi kebersihan kota yang memadai, serta terpenuhinya ruang publik bagi seluruh warga masyarakat.

3) Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Melalui misi ketiga ini diharapkan, Kota Cilegon mampu membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dari segi jasmani dan rohani, berkualitas dan produktif serta memiliki kompetensi yang tinggi sehingga memiliki daya saing baik lokal ataupun global, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan kearifan budaya, serta memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka mencapai sasaran misi ke-3, yaitu Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial dituangkan ke dalam program-program sebagai berikut :

Tabel 1.3
Strategi dan arah kebijakan misi ke-3 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

No.	Strategi Misi III	Arah Kebijakan Misi III	Program Misi III
1	Memperluas cakupan dan meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang merata, terjangkau dan bermutu serta memperluas cakupan pelayanan dan pembinaan pendidikan kesetaraan, anak usia dini, kemasyarakatan, dan informal	Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Dasar	Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar
		Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama	Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama
		Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dan Lembaga Kursus	Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan
2	Mewujudkan kelestarian seni dan budaya untuk mendukung pendidikan karakter bagi usia sekolah serta menjaga kearifan lokal	Meningkatkan pembinaan seni tradisional, kelestarian nilai budaya, pembinaan sejarah, pengelolaan museum dan cagar budaya	Program Pembinaan dan Pelestarian Seni, Budaya dan Sejarah Daerah
3	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, kualitas gizi masyarakat dan perluasan cakupan	Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat melalui upaya-upaya promotif terkait kesehatan pada keluarga, pemenuhan gizi, dan kebiasaan berolahraga	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat



BAB I - PENDAHULUAN

No.	Strategi Misi III	Arah Kebijakan Misi III	Program Misi III
	pelayanan kesehatan khusus dan rujukan	Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang kesehatan melalui mekanisme pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan), penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, mengembangkan sumber-sumber daya kesehatan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas penyedia jasa kesehatan serta peredaran obat dan makanan	Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
		Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Kesehatan pada RSUD	Program Peningkatan Pelayanan RSUD
4	Peningkatan prestasi olahraga, dan pembudayaan olahraga melalui pembinaan	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pemuda dan olahraga	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
		Meningkatkan upaya promosi dalam rangka membudayakan olahraga dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan atlet	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
		Meningkatkan Pembinaan terhadap organisasi Kepemudaan dalam rangka menyelaraskan program kerja kepemudaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda
5	Peningkatan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat	Meningkatkan cakupan layanan perlindungan sosial dan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat miskin	Program Perlindungan Jaminan Sosial
		Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial yang terkait kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas & Tuna Sosial serta Peningkatan Kapasitas PMKS dan Pengelolaan Rumah Singgah	Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial
6	Peningkatan pemberdayaan sosial dalam penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan perorangan dan keluarga, kelembagaan, serta penanganan fakir miskin	Program Pemberdayaan Sosial
7	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	Melaksanakan Pembinaan Masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga	Program Bina Keluarga Sejahtera
		Melaksanakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dalam upaya mengendalikan penduduk	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
8	Mewujudkan pembangunan berbasis gender dan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi, bidang sosial, hukum dan politik, serta upaya peningkatan kualitas keluarga	Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
		meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

No.	Strategi Misi III	Arah Kebijakan Misi III	Program Misi III
		serta menciptakan kondisi kota yang layak anak	

Agenda Pembangunan yang ditetapkan untuk mendukung misi ke-3 yaitu **Agenda Cilegon Sehat dan Cerdas** yang berfokus kepada **pembangunan sumberdaya manusia** yang cerdas, sehat dari segi jasmani dan rohani, berkualitas dan produktif serta memiliki kompetensi yang tinggi sehingga memiliki daya saing baik lokal ataupun global, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan kearifan budaya, **serta memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat** yang berkualitas, terpadu, adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menjadi prioritas penuh Pemerintah Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan dikeluarkannya SMA/SMK dari kewenangan Pemerintah Kota maka substitusi anggaran sebesar 20% dari APBD akan dimaksimalkan seluruhnya untuk pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru negeri dan swasta. Selain itu pengembangan fisik gedung serta sarana prasarana pembelajaran di sekolah akan menjadi prioritas.

Selain bidang Pendidikan, **infrastruktur kesehatan** juga terus dikembangkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan terjangkau. Oleh karena itu, penyediaan sarana kesehatan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat serta mudah diakses secara cepat adalah suatu keharusan. Selain itu, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran pembangunan bidang kesehatan dengan prosentase sebesar 10% dari total belanja langsung sesuai amanat undang-undang kesehatan, menjadi rujukan utama prioritas perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD setiap tahunnya. Agenda ini diarahkan pada peningkatan kecerdasan, kesehatan masyarakat, serta kualitas dan ketrampilan SDM, dalam koridor pembangunan berkelanjutan.

4) Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota

Melalui misi ke-4 ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana kota yang merata dan berkualitas yang berorientasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga dapat menunjang akselerasi pertumbuhan dan pembangunan kota

Berpijak pada upaya untuk mencapai **sasaran** misi **Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota** maka ditetapkan **strategi** dan **arah kebijakan** sebagai berikut:

Tabel 1.4
Strategi dan arah kebijakan misi ke-4 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

No	Strategi Misi IV	Arah Kebijakan Misi IV	Program Misi IV
1	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2	Peningkatan pengawasan dan pengendalian angkutan/transportasi umum serta manajemen lalu lintas	Mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas angkutan jalan serta melaksanakan upaya-upaya promotif terkait keselamatan dan ketertiban berkendara bagi masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas angkutan jalan serta melaksanakan upaya-upaya promotif terkait keselamatan dan ketertiban berkendara bagi masyarakat	Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas
		Meningkatkan pengawasan dan tata kelola kepelabuhanan	Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut
3	Mewujudkan Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perhubungan	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perhubungan (kelayakan angkutan jalan, halte penerangan jalan umum, dsb)	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4	Mengoptimalkan sumber-sumber daya air beserta saluran/jaringannya serta meningkatkan cakupan layanan dan distribusi air bersih bagi masyarakat melalui jaringan air perpipaan dan non-perpipaan	Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sumber-sumber daya air beserta jaringannya dalam rangka mendukung penurunan titik banjir	Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Guna mengarahkan rumusan kebijakan tahunan selama periode 2016-2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi ke-4, dituangkan lebih lanjut dalam Agenda Pembangunan yang pertama, yaitu **Agenda Cilegon Nyaman**.

Agenda Cilegon Nyaman, dicerminkan dengan kondisi infrastruktur kota yang memadai serta mampu memenuhi kebutuhan aktifitas ekonomi segenap warga masyarakatnya. agenda ini berfokus kepada **pelayanan sarana dan prasarana kota yang merata dan berkualitas** yang berorientasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga dapat menunjang akselerasi pertumbuhan dan pembangunan kota.

5) Strategi dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan

Melalui misi ke-5 ini diharapkan, Kota Cilegon mampu membangun pemerintahan yang akuntabel, bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sadar akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi dari birokrasi, membangun kemitraan yang serasi antara eksekutif dan legislatif, dan penciptaan kondisi politik yang stabil dan konsisten dalam penegakan hukum.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran misi ke-5, yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program sebagai berikut:

Tabel 1.5
Strategi dan arah kebijakan misi ke-5 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

No.	Strategi Misi V	Arah Kebijakan	Program
1	Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
		Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun jabatan	Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara
		Mewujudkan tata kelola administrasi sumber daya aparatur sipil negara secara terpadu	Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA)
		Peningkatan etos kerja, kedisiplinan dan motivasi aparatur sipil negara melalui mekanisme penilaian kinerja pegawai, penjaminan kesejahteraan, dan fasilitasi mutasi/kepangkatan serta promosi/pengembangan karir pegawai	Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN
2	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Optimalisasi fungsi organisasi perangkat daerah melalui penyesuaian formasi jabatan dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah
		Meningkatkan koordinasi kerjasama daerah, meningkatkan kualitas perangkat kecamatan & kelurahan, serta peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang pemerintahan umum, ketentraman & ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan
		Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pemuda, olahraga, teknologi informasi, statistik, persandian, serta bina keagamaan dan pembinaan mental	Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan

No.	Strategi Misi V	Arah Kebijakan	Program
		Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan daerah	Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
		Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)	Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman	Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan
		Meningkatkan fungsi pengawasan pada tata laksana pembangunan daerah	Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah
3	Peningkatan kualitas tata kelola kearsipan di seluruh unit pemerintahan	Mewujudkan tata kelola arsip dinamis dan statis secara optimal dan terintegrasi	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah
4	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan dan administrasi penganggaran	Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan
		Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah melalui efisiensi tata kelola penerimaan, pengeluaran dan pelaporan neraca keuangan daerah	Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
		Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
		Meningkatkan kualitas administrasi dan tata kelola aliran keuangan daerah	Program Perbendaharaan Keuangan Daerah
		Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset di setiap unit satuan kerja perangkat daerah	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
			Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
5	Meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah	Mewujudkan peningkatan pajak daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi wajib pajak daerah serta peningkatan pelayanan perpajakan serta tata kelola data & informasi wajib pajak secara terpadu	Program Peningkatan Pajak Daerah
6	Optimalisasi belanja program/kegiatan melalui peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sistem layanan pengadaan barang dan jasa	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
		Peningkatan transparansi proses pengadaan barang dan jasa	Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Strategi Misi V	Arah Kebijakan	Program
7	Mewujudkan ketersediaan data dan informasi daerah dalam rangka mendukung kualitas perencanaan sektoral dan makro daerah	Penyediaan data statistik sektoral dan data statistik makro daerah melalui sistem manajemen data dan informasi sektoral secara terpadu	Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah
		Melaksanakan pengamanan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian
		Meningkatkan inovasi daerah melalui penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan lembaga penelitian atau instansi lainnya	Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
8	Memadukan dan meningkatkan kualitas seluruh tahapan/proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektor pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang ekonomi dan infrastruktur	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan
		Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektoral pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang pembangunan sosial dan budaya	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan
		Mengoptimalkan keterlaksanaan dan integrasi program pembangunan melalui mekanisme pengendalian, evaluasi dan pelaporan,	Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi
		Meningkatkan kinerja penyediaan data-data dan perencanaan sektoral	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
9	Meningkatkan fasilitasi produk hukum antara eksekutif dan legislatif	Peningkatan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan konsultasi, dokumentasi, evaluasi, dan penyuluhan hukum	Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah
		Pengembangan produk hukum dan regulasi melalui instrumen legislatif daerah	Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah
10	Pengembangan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, perangkat keras serta sumber daya lainnya dalam rangka penerapan e-government	Mengembangkan interkoneksi jaringan teknologi informasi, membangun & mengintegrasikan sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan secara terpadu, serta mendorong pertumbuhan pemanfaatan teknologi dan informasi bagi masyarakat.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
11	Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada instansi daerah	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada kecamatan dan kelurahan	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
		Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Catatan Sipil	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
		Meningkatkan pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

No.	Strategi Misi V	Arah Kebijakan	Program
		Meningkatkan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Meningkatkan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
		Meningkatkan pelayanan pengaduan perizinan dan penyediaan data dan informasi perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan
12	Mewujudkan tata kelola dan diseminasi informasi publik	Meningkatkan efektifitas pelayanan informasi publik dan tata kelola informasi pemerintah daerah	Program Pengembangan Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah
13	Mewujudkan perpustakaan sebagai ruang publik fungsional serta memenuhi kebutuhan informasi & kepustakaan bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan daerah sebagai pusat referensi kepustakaan, aktivitas akademis, serta sarana pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah
14	Peningkatan pengawasan, pembinaan dan penegakkan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatkan pengawasan, pembinaan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan pengawasan, pembinaan dalam rangka melaksanakan perlindungan masyarakat	Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
		Mewujudkan penegakkan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
15	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
			Program Peningkatan LSM dan ORMAS
16	Peningkatan upaya pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan bahaya kebakaran	Meningkatkan upaya pencegahan dan menyediakan sarana prasarana penanganan kebakaran	Program Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran
		Meningkatkan pelayanan pengaduan dan optimalisasi waktu kecepatan tanggap penanganan kebakaran	Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
		Memetakan potensi bencana serta meningkatkan upaya mitigasi bencana dalam rangka meminimalisir dampak bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
		Meningkatkan utilitas dan koordinasi penanganan bencana	Program Kedaruratan dan Logistik
		Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Agenda Pembangunan yang diterapkan pada misi ini yaitu **Agenda Cilegon Berwibawa** yang bermakna pelaksanaan **pemerintahan yang akuntabel, bertanggung jawab, serta sadar akan hak dan kewajiban**, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi dari birokrasi,

membangun kemitraan yang serasi antara eksekutif dan legislatif, dan penciptaan kondisi politik yang stabil dan konsisten dalam penegakan hukum.

Reformasi birokrasi yang sekarang berjalan, perlu ditingkatkan akselerasinya, untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap birokrasi yang tangkas, tanggap, dan cepat. Oleh karena itu, sudah sangat mendesak untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Restrukturisasi organisasi pemerintahan harus dilakukan dengan memperkuat *front office* pelayanan publik.

Di samping itu, *reward* dan *punishment* di dalam birokrasi harus ditata ulang agar lebih adil dan proporsional. Gebrakan-gebrakan dalam reformasi birokrasi ini adalah suatu keharusan untuk menyesuaikan dengan dinamika demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi. Agenda ini diarahkan pada peningkatan tatakelola pemerintahan dalam koridor pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

1.2.3 PRIORITAS DAERAH (RKPD KOTA CILEGON TAHUN 2019)

Berpijak pada kondisi dan tantangan pembangunan di tahun berkenan, agenda dan prioritas pembangunan Kota Cilegon tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian;

Struktur perekonomian daerah Kota Cilegon yang didominasi oleh sektor industri, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap tingginya laju pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kerawanan sosial serta pencemaran lingkungan. Hal tersebut dikarenakan sektor industri yang berkembang di Kota Cilegon bukan merupakan industri yang berbasis sumberdaya lokal, namun merupakan industri yang padat modal serta membutuhkan tenaga kerja dengan skill atau keahlian khusus.

Disamping itu, perekonomian yang didominasi oleh industri, strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumberdaya lokal berupa UMKM dan Koperasi harus lebih ditingkatkan kinerjanya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah, serta mampu mendukung kinerja sektor industri daerah.

2. Peningkatan tata kelola lingkungan dan estetika perkotaan;

Sebagaimana umumnya kawasan perkotaan yang memiliki lahan yang sangat terbatas, Kota Cilegon dihadapkan dengan semakin menurunnya luas lahan terbuka akibat semakin intensifnya penggunaan lahan khususnya untuk permukiman. Dengan kecenderungan demikian, maka konsistensi terhadap implementasi perda penataan ruang harus diupayakan guna mencegah terjadinya konversi lahan yang masif sehingga akan berakibat pada menurunnya daya

dukung lahan. Lebih jauh lagi, aktivitas di kawasan perkotaan yang sangat tinggi tanpa diimbangi oleh upaya pengendalian lingkungan, pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang akan sangat merugikan bagi kelangsungan pembangunan.

3. Peningkatan kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial;

Isu kualitas sumber daya manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial merupakan isu yang sangat substansial dalam kerangka pembangunan daerah Kota Cilegon. Hal tersebut terkait dengan fungsi manusia itu sendiri sebagai subjek dan juga sekaligus objek dari kegiatan pembangunan, sehingga seluruh upaya pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk menunjang kelangsungan aktivitas manusia. Kesejahteraan sosial masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan Kota Cilegon. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator tercapai atau tidaknya program-program pembangunan yang telah dilaksanakan.

4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan

Peningkatan daya dukung dan pelayanan prasarana dan sarana serta infrastruktur kota merupakan hal yang krusial dilakukan. Hal tersebut mengingat dampak yang sangat signifikan yang dapat ditimbulkan akibat kurang memadainya daya dukung infrastruktur tersebut, baik dampak secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Secara sosial, dampak yang ditimbulkan akibat keterbatasan infrastruktur kota adalah semakin meningkatnya kerawanan sosial yang mengancam ketentraman dan ketertiban umum. Dari sisi ekonomi, dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya aksesibilitas pergerakan barang dan angkutan sehingga kegiatan koleksi dan distribusi menjadi terganggu. Adapun dari sisi lingkungan, berbagai dampak yang dapat ditimbulkan diantaranya banjir, kawasan kumuh, kurangnya suplai air bersih, dll.

5. Peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum.

Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kota Cilegon. Kinerja birokrasi yang efisien dan efektif dengan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang profesional dan akuntabel pada gilirannya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat maka diharapkan masyarakat akan semakin produktif dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahateraan.



BAB I - PENDAHULUAN

Berikut adalah beberapa kegiatan prioritas daerah di tahun anggaran 2019 :

Tabel 1.6 Prioritas Daerah Kota Cilegon Tahun 2019

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	OPD
1	Pembinaan Manajemen Sekolah Mantap	Dinas Pendidikan
2	Pengembangan Kurikulum Sekolah mantap	Dinas Pendidikan
3	Pendamping Sekolah Model dan Sekolah Mantap	Dinas Pendidikan
4	Workshop Pemantapan Mata Pelajaran SMP Sekolah Mantap	Dinas Pendidikan
5	Workshop Pemantapan Guru Kelas Sekolah Mantap	Dinas Pendidikan
6	Pembangunan Jalan Lingkar Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
7	Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Bantuan Keuangan)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
8	Pengendalian Banjir dan Genangan (Prioritas Daerah)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
9	Perencanaan Teknis (DED) Revitalisasi Situ Rawa Arum (Prioritas Daerah)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
10	Revitalisasi Situ Rawa Arum (Prioritas Daerah)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
11	Perencanaan Teknis Cipta Karya (Prioritas Daerah)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
12	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan (Prioritas Daerah)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
13	Peningkatan/Penataan Sarana Arsitektur Kota (Prioritas Daerah)	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
14	Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum PDAM (Prioritas Daerah)	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
15	Penyusunan naskah akademis evaluasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 (Prioritas Daerah)	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
16	Pengembangan BLK	Dinas Tenaga Kerja
17	Kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu (prioritas daerah)	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
18	Pengadaan dan Pembangunan Alat Instalasi Stasiun Pemantau Udara (ISPU)	Dinas Lingkungan Hidup
19	Pembangunan Kantong Parkir Angkutan Barang (Penyusunan DED)	Dinas Perhubungan
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana SAUM (DID)	Dinas Perhubungan
21	Operasional SAUM (DID)	Dinas Perhubungan
22	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Integrated Control City System and Room (Prioritas Daerah)	Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi & Statistik
23	Pengelolaan Smart City (Prioritas Daerah)	Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi & Statistik
24	Pengelolaan Panggilan Darurat Terpadu (Prioritas Daerah)	Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi & Statistik
25	Pembangunan Sport center (Prioritas Daerah)	Dinas Pemuda dan Olahraga
26	Revitalisasi dan Penataan Pasar Rakyat (Prioritas Daerah)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27	Penumbuhan Sentra Industri Kecil Aneka (IK. Sarung Tangan dan IK. Majun (Prioritas Daerah)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



1.3 DATA UMUM DAERAH

Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten yang berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan sejak tanggal 20 April 1999 Kota Cilegon menjadi kotamadya atau wilayah pemerintahan otonomi yang secara yuridis ditetapkan melalui Undang-Undang No.15 Tahun 1999. Sebagai kotamadya (sebutan kotamadya diganti dengan kota sejak tahun 2001), Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri dan menjadi pusat industri di kawasan Banten bagian barat. Kota Cilegon dilintasi jalan negara dan jalan tol lintas Jakarta-Merak, dilalui jalur kereta api Jakarta-Merak, serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital nasional antara lain Pelabuhan penyeberangan Merak, Pelabuhan PLTU Suralaya dan Industri Strategis Nasional Krakatau Steel.

Kota Cilegon dilintasi jalan negara dan jalan tol lintas Jakarta-Merak, dilalui jalur kereta api Jakarta-Merak, serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital nasional antara lain Pelabuhan penyeberangan Merak, Pelabuhan PLTU Suralaya dan Industri Strategis Nasional Krakatau Steel.

1.3.2 Kondisi Geografis Daerah

Kota Cilegon berada pada posisi paling barat pulau Jawa dan juga Provinsi Banten, yaitu terletak antara 105°54'05" - 106°05'11" Bujur Timur dan 5°52'24" - 6°04'07" Lintang Selatan yang dibatasi oleh :

Sebelah Barat	: Selat Sunda
Sebelah Utara	: Kec. Pulo Ampel (Kabupaten Serang)
Sebelah Timur	: Kec. Bojonegara dan Kec. Kramatwatu (Kabupaten Serang)
Sebelah Selatan	: Kec. Waringin Kurung, Kec. Mancak dan Kec. Anyer (Kabupaten Serang)

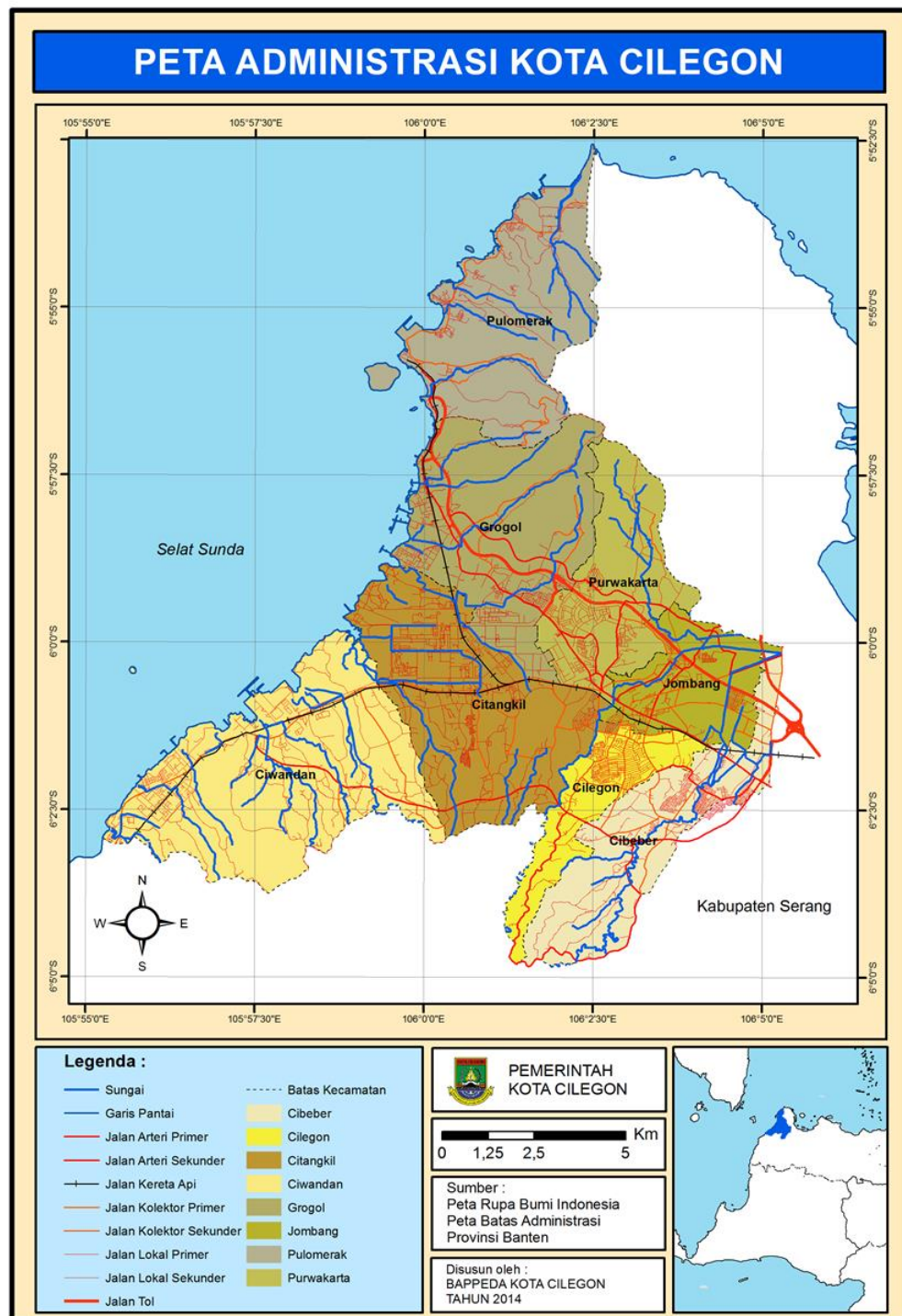
Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada di bagian ujung sebelah barat dari Pulau Jawa yang terletak pada posisi 5° 52' 24" – 6° 04' 07" Lintang Selatan (LS) dan 105° 54' 05" – 106° 05' 11" Bujur Timur (BT). Batasan ruang lingkup wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 luas wilayah administrasi 17.550,0 Ha dengan 4 kecamatan yang telah dimekarkan menjadi 8 kecamatan (Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, Grogol, Purwakarta, Cilegon, Jombang, dan Cibeber) yang terdiri atas 43 kelurahan.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penentuan daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Kewenangan daerah kota terhadap laut adalah $\frac{1}{3}$ dari wilayah laut Propinsi (yaitu 12 mil laut), atau kurang 4 mil laut (1 mil laut = 1.852 m, sehingga 4 mil laut = 7.408 m). Panjang pantai Kota Cilegon yang menghadap ke Selat Sunda bila diukur secara “lurus” adalah sekitar 25 Km. Sehingga secara tentatif luas laut yang menjadi kewenangan Kota Cilegon sekitar 185 Km², atau sedikit lebih luas dari wilayah daratan.

Kota Cilegon memiliki 5 (lima) pulau, yaitu: P. Merak Besar, P. Merak Kecil, P. Rida, P. Ular dan P. Tempurung. Pulau-pulau yang berada di perairan Kota Cilegon ini merupakan bagian ekosistem pantai yang keberadaannya secara ekologi berfungsi sebagai pengatur iklim, pengatur siklus hidrologi, penyerap limbah, penahan gelombang dan angin, sumber plasma nutfah dan penunjang kehidupan lainnya. Ditinjau dari aspek geostrategis, Kota Cilegon memiliki peran dan posisi yang sangat menentukan dalam mendukung arah dan pola pembangunan serta pengembangan perkotaan baik dalam konstelasi regional, nasional, dan bahkan internasional. Selain aspek geostrategis, karakteristik geografis Kota Cilegon masuk ke dalam kategori kota pesisir. Hal ini diindikasikan dengan membentangnya kawasan pesisir laut dari bagian utara hingga selatan wilayah kota serta hasil perhitungan Peta Topografi Kota Cilegon di mana panjang garis pantai Kota Cilegon adalah 40,88 km atau sekitar 43,6% dari total perimeter wilayah Kota Cilegon. Dibawah ini adalah gambaran Kota Cilegon secara administratif dalam Peta Administrasi Kota Cilegon :

Gambar 1-1. Peta Administratif Kota Cilegon



A. Luas Wilayah

Kota Cilegon merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok. Sebagai kota yang berada di ujung Barat Pulau Jawa, Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Secara administratif, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Cilegon, Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,51 km² yang terbagi kedalam 8 (delapan) Kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) Kelurahan. Pembagian wilayah serta jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.7 Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan

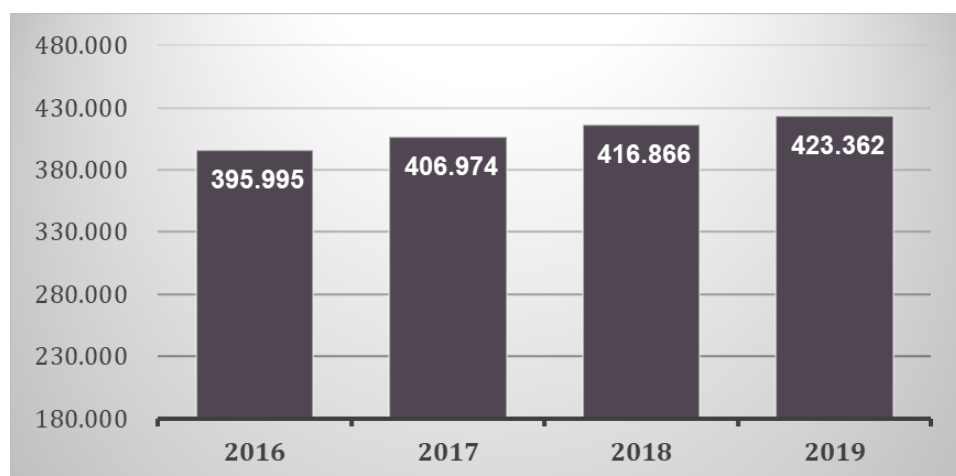
No.	Kecamatan	Pusat Kecamatan	Luas		Jumlah		
			Km ²	%	Kelurahan	RW	RT
1	Ciwandan	Tegal Ratu	51,81	29,52	6	29	121
2	Citangkil	Kebonsari	22,98	13,09	7	52	198
3	Pulomerak	Tamansari	19,86	11,32	4	27	127
4	Purwakarta	Purwakarta	15,29	8,71	6	40	134
5	Grogol	Grogol	23,38	13,32	4	28	103
6	Cilegon	Ciwaduk	9,15	5,21	5	31	109
7	Jombang	Jombang Wetan	11,55	6,58	5	43	174
8	Cibeber	Kalitimbang	21,49	12,24	6	38	167
Kota Cilegon			175,51	100	43	288	1133

1.3.3 Kondisi Demografis Daerah

A. Jumlah Penduduk & Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Cilegon berdasarkan Basis Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 adalah sebanyak 423.362 jiwa, dimana terjadi penambahan penduduk sebesar 6.496 jiwa dari tahun sebelumnya (2018 = 416.866 jiwa), sehingga pertumbuhan penduduk Kota Cilegon dari 2018 ke 2019 adalah sebesar 1,56 persen.

Gambar 10.2 Jumlah Penduduk Kota Cilegon Tahun 2016-2019



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon (2020)

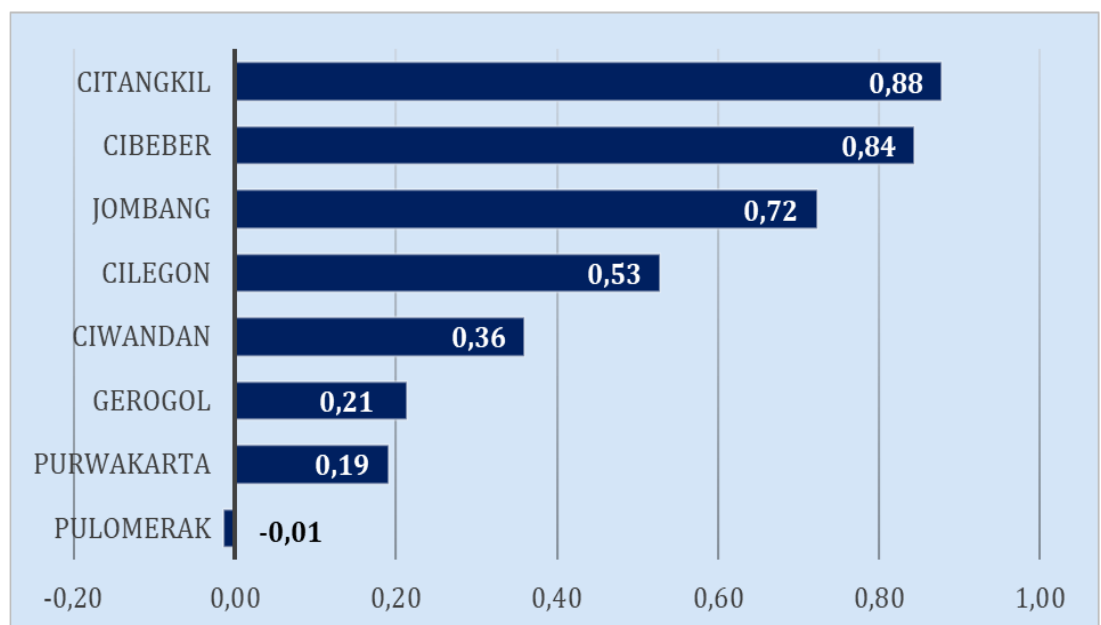
Tabel 1.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2018 dan 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (2018-2019) (%)
		2018	2019	
1	Cibeber	54.378	55.767	2,55%
2	Cilegon	45.062	45.780	1,59%
3	Pulomerak	47.538	47.517	-0,04%
4	Ciwandan	47.899	48.418	1,08%
5	Jombang	64.401	65.808	2,18%
6	Gerogol	41.863	42.132	0,64%
7	Purwakarta	41.262	41.499	0,57%
8	Citangkil	74.463	76.441	2,66%
Kota Cilegon		416.866	423.362	1,56%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk Kota Cilegon dari Tahun 2018-2019, terjadi penambahan jumlah penduduk di Kecamatan Citangkil (0,88%), kecamatan cibeber (0,84%), kecamatan jombang (0,72%), kecamatan cilegon (0,53%), kecamatan ciwandan (0,36%), kecamatan gerogol (0,21%), dan kecamatan purwakarta (0,19%), sedangkan yang mengalami pengurangan jumlah penduduk adalah kecamatan pulomerak (-0,01%). Kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk terbanyak adalah di Kecamatan Citangkil.

Gambar 10.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2018-2019



Sumber : DKPS Kota Cilegon

B. Tingkat Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kota Cilegon tahun 2019 mencapai 2.412 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jombang dengan tingkat kepadatan 5.698 jiwa/km².

Tabel 10.9 Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Cilegon Tahun 2018 dan 2019

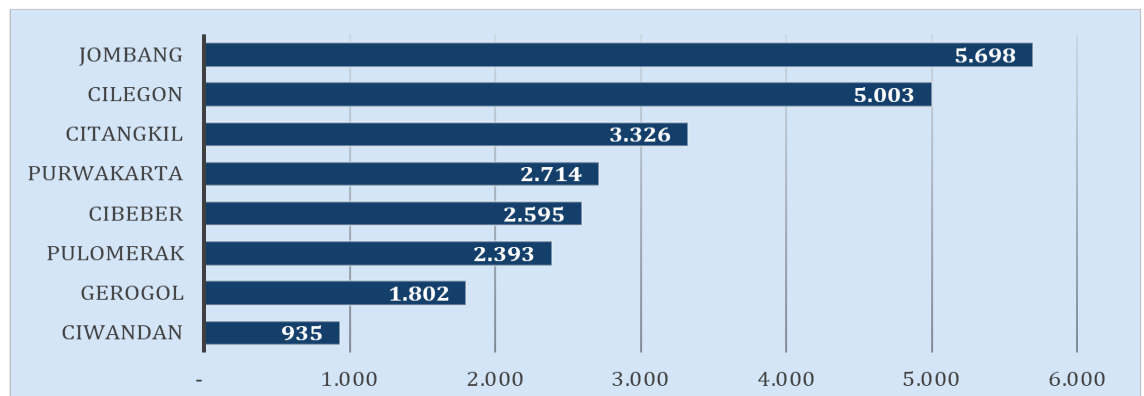
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tahun 2018		Tahun 2019	
			Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Cibeber	21,49	54.378	2.530	55.767	2.595
2	Cilegon	9,15	45.062	4.925	45.780	5.003
3	Pulomerak	19,86	47.538	2.394	47.517	2.393
4	Ciwandan	51,81	47.899	925	48.418	935
5	Jombang	11,55	64.401	5.576	65.808	5.698
6	Gerogol	23,38	41.863	1.791	42.132	1.802
7	Purwakarta	15,29	41.262	2.699	41.499	2.714
8	Citangkil	22,98	74.463	3.240	76.441	3.326
Kota Cilegon		175,51	416.866	2.375	423.362	2.412

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kecamatan Jombang sebagai wilayah terpadat sesuai dengan karakteristik kawasan dimaksud sebagai kawasan pemukiman dan juga berdekatan dengan berbagai pusat aktivitas ekonomi Kota Cilegon. Secara keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk di Kota Cilegon meningkat sebesar 37 jiwa per km², dari 2.375 jiwa per km² di tahun 2018 menjadi 2.412 jiwa per km² di 2019.

Kecamatan Ciwandan merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan rendah yaitu sebesar 935 Jiwa/Km², yang juga merupakan wilayah terluas di Kota Cilegon, sekaligus sebagai wilayah industri yang minim penduduk dan permukiman. Secara peringkat, kepadatan penduduk dari kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi hingga ke rendah adalah sebagai berikut :

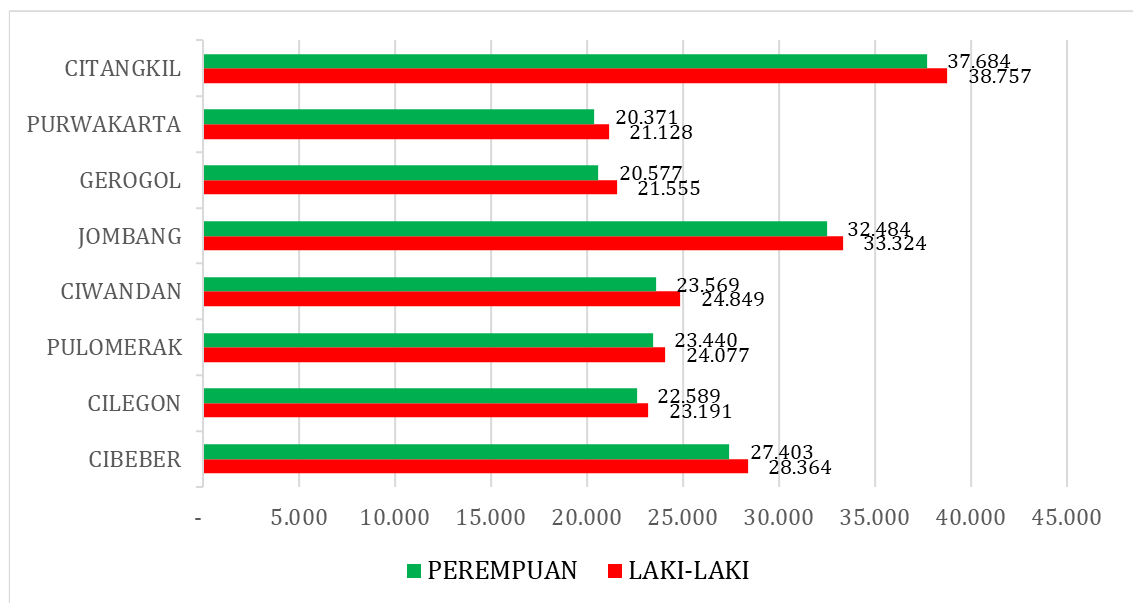
Gambar 1.4 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Cilegon Tahun 2019 menurut kecamatan



C. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2019 jumlah Penduduk di Kota Cilegon masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 215.245 jiwa dibandingkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 208.117 jiwa. Pola demikian juga terjadi di dalam setiap kecamatan di Kota Cilegon sebagaimana terdeskripsi dalam gambar berikut.

Gambar 1.5 Penduduk Kota Cilegon Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2019



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jika diperhatikan dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan (sex rasio) di Kota Cilegon, terlihat bahwa pada tahun 2019 sex rasionya sebesar 103, yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex rasio terbesar terdapat di Kecamatan Ciwandan dan Gerogol yakni sebesar 105, secara lengkap dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Cilegon Tahun 2019

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			SEX RATIO (%)
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1 Cibeber	28.364	27.403	55.767	104
2 Cilegon	23.191	22.589	45.780	103
3 Pulomerak	24.077	23.440	47.517	103
4 Ciwandan	24.849	23.569	48.418	105
5 Jombang	33.324	32.484	65.808	103

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			SEX RATIO (%)
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
6 Gerogol	21.555	20.577	42.132	105
7 Purwakarta	21.128	20.371	41.499	104
8 Citangkil	38.757	37.684	76.441	103
KOTA CILEGON	215.245	208.117	423.362	103

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS)

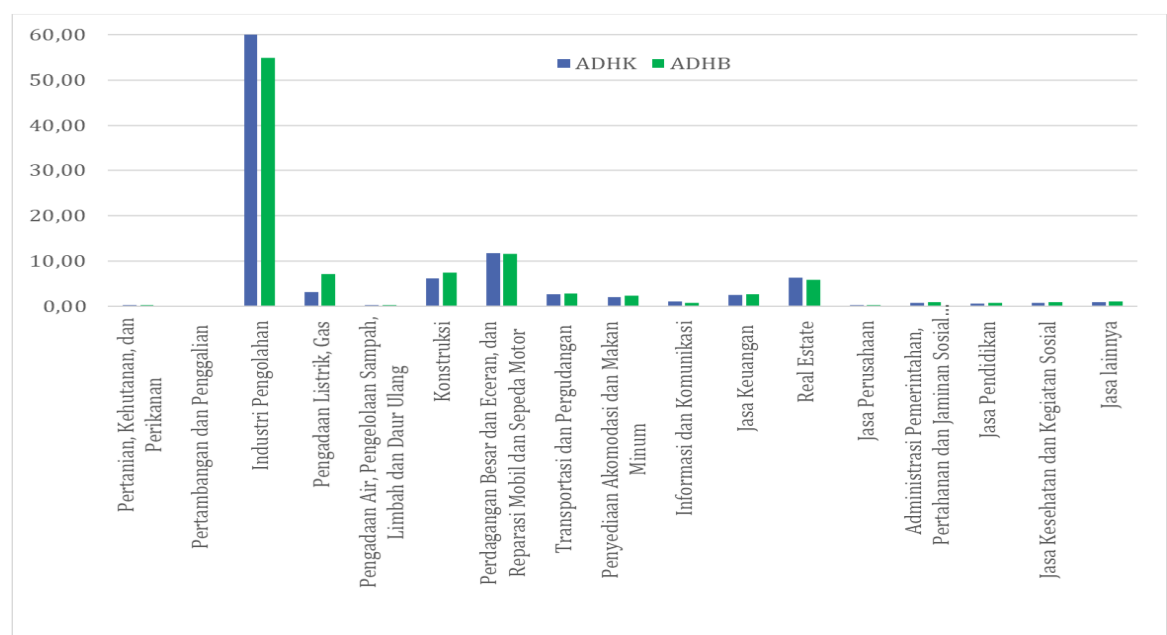
Secara sex rasio, laki-laki masih menjadi penduduk dominan di Kota Cilegon namun secara pertumbuhan penduduk, penduduk perempuan memiliki nilai pertumbuhan yang relatif tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki selama tiga tahun terakhir.

1.3.4 Kondisi Ekonomi

A. Struktur PDRB Kota Cilegon

Pada pendekatan produksi, Cilegon sebagai kota industri tercermin dari dominasi industri pengolahan pada struktur PDRB Kota Cilegon. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan rata-rata dominasi sektor industri pengolahan berada diatas 61 persen, sedangkan pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 58 persen pada rentang tahun 2016-2019. Perbedaan besaran kontribusi antara ADHK dan ADHB disebabkan adanya faktor inflasi. Status Kota Cilegon sebagai daerah Industri yang relatif besar khususnya bagi petrokimia dan logam, perekonomiannya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional maupun global.

Gambar 1.6 Perbandingan Kontribusi Sektor PDRB antara ADHK dan ADHB



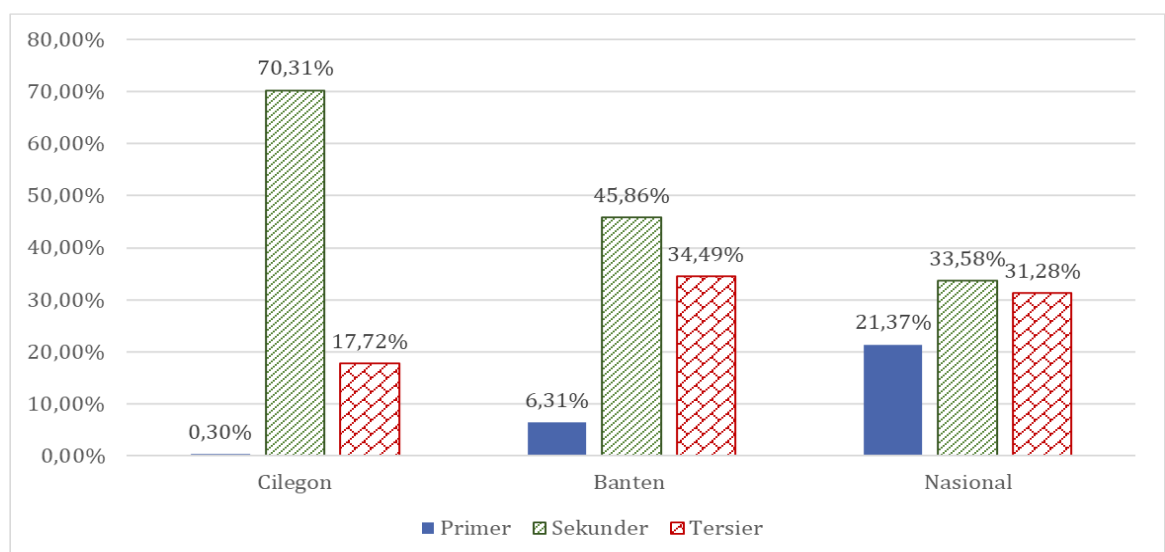
Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi.

Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Pada tahun 2019, kelompok lapangan usaha tersier memberikan sumbangan sebesar 30,34 persen yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 27,82 persen. Kelompok lapangan usaha primer dan sekunder memberikan sumbangan masing-masing sebesar 0,33 persen dan 69,33 persen. Kelompok lapangan usaha primer dan sekunder ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014 yang masing-masing sebesar 0,34 persen dan 71,84 persen.

Sedangkan berdasarkan kategori sektor, terlihat jelas bahwa Cilegon telah meninggalkan sektor primer.

Gambar 1.7 Perbandingan Kontribusi per Kategori Sektor antara Cilegon, Banten dan Nasional



B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Cilegon mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk dijadikan dasar evaluasi untuk perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 1.11 Peningkatan Nilai PDRB Kota Cilegon Tahun 2016-2019

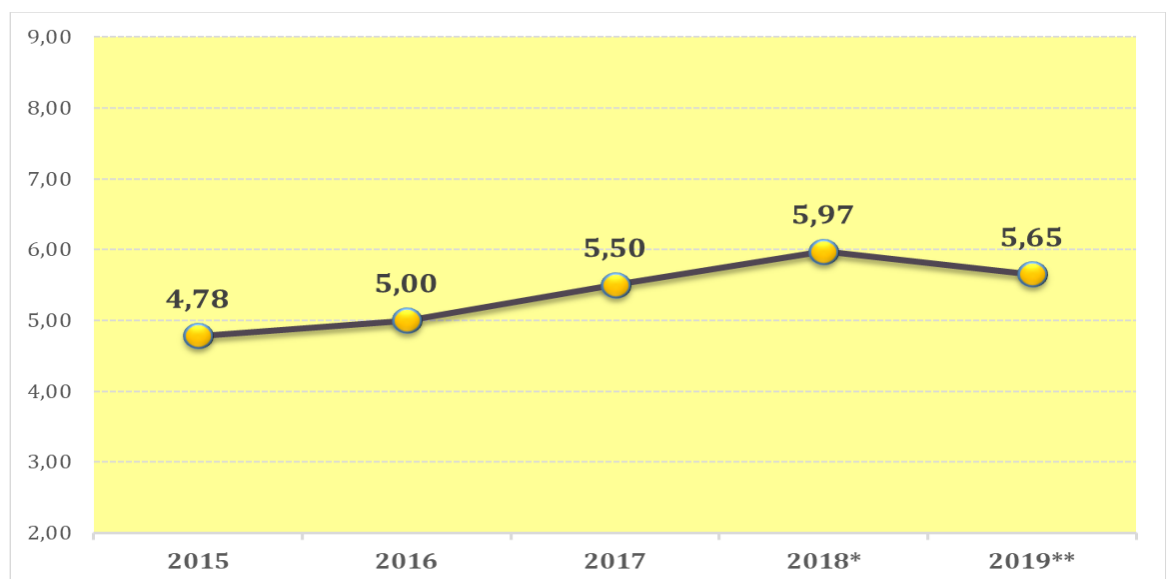
URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019**
PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	77.057,93	81.953,57	88.871,49	96.794,98	104.248,82
PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	59.982,73	62.981,05	66.444,53	70.409,19	74.385,22
LPE (ADHK)	4,78 %	5,00 %	5,5 %	5,97 %	5,65 %

**) Angka sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada tahun 2015 sampai dengan 2018 perekonomian Kota Cilegon semakin membaik seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon. Berdasarkan data BPS, perekonomian Kota Cilegon tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 5,97% naik 1,19 poin dari tahun 2015 (4,78%), dan pada tahun 2019 melambat sebesar 5,65%. Kondisi tersebut didorong oleh realisasi investasi yang semakin membaik dan telah memberikan dampak bagi perekonomian Kota Cilegon. Pada gambar berikut adalah perjalanan Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Gambar 1.8 Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon 2015-2019



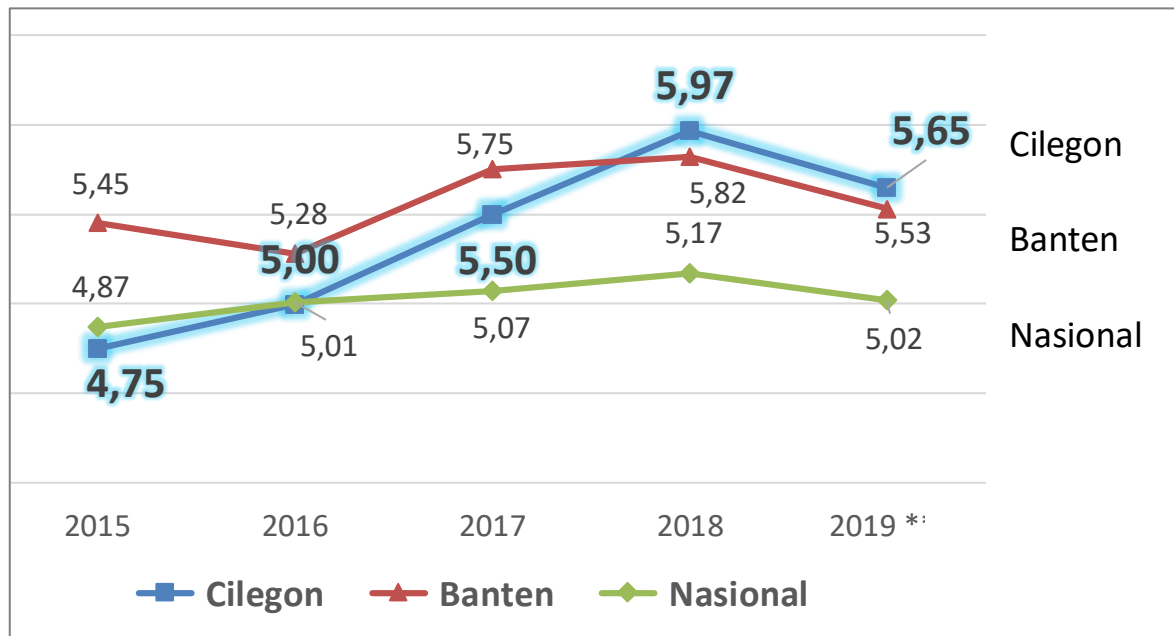
Sumber : Cilegon Dalam Angka Tahun 2020

Secara global hal ini terdampak dari adanya perang dagang antara Amerika dan China yang masih terus berlanjut. Dengan struktur ekonomi yang sebagian besar disumbangkan dari sektor industri yang berorientasi ekspor import, kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi terhadap kinerja sektor industri. Merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah untuk mendorong sektor-sektor lainnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor industri.

Sementara itu di sisi penawaran, lapangan usaha industri pengolahan masih terus menjadi penopang utama perekonomian Provinsi Banten seiring dengan ekspektasi membaiknya kinerja penjualan dari sisi domestik dan ekspor. Telah beroperasinya pabrik synthetic rubber dan pabrik pelat baja otomotif pada tahun ini dan realisasi rencana pembangunan pabrik lainnya yang bersifat multiyears akan mendorong peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan sehingga ke depan diharapkan semakin berkontribusi terhadap tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten.

Sementara itu, jika melihat perekonomian Kota Cilegon dibandingkan Banten dan Nasional. Kontribusi perekonomian Cilegon secara rata-rata berkisar pada porsi 16 persen terhadap Banten dan 0,66 persen terhadap nasional. Pada tahun 2019, perekonomian Kota Cilegon mampu tumbuh sebesar 5,65 persen dan Banten secara umum mampu tumbuh sekitar 5,53 persen.

Gambar 1.9 Perbandingan Realisasi LPE antara Cilegon, Banten dan Nasional Tahun 2015-2019

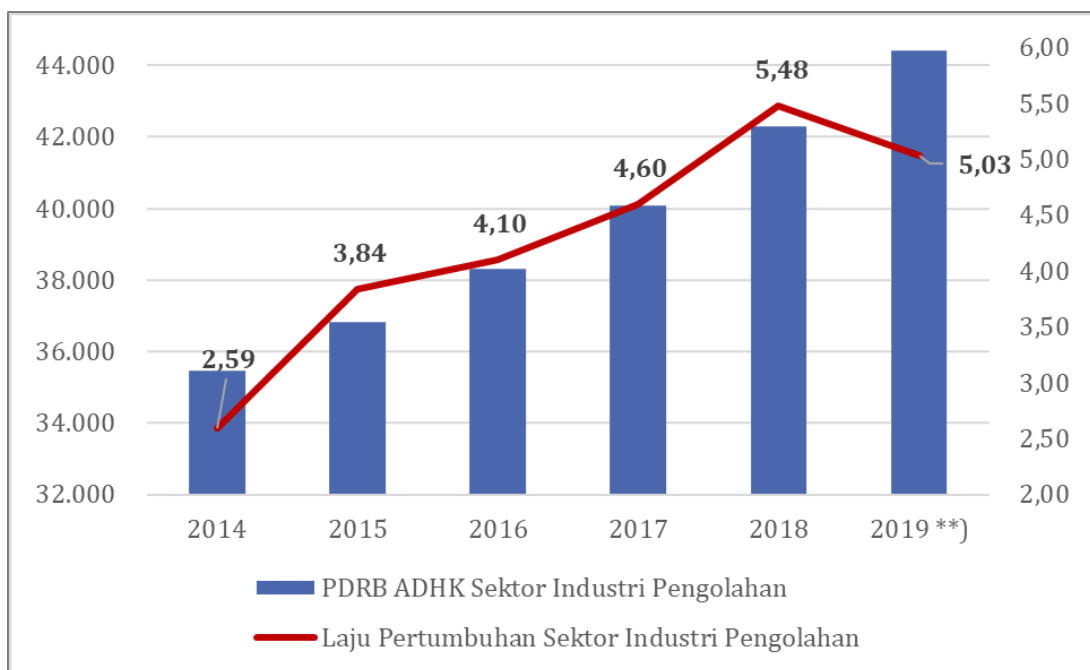


Pertumbuhan PDRB sektoral

Industri Pengolahan di Cilegon memegang peranan dalam laju pertumbuhan ekonomi mencapai 60,77% secara rata-rata pada perekonomian daerah, dan memegang 27,19% terhadap perekonomian Banten dan bahkan secara sub sektor, industri logam dasar memegang peranan sebesar 90.64 persen.

Pada tahun 2019 Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan mencapai 5,03% yang mana lajunya menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 5,48%. Hal ini sebagai dampak dari industri baja yang mengalami penurunan serta industri kimia yang produksinya sedikit menurun di tahun 2019 karena lebih fokus kepada perluasan usaha.

Gambar 1.10 Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2014-2019
(laju dalam %)

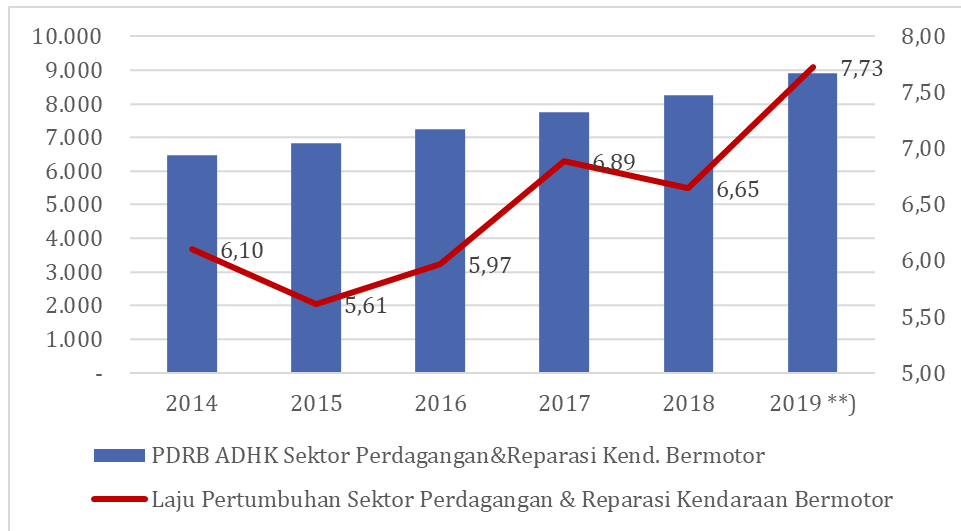


**) Angka sementara, BPS Cilegon (2020)
Sumber : Cilegon Dalam Angka Tahun 2020

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor yang memiliki *share* tertinggi kedua dalam perekonomian Kota Cilegon. Secara rata-rata, kontribusi sektor tersebut sekitar 11 persen.

Pada tahun 2019, laju pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah sebesar 7,73% meningkat sebesar 0,08% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 6,65%.

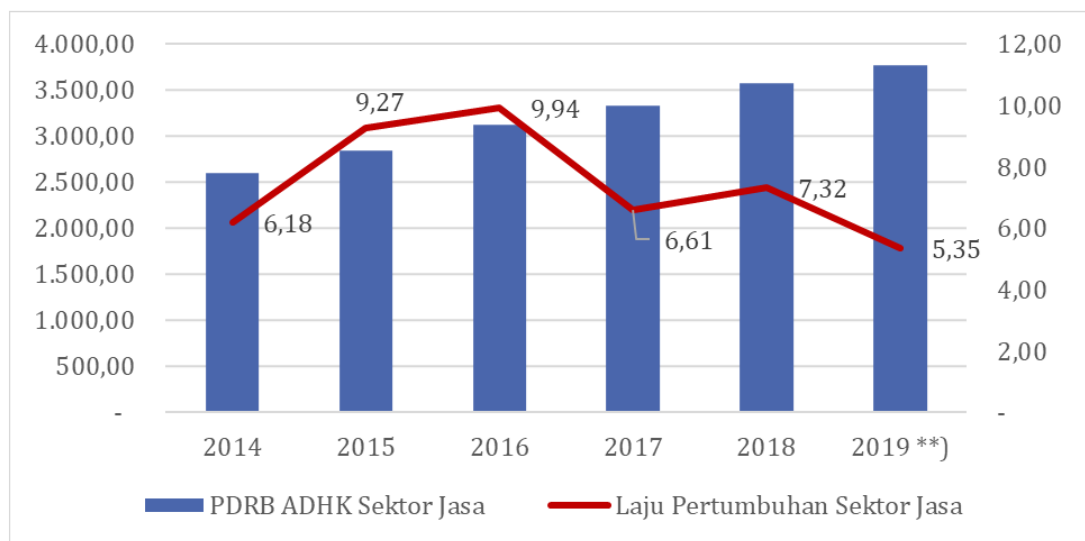
Gambar 1.11 Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2014-2019 (laju dalam %)



Sektor Jasa merupakan akumulasi dari 5 sektor, yaitu; Jasa Keuangan, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. Sektor tersebut dalam konsep struktur ekonomi merupakan kategori yang digolongkan menjadi daerah yang maju karena terjadi pergeseran dari sektor sekunder ke tersier. Secara rata-rata kontribusi sektor jasa mencapai 5 persen di dalam perekonomian Kota Cilegon.

Pada tahun 2019, sektor jasa mengalami pertumbuhan yang positif, namun laju pertumbuhannya lebih rendah dari tahun 2018. Laju pertumbuhan sektor ini di tahun 2019 mencapai 5,35%, mengalami penurunan sebesar 1,97% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 7,32%.

Gambar 1.12 Perkembangan PDRB Sektor Jasa Tahun 2014-2019 (laju dalam %)



C. PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2019, secara agregat PDRB per kapita Kota Cilegon mencapai 238,44 juta rupiah, meningkat 6,82 persen bila dibandingkan dengan tahun 2018. PDRB per kapita merupakan *proxy* ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan

masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Berdasarkan data pada tabel PDRB per capita penduduk Kota Cilegon per tahun selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.11 PDRB Per Kapita Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019**
PDRB per Kapita (Juta Rp)	186,99	195,73	209,05	223,95	238,44
Indeks Perkembangan PDRB per Kapita (2010=100)	157.54	164.91	176.13	188.68	199,51
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)	8,65	4,68	6,81	7,13	6,82

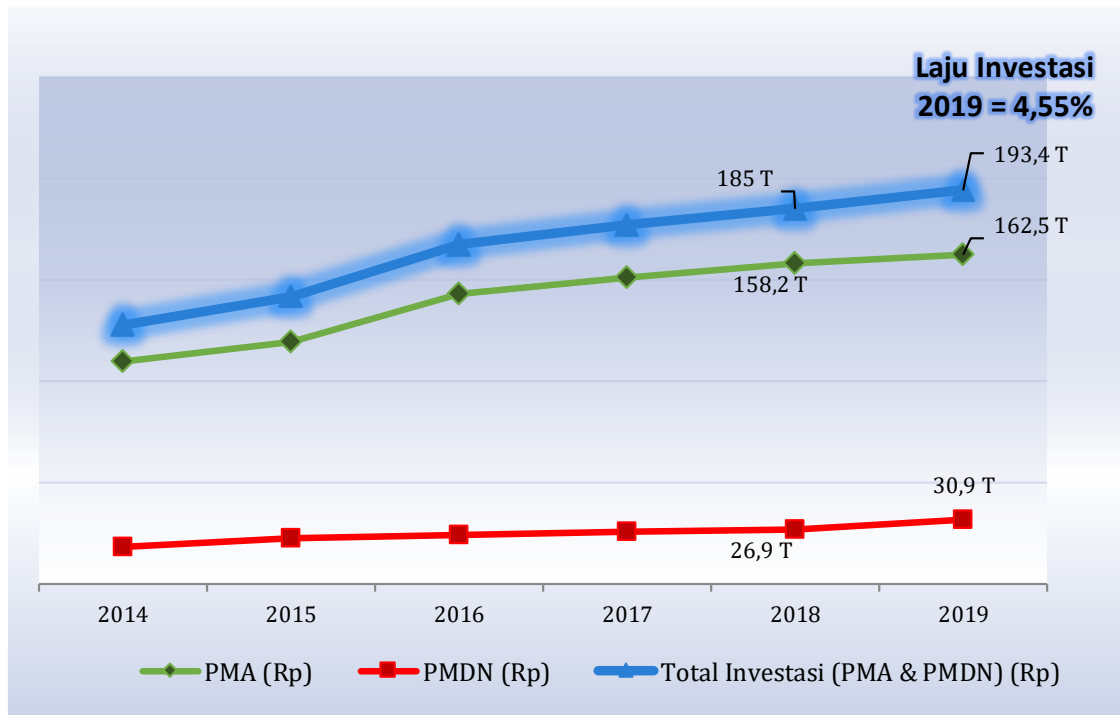
Sumber : Cilegon Dalam Angka 2020, hasil olah

D. Perkembangan Investasi

Realisasi investasi merupakan investasi yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN yang didahului oleh izin prinsip, yang saat ini diubah menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB). Data realisasi investasi diperoleh dari izin usaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online, yang mana PMA dan PMDN yang berlokasi di Kota Cilegon wajib menyampaikan LKPM baik pada tahap pembangunan maupun yang sudah komersil. Dari data tersebut dapat diketahui nilai realisasi investasi PMA dan PMDN baik investasi baru maupun perluasan.

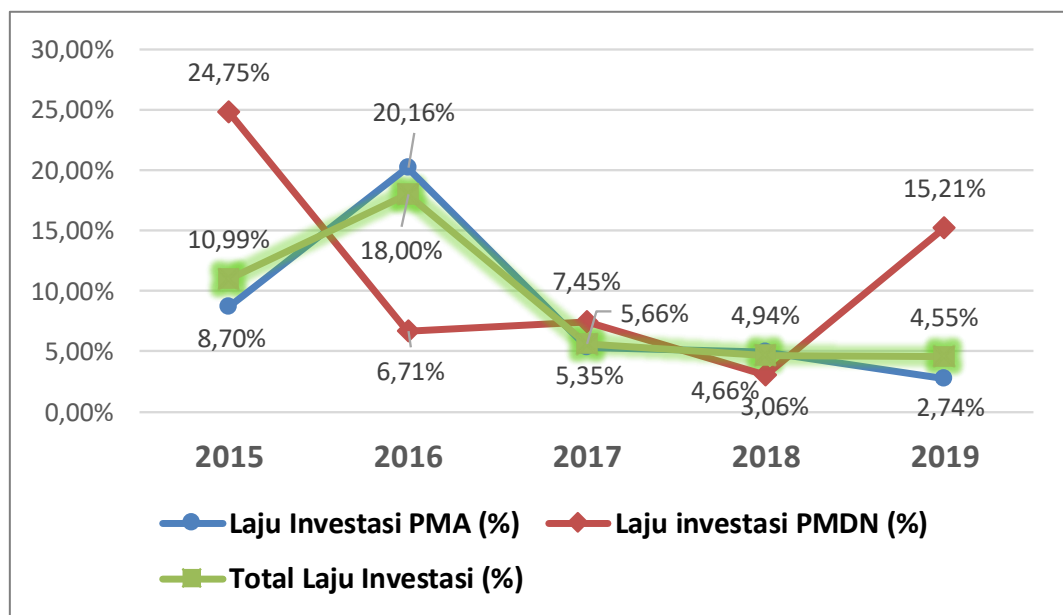
Total Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Cilegon **hingga tahun 2019 (secara akumulasi)** adalah sebesar Rp. 193,4 trilyun,- dengan komposisi realisasi investasi PMA sebesar Rp. 162,54 Trilyun atau 84% dari total realisasi investasi Kota Cilegon dan realisasi PMDN sebesar Rp. 30,9 Trilyun,- atau 16% dari total realisasi investasi Kota Cilegon tahun 2019.

Gambar 1.13 Realisasi Investasi sampai dengan tahun 2019 di Kota Cilegon

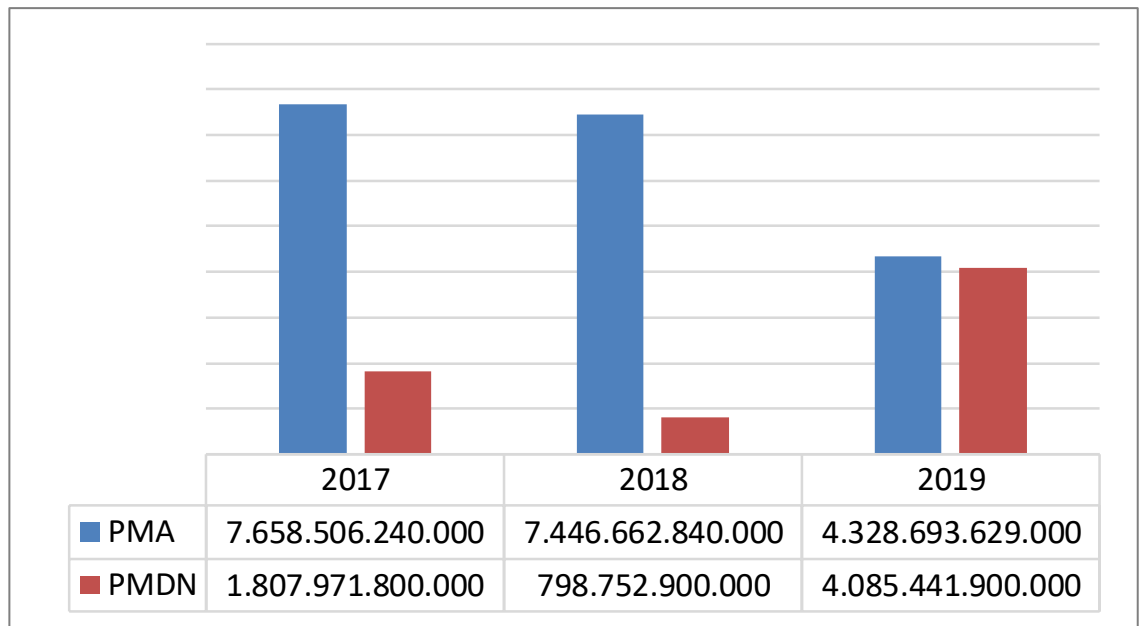


Sepanjang tahun 2019, realisasi investasi di Kota Cilegon sangatlah baik sebesar 8,41 Trilyun yang meliputi investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp. 4,33 Trilyun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 4,08 Trilyun. Secara target, pencapaian realisasi tahun 2019 sebesar 4,55%. Nilai investasi Kota Cilegon di 2019 merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten, yaitu peringkat ke-2 setelah Kabupaten Tangerang. Tentunya hal ini sangat baik bagi kondisi perekonomian Kota Cilegon.

Gambar 1.14 Dinamika Laju Peningkatan Investasi Kota Cilegon 2015 -2019



Gambar 1.15 Nilai Investasi PMA & PMDN di Kota Cilegon 2017 - 2019



Total Investasi yang ada di Kota Cilegon dari 2017 sampai dengan tahun 2019 pada dasarnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah investasi di Kota Cilegon masih didominasi oleh penanaman modal asing (PMA), meskipun komposisinya sudah hampir berimbang di tahun 2019. Di tahun 2019 terjadi laju pertumbuhan realisasi investasi yang signifikan dari investasi PMDN dengan laju pertumbuhan realisasi investasi mencapai 15,21 %.

Terkait dinamika tata kelola investasi di daerah, dengan terbitnya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, izin prinsip sudah tidak berlaku lagi, dan bagi perusahaan yang akan melakukan investasi maupun yang sudah berinvestasi diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan/atau bupati kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi. Sedangkan NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

Faktor pendukung terkait pencapaian laju investasi di Kota Cilegon antara lain :

- 1) Infrastruktur Kota Cilegon yang memadai;
- 2) Situasi politik yang kondusif;
- 3) Kebijakan daerah yang ramah terhadap investor;
- 4) Pelayanan perizinan yang mudah dan transparan;
- 5) Adanya sistem pelayanan perizinan secara elektronik (SIPECI).

Sedangkan permasalahan yang kerap ditemui diantaranya :

- 1) Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar;
- 2) Ketersediaan bahan baku yang terbatas dan ketidakstabilan harga bahan baku tersebut;
- 3) Kebijakan fiskal (terutama kebijakan nasional) yang kurang berpihak pada investor;
- 4) Terjadinya stagnansi di masa transisi dari pelayanan perizinan menggunakan SPIPISE diubah menjadi OSS
- 5) Belum adanya Peraturan Daerah terkait pemberian insentif daerah bagi penanaman modal tertentu

E. Tingkat Inflasi

Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 415 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2012 di Kota Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan, diketahui pada akhir tahun 2019 (bulan Desember) sebanyak 221 komoditas mengalami perubahan harga. Rincian lengkapnya adalah 146 komoditas mengalami kenaikan harga dan sisanya sebanyak 75 komoditas mengalami penurunan harga.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi selama bulan Desember 2019 antara lain komoditas bawang merah, telur ayam ras, tomat buah, labu siam/ jipang, melon dan buncis. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga paling banyak antara lain adalah cabe rawit, VCD/DVD player, telepon seluler, kamera, cabe merah dan kentang.

Tabel 1.12. IHK, Inflasi, Laju Inflasi Tahun Kalender Kota Cilegon Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2019

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2019	Inflasi Desember 2019 *)	Laju Inflasi Tahun 2019 **)
U M U M	146,63	0,45	3,54
1, Bahan Makanan	163,63	1,27	5,51
2, Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	152,38	0,17	2,30
3, Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	139,96	0,13	1,60
4, Sandang	131,66	0,58	5,27
5, Kesehatan	134,96	0,54	3,62
6, Pendidikan, rekreasi dan olahraga	160,74	0,01	4,43
7, Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	126,43	-0,03	3,12

Sumber : BRS Badan Pusat Statistik Kota Cilegon

Keterangan : *) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2019 terhadap IHK bulan sebelumnya

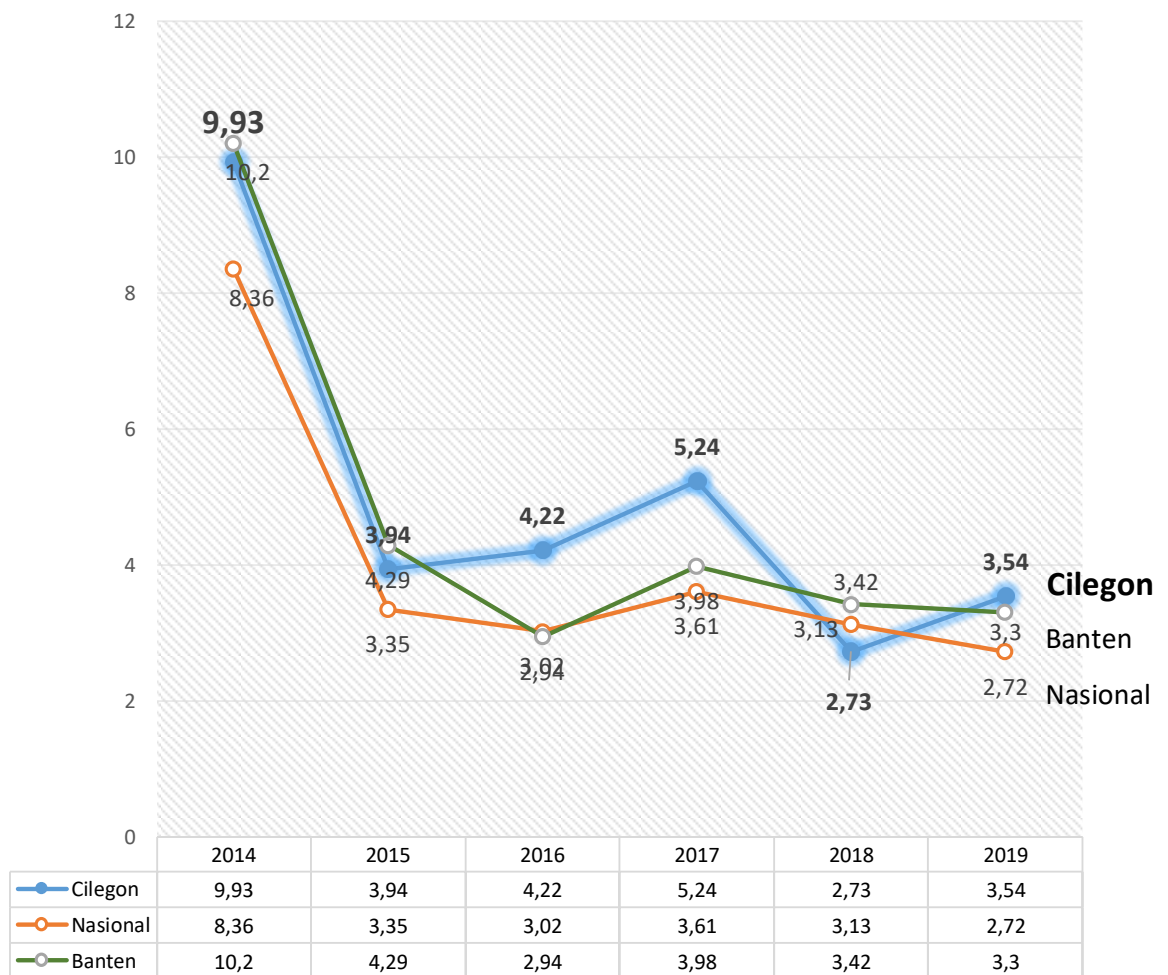
*) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2019 terhadap IHK bulan desember 2018

*) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2019 terhadap IHK bulan Desember 2018

Tabel 1.13 Sumbangan kelompok pengeluaran terhadap inflasi Kota Cilegon bulan Desember 2019 (%)

Kelompok Pengeluaran	Peningkatan IHK (Nov - Des 2019)
UMUM	0,45
1. Bahan Makanan	0,34
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,04
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	0,02
4. Sandang	0,03
5. Kesehatan	0,02
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0,00
7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	0,00

Gambar 1.15 Inflasi Kota Cilegon dibandingkan dengan Banten & Nasional



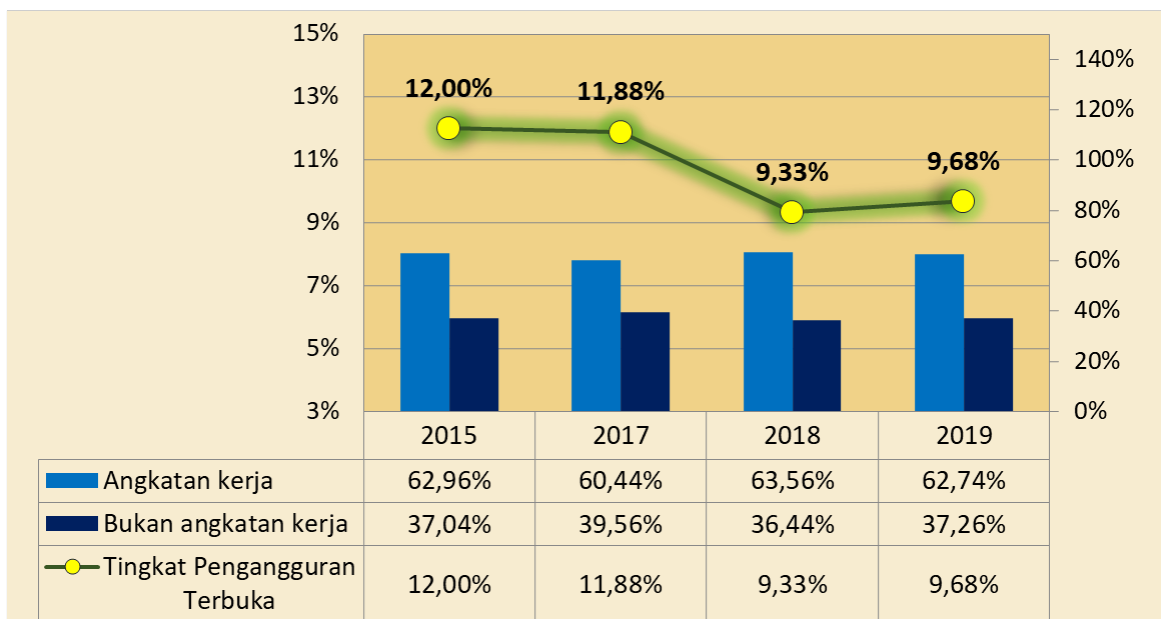
Secara umum, inflasi di Kota Cilegon pada tahun 2019 (secara year on year) masih terjaga di bawah 5 %. Kenaikan UMK yang signifikan di tahun 2019 dan 2020 turut andil dalam menyebabkan harga beberapa komoditas bahan pokok melonjak drastis. Sedangkan sebagaimana telah dijelaskan, bahwa indeks harga komoditas yang mengalami inflasi terbesar adalah pada komoditas bahan makanan (5,51 %),

yang notabene merupakan komoditas yang sebagian besar tidak diproduksi di wilayah Kota Cilegon.

F. Ketenagakerjaan

Salah satu sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap penambahan penduduk usia kerja dari tahun ke tahun sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Gambar 1.16 Statistik Ketenagakerjaan Kota Cilegon Tahun 2015-2019



Tabel 1.14 Statistik Ketenagakerjaan Kota Cilegon

Uraian		Satuan	2017	2018	2019
1.	Angkatan Kerja	%	60,44	63,56	62,74
	- Bekerja	%	53,26	57,63	56,7
	- Pengangguran	%	7,18	5,93	6,1
2.	Bukan Angkatan Kerja	%	39,56	36,44	37,26
	- Sekolah	%	7,17	8,50	8,7
	- Mengurus Rumah Tangga	%	29,25	25,09	25,7
	- Lainnya	%	3,14	2,85	2,9
Tingkat Pratisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		%	60,44	63,56	62,74
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		%	11,88	9,33	9,68

Sumber : BPS Kota Cilegon

Pada bulan Agustus tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Kota Cilegon sebesar 9,68 persen, naik 0,35 persen dibandingkan tahun

sebelumnya. Kenaikan TPT ini diakibatkan kondisi ketenagakerjaan yang 'kurang kondusif' pada salah satu perusahaan besar di Cilegon.

Berikut beberapa kemungkinan penyebab meningkatnya tingkat pengangguran di Kota Cilegon Tahun 2019 :

- 1) Kebijakan PT. Krakatau Steel untuk “meng-efisiensikan” dan menghentikan kerjasama atau afiliasi dengan berbagai perusahaan outsourcing. Hal ini berimbas pada fenomena PHK yang terjadi di banyak perusahaan outsourcing yang sebelumnya bekerja sama dengan PT. KS. Tidak kurang dari 1300 tenaga kerja yang terdampak PHK sehingga berubah statusnya dari “pekerja” menjadi “pencari kerja”.
- 2) Komposisi piramida penduduk Kota Cilegon (penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur) menunjukkan bahwa Kota Cilegon merupakan wilayah dengan penduduk ekspansif (penduduk muda). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap tahunnya banyak terjadi “transisi” dari penduduk bukan usia kerja ke penduduk usia kerja. Sehingga potensi terjadi penambahan angkatan kerja per tahun sangat besar. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Cilegon, bagaimana menjadikan masyarakat usia kerja yang produktif di dalam pembangunan, serta menciptakan generasi muda produktif yang berkualitas dalam menghadapi perekonomian global dan revolusi industri 4.0 yang sedang digaungkan oleh pemerintah dan pelaku industri di Indonesia.

Gambar 1.17 Piramida Penduduk Kota Cilegon Tahun 2019



Terkait ketenagakerjaan, Kota Cilegon telah melakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat pengangguran, beberapa diantaranya melalui :

- 1) Pemanfaatan Balai Latihan Kerja sebagai pusat peningkatan kapasitas SDM, yaitu dalam bentuk fasilitasi pelatihan, sertifikasi, hingga pelatihan vokasi.
- 2) Perluasan dan replikasi fungsi balai latihan kerja ke 43 kelurahan melalui mekanisme Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan dalam wujud kegiatan pelatihan tenaga kerja di 43 kelurahan, sesuai dengan kebutuhan dan potensi komoditas di masing-masing wilayah.
- 3) Pelaksanaan pembangunan sarpraswil di 43 Kelurahan melalui DPWkel tahun 2017-2019 yang rata-rata menyerap ± 5.000 HOK (Hari/Orang/Kerja) per tahun yang tenaga kerjanya berasal dari masyarakat lokal.
- 4) Pelaksanaan rangkaian program pro poor secara sinergi yang dilakukan melalui Dinas Sosial (melalui kelompok usaha bersama), Dinas Koperasi dan UMK (penumbuhan dan pengembangan usaha mikro dan kecil), dan lain sebagainya.

1.3.5 Kondisi Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator sosial, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan. Gambaran rincian terhadap aspek kesejahteraan sosial di Kota Cilegon, secara umum sebagai berikut :

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks gabungan dari tiga komponen 'penilai' kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan seberapa besar tingkat pencapaian dari pembangunan yang telah dilakukan selama ini dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai Indeks Pembangunan Manusia adalah rata-rata dari ketiga indeks (Indeks Angka Harapan Hidup, Indeks Tingkat Pendidikan dan Indeks Pendapatan/Daya Beli Penduduk).

Tabel 1.15 Perkembangan Komponen IPM Kota Cilegon Tahun 2011 – 2019

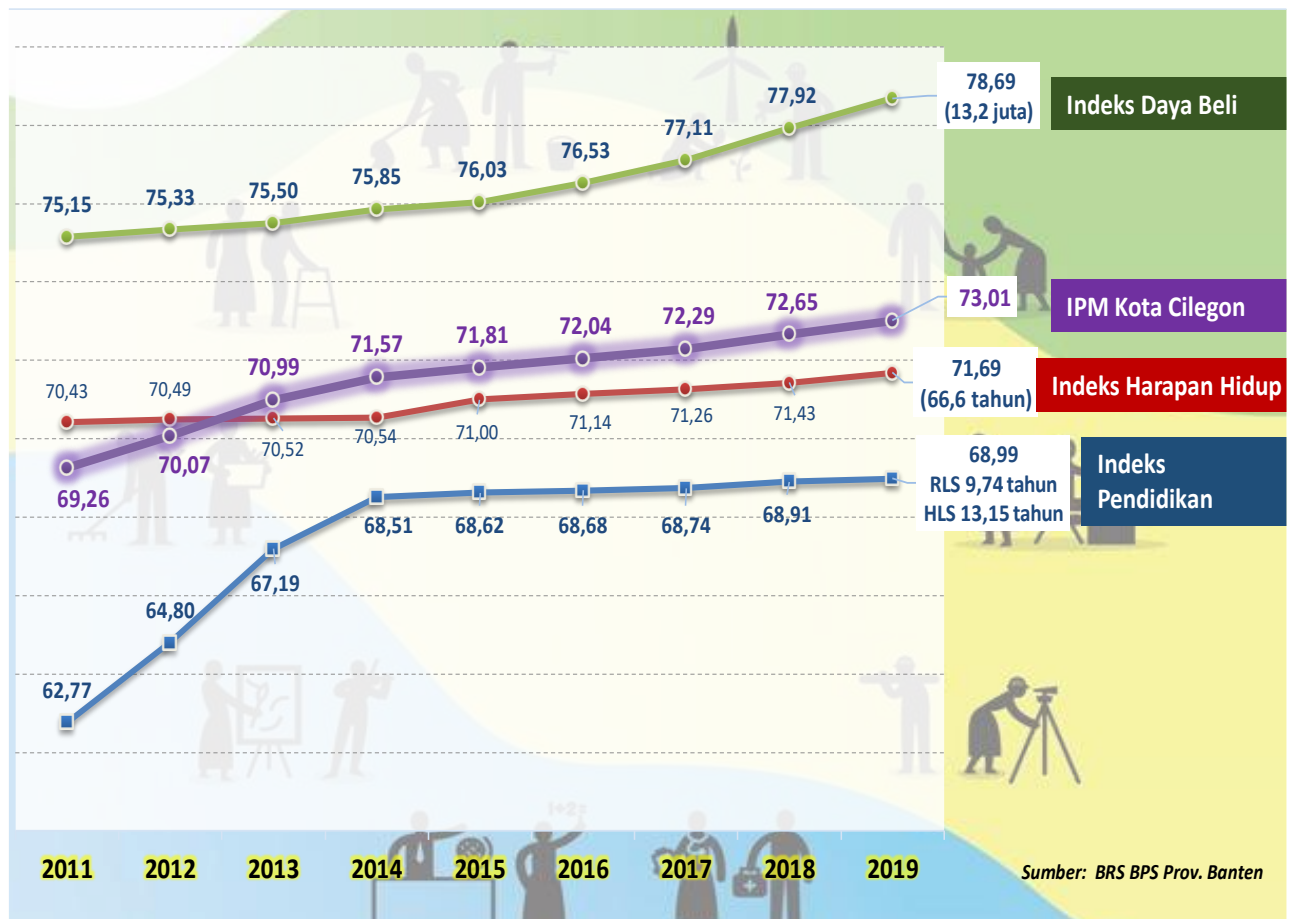
Indikator/ Variabel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (tahun)	65,82	65,84	65,85	66,15	66,24	66,32	66,43	66,60
Indeks angka harapan hidup (poin)	70,49	70,52	70,54	71,00	71,14	71,26	71,43	71,69
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,18	12,67	13,07	13,10	13,11	13,12	13,13	13,15
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,29	9,6	9,66	9,67	9,68	9,69	9,73	9,74
Indeks pendidikan (poin)	64,80	67,19	68,51	68,62	68,68	68,74	68,91	68,99
Daya Beli (ribu rupiah)	11.851	11.919	12.057	12.127	12.326	12.562	12.900	13.230
Indeks daya beli (poin)	75,33	75,50	75,85	76,03	76,53	77,11	77,92	78,69
IPM Cilegon	70,07	70,99	71,57	71,81	72,04	72,29	72,65	73,01

Sumber : BPS Kota Cilegon, hasil olah

Capaian IPM Kota Cilegon selalu membaik dalam 6 tahun terakhir, terutama yang paling signifikan adalah dari aspek daya beli. Indeks daya beli di Kota Cilegon mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dibandingkan dengan aspek lainnya, terutama dikarenakan tingkat penghasilan yang cukup membaik serta harga barang dan jasa yang menurun sehingga kemampuan untuk melakukan konsumsi meningkat.

Aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia indikator yang dilihat untuk melihat pencapaian tujuan tersebut adalah perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2019, IPM Kota Cilegon berada pada 73.01 naik 0.36 poin. Sementara itu, pada indeks kompositnya Indeks Pendidikan naik 0.09 poin dari 68.91 menjadi 68.99, Indeks Angka Harapan Hidup naik 0.26 poin dari 71.43 menjadi 71.69, Indeks Daya Beli naik 0.77 poin dari 77.92 menjadi 78.69. Secara grafik, dapat terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.18 Perkembangan IPM Kota Cilegon Tahun 2011-2019 beserta Indeks Kompositnya

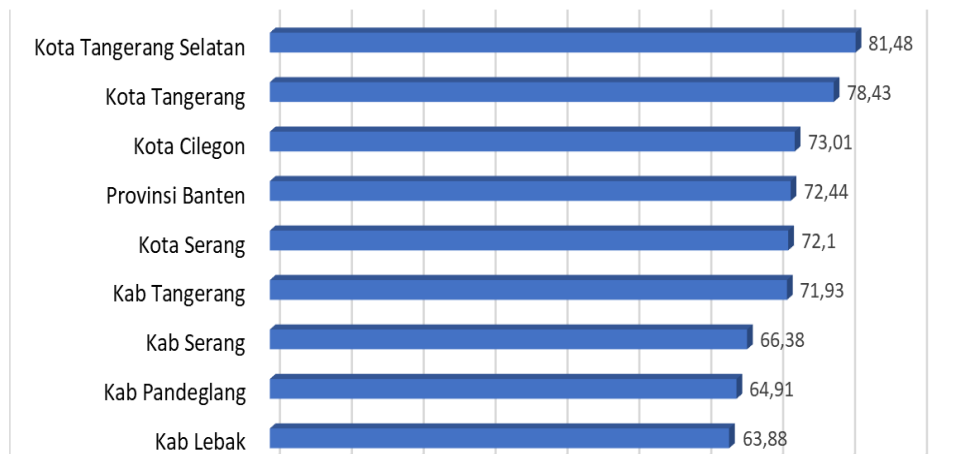


Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, IPM Kota Cilegon menempati urutan ke-3 tertinggi di Provinsi Banten. Berikut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon di antara 8 Kota di Provinsi Banten :

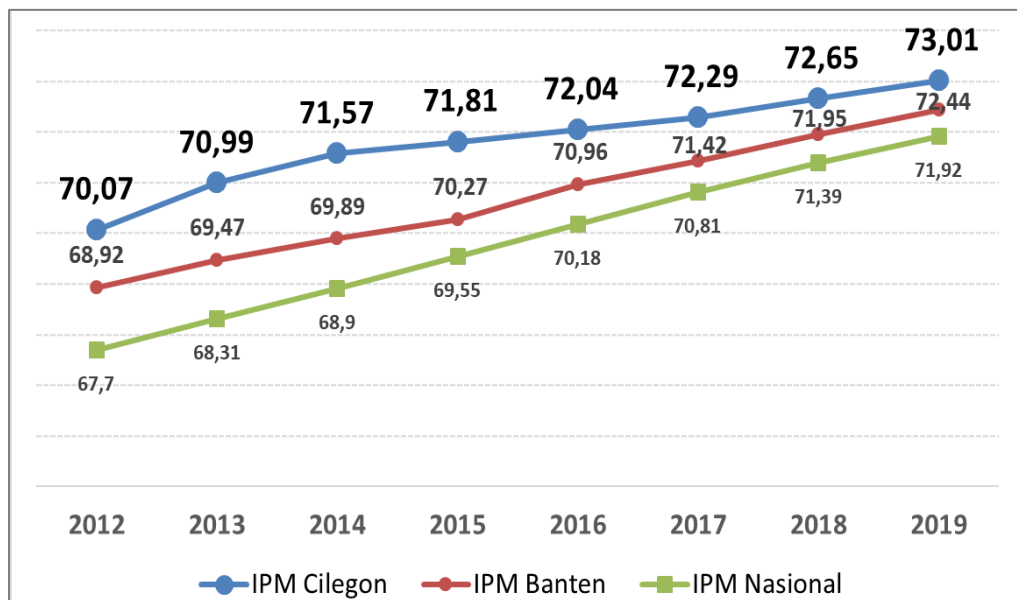
Tabel 1.16 Perkembangan IPM Kota Cilegon dan Banten Tahun 2012-2019

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Tangerang Selatan	77,68	78,65	79,17	79,38	80,11	80,84	81,17	81,48
Kota Tangerang	74,57	75,04	75,87	76,08	76,81	77,01	77,92	78,43
Kota Cilegon	70,07	70,99	71,57	71,81	72,04	72,29	72,65	73,01
Provinsi Banten	68,92	69,47	69,89	70,27	70,96	71,42	71,95	72,44
Kota Serang	69,43	69,69	70,26	70,51	71,09	71,31	71,68	72,1
Kab Tangerang	68,83	69,28	69,57	70,05	70,44	70,97	71,59	71,93
Kab Serang	62,97	63,57	63,97	64,61	65,12	65,6	65,93	66,38
Kab Pandeglang	60,48	61,35	62,06	62,72	63,4	63,82	64,34	64,91
Kab Lebak	60,22	61,13	61,64	62,03	62,78	62,95	63,37	63,88

Gambar 1.19 IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019



Gambar 1.20. IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional



Sumber : BPS Banten, hasil olah

a) Indeks Angka Harapan Hidup (AHH)

Dari tahun ke tahun Angka Harapan Hidup Kota Cilegon mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, angka harapan hidup penduduk Kota Cilegon sebesar 66,60 artinya bayi yang dilahirkan mempunyai peluang/harapan untuk hidup selama 66 tahun. Peningkatan angka Indeks Harapan Hidup tersebut menunjukkan tingkat kesehatan penduduk Kota Cilegon semakin baik dari tahun sebelumnya.

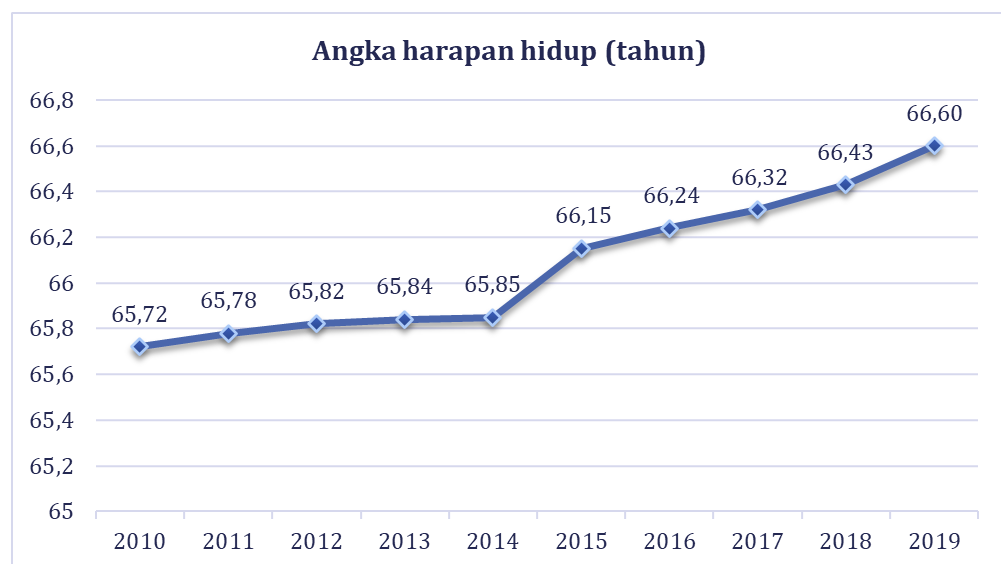
Pada tabel terlihat bahwa Indeks Angka Harapan Hidup selama empat tahun terakhir (2016-2019) terus menunjukkan peningkatan. Pembangunan bidang kesehatan di Kota Cilegon di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,17%.

Tabel 1.17. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cilegon Tahun 2010 – 2019

Indikator/ variabel	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (AHH) (dalam tahun)	65,72	65,78	65,82	65,84	65,85	66,15	66,24	66,32	66,43	66,60

Sumber : BPS Kota Cilegon Tahun 2019

Gambar 1.21 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cilegon Tahun 2010 – 2019



Sumber : BPS Kota Cilegon Tahun 2019

Dari tahun ke tahun Angka Harapan Hidup Kota Cilegon mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, angka harapan hidup penduduk Kota Cilegon sebesar 66,60 artinya bayi yang dilahirkan mempunyai peluang/harapan untuk hidup selama 66 tahun. Secara nilai angka AHH tahun 2019 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018

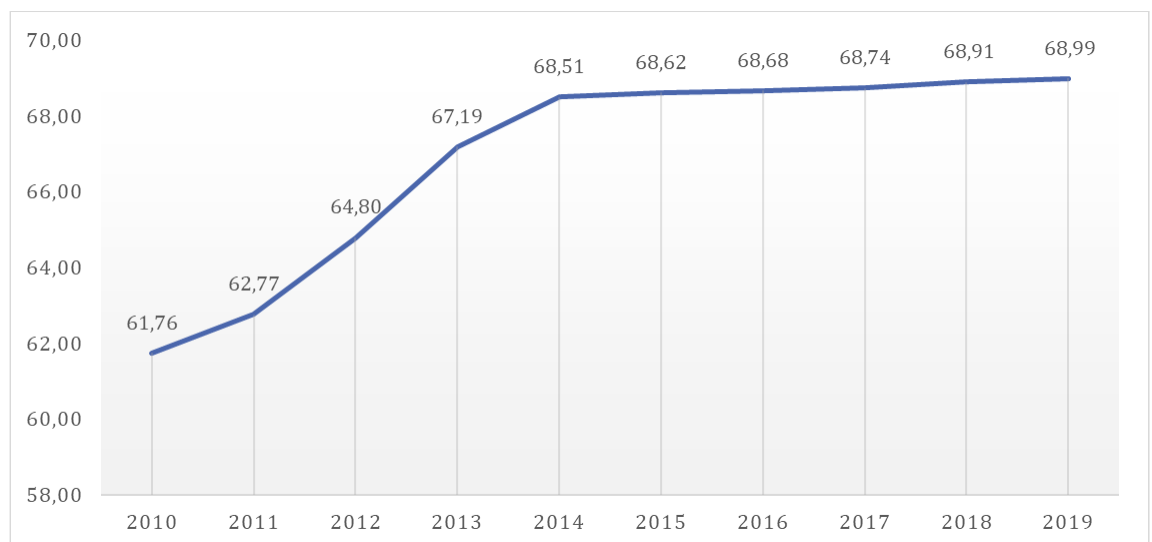
sebesar 66,43. Diharapkan angka tersebut terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah di dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan nilai Indeks Angka Harapan Hidup (IHH), nilai tahun 2019 meningkat 0,26 poin menjadi 71,69. Jika melihat perkembangan IHH dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, peningkatan IHH dan AHH yang paling signifikan terjadi pada tahun 2014-2015. Pertumbuhan nilai IHH setelah tahun 2015 mulai melambat namun memiliki kecenderungan pertumbuhan yang relative lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelum 2014. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat saat ini semakin merata seiring dengan adanya program jaminan kesehatan nasional sehingga berkecenderungan percepatan indeks AHH lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kota Cilegon, sebagai daerah industri yang cukup besar, tentunya memiliki resiko terhadap pencemaran lingkungan yang turut mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan tapi juga sektor lainnya di dalam proses pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan.

b) Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan representasi dari dimensi pengetahuan di dalam IPM. Indeks pendidikan dihasilkan dari gabungan perhitungan antara Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama sekolah. Pada perkembangannya Indeks Pendidikan Kota Cilegon senantiasa meningkat dari waktu ke-waktu. Namun dalam kurun waktu empat tahun terakhir, peningkatannya mulai “melandai” sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 1.22 Perkembangan Indeks Pendidikan Tahun 2010-2019



1) Harapan lama sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2019 harapan lama sekolah Kota Cilegon sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2018 angka harapan lama sekolah sebesar 13,13 tahun, maka tahun 2019 meningkat menjadi 13,15 tahun, Harapan lama sekolah mengalami peningkatan sebanyak 0,02 tahun. Peningkatan tersebut tentunya didukung oleh peningkatan minat penduduk untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi.

Dalam hal ini, untuk meningkatkan harapan lama sekolah, perlu menciptakan kebijakan yang mendukung iklim pendidikan yang merata dan terjangkau. Sejak ditariknya kewenangan Pendidikan Menengah dari Kota ke Provinsi, Pemerintah Kota Cilegon kini lebih fokus pada upaya peningkatan kualitas pendidikan yang merata, terjangkau, bermutu dan kompetitif bagi pendidikan dasar. Pendidikan yang merata dan terjangkau diwujudkan dengan cara mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat sehingga masyarakat diseluruh wilayah Kota Cilegon dapat mengenyam pendidikan. Sedangkan pada aspek mutu dan kompetitif, pendidikan di Kota Cilegon diarahkan pada Program Sekolah Mantap.

2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) yang didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijasah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Kegunaan dari indikator RLS adalah untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cilegon selama empat tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan. Rata-rata lama sekolah Kota

Cilegon mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,14 poin per tahun sepanjang tahun 2010 sampai 2019, dan selama 3 tahun terakhir hanya meningkat 0,01 poin setiap tahunnya, namun pada tahun 2019 ini rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin lebih tinggi dari rata-rata tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019 sebesar 9,74 tahun, menunjukkan bahwa secara rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cilegon telah mampu menyelesaikan pendidikan tingkat SMP.

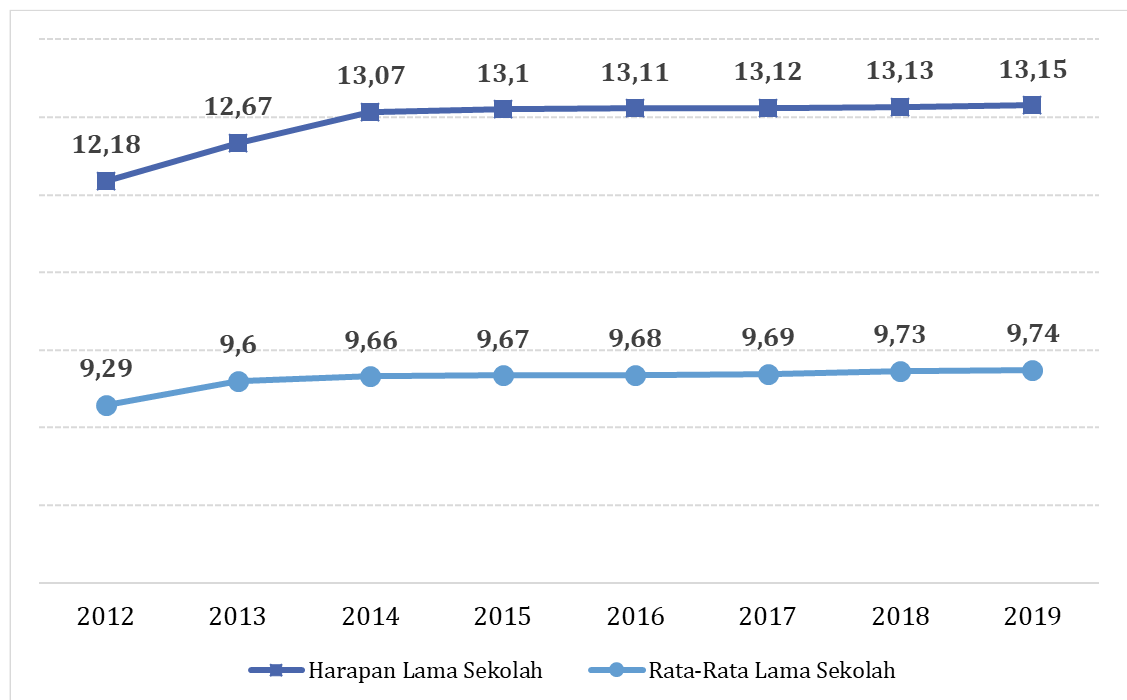
Pada dasarnya, angka RLS yang telah dicapai Kota Cilegon telah melampaui target wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Artinya setiap penduduk Kota Cilegon yang berusia 25 tahun keatas, telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun jika dilihat percepatan pertumbuhan RLS secara series. Kota Cilegon dan beberapa kota lainnya di Provinsi Banten mengalami pertumbuhan RLS yang relative lambat dengan penambahan sebesar 0.01 poin.

Tabel 1.18 Perkembangan Harapan lama sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cilegon Tahun 2012 – 2019

Indikator/ Variabel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,18	12,67	13,07	13,10	13,11	13,12	13,13	13,15
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,29	9,6	9,66	9,67	9,68	9,69	9,73	9,74

Sumber : BPS Kota Cilegon Tahun 2019

Gambar 1.23 Grafik Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kota Cilegon Tahun 2012-2019



Sumber : BPS Kota Cilegon

c) Indeks Tingkat Daya Beli

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

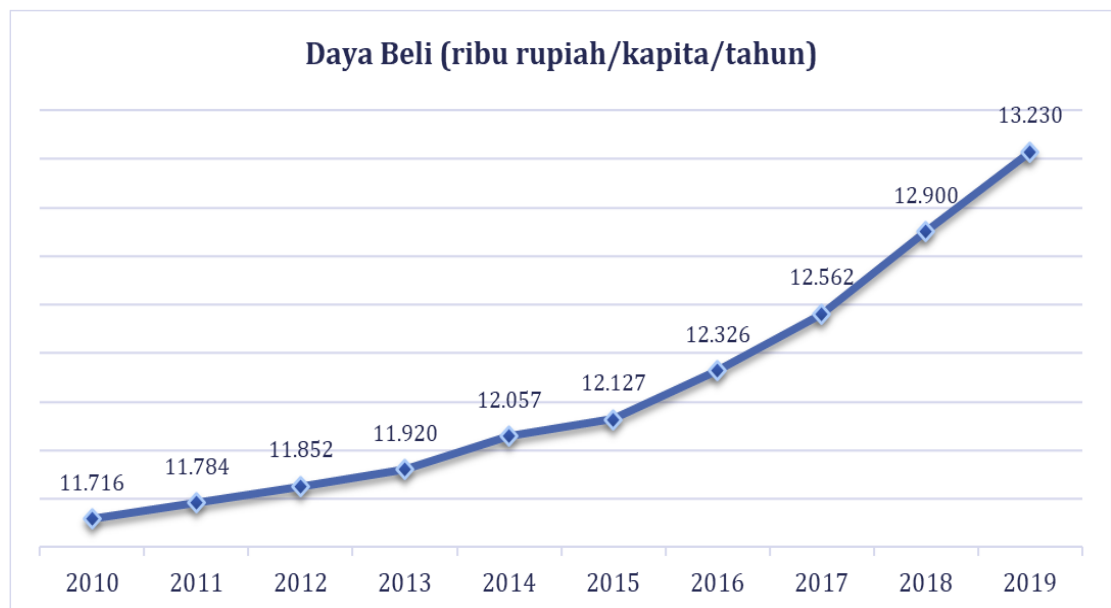
Besarnya nilai Indeks Tingkat Daya Beli (PPP) menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk. Semakin besar PPP, mengindikasikan kesejahteraan penduduk semakin membaik. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari besarnya Indeks Daya Beli Penduduk. Tahun 2019, tingkat Daya Beli Penduduk Kota Cilegon sebesar Rp 13,23 juta dengan nilai indeks 78,69. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, indeks daya beli naik 0,77 poin. Secara series perkembangannya terlihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 1.19 Perkembangan Daya Beli Penduduk Kota Cilegon Tahun 2012 – 2019

Indikator/ Variabel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Daya Beli (dalam ribuan rupiah)	11.852	11.919	12.057	12.127	12.326	12.562	12.900	13.230

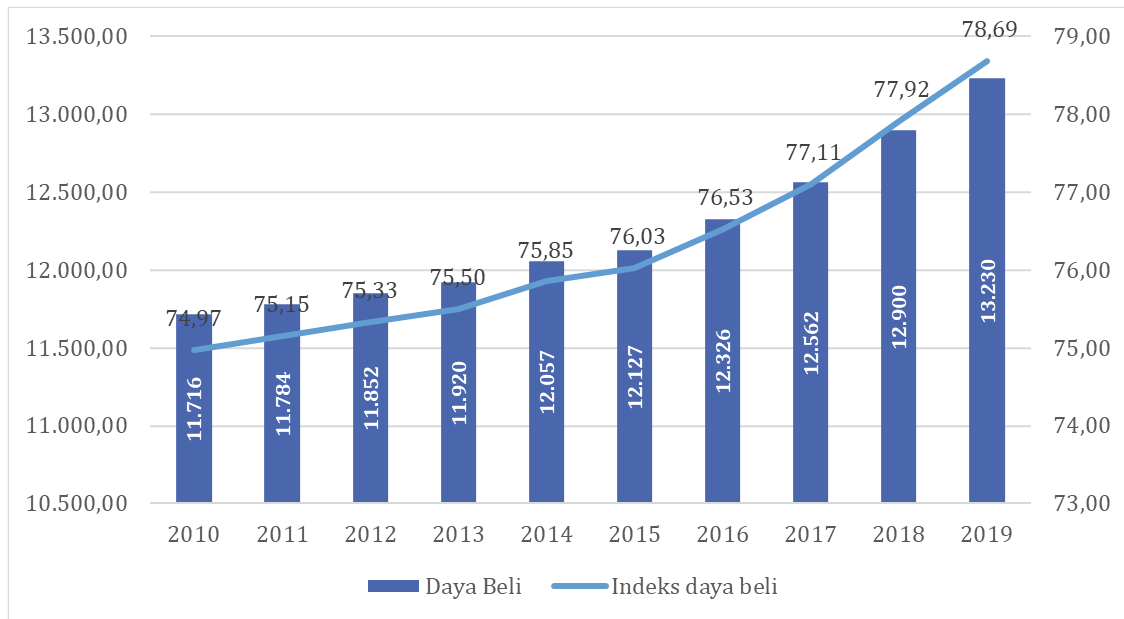
Sumber : BPS Kota Cilegon Tahun 2018

Gambar 1.23 Grafik Perkembangan Daya Beli Penduduk Kota Cilegon Tahun 2010-2019 (per kapita per tahun) (dalam juta rupiah)



Sumber : BPS Kota Cilegon

Gambar 1.24 Perbandingan Capaian Indeks Daya Beli dan Pengeluaran Perkapita 2010-2019



Peningkatan daya beli juga berjalan beriringan dengan peningkatan PDRB, terutama pada sektor-sektor unggulan Kota Cilegon seperti perdagangan dan jasa, serta industri pengolahan. Meningkatnya produksi barang dan jasa, akan berimplikasi pada pendapatan pekerja (di sektor terkait) yang juga meningkat.

Peningkatan daya beli dipengaruhi pula oleh intervensi pemerintah yang menjaga “level” daya beli terutama untuk masyarakat rumah tangga sasaran (RTS), terutama pada aspek pemenuhan pelayanan dasar, maupun meningkatkan keberdayaan ekonomi melalui berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah seperti JSCM, Raskin/ BPNT (bantuan langsung pangan non tunai), PKH, Kube (kelompok usaha bersama), dan lain sebagainya.

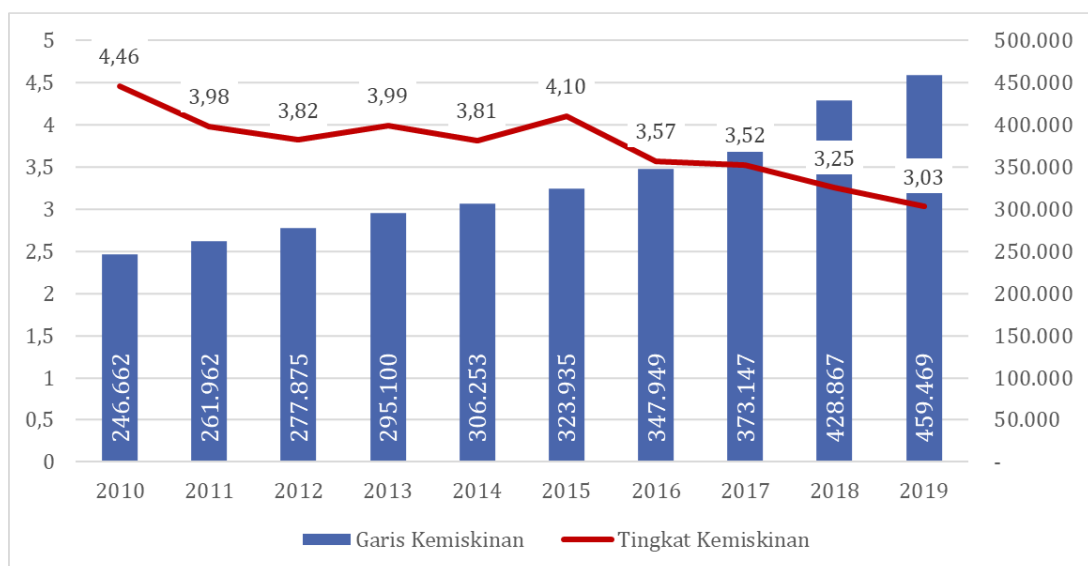
Dalam 2 tahun terakhir, peningkatan daya beli masyarakat kota Cilegon meningkat cukup signifikan, yaitu 2,5 hingga 2,7 % per tahun. Ini sejalan pula dengan peningkatan upah minimum Kota Cilegon yang meningkat cukup drastis dalam 3 tahun terakhir. Kota Cilegon bahkan menempatkan urutan tertinggi di provinsi Banten dalam hal nilai UMK, yaitu dari tahun 2018 hingga 2020 berturut-turut sebesar 3,62 juta (2018), 3,91 juta (2019) dan 4,24 juta (2020). Dengan rata-rata peningkatan UMK sebesar 8% per tahun.

B. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. BPS menentukan angka kemiskinan dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan data BPS, Tingkat Kemiskinan Kota Cilegon pada tahun 2019 berada pada angka 3,03%, atau sekitar 13 ribuan penduduk. Pendekatan tersebut adalah pendekatan moneter yang menghitung bahwa pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan makanan dan non makanan dengan angka (garis kemiskinan) GK 2019 Rp. 459.469. Angka kemiskinan tersebut turun 0,22 poin jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada tahun sebelumnya (2018).

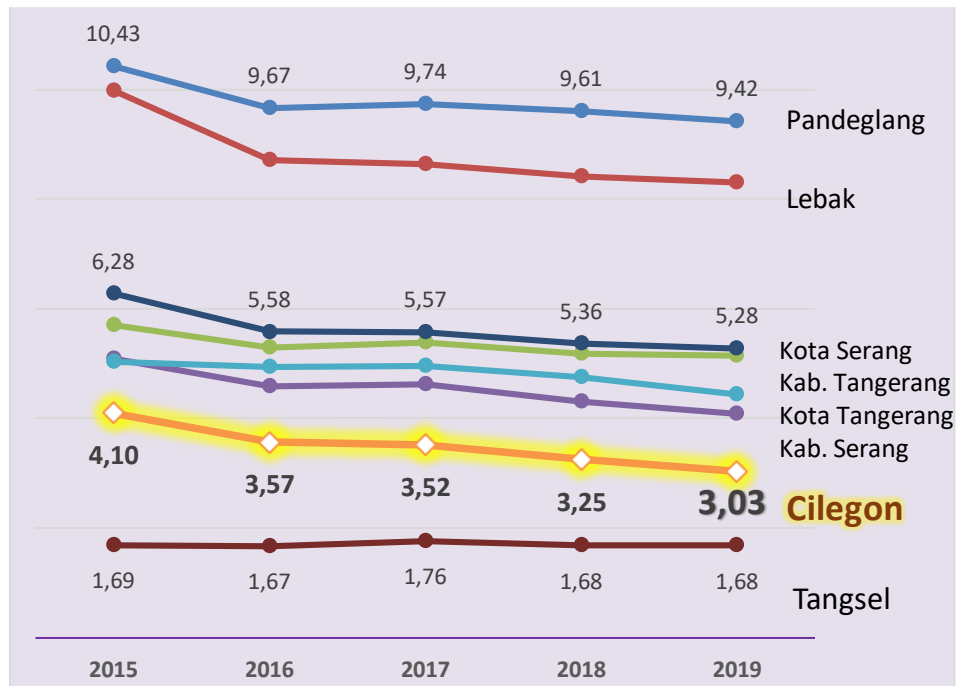
Gambar 1.25 Perbandingan Tingkat Kemiskinan terhadap Garis Kemiskinan



Sumber: BPS Provinsi Banten, hasil olah

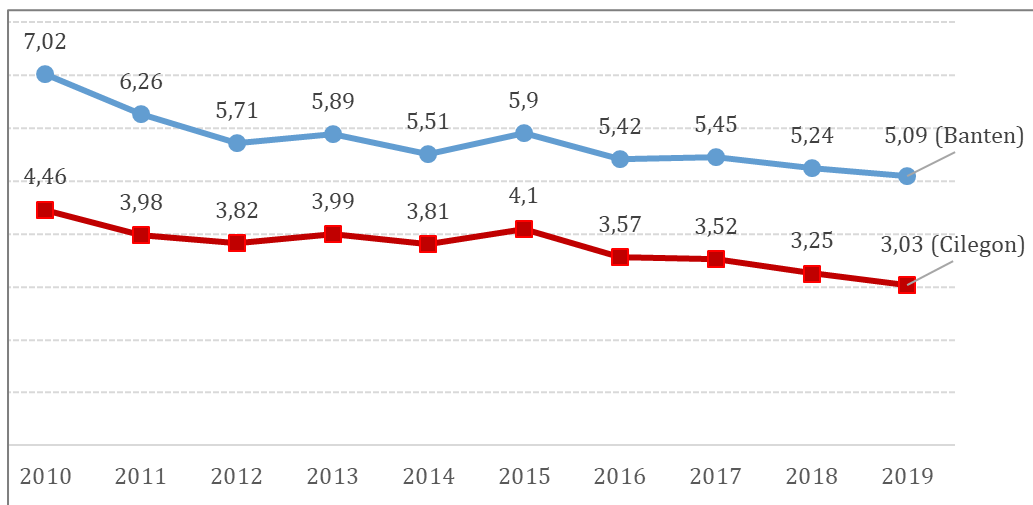
Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, tingkat kemiskinan Kota Cilegon menempati peringkat kedua terendah setelah Kota Tangerang selatan dengan tingkat kemiskinan sebesar 1,68%.

Gambar 1.26. Urutan Tingkat Kemiskinan se Provinsi Banten Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi Banten, hasil olah

Gambar 1.27 Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara Banten dan Cilegon



Sumber: BPS Provinsi Banten, hasil olah

Penurunan angka kemiskinan merupakan implikasi dari berbagai program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kota Cilegon melalui intervensi di berbagai sektor (lintas OPD) diantaranya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), JSCM, Santunan Kematian, Beasiswa pendidikan untuk RTS, jaminan kesehatan untuk RTS, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kube, penumbuhan UMK dan lain sebagainya yang semuanya merupakan instrumen-instrumen untuk menjaga “daya beli” masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, khususnya dalam pemenuhan kalori (kebutuhan pangan) berdasarkan garis kemiskinan nasional.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



2.1 KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CILEGON

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif dengan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan kemampuan potensi daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggungjawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun. Pengelolaan Keuangan Daerah tercermin pada APBD setiap tahun yang secara rinci akan dijelaskan dalam bentuk rekapitulasi APBD Tahun 2019 yang memuat pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan.



2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Definisi *Pendapatan Daerah* menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun jenis Pendapatan sebagai tertuang dalam Pasal 25 dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk kelompok *Pendapatan Asli Daerah* dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berlandaskan kepada Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun kelompok pendapatan *Dana Perimbangan* dibagi menurut jenis Pendapatan terdiri dari :

- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adapun kelompok pendapatan *Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah* dibagi menurut jenis Pendapatan terdiri dari :

- a. Dana Hibah (BOS SD dan SMP)
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon 5 tahun, kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah melalui perbaikan system dan prosedur serta perbaikan administrasi;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek/subjek, peningkatan pengawasan dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak sesuai.

2.2.1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Capaian penerimaan realisasi Pendapatan Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2015 – 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun lebih dari 5%.

Terhitung sejak tahun 2015 realisasi Pendapatan Daerah sebesar **Rp. 1,40 Triliun**, terjadi peningkatan di tahun 2016 sebesar **Rp. 204 Milyar** sehingga realisasi menjadi **Rp. 1,61 Triliun,-**, terjadi peningkatan di tahun 2017 sebesar **Rp. 299 Milyar** sehingga total penerimaan menjadi **Rp. 1,70 Triliun,-** di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar **Rp. 220 Milyar** sehingga total penerimaan menjadi **Rp. 1,63 Triliun,-** dan di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar **Rp. 357 Milyar** sehingga total penerimaan menjadi **Rp. 1,766 Triliun** Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tabel Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tahun	Realisasi Pendapatan	Laju Pertumbuhan terhadap Tahun 2015	% Laju Pertumbuhan terhadap Tahun 2015	Keterangan
2015	1.409.261.799.808			
2016	1.614.162.030.694	204.900.230.886	15%	2016 - 2015
2017	1.708.838.034.694	299.576.234.886	21%	2017 - 2015
2018	1.630.020.024.950	220.758.225.142	16%	2018 - 2015
2019	1.766.980.559.475	357.718.759.667	25%	2019 - 2015
		136.960.534.525	8,40%	2019 - 2018

Perbandingan laju pertumbuhan penerimaan Pendapatan Daerah dari tahun 2019 terhadap tahun 2015 mencapai **25%** atau terdapat peningkatan sebesar **Rp. 357 milyar**. Sedangkan perbandingan laju pertumbuhan penerimaan Pendapatan Daerah dari tahun 2019 terhadap tahun 2018 mencapai **8,40%** atau terdapat peningkatan sebesar **Rp. 136,9 milyar**.

2.2.2 Deskripsi Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 1.881.449.605.475,-** dengan realisasi sebelum audit oleh BPK-RI sebesar **Rp. 1.766.980.559.475,-** atau mencapai **93,92%**, dengan sisa anggaran pendapatan tahun anggaran 2019 sebesar **(Rp. 114.469.046.000,-)**.

Hal tersebut dipengaruhi dari pencapaian penerimaan sektor Pendapatan Asli Daerah dengan capaian sebesar **92,26%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 53.282.238.388,-)**, sektor Dana Perimbangan dengan capaian mencapai **95,00%**

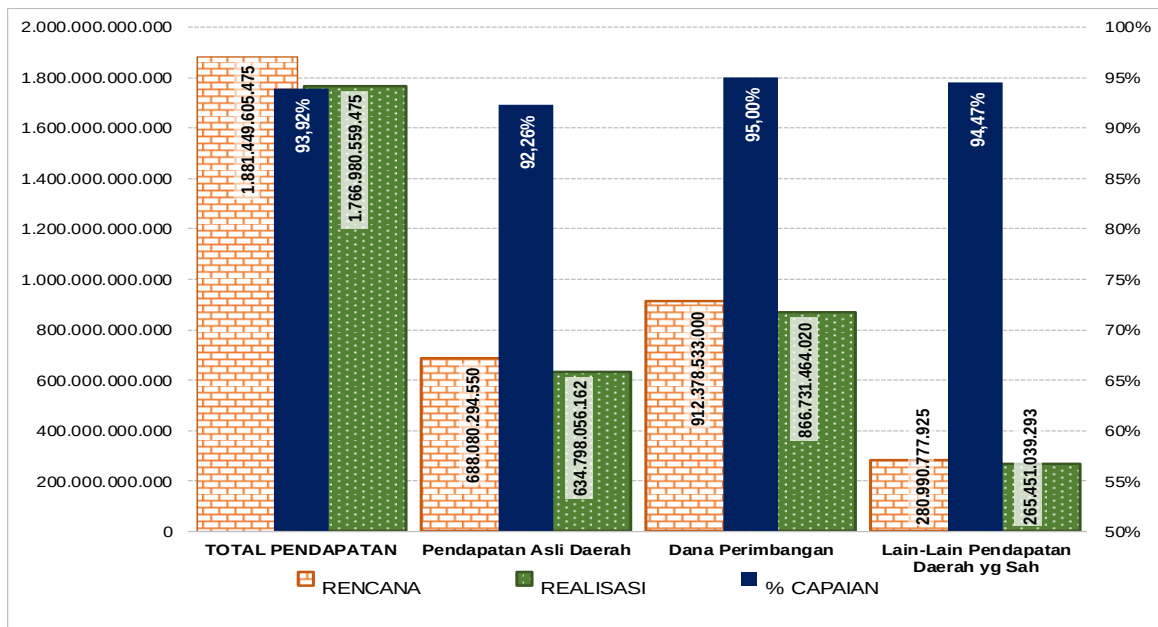
tidak terlampaui sebesar **(Rp. 45.647.068.980,-)**, dan Sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan capaian mencapai **94,47%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 15.539.738.632,-)**. Adapun rincian rencana dan realisasi Pendapatan Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
	TOTAL PENDAPATAN	1.881.449.605.475	1.766.980.559.475	93,92%
1	Pendapatan Asli Daerah	688.080.294.550	634.798.056.162	92,26%
2	Dana Perimbangan	912.378.533.000	866.731.464.020	95,00%
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah	280.990.777.925	265.451.039.293	94,47%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (*Unaudited*)

Gambar 2.1 Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2019



A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 688.080.294.550,-** adapun realisasi sebesar **Rp. 634.798.056.162,-** atau mencapai **92,26%** atau tidak terlampaui/selisih sebesar **Rp. 53.282.238.388**, hal tersebut disebabkan :

1. Capaian Pajak Daerah sebesar **90,43%**. tidak terlampaui sebesar **(Rp. 51.691.918.583,-)**. dikarenakan pada sektor Pajak Mineral bukan logam dan batuan tidak tercapai mengingat proses perluasan salah satu perusahaan yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2019 ternyata tidak selesai sehingga terjadi kemunduran penyelesaian di tahun berikutnya, pada sektor Pajak BPHTB disebabkan transaksi penerimaan potensial di tahun 2019 yang

diproyeksikan akan masuk namun hingga akhir tahun 2019 belum terjadi, dan pada sektor PBB disebabkan masih adanya wajib pajak yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Capaian Retribusi Daerah sebesar **106,67%**, kinerjanya melampaui target sebesar **Rp. 1.170.863.114,-**. Merupakan hasil intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sektor retribusi daerah yang dilakukan oleh OPD pengelola retribusi daerah.
3. Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai **100%**. Hasil audite Independen BUMD.
4. Capaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar **97,56%**. Tidak terlampaui sebesar Rp. 2.761.147.919. Mengingat terdapat kendala penerimaan atas Lain-lain PAD komponen BLUD RSUD Kota Cilegon atas kerjasama dengan BPJS.

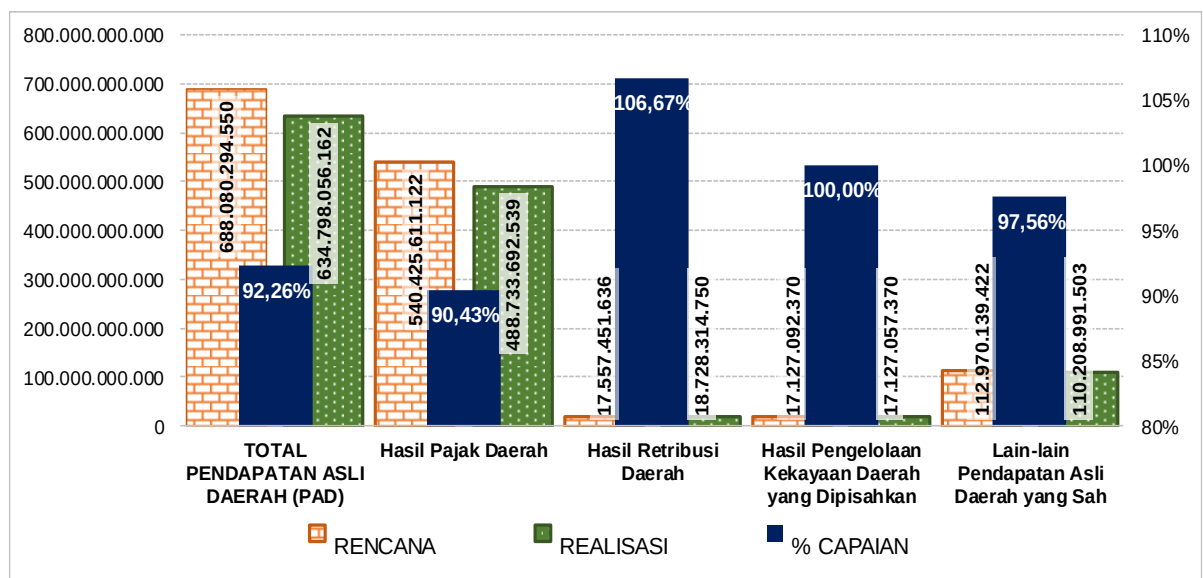
Adapun rincian rencana dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

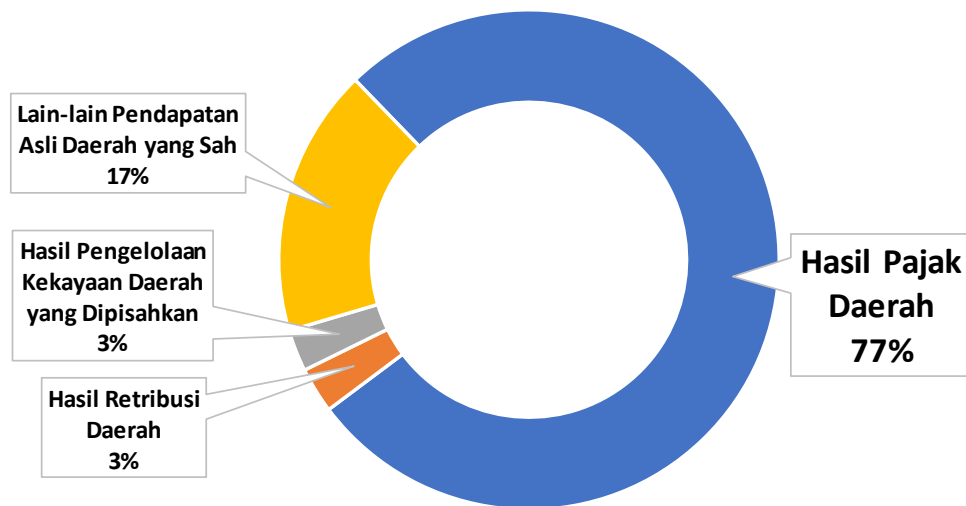
NO.	URAIAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	688.080.294.550	634.798.056.162	92,26%
1	Hasil Pajak Daerah	540.425.611.122	488.733.692.539	90,43%
2	Hasil Retribusi Daerah	17.557.451.636	18.728.314.750	106,67%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.127.092.370	17.127.057.370	100,00%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.970.139.422	110.208.991.503	97,56%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (*Unaudited*)

Gambar 2.2 Capaian Pendapatan Asli Daerah beserta Komponennya



Gambar 2.3 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah



Deskripsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon

1. Hasil Pajak Daerah

Target Pendapatan dari sektor Pajak Daerah Kota Cilegon dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 540.425.611.122,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 488.733.692.539,-** atau mencapai **90,43%** artinya tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebesar **(Rp. 51.691.918.583,-)**. Hal tersebut dipengaruhi dari capaian :

1. Realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan hanya terealisasi sebesar **68,55%** atau tidak terlampaui target sebesar **(Rp. 59.395.892.696,-)**. Tidak tercapainya target BPHTB, hal tersebut dikarenakan transaksi yang potensial/besar yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2019, namun hingga akhir tahun 2019 belum terjadi.
2. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi sebesar **87,58%** tidak terlampaui target sebesar **(Rp. 1.155.293.100,-)**, tidak tercapainya target dikarenakan proses perluasan salah satu perusahaan yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2019 ternyata tidak selesai pada tahun 2019 sehingga mengalami kemunduran penyelesaian di tahun berikutnya.
3. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, dan Perkotaan mencapai **98,18%** atau tidak tercapai sebesar **(Rp. 1.602.987.258,-)**, hal tersebut dikarenakan terdapat wajib pajak yang menunggak.
4. Realisasi Pajak Penerangan Jalan mencapai **100,09%** atau melampaui target sebesar **Rp. 190.428.545,-**,

5. Realisasi Pajak Reklame mencapai **150,15%** atau melampaui target sebesar **Rp. 631.936.109,-**,
6. Realisasi Pajak Air Tanah mencapai **105,00%** atau melampaui target sebesar **Rp. 75.066.769,-**,
7. Realisasi Pajak Hotel mencapai **107,92%** atau melampaui target sebesar **Rp. 826.118.434,-**,
8. Realisasi Pajak Restoran mencapai **129,12%** atau melampaui target sebesar **Rp. 7.243.241.400,-**,
9. Realisasi Pajak Hiburan mencapai **117,94%** atau melampaui target sebesar **Rp. 708.955.910,-**,
10. Realisasi Pajak Parkir mencapai **130,74%** atau melampaui target sebesar **Rp. 522.628.156,-**.

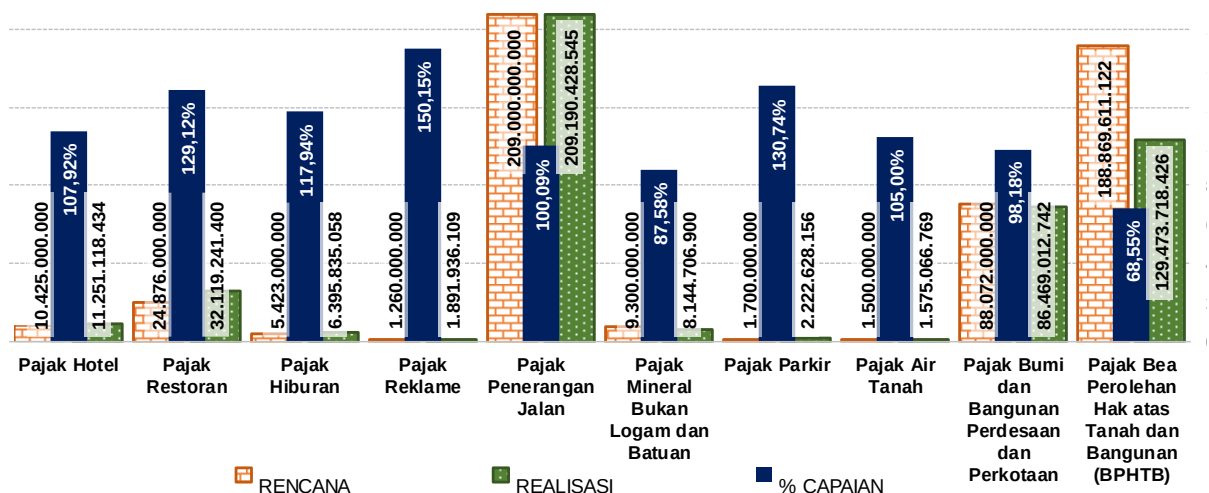
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan dari sektor Pajak Daerah sebagai berikut :

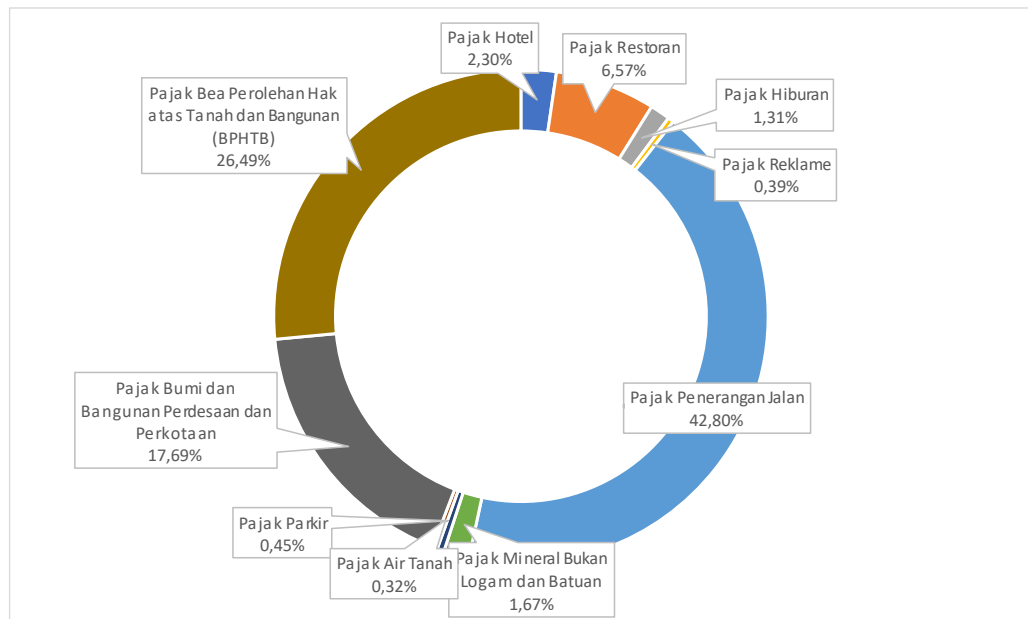
Tabel 2.6 Rencana dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
	HASIL PAJAK DAERAH	540.425.611.122	488.733.692.539	90,43%
1	Pajak Hotel	10.425.000.000	11.251.118.434	107,92%
2	Pajak Restoran	24.876.000.000	32.119.241.400	129,12%
3	Pajak Hiburan	5.423.000.000	6.395.835.058	117,94%
4	Pajak Reklame	1.260.000.000	1.891.936.109	150,15%
5	Pajak Penerangan Jalan	209.000.000.000	209.190.428.545	100,09%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.300.000.000	8.144.706.900	87,58%
7	Pajak Parkir	1.700.000.000	2.222.628.156	130,74%
8	Pajak Air Tanah	1.500.000.000	1.575.066.769	105,00%
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	88.072.000.000	86.469.012.742	98,18%
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	188.869.611.122	129.473.718.426	68,55%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019(Unaudited)

Gambar 2.4 Capaian Komponen Pendapatan Pajak Daerah



Gambar 2.5 Kontribusi Realisasi Pajak Daerah

2. Hasil Retribusi Daerah

Target pendapatan dari sektor Retribusi Daerah Kota Cilegon dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 17.557.451.636,-** dengan realisasi sebelum audit oleh BPK-RI sebesar **Rp. 18.728.314.750,-** atau mencapai **106,67%**, yang bersumber dari komponen Retribusi Daerah :

1. Capaian Retribusi Jasa Umum sebesar **95,31%**, tidak terlampaui sebesar (**Rp. 172.861.636,-**) atau terealisasi sebesar **Rp. 3.511.890.000,-** dari target sebesar **Rp. 3.684.751.636,-**. Hal tersebut dipengaruhi dari :
 - Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai **121,32%** atau melampaui target sebesar **Rp. 255.871.000,-**, mengingat terdapat pencairan Dana JKN atas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kota Cilegon.
 - Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar mencapai **119,77%** atau melampaui target sebesar **Rp. 115.054.000,-**, sesuai dengan potensi penerimaan tahun 2019.
 - Realisasi Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran mencapai **114,40%** atau melampaui target sebesar **Rp. 10.082.000,-**.

Namun terdapat beberapa sektor yang tidak melampaui target diantaranya :

- Pada Tahun Anggaran 2019 Retribusi Pelayanan Parkir tidak terealisasi dikarenakan pungutan retribusi parkir dihentikan.
- Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan mencapai **84,88%** atau tidak terlampaui sebesar (**Rp. 147.057.582,-**), hal ini terjadi akibat

berkurangnya pembayaran retribusi dari wajib retribusi sampaj yang berasal dari sumber industri akibat pelarangan pembuangan sampahnya ke TPSA Bagendung selama 2 bulan (bulan Agustus dan September 2019) akibat adanya kebakaran TPSA Bagendung.

- Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai **Rp. 453.473.000,-** atau **98,52%** pencapaian PAD itu melebihi dari target tahun 2018 sebesar **Rp. 408.017.500,-** meski belum mencapai target 100% dari PAD yang ditetapkan yakni sebesar **Rp. 460.284.054,-** tetapi sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya, kedepan mudah-mudahan bisa mencapai target 100%.
- 2. Capaian Retribusi Jasa Usaha mencapai **114,78%** atau melampaui target sebesar **Rp. 268.944.600** dari target sebesar **Rp. 1.819.700.000,-** dengan total penerimaan sebesar **Rp. 2.088.644.600,-**. Adapun komponen yang mempengaruhi realisasi tersebut adalah :
 - Realisasi Retribusi Terminal mencapai **90,38%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 6.418.000,-)**. Mengingat terdapat kendala baik dari aspek petugas, pedagang, peraturan, fasilitas, dan karakteristik tertentu yang ada di Terminal Seruni.

Dan terdapat beberapa sektor Retribusi Daerah Jasa Umum yang mengalami Melampaui target diantaranya :

- Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mencapai **116,41%** atau melampaui target sebesar **Rp. 275.302.600,-**. Hal tersebut dipengaruhi dari capaian pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola beberapa OPD diantaranya :
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon dengan capaian penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah mencapai **105%** melampaui target sebesar **Rp. 7.990.000,-**
 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan capaian penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah mencapai **86,36%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 58.249.800,-)**.
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal pengelolaan Retribusi Kekayaan Daerah mencapai **129,60%** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.425.562.400,-** dari target sebesar **Rp. 1.100.000.000,-**.
- Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan, mencapai **100,08%** atau melampaui target sebesar **Rp. 60.000,-**. Atas pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh OPD pengelola.
- 3. Capaian **Retribusi Perizinan Tertentu** mencapai **108,92%** melampaui target sebesar **Rp. 1.074.780.150,-** dari target sebesar **Rp. 12.053.000.000,-**

dengan total penerimaan sebesar **Rp. 13.127.780.150,-**. Adapun komponen yang mempengaruhi capaian retribusi perizinan tertentu yakni :

- Realisasi capaian pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mencapai **101,95%** atau melampaui target sebesar **Rp. 155.919.450,-**.
- Realisasi pada Retribusi IMTA mencapai **123,47%** atau melampaui target sebesar **Rp. 938.615.600,-**. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 569/424/SJ tentang penerimaan daerah yang bersumber dari pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Sehingga Dana Kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DPTKA) Masih dapat di pungut Oleh Kota Cilegon.

Namun terdapat sektor retribusi perizinan tertentu yang tidak melampaui target yakni :

- Realisasi Retribusi Izin Trayek dengan capaian **62,73%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 19.754.900,-)** mengingat kurangnya kesadaran dari wajib retribusi (angkutan umum) dalam melaksanakan kewajiban membayar Retribusi Izin Trayek.

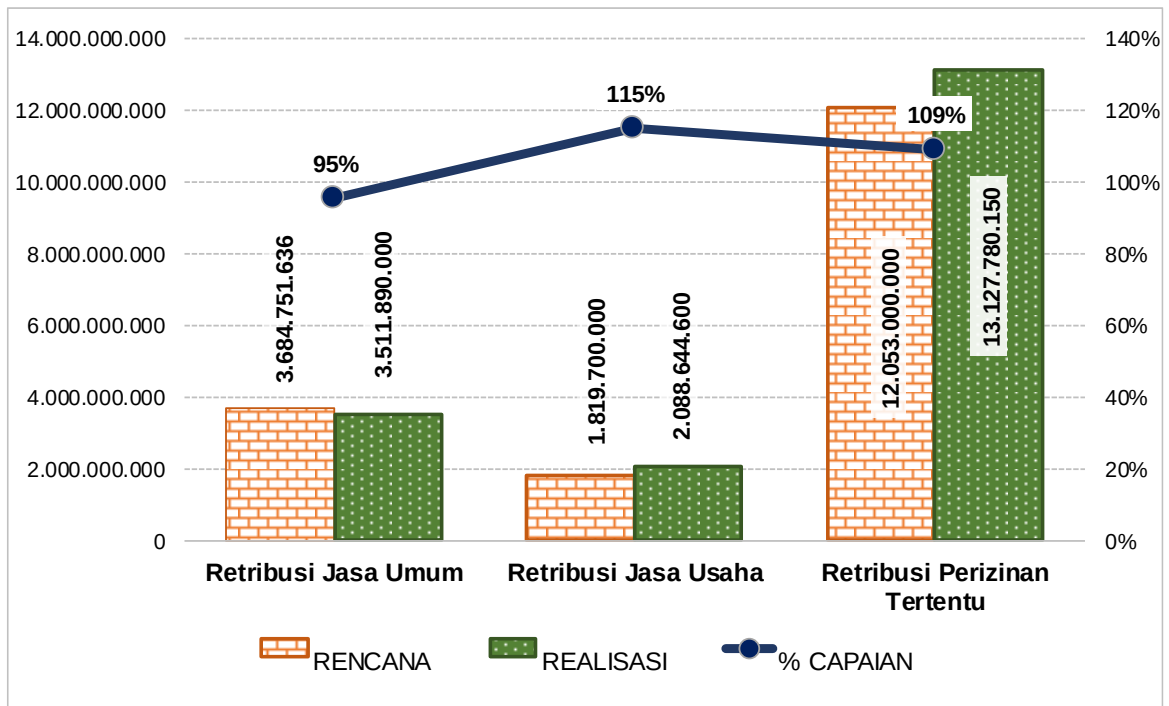
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor retribusi daerah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Rencana dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kota Cilegon Tahun 2019

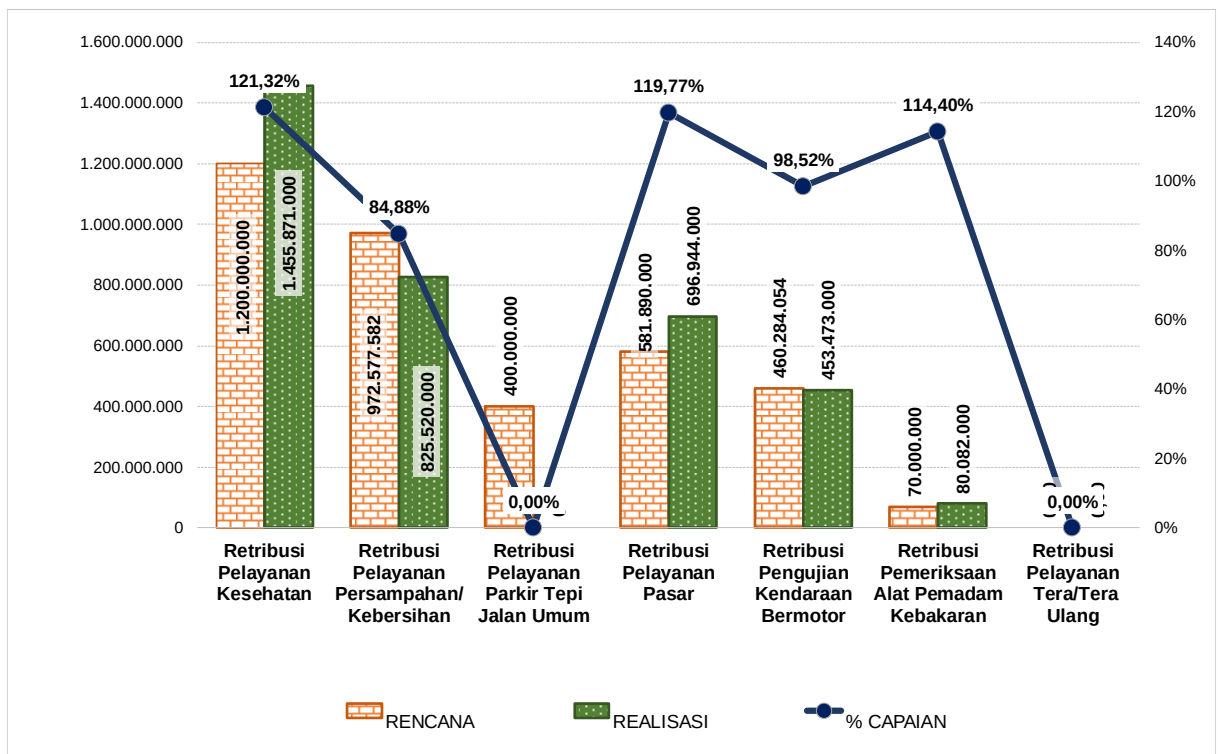
NO.	URAIAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
	HASIL RETRIBUSI DAERAH	17.557.451.636	18.728.314.750	106,67%
1	TOTAL RETRIBUSI JASA UMUM	3.684.751.636	3.511.890.000	95,31%
1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.200.000.000	1.455.871.000	121,32%
1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	972.577.582	825.520.000	84,88%
1.3	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	400.000.000	0	0,00%
1.4	Retribusi Pelayanan Pasar	581.890.000	696.944.000	119,77%
1.5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	460.284.054	453.473.000	98,52%
1.6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	70.000.000	80.082.000	114,40%
1.7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00%
2	TOTAL RETRIBUSI JASA USAHA	1.819.700.000	2.088.644.600	114,78%
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.677.200.000	1.952.502.600	116,41%
2.2	Retribusi Terminal	66.700.000	60.282.000	90,38%
2.4	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.800.000	75.860.000	100,08%
3	TOTAL RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	12.053.000.000	13.127.780.150	108,92%
3.1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000	8.155.919.450	101,95%
3.3	Retribusi Izin Trayek	53.000.000	33.245.100	62,73%
3.4	Retribusi IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing)	4.000.000.000	4.938.615.600	123,47%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited)

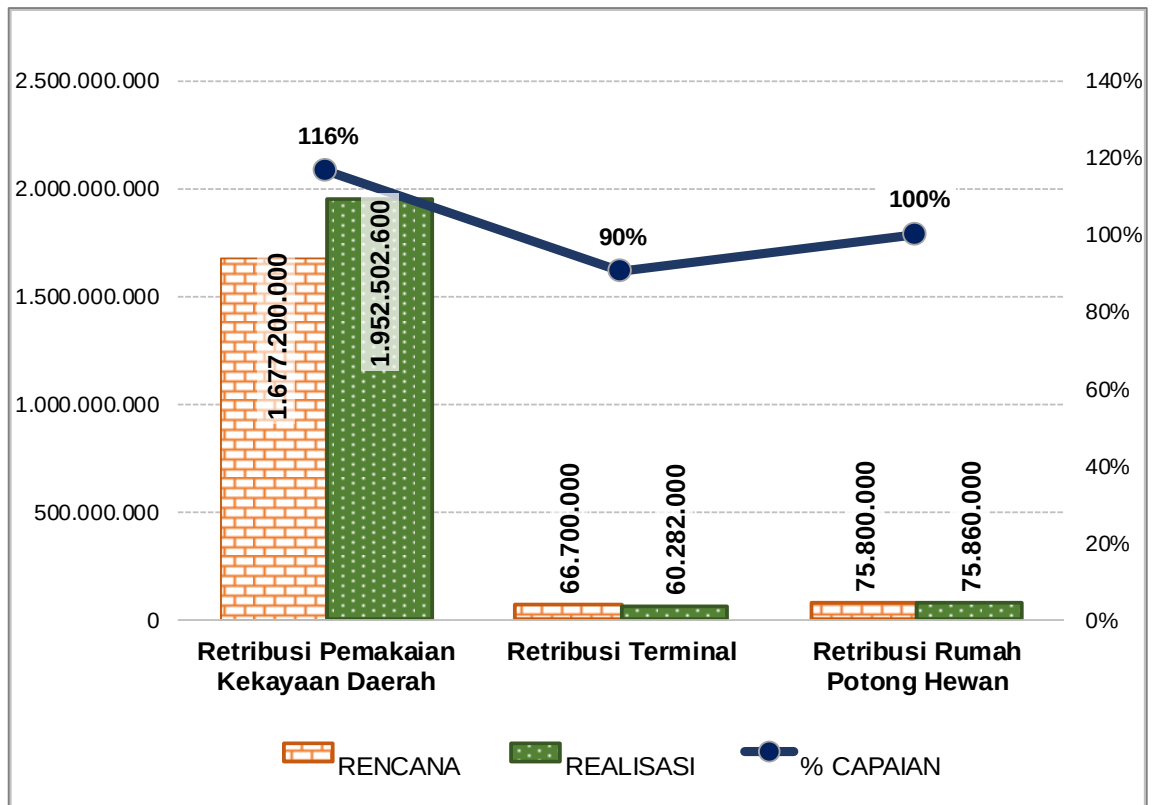
Gambar 2.6 Capaian Komponen Retribusi Daerah Tahun 2019



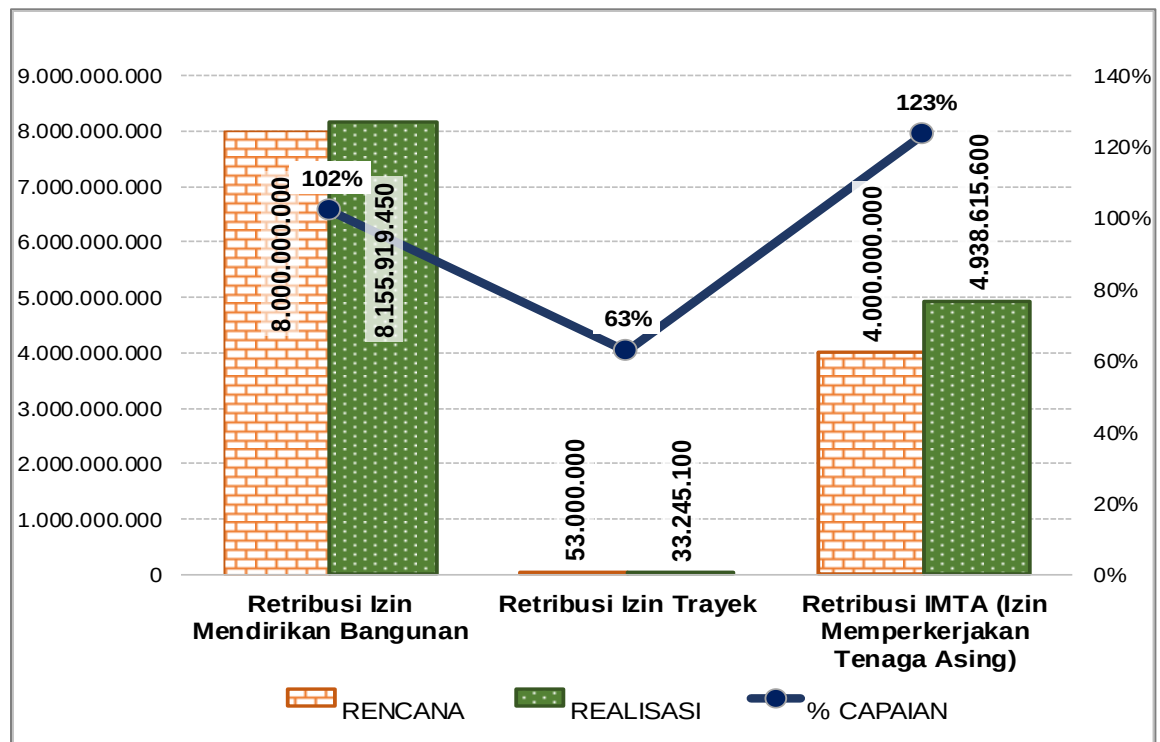
Gambar 2.7 Capaian Retribusi Jasa Umum



Gambar 2.8 Capaian Retribusi Jasa Usaha



Gambar 2.9 Capaian Retribusi Perizinan Tertentu



3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dengan penerimaan mencapai **100,00%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 17.127.092.370,-** adapun realisasi sebesar **Rp. 17.127.057.370,-** tersebut merupakan hasil audit independen masing-masing BUMD Kota Cilegon.

- **Bank Jabar Banten Cabang Kota Cilegon** pada tahun anggaran 2019 memiliki total sektor modal (modal disetor + Agio) sebesar **Rp. 19.499.998.200,-** dengan jumlah deviden kepada Pemerintah Daerah Kota Cilegon sebesar **Rp. 5.420.463.073,-** dengan lembar saham sebanyak **60.631.578**.
- Realisasi Bagi Hasil Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah **PT. BPRS Cilegon Mandiri** telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 621.743.186,-** atau **100%** adapun realisasi tersebut berdasarkan keputusan RUPS nomor 72 tanggal 09 April 2019.
- **PDAM Cilegon Mandiri** memperoleh laba tahun anggaran 2019 sebesar **Rp. 6.909.933.161,-** dari proyeksi anggaran perusahaan sebesar **Rp. 6.145.651.000,-** atau terealisasi sebesar **112%**. Untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar **50%** atas laporan laba rugi tahun anggaran 2019 yakni sebesar **Rp. 3.454.966.581,-** dari target Proyeksi RPJMD sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** sehingga hasil pencapaian terealisasi sebesar **115%**.
- **Laba PT. PCM** dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4%. PT. PCM telah menyetorkan PAD tahun anggaran 2019 ke Kas Umum Daerah Kota Cilegon senilai **Rp. 7.510.816.736,-**, dengan 3 tahap penyetoran, namun terdapat kurang bayar sebesar **Rp. 35.000,-** merupakan potongan administrasi dari pihak Bank berupa beban RTGS, namun di tahun 2020 pihak Bank terkait telah menyetorkan sejumlah **Rp. 35.000,-** ke Kas Daerah Kota Cilegon.

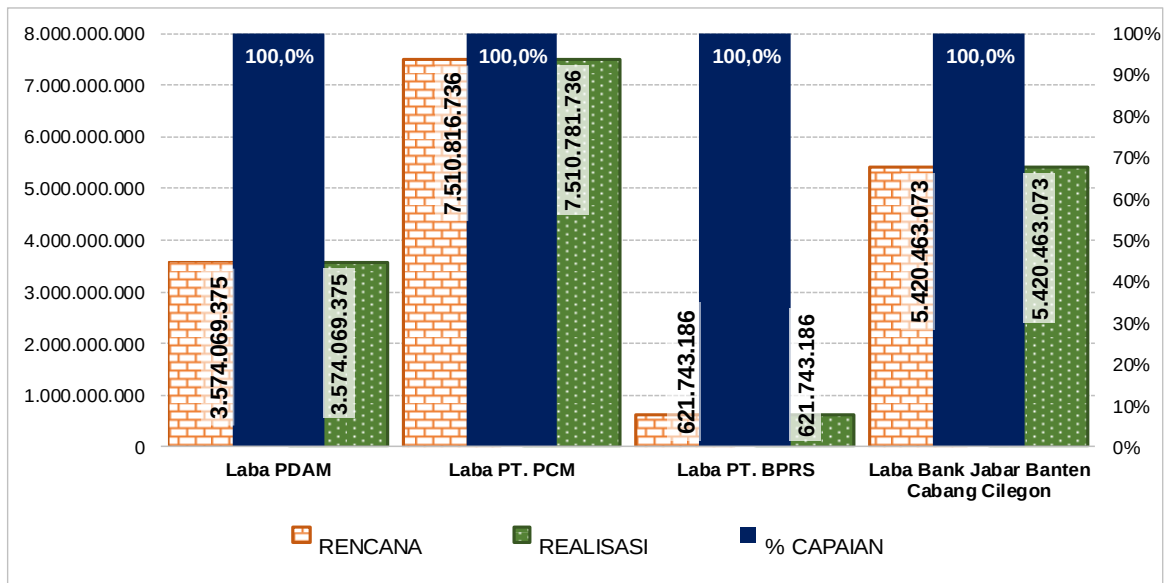
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut :

Tabel 2.8 Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
		RENCANA	REALISASI	(%)
	TOTAL HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	17.127.092.370	17.127.057.370	100,0%
1	Laba PDAM	3.574.069.375	3.574.069.375	100,0%
2	Laba PT. PCM	7.510.816.736	7.510.781.736	100,0%
3	Laba PT. BPRS	621.743.186	621.743.186	100,0%
4	Laba Bank Jabar Banten Cabang Cilegon	5.420.463.073	5.420.463.073	100,0%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019(Unaudited)

Gambar 2.10 Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, capaian realisasi penerimaan mencapai **97,56%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 2.761.147.919,-)** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 112.970.139.422,-** dengan total penerimaan sebesar **Rp. 110.208.991.503,-** Hal tersebut dipengaruhi atas capaian realisasi beberapa sektro lain-lain PAD yang sah, diantaranya:

- Capaian sektor Lain-lain PAD yang sah pada Komponen BLUD PEM mencapai **100,58%** atau melampaui target sebesar **Rp. 18.509.902,-** dari target sebesar **Rp. 3.192.139.500,-** yang berasal dari beberapa sumber pendapatan, secara rinci sebagai berikut :
 1. Jasa Layanan sebesar **Rp. 106.132.600,-**.
 2. Jasa Bank sebesar **Rp. 53.924.357,-**.
 3. Pendapatan Produk Input sebesar **Rp. 3.039.492.445,-**.
 4. Pendapatan Lain-lain sebesar **Rp. 11.100.000,-**.
- Realisasi atas komponen Bunga Deposito Bjb telah mencapai target sebesar **106,55%** atau melampaui target sebesar **Rp. 802.573.226,-**, mengingat di akhir tahun 2019 pembiayaan belanja daerah tidak dapat terakomodir oleh Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Transfer Pusat, maka penerimaan atas Bunga deposito Bjb semakin tinggi.
- Realisasi dana kapitasi penerimaan atas JKN mencapai **105,59%** hal tersebut sesuai dengan alokasi transfer yang dilakukan oleh kementrian terkait.



BAB II - KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Realisasi Pendapatan atas Denda Pajak Daerah mencapai **231,20%** melampaui target sebesar **Rp. 1.010.878.336,-**.
- Adanya komponen Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebesar **Rp. 826.967.520,-** yang tidak terproyeksikan sebagai target pendapatan daerah. Namun dalam kurun waktu 3 bulan terakhir di tahun 2019 terjadi transaksi atas komponen pendapatan tersebut.

Namun terdapat beberapa sektor Lain-lain PAD yang sah yang tidak melampaui target, diantaranya :

- Realisasi Capaian Lain-lain PAD yang Sah komponen BLUD RSUD Cilegon mencapai **94,63%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 4.184.975.742,-)**, mengingat adanya piutang yang ditimbulkan oleh pihak BPJS selama 3 (tiga) bulan periode bulan Oktober, November, dan Desember 2019.
- Rendahnya penerimaan Jasa Giro Kas Daerah mencapai **78,41%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 473.090.414,-)**.
- Realisasi penerimaan atas Pendapatan Sewa Cicilan Kios di tahun 2019 hanya mencapai **10,06%** itu berarti hanya terealisasi sebesar **Rp. 105.412.878,-** dari target yang telah ditentukan sebesar **Rp. 1.047.733.212,-** dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat pedagang dalam membayar angsuran kurang, akibatnya mereka mengosongkan lapaknya dan memilih untuk berdagang di luar.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Rencana dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

URAIAN PENERIMAAN	ANGGARAN APBD TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	%
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	112,970,139,422	110,208,991,503	97.56%
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0	826,967,520	
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Dipakai	0	63,099,999	
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0	120,486,867	
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0	593,499,774	
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Tiga	0	8,880,880	
Penjualan Tanah Galian	0	41,000,000	
Penerimaan Jasa Giro	2,191,118,256	1,718,027,842	78.41%
Jasa Giro Kas Daerah	2,191,118,256	1,718,027,842	78.41%
Pendapatan Bunga Deposito	12,250,000,000	13,052,573,226	106.55%
Rekening Deposito pada Bank Jabar	12,250,000,000	13,052,573,226	106.55%
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17,340,372	197,356,422	1138.13%

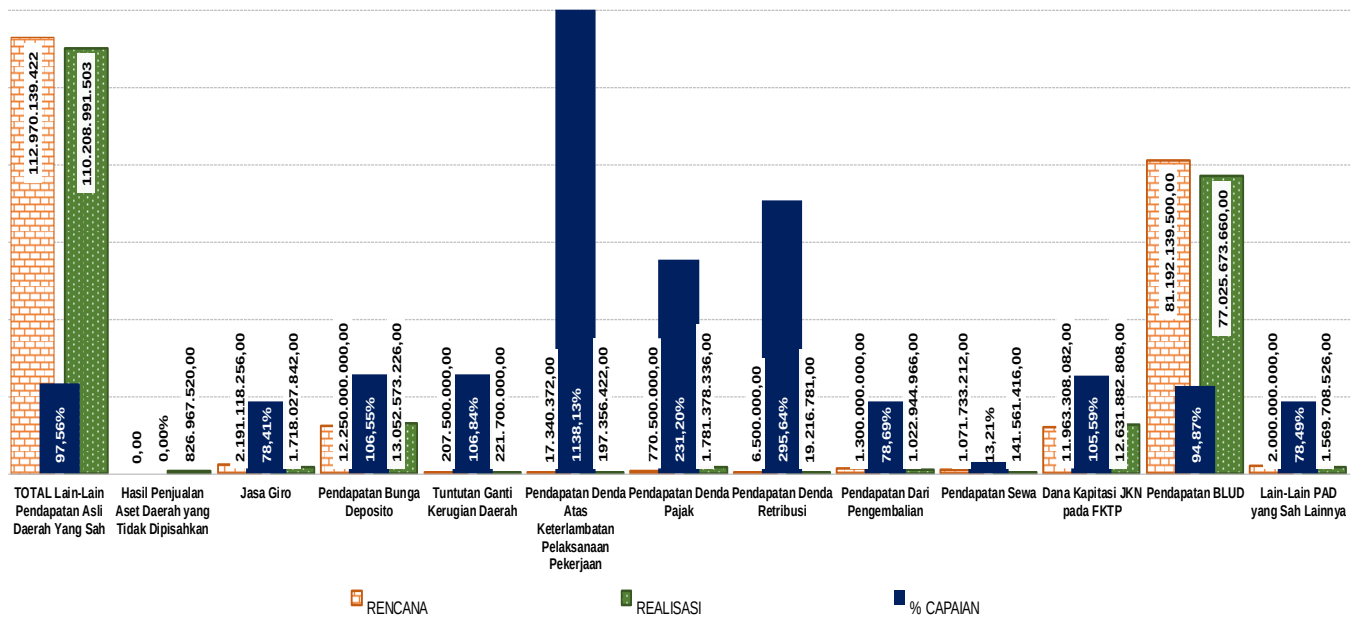


BAB II - KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

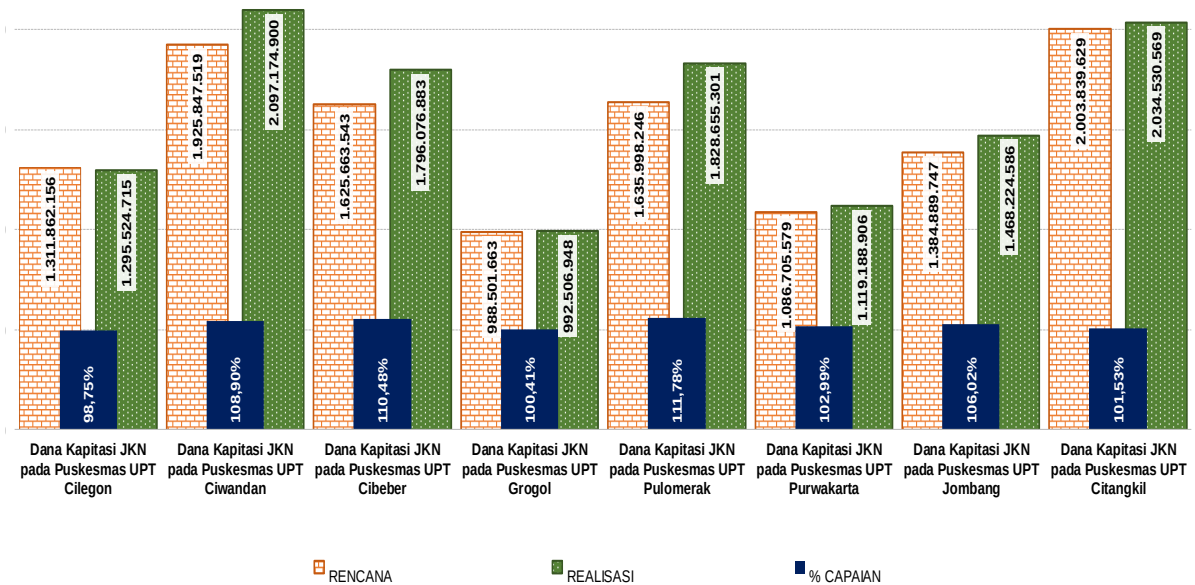
URAIAN PENERIMAAN	ANGGARAN APBD TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	%
Bidang Pendidikan	0	121,533,375	#DIV/0!
Bidang Kesehatan	0	35,161,492	#DIV/0!
Bidang Pekerjaan Umum	6,812,622	10,354,677	151.99%
Bidang Perumahan Rakyat	10,527,750	21,383,210	203.11%
Bidang Lingkungan Hidup	0	8,923,668	#DIV/0!
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	207,500,000	221,700,000	106.84%
Kerugian Uang Daerah	0	0	#DIV/0!
Kerugian Barang Daerah	207,500,000	221,700,000	106.84%
Pendapatan Denda Pajak	770,500,000	1,781,378,336	231.20%
Pendapatan Denda Pajak Hotel	40,000,000	56,032,805	140.08%
Pendapatan Denda Pajak Restoran	40,000,000	89,451,406	223.63%
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	3,000,000	2,703,337	90.11%
Pendapatan Denda Pajak Reklame	75,000,000	108,798,930	145.07%
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	300,000	4,604	1.53%
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5,000,000	48,370,724	967.41%
Pendapatan Denda Parkir	5,000,000	6,643,129	132.86%
Pendapatan Denda Air Tanah	2,200,000	909,179	41.33%
Pendapatan Denda PBB Perdesaan dan Perkotaan	600,000,000	1,468,464,222	244.74%
Pendapatan Denda Retribusi	6,500,000	19,216,781	295.64%
Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Denda Retribusi Kekayaan Daerah	4,500,000	6,279,688	139.55%
Pendapatan Denda Retribusi IMB	2,000,000	12,937,093	646.85%
Pendapatan dari Pengembalian	1,300,000,000	1,022,944,966	78.69%
Pendapatan dari Pengembalian Temuan	1,300,000,000	1,022,944,966	78.69%
Pendapatan Sewa	1,071,733,212	141,561,416	13.21%
Cicilan Kios	1,047,733,212	105,412,878	10.06%
MCK Umum	24,000,000	36,148,538	150.62%
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11,963,308,082	12,631,882,808	105.59%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cilegon	1,311,862,156	1,295,524,715	98.75%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Ciwandan	1,925,847,519	2,097,174,900	108.90%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cibeber	1,625,663,543	1,796,076,883	110.48%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Grogol	988,501,663	992,506,948	100.41%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Pulomerak	1,635,998,246	1,828,655,301	111.78%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Purwakarta	1,086,705,579	1,119,188,906	102.99%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Jombang	1,384,889,747	1,468,224,586	106.02%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Citangkil	2,003,839,629	2,034,530,569	101.53%
Pendapatan BLUD	81,192,139,500	77,025,673,660	94.87%
Pendapatan BLUD - RSUD	78,000,000,000	73,815,024,258	94.63%
Pendapatan BLUD - PDB	3,192,139,500	3,210,649,402	100.58%
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	2,000,000,000	1,569,708,526	78.49%
Lain-Lain PAD yang Sah Lain-lainnya	2,000,000,000	1,569,708,526	78.49%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019(Unaudited)

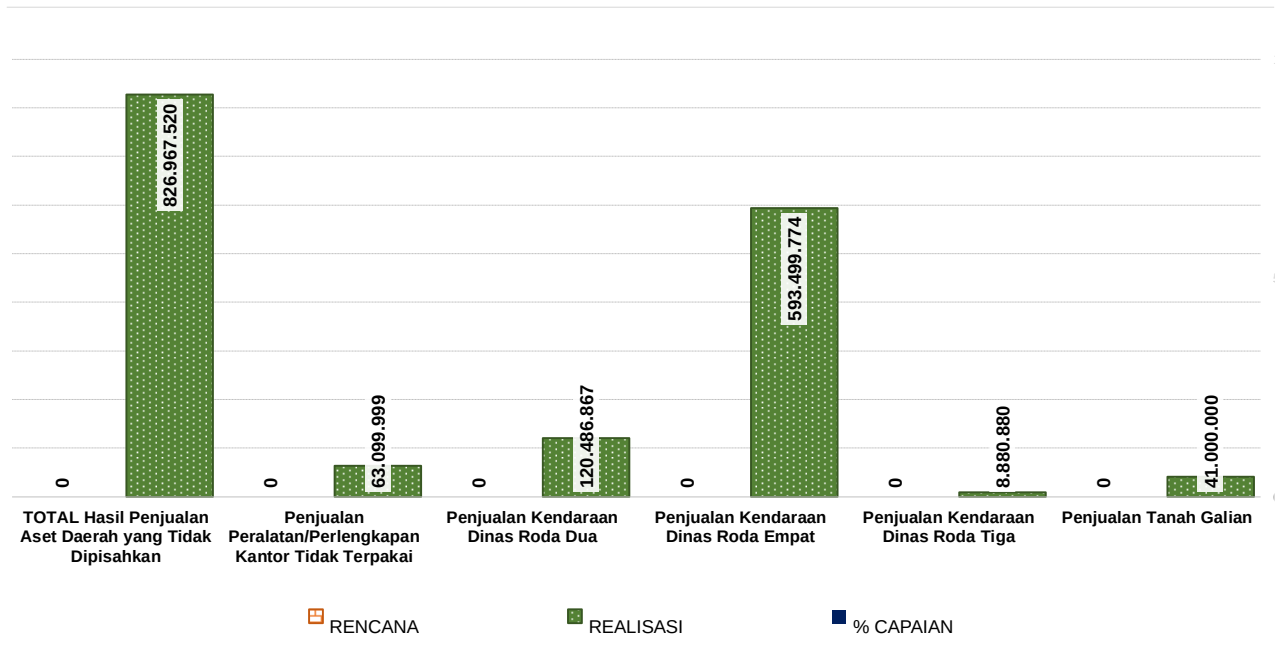
Gambar 2.10a Realisasi Komponen Lain-lain PAD yang Sah



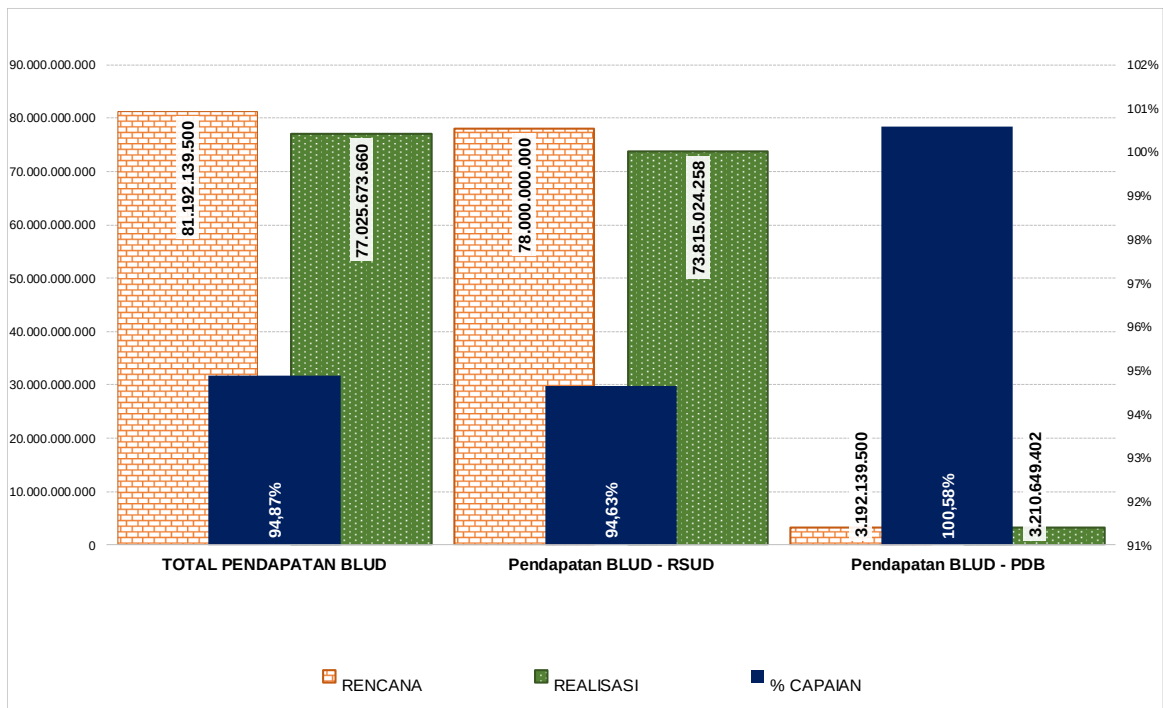
Gambar 2.10b Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP



Gambar 2.10c Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan



Gambar 2.10d Realisasi Total Pendapatan BLUD



B. DANA PERIMBANGAN

Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2019 dari Dana Perimbangan mencapai **95,00%** atau sebesar **Rp. 866.731.464.020,-** artinya terdapat deviasi **5,00%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 912.378.533.000,-**. Yang bersumber dari komponen :

1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar **74,67%** atau terealisasi sebesar **Rp. 98.126.631.451,-**. Dari target sebesar **Rp. 131.420.440.000,-**. Capaian tersebut berdasarkan pada aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 180/PMK.07/2019 tentang perubahan rincian DBH dan penyaluran DBH Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2019 tidak di transfer.
2. Realisasi Dana Alokasi Umum mencapai **100,00%** dari target sebesar **Rp. 643.891.037.000,-**.
3. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai **90,99%** atau tidak terlampaui sebesar **Rp. 12.353.260.431,-** dari target sebesar **Rp. 137.067.056.000,-**. Adapun secara rinci DAK Fisik mencapai **84,25%** sesuai dengan PMK Nomor 121/PMK.07/2018, bahwa transfer DAK Fisik adalah sesuai data kontrak yang disampaikan ke Kementerian Keuangan pada tanggal 21 Juli 2019. Sedangkan DAK Non Fisik mencapai **94,31%** namun pada dasarnya DAK Non Fisik terealisasi 100% akan tetapi terdapat silpa tahun 2018 mengurangi transfer pada tahun 2019.

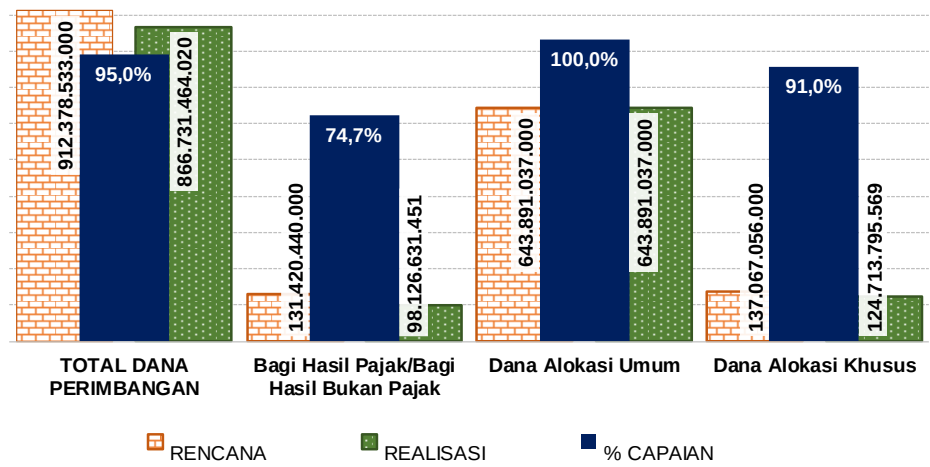
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Dana Perimbangan sebagai berikut :

Tabel 2.10 Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
		RENCANA	REALISASI	(%)
	TOTAL DANA PERIMBANGAN	912.378.533.000	866.731.464.020	95,0%
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	131.420.440.000	98.126.631.451	74,7%
2	Dana Alokasi Umum	643.891.037.000	643.891.037.000	100,0%
3	Dana Alokasi Khusus	137.067.056.000	124.713.795.569	91,0%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019(*Unaudited*)

Gambar 2.11 Capaian Komponen Dana Perimbangan



1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Realisasi penerimaan dari komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak hanya mencapai **74,67%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 33.293.808.549,-)** dari target sebesar **Rp. 131.420.440.000,-** dengan total realisasi sebesar **Rp. 98.126.631.451,-** yang terdiri dari:

1. Bagi Hasil Pajak mencapai **74,66%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 32.762.446.039,-)** dari target sebesar **Rp. 129.306.337.000,-** adapun yang mempengaruhi dari:
 - a. komponen Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mencapai **94,19%** dari target sebesar **Rp. 5.005.059.000,-**,
 - b. komponen Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Psl 25, Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Psl 21 hanya mencapai **73,88%** dari target sebesar **Rp. 124.301.278.000,-**.
2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mencapai **74,87%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 531.362.510,-)** dari target sebesar **Rp. 2.114.103.000,-** capaian tersebut dipengaruhi dari penerimaan komponen :
 - a. DBH dari Provisi Sumber Daya Hutan mencapai **158,10%** melampaui target sebesar **Rp. 31.331.299,-**,
 - b. DBH dari Pertambangan Panas Bumi Iuran Tetap mencapai **96,19%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 5.449.485,-)**.
 - c. DBH dari Sumber Daya Perikanan mencapai **70,08%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 294.252.529,-)**.
 - d. DBH dari Hasil SDA Pertambangan Umum mencapai **71,83%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 262.991.795,-)**.

3. Alokasi tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Tahun Anggaran 2019 tentang Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2019
4. Adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 180/PMK.07/2019 tentang perubahan rincian DBH dan penyaluran DBH Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 (tidak di transfer).

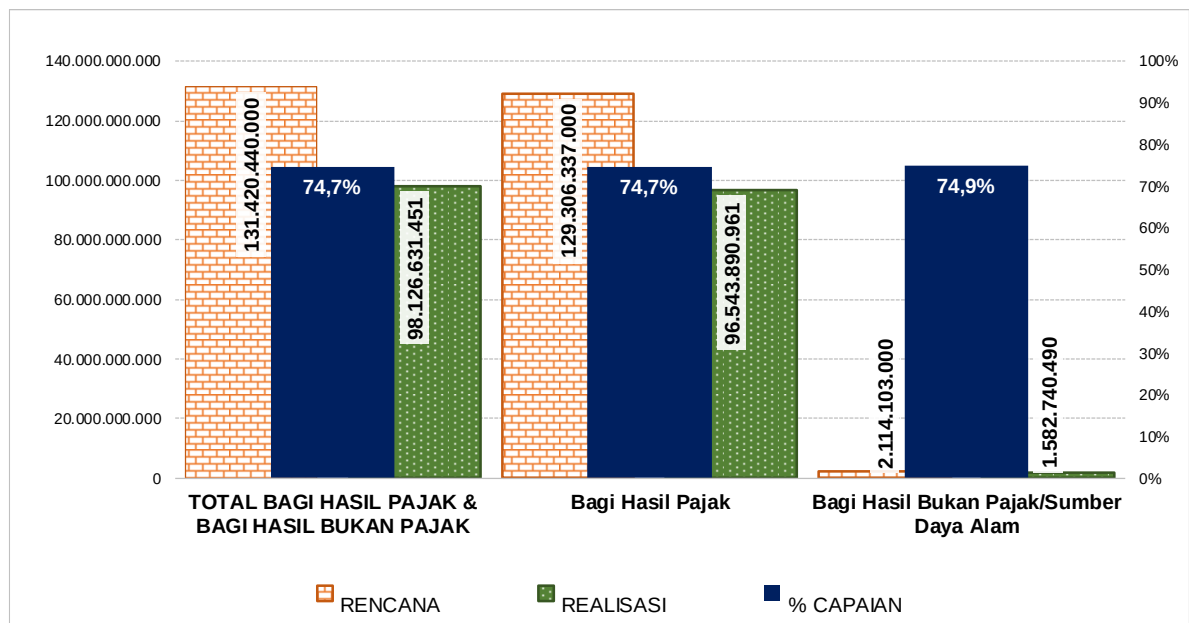
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebagai berikut :

Tabel 2.11 Rencana dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

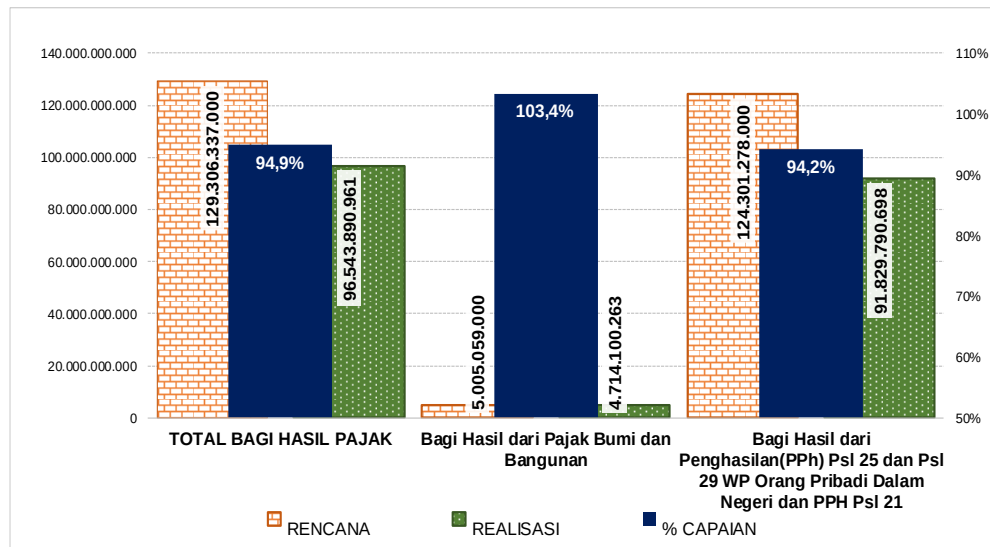
No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
		RENCANA	REALISASI	(%)
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	131.420.440.000	98.126.631.451	74,7%
1.	TOTAL BAGI HASIL PAJAK	129.306.337.000	96.543.890.961	94,9%
1.1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5.005.059.000	4.714.100.263	103,4%
1.2	Bagi Hasil dari Penghasilan(PPh) Ps1 25 dan Ps1 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Ps1 21	124.301.278.000	91.829.790.698	94,2%
2.	TOTAL BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM)	2.114.103.000	1.582.740.490	76,2%
2.1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	53.924.000	85.255.299	92,1%
2.2	Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Iuran Tetap	142.903.000	137.453.515	245,7%
2.3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	983.593.000	689.340.471	41,5%
2.4	Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum (Royalti)	933.683.000	670.691.205	115,7%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019(Unaudited)

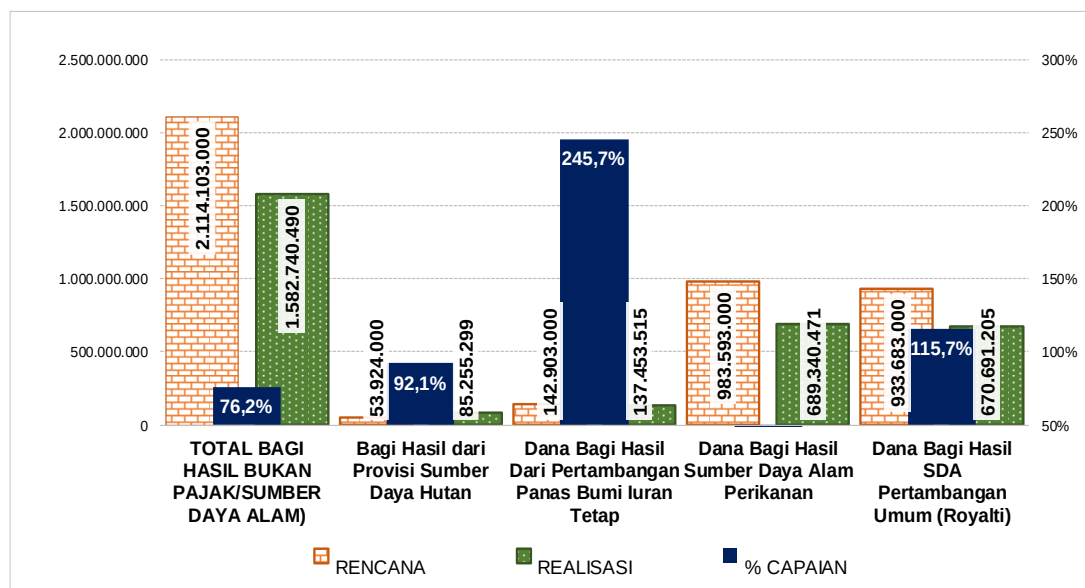
Gambar 2.12 Target & Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak



Gambar 2.13a Target dan Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak



Gambar 2.13b Target dan Realisasi Komponen Bagi Hasil Bukan Pajak



2. Dana Alokasi Umum

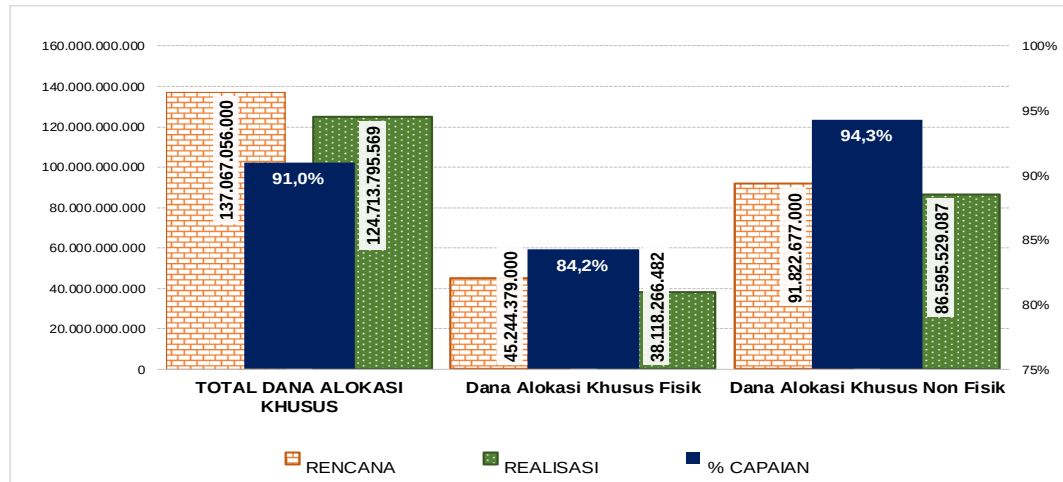
Dana Alokasi Umum terealisasi 100% dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. 643.891.037.000,-.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi Khusus terealisasi sebesar **90,99%** atau sebesar **Rp.**

124.713.795.569,- dari target sebesar **Rp. 137.067.056.000,-**. Dikarenakan transaksi DAK Fisik sesuai dengan data kontrak yang disampaikan pada tanggal 21 Juli 2019 ke Kementerian Keuangan.

Gambar 2.14 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus



C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, realisasi penerimaannya mencapai **94,47%** atau sebesar **Rp. 265.451.039.293,-** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 280.990.777.925,-** yang bersumber dari komponen :

- a. Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS mencapai **97,71%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 910.234.587,-)** dari target sebesar **Rp. 39.774.000.000,-** berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2019.
- b. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya mencapai **91,29%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 14.629.504.045,-)** dari target sebesar **Rp. 168.049.961.925,-**, capaian tersebut dipengaruhi dari komponen sebagai berikut :
 - a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor mencapai **92,43%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 3.029.727.672,-)**
 - b. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai **77,01%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 9.036.759.251,-)**.
 - c. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mencapai **97,44%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 1.546.371.271,-)**.

- d. Bagi Hasil dari Pajak Rokok mencapai **96,42%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 1.016.645.851,-)**.
- c. Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus komponen Dana Insentif Daerah (DID) mencapai **100,00%** dari target sebesar **Rp. 33.168.816.000,-**
- d. Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten mencapai **100,00%** dari target sebesar **Rp. 40.000.000.000,-**.

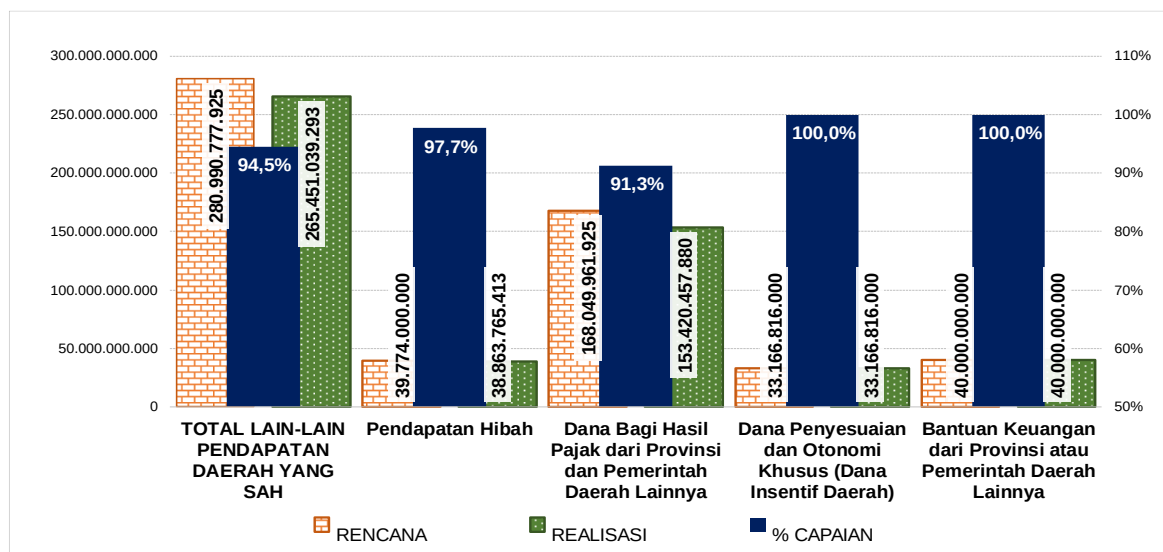
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut :

Tabel 2.12 Rencana dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

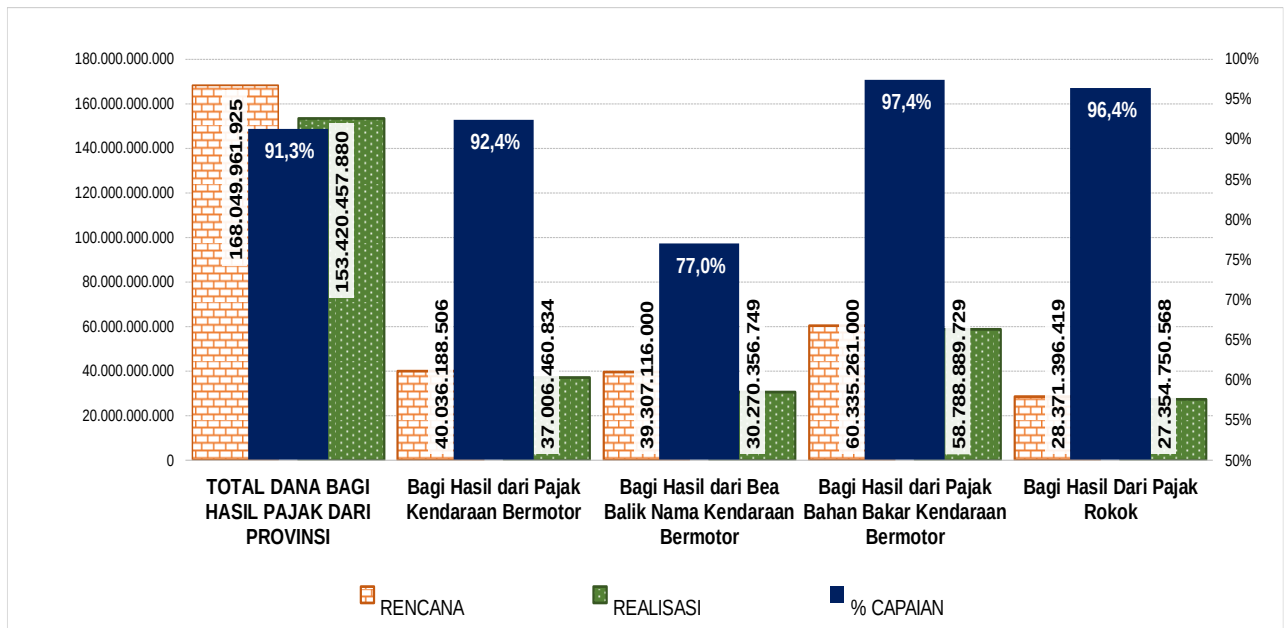
No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
		RENCANA	REALISASI	(%)
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	280.990.777.925	265.451.039.293	94,5%
1.	Pendapatan Hibah	39.774.000.000	38.863.765.413	97,7%
2.	TOTAL DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	168.049.961.925	153.420.457.880	91,3%
2.1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	40.036.188.506	37.006.460.834	92,4%
2.2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	39.307.116.000	30.270.356.749	77,0%
2.3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	60.335.261.000	58.788.889.729	97,4%
2.4	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	28.371.396.419	27.354.750.568	96,4%
3.	TOTAL DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	33.166.816.000	33.166.816.000	100,0%
3.3	Dana Insentif Daerah	33.166.816.000	33.166.816.000	100,0%
4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	40.000.000.000	40.000.000.000	100,0%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019(Unaudited)

Gambar 2.15 Target & Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



Gambar 2.16 Target & Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten



Tabel 2.13 Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

URAIAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	1,881,449,605,475	1,766,980,559,475	93.92%
I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	688,080,294,550	634,798,056,162	92.26%
POS PAJAK DAERAH	540,425,611,122	488,733,692,539	90.43%
Pajak Hotel	10,425,000,000	11,251,118,434	107.92%
Hotel Bintang Empat	5,800,000,000	6,371,081,253	109.85%
Hotel Bintang Tiga	700,000,000	656,066,197	93.72%
Hotel Bintang Dua	3,200,000,000	3,440,687,936	107.52%
Hotel Melati Tiga	500,000,000	567,009,020	113.40%
Hotel Melati Dua	100,000,000	94,710,700	94.71%
Hotel Melati Satu	15,000,000	16,186,500	107.91%
Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel/ Rumah Kos	110,000,000	105,376,828	95.80%
Pajak Restoran	24,876,000,000	32,119,241,400	129.12%
Restoran	15,876,000,000	20,647,917,671	130.06%
Rumah Makan	700,000,000	763,994,173	109.14%
Kafetaria	1,900,000,000	2,563,121,168	134.90%
Kantin	500,000,000	644,162,131	128.83%
Katering	5,900,000,000	7,500,046,257	127.12%
Pajak Hiburan	5,423,000,000	6,395,835,058	117.94%
Tontonan Film/Bioskop	2,550,000,000	3,258,955,910	127.80%
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	10,000,000	0	0.00%
Pameran	2,000,000	0	0.00%
Karaoke	53,000,000	0	0.00%
Sirkus/Akrobat/Sulap	10,000,000	4,336,364	43.36%
Permainan Biliard	88,000,000	100,378,467	114.07%
Permainan Ketangkasan	2,600,000,000	2,922,321,403	112.40%
Mandi Uap/SPA	55,000,000	49,253,095	89.55%



BAB II - KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

URAIAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
Pertandingan Olahraga	55,000,000	60,589,819	110.16%
Pajak Reklame	1,260,000,000	1,891,936,109	150.15%
Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	997,000,000	1,512,692,329	151.72%
Reklame Kain	140,000,000	155,658,780	111.18%
Reklame Melekat / Stiker	7,000,000	6,725,000	96.07%
Reklame Berjalan	5,000,000	1,500,000	30.00%
Reklame Udara	1,000,000	0	0.00%
Reklame Film/Slide	110,000,000	215,360,000	195.78%
Pajak Penerangan Jalan	209,000,000,000	209,190,428,545	100.09%
Pajak Penerangan Jalan PLN	145,000,000,000	134,237,148,294	92.58%
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	64,000,000,000	74,953,280,251	117.11%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9,300,000,000	8,144,706,900	87.58%
Batu Gunung/Batu Belah/Andesit	500,000,000	659,212,600	131.84%
Makadam	300,000,000	385,164,000	128.39%
Pasir/Pasir Kuarsa/Pasir teras	8,500,000,000	7,100,330,300	83.53%
Pajak Parkir	1,700,000,000	2,222,628,156	130.74%
Pajak Parkir	1,700,000,000	2,222,628,156	130.74%
Pajak Air Tanah	1,500,000,000	1,575,066,769	105.00%
Pajak Air Tanah (ABT)	1,500,000,000	1,575,066,769	105.00%
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	88,072,000,000	86,469,012,742	98.18%
Pajak Bumi dan Bangunan	88,072,000,000	86,469,012,742	98.18%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	188,869,611,122	129,473,718,426	68.55%
Pajak BPHTB	188,869,611,122	129,473,718,426	68.55%
HASIL RETRIBUSI DAERAH	17,557,451,636	18,728,314,750	106.67%
Retribusi Jasa Umum	3,684,751,636	3,511,890,000	95.31%
Pelayanan Kesehatan	1,200,000,000	1,455,871,000	121.32%
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	972,577,582	825,520,000	84.88%
Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	400,000,000	0	0.00%
Pelayanan Pasar	581,890,000	696,944,000	119.77%
- Pelayanan Pasar	575,290,000	689,942,000	119.93%
- Pelayanan Pasar (Pasar Hewan)	6,600,000	7,002,000	106.09%
Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	460,284,054	453,473,000	98.52%
Pemeriksaan Alat Damkar	70,000,000	80,082,000	114.40%
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0	0	#DIV/0!
Retribusi Jasa Usaha	1,819,700,000	2,088,644,600	114.78%
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	1,677,200,000	1,952,502,600	116.41%
a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	427,200,000	368,950,200	86.36%
b. DPUTR	150,000,000	157,990,000	105.33%
c. BPKAD	1,100,000,000	1,425,562,400	129.60%
Ret. Terminal	66,700,000	60,282,000	90.38%
Ret. Rumah Potong Hewan	75,800,000	75,860,000	100.08%
Retribusi Perizinan Tertentu	12,053,000,000	13,127,780,150	108.92%
Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	8,000,000,000	8,155,919,450	101.95%
Ret. Izin Trayek	53,000,000	33,245,100	62.73%
Ret. Perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing)	4,000,000,000	4,938,615,600	123.47%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	17,127,092,370	17,127,057,370	100.00%



BAB II - KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

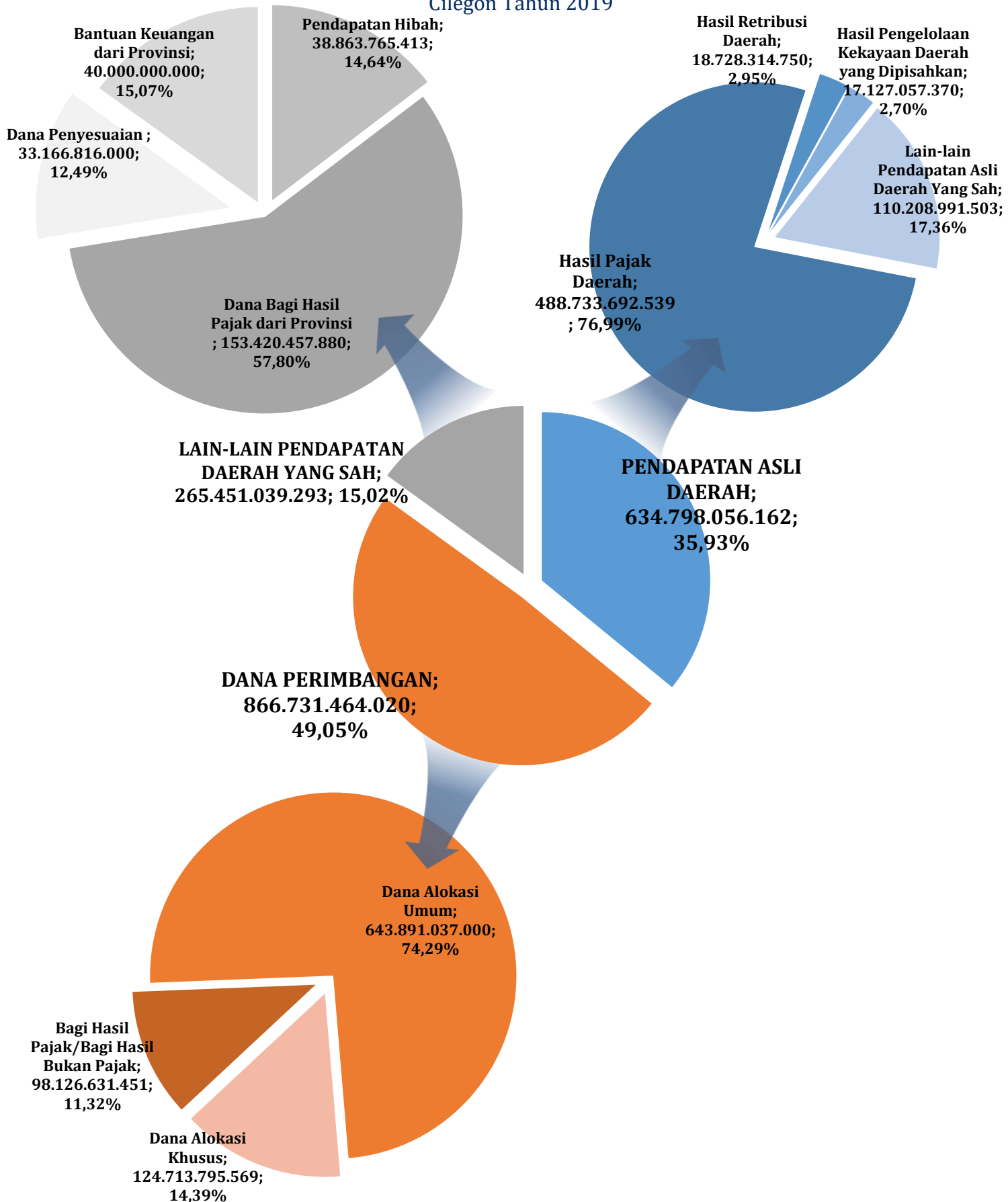
URAIAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
Bagian Laba atas Pernyataan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	17,127,092,370	17,127,057,370	100.00%
Laba Perusahaan PDAM	3,574,069,375	3,574,069,375	100.00%
Laba Perusahaan PD.PCM	7,510,816,736	7,510,781,736	100.00%
Laba Perusahaan PD.BPRS	621,743,186	621,743,186	100.00%
Laba Bank Jabar Banten Cabang Cilegon	5,420,463,073	5,420,463,073	100.00%
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	112,970,139,422	110,208,991,503	97.56%
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0	826,967,520	#DIV/0!
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Dipakai	0	63,099,999	#DIV/0!
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0	120,486,867	#DIV/0!
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0	593,499,774	#DIV/0!
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Tiga	0	8,880,880	#DIV/0!
Penjualan Tanah Galian	0	41,000,000	#DIV/0!
Penerimaan Jasa Giro	2,191,118,256	1,718,027,842	78.41%
Jasa Giro Kas Daerah	2,191,118,256	1,718,027,842	78.41%
Pendapatan Bunga Deposito	12,250,000,000	13,052,573,226	106.55%
Rekening Deposito pada Bank Jabar	12,250,000,000	13,052,573,226	106.55%
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17,340,372	197,356,422	1138.13%
Bidang Pendidikan	0	121,533,375	#DIV/0!
Bidang Kesehatan	0	35,161,492	#DIV/0!
Bidang Pekerjaan Umum	6,812,622	10,354,677	151.99%
Bidang Perumahan Rakyat	10,527,750	21,383,210	203.11%
Bidang Lingkungan Hidup	0	8,923,668	#DIV/0!
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	207,500,000	221,700,000	106.84%
Kerugian Uang Daerah	0	0	#DIV/0!
Kerugian Barang Daerah	207,500,000	221,700,000	106.84%
Pendapatan Denda Pajak	770,500,000	1,781,378,336	231.20%
Pendapatan Denda Pajak Hotel	40,000,000	56,032,805	140.08%
Pendapatan Denda Pajak Restoran	40,000,000	89,451,406	223.63%
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	3,000,000	2,703,337	90.11%
Pendapatan Denda Pajak Reklame	75,000,000	108,798,930	145.07%
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	300,000	4,604	1.53%
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5,000,000	48,370,724	967.41%
Pendapatan Denda Parkir	5,000,000	6,643,129	132.86%
Pendapatan Denda Air Tanah	2,200,000	909,179	41.33%
Pendapatan Denda PBB Perdesaan dan Perkotaan	600,000,000	1,468,464,222	244.74%
Pendapatan Denda Retribusi	6,500,000	19,216,781	295.64%
Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Denda Retribusi Kekayaan Daerah	4,500,000	6,279,688	139.55%
Pendapatan Denda Retribusi IMB	2,000,000	12,937,093	646.85%
Pendapatan dari Pengembalian	1,300,000,000	1,022,944,966	78.69%
Pendapatan dari Pengembalian Temuan	1,300,000,000	1,022,944,966	78.69%
Pendapatan Sewa	1,071,733,212	141,561,416	13.21%
Cicilan Kios	1,047,733,212	105,412,878	10.06%
MCK Umum	24,000,000	36,148,538	150.62%
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11,963,308,082	12,631,882,808	105.59%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cilegon	1,311,862,156	1,295,524,715	98.75%



BAB II - KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

URAIAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Ciwandan	1,925,847,519	2,097,174,900	108.90%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cibeber	1,625,663,543	1,796,076,883	110.48%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Grogol	988,501,663	992,506,948	100.41%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Pulomerak	1,635,998,246	1,828,655,301	111.78%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Purwakarta	1,086,705,579	1,119,188,906	102.99%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Jombang	1,384,889,747	1,468,224,586	106.02%
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Citangkil	2,003,839,629	2,034,530,569	101.53%
Pendapatan BLUD	81,192,139,500	77,025,673,660	94.87%
Pendapatan BLUD - RSUD	78,000,000,000	73,815,024,258	94.63%
Pendapatan BLUD - PDB	3,192,139,500	3,210,649,402	100.58%
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	2,000,000,000	1,569,708,526	78.49%
Lain-Lain PAD yang Sah Lain-lainnya	2,000,000,000	1,569,708,526	78.49%
II. DANA PERIMBANGAN	912,378,533,000	866,731,464,020	95.00%
POS BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	131,420,440,000	98,126,631,451	74.67%
Bagi Hasil Pajak	129,306,337,000	96,543,890,961	74.66%
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5,005,059,000	4,714,100,263	94.19%
Bagi Hasil dan Penghasilan (PPh) Psl 25 dan Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Psl 21	124,301,278,000	91,829,790,698	73.88%
Bagi Hasil Bukan Pajak/sumber Daya Alam	2,114,103,000	1,582,740,490	74.87%
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	53,924,000	85,255,299	158.10%
Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Iuran Tetap	142,903,000	137,453,515	96.19%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan	983,593,000	689,340,471	70.08%
Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum (Royalti)	933,683,000	670,691,205	71.83%
DANA ALOKASI UMUM	643,891,037,000	643,891,037,000	100.00%
Dana Alokasi Umum	643,891,037,000	643,891,037,000	100.00%
Dana Alokasi Umum	643,891,037,000	643,891,037,000	100.00%
DANA ALOKASI KHUSUS	137,067,056,000	124,713,795,569	90.99%
Dana Alokasi Khusus	137,067,056,000	124,713,795,569	90.99%
Dana Alokasi Khusus Fisik	45,244,379,000	38,118,266,482	84.25%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	91,822,677,000	86,595,529,087	94.31%
III. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	280,990,777,925	265,451,039,293	94.47%
Pendapatan Hibah	39,774,000,000	38,863,765,413	97.71%
Pendapatan Hibah Dana BOS	39,774,000,000	38,863,765,413	97.71%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	168,049,961,925	153,420,457,880	91.29%
Bagi Hasil Pajak Propinsi	168,049,961,925	153,420,457,880	91.29%
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	40,036,188,506	37,006,460,834	92.43%
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	39,307,116,000	30,270,356,749	77.01%
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	60,335,261,000	58,788,889,729	97.44%
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	28,371,396,419	27,354,750,568	96.42%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33,166,816,000	33,166,816,000	100.00%
Dana Penyesuaian	33,166,816,000	33,166,816,000	100.00%
Dana Insentif Daerah	33,166,816,000	33,166,816,000	100.00%
POS BANTUAN KEUANGAN PROPINSI	40,000,000,000	40,000,000,000	100.00%
Bantuan Keuangan dari Propinsi	40,000,000,000	40,000,000,000	100.00%
Bantuan keuangan dari Provinsi Banten	40,000,000,000	40,000,000,000	100.00%

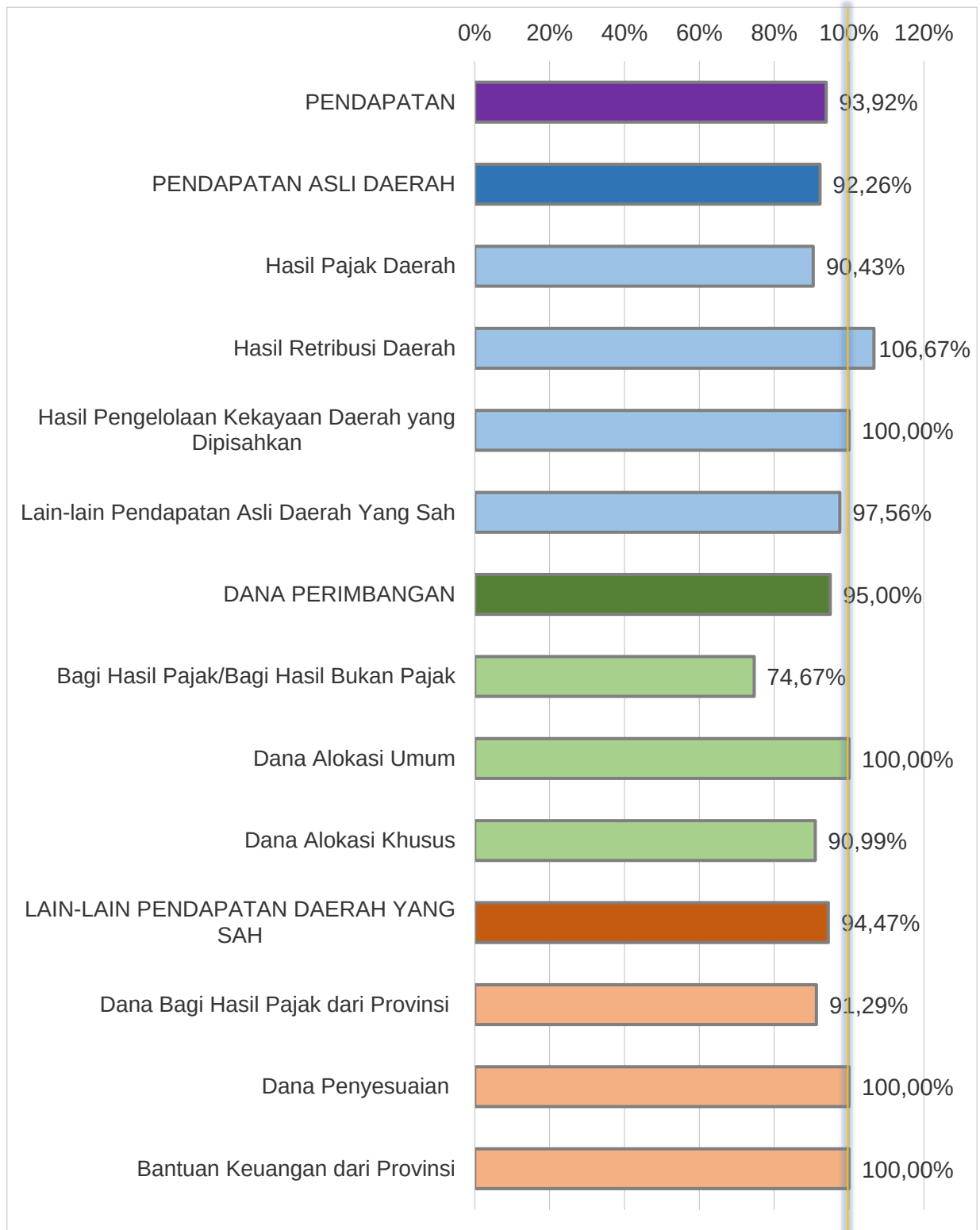
Gambar 2.16a Diagram Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan daerah Kota Cilegon Tahun 2019





BAB II - KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

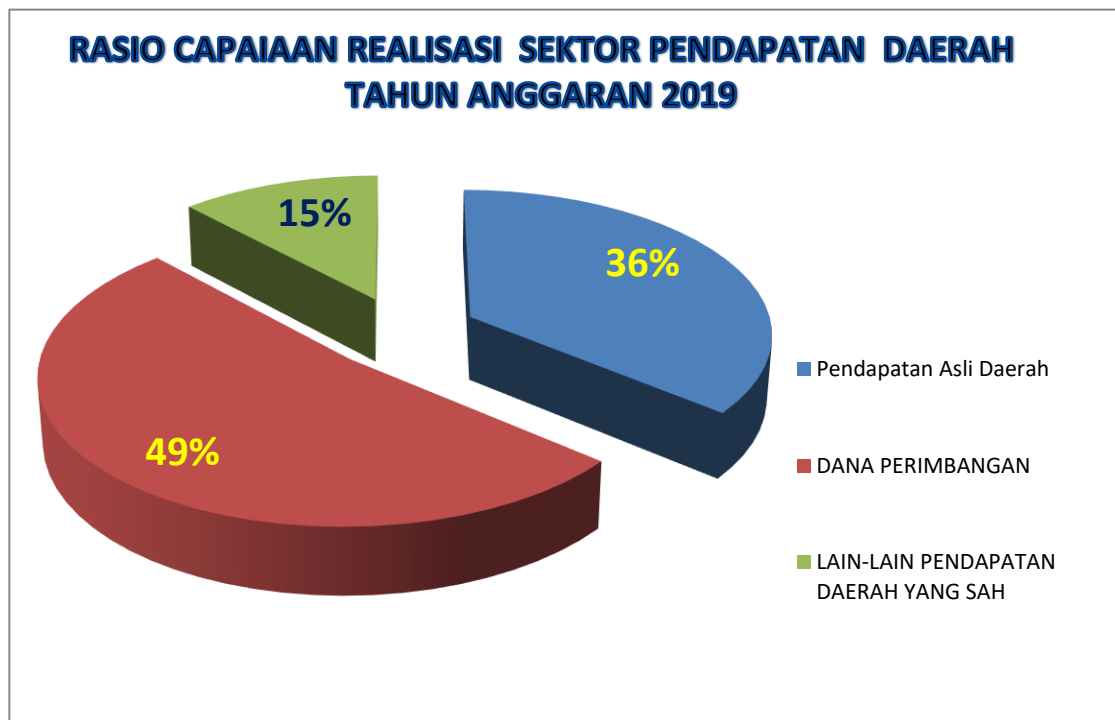
Gambar 2.16b Diagram Presentase Capaian Realisasi Komponen Pendapatan daerah Kota Cilegon Tahun 2019



2.2.3 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

Komposisi Penerimaan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2019 meliputi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan perhitungan komposisi mencapai 36%, Dana Perimbangan memberikan komposisi sebesar 49%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya memberikan komposisi sebesar 15%. Dengan kata lain PAD Kota Cilegon memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi peneriman Kota Cilegon, sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dari Dana Alokasi dari Pemerintah Pusat. Dalam banyak hal, Dana Alokasi dari Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutupi kebutuhan pengeluaran pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemberian kewenangan sesuai Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga kemandirian pembiayaan dapat tercipta oleh Pemerintah Kota Cilegon.

Gambar 2.16c Diagram Rasio Realisasi Komponen Pendapatan Daerah.

**A. INTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2019**

Untuk menjaga keseimbangan belanja penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan prioritas pemerintah Kota Cilegon yang dibebankan kepada Pendapatan Asli Daerah, maka diupayakan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai strategi baik peningkatan kinerja pemungutan, peningkatan pelayanan publik, penyederhanaan mekanisme, peningkatan/ penambahan objek/subjek Pajak dan Retribusi Daerah, peningkatan daya investasi, meningkatkan pendanaan penyertaan modal BUMD, dan mengurangi

resiko pengembalian/temuan. Secara rinci Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Intensifikasi Pajak Daerah

Pelaksanaan intensifikasi Pajak Daerah dilakukan terhadap objek pajak yang sudah menjadi wajib pajak daerah. dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Hotel : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak hotel dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak hotel.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak hotel.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak hotel yang menunggak.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak hotel.
 - Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (tapping box) pada beberapa hotel.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
2. Pajak Restoran : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak restoran dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak restoran.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak restoran.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak restoran yang menunggak.
 - Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (tapping box) pada beberapa wajib restoran /rumah makan.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak restoran.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
3. Pajak Hiburan : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak Hiburan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak hiburan.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak hiburan.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak hiburan yang menunggak.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak hiburan.
 - Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (tapping box) pada beberapa Wajib Pajak Hiburan.



- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
- 4. Pajak Reklame : Membentuk tim untuk melakukan pendataan dan konfirmasi reklame yang masih terpasang namun belum membayar pajak reklame. Tim juga melakukan pengukuran langsung terhadap media reklame yang terpasang, serta memberikan teguran kepada wajib pajak yang belum membayar pajak reklame.
- 5. Pajak Penerangan Jalan : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak penerangan jalan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak penerangan jalan.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak penerangan jalan.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
- 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yang menunggak.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
- 7. Pajak Parkir Pelaksanaan intensifikasi dari pajak Parkir dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak parkir.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak parkir.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak parkir yang menunggak.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak parkir.
 - Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (tapping box).
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
- 8. Pajak Air Tanah Pelaksanaan intensifikasi dari pajak Air Tanah dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu:
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak Air Tanah.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak Air Tanah.



- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak Air Tanah yang menunggak.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
9. BPHTB BPKAD Kota Cilegon melakukan pemeriksaan pajak BPHTB pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi mengalami peralihan kepemilikan hak.
10. PBB Pelaksanaan intensifikasi dari pajak bumi dan bangunan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
- Melakukan penagihan aktif pada wajib-wajib pajak yang menunggak
 - Melakukan penilaian individual objek subjek PBB di wilayah Kota Cilegon
 - Melakukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak secara langsung.
 - Memberikan penghargaan pada wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo melalui kegiatan bulan panutan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - Melakukan pendataan dan pemutakhiran masal PBB.
 - Melakukan pelayanan PBB keliling di tingkat Kelurahan.

Intensifikasi Retribusi Daerah

Adapun rincian intensifikasi yang dilakukan per objek Retribusi Daerah diantaranya sebagai berikut :

1. Intensifikasi Retribusi Jasa Umum

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor Retribusi Jasa Umum meliputi :

1. Peningkatan kualitas **Pelayanan Kesehatan** pada Dinas Kesehatan khususnya pada UPTD Puskesmas sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan secara baik dan optimal, melakukan peningkatan SDM khususnya bagi tenaga medis UPTD Kesehatan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan seminar, sehingga mampu memberikan pelayanan sekaligus tindakan bagi pasien, dan melaksanakan akreditasi puskesmas agar pembinaan peningkatan mutu dan kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program serta penetapan manajemen resiko.
2. Pelaksanaan intensifikasi dalam hal pemungutan **Retribusi Pelayanan Persampahan** yang telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam penerapan sanksi terhadap wajib retribusi yang tidak mau membayar retribusi sampah, dan mengingatkan para petugas

kolektor secara rutin untuk menjemput bola dalam penagihan retribusi kepada wajib retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Upaya intensifikasi dalam hal pemungutan **Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum** oleh **Dinas Perhubungan** adalah monitoring para jukir dan lokasi parkir.
4. Upaya intensifikasi terkait pengelolaan **Retribusi Pelayanan Pasar** baik yang dikelola oleh **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** maupun **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** meliputi :
 - a. Dalam hal pengelolaan **Retribusi Pasar Hewan** melaksanakan sosialisasi dan penjemputan atas pelayanan pasar hewan.
 - b. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Cilegon dalam pengelolaan pendapatan melakukan pembinaan kepada petugas kolektor dalam melakukan pungutan di setiap pasar, dan pembenahan manajemen pengelolaan pasar serta pemenuhan sarana dan prasarana pasar.
5. Pelaksanaan intensifikasi dalam hal pemungutan **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor** pada **Dinas Perhubungan** berupaya meningkatkan kegiatan pelayanan PKB kepada Konsumen atau masyarakat umum, Dinas Perhubungan Kota Cilegon pada tahun 2020 melakukan perubahan dan perbaikan baik sarana dan prasarana guna mendekatkan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, beberapa perubahan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Aplikasi SIM PKB (Smart Card).
 - b. Pembuatan ruang tunggu atau ruangan pelayanan uji KIR.
 - c. Peningkatan sarana pada ruang PKB.
6. Pelaksanaan intensifikasi yang dilaksanakan oleh **Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan** dalam hal pemungutan **Retribusi APAR** diantaranya :
 - a. Menjalin koordinasi dengan OPD terkait dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dukungan anggaran.
 - c. Melaksanakan pendataan bangunan gedung untuk bahan evaluasi selanjutnya.
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan BKPP tentang kebutuhan tenaga teknis.
 - e. Melaksanakan sosialisasi bahwa pentingnya pemenuhan standar keselamatan kebakaran bangunan gedung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Intensifikasi Retribusi Jasa Usaha

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor Retribusi Jasa Usaha meliputi :

1. Upaya intensifikasi dalam pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dilakukan oleh OPD sebagai berikut :
 - a. **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** dengan upaya menjaga alat berat yang dimiliki selalu dalam keadaan baik dengan perbaikan dan pemeliharaan secara berkala sehingga ketika ada yang menyewa alat dalam keadaan siap.
 - b. **BPKAD** dalam mengoptimalkan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan upaya sebagai berikut:
 1. Menginventarisir Aset Pemerintah Daerah baik aset tetap dan lainnya.
 2. Mengoptimalkan upaya penerapan Peraturan Walikota terkait pemungutan retribusi Pemakaian kekayaan daerah.
 3. Mengembangkan Sistem Pembayaran Online, untuk mempermudah pembayaran retribusi pada Wajib Retribusi.
2. Upaya intensifikasi dalam hal pemungutan **Retribusi Terminal** pada Dinas Perhubungan telah berupaya melakukan pembenahan peningkatan dan pengembangan pengelolaan retribusi terminal kepada wajib retribusi, dan memberikan pemahaman tentang retribusi kepada wajib retribusi.
3. Intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian khususnya pada **UPT RPH (Rumah Potong Hewan)** Ruminasi (sapi/kerbau) dengan upaya persuasif menjemput pengguna jasa, selama ini masih terus dilakukan guna menciptakan hubungan yang baik dengan pengguna jasa, baik itu dari pengguna jasa pelayanan pemotongan dan pelayanan pasar hewan.

3. Intensifikasi Retribusi Perizinan Tertentu

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

- a. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan **Retribusi IMB** adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemohon.
- b. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan atas pemungutan **Retribusi Izin Trayek** dapat dilakukan apabila kita menambah jumlah angkutan umum dan memperluas jalur pelayanan trayek.
- c. **Retribusi IMTA** : dengan melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap perusahaan pengguna TKA diantaranya mengecek setiap TKA 2 (dua) Lokasi kerja atau lebih, apakah dari jabatan dan jenis pekerjaannya dapat di pastikan bahwa TKA tersebut hanya bekerja di cilegon. Maka kita wajibkan ke perusahaan tersebut untuk perpanjangan selanjutnya agar di rubah 1 (satu)



lokasi kerja hanya kota cilegon. Sehingga saat perpanjangan, perusahaan akan membayar DKPTKA -Nya ke rekening Kasda Kota Cilegon danj itu akan meningkatkan PAD Kota Cilegon Yang bersumber dari retribusi Penggunaan TKA.

Intensifikasi Perusahaan Milik Daerah

1. Langkah dan upaya yang telah dilaksanakan oleh Bank BJB Cab. Cilegon dalam rangka pencapaian Pendapatan Daerah diantaranya peningkatan layanan dan jaringan untuk melayani pembayaran Pajak Daerah dengan menyiapkan jaringan kantor yang mempermudah wajib pajak diantaranya :
 - 1 (satu) kantor cabang.
 - 2 (dua) kantor cabang pembantu.
 - 7 (tujuh) kantor kas.
 - 5 (lima) payment point di kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pajak Daerah.
 - 1 (satu) unit mobil edukasi.
 - 53 (lima puluh tiga) mesin ATM.
 - Internet Banking (Bjb Digi) dan internet banking corporate (IBC).
 - Penempatan elektronik data capture (EDC) untuk peningkatan pelayanan di RSUD.
 - Pembayaran pajak melalui gerai modern (Indomaret) dan E- Commerce (Traveloka, Bukalapak dan Tokopedia)
 - Pemungutan Retribusi melalui E-Retribusi.
2. Intensifikasi yang dilakukan oleh **PT PCM** meliputi memberikan pelayanan jasa penyandaran kapal yang tepat waktu, handal dan aman, serta meminimalisir keluhan pelanggan secara objektif sekaligus penyelesaian keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat.
3. Intensifikasi yang dilakukan oleh **Perusahaan Milik Daerah PT. BPRS CM** meliputi meminimalisir kolektibilitas pembiayaan bermasalah, melakukan sosialisasi, kerjasama dan promosi kepada pemerintah, BUMD, swasta (usaha besar, menengah, usaha kecil), lembaga kemasyarakatan dan sekolah-sekolah di wilayah Cilegon, dan mengadakan jasa pembiayaan individu yang lebih kompetitif untuk pegawai negeri maupun pegawai swasta.
4. **Perusahaan Milik Daerah PDAM Cilegon Mandiri** dalam hal peningkatan pendapatan dari sektor Laba PDAM Kota Cilegon melaksanakan upaya intensifikasi berupa menjual air kepada masyarakat dengan menambah jaringan pipa dan menambah pemasangan pelanggan baru sebanyak 1500 pelanggan di tahun 2019.

Intensifikasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Intensifikasi yang dilakukan oleh BPKAD dalam hal penyerapan pendapatan lelang kendaraan adalah melaksanakan inventarisir barang milik daerah pada pengguna barang.
2. Intensifikasi yang dilakukan **RSUD** diantaranya melakukan revisi tarif pelayanan, melakukan perbaikan mekanisme pendapatan tunai, bekerja sama dengan pihak bank untuk memfasilitasi sistem pembayaran biaya pelayanan pasien menggunakan ATM, maupun langsung ke kasir Bank.
3. Intensifikasi pada **BLUD Pemerintah** dalam hal ini dilaksanakan oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil adalah meningkatkan penagihan kepada Mitra Binaan, melakukan pendampingan kepada Mitra Binaan, dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pada Pendamping Kelurahan.
4. Mengurangi tingkat realisasi penerimaan dari sektor pendapatan denda pajak dan retribusi dengan melaksanakan sosialisasi, himbauan atas kewajiban membayar pajak dan retribusi.
5. Intensifikasi dalam pelaksanaan pemungutan pengembalian temuan adalah meningkatkan sistem pengendalian, dan pengawasan atas serapan belanja daerah sejak tahun 2016.
6. Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana, fasilitas pendukung pelayanan pada 8 unit UPT Puskesmas, dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait alokasi JKN tahun anggaran 2019.

B. INTENSIFIKASI DANA PERIMBANGAN TAHUN 2019

Secara garis besar penerimaan Dana Perimbangan dipengaruhi dari alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan ketentuan. Namun Pemerintah Daerah senantiasa melaksanakan upaya-upaya peningkatan yang koperhensif dan berkala dengan melaksanakan rekonsiliasi data dengan kementerian terkait, dalam penyampaian laporan sesuai jadwal yang ditentukan, melaksanakan konsultasi atas piutang capaian alokasi transfer lebih bayar maupun kurang bayar oleh Pemerintah Pusat, dan melakukan penyesuaian atas pagu anggraan target pendapatan dari sektor transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk Kota Cilegon.

Adapun intensifikasi sesuai dengan komposisi alokasi Dana Perimbangan sebagai berikut:

A. Intensifikasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak**1. Bagi Hasil Pajak Pusat**

- Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Bagi Hasil Pajak Pusat sesuai dengan rincian alokasi TKDD tahun anggaran 2019.



- Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 77/PMK.07/2019 tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun anggaran 2019.
- Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data pada Kantor Pengelolaan Kas Negara (KPN) dalam rangka penyesuaian penerimaan pendapatan dari sektor DBH Pajak Bumi dan Bangunan dan DBH Pph Pasal 21, 25 dan 29 Pajak Pribadi atau Orang Asing.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

- Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Bagi Hasil Pajak Pusat sesuai dengan rincian alokasi TKDD tahun anggaran 2019.
- Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 77/PMK.07/2019 tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun anggaran 2019.
- Melakukan koordinasi pada Kementerian Keuangan RI dalam rangka penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan, dan Bagi Hasil Sumber Daya Pertambangan Umum (Royalti), dan melaksanakan rekonsiliasi dan koordinasi dengan Bappenda Provinsi Banten.

Intensifikasi Dana Alokasi Umum (DAU)

Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi data pada Kementerian Keuangan RI terkait Dana Alokasi Umum (DAU) secara periodik, dan melaksanakan penyerapan DAU sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Intensifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Melaksanakan penyampaian pelaporan penyerapan DAK tepat waktu, meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait juknis/juklak penyerapan DAK periode tahun 2019, melaksanakan ketentuan Peraturan Kementerian Keuangan nomor 48/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non fisik, serta melakukan himbauan kepada OPD penerima DAK agar melaksanakan penyerapan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

C. INTENSIFIKASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN 2019

Secara umum upaya intensifikasi yang dapat dilakukan pada penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah

- Melaksanakan penyesuaian target alokasi anggaran Hibah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan
- Melaksanakan penyesuaian target alokasi anggaran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 973/Kep.105-Huk/2019 tentang Penetapan Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi T.A 2019.



- Melaksanakan kebijakan atas pencairan/transfer yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten.

Berdasarkan Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Pendapatan Hibah

Dana Bantuan Oprasional Sekolah pada Dinas Pendidikan berupaya melaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi dengan sekolah-sekolah yang penerima dana BOS di Wilayah Kota Cilegon, dan melaksanakan penyesuaian pagu anggaran pendapatan hibah BOS kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Oprasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

B. Bagi Hasil Pajak Provinsi

- Melaksanakan kesesuaian target pendapatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.105-Huk/2019 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
- Melaksanakan kesesuaian pagu anggaran pendapatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.143-Huk/2019 tentang Pelampauan Target Bagi Hasil PKB Tahun 2018.
- Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data dengan Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor Bagi Dari PKB, Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok yang dilaksanakan rutin setiap periodik.

C. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Insentif Daerah) sesuai dengan rincian alokasi TKDD tahun anggaran 2019. Serta melakukan rekonsiliasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

D. Bantuan Keuangan Provinsi Banten

- Melaksanakan kesesuaian target pendapatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.105-Huk/2019 tentang Penetapan Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi T.A 2019.
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini koordinasi dengan Bappenda Provinsi berkaitan dengan penetapan target alokasi anggaran tahun 2019, dan alokasi penyerapan/penerimaan atas bantuan keuangan Provinsi Banten secara periodik.



D. EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019

A. EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Ekstensifikasi merupakan upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui perluasan dan/atau penambahan obyek dan subyek sumber-sumber pendapatan, dan perubahan atas regulasi/tata cara pemungutan/mekanisme pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah :

Pajak Daerah

- a) Ekstensifikasi dari beberapa Jenis Pajak diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah adalah dengan melaksanakan pendataan pada objek-objek Pajak Daerah dan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
- b) Pada jenis Pajak Reklame upaya ekstensifikasi dengan melakukan pendataan reklame indoor terhadap objek-objek media reklame yang berada di Kota Cilegon.
- c) pada sektor BPHTB mencari informasi pada pihak lain terkait potensi hal yang terjadi di kota Cilegon, dan
- d) pada sektor PBB melakukan pendataan dan pemutakhiran massal PBB pada 3 (tiga) Kecamatan.

Retribusi Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Cilegon telah berupaya untuk dapat mengintegrasikan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah dengan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum, meliputi ;

1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai petunjuk untuk pelayanan kesehatan agar lebih baik.
2. Melakukan terobosan wilayah baru, pendaftaran ulang terhadap wajib retribusi baru terutama sumber sampah industri dan komersial, dan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sampah pada lahan TPSA Bagendung melalui penyediaan air dan sistem hidran yang memenuhi syarat serta koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
3. Ekstensifikasi sektor Parkir Tepi Jalan Umum yang dikelola Dinas Perhubungan adalah mensurvey lokasi titik parkir baru, dan mendata para jukir baru dan menerbitkan SPTP.
4. Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan upaya melakukan relokasi pedagang untuk masuk ke pasar yang sudah

tersedia agar dapat dilakukan pungutan retribusi terhadap mereka dan dilakukan sosialisasi tentang retribusi daerah kepada para pedagang pasar.

5. Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan perluasan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor guna memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2020 ini Dinas Perhubungan Kota Cilegon akan membangun ruangan tunggu atau ruangan pelayanan terpadu uji KIR kendaraan bermotor.
6. Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan dalam pembenahan dan peningkatan capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran diantaranya:
 - a. Terlaksananya evaluasi/revisi atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran agar dapat diundangkan.
 - b. Melaksanakan pengajuan peningkatan fasilitas/ peralatan pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan penambahan personil SDM petugas pemadam kebakaran.
 - c. Melaksanakan perubahan atas revisi Raperwal tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan meyakinkan pihak ketiga (penyewa) bahwa alat berat yang dimiliki UPTD Perlengkapan, perbengkelan dan laboratorium tidak kalah dengan yang dimiliki swasta.
2. **BPKAD** dalam hal pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah melaksanakan upaya ekstensifikasi berupa :
 - a. Kajian untuk menentukan kesesuaian pemanfaatan aset Pemerintah Kota Cilegon dengan ketetapan zonasi wilayah
 - b. Promosi untuk meningkatkan daya investasi agar aset yang dimiliki Pemerintah Kota Cilegon dapat dimanfaatkan secara optimal oleh investor.
3. Ekstensifikasi pemungutan **Retribusi Terminal** merupakan salah satu optimalisasi adalah membangun sub terminal tipe C di wilayah Kota Cilegon dan mengaktifkan kembali Sub Terminal Angkot Pasar Kelapa.
4. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi pelayanan jasa usaha sektor retribusi pemotongan hewan ternak besar (sapi/kerbau) melakukan himbuan memotong hewan pada tempat yang disediakan pemerintah daerah, dan memberikan penyediaan fasilitas jasa pelayanan tambahan sesuai kebutuhan.

c. Retribusi Izin Tertentu, meliputi :

1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya membuat IMB.
2. Retribusi IMTA : dengan mengidentifikasi lokasi kerja yang ada di Notifikasi dari TKA melalui laporan keberadaan untuk di pastikan adanya TKA tersebut

Job description / lingkup pekerjaannya dapat dinyatakan berlokasi di Kota Cilegon. Dengan demikian kita dapat menyakinkan Perusahaan untuk merubah lokasi kerja hanya satu lokasi Kota Cilegon sehingga pada saat memperpanjang Notifikasi TKA itu dilakukan di Kota Cilegon. Dan kita juga melaksanakan konsultasi terkait penerapan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 569/424/SJ tentang penerimaan daerah yang bersumber dari pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja.

3. Retribusi Trayek berupaya mengintegrasikan pengawasan bagi angkutan umum, upaya pemberian reward bagi angkutan umum yang taat kewajiban izin trayek.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- a. Bank BJB turut serta mendukung pembangunan di Kota Cilegon dengan program Kredit Modal Kerja Konstruksi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur serta Kredit Usaha Rakyat untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Serta Bank BJB senantiasa turut berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
- b. PDAM Cilegon Mandiri melakukan ekstensifikasi dengan melakukan penambahan pelanggan SL Baru, dan Pengembangan jaringan pipa baru di beberapa wilayah di Kota Cilegon.
- c. Ekstensifikasi yang dilakukan oleh PT. PCM adalah memelihara komunikasi rutin yang efektif dengan pelanggan, meninjau kemungkinan pengembangan bisnis perusahaan dengan kajian-kajian yang komprehensif, memelihara hubungan dengan organisasi-organisasi kemaritiman dan khususnya pengusaha kepelabuhanan untuk membuka peluang pelanggan dan bisnis baru.
- d. Mengadakan fasilitas jemput tabungan kepada pihak nasabah penabung, baik setoran maupun penarikan, mengadakan pemantauan dan pembinaan yang lebih efektif terhadap nasabah Badan Usaha, melakukan kerjasama penempatan dana, kerjasama pembiayaan dengan Bank Umum Syariah. Serta mengupayakan efisiensi pengeluaran biaya pengeluaran PT. BPRS CM.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- a. Upaya penentuan nilai jual lelang kendaraan dengan melaksanakan koordinasi dengan pihak KPKNL selaku appraisal (penilai) BMD.
- b. Melaksanakan efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan Pembiayaan Daerah sehingga penerimaan atas temuan Inspektorat dapat terminimalisir.
- c. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pemungutan Lain-lain PAD yang sah Cicilan Kios dengan melakukan revitalisasi pasar, meningkatkan

kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bagi pengunjung maupun pedagang, dan melakukan pendataan kembali terhadap debitur.

- d. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pendapatan BLUD RSUD Cilegon adalah meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan, penambahan pelayanan baru pada RSUD, penambahan alat kesehatan pada RSUD.
- e. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pemungutan BLUD Pemerintah adalah melaksanakan sosialisasi/ pembekalan kepada Calon Mitra Binaan sebelum pencairan pinjaman, peningkatan kemampuan SDM Pengelola Dana Bergulir, dan lebih selektif dalam rekrutasi dan penyaluran pinjaman.

B. EKSTENSIFIKASI DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sehingga upaya ekstensifikasi penggalan potensi baru sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun demikian Pemerintah Kota Cilegon hanya dapat mendukung pengelolaan dimaksud melalui konsultasi, koordinasi terkait mekanisme pencairan/transfer yang dilakukan Pemerintah RI Kementerian terkait, agar Dana Perimbangan dimasa mendatang mendapatkan alokasi Dana Bidang Baru dan semakin optimal.

C. EKSTENSIFIKASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LAINNYA

- a. Upaya yang dilakukan dalam penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diantaranya melibatkan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Banten agar alokasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah lebih maksimal.
- b. Upaya ekstensifikasi dalam hal penyerapan alokasi Dana Bantuan Sekolah adalah dengan melakukan pemantauan update atas aturan-aturan Pemerintah Pusat, dan update petunjuk teknis bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja.

2.2.4 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. PERMASALAHAN

PERMASALAHAN PENDAPATAN DAERAH

Permasalahan pemungutan atas tidak tercapainya beberapa komponen target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019, yang tercermin pada beberapa sektor pendapatan daerah Kota Cilegon adapun permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**a. Hasil Pajak Daerah**

- a) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2019 dari target yang sebesar **Rp. 9.300.000.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 8.144.706.900,-** atau sebesar **87,58%**. Tidak tercapainya target dari sektor Pajak mineral bukan logam dan batuan dikarenakan proses perluasan salah satu perusahaan yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2019 ternyata tidak selesai pada tahun 2019 sehingga mengalami kemunduran penyelesaian di tahun berikutnya.
- b) BPHTB pada tahun 2019 dari target sebesar **Rp. 188.869.611.122,-** terealisasi sebesar **Rp. 129.473.718.718.426,-** atau sebesar **68,55%**. Tidak tercapainya target dari BPHTB, hal tersebut dikarenakan transaksi yang potensial/besar yang diperkirakan akan terjadi di Tahun 2019, namun hingga akhir tahun 2019 belum terjadi.
- c) PBB Pada tahun 2019 target dari PBB-P2 sebesar **Rp. 88.072.000.000,-**, akan tetapi hingga akhir tahun terealisasi sebesar **Rp. 86.469.012.742,-** atau sekitar **98,18%**. Hal tersebut dikarenakan terdapat wajib pajak yang menunggak.

b. Hasil Retribusi Daerah

- 1. Pada Retribusi Pelayanan Persampahan terdapat permasalahan diantaranya :
 - a. Kejadian kebakaran TPSA Bagendung yang mengakibatkan dihentikannya pembuangan sampah ke lokasi selama 2 bulan (agustus dan september 2019).
 - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan Perda No 8 tahun 2012.
 - c. Belum sinkronnya jumlah pedagang di pasar keranggot dengan penerimaan retribusi
 - d. Terbatasnya personil kolektor pemungut retribusi
 - e. Adanya keterlambatan wajib retribusi persampahan (pihak ketiga) dalam membayar retribusi bulannya sehingga terjadi piutang pada akhir tahun.
- 2. Pada Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terdapat permasalahan diantaranya :
 - a. Keterbatasan anggaran
 - b. Tidak adanya SPTP
 - c. Belum adanya data jukir
 - d. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)



3. Pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola BPKAD Kota Cilegon meliputi :
 - a. Terkendala terbenturnya peraturan yang dibuat pada OPD baik Perda dan Perwal yang berlaku pada pengguna BMD terhadap larangan Objek pemanfaatan pada trotoar dan lain-lainya.
4. Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor permasalahan yang dihadapi diantaranya tingkat kesadaran pemilik kendaraan angkutan umum masih rendah, kendaraan wajib uji perusahaan belum bisa hadir langsung, dan banyaknya kendaraan wajib uji yang melaksanakan mutasi ke luar daerah.
5. Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran (APAR) terdapat permasalahan diantaranya :
 - a. Masih minimnya alat kelengkapan / penunjang tim pemeriksa.
 - b. Masih adanya keluhan pengelola/objek pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terjadi tumpang tindih (pemeriksaan 2 (dua) Instansi pada satu alat yang sama) termasuk asumsi keberadaan Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2014 terjadi kontradiksi dengan Undang-undang Bangunan Gedung Nomor 28 tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009.
 - c. Masih minimnya tenaga teknis (SDM) hanya memiliki 3 orang staf pelaksana, sehingga mengakibatkan kurangnya optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan.
 - d. Beberapa anggota tim teknis belum mendapatkan pembekalan bimten inspeksi (tata cara pelaksanaan inspeksi/audite pemeriksaan bangunan gedung).
 - e. Kendaraan oprasional untuk personil dan peralatan tidak layak (dibutuhkan minibus).
6. Dalam melaksanakan pengelolaan Retribusi Terminal guna mencapai target retribusi, banyak dijumpai kendala-kendala, baik dari aspek petugas, pedagang, peraturan, fasilitas, dan karakteristik tertentu yang ada di terminal tersebut, adapun kendala-kendala sebagai berikut :
 - a. Sistem jaringan trayek angkutan kota belum terintegrasi dengan terminal seruni.
 - b. Belum tersedianya fasilitas penunjang terminal yang memadai.
 - c. Pedagang (wajib retribusi sewa lahan) sering tidak berjualan (tutup).
 - d. Berkurangnya kendaraan angkutan umum (angkot), karena banyaknya kendaraan online.
7. Pada Retribusi **Rumah Potong Hewan (RPH)** yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per-2019 memiliki permasalahan

diantaranya kurangnya kesadaran pengguna jasa RPH dan pasar hewan dalam membayar retribusi. Dan tarif retribusi rumah potong hewan dan pasar hewan perlu dilakukan penyesuaian tarif mengingat sudah 8 tahun berjalan belum ada penyesuaian.

8. Pada **Retribusi Izin Trayek** permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran angkutan umum untuk membayar retribusi izin trayek.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah

- Permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Milik Daerah PT. BPRS CM adalah Pemahaman masyarakat atas sistem syariah secara umum masih rendah, dan tingkat penabung (nasabah) pada Bank BPRS masih rendah, cakupan pelayanan belum mencakup seluruh wilayah di Kota Cilegon bahkan di Luar Kota Cilegon dan fasilitas PT. BPRS CM masih minim.
- Permasalahan yang dihadapi oleh BJB diantaranya Pembayaran SP2D kepada rekanan Pemerintah Kota Cilegon sebagian masih disalurkan melalui Bank Lain, belum optimalnya penggunaan garansi bank untuk mengcover pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, serta Wajib Pajak khususnya penggunaan Tapping Box belum seluruhnya menggunakan rekening Bank Bjb untuk mempermudah transaksi keuangan.
- Permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Milik Daerah PDAM Cilegon Mandiri adalah kebiasaan pelanggan untuk melunasi tagihan air dilakukan pada bulan berikutnya setelah mendapatkan surat peringatan penutupan sementara.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Pada komponen lain-lain PAD yang Sah Cicilan Kios terdapat permasalahan tingkat kesadaran masyarakat pedagang dalam membayar angsuran masih kurang, akibatnya mereka mengosongkan lapaknya dan memilih untuk berdagang di luar.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan BLUD Pemerintah diantaranya rendahnya kesadaran mitra binaan dalam memenuhi kewajiban untuk pengembalian pinjaman tepat waktu, adanya anggapan di masyarakat bahwa dana yang dikeluarkan dari pemerintah dianggap sebagai Hibah, dan kurang optimalnya pelaksana Pengelola Dana Bergulir (pendamping kelurahan) dalam melakukan penagihan kepada Mitra Binaan.
3. Pada komponen lain-lain PAD yang Sah BLUD-RSUD terealisasi mencapai **94,63%** dikarenakan masih adanya pihak perusahaan / instansi / lembaga yang melakukan kerjasama dengan BLUD-RSUD yang belum memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan piutang.

2. DANA PERIMBANGAN

- 1) Adapun capaian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2019 yang kurang signifikan, hal tersebut dikarenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25 dan 29 merupakan komponen pajak pusat yang dikelola Kementerian Keuangan melalui Kantor Pajak Pratama Kota Cilegon, sehingga Pemerintah Kota Cilegon hanya menerima bagi hasil atas capaian pendapatan yang dipungut atau dikelola oleh Kantor Pajak Pratama Kota Cilegon.
- 2) Seperti halnya capaian realisasi DBH Pajak capaian atas DBH Bukan Pajak/Sumber daya alam dengan capaian yang masih jauh dari target, dikarenakan Pemerintah Kota Cilegon hanya menerima Bagi Hasil atas Capaian Pendapatan Bukan Pajak yang dipungut atau dikelola Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, dan perlu kami informasikan bahwa Pemerintah Kota Cilegon merupakan salah satu Kota Industri sehingga beberapa komponen DBH bukan Pajak objek/subjeknya relatif minim.
- 3) Berdasarkan pada Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2019 Untuk DAK Fisik realisasi transfer dari Pusat sesuai data kontrak yang diupload oleh Daerah pada tanggal 21 Juli 2019 di DJPK.
- 4) Untuk DAK Non Fisik pada dasarnya realisasi mencapai 100% namun nilai selisih transfer adalah silpa tahun 2017 mengurangi transfer tahun 2019.

4. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

- a. Pada DBH Pajak Provinsi baik DBH PKB, DBH BBNKB, DBH PBBKB, dan DBH PR, Pemerintah Kota Cilegon mengacu pada Keputusan Gubernur Banten Nomor :973/Kep.105-Huk/2019 tentang Penetapan Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak. Dalam Hal pencapaian realisasi sesuai Per-Gub mengingat DBH merupakan komponen pajak provinsi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Banten, sehingga Pemerintah Kota Cilegon hanya menerima bagi hasil atas penerimaan jenis pajak tersebut.
- b. Pemerintah Pusat menerbitkan Surat Keputusan terkait penambahan pagu anggaran pendapatan Dana Hibah BOS di bulan September 2019 sehingga menimbulkan kurangnya koordinasi antar pengelola dana hibah (Bantuan Operasional Sekolah) dengan Intansi pengelola keuangan baik Dinas terkait maupun PPKD.



B. SOLUSI

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

a. Hasil Pajak Daerah

1. Solusi terhadap permasalahan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah melakukan koordinasi dengan DPMTPTSP Provinsi Banten dan Distamben Provinsi Banten terkait wajib pajak baru.
2. Solusi terhadap permasalahan pemungutan BPHTB : BPKAD Kota Cilegon melakukan pemeriksaan pajak BPHTB pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi mengalami peralihan kepemilikan hak. Serta memonitor perusahaan yang memiliki potensi peralihan hak atas tanah dan bangunan.
3. PBB BPKAD Kota Cilegon melakukan penagihan langsung pada wajib pajak daerah yang hingga tanggal jatuh tempo belum melakukan pembayaran PBB, baik terhadap piutang yang lalu maupun yang regular tahun berjalan, serta melakukan program penghapusan denda.

b. Hasil Retribusi Daerah

- 1) Dalam hal permasalahan retribusi persampahan Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk melakukan tagihan langsung terhadap wajib retribusi yang mengalami keterlambatan membayar yang disertai surat teguran, meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk peningkatan penerimaan retribusi dari pasar disesuaikan dengan jumlah pedagang.
- 2) Mengirimkan surat teguran kepada wajib retribusi (WR) untuk segera melunasi tunggakan retribusi. Meningkatkan koordinasi dengan Disperindag untuk peningkatan pelayanan kebersihan pada wilayah blok F. dan melaksanakan koordinasi dengan pihak penanggulangan bencana terkait adanya bencana alam kebakaran TPA Bagendung.
- 3) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum berupaya melaksanakan :
 - a. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang perpajakan (dengan status masih dalam proses).
 - b. Pendataan para jukir dan pendapatannya.
 - c. Menentukan/mensurvey lokasi titik parkir.
 - d. Mengeluarkan SPTP.
- 4) Meningkatkan sosialisasi terkait kewajiban membayar retribusi pelayanan pasar yang tertuang dalam peraturan daerah dan peraturan walikota Cilegon.
- 5) Upaya yang dilakukan terkait permasalahan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan melakukan koordinasi lebih intensif terkait objek Pemohon dengan BMD yang ada pada pengguna BMD dan memberikan solusi agar target tidak terkendala dan terbentur dengan Peraturan yang ada untuk pencapaian target Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah tersebut.



- 6) Solusi yang dilakukan guna meningkatkan PAD sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. Memberikan himbauan kepada masyarakat dan pengusaha jasa transportasi untuk melakukan uji KIR Kendaraan secara berkala.
 - b. Melakukan Operasi dan Razia Kendaraan Bermotor
 - c. Menyiapkan Aplikasi SIM PKB (Smart Card).
- 7) Solusi yang dilakukan guna meningkatkan PAD dari sektor Retribusi Rumah Potong Hewan adalah meningkatkan sosialisasi/himbauan kepada pengguna jasa RPH agar melaksanakan kewajiban membayara kewajibanya dan dapat melaksanakan penyesuaian tarif pemungutan,
- 8) Solusi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diantaranya :
 - a. Melaksanakan dan meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke OPD teknis yang terkait.
 - b. Meningkatkan sosialisasi kepada pengelola/objek terperiksa dan melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis yang terkait.
 - c. Melaksanakan kegiatan evaluasi Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - d. Melaksanakan pengajuan penambahan atas fasilitas pendukung dan SDM petugas pemadam kebakaran namun sifatnya belum terakomodir.
 - e. Mengoptimalkan SDM yang ada dan yang telah mengikuti bimtek inpeksi/audit bangunan gedung.
 - f. Mengoptimalkan peralatan yang ada (pengecekan detektor menggunakan asap rokok dari petugas dan detektor panas menggunakan hairdrayer milik owner) serta Menggunakan mobil yang ada (losbak) dan mobil salah satu anggota tim karena tidak muat.
- 9) Upaya penyelesaian masalah terkait Retribusi Terminal solusi yang Dinas Perhubungan lakukan adalah :
 - a. Lebih meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan retribusi terminal.
 - b. Melakukan pengajuan perubahan tarif retribusi terminal.
 - c. Perubahan jalur trayek angkutan umum (angkot).
- 10) Upaya penyelesaian masalah pemungutan Retribusi Trayek adalah perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan PAD yang bersumber dari Retribusi Izin Trayek.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Solusi yang dilakukan oleh Perusahaan Milik Daerah diantaranya :

1. Pada Laba PT. BPRS CM Perlu adanya peningkatan pelayanan SDM, dan fasilitas-fasilitas pendukung seperti halnya ATM, mendekatkan cakupan pelayanan kepada nasabah melalui pembukaan cabang yang lebih luas.

2. Implementasi Internet Banking Corporate (IBC) di tahun 2019 untuk mempermudah transaksi keuangan serta peningkatan kerjasama dengan SKPD agar penyetoran dana SP2D bisa disalurkan melalui Bank Bjb serta peningkatan gerakan Non Tunai untuk program dana yang bersifat bantuan. Perluasan cara pembayaran PBB melalui e-commerce (Traveloka, bukalapak, dan tokopedia), Serta Implementasi BPHTB online Kota Cilegon.
3. Adapun untuk menarik piutang pelanggan dilakukan dengan cara melakukan penagihan dan penerapan sanksi berupa penutupan SL sementara kepada penggunaan yang menunggak.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Guna meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pemerintah Kota Cilegon berupaya untuk :

1. Dalam hal pengelolaan, pemungutan Lain-lain PAD yang Sah Cicilan Kios SKPD terkait membentuk tim pembinaan dan pengawasan kepada debitur yang menunggak atas kewajiban membayar retribusi daerah, dimana pelaksanaannya melibatkan Pengacara Negara yakni Kejaksaan Negeri Kota Cilegon. Untuk mengatasi masalah terkait masih rendahnya kesadaran pemilik kios dalam membayar kewajiban cicilan kios pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pendekatan baik secara kekeluargaan maupun pendekatan secara hukum agar para pemilik kios dapat memenuhi kewajibannya, serta terus dilakukan penataan dan pembinaan kepada para pedagang agar dapat menempati hanggar yang sudah disediakan.
2. Solusi yang telah dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan BLUD Pemerintah adalah memberikan surat teguran/peringatan kepada Mitra Binaan atas keterlambatan pembayaran angsuran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Dana bergulir adalah dana yang harus dikembalikan bukan Dana Hibah, dan membuat jadwal kunjungan / pendampingan secara berkala kepada mitra Binaan.
3. Untuk upaya meningkatkan penerimaan pendapatan BLUD –RSUD sesuai target yang ditetapkan pihak RSUD dipandang perlu melakukan optimalisasi pengelolaan piutang pada para Pihak yang melakukan kerjasama, serta meningkatkan koordinasi yang baik antara RSUD Kota Cilegon dengan pihak perusahaan/instansi/lembaga yang melakukan kerjasama dengan pihak RSUD.

2. DANA PERIMBANGAN

- a. Upaya pencapaian target realisasi dana perimbangan dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian terkait baik



(Kantor Pajak Pratama Kota Cilegon maupun KPPN Provinsi Banten) dalam upaya peningkatan alokasi transfer dari Bagi Hasil Pajak, DBH Bukan Pajak dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif. Serta perlu adanya koordinasi dengan pihak pemerintah pusat baik rekon, konfirmasi, bahkan perlu adanya pertukaran data base wajib pajak pph 21/25/29 yang berkedudukan di wilayah Kota Cilegon.

- b. Dalam upaya pencapaian target realisasi dana alokasi khusus SKPD penerima Dana Alokasi Khusus harus pro aktif dalam berkoordinasi dengan Instansi Terkait agar penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus dapat lebih maksimal. Memperhatikan dan melaksanakan sesuai Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan penyerapan dana alokasi khusus.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

- a. Pencapaian target realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bappenda Provinsi Banten.
- b. Melaksanakan penyesuaian dan perubahan atas pagu anggaran Dana Hibah BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2.3 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

2.3.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Berpedoman kepada Permendagri No.38 Tahun 2018 tentang Penyusunan APBD Tahun 2020, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar belanja dan standar satuan harga. Dalam rangka mendukung prioritas nasional, APBD juga dialokasikan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3.2 Target dan Realisasi Belanja

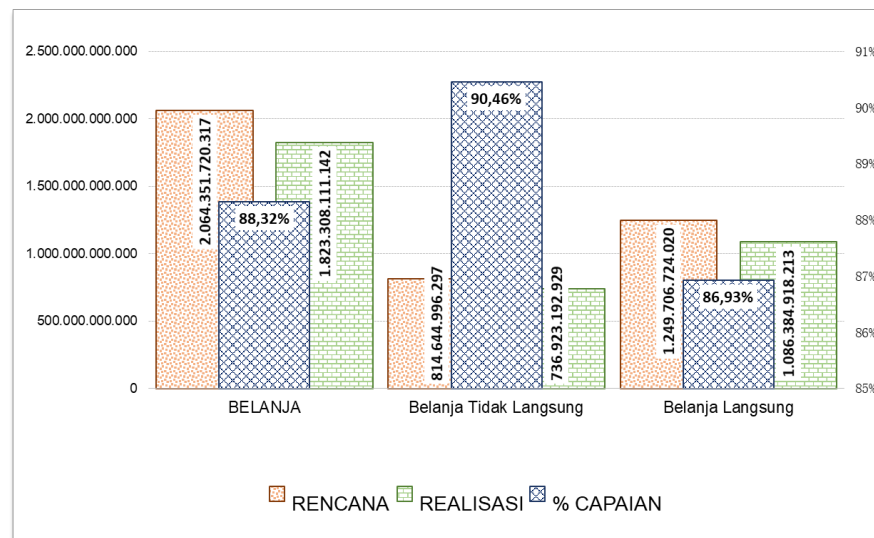
Anggaran Belanja daerah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2018 sebelum dilakukan audit oleh BPK RI adalah sebesar Rp 2.064.351.720.317,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.823.308.111.142,- atau persentase pencapaian sebesar 88,32%. Jika dibandingkan dengan kinerja belanja daerah di tahun sebelumnya yang hanya mencapai 80,53% terdapat peningkatan kinerja yang lebih baik. Rincian realisasi belanja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.14a Rencana dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
	BELANJA	2.064.351.720.317	1.823.308.111.142	88,32%
1	Belanja Tidak Langsung	814.644.996.297	736.923.192.929	90,46%
2	Belanja Langsung	1.249.706.724.020	1.086.384.918.213	86,93%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (*Unaudited*)

Gambar 2.17 Rencana dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited)

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan teknis. Belanja tidak langsung yang dilaksanakan pada pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2018 meliputi Belanja pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik, dan Belanja Tidak Terduga.

Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 814.644.996.297,- dengan realisasi sebesar Rp. 736.923.192.928,- atau mencapai 90,46%. Adapun rincian belanja tidak langsung sebagai berikut :

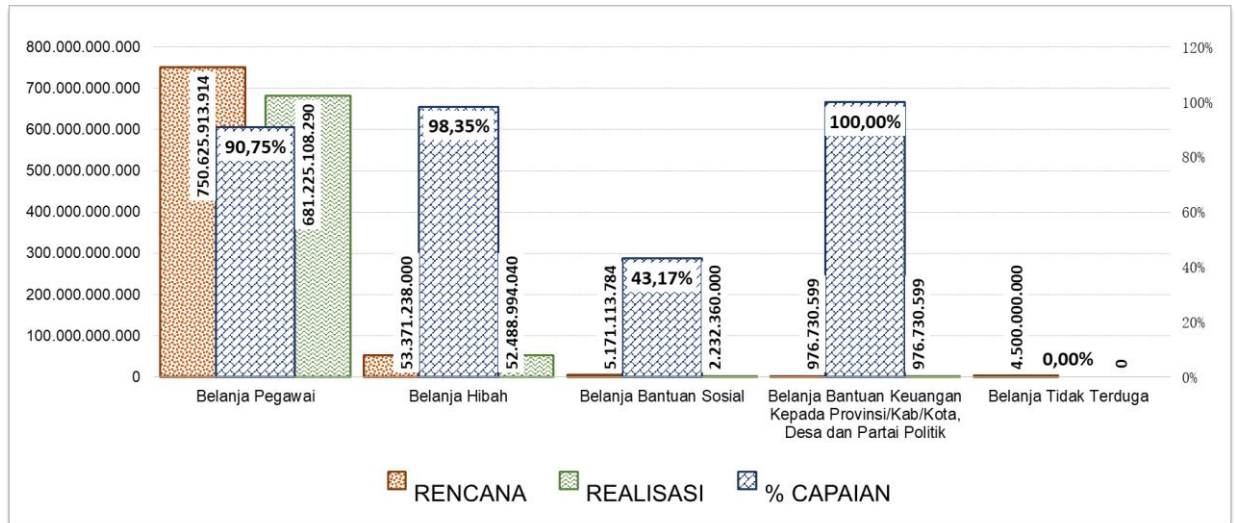
Tabel 2.14b
Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	RENCANA	REALISASI	% CAPAIAN
	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	814.644.996.297	736.923.192.929	90,46%
1	Belanja Pegawai	750.625.913.914	681.225.108.290	90,75%
2	Belanja Hibah	53.371.238.000	52.488.994.040	98,35%
3	Belanja Bantuan Sosial	5.171.113.784	2.232.360.000	43,17%
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota, Desa dan Partai Politik	976.730.599	976.730.599	100,00%
5	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000	0	0,00%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited)

Gambar 3.18

Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019



Sumber : Diolah dari LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (*Unaudited*)

A.1 Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai pada APBD tahun 2019 meliputi :

1. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan yang berlaku tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan penganggaran Calon PNSD sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2019;
3. Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBDT Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani peraturan yang berlaku;
4. Dalam merencanakan belanja pegawai memperhitungkan “accres” gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;
5. Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
6. Penganggaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani regulasi yang berlaku;

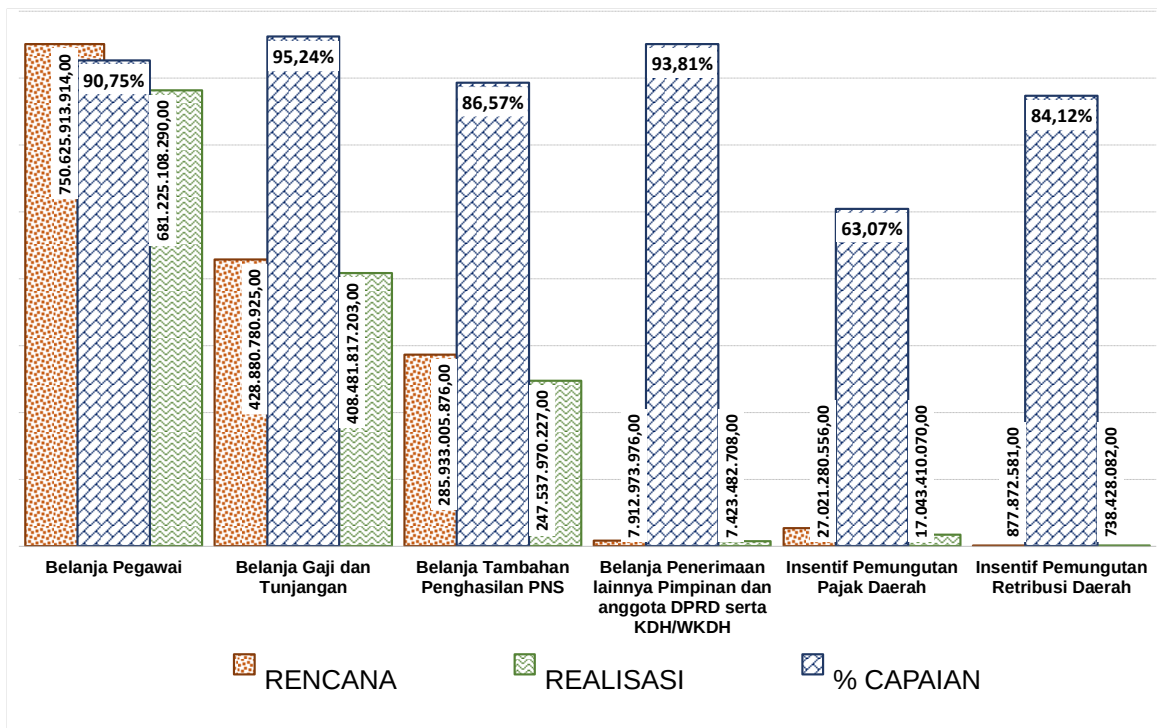
Pada tahun 2019 belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 750.625.913.914,- dan terealisasi sebesar Rp 681.225.108.290,- atau sebesar 90,75%.

Tabel 2.15
Rencana dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
	Target	Realisasi	Selisih	% Capaian
Belanja Pegawai	750.625.913.914,00	681.225.108.290,00	(69.400.805.624,00)	90,75%
Belanja Gaji dan Tunjangan	428.880.780.925,00	408.481.817.203,00	(20.398.963.722,00)	95,24%
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	285.933.005.876,00	247.537.970.227,00	(38.395.035.649,00)	86,57%
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.912.973.976,00	7.423.482.708,00	(489.491.268,00)	93,81%
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	27.021.280.556,00	17.043.410.070,00	(9.977.870.486,00)	63,07%
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	877.872.581,00	738.428.082,00	(139.444.499,00)	84,12%

Sumber : Diolah dari LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (*Unaudited*)

Gambar 2.19 Realisasi Komponen Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung



A.2 Belanja Hibah

Pengertian Hibah dalam konteks tata kelola keuangan daerah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

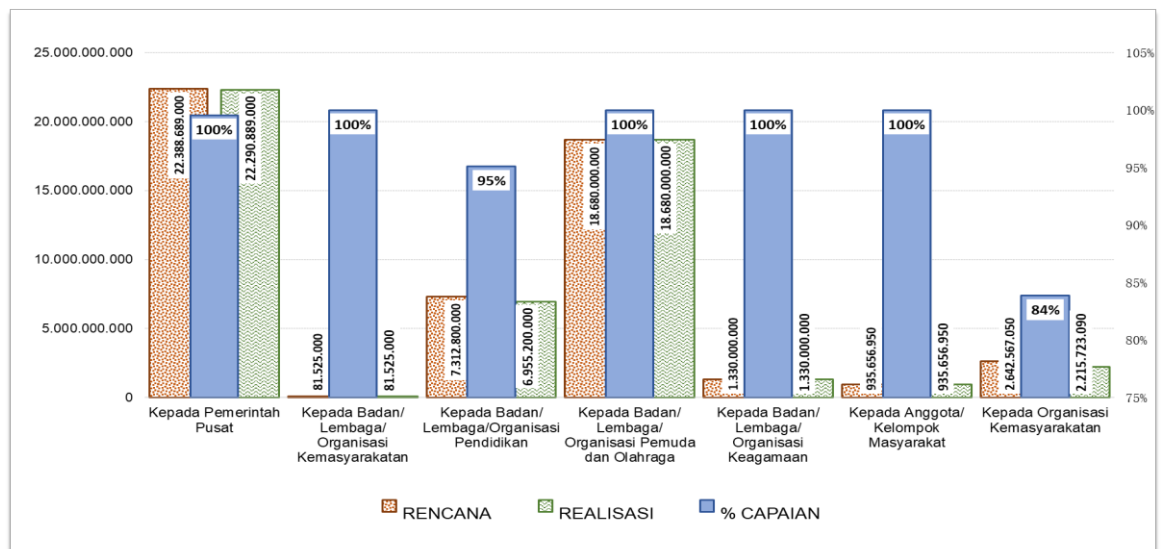
Pada tahun anggaran 2019 belanja hibah dianggarkan sebesar Rp. 53.371.238.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.488.994.040,- (98,35%). Target dan realisasi belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16 Rencana dan Realisasi Belanja Hibah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
		RENCANA	REALISASI	(%)
	TOTAL BELANJA HIBAH	53.371.238.000	52.488.994.040	98%
1	Kepada Pemerintah Pusat	22.388.689.000	22.290.889.000	100%
2	Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	81.525.000	81.525.000	100%
3	Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Pendidikan	7.312.800.000	6.955.200.000	95%
4	Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Pemuda dan Olahraga	18.680.000.000	18.680.000.000	100%
5	Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Keagamaan	1.330.000.000	1.330.000.000	100%
6	Kepada Anggota/ Kelompok Masyarakat	935.656.950	935.656.950	100%
7	Kepada Organisasi Kemasyarakatan	2.642.567.050	2.215.723.090	84%

Sumber: LRA Kota Cilegon 2019 (Unaudited)

Gambar 2.20
Rencana dan Realisasi Belanja Hibah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019



Sumber : Diolah dari LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited)

A.3 Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada tahun anggaran 2019 belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp. 5.171.113.784,- meliputi :

- bantuan sosial yang direncanakan sebesar Rp 2.763.700.000,- untuk alokasi bantuan beasiswa keluarga miskin, Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM), bantuan permakanan panti dan bantuan operasional panti, yang keseluruhannya terealisasi sebesar Rp. 1.692.360.000,- (61,24%); Anggaran bantuan sosial yang tidak terealisasi, antara lain dari beasiswa bagi anak miskin, kegiatan JSCM dan bantuan operasional panti.

Terkait beasiswa, hal ini diberikan kepada peserta yang memenuhi kriteria penerima sesuai dengan hasil verifikasi akhir; terkait JSCM, tidak seluruh anggaran dicairkan karena terdapat beberapa calon penerima sasaran sudah tercakup dalam sasaran program PKH dari sumber dana APBN. Sedangkan terkait operasional panti, anggaran ini tidak direalisasikan karena mengacu kepada regulasi tentang kewenangan bahwa rehalibitasi dalam panti merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

- b) bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk alokasi santuan kematian, cadangan rawan pangan, dan bantuan RTLH karena bencana sebesar Rp 2.407.413.784,-, yang keseluruhannya terealisasi sebesar Rp. 540.000.000,- (22,43%), sesuai dengan kejadian di lapangan.

Rincian rencana dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

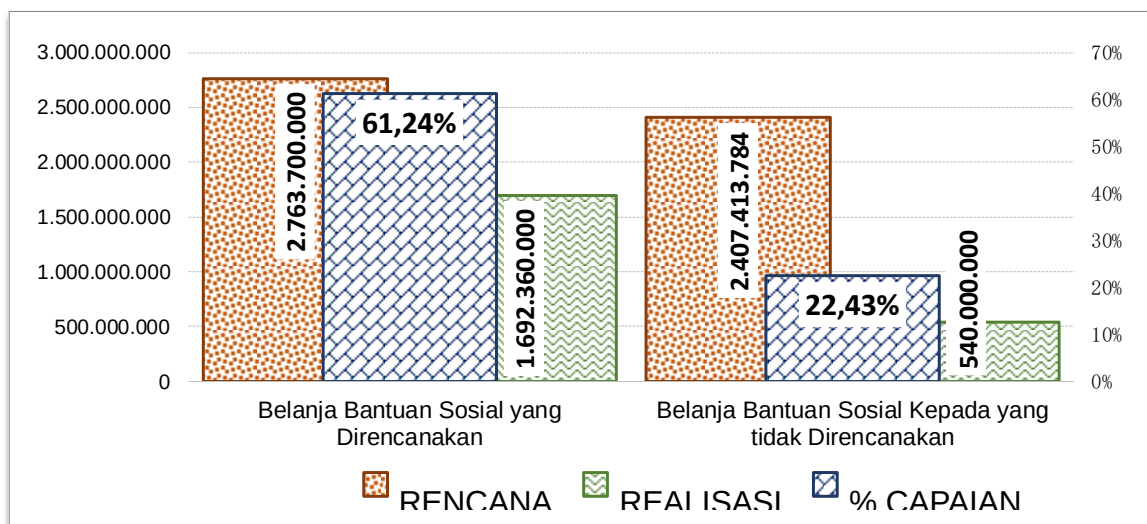
Tabel 2.17

Rencana dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
		RENCANA	REALISASI	(%)
	Belanja Bantuan Sosial	5.171.113.784	2.232.360.000	43,17%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	0	
2	Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan	2.763.700.000	1.692.360.000	61,24%
3	Belanja Bantuan Sosial Kepada yang tidak Direncanakan	2.407.413.784	540.000.000	22,43%

Gambar 2.21

Rencana dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019



A.4 Belanja Bantuan Keuangan

Di Kota Cilegon, belanja bantuan keuangan diperuntukan kepada partai politik. Pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Kota Cilegon menganggarkan sebesar Rp 976.730.599,- yang terealisasi 100%.

A.5 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan jenis belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Di tahun anggaran 2019, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 4.500.000.000,- yang hingga akhir tahun anggaran tidak terealisasi.

B. Belanja Langsung

Salah satu komponen terpenting dalam struktur APBD adalah belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dialokasikan secara langsung untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah Kota Cilegon.

Belanja langsung direncanakan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.249.706.724.020,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.086.384.918.213,- atau sebesar 86,93%. Komponen Belanja Langsung terdiri dari Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja modal. Adapun rinciannya sebagai berikut :

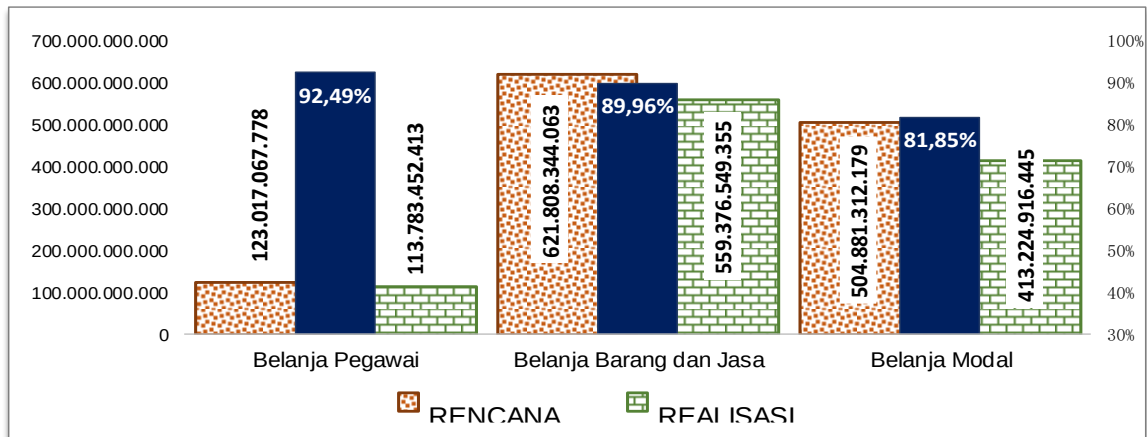
Tabel 2.18
Rencana dan Realisasi Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
		RENCANA	REALISASI	(%)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG	1.249.706.724.020,00	1.086.384.918.213,00	86,93%
1	Belanja Pegawai	123.017.067.778,00	113.783.452.413,00	92,49%
2	Belanja Barang dan Jasa	621.808.344.063,00	559.376.549.355,00	89,96%
3	Belanja Modal	504.881.312.179,00	413.224.916.445,00	81,85%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (*Unaudited*)

Gambar 2.22

Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019



Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (*Unaudited*)

B.1. Belanja Langsung berdasar Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanjanya, kelompok belanja langsung terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standar belanja tahun 2019.

Total anggaran belanja pegawai di tahun 2019 sebesar Rp 123,02 milyar atau sebesar 9,8% dari total belanja langsung, meliputi honorarium non PNS, honorarium PNS, belanja pegawai BLUD/BOS dan belanja untuk diberikan kepada pihak ketiga. Realisasi belanja pegawai di belanja langsung di tahun 2019 mencapai Rp. 113,8 milyar atau sebesar 92,49% dari total belanja pegawai.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jenis dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Total anggaran belanja barang dan jasa adalah Rp. 621,8 milyar atau sebesar 49,8% dari total belanja langsung, dan terealisasi sebesar RP. 559,37 milyar atau sebesar 89,96% dari anggaran belanja barang dan jasa.

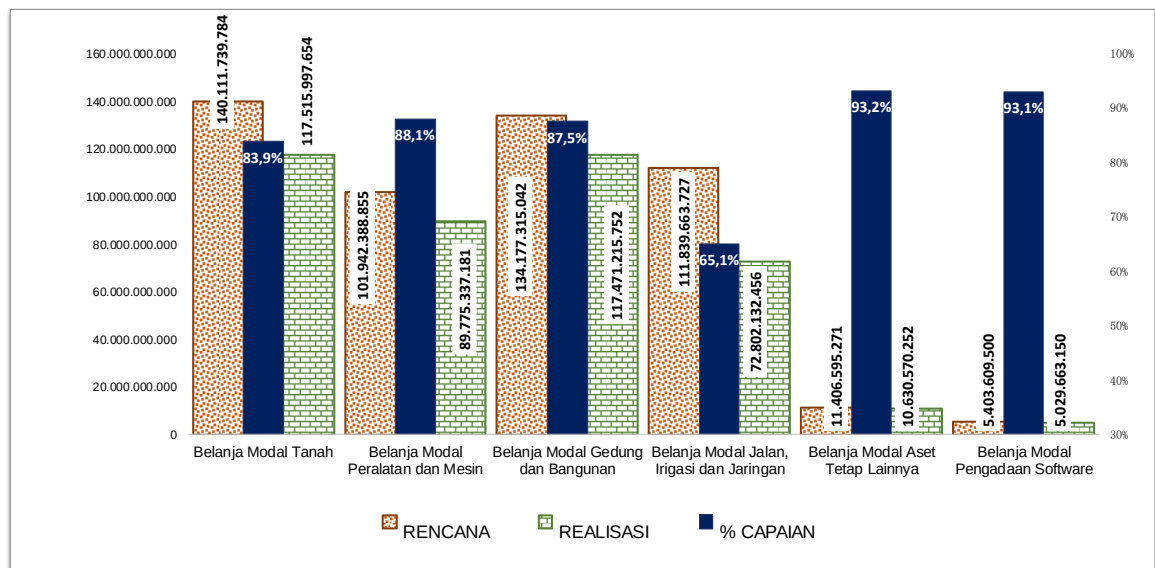
3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk pengadaan lahan, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

Di tahun 2019, belanja modal diprioritaskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah terutama jalan dan jembatan, pemenuhan sarana prasarana pemerintahan pengadaan sarana prasarana peningkatan layanan pemerintahan terutama kebersihan, penerangan jalan umum dan penataan Kawasan kumuh, serta pembangunan saluran dan drainase sebagai percepatan penanganan banjir.

Total anggaran belanja modal di tahun 2019 sebesar Rp 504,9 milyar atau sebesar 40,4% dari total belanja langsung, dan terealisasi sebesar Rp 413,3 milyar atau sebesar 81,87% dari anggaran belanja modal.

Gambar 2.23 Realisasi Komponen Belanja Modal



B.2. Belanja Langsung bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan

Berdasarkan sumber dananya, belanja langsung meliputi : belanja yang dibiayai dari dana transfer (dana perimbangan, antara lain meliputi DAU dan DAK) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (antara lain Bantuan Keuangan Provinsi).

B.2.1. Belanja Langsung bersumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep. 145-Huk/2019 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kota Cilegon memperoleh Bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar rupiah) yang dialokasikan untuk : a) Rehabilitasi Gedung Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 215.500.000,00; b) Pengadaan komputer sekolah menengah pertama sebesar Rp. 3.851.980.000,-; c) Pengadaan meubelair siswa dan guru sekolah menengah pertama negeri sebesar Rp. 695.050.000,- d) kegiatan pengadaan meubelair SMP Negeri Rp. 454.470.000; e) kegiatan Rehabilitasi ruang kelas SD Negeri dengan anggaran Rp. 2.289.543.000; f) kegiatan pengadaan meubelair Gedung Perpustakaan SD dengan anggaran sebesar Rp. 106.869.000; g) kegiatan Pengadaan Meubelair SD Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 916.566.000; h) kegiatan Pembangunan Puskesmas Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000, dan i) kegiatan Pembangunan JLU Rp. 27.476.022.000,-.

Berikut rincian kegiatan yang bersumber dana dari bantuan keuangan provinsi Banten tahun 2019 :

Tabel 2.19 Realisasi kegiatan yang bersumber dari Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2019

Program/ Kegiatan	Satuan output	Kinerja Fisik	Anggaran (Rupiah)			OPD
		Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri (Bantuan Keuangan)	1. 2 RK SDN Lebak Gede; 2. 2 RK SDN Cilegon IX 3. 2 RK SDN Kenanga; 4. 4 RK SDN Cilegon IV 5. 4 RK SDN Kedaleman I; 6. 3 RK SDN Blok C; 7. 3 RK SDN Babakan Turi; 8. 2 RK SDN Walikukun 9. 2 RK SDN Cilegon XII	100%	2.289.543.000	2.148.129.348	93,8%	Dindik
Pengadaan Meubelair Gedung Perpustakaan SD Negeri (Bantuan Keuangan)	10 rak buku, 1 Lemari Buku, 10 meja baca, 1 kursi kerja, 1 meja kerja @lokasi: 1. SDN Masigit III; 2. SDN Kubang Sepat I 3. SDN Cilegon II; 4. SDN Belumbang 5. SDN Pekalongan I; 6. SDN Kubang Lesung Kulon	100%	106.869.000	104.435.000	97,7%	Dindik
Pengadaan Meubelair SD Negeri (Bantuan Keuangan)	28 Meja Siswa, 28 Kursi Siswa, 1 Meja Guru, 1 Kursi Guru untuk 28 SD negeri, diantaranya: 1. SDN Krenceng I; 2. SDN Kebonsari II; 3. SDN Ketileng III; 4. SDN Cilegon V; 5. SDN Tembulun I; 6. SDN Pringori; 7. SDN Delingseng; 8. SDN Gunung Sugih; 9. SDN Samang Raya II; 10. SDN Cilegon VIII; 11. SDN Ketileng I; 12. SDN, dst...	100%	910.566.000	787.164.400	86,4%	Dindik
Rehabilitasi Gedung SMP (Bantuan Keuangan)	1 Paket R. Lab Komputer SMPN 1 Cilegon	100%	215.500.000	206.440.000	95,8%	Dindik
Pengadaan Komputer SMP (Bantuan Keuangan)	1. 3 server; 40 client SMPN 1 2. 3 server; 40 client SMPN 2 3. 3 server; 40 client SMPN 3 4. 3 server; 56 client SMPN 9 5. 3 server; 55 client SMPN 10	100%	3.851.980.000	3.729.743.200	96,8%	Dindik
Pengadaan Meubelair Siswa dan Guru SMP Negeri (Bantuan Keuangan)	1. 96 meja kursi siswa; 3 meja kursi guru SMPN 6 2. 96 meja kursi siswa; 3 meja kursi guru SMPN 8 3. 52 meja kursi siswa; 2 meja kursi guru SMPN 9 4. 52 meja kursi siswa; 2 meja kursi guru SMPN 10	100%	695.050.000	505.262.500	72,7%	Dindik
Pengadaan Meubelair SMP Negeri (Bantuan Keuangan)	1. 40 meja kursi komputer SMPN 2; 2. 40 meja kursi komputer SMPN 3; 3. 60 meja kursi komputer SMPN 9; 4. 60 meja kursi komputer SMPN 10	100%	454.470.000	373.460.000	82,2%	Dindik
Pembangunan Puskesmas Jombang (Bantuan Keuangan)	Puskesmas Jombang	100%	4.000.000.000	3.728.688.000	93,2%	Dinkes
Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Bantuan Keuangan)	1. 1 paket STA 04+600 s.d. 05+200 2. 1 paket STA 08+550 s.d. 09+150 3. 1 paket STA 12+000 s.d. 12+664	82%	27.476.022.000	12.798.736.620	46,58%	DPUTR
JUMLAH		88 %	40 Milyar	24,32 Milyar	61 %	

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, rendahnya serapan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara berdampak terhadap kinerja anggaran bantuan keuangan. Terkait hal ini, progress fisik kegiatan pembangunan JLU pada Sta 12 + 000 sd 12 + 664 hanya terealisasi sebesar 20%, karena masih terkendala dengan pembebasan lahan.

B.2.2. Belanja Langsung bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus

Di Tahun Anggaran 2019 Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) disampaikan melalui sistem aplikasi E-planning yang di kelola langsung oleh kementerian PPN/Bappenas. Anggaran dana alokasi khusus (DAK) adalah sebesar 137.067.056.000,- meliputi : 1) DAK Fisik sebesar Rp. 45.244.379.000,- untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas, sarpras belajar. Pengadaan alkes, penyediaan obat, sarpras rumah sakit, peningkatan struktur jalan, sarpras KB dan pelayanan kemetrolagian; 2) DAK non fisik sebesar Rp 91.822.677.000,- untuk dana tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional kesehatan puskesmas, akreditasi puskesmas, jaminan persalinan dan dana bantuan operasional keluarga berencana. Realisasi kegiatan mencapai Rp 103.288.710.740,- (75,35%). Capaian kegiatan yang bersumber dana dari dana alokasi khusus sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.20.a Target dan Realisasi Keg. yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019

Program/ Kegiatan	Satuan output	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)			OPD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
DAK FISIK					45.244.379.000	37.739.886.370	83,41%	
DAK REGULER								
BIDANG PENDIDIKAN								
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri (DAK)	Sekolah	5	5	100,0%	1.737.330.000	1.725.267.600	99,3%	Dindik
Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK)	Sekolah	3	3	100,0%	1.201.220.000	1.200.277.000	99,9%	Dindik
Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK)	Sekolah	10	10	100,0%	2.124.217.000	2.111.280.000	99,4%	Dindik
BIDANG KESEHATAN & KB								
Instalasi Pengolahan Air Limbah /IPAL (DAK)	unit	1	1	100,0%	450.000.000	446.650.000	99,3%	Dinkes
Penyediaan Obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	Tahun	1	1	100,0%	3.069.636.000	3.034.605.565	98,9%	Dinkes
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	kegiatan	1	1	100,0%	2.127.265.000	986.635.981	46,4%	Dinkes
Pengadaan Alat Kesehatan Rujukan (DAK)	jenis	20	20	100,0%	19.100.134.000	18.193.340.804	95,3%	RSUD
Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB (DAK)	Unit	1	1	92,2%	853.000.000	786.060.000	92,2%	DP3AKB
Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB (DAK)	Unit	11	11	100,0%	91.260.000	88.431.000	96,9%	DP3AKB
Pengadaan Sarana KIE Kita dan Media Lini Lapangan (DAK)	Unit	75	70	93,4%	371.540.000	346.857.500	93,4%	DP3AKB
BIDANG INFRASTRUKTUR/JALAN								
Peningkatan Struktur Jalan (DAK)	%	88	59	67,4%	12.363.453.000	8.331.602.000	67,4%	Dinas PUTR
DAK PENUGASAN								
BIDANG PASAR								
Peningkatan Pelayanan Kemetrolagian (DAK)	paket	1	-	0,0%	1.271.691.000	5.250.000	0,4%	Disperindag
BIDANG KESEHATAN & KB								
Penurunan Stunting (DAK)	Bulan	12	12	100,0%	483.633.000	483.628.920	100,0%	Dinkes

Tabel 2.20b Target dan Realisasi Keg. yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2019

Program/ Kegiatan	Satuan output	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)			OPD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
DAK NON-FISIK					91.703.046.500	90.622.638.814	98,82%	
Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal (DAK)	Keg	9	7	80,0%	250.000.000	199.992.000	80,0%	Dinkes
Upaya Kesehatan Sekunder Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	keg	15.346	14.047	91,5%	587.000.000	520.300.000	88,6%	Dinkes
BOK Distribusi Obat & E-logistik (DAK)	UPTD	8	8	100,0%	120.000.000	99.025.000	82,5%	Dinkes
Akreditasi Puskesmas (DAK)	Puskesmas	2	2	100,0%	774.480.000	736.077.639	95,0%	Dinkes
Jaminan Persalinan/Jampersal (DAK)	Tahun	1	1	100,0%	473.000.000	129.024.093	27,3%	Dinkes
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) (akumulasi 8 Puskesmas)	bulan	12	12	100,0%	3.289.000.000	3.273.676.000	99,5%	8 Puskesmas
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)	OK	1.600	1.600	100,0%	343.341.500	339.541.500	98,9%	Disdukcapil
Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)	kecamatan	8	7	89,6%	96.078.000	86.077.186	89,6%	Disdukcapil
Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK)	Dokumen	2	2	92,2%	282.287.500	260.257.500	92,2%	Disdukcapil
Pengelolaan SIAK (DAK)	tahun	1	1	100,0%	25.459.000	14.910.000	58,6%	Disdukcapil
Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksana Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)	Kegiatan	3	3	85,6%	150.000.000	128.318.646	85,5%	Disdukcapil
Dukungan Media KIE (DAK)	%	100	100	100,0%	162.800.000	161.000.000	98,9%	DP3AKB
Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader (DAK)	Kelurahan	43	43	100,0%	206.400.000	205.368.000	99,5%	DP3AKB
Biaya Operasional Distribusi Alokasi (DAK)	Kecamatan	8	8	100,0%	25.000.000	21.672.000	86,7%	DP3AKB
Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK)	Orang	15	15	100,0%	760.000.000	755.412.000	99,4%	DP3AKB
Dukungan Manajemen (DAK)	Tahun	1	1	100,0%	127.262.000	124.622.000	97,9%	DP3AKB
Biaya Operasional Penyuluhan (DAK)	%	100	100	100,0%	9.437.500	9.437.500	100,0%	UPT KCM I
Biaya Operasional Penyuluhan (DAK)	%	100	100	100,0%	10.932.000	10.932.000	100,0%	UPT KCM II
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro (DAK)	pelaku usaha	40	40	100,0%	470.000.000	420.630.000	89,5%	Diskop UMK
Hibah Kepada Organisasi Pendidikan (BOP PAUD)	Paud/TK/Playgroup/SPS	228	228	100,0%	5.791.200.000	5.440.500.000	93,9%	Dindik
Hibah Kepada Organisasi Pendidikan (BOP Kesetaraan)	lembaga	20	20	100,0%	1.521.600.000	1.521.600.000	100,0%	Dindik
Tunjangan Khusus Guru PNSD	Bulan	12	12	100,0%	75.967.257.000	75.944.440.750	100,0%	Dindik
Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	Bulan	12	12	100,0%	260.512.000	219.825.000	84,4%	Dindik

2.3.3 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

- 1) Persentase serapan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada Partai Politik dan belanja tidak terduga mencapai 90,46%. Serapan belanja bantuan sosial hanya mencapai 43,17% dalam hal ini tidak seluruh anggaran belanja bantuan sosial direalisasikan karena berpedoman kepada hasil verifikasi lapangan; Selain itu, beberapa sasaran/penerima program telah tercakup sebagai sasaran program Bantuan Sosial yang bersumber dana dari APBN.
- 2) Persentase serapan keseluruhan belanja langsung yang merupakan akumulasi belanja dari seluruh program maupun kegiatan yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon adalah sebesar 86,93 %. Beberapa kegiatan masih belum optimal penyerapannya dikarenakan adanya ketidaktepatan dalam perencanaan kegiatan al. terkait cash budget, kendala pada saat proses pelelangan, kelengkapan administrasi

khususnya terkait pengadaan lahan, serta adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan 4, yang ketika mengalami gagal lelang tidak memungkinkan lagi dilakukan lelang ulang.

B. Solusi

1. Meningkatkan kualitas perencanaan belanja tidak langsung khususnya terkait belanja bantuan sosial, melalui peningkatan kualitas verifikasi serta peningkatan pemahaman terkait mekanisme dan alokasi bantuan sosial bagi pengusul dan penerima program.
2. Meningkatkan kinerja serapan belanja langsung melalui peningkatan pengendalian sejak tahap perencanaan kegiatan, hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, yang dalam hal ini didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi, serta system reward dan punishment berbasis kinerja.

2.4 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada struktur APBD komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Sesuai dengan arah kebijakan pembiayaan dalam APBD, yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah.

Pada APBD Tahun 2019, penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 192.902.114.842,-. Silpa ini selain dari efisiensi belanja juga merupakan silpa anggaran BLUD serta realisasi pendapatan dana transfer khususnya bantuan keuangan yang tidak terserap. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk dana cadangan pilkada sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang dalam hal ini tidak direalisasikan di tahun 2019. Anggaran ini menjadi bagian dari SILPA Tahun 2019 yang akan tercatat sebagai penerimaan pembiayaan (pencairan dana cadangan) pada APBD Tahun 2020.

Tabel 2.21

Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
		RENCANA	REALISASI	(%)
	PEMBIAYAAN DAERAH	202.902.114.842	192.902.114.842	95,07%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	192.902.114.842	192.902.114.842	100,00%
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000	0	0,00%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (*Unaudited*)



2.5 RINGKASAN REALISASI KEUANGAN DAERAH

Ringkasan APBD dan realisasi tahun anggaran 2019 sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19

Ringkasan Rencana dan Realisasi APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
	RENCANA	REALISASI	%
PENDAPATAN	1.881.449.605.475	1.766.980.559.475	93,92%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	688.080.294.550	634.798.056.162	92,26%
Pendapatan Pajak Daerah	540.425.611.122	488.733.692.539	90,43%
Hasil Retribusi Daerah	17.557.451.636	18.728.314.750	106,67%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.127.092.370	17.127.057.370	100,00%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.970.139.422	110.208.991.503	97,56%
DANA PERIMBANGAN	912.378.533.000	866.731.464.020	95,00%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	131.420.440.000	98.126.631.451	74,67%
Dana Alokasi Umum	643.891.037.000	643.891.037.000	100,00%
Dana Alokasi Khusus	137.067.056.000	124.713.795.569	90,99%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	280.990.777.925	265.451.039.293	94,47%
Pendapatan Hibah	39.774.000.000	38.863.765.413	97,71%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	168.049.961.925	153.420.457.880	91,29%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.166.816.000	33.166.816.000	100,00%
Bantuan Keuangan dari Provinsi	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
BELANJA	2.064.351.720.317	1.823.308.111.142	88,32%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	814.644.996.297	736.923.192.929	90,46%
Belanja Pegawai	750.625.913.914	681.225.108.290	90,75%
Belanja Hibah	53.371.238.000	52.488.994.040	98,35%
Belanja Bantuan Sosial	5.171.113.784	2.232.360.000	43,17%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota, Desa dan Partai Politik	976.730.599	976.730.599	100,00%
Belanja tidak terduga	4.500.000.000	0	0,00%
BELANJA LANGSUNG	1.249.706.724.020	1.086.384.918.213	86,93%
Belanja Pegawai	123.017.067.778	113.783.452.413	92,49%
Belanja Barang dan Jasa	621.808.344.063	559.376.549.355	89,96%
Belanja Modal	504.881.312.179	413.224.916.445	81,85%
SURPLUS / DEFISIT(-)	-182.902.114.842	-56.327.551.667	30,80%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	192.902.114.842	192.902.114.842	100,00%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	192.902.114.842	192.902.114.842	100,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000	0	0,00%
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	10.000.000.000	0	0,00%
Pengeluaran Investasi Non Permanen Dana Bergulir	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN	182.902.114.842	192.902.114.842	105,47%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2019	0	136.574.563.175	

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2019 (Unaudited)

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.1 Bidang Urusan Pendidikan

A. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

A.1 Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal

Tabel 3.1.1a

Target dan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal						7.344,67	6.851,05	93,28%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) POS PAUD/ KOBER/ TPA/ SPS (0-6 tahun)	%	8,87	8,65	97,52%			
	APK PAUD usia 3-6 tahun (RENSTRA KEMDIKBUD)	%	43,60	39,19	89,89%			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (TK/RA/TPA)	%	37,55	32,55	86,68%			
	Angka Melanjutkan (AM) POS PAUD/ KOBER/ TPA/ SPS	%	100,00	100,00	100,00%			
	Angka Putus Sekolah (APTs) PAUD/ KOBER/ TPA/ MDA	%	-	-	100,00%			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK dan sederajat (TK/RA)	%	36,96	34,16	92,42%			
	Angka Partisipasi Murni (APM) TK/RA	%	36,96	34,16	92,42%			
	Proporsi jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang melek huruf	%	100,00	99,94	99,94%			
	Rasio sekolah PAUD terhadap murid	%	2,00	2,52	126,00%			
	Rasio jumlah PAUD per penduduk	%	1,18	1,33	112,71%			
	Tingkat kelulusan UN kejar paket A	%	100,00	100,00	100,00%			
	Tingkat kelulusan pendidikan kesetaraan Paket B dan C	%	100,00	100,00	100,00%			
	APM Pendidikan Prasekolah	%	59,12	52,97	89,60%			
	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Prasekolah	%	23,65	23,61	99,83%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Jumlah Penyelenggara LKP	LKP	138,00	136,00	98,55%			
	Jumlah Instruktur pada Program LKP	orang	270,00	270,00	100,00%			
	Jumlah lembaga kursus yang memiliki TUK (Tempat Uji Kompetensi)	Lembaga	8,00	8,00	100,00%			
	Jumlah peserta didik Kegiatan Pelestarian Melek Aksara	Orang	250,00	200,00	80,00%			
	Cakupan kelembagaan PAUD yang dibina	%	100,00	100,00	100,00%			
	Cakupan lembaga PAUD yang dikembangkan	%	100,00	100,00	100,00%			
	Cakupan lembaga PAUD Formal dan Non Formal yang mendapatkan APE	%	8,01	9,70	121,10%			
	Cakupan warga Belajar yang mengikuti ujian kompetensi/Ujian Nasional	%	17,04	68,25	400,53%			
	Jumlah kelembagaan PAUD yang dibina	Lembaga	312,00	331,00	106,09%			
	Jumlah lembaga PAUD yang dikembangkan	Lembaga	312,00	331,00	106,09%			
	Jumlah lembaga TK/RA yang dibina	Lembaga	160,00	179,00	111,88%			
Pengadaan Peralatan/Pendidikan PAUD Holistik Integratif	Tersedianya Alat didik PAUD Holistik Integratif	Lembaga	2	2	100,00%	325,00	318,35	97,95%
Pengadaan Fasilitas Sarana Lembaga Kursus	Jumlah Lembaga Kursus yang diberikan Bantuan	Lembaga	4	4	100,00%	130,00	128,30	98,69%
Pengadaan Fasilitas Sarana Belajar Bagi PAUD	Tersedianya alat peraga edukasi (APE) Indoor outdoor dan Meubeleir bagi PAUD	Lembaga	16	16	100,00%	450,00	439,32	97,63%
Pengadaan Sarana Prasarana Warga Belajar	Jumlah Kelompok Keaksaraan Fungsional yang diberikan sarana prasarana	kegiatan	1	1	100,00%	163,20	158,15	96,91%
Pengadaan Alat Didik TK Holistik Integratif	Tersedianya Alat didik TK Holistik Integratif	Lembaga	3	3	100,00%	207,50	200,65	96,70%
Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Jumlah Kebutuhan Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Lembaga	28	28	100,00%	228,90	224,25	97,97%
Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Jumlah Lembaga PKBM yang mendapatkan operasional	PKBM	15	15	100,00%	172,60	170,68	98,89%
Rehabilitasi Gedung PAUD	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Gedung PAUD	Lembaga	2	2	100,00%	200,00	196,37	98,19%
Pelatihan pengelolaan lembaga kursus/pelatihan	Terselenggaranya mutu tenaga pengelola kursus	Orang	40	40	100,00%	37,77	22,97	60,81%
Pelatihan Kelembagaan Pengelola PKBM, TBM, LKP dan PAUD	Jumlah Pengelola PKBM TBM dan LKP yang mendapatkan Pelatihan Kelembagaan	Orang	275	275	100,00%	166,20	163,04	98,10%
Peningkatan Kompetensi Pengelola TK Holistik Integratif	Terselenggaranya peningkatan kompetensi Pengelola TK Holistik Integratif	Orang / Lembaga	98	98	100,00%	90,00	72,15	80,17%
Apresiasi PTK PNFI Berprestasi Tingkat Kota Cilegon	Terlaksananya Kegiatan Lomba dalam Rangka Apresiasi PTK PNFI Berprestasi Tingkat Kota Cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%	198,95	194,62	97,82%
Bantuan BOP TK Negeri	Jumlah TK negeri Penerima Pendampingan	Lembaga	14	14	100,00%	257,59	252,80	98,14%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Biaya Operasional Pembangunan (BOP)							
Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Cilegon	Jumlah Peserta Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Cilegon	kegiatan	1	1	100,00%	51,30	41,51	80,92%
Supervisi Pelaporan Evaluasi Monitoring dan Pembinaan Penilik	Jumlah kegiatan Supervisi Pelaporan Evaluasi Monitoring dan Pembinaan Penilik	kegiatan	1	1	100,00%	40,89	40,89	100,00%
Penyelenggaraan Lomba Kesiswaan Paket B Tingkat Kota Cilegon	Jumlah Lomba Kesiswaan paket B Tingkat Kota Cilegon	kegiatan	1	1	100,00%	135,00	132,99	98,51%
Penyelenggaraan keterampilan bagi Warga Belajar Paket C	Terlaksananya Penyelenggaraan Keterampilan bagi Warga Belajar Paket C	kegiatan	1	1	100,00%	178,19	175,23	98,34%
Gebyar kreativitas peserta didik PAUD dan TK	Terlaksananya Gebyar Kreativitas peserta didik PAUD dan TK	Kegiatan	1	1	100,00%	91,78	64,72	70,52%
Seminar pembentukan jati diri bagi warga belajar paket C dan paket B	Terlaksananya Seminar Pembentukan Jati Diri Bagi Warga Belajar Paket C dan Paket B	kegiatan	1	1	100,00%	62,86	61,15	97,28%
Jambore pramuka kesetaraan paket B	Terlaksananya kegiatan Jambore Pramuka Kesetaraan warga belajar paket B	kegiatan	1	1	100,00%	61,31	60,67	98,95%
Workshop keriususahaan bagi warga belajar pendidikan Non Formal dan LKP	Terlaksananya Workshop Kewirausahaan Bagi Warga Belajar Pendidikan Non Formal dan LKP	kegiatan	1	1	100,00%	100,00	98,15	98,15%
Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Kesetaraan	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Ujian Nasional dan ujian sekolah kesetaraan	Orang	900	900	100,00%	96,00	88,23	91,91%
Pendampingan Operasional DAK	Jumlah Kegiatan Pendampingan Operasional DAK	kegiatan	1	1	100,00%	128,26	126,61	98,71%
Operasional PAUD Formal dan Non Formal	Jumlah Kebutuhan Operasional PAUD Formal dan Non Formal	Lembaga	100	100	100,00%	199,45	190,07	95,30%
Ujian Kompetensi Keterampilan Warga Belajar Non Formal	Jumlah Peserta Ujian Kompetensi Keterampilan Warga Belajar Non Formal	Orang	75	75	100,00%	71,41	70,40	98,58%
Pelatihan Keterampilan Warga Belajar Non Formal	Jumlah Warga Belajar Non Formal yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan	Orang	80	80	100,00%	180,00	176,32	97,96%
Penyelenggaraan Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan TK	Terselenggaranya Lomba Kesiswaan TK Tingkat Kota Cilegon	kegiatan	1	1	100,00%	76,82	75,10	97,77%
Pelestarian Keaksaraan Fungsional	Jumlah Peserta Pelestarian Keaksaraan Fungsional	kegiatan	1	1	100,00%	64,22	64,22	100,00%
Penyelenggaraan Paket B dan C kesetaraan Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B dan C Kesetaraan Pendidikan Non Formal	Orang	615	615	100,00%	350,00	349,40	99,83%
Pendampingan Akreditasi Satuan Lembaga PNFI	Jumlah Satuan lembaga PNFI yang Terakreditasi	Lembaga	30	30	100,00%	159,81	125,63	78,62%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pengembangan Kurikulum 2013 PAUD Dan TK	Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum 2013 PAUD Dan TK	Lembaga	241	241	100,00%	175,00	162,53	92,88%
Peningkatan Kompetensi Pengelola PAUD Holistik Integratif	Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Pengelola PAUD Holistik Integratif	Orang	150	150	100,00%	220,00	207,28	94,22%
Penyusunan Bahan Ajar Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Dan Paket C	Jumlah peserta workshop Bahan Ajar Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Dan Paket C	Orang	100	100	100,00%	192,50	152,19	79,06%
Pelatihan Dan Penulisan Soal UPK Pendidikan Kesetaraan	Terlaksananya Pelatihan Dan Penulisan Soal UPK Pendidikan Kesetaraan	Orang	50	50	100,00%	82,50	64,43	78,09%
Bimtek Kurikulum Lembaga Kursus Dan Pelatihan	Terlaksananya Bimtek Kurikulum Lembaga Kursus Dan Pelatihan	Orang	100	100	100,00%	165,00	143,26	86,82%
Penilaian Kinerja Lembaga P2PNF	Terlaksananya kegiatan Penilaian Kinerja Lembaga P2PNF	Lembaga	9	9	100,00%	350,00	318,53	91,01%
Operasional POKJA Akreditasi	Terlaksananya Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal	Kegiatan	1	1	100,00%	82,50	82,50	100,00%
Pembinaan Dan Pengembangan PKG PAUD Formal dan Non Formal	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan PKG PAUD Formal dan Non Formal	Kecamatan	8	8	100,00%	352,00	267,98	76,13%
Bimtek Penguatan Pendidikan Keluarga dan Pelibatan Orang Tua Pada Satuan Pendidikan	Terlaksananya Bimtek Penguatan Pendidikan Keluarga dan Pelibatan Orang Tua Pada Satuan Pendidikan	Kegiatan	1	1	100,00%	285,00	256,10	89,86%
Pengadaan Server dan Komputer Bagi PKBM	Tersedianya Komputer dan Server untuk UNBK PKBM	PKBM	2	2	100,00%	300,00	297,61	99,20%
Gebyar Pramuka Pra Siaga PAUD Saka Widya Budaya Bakti	Jumlah peserta yang mengikuti Gebyar Pramuka Pra siaga PAUD saka widya budaya bakti	kegiatan	1	1	100,00%	250,00	241,80	96,72%
Rehabilitasi Gedung TK Negeri	Jumlah Lembaga TK Negeri yang mendapatkan rehab gedung	Sekolah	1	1	100,00%	140,87	101,75	72,23%
Pengadaan Peralatan Kantor bagi Lembaga PAUD	Tersedianya peralatan kantor bagi lembaga PAUD	Lembaga	8	8	100,00%	74,31	72,17	97,12%

Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal merupakan bagian dari upaya perluasan akses pendidikan di Kota Cilegon. Melalui jalur pendidikan non formal yang dilakukan antara lain melalui Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keaksaraan serta pendidikan kesetaraan melalui kejar paket A, B dan C, serta jalur pendidikan informal melalui jalur pendidikan keluarga dan masyarakat yang dilakukan secara mandiri. Sasaran Strategis Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal adalah Terwujudnya penyediaan dan pengembangan layanan satuan Pendidikan PAUD Formal dan Non Formal yang merata dan berkeadilan secara berkesinambungan, berkualitas, terjangkau, relevan dan kompetitif.



Sasaran Strategis untuk Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal adalah terwujudnya penyediaan dan pengembangan layanan satuan Pendidikan PAUD Formal dan Non Formal yang merata dan berkeadilan secara berkesinambungan, berkualitas, terjangkau, relevan dan kompetitif dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan capaian realisasi 99,94% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat baca tulis terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (TK/RA/TPA) dengan capaian realisasi 32,55% dari target RPJMD 37,55%, berdasarkan rencana target yang ditetapkan terlihat realisasi yang diperoleh masih dibawah target dikarenakan jumlah penduduk usia 5-6 tahun pada tahun 2019 mengalami kenaikan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah sekolah PAUD pada tahun 2019, capaian ini terukur melalui jumlah peserta didik usia 5-6 tahun pada jenjang PAUD terhadap jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun;
3. Angka Melanjutkan (AM) POS PAUD/KOBER/TPA/SPS dengan capaian realisasi 100% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah peserta didik yang lulus pada jenjang PAUD terhadap jumlah peserta didik baru yang masuk pada kelas 1 jenjang SD;
4. Angka Putus Sekolah (APTs) PAUD/KOBER/TPA/MDA dengan capaian realisasi 0% dari target RPJMD 0,00%, capaian ini terukur melalui jumlah siswa yang putus sekolah pada jenjang PAUD terhadap jumlah seluruh siswa pada jenjang PAUD;
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) TK dan sederajat dengan capaian realisasi 34,16% dari target RPJMD 36,96%, hal ini dikarenakan jumlah masyarakat usia 4-6 tahun terpecah tidak hanya bersekolah pada jenjang TK dan RA tetapi ada juga yang masih bersekolah pada jenjang PAUD Non Formal seperti Kober, TPA dan SPS, capaian ini terukur melalui jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA usia 4-6 tahun terhadap jumlah penduduk usia 4-6 tahun.

Pada program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal di atas terdapat 14 Indikator program yang rata-rata capaian realisasinya sudah mencapai lebih dari 90%, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan dan partisipasi masyarakat pada jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal telah terkelola dengan baik. Salah satu keberhasilan prestasi yang diraih program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal adalah tercapainya Nilai Akreditasi tertinggi Tahun 2019 dan meningkatnya pelayanan PAUD Holistik Integratif Tahun 2019. Keberhasilan tersebut didukung dengan adanya kegiatan – kegiatan sebagai berikut :



1. Pengadaan Peralatan/Pendidikan PAUD Holistik Integratif dengan *output* Tersedianya Alat didik PAUD Holistik Integratif untuk 3 lembaga dengan capaian persentasi pagu anggaran 97,95%;
2. Pengadaan Alat Didik TK Holistik Integratif dengan *output* Tersedianya Alat didik TK Holistik Integratif untuk 3 TK Negeri dengan capaian persentasi pagu anggaran 96,70%;
3. Peningkatan Kompetensi Pengelola PAUD Holistik Integratif dengan *output* Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Pengelola PAUD Holistik Integratif sebanyak 141 orang dengan capaian persentasi pagu anggaran 94,22%;
4. Peningkatan Kompetensi Pengelola TK Holistik Integratif dengan *output* Terselenggaranya peningkatan kompetensi Pengelola TK Holistik Integratif sebanyak 79 orang/lembaga dengan capaian persentasi pagu anggaran 80,17%.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kinerja dan anggaran kegiatan pada Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal telah mencapai realisasi rata-rata lebih dari 90% yang berarti semua kegiatan dan anggaran yang tersedia telah dilaksanakan dengan baik pada tahun 2019.

Adapun beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih belum optimal antara lain sebagai berikut :

1. Pelatihan pengelolaan lembaga kursus/pelatihan;

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya mutu tenaga pengelola kursus, dengan target RPJMD 40 orang dan realisasi 24 orang. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.22.965.100,- dari target Rp.37.765.100,- dengan persentasi capaian anggaran 60,81%, hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan didalam DPA 2 hari, sedangkan anggaran belanja makanan dan minuman hanya 1 hari. Sehingga kegiatan dilaksanakan satu hari. Adapun anggaran yang tidak diserap adalah belanja sewa gedung dan honorarium narasumber di hari kedua dan belanja transportasi peserta.

2. Gebyar kreativitas peserta didik PAUD dan TK;

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya gebyar kreativitas peserta didik PAUD dan TK, dengan target RPJMD 400 orang dan realisasi 282 orang. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.64.720.000,- dari target Rp.91.775.000,- dengan persentasi capaian anggaran 70,52%, hal ini dikarenakan adanya efisiensi dalam penyerapan belanja makanan dan minuman peserta karena disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir. Selain itu kurangnya motivasi peserta untuk hadir mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan tidak diperbolehkannya uang saku sebagai pengganti transport peserta.

3. Pendampingan Akreditasi Satuan Lembaga PNFI;

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pendampingan akreditasi satuan lembaga PNFI, dengan target RPJMD 30 lembaga dan realisasi 24 lembaga. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.125.633.500,- dari target Rp.159.805.000,- dengan persentasi capaian anggaran 78,62%, hal ini dikarenakan adanya pengalihan uang transport peserta, dan honorarium narasumber yang melebihi standar satuan harga atau SSH.

4. Penyusunan Bahan Ajar Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Dan Paket C;

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya penyusunan bahan ajar program pendidikan kesetaraan Paket B Dan Paket C, dengan target RPJMD 100 orang dan realisasi 84 orang. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.152.189.000,- dari target Rp.192.500.000,- dengan persentasi capaian anggaran 79,06%, hal ini dikarenakan adanya kode rekening belanja transportasi yang tidak diserap dikarenakan melebihi SSH.

5. Pelatihan Dan Penulisan Soal UPK Pendidikan Kesetaraan;

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelatihan dan penulisan soal UPK pendidikan kesetaraan, dengan target RPJMD 50 orang dan realisasi 44 orang. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.64.425.000,- dari target Rp.82.500.000,- dengan persentasi capaian anggaran 78,09%, hal ini dikarenakan efisiensi belanja jasa transportasi dan honorarium narasumber melebihi SSH.

6. Pembinaan Dan Pengembangan PKG PAUD Formal dan Non Formal;

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan dan pengembangan PKG PAUD Formal dan Non Formal, dengan target RPJMD 8 kecamatan dan realisasi 8 kecamatan. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.267.981.000,- dari target Rp.352.000.000,- dengan persentasi capaian anggaran 76,13%, hal ini dikarenakan belanja ATK tidak diserap karena ada kesalahan kode rekening yang seharusnya belanja alat perlengkapan pendidikan tetapi masuk dalam kode rekening ATK, dan belanja jasa transport peserta tidak diserap karena peserta yang mengikuti kegiatan telah mendapat honor daerah.

7. Rehabilitasi Gedung TK Negeri;

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi gedung TK Negeri, dengan target RPJMD 1 tahun dan realisasi 1 tahun. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.101.745.600,- dari target Rp.140.870.600,- dengan persentasi capaian anggaran 72,23%, hal ini dikarenakan pada saat pengesahan DPA APBD-P tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga tidak ada konsultan yang sanggup untuk melaksanakan kegiatan ini.

A.2 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar

Tabel 3.1.1b

Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar						30.529,37	28.002,67	91,72%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	%	115,35	105,58	91,53%			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A	%	100,47	92,98	92,55%			
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A	%	100,47	92,98	92,55%			
	Angka Mengulang Kelas (AMK) SD/ MI	%	2,91	0,33	188,66%			
	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI/ SDLB ke SMP/ MTs/ SMPLB	%	100,00	100,00	100,00%			
	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/ MI	%	0,25	0,15	140,00%			
	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	100,00	100,00	100,00%			
	Rata - rata lama sekolah (RLS)	Tahun	10,67	9,73	91,19%			
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,43	13,13	90,99%			
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi , SMP/MTs) (Permendagri 100 thn 2018)	%	91,59	105,39	115,07%			
	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan	%	100,00	100,00	100,00%			
	Prosentase gedung SD/MI dalam kondisi baik	%	98,30	95,63	97,28%			
	Prosentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik	%	81,50	95,63	117,34%			
	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen	%	100,00	100,00	100,00%			
	Setiap rombongan belajar untuk SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	%	100,00	100,00	100,00%			
	Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya	%	97,00	100,00	103,09%			
	Satuan pendidikan SD/MI menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	Sekolah	190,00	194,00	102,11%			
	Kepala sekolah atau madrasah SD/MI menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester	%	100,00	100,00	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	(UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota							
	Jumlah SD/MI/SDLB yang mendapat pengembangan pembelajaran pendidikan agama dan bahasa inggris	Sekolah	190,00	194,00	102,11%			
	Pemerintah kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif untuk SD/ MI	%	100,00	100,00	100,00%			
	Satuan pendidikan SD/MI menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : kelas I-II (18 jam per minggu); kelas III-IV (24 jam per minggu); kelas V-VI (27 jam per minggu)	%	100,00	100,00	100,00%			
Revitalisasi Ruang Kelas Sekolah Dasar	Terlaksananya Revitalisasi Ruang Kelas Sekolah Dasar	Sekolah	7	7	100,00%	3.156,33	2.784,80	88,23%
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri	Terpeliharanya Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri	Ruang Kelas	22	22	100,00%	2.121,42	1.995,98	94,09%
Bantuan Operasional Sekolah Model dan Gugus	Jumlah sekolah yang mendapat Bantuan Operasional Sekolah Model dan Gugus	3 Sekolah dan 28 Sekolah Model Gugus	31	31	100,00%	118,80	118,12	99,43%
Pembangunan Ruang Perpustakaan	Tersedianya Ruang Perpustakaan Sekolah	SD	3	3	100,00%	601,10	594,99	98,98%
Revitalisasi Gedung Kantor/Guru	Tersedianya Ruang Kantor untuk Guru di sekolah	SD	2	2	100,00%	782,40	694,98	88,83%
Pembangunan TPT, Cut and Fill Sekolah Dasar	Terlaksananya Pembangunan TPT, Cut and Fill di sekolah dasar	SD	2	2	100,00%	1.668,60	1.414,93	84,80%
Pemagaran Sekolah Dasar	Tersedianya pagar sekolah dasar	SD	4	4	100,00%	591,00	585,53	99,07%
Pembangunan RKB SD Negeri	Tersedianya Ruang Kelas Baru	Ruang	6	6	100,00%	1.301,00	1.289,68	99,13%
Pembangunan Toilet Dasar	Tersedianya Toilet Sekolah Dasar	Ruang	16	16	100,00%	307,66	303,74	98,73%
Pembangunan Ruang UKS Sekolah Dasar	Tersedianya ruang UKS Sekolah Dasar	SDN	1	1	100,00%	152,72	151,72	99,35%
Pengadaan Meubeleir Sekolah Dasar	Tersedianya meubeleir untuk sekolah dasar	Ruang	36	36	100,00%	900,00	686,66	76,30%
Pengadaan Alat Peraga/praktek Pendidikan sekolah	Tersedianya alat peraga/praktek pendidikan sekolah	Sekolah	8	8	100,00%	178,00	175,78	98,75%
Penyelenggaraan Lomba - Lomba	Terselenggaranya Lomba - Lomba	Mata Lomba	21	21	100,00%	520,95	471,32	90,47%
Pelaksanaan Kegiatan FLS2N, OSN	Terlaksananya Kegiatan FLS2N dan OSN	Kegiatan	2	2	100,00%	178,00	142,42	80,01%
Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Yang Menyelenggarakan PSB	Sekolah Negeri	150	150	100,00%	83,16	81,98	98,58%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Penyelenggaraan dan Pelatihan UASBN dan US SD/MI	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan UASBN dan US SD/MI	Siswa	800	800	100,00%	357,60	288,30	80,62%
Penyelenggaraan Pembinaan Program Gugus dan KKKS	Jumlah peserta Pembinaan Program Gugus dan KKKS	Kegiatan	1	1	100,00%	623,65	569,50	91,32%
Pelatihan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar (SD)	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar (SD)	Peserta	160	160	100,00%	478,90	439,84	91,84%
Pelatihan Penulisan Soal Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan Penulisan Soal Jenjang Sekolah Dasar	Peserta	80	80	100,00%	86,15	80,15	93,04%
Pengadaan Buku Paket/ Perpustakaan Sekolah	Tersedia Buku Pustaka	Kegiatan	1	1	100,00%	148,50	146,45	98,62%
Penyelenggaraan Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan	Jumlah Lomba Kesiswaan yang di laksanakan	Mata Lomba	20	20	100,00%	600,00	564,22	94,04%
Penyelenggaraan Pembinaan Program UKS SD	Jumlah peserta Pembinaan Program UKS SD	Peserta	50	50	100,00%	70,15	67,11	95,67%
Pembinaan Manajemen Sekolah Mantap	Tersedianya Pengelola Sekolah Yang Berkompeten	Peserta	100	100	100,00%	100,00	97,00	97,00%
Penyelenggaraan Beasiswa SD	Terselenggaranya Beasiswa untuk sekolah dasar	Sekolah Dasar	160	160	100,00%	80,54	28,06	34,84%
Bimbingan Teknis Tim Pengelola Beasiswa Sekolah SD	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tim Pengelola Beasiswa Sekolah SD	Kegiatan	1	1	100,00%	88,62	42,02	47,42%
Pendidikan dan Pelatihan Non Akademik	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Non Akademik	Kegiatan Non Akademik	7	7	100,00%	492,17	482,33	98,00%
Pembangunan Sekolah Dasar Negeri	Terlaksananya Pembangunan SDN Ciwedus 1	Sekolah	1	1	100,00%	1.034,39	982,10	94,94%
Revitalisasi Sekolah Dasar Negeri	Terlaksananya Revitalisasi SD Negeri	Sekolah	1	1	100,00%	844,80	759,49	89,90%
Pengembangan Kurikulum Sekolah mantap	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar (SD) Mantap	Sekolah	8	8	100,00%	188,00	97,00	51,60%
Sosialisasi Program Indonesia Pintar	Terlaksananya penyaluran bantuan pendidikan siswa penerima PIP	Sekolah	150	150	100,00%	36,40	19,45	53,43%
Pengadaan Alat TIK Sekolah Dasar Negeri	Tersedianya peralatan LAB Komputer untuk SD Negeri	PC, Laptop, Proyektor	64, 4, 4	64, 4, 4	100,00%	322,95	301,32	93,30%
Renovasi Pagar dan Gapura	Terlaksananya Renovasi Pagar dan Gapura	SD	2	2	100,00%	300,00	296,05	98,68%
Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD	SD	2	2	100,00%	300,00	293,64	97,88%
Penulisan Soal UASBN SD/MI	Jumlah Mata Pelajaran hasil Penulisan Soal Jenjang Sekolah Dasar	Mata Pelajaran	3	3	100,00%	95,00	92,00	96,84%
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri (DAK)	Terpeliharanya Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri	Sekolah	5	5	100,00%	1.737,33	1.725,27	99,31%
Revitalisasi Ruang Kelas Sekolah Dasar (DID)	Terlaksananya Revitalisasi Ruang Kelas Sekolah Dasar (DID)	Sekolah	4	4	100,00%	4.856,10	4.516,25	93,00%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar (DID)	Terpeliharanya Ruang Kelas Sekolah Dasar (DID)	Ruang Kelas	1	1	100,00%	226,69	219,30	96,74%
Pengadaan Meubeuleir Sekolah Dasar (DID)	Tersedianya Barang Meubeuleir	Ruang	24	24	100,00%	924,29	817,56	88,45%
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang kelas SD Negeri (Bantuan Keuangan)	Sekolah	5	5	100,00%	2.289,54	2.148,13	93,82%
Pengadaan Meubeleir Gedung Perpustakaan SD Negeri (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya Pengadaan Meubeleir Gedung Perpustakaan SD Negeri (Bantuan Keuangan)	Sekolah	5	5	100,00%	106,87	104,44	97,72%
Pengadaan Meubeleir SD Negeri (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya Pengadaan Meubeleir SD Negeri (Bantuan Keuangan)	Sekolah	5	5	100,00%	910,57	787,16	86,45%
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Sekolah Dasar Negeri	Terlaksananya Program Penyusunan Detail Engineering Design (DED)	Tahun	1	1	100,00%	569,05	545,90	95,93%
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan BOS)						30.965,26	30.216,85	97,58%
Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOS SD)	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOS SD)	Paket	1	1	98,80%	30.585,26	30.216,85	98,80%
Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOS Kinerja SD)	Tersedianya BOS Kinerja SD	tahun	1	-	0,00%	380,00	0,00	0,00%

Sasaran Strategis Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar adalah Terwujudnya ekosistem pendidikan Sekolah Dasar yang merata, terjangkau, bermutu dan kompetitif bagi masyarakat. Pada program tersebut terdapat 7 Indikator program yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dengan capaian kinerja rata – rata lebih dari 80% yang menunjukkan bahwa pelayanan dan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan Sekolah Dasar telah dilakukan dengan baik melalui :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dengan capaian realisasi 105,58% dari target RPJMD 115,35%, capaian ini terukur melalui perbandingan antara jumlah seluruh peserta didik pada jenjang SD/MI terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun;
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dengan capaian realisasi 92,98%. Dari target RPJMD 99,13%, capaian ini terukur melalui perbandingan antara jumlah peserta didik usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Dari capaian ini dapat diartikan bahwa daya tampung

- peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar telah memadai dengan di dukung sarana dan prasarana yang mencukupi;
3. Angka Mengulang Kelas (AMK) SD/Mi dengan target 2,91 % dan realisasi sebesar 0,33 %, dengan capaian sudah lebih dari 100% menunjukkan angka AMK SD/Mi telah baik karena nilai realisasi lebih rendah dari nilai yang ditargetkan;
 4. Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI/ SDLB ke SMP/ MTs/ SMPLB dengan capaian realisasi 100% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah seluruh peserta didik baru kelas 1 SMP/MTs terhadap jumlah jumlah lulusan kelas jenjang SD/MI;
 5. Angka Putus sekolah (APTs) SD/ MI dengan target 0,25% dan realisasi sebesar 0,15 % dengan capaian 166,67% menunjukkan angka APTs SD/MI telah baik karena nilai realisasi lebih rendah dari nilai yang ditargetkan;
 6. Angka Kelulusan (AL) SD/ MI dengan capaian realisasi 100% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah peserta didik yang lulus ujian nasional jenjang SD/Mi terhadap jumlah peserta didik yang mengikuti ujian nasional jenjang SD/MI.

Untuk mendukung capaian indikator program tersebut maka diperlukan adanya kegiatan penunjang agar sasaran program dapat tercapai. Dari tabel realisasi kegiatan dan anggaran di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran pada program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar telah mencapai 91,72%, yang menggambarkan bahwa hampir semua kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan secara maksimal.

Adapun beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih belum optimal antara lain sebagai berikut :

1. Pengadaan Meubeleir Sekolah Dasar;

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya meubeleir untuk sekolah dasar, dengan target RPJMD 36 ruang dan realisasi 36 ruang. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 686,663,360,- dari target Rp. 900,000,000,- dengan persentasi capaian anggaran 76,30%, hal ini dikarenakan adanya proses negosiasi dalam mekanisme E-Catalog dan untuk pengadaan jenis meubeleir lemari buku tidak terserap dikarenakan harga di E-Catalog lebih tinggi dari nilai pagu yang ada di DPA.

2. Penyelenggaraan Beasiswa SD;

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Beasiswa untuk sekolah dasar, dengan target RPJMD 160 Sekolah Dasar dan realisasi 160 Sekolah Dasar. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 28,060,000,- dari target Rp. 80,541,200,- dengan persentasi capaian anggaran 34,84%, dikarenakan ada beberapa belanja yang tidak terserap antara lain belanja jasa honorarium narasumber tidak diserap karena berstatus PNS, dan sewa aula tidak diserap karena diselenggarakan di aula Dinas Pendidikan.

3. Bimbingan Teknis Tim Pengelola Beasiswa Sekolah SD;

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan teknis tim pengelola beasiswa Sekolah Dasar, dengan target RPJMD 1 kegiatan dan realisasi 1 kegiatan. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 42,020,550,- dari target Rp. 88,620,550,- dengan persentasi capaian anggaran 47,42%, dikarenakan pemerintah kota cilegon melalui dinas pendidikan yang di implementasikan pada kegiatan ini melakukan efisiensi dalam belanja sewa tempat guna memaksimalkan tempat yang ada ada di Dinas Pendidikan sehingga untuk belanja sewa tempat tidak di serap. Sedangkan untuk belanja honor narasumber tidak dapat diberikan karena berstatus PNS.

4. Pengembangan Kurikulum Sekolah mantap;

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pengembangan kurikulum sekolah mantap, dengan target RPJMD 8 Sekolah dan realisasi 8 Sekolah. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 97,000,000,- dari target Rp. 188,000,000,- dengan persentasi capaian anggaran 51,60%, pada kegiatan ini ada anggaran yang tidak terserap pada rekening belanja jasa honor pakar/praktisi sekolah mantap karena terjadi kesalahan kode rekening sehingga nilai pagu melebihi standar satuan harga/SSH pada kode rekening tersebut.

5. Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP);

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyaluran bantuan pendidikan siswa penerima PIP, dengan target RPJMD 150 Sekolah dan realisasi 150 Sekolah. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 19,448,000,- dari target Rp. 36,398,000,- dengan persentasi capaian anggaran 53,43%, dikarenakan pada saat penganggaran kegiatan, aula dinas pendidikan dalam kondisi perbaikan sehingga dianggarkan sewa tempat, tetapi pada saat pelaksanaan aula dinas pendidikan telah selesai di perbaiki sehingga dilaksanakan di aula Dinas Pendidikan.

Adapun beberapa ketercapaian dari kegiatan prioritas daerah yang menunjang program tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Revitalisasi Ruang Kelas Sekolah Dasar (DID);

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Revitalisasi Ruang Kelas Sekolah Dasar (DID), dengan target RPJMD 4 Sekolah dan realisasi 4 Sekolah. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 4.528.178.817,00,- dari target Rp. 4.856.095.000,00,- dengan persentasi capaian anggaran 93,25 %.

2. Revitalisasi Sekolah Dasar Negeri.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Revitalisasi Sekolah Dasar Negeri, dengan target RPJMD 1 Sekolah dan realisasi 1 Sekolah. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 762.568.000,00,- dari target Rp. 844.804.800,00,- dengan persentasi capaian anggaran 90,27 %.

A.3 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama

Tabel 3.1.1c

Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama
Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama						37.092,11	34.858,71	93,98%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ SMPLB	%	107,30	107,99	100,64%			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	%	94,94	90,33	95,14%			
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs/ SMPLB ke SMA/ SMK/ MA/ SMALB	%	100,00	100,00	100,00%			
	Angka Putus Sekolah (APTs) SMP/ MTs	%	0,11	0,28	-54,55%			
	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	100,00	100,00	100,00%			
	Angka Mengulang Kelas (AMK) SMP/ MTs	%	0,13	0,11	115,38%			
	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen	%	100,00	100,00	100,00%			
	Setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	%	100,00	100,00	100,00%			
	Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya	%	100,00	100,00	100,00%			
	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang	%	100,00	100,00	100,00%			
	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	%	100,00	100,00	100,00%			
	Pemerintah kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan SMP/MTs dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	%	100,00	100,00	100,00%			
	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai	%	100,00	100,00	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	berikut : kelas VII-IX (27 jam per minggu)							
	Satuan pendidikan SMP/MTs menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	%	100,00	100,00	100,00%			
	Kepala sekolah SMP/MTs melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	%	100,00	100,00	100,00%			
Pengembangan Kurikulum Jenjang SMP	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kurikulum Jenjang SMP	SMP	42	42	100,00%	936,85	924,32	98,66%
Rehabilitasi Sarana Prasarana Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana - Prasarana Sekolah SMP	Sekolah	3	3	100,00%	1.836,00	1.593,79	86,81%
Pembangunan Prototype Gerbang SMP	Terlaksananya Pembangunan Prototype Gerbang SMP	Sekolah	4	4	100,00%	436,00	429,24	98,45%
Pembangunan RKB	Tersedianya RKB Baru pada SMP Negeri	Sekolah	3	3	100,00%	2.099,70	1.904,04	90,68%
Bantuan Operasional SMPN Satu Atap Gunung Batur	Jumlah Kebutuhan Bantuan Operasional SMPN Satu Atap Gunung Batur	Sekolah	1	1	100,00%	69,94	68,86	98,46%
Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Jenjang SMP	Jumlah Kegiatan Penerimaan Siswa Baru Jenjang SMP	Kegiatan	1	1	100,00%	498,68	421,07	84,44%
Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Jenjang SMP	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Jenjang SMP Tingkat Kota Cilegon	SMP dan MTS	83	83	100,00%	960,80	897,58	93,42%
Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP	Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP	SMP	42	42	100,00%	170,13	150,68	88,57%
Gebyar Festival FLS2N Tingkat Kota Cilegon	Terlaksananya Gebyar Festival FLS2N Tingkat Kota Cilegon	Kegiatan	5	5	100,00%	762,24	740,57	97,16%
Pelatihan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS)	Terlaksananya Pelatihan LDKS jenjang SMP	Kegiatan	1	1	100,00%	101,65	97,66	96,07%
Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kota Cilegon	Terselenggaranya Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kota Cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%	315,57	305,04	96,66%
Penyelenggaraan Lomba Literasi Sekolah	Terselenggaranya Lomba Literasi Sekolah Jenjang SMP	Kegiatan	1	1	100,00%	246,93	238,54	96,60%
Sosialisasi Kapasitas Pembangunan Karakter Peserta Didik SMP	Terlaksananya Sosialisasi kapasitas pembangunan karakter peserta didik SMP	Kegiatan	1	1	100,00%	120,18	115,92	96,45%
Kemah Karya Siswa Tingkat Kota Cilegon	Terlaksananya Kemah Karya Siswa Tingkat Kota Cilegon	Lomba	5	5	100,00%	296,45	274,34	92,54%
Workshop Jurnalistik	Terlaksananya Workshop Jurnalistik jenjang SMP	Kegiatan	1	1	100,00%	101,65	97,02	95,44%
Kegiatan Gebyar Pendidikan Agama Islam (PAI) Tingkat SMP	Terlaksananya Gebyar Pendidikan Agama Islam (PAI) Tingkat SMP	Kegiatan	1	1	100,00%	335,80	325,52	96,94%
Pendamping Sekolah Model dan Sekolah Mantap	Terlaksananya Pendampingan Sekolah Model dan Sekolah Mantap	Sekolah Model & Sekolah Mantap	7 & 2	7 & 2	100,00%	83,55	81,96	98,10%
Pembangunan Pagar SMPN	Terlaksananya Pembangunan Pagar SMPN	Sekolah	1	1	100,00%	247,65	239,87	96,86%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pemasangan Paving Blok SMPN	Terlaksananya Pemasangan Paving Blok SMPN	Sekolah	3	3	100,00%	393,28	388,74	98,85%
Pengadaan Meubeleir SMP Negeri	Terlaksananya Pengadaan Meubeleir SMP Negeri	Sekolah	5	5	100,00%	880,00	779,12	88,54%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	11	11	100,00%	411,37	404,84	98,41%
Pembangunan Toilet SMPN	Terlaksananya Pembangunan Toilet SMPN	Sekolah	2	2	100,00%	384,70	379,75	98,71%
Penyelenggaraan Beasiswa SMP	Terlaksananya Penyelenggaraan Beasiswa SMP	Sekolah	42	42	100,00%	233,49	210,09	89,98%
Liga Sepak bola Siswa Jenjang SMP	Terlaksananya Liga Sepak Bola Siswa Jenjang SMP	Sekolah	42	42	100,00%	219,11	180,24	82,26%
Revitalisasi SMP Negeri	Terlaksananya Revitalisasi SMP Negeri	Kegiatan	2	2	100,00%	4.192,35	3.920,35	93,51%
Pengadaan Alat Lab. IPA / Fisika Biologi SMP	Terlaksananya Pengadaan Alat Lab. IPA / Fisika Biologi SMP	Sekolah	2	2	100,00%	435,40	425,22	97,66%
Pengadaan Lab Komputer SMP	Terlaksananya Pengadaan Lab Komputer SMP	Sekolah	2	2	100,00%	2.368,13	2.280,75	96,31%
Rehabilitasi Toilet SMP	Terlaksananya Rehabilitasi Toilet SMP	Sekolah	3	3	100,00%	300,00	296,34	98,78%
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	Sekolah	3	3	100,00%	2.000,00	1.787,52	89,38%
Pembangunan UKS dan Perlengkapan UKS	Terlaksananya Pembangunan UKS dan Perlengkapan UKS	Sekolah	3	3	100,00%	300,00	292,81	97,60%
Pengadaan Alat Pendingin SMP	Terlaksananya Pengadaan Alat Pendingin SMP	Sekolah	3	3	100,00%	400,00	315,86	78,97%
Pembangunan Aula SMP	Terlaksananya Pembangunan Aula SMP	Sekolah	2	2	100,00%	1.586,85	1.424,66	89,78%
Pengadaan Studio Visual SMP	Terlaksananya Pengadaan Studio Visual SMP	Sekolah	11	11	100,00%	1.100,00	1.090,20	99,11%
Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK)	Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Sekolah SMP (DAK)	Sekolah	3	3	100,00%	1.201,22	1.200,28	99,92%
Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Belajar SMP Negeri (DAK)	Sekolah	10	10	100,00%	2.124,22	2.111,28	99,39%
Pengadaan Studio Visual Sekolah Menengah Pertama (DID)	Terlaksananya Pengadaan Studio Visual SMP (DID)	Sekolah	2	2	100,00%	2.541,00	2.496,80	98,26%
Pengadaan Meubeleir Sekolah Menengah Pertama (DID)	Terlaksananya Pengadaan Meubeleir SMP Negeri (DID)	Sekolah	2	2	100,00%	271,92	255,43	93,93%
Rehabilitasi Gedung SMP (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung SMP (Bantuan Keuangan)	Tahun	1	1	100,00%	215,50	206,44	95,80%
Pengadaan Komputer SMP (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya Pengadaan Komputer SMP (Bantuan Keuangan)	Tahun	1	1	100,00%	3.851,98	3.729,74	96,83%
Pengadaan Meubeleir Siswa dan Guru SMP Negeri (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya Pengadaan Meubeleir Siswa Dan Guru SMP Negeri (Bantuan Keuangan)	Tahun	1	1	100,00%	695,05	505,26	72,69%
Pengadaan Meubeleir SMP Negeri (Bantuan Keuangan)	terlaksananya Pengadaan Meubeleir SMP Negeri (Bantuan Keuangan)	Tahun	1	1	100,00%	454,47	373,46	82,17%
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Detail Engineering Design (DED) Sekolah Menengah Pertama	paket	1	1	100,00%	782,30	769,78	98,40%
Penyusunan e-RKAS dan SIPLah Dana BOS	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan E-RKAS, SIPLah dan Katalog Sektoral	kegiatan	1	1	100,00%	130,00	127,73	98,25%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan BOS)						9.712,80	7.812,29	80,43%
Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama (BOS SMP)	Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama (BOS SMP)	paket	1	1	100,00%	9.049,80	7.812,29	86,33%
Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama (BOS Kinerja SMP)	Tersedianya BOS Kinerja SMP	tahun	1	-	0,00%	663,00	0,00	0,00%

Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama adalah Terwujudnya ekosistem pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang merata, terjangkau, bermutu dan kompetitif bagi masyarakat.

Salah satu ketercapaian Indikator Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama adalah :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B dengan capaian realisasi sebesar 94,58% dari target RPJMD 107,30%, capaian ini terukur melalui perbandingan jumlah seluruh peserta didik jenjang SMP/MTs terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun;
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dengan capaian realisasi sebesar 79,11% dari target RPJMD 94,94%, hal ini menunjukkan bahwa daya tampung untuk masyarakat dan siswa usia 13-15 tahun telah memadai dari segi pelayanan maupun sarana-prasarana sekolah jenjang SMP sederajat, capaian ini terukur melalui perbandingan antara jumlah peserta didik usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

Untuk mendukung capaian indikator program tersebut maka diperlukan adanya kegiatan penunjang agar sasaran program dapat tercapai. Dari tabel realisasi kegiatan dan anggaran di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran pada Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama telah mencapai 91,72%, yang menggambarkan bahwa hampir semua kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan secara maksimal.

Adapun beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih belum optimal antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarana Prasarana SMP Swasta;

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan sarana prasarana SMP Swasta, dengan target RPJMD 2 Sekolah dan realisasi 0 Sekolah. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target Rp.0,- dengan persentasi capaian anggaran 0%,

hal ini dikarenakan pada tahapan E-Hibah Bansos sekolah yang mengajukan proposal tidak tercapai sampai dengan tahap akhir.

2. Pengadaan Alat Pendingin SMP;

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya alat pendingin SMP, dengan target RPJMD 3 Sekolah dan realisasi 3 Sekolah. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.315.861.200,- dari target Rp.400.000.000,- dengan persentasi capaian anggaran 78,97%, hal ini dikarenakan harga barang yang di dapatkan dari pengadaan tersebut di bawah harga satuan yang di anggar pada DPA.

3. Pengadaan Meubeleir Siswa Dan Guru SMP Negeri (Bantuan Keuangan);

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya meubeleir Siswa dan Guru SMPNegeri, dengan target RPJMD 1 Tahun dan realisasi 1 Tahun. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.505.262.500,- dari target Rp.695.050.000,- dengan persentasi capaian anggaran 72,69%, hal ini dikarenakan harga barang yang diperoleh dari pengadaan tersebut dibawah harga satuan yang di rencanakan dalam DPA kegiatan.

Adapun beberapa ketercapaian dari kegiatan prioritas daerah yang menunjang program tersebut diantaranya sebagai berikut :

2. Revitalisasi SMP Negeri;

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Revitalisasi SMP Negeri, dengan target RPJMD 4 Ruang Kelas dan realisasi 4 Ruang Kelas. Adapun serapan anggaran sebesar Rp 3.920.350.966,00,- dari target Rp 4.192.350.000,00,- dengan persentasi capaian anggaran 93,51 %.

3. Pengadaan komputer smp (bantuan keuangan);

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengadaan komputer smp (bantuan keuangan), dengan target RPJMD 4 Sekolah dan realisasi 4 Sekolah. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 3.729.743.200,00 , - dari target Rp. 3.851.980.000,00,- dengan persentasi capaian anggaran 96,83%.

Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa seluruh kinerja dan anggaran kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama belum dapat terlaksana secara sempurna sehingga penyerapan anggaran pada program tersebut hanya mencapai sebesar 93,98% pada tahun anggaran 2019.

A.3.1 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMPN)

Tabel 3.1.1c-1

Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMPN) Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1)						185,26	169,92	91,72%
Pembinaan Orientasi Siswa	Tersedianya pembinaan orientasi terhadap siswa baru	siswa	240	240	100,00%	9,05	9,05	100,00%
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik	Terlaksananya evaluasi hasil belajar pada SMPN 1 Cilegon	kegiatan	5	5	100,00%	166,20	150,86	90,77%
Pembinaan Imtaq dan kerohanian peserta didik	Terlaksananya pembinaan imtaq dan kerohanian siswa/i SMPN 1 Cilegon	siswa	706	706	100,00%	10,01	10,01	100,00%
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)						315,60	233,68	74,04%
Pembinaan Orientasi Siswa	Terpenuhinya kelancaran kegiatan pembinaan orientasi siswa	Kegiatan	4	4	100,00%	46,30	37,59	81,18%
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Hasil Belajar Peserta didik	Kegiatan	8	8	100,00%	90,03	83,55	92,80%
Pendampingan Program Sekolah Mantap	Terlaksananya kegiatan pendampingan program sekolah mantap	Guru/TU	67	67	100,00%	17,02	16,90	99,28%
Peningkatan Kompetensi Akademik non Akademik	Terlaksananya kegiatan Ekstrakurikuler	Jenis	17	15	88,24%	134,40	74,40	55,36%
Pembinaan Imtaq dan kerohanian peserta didik	Terpenuhinya kegiatan pembinaan imtaq dan kerohanian siswa	Kegiatan	2	2	100,00%	27,86	21,25	76,31%
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)						220,72	203,78	92,33%
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik	Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik	Kegiatan	4	4	100,00%	126,60	115,47	91,21%
Penyusunan Dokumen Kurikulum 2013	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Dokumen Kurikulum 2013	Kegiatan	3	3	100,00%	22,97	17,85	77,72%
Pembinaan Orientasi Peserta Didik	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Orientasi Peserta Didik	Kegiatan	3	3	100,00%	43,00	42,59	99,04%
Pembinaan Imtaq dan kerohanian peserta didik	Terselenggaranya Pembinaan Imtaq dan Kerohanian Peserta Didik	Kegiatan	2	2	100,00%	28,15	27,87	99,01%
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)						264,09	79,50	30,10%
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik	Tersedianya pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil belajar peserta didik.	Kegiatan	7	7	100,00%	246,03	64,80	26,34%
Pembinaan Imtaq dan kerohanian peserta didik	tersedianya pembinaan Imtaq dan kerohanian peserta didik	Kegiatan	5	5	100,00%	18,06	14,70	81,41%
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)						194,31	183,41	94,39%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik	Terpenuhinya kebutuhan Evaluasi Hasil Belajar pada SMPN 5 Cilegon	bulan	12	12	100,00%	182,33	175,32	96,15%
Pembinaan Ekstra Kurikuler	Terpenuhinya Kegiatan Ekstra Kurikuler	bulan	12	12	100,00%	11,98	8,09	67,52%
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)						26,60	14,37	54,03%
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik	Kegiatan	4	4	100,00%	26,60	14,37	54,03%
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)						238,41	212,32	89,06%
Pembinaan Orientasi Siswa	Terpenuhinya Pelaksanaan Pembinaan Peserta Didik pada SMPN 7 Cilegon	kegiatan	5	5	100,00%	9,10	9,10	100,00%
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik	Terpenuhinya Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada SMPN 7 Cilegon	Kegiatan	6	6	100,00%	159,11	140,03	88,01%
Pendampingan Program Kurikulum 2013	Terlaksananya program kurikulum 2013	Kegiatan	1	1	100,00%	35,00	34,00	97,14%
Peningkatan Kompetensi Akademik non Akademik	Terpenuhinya Kegiatan Kompetensi Akademik dan Non Akademik	kegiatan	5	5	100,00%	35,19	29,19	82,95%
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)						68,00	50,60	74,41%
Pembinaan Orientasi Siswa	Terlaksananya Program Pembinaan Orientasi Siswa	Kegiatan	4	4	100,00%	13,13	10,33	78,67%
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Hasil Belajar Siswa	Kegiatan	4	4	100,00%	42,20	30,61	72,53%
Peningkatan Kompetensi Akademik non Akademik	Terlaksananya Kegiatan EkstKulikuler (OSIS)	kegiatan	2	2	100,00%	2,02	0,00	0,00%
Pembinaan Imtaq dan kerohanian peserta didik	Terwujudnya Peningkatan IMTAQ Dan Kerohanian Siswa	Kegiatan	7	7	100,00%	10,67	9,67	90,62%
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9)						21,54	13,12	60,91%
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik	Terlaksananya evaluasi hasil belajar pada SMPN 9 Cilegon	kegiatan	2	2	100,00%	21,54	13,12	60,91%
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10)						41,63	36,70	88,16%
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik	terlaksananya kegiatan evaluasi hasil belajar peserta didik	kegiatan	7	7	100,00%	23,28	22,11	94,97%
kegiatan orientasi siswa	tersedianya pendukung kegiatan kesiswaan	kegiatan	8	8	100,00%	12,95	9,19	70,97%
Pembinaan Imtaq dan kerohanian peserta didik	Terlaksananya pembinaan imtaq dan kerohanian peserta didik	kegiatan	6	6	100,00%	5,40	5,40	100,00%
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMPN 11)						104,10	84,78	81,44%
Pembinaan Orientasi Siswa	Tercapainya pelaksanaan pembinaan orientasi siswa	Kegiatan	1	1	100,00%	9,81	8,61	87,77%
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik	Terpenuhinya kegiatan evaluasi hasil belajar siswa	Kegiatan	9	9	100,00%	32,78	27,26	83,14%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Kompetensi Akademik non Akademik	Terlaksananya kegiatan kompetensi akademis dan non akademis siswa	Kegiatan	6	6	100,00%	47,49	34,90	73,48%
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB Sekolah)	Terselenggaranya Penerimaan Siswa Baru SMP Negeri 11 Cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%	14,02	14,02	100,00%

Dari tabel realisasi kegiatan dan anggaran 11 Sekolah Menengah Pertama Negeri dapat dilihat bahwa rata – rata capaian realisasi kegiatan dan anggaran sudah terealisasi lebih dari 90%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang bersumber dari APBD di SMP Negeri telah dikelola dengan baik. Akan tetapi ada beberapa kegiatan yang capaian realisasi anggarannya masih di bawah 80% antara lain :

SMPN 3

1. Penyusunan Dokumen Kurikulum 2013.

Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Kurikulum pada SMPN 3 Cilegon, dengan target RPJMD 3 kegiatan dan realisasi 3 kegiatan. Adapun serapan anggarannya sebesar Rp. 17.851.800,- dari target Rp. 22.970.000,- dengan persentasi capaian anggaran 77,72%, hal ini dikarenakan Belanja jasa tenaga ahli/narasumber/pakar/praktisi/pembicara khusus dan pendukungnya ditanggulangi oleh sponsor/penerbit dan Belanja cetak spanduk dan penggandaan juga ditanggulangi oleh sponsor/penerbit.

SMPN 4

1. Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik.

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil belajar peserta didik, dengan target RPJMD 7 kegiatan dan realisasi 7 kegiatan. Adapun serapan anggarannya sebesar Rp. 81.600.000,- dari target Rp. 139.500.000,- dengan persentasi capaian anggaran 58,49%, hal ini dikarenakan Adanya sistem penilaian dalam evaluasi dari UNKP (Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil) menjadi UNBK (Ujian Nasional Bebasis Komputer), sehingga berdampak pada jumlah pengawas dan pemeriksa hasil evaluasi.

SMPN 5

1. Pembinaan Ekstra Kurikuler;

Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kegiatan Ekstra Kurikuler, dengan target RPJMD 12 bulan dan realisasi 12 bulan. Adapun serapan anggarannya sebesar Rp. 8.085.000,- dari target Rp. 11.975.000,- dengan persentasi capaian anggaran 67,52%, hal ini dikarenakan kegiatan ini tidak dilaksanakan secara penuh.



SMPN 6

1. Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik;

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan evaluasi hasil belajar siswa, dengan target RPJMD 4 kegiatan dan realisasi 4 kegiatan. Adapun serapan anggarannya sebesar Rp. 14.372.000,- dari target Rp. 26.600.000,- dengan persentasi capaian anggaran 54,03 %, hal ini dikarenakan pada belanja penggandaan soal dari anggaran yang dibuat Fotocopy Soal Penilaian Tengah Semester 800 siswa x 7 lembar x 10 MP x 2 keg, yang terserap adalah 760 siswa x 4 lembar x 10 MP x 2 keg, begitu pula dengan Fotocopy Soal Try Out (260 siswa x 8 lmr x 4 MP x 2 keg) yang terserap adalah 257 siswa x 7 lmr x 4 MP x 2 keg.

SMPN 8

1. Peningkatan Kompetensi Akademik Non Akademik;

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler (Osis), dengan target RPJMD 2 kegiatan dan realisasi 2 kegiatan. Adapun serapan anggarannya sebesar Rp. 0,- dari target Rp. 2.015.000,- dengan persentasi capaian anggaran 0,00%, hal ini dikarenakan anggaran di kegiatan ini sudah ada di kegiatan dana BOS.

SMPN 9

1. Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik;

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi hasil belajar pada SMPN 9 Cilegon, dengan target RPJMD 2 kegiatan dan realisasi 2 kegiatan. Adapun serapan anggarannya sebesar Rp. 13.120.600,- dari target Rp. 21.540.808,- dengan persentasi capaian anggaran 60.91%, hal ini disebabkan adanya kelebihan didalam penganggaran pada perencanaan sebelumnya, sehingga masih menyisakan anggaran.

SMPN 10

1. Kegiatan Orientasi Siswa;

Output dari kegiatan ini terlaksananya pembinaan orientasi siswa, dengan target RPJMD 8 kegiatan dan realisasi 8 kegiatan. Adapun serapannya sebesar Rp. 9.190.000,- dari target Rp. 12.950.000,- dengan persentasi capaian anggaran 70,97% dikarenakan ada 1 Kegiatan yang belum terlaksana, yaitu PPDB sehingga belum bisa diajukan.

A.4 Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.1.1d

Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan
Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Kualitas Guru Dan Tenaga Kependidikan						23.561,05	22.345,75	94,84%
	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	100,00	100,00	100,00%			
	Di setiap kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	100,00	100,00	100,00%			
	Di setiap kota semua pengawas sekolah dan madrasah untuk SD/MI memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	100,00	100,00	100,00%			
	Di setiap kota semua pengawas sekolah dan madrasah SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	100,00	100,00	100,00%			
	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%)	%	100,00	94,04	94,04%			
	Guru yang memenuhi kualifikasi D4/ S1 (Proporsi jumlah guru SD/ MI, SMP/ MTs/ dan SMA/ SMK/ MA yang berijazah D4/ S1 terhadap total jumlah guru SD/ MI, SMP/ MTs dan SMA/ SMK/ MA)	%	89,71	92,37	102,97%			
	Jumlah Guru TK/RA yang bersertifikat Pendidik	Orang	350,00	366,00	104,57%			
	Jumlah Guru TK/RA yang berkualifikasi S1/D4	Orang	735,00	861,00	117,14%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Penyelenggaraan & Pembekalan Calon Peserta PPG	Terselenggaranya Pembekalan Calon Peserta PPG	Orang	54	-	0,00%	425,90	18,05	4,24%
Workshop Penggunaan Teknologi Informasi	Tersedianya GTK yang menguasai kemampuan penggunaan IT	Orang	300	300	100,00%	201,00	198,63	98,82%
Workshop Pemantapan Mata Pelajaran SMP Sekolah Mantap	Tersedianya Guru Mata Pelajaran Yang Berkompetensi Tinggi	Peserta	118	118	100,00%	75,18	74,65	99,30%
Workshop Pemantapan Guru Kelas Sekolah Mantap	Tersedianya Guru Kelas Yang Berkompetensi Tinggi	Orang	130	130	100,00%	100,50	96,43	95,95%
Workshop Pembinaan Pemantapan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Jumlah Peserta Workshop Pembinaan PKB	Orang	160	160	100,00%	135,30	133,05	98,34%
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Jumlah Peserta Pembinaan PTK Berprestasi	Orang	256	256	100,00%	131,68	126,38	95,98%
Penyelenggaraan Kualifikasi Guru S1/D4 Tingkat Kota Cilegon	Jumlah Guru Kualifikasi Guru S1/D4	Orang	300	300	100,00%	41,11	40,16	97,68%
Pelatihan Guru Mata Pelajaran Penjaskes SD/SMP	Terlaksananya Pelatihan Guru Mata Pelajaran Penjaskes SD/SMP	Orang	175	175	100,00%	113,75	105,94	93,14%
Pendidikan dan Pelatihan (workshop/binlat/seminar/dll) Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya Tenaga GTK yg professional	Orang	260	260	100,00%	284,12	256,66	90,34%
Pelatihan Guru Teknologi Informasi	Jumlah Guru Yang Mengikuti Pelatihan	Guru	219	219	100,00%	159,50	151,12	94,75%
Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Peserta Peningkatan Kualitas PTK	Orang	2.337	2.337	100,00%	12.871,14	12.374,18	96,14%
Pemeliharaan Sistem Informasi Uji Kompetensi Guru dan Penilaian Rapor	Terpeliharanya Sistem Informasi Ujian Kompetensi Guru dan penilaian rapor	Aplikasi	1	1	100,00%	46,50	39,41	84,76%
Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Tunjangan Guru	Terpeliharanya Sistem Informasi Bawa Aku Sejahtera	System	1	1	100,00%	28,50	21,34	74,88%
Penguatan Lembaga PAUD Non Formal	Tersedianya Operasional Pengelola PAUD	Orang	907	907	100,00%	4.916,80	4.853,95	98,72%
Seleksi dan Apresiasi GTK Tingkat Kota Cilegon	Jumlah Peserta Seleksi PTK dan Siswa Teladan	Orang	439	439	100,00%	494,35	486,20	98,35%
Peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah Peserta Peningkatan MBS	Orang	80	80	100,00%	83,10	56,27	67,72%
Lomba dan Apresiasi Karya APEM (Alat Peraga Edukatif Murah)	Terlaksananya Loma dan Apresiasi Karya APEM (Alat Peraga Edukatif Murah)	Peserta	310	310	100,00%	346,11	331,20	95,69%
Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Guru SD	Terlaksananya Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Guru SD	Peserta	178	178	100,00%	221,48	211,84	95,65%
Bimtek Kurikulum Pengelola PAUD	Terlaksananya Bimtek Kurikulum Pengelola PAUD	Orang	340	340	100,00%	166,65	165,09	99,06%
Peningkatan Mutu Kualitas Pendidikan Guru Sekolah Negeri Non PNS	Tersedianya Bantuan Biaya Penyusunan Skripsi S1, S2	Orang	187	187	100,00%	93,75	90,15	96,16%
Workshop Pembinaan Guru Mulok SD/SMP	Terlaksananya Workshop Pembinaan Guru Mulok SD/SMP	Orang	135	135	100,00%	140,00	137,03	97,88%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Workshop Pembinaan Guru PAI SD/SMP	Terlaksananya Workshop pembinaan guru PAI SD/SMP	Orang	138	138	100,00%	140,00	137,03	97,88%
Seleksi Dan Apresiasi Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru SD Dan SMP	Terlaksananya Seleksi dan Apresiasi Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru SD dan SMP	Orang	356	356	100,00%	189,95	178,81	94,13%
Verifikasi Dan Validasi Guru Penerima Tunjangan Profesi Dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Non Sertifikasi	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Tambahan penghasilan bagi Guru PNSD Non Sertifikasi	Orang	200	200	100,00%	99,74	96,73	96,99%
Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Guru SMP	Terlaksananya Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Guru SMP	Orang	300	300	100,00%	168,50	155,22	92,12%
Lomba Penulisan Best Practice Kepsek dan Pengawas	Terlaksananya Lomba Penulisan Best Practice Kepsek dan Pengawas	Orang	255	255	100,00%	235,19	226,23	96,19%
Workshop peningkatan kualitas guru kelas SD Negeri / Swasta	Terlaksananya Workshop peningkatan kualitas guru kelas SD Negeri / Swasta	Orang	152	152	100,00%	133,50	130,03	97,40%
Workshop penguatan Pendidikan karakter (PPK) KKKS/KKPS, MKKS/MKPS SD/SMP	Terlaksananya Workshop penguatan Pendidikan karakter (PPK) KKKS/KKPS, MKKS/MKPS SD/SMP	Orang	178	178	100,00%	224,30	216,80	96,66%
Penyelenggaraan Pemantapan pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) KKG/MGMP SD dan SMP	Terlaksananya Pemantapan pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) KKG/MGMP SD dan SMP	Orang	218	218	100,00%	205,60	185,03	90,00%
Workshop Kepemimpinan Kepala Sekolah PAUD	Terlaksananya Workshop Kepemimpinan Kepala Sekolah PAUD	Orang	300	300	100,00%	119,60	119,07	99,55%
Workshop PTK PAUD Tingkat Kota Cilegon	Terlaksananya Workshop PTK PAUD Tingkat Kota Cilegon	Orang	300	300	100,00%	130,00	128,49	98,84%
Penyelenggaraan Olimpiade Guru Tingkat Kota Cilegon	Terlaksananya Penyelenggaraan Olimpiade Guru Tingkat Kota Cilegon	Guru SD dan SMP	388	388	100,00%	413,65	404,20	97,72%
Lomba Sastra Bahasa Bagi Guru TK, SD dan SMP	Terlaksananya Lomba Sastra Bahasa Bagi Guru TK, SD Dan Smp	Tahun	1	1	100,00%	424,61	400,36	94,29%

Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Meningkatkan Kapasitas, Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Ketercapaian indikator program pada program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dilihat dari 12 indikator Program yang ada pada tabel tersebut rata – rata capaian realisasi sudah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di Kota Cilegon telah dilaksanakan dengan baik.

Ketercapaian Indikator:

Sasaran Strategis Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Meningkatnya Kapasitas, Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dari 12 indikator Program yang ada pada tabel tersebut rata – rata capaian realisasi sudah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di Kota Cilegon telah dilaksanakan dengan baik melalui indikator program berikut :

1. Guru yang memenuhi kualifikasi D4/ S1 (Proposi jumlah guru SD/ MI, SMP/ MTs/ yang berijazah D4/ S1 terhadap total jumlah guru SD/ MI, SMP/ MTs) dengan realisasi 92,37 % dari target RPJMD 89,71 %, capaian ini terukur dari perbandingan antara jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi D4/S1 terhadap jumlah seluruh guru pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs
2. Jumlah Guru TK/RA yang bersertifikat Pendidik dengan capaian realisasi 366 orang dari target RPJMD 350 Orang capaian ini terukur melalui perbandingan antara jumlah guru TK/RA yang bersertifikat pendidikan terhadap seluruh jumlah guru TK/RA
3. Jumlah Guru TK/RA yang berkualifikasi S1/D4 dengan capaian realisasi 861 dari target RPJMD 735 Orang capaian ini terukur melalui perbandingan antara jumlah guru TK/RA yang berkualifikasi D4/S1 terhadap jumlah seluruh guru TK/RA

Ketercapaian kegiatan:

Jika dilihat dari tabel realisasi kegiatan dan anggaran program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan di atas bahwa capaian realisasi anggaran program tersebut telah mencapai 94,84%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal pada tahun 2019.

Adapun beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih belum optimal antara lain sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan & Pembekalan Calon Peserta PPG;

Output dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Pembekalan Calon Peserta PPG, dengan target RPJMD 54 orang dan realisasi 0 orang. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.18.050.000,- dari target Rp.425.900.000,- dengan persentasi capaian anggaran 4,24%, hal ini dikarenakan tidak ada kepastian kuota dari kemendikbud untuk pretest persyaratan PPG, angka yang ditentukan oleh kemendikbud untuk mencapai angka kelulusan di atas 80 sesuai dengan mata pelajarannya, sedangkan guru yang mengikuti pretest hanya lulus sebanyak 20 orang dan dana PPG kemendikbud belum terserap 100% kemudian kebijakan pusat yang lulus pretest 20 orang ini dibiayai menggunakan APBN dan dinas pendidikan mengusulkan untuk

peserta PPG sejumlah 45 orang. Karena dominan menggunakan anggaran PPG pusat dari 20 orang ini maka anggaran APBD tidak terserap.

2. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Tunjangan Guru;

Output dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya Sistem Informasi Bawa Aku Sejahtera, dengan target RPJMD 1 sistem dan realisasi 1 sistem. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.21.340.000,- dari target Rp.28.500.000,- dengan persentasi capaian anggaran 74,88%, hal ini dikarenakan belanja makanan dan minuman kegiatan verval data honor daerah untuk koordinator honor sekolah hanya dilakukan satu kali pertemuan yang semula di reencanakan empat kali pertemua.

3. Peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Peningkatan MBS, dengan target RPJMD 80 orang dan realisasi 80 orang. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.56.273.000,- dari target Rp.83.099.000,- dengan persentasi capaian anggaran 67,72%, hal ini dikarenakan belanja transportasi uang saku peserta tidak dibayarkan karena belanja tersebut tidak diperbolehkan diberikan kepada peserta diklat MBS yang berstatus pegawai PNS atau Non PNS di kota cilegon.

4. Lomba Sastra Bahasa Bagi guru SMP (MBS);

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Lomba Sastra Bahasa Bagi guru SMP, dengan target RPJMD 84 orang dan realisasi 0 orang. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 0,- dari target Rp. 0,- dengan persentasi capaian anggaran 0%, hal ini dikarenakan lakukan pergantian judul kegiatan pada saat APBD-P untuk mengakomodir peserta dari guru TK, SD, dan SMP.

A.5 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Pendidikan)

Tabel 3.1.1e

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2019 (Dinas Pendidikan)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS PENDIDIKAN)						14.363,60	12.071,68	84,04%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100,00	100,00	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100,00	91,00	91,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100,00	87,00	87,00%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100,00	93,81	93,81%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (SMPN 1)						1.010,90	980,72	97,01%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (SMPN 2)						1.130,13	1.055,12	93,36%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (SMPN 3)						993,68	924,27	93,02%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (SMPN 4)						1.010,45	983,08	97,29%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (SMPN 5)						1.312,30	1.250,84	95,32%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (SMPN 6)						1.220,66	1.081,09	88,57%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (SMPN 7)						1.035,92	990,57	95,62%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (SMPN 8)						947,37	920,08	97,12%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (SMPN 9)						1.025,13	958,73	93,52%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (SMPN 10)						755,07	699,18	92,60%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (SMPN 11)						1.011,01	936,82	92,66%

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Belum terakomodirnya calon siswa SMP di beberapa wilayah di Kota Cilegon akibat dari Zonasi Sekolah dan pemberlakuan MoU wilayah perbatasan;
2. Belum signifikannya peningkatan APK dan APM jenjang PAUD dikarenakan belum adanya peraturan daerah maupun peraturan Walikota terkait program wajib PAUD bagi penduduk usia PAUD;
3. Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan beasiswa prestasi untuk siswa berprestasi dan lulusan terbaik jenjang SD dan SMP;
4. Belum adanya sistem pelaporan hasil perkembangan belajar peserta didik kepada orangtua secara langsung berbasis internet;
5. Belum terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai dengan 4 standar kompetensi pedagogik, professional, kepribadian dan sosial;
6. Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah sekolah sehingga mempengaruhi pelaksanaan proses belajar mengajar dan minimnya daya tampung;
7. Belum optimalnya pendataan masyarakat usia sekolah yang tidak sekolah;
8. Belum konsistennya antara perencanaan dan pelaksanaan;
9. Belum tersebarnya dan meratanya tenaga pendidik dan kependidikan terutama di wilayah yang jauh dari perkotaan;
10. Belum maksimalnya pemberian BOSDA untuk jenjang SD dan SMP serta BOPDA untuk jenjang PAUD.



B.2 Solusi

1. Diadakannya pembangunan unit sekolah baru SMPN 12 di kecamatan purwakarta dan pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah sekolah di wilayah perbatasan;
2. Disusunnya peraturan daerah dan peraturan walikota tentang program wajib PAUD bagi penduduk usia PAUD
3. Disediakan beasiswa prestasi bagi peserta didik berprestasi dan lulusan terbaik jenjang SD dan SMP;
4. Diperlukan adanya pembuatan system pelaporan hasil belajar peserta didik yang dapat diakses orang tua siswa secara online;
5. Diadakannya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat, bimbingan teknis dan workshop kompetensi;
6. Melaksanakan pembangunan dan pengadaan sarana secara bertahap dan berkelanjutan dengan skala prioritas;
7. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja Penilik dan PKBM dalam pendataan masyarakat tidak sekolah serta memaksimalkan fungsi pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah sampai dengan warga binaan di dalam lembaga pemasayarakatan;
8. Perlu adanya kajian yang terdokumentasi sebagai dasar dalam menentukan perencanaan kegiatan dan anggaran;
9. Pemetaan dan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai dasar dalam penempatan guru dan tenaga kependidikan;
10. Dibuat payung hukum yang mengatur tentang tata cara pemberian BOSDA untuk jenjang SD dan SMP serta BOPDA untuk jenjang PAUD.

3.1.2 Bidang Urusan Kesehatan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.1.2a
Target dan Realisasi Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat						5.280,14	4.515,71	85,52%
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	306,00	120,00	160,78%			
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 kelahiran hidup	24,00	9,00	162,50%			
	Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	96,22	96,22%			
	Persentase Ibu bersalin mendapat Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100,00	104,68	104,68%			
	Persentase bayi baru lahir mendapat Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	108,30	108,30%			
	Persentase anak usia 0-59 bulan mendapat Pelayanan kesehatan balita	%	100,00	96,36	96,36%			
	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100,00	96,33	96,33%			
	Persentase warga negara usia 60 th keatas mendapat Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100,00	38,22	38,22%			
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	%	17,00	3,13	181,59%			
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	%	28,00	0,91	196,75%			
	Persentase BBLR	%	8,00	3,35	158,13%			
	Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	%	18,20	11,60	136,26%			
	Persentase ibu hamil anemia	%	20,00	10,57	147,15%			
	Persentase penduduk yang menggunakan Jamban Sehat	%	92,00	90,46	98,33%			
	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS	%	71,00	80,22	112,99%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya inspeksi sanitasi tempat-tempat umum	Lokasi	10	15	150,00%	484,23	410,44	84,76%
	Terlaksananya pengawasan kualitas air bersih pemukiman	Lokasi	86	86	100,00%			
	Terlaksananya pelatihan	Kegiatan	4	4	100,00%			
	Terlaksananya pengujian sampel kolam renang	Lokasi	6	6	100,00%			
	Terlaksananya monitoring limbah fasyankes	Lokasi	10	10	100,00%			
	Terlaksananya penyuluhan kesling	Sekolah	10	11	110,00%			
	Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi makanan minuman	Lokasi	100	100	100,00%			
	Terlaksananya pemicuan CLTS/STBM	Lokasi	8	8	100,00%			
Penyelenggaraan Kota Sehat	Terlaksananya sosialisasi Kota Sehat	Kegiatan	1	1	100,00%	191,04	190,93	99,94%
	Terlaksananya Rapat Kerja TPKS	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Rapat Koordinasi (TP-Forum)	Kegiatan	3	3	100,00%			
	Terlaksananya Rapat Evaluasi	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya penilaian Kelembagaan FKS Kec & POKJA Tk. Kota	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Verifikasi dan Deklarasi Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) / Open Defecation Free (ODF)	Kelurahan	10	10	100,00%			
Peningkatan Promosi Kesehatan	Melaksanakan Penandatanganan Kerjasama Dengan Dunia Usaha	orang	40	40	100,00%	479,97	434,54	90,54%
	Melaksanakan Kampanye Germas Untuk Santri Hebat	Orang	40	40	100,00%			
	Melaksanakan Penandatanganan Kerjasama Dengan Organisasi Masyarakat	Orang	150	150	100,00%			
	Melaksanakan Pembinaan Krida SBH	Orang	50	50	100,00%			
	Melaksanakan Pameran Pembangunan	Kegiatan	12	12	100,00%			
	Melaksanakan Bimbingan Teknis Puskesmas	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Media Promosi Kesehatan	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan di Radio	Paket	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Pemberitaan Media Massa	Kegiatan	50	50	100,00%			
	Melaksanakan Evaluasi Keluarga Sehat	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Melaksanakan Evaluasi Tindak Lanjut: Kerjasama	Orang	60	60	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Dengan Ormas & Dunia Usaha							
	Melaksanakan Lomba Desain Grafis Tingkat SMA	Orang	50	50	100,00%			
	Melaksanakan Pemberitaan Media Massa dan Media Elektronik	Orang	60	60	100,00%			
Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	Terlaksananya Senam Sehat bagi Pekerja	kegiatan	44	44	100,00%	73,28	58,73	80,15%
	Terlaksananya Pembinaan Pos UKK Kesja	Orang	30	30	100,00%			
	Terlaksananya Monitoring Pos UKK	Lokasi	18	18	100,00%			
	Terlaksananya Monitoring Pekerja Formal	Lokasi	10	10	100,00%			
	Terlaksananya Koordinasi Lintas Prog_Sek KesJa	Orang	40	40	100,00%			
	Terlaksananya rapat evaluasi KesJa	Orang	40	40	100,00%			
	Tersedianya audio visual penerapan kesehatan kerja	Lokasi	9	9	100,00%			
	Terlaksananya Rockport Test	kegiatan	10	10	100,00%			
BOP Jamban Keluarga	Terlaksananya dukungan kegiatan jamban keluarga pada Wilayah Kelurahan	unit	6	6	100,00%	40,10	25,13	62,66%
Jaminan Persalinan/Jampersal (DAK)	Terlaksananya Pelayanan Jasa Kesehatan	Tahun	1	1	100,00%	473,00	129,02	27,28%
Instalasi Pengolahan Air Limbah /IPAL (DAK)	Terlaksananya pengadaan unit IPAL Puskesmas	unit	1	1	100,00%	450,00	446,65	99,26%
Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal (DAK)	Terlaksananya Kegiatan Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	Keg	9	7	80,00%	250,00	199,99	80,00%
DED Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah	Terlaksanakanya DED IPAL	lokasi	1	1	51,57%	49,39	25,47	51,57%
Kesehatan Ibu Hamil	Terlaksananya MOU Pemanfaatan Buku KIA lintas Sektoral	Orang	20	20	100,00%	185,60	183,99	99,13%
	Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA Lintas Sektor	Orang	40	80	200,00%			
	Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Buku KIA bagi Petugas	Kegiatan	3	3	100,00%			
	Terlaksananya Follow UP SBMR Bidan	Orang	50	50	100,00%			
	Terlaksananya Follow Up SBMR Poned	Orang	30	30	100,00%			
	Terlaksananya Pelatihan Supervisi Fasilitatif PKM dan BPM	Orang	65	65	100,00%			
	Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA untuk Kader	Kegiatan	2	2	100,00%			
Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya Evaluasi Kesga Gizi	Kegiatan	1	1	100,00%	156,15	155,40	99,52%
	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Bidan Kelurahan	Orang	43	43	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Terlaksananya pertemuan Bidan Koordinator	Orang	16	16	100,00%			
	Terlaksananya Pelacakan kematian Ibu	Kegiatan	4	1	25,00%			
	Terlaksananya Pengkajian Kasus IBU dan Anak	Kegiatan	4	4	100,00%			
	Terlaksananya Pembelajaran audit	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Terlaksananya Evaluasi PPWS KIA	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Koordinasi PKRT	Orang	50	50	100,00%			
	Terlaksananya Orientasi AMP Terintegrasi dengan MDN	Orang	35	35	100,00%			
	Terlaksananya Orientasi Pelayanan Kesehatan PNC	Kegiatan	3	3	100,00%			
Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya perawatan BBLR bagi kader	Orang	86	86	100,00%	135,45	123,35	91,07%
	Terlaksananya Pelacakan kematian Anak	Kegiatan	2	1	50,00%			
	Terlaksananya Pelatihan MTBM Bagi bidan Kelurahan	Orang	53	53	100,00%			
	Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal PKM Non Poned	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Pelatihan Asfiksia BBLR Bagi Tenaga Kesehatan	Orang	18	18	100,00%			
	Terlaksananya Orientasi SHK bagi tenaga kesehatan swasta	Orang	24	24	100,00%			
	Terlaksananya Orientasi Yankes Neonatal Esensial	Kegiatan	1	1	100,00%			
Kesehatan Anak Bawah Lima Tahun (Balita)	Terlaksananya Evaluasi MTBS	Orang	24	24	100,00%	97,03	96,48	99,43%
	Terlaksananya Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak oleh Dr SpA	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Pendampingan Psikolog	Puskesmas	8	8	100,00%			
	Terlaksananya Evaluasi Hasil Pendampingan Psikolog	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Pelatihan SDIDTK bagi Petugas	Orang	55	55	100,00%			
Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pelatihan Peer Conselor	puskesmas	8	8	100,00%	250,76	234,97	93,70%
	Terlaksananya Koordinasi Usekrem	Orang	40	40	100,00%			
	Terlaksananya Gebyar Anak Sehat	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Pelatihan Instrumen Penjaringan Kesehatan bagi Guru	Orang	60	60	100,00%			
	Terlaksananya Pendampingan imunisasi Gigi	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Intervensi Kesehatan Mental Emosional	Kegiatan	1	1	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya Lomba Senam USILA	Kegiatan	1	1	100,00%	87,62	80,31	91,66%
	Terlaksananya Pelatihan USILA	Orang	32	32	100,00%			
	Tersedianya Kartu Kunjungan USILA	Kartu	14.000	14.000	100,00%			
Gizi Masyarakat	Terlaksananya Lomba LBI dan Bumil Sehat	Kegiatan	1	1	100,00%	805,91	716,39	88,89%
	Terlaksananya Validasi Data Gizi	Kegiatan	4	4	100,00%			
	Terlaksananya Pemantauan GPA Balita Kurus Sekali	Kegiatan	4	2	50,00%			
	Terlaksananya Seminar Hari Gizi Nasional	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Kordinasi Tata Laksana Gizi Buruk	Orang	40	40	100,00%			
	Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan Anemia pada Bumil	Orang	60	60	100,00%			
	Terlaksananya Pertemuan Stunting dan Gizi Lebih pada Balita	Orang	60	60	100,00%			
	Terlaksananya Konselor ASI	Orang	20	20	100,00%			
	Terlaksananya Pengadaan PMT bagi Kurang Gizi dan Bumil KEK	Paket	1	1	100,00%			
Penurunan Stunting (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Obat Program Gizi untuk mendukung Pencegahan Stunting	Bulan	12	12	100,00%	483,63	483,63	100,00%
Upaya Kesehatan Sekunder Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Terlaksananya Upaya Kesehatan Sekunder	keg	15.346	14.047	91,54%	587,00	520,30	88,64%
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas Kecamatan Cilegon)						317,85	317,39	99,86%
Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya LBSI Di Kecamatan Cilegon	peserta	125	125	100,00%	13,98	13,98	100,00%
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Terlaksananya Kegiatan BOK (DAK)	Jenis Kegiatan	4	4	100,00%	303,87	303,42	99,85%
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas Kecamatan Ciwandan)						543,14	534,95	98,49%
Perbaikan Gizi Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan LBSI	Pemenang	120	120	100,00%	14,90	14,75	98,99%
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	terpenuhinya kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Bulan	12	12	100,00%	528,24	520,20	98,48%
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas Kecamatan Cibeber)						455,77	455,09	99,85%
Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat	kegiatan	1	1	100,00%	21,35	21,13	98,97%
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Tersedianya Upaya Kesehatan Prioritas/BOK	Tahun	1	1	100,00%	434,42	433,97	99,90%
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat						335,89	335,43	99,86%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(UPTD Puskesmas Kecamatan Grogol)								
Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya kegiatan perbaikan gizi masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	22,02	22,02	100,00%
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Terlaksananya Kegiatan BOK (DAK)	Kegiatan	4	4	100,00%	313,87	313,42	99,86%
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas Kecamatan Pulomerak)						422,00	421,55	99,89%
Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Lomba Balita Indonesia Tingkat kecamatan	Pemenang	6	6	100,00%	17,49	17,49	100,00%
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Terlaksananya Kegiatan BOK	Jenis	4	4	100,00%	404,51	404,06	99,89%
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas Kecamatan Purwakarta)	Tersedianya Makanan Dan Minuman Kegiatan BOK	Tahun	1	1	100,00%	384,57	384,12	99,88%
Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan LBI Puskesmas Purwakarta	Orang	110	110	100,00%	17,11	17,11	100,00%
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Tersedianya Jasa / Upah Tenaga Kerja	Tahun	1	1	100,00%	367,46	367,01	99,88%
	Tersedianya Transportasi Dan Akomodasi Kegiatan BOK	Tahun	1	1	100,00%			
	Tersedianya Penggandaan	Lembar	15.050	15.050	100,00%			
	Tersedianya Makanan Dan Minuman Kegiatan BOK	Tahun	1	1	100,00%			
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas Kecamatan Jombang)						476,73	476,09	99,87%
Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya LBI	Peserta	155	155	100,00%	13,90	13,90	100,00%
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi	Terlaksananya Gebyar Ibu Hamil Tingkat Kecamatan	orang	283	283	100,00%	16,78	16,78	100,00%
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Terlaksananya Kegiatan Bantuan Operasional (DAK)	Bulan	12	12	100,00%	446,05	445,42	99,86%
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas Kecamatan Citangkil 1)						500,88	496,51	99,13%
Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Lomba Balita Indonesia Tk.Kecamatan	Pemenang	6	6	100,00%	10,30	10,30	100,00%
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Terlaksananya Kegiatan BOK	Kegiatan	4	4	100,00%	490,58	486,21	99,11%
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UPT Kesehatan P2KP)						10,00	10,00	100,00%
Jasa Dokter Spesialis Paru	Terlaksananya Jasa Dokter Spesialis Paru	Orang	1	1	100,00%	10,00	10,00	100,00%

Peningkatan kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : perilaku, lingkungan, sosial budaya, dan fasilitas kesehatan serta peran masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan urusan kesehatan pada masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Cilegon melalui Dinas

Kesehatan terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui pengembangan kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.

Upaya Dinas Kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan di Kota Cilegon cukup berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya dalam memelihara kesehatan serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari beberapa indikator keberhasilan diantaranya :

1) AKI (Angka Kematian Ibu) per100.000 KH (Kelahiran Hidup) (AKI KONVERSI)

Jumlah kematian ibu karena hamil, bersalin, dan nifas di Kota Cilegon Tahun 2019 sebanyak 11 orang dari 9.132 jumlah kelahiran hidup, dan bila dikonversikan menjadi 120/100.000 KH. Dengan target tahun 2019 sebesar kurang dari 306/100.000 KH, maka dengan ini capaiannya adalah sebesar 160,64%. Ini menunjukkan keberhasilan capaian program kesehatan dalam upaya menurunkan AKI di Kota Cilegon; hal tersebut menunjukkan ANC yang semakin berkualitas. Penyebab kematian ibu terdiri dari : kematian pada masa nifas sebanyak 2 orang, selama kehamilan sebanyak 3 orang, dan pada saat persalinan sebanyak 6 orang. Penyebab kematian paling tinggi dikarenakan pendarahan post partum dan masa nifas. Adapun kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini adalah

Kegiatan	Output
Kesehatan Ibu Hamil	Terlaksananya MOU Pemanfaatan Buku KIA lintas Sektoral
	Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA Lintas Sektor
	Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Buku KIA bagi Petugas
	Terlaksananya Follow UP SBMR Bidan
	Terlaksananya Follow Up SBMR Poned
	Terlaksananya Pelatihan Supervisi Fasilitatif PKM dan BPM
	Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA untuk Kader
Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya perawatan BBLR bagi kader
	Terlaksananya Pelacakan kematian Anak
	Terlaksananya Pelatihan MTBM Bagi bidan Kelurahan
	Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal PKM Non Poned
	Terlaksananya Pelatihan Asfiksia BBLR Bagi Tenaga Kesehatan
	Terlaksananya Orientasi SHK bagi tenaga kesehatan swasta
	Terlaksananya Orientasi Yankes Neonatal Esensial
Gizi Masyarakat	Terlaksananya Lomba LBI dan Bumil Sehat
	Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan Anemia pada Bumil

Kegiatan	Output
	Terlaksananya Konselor ASI
	Terlaksananya Pengadaan PMT bagi Kurang Gizi dan Bumil KEK

2) AKB (Angka Kematian Bayi) per1000 KH (Kelahiran Hidup)

Jumlah kematian bayi ditahun 2019 sebesar 82 bayi dari 9132, apabila di konversikan sebesar 9/1000 KH dengan target tahun 2019 sebesar kurang dari 24/1000 KH. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan lebih baik, maka dengan ini capaiannya adalah sebesar 162,59%, Penyebab Kematian tertinggi dikarenakan BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah), keberhasilan indikator ini melalui kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan	Output
Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya perawatan BBLR bagi kader
	Terlaksananya Pelacakan kematian Anak
	Terlaksananya Pelatihan MTBM Bagi bidan Kelurahan
	Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal PKM Non PONE
	Terlaksananya Pelatihan Asfiksia BBLR Bagi Tenaga Kesehatan
	Terlaksananya Orientasi SHK bagi tenaga kesehatan swasta
	Terlaksananya Orientasi Yankes Neonatal Esensial
Gizi Masyarakat	Terlaksananya Lomba LBI dan Bumil Sehat
	Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan Anemia pada Bumil
	Terlaksananya Konselor ASI
	Terlaksananya Pengadaan PMT bagi Kurang Gizi dan Bumil KEK
Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya perawatan BBLR bagi kader
	Terlaksananya Pelacakan kematian Anak
	Terlaksananya Pelatihan MTBM Bagi bidan Kelurahan
	Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal PKM Non PONE
	Terlaksananya Pelatihan Asfiksia BBLR Bagi Tenaga Kesehatan
	Terlaksananya Orientasi SHK bagi tenaga kesehatan swasta
	Terlaksananya Orientasi Yankes Neonatal Esensial

3) Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan kesehatan ibu hamil

Kunjungan Ke-4 (K4) adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit empat kali kunjungan, dengan distribusi sekali pada tri semester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat

kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil. Pada Tahun 2019 Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta sebesar 8.707 bumil terhadap Jumlah semua ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama sebanyak 9.049 bumil sehingga persentasenya sebesar 96,22% dengan target sasaran 100%, maka capaian Kinerja sebesar 96,22%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

Kegiatan	Output
Kesehatan Ibu Hamil	Terlaksananya MOU Pemanfaatan Buku KIA lintas Sektoral
	Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA Lintas Sektor
	Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Buku KIA bagi Petugas
	Terlaksananya Follow UP SBMR Bidan
	Terlaksananya Follow Up SBMR Poned
	Terlaksananya Pelatihan Supervisi Fasilitatif PKM dan BPM
	Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA untuk Kader

4) Persentase Ibu bersalin mendapat Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Persentase pelayanan terhadap ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan yang standar Pada Tahun 2019 target ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sebesar 8.637 ibu bersalin, realisasi sebesar 9.044 ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sehingga capaiannya kinerjanya sebesar 104,68% dari target 100%, Keberhasilan ini dengan meningkatnya kesadaran kesehatan tentang kehamilan serta di dukung melalui kegiatan :

Kegiatan	Output
Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya perawatan BBLR bagi kader
	Terlaksananya Pelacakan kematian Anak
	Terlaksananya Pelatihan MTBM Bagi bidan Kelurahan
	Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal PKM Non Poned
	Terlaksananya Pelatihan Asfiksia BBLR Bagi Tenaga Kesehatan
	Terlaksananya Orientasi SHK bagi tenaga kesehatan swasta
	Terlaksananya Orientasi Yankes Neonatal Esensial

5) Persentase bayi baru lahir mendapat Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Pada Tahun 2019 target bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 8.226 bayi akan tetapi realisasi sebesar 8.909 bayi sehingga capaiannya adalah 108,30%, dari target sebesar 100%, , ini menunjukkan keberhasilan capaian program kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun kegiatan yang mendukung adalah:

Kegiatan	Output
Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya perawatan BBLR bagi kader

Kegiatan	Output
	Terlaksananya Pelacakan kematian Anak
	Terlaksananya Pelatihan MTBM Bagi bidan Kelurahan
	Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal PKM Non Poned
	Terlaksananya Pelatihan Asfiksia BBLR Bagi Tenaga Kesehatan
	Terlaksananya Orientasi SHK bagi tenaga kesehatan swasta

6) Persentase anak usia 0-59 bulan mendapat Pelayanan kesehatan balita

Tahun 2019 Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 31.919 balita terhadap jumlah seluruhnya 33.125 balita sehingga capaiannya sebesar 96,36%, dari target sebesar 100%, maka capaiannya realisasi adalah sebesar 96,36%, ini menunjukkan keberhasilan capaian program kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun indikator ini yang didukung melalui kegiatan:

Kegiatan	Output
Kesehatan Anak Bawah Lima Tahun (Balita)	Terlaksananya Evaluasi MTBS
	Terlaksananya Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak oleh Dr SPA
	Terlaksananya Pendampingan Psikolog
	Terlaksananya Evaluasi Hasil Pendampingan Psikolog
	Terlaksananya Pelatihan SDIDTK bagi Petugas
Gizi Masyarakat	Terlaksananya Lomba LBI dan Bumil Sehat
	Terlaksananya Validasi Data Gizi
	Terlaksananya Pemantauan GPA Balita Kurus Sekali
	Terlaksananya Seminar Hari Gizi Nasional
	Terlaksananya Kordinasi Tata Laksana Gizi Buruk
	Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan Anemia pada Bumil
	Terlaksananya Pertemuan Stunting dan Gizi Lebih pada Balita
	Terlaksananya Konselor ASI
	Terlaksananya Pengadaan PMT bagi Kurang Gizi dan Bumil KEK

7) Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Cakupan pelayanan usia Pendidikan Dasar yang mendapat Skrining Kesehatan sesuai standar di Kota Cilegon Pada Tahun 2019 Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar dalam kurun waktu satu tahun ajaran 23.241 siswa terhadap seluruh siswa kelas 1 dan 7 sebanyak 24.126 siswa sehingga capaian

kinerjanya sebesar 96,33% dari target sasaran sebesar 100%,. Adapun kegiatan yang mendukung ini dikator ini adalah:

Kegiatan	Output
Gizi Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Usekrem
	Terlaksananya Gebyar Anak Sehat
	Terlaksananya Pelatihan Instrumen Penjaringan Kesehatan bagi Guru
	Terlaksananya Pendampingan imunisasi Gigi
	Terlaksananya Intervensi Kesehatan Mental Emosional
Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pelatihan Peer Conselor
	Terlaksananya Koordinasi Usekrem
	Terlaksananya Gebyar Anak Sehat
	Terlaksananya Pelatihan Instrumen Penjaringan Kesehatan bagi Guru
	Terlaksananya Pendampingan imunisasi Gigi
	Terlaksananya Intervensi Kesehatan Mental Emosional

8) Persentase warga negara usia 60 th keatas mendapat Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Pada tahun 2019 Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun sebesar 16.386 usia lanjut terhadap seluruh penduduk usia lanjut sebanyak 42.870 orang sehingga capaiannya sebesar 38,22% dengan target sebesar 100%. Pencapaian di bawah target tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran lansia dan keluarganya untuk melakukan skrining lansia di posbindu. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya Lomba Senam USILA
	Terlaksananya Pelatihan USILA
	Tersedianya Kartu Kunjungan USILA

9) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)

Pada tahun 2019 Jumlah Balita Kurus dan Kurus sekali dalam kurun waktu tertentu sebesar 384 balita terhadap 32.854 sehingga capain kinerjanya sebesar 3,13% dari yang ditargetkan 17%, angka tersebut menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak balita. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan lebih baik, ini menunjukkan keberhasilan capaian program kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Gizi Masyarakat	Terlaksananya Lomba LBI dan Bumil Sehat
	Terlaksananya Validasi Data Gizi
	Terlaksananya Pemantauan GPA Balita Kurus Sekali
	Terlaksananya Seminar Hari Gizi Nasional
	Terlaksananya Kordinasi Tata Laksana Gizi Buruk
	Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan Anemia pada Bumil
	Terlaksananya Pertemuan Stunting dan Gizi Lebih pada Balita
	Terlaksananya Pengadaan PMT bagi Kurang Gizi dan Bumil KEK

10) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)

Pada Tahun 2019 Jumlah Balita Kurus dan Kurus sekali dalam kurun waktu tertentu 298 terhadap 32.854 sebesar 0,91% dengan target sebesar 29%, sehingga capaian realisasi sebesar 196,87%. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan lebih baik, keberhasilan ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksakan kesehatan, Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Gizi Masyarakat	Terlaksananya Lomba LBI dan Bumil Sehat
	Terlaksananya Validasi Data Gizi
	Terlaksananya Pemantauan GPA Balita Kurus Sekali
	Terlaksananya Seminar Hari Gizi Nasional
	Terlaksananya Kordinasi Tata Laksana Gizi Buruk
	Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan Anemia pada Bumil
	Terlaksananya Pertemuan Stunting dan Gizi Lebih pada Balita

11) Persentase BBLR

Pada Tahun 2019 jumlah bayi lahir dengan BB lahir rendah 304 bayi terhadap jumlah bayi kelahiran hidup 9.087 bayi sehingga capaian kinerjanya sebesar 3,35% dari target sebesar 8%, maka capaian realisasi adalah sebesar 158,18%, Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan lebih baik. keberhasilan indikator ini didukung melalui kegiatan :

Kegiatan	Output
Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya perawatan BBLR bagi kader
	Terlaksananya Pelacakan kematian Anak
	Terlaksananya Pelatihan MTBM Bagi bidan Kelurahan
	Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal PKM Non PONED
	Terlaksananya Pelatihan Asfiksia BBLR Bagi Tenaga Kesehatan

Kegiatan	Output
	Terlaksananya Orientasi SHK bagi tenaga kesehatan swasta
	Terlaksananya Orientasi Yankes Neonatal Esensial

12) Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)

Pada tahun 2019 Jumlah ibu hamil dengan status Kurang Energi Kronik dalam satu periode 1.050 Bumil KEK terhadap jumlah ibu hamil dalam satu periode yang sama 9.049 bumil sehingga capaian kinerjanya sebesar 11,60% dengan target sasaran sebesar 18,2%, sehingga capaian realisasi sebesar 136,24%. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan lebih baik. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

Kegiatan	Output
Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan Anemia pada Bumil
	Terlaksananya Pengadaan PMT bagi Kurang Gizi dan Bumil KEK

13) Persentase ibu hamil anemia

Capaian Kinerja Persentase ibu hamil anemia di Kota Cilegon pada tahun 2019 Jumlah ibu hamil yang menderita berdasarkan uji lab dalam kurun waktu satu tahun 920 bumil terhadap jumlah semua ibu hamil diwilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun yang sama 8.707 bumil sehingga persentasenya sebesar 10,57% dengan target sasaran sebesar 20 %, sehingga capaian realisasi sebesar 147,17%. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan lebih baik. Adapun kegiatan yang mendukung adalah:

Kegiatan	Output
Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pertemuan Penanggulangan KEK dan Anemia pada Bumil
	Terlaksananya Pengadaan PMT bagi Kurang Gizi dan Bumil KEK

14) Presentase penduduk yang menggunakan Jamban Sehat

Pada tahun 2019 jumlah penduduk yang menggunakan jamban sehat 116.474 jiwa terhadap jumlah penduduk 128.751 jiwa sehingga persentasenya sebesar 90.46 % dengan target sasaran sebesar 92%, sehingga capaian realisasi sebesar 98.33%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

Kegiatan	Output
Penyelenggaraan Kota Sehat	Terlaksananya Verifikasi dan Deklarasi Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) / Open Defecation Free (ODF)
BOP Jamban Keluarga	Terlaksananya dukungan kegiatan jamban keluarga pada Wilayah Kelurahan

15) Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS

Pada tahun 2019 Jumlah rumah tangga yang disurvei dan melaksanakan PHBS 53.634 rumah terhadap jumlah Rumah Tangga yang di Survey PHBS 66.862 rumah sehingga persentasenya sebesar 80,22% dari target sasaran sebesar 71%, sehingga capaian realisasi sebesar 112.98%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

Kegiatan	Output
Peningkatan Promosi Kesehatan	Melaksanakan Bimbingan Teknis Puskesmas
	Melaksanakan Media Promosi Kesehatan
	Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan di Radio
	Melaksanakan Pemberitaan Media Massa
	Melaksanakan Evaluasi Keluarga Sehat
	Melaksanakan Pemberitaan Media Massa dan Media Elektronik

REALISASI CAPAIAN KINERJA ANGGARAN < 75%

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat terdapat realisasi yang belum mencapai 75% dapat adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian BOP Jamban Keluarga sebesar 100 % dengan Total Anggaran Rp.40.100.000 terealisasi sebesar Rp.25.125.000 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 62,66%, dikarenakan ada perubahan metode pembuatan jamban keluarga dengan tujuan agar masyarakat dapat membuat sendiri jamban keluarga sehingga adanya efisiensi anggaran.
- 2) Capaian Kinerja Kegiatan Jampersal (DAK) sebesar 27,28 % dengan Total Anggaran Rp.473.000.000, terealisasi sebesar Rp.129.024.093 dengan capaian kinerja keuangan 27,28%, dikarenakan sudah banyak masyarakat menjadi peserta BPJS baik PBI atau Non PBI, dan belum semua faskes dan BPM bekerjasama dengan Dinas Kesehatan berkaitan dengan jampersal.
- 3) Capaian Kinerja Kegiatan DED Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah sebesar 50,00% dengan Total Anggaran Rp.49.390.400, terealisasi sebesar Rp.25.472.800 dengan capaian kinerja keuangan 51,57%, dikarenakan TP4D sudah di tiadakan menurut kebijakan pusat sehingga Honor TP4D tidak di realisasikan.

A.2 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tabel 3.1.2b

Target dan Realisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit						2.349,58	2.150,86	91,54%
	Cakupan Keluruhan Universal Child Immunization (UCI)	%	100,00	100,00	100,00%			
	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	97,00	105,79	109,06%			
	Prevalensi HIV/AIDS	%	0,50	0,03	194,00%			
	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	23,70	8,88	162,53%			
	Cakupan Penemuan Kasus TB (Case Detection Rate / CDR) yang diobati	%	90,00	92,89	103,21%			
	Menurunnya Prevalensi Kusta	/ 10.000 Penduduk	1,00	0,73	127,00%			
	Puskesmas yang melaksanakan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu	Puskesmas	8,00	8,00	100,00%			
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%	100,00	100,00	100,00%			
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	%	100,00	100,00	100,00%			
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	%	100,00	107,19	107,19%			
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	%	100,00	82,53	82,53%			
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100,00	42,10	42,10%			
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	%	100,00	63,43	63,43%			
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100,00	99,23	99,23%			
	Angka Penemuan Kasus Baru (CDR) Kusta	per 100.000 penduduk	5,00	6,40	72,00%			
	Persentase sekolah melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	%	25,00	56,50	226,00%			
	Angka Kesakitan DBD	per 100.000 penduduk	49,00	132,20	49,00%			
	Jamaah haji yang dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan	%	90,00	95,94	106,60%			
Kesehatan Haji	Terlaksananya pemeriksaan haji lanjutan	Orang	810	779	96,17%	212,14	198,32	93,48%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Terlaksananya pembinaan di masa tunggu	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya pembinaan di masa keberangkatan	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya pengukuran kebugaran jemaah haji	Orang	810	787	97,16%			
	Terlaksananya senam berhaji sehat	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya entry siskohatkes	Kegiatan	1	2	200,00%			
	Terlaksananya pembinaan kesehatan calon jemaah haji di KBIH	KBIH	7	7	100,00%			
	Terlaksananya skrining istithaah jemaah haji	Kegiatan	1	2	200,00%			
	Terlaksananya istithaah	Orang	810	779	96,17%			
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Terlaksananya Bongkar Muat Bahan insektisida dan larvasida program P2BB	kegiatan	4	4	100,00%	253,40	253,40	100,00%
	Terlaksananya Fogging	Focus	120	120	100,00%			
	Terlaksananya Sosialisasi Leptospirosis pada swasta	kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya sosialisasi Leptospirosis pada kader	kegiatan	2	2	100,00%			
	terlaksananya kegiatan Gerakan Serentak PSN	Kecamatan	8	8	100,00%			
	Terlaksananya belanja BBM Fogging	Focus	120	120	100,00%			
	Terlaksananya pertemuan koordinasi Gerakan Serentak PSN	kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya supervisi Jumantik di sekolah	kegiatan	8	8	100,00%			
	Terlaksananya kegiatan pertemuan P2BB	kegiatan	1	1	100,00%			
	terlaksananya validasi data HIV AIDS dan IMS	Kegiatan	4	5	125,00%	245,52	241,32	98,29%
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HIV AIDS	terlaksananya monev pendampingan ODHA	Kegiatan	2	2	100,00%			
	terlaksananya workshop LKB	Kegiatan	2	1	50,00%			
	terlaksananya transport pendampingan ODHA	Orang	24	24	100,00%			
	terlaksananya transport ODHA	Orang	40	40	100,00%			
	terlaksananya monev Duta TB HIV	Kegiatan	8	8	100,00%			
	terlaksananya sosialisasi layanan VCT lintas sektoral	Kegiatan	2	2	100,00%			
	terlaksananya sosialisasi program TB HIV di perusahaan	Kegiatan	2	2	100,00%			
	terlaksananya sosialisasi / survey komprehensif HIV AIDS di PT	Kegiatan	10	10	100,00%			
	terlaksananya mobile vct	Kegiatan	15	15	100,00%			
	terlaksananya hari aids sedunia	Kegiatan	1	1	100,00%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	terlaksananya pertemuan program HIV AIDS dan IMS di RS	Kegiatan	2	2	100,00%			
	terlaksananya sosialisai bagi kader	Kegiatan	2	2	100,00%			
	terlaksananya supervisi P2 HIV	Kegiatan	4	4	100,00%			
	terlaksananya bongkar muat logistik program HIV	Kegiatan	4	4	100,00%			
	terlaksananya belanja ATK Kegiatan	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya (Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota Serang, Tangerang, Tangsel)	Paket	1	1	100,00%			
	Terlaksananya kegiatan pertemuan P2 HIV	Orang	35	35	100,00%			
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular TB	terlaksananya validasi Tb HIV	kegiatan 60 Orang	2	2	100,00%	347,16	346,13	99,70%
	terlaksananya monev pokja TB HIV Tk. UPK ,kolaborasi TB DM dan Kolaborasi TB Kusta	Kegiatan	2	2	100,00%			
	terlaksananya monev pokja TB HIV Tk. Kota	Pokja	16	16	100,00%			
	terlaksananya validasi data TB	Kegiatan	2	3	150,00%			
	terlaksananya sosialisasi TB RO bagi petugas kesehatan swasta	Kegiatan	4	4	100,00%			
	terlaksananya pertemuan rakor PPM Tk. Kota	Kegiatan	2	2	100,00%			
	terlaksananya pertemuan sosialisasi TCM pada petugas	Kegiatan	4	4	100,00%			
	terlaksananya pelaksanaan TB Day	Kegiatan	2	2	100,00%			
	terlaksananya kolaborasi TB DM	Kegiatan	1	1	100,00%			
	terlaksananya pelatihan SITT TB 10.04	Kegiatan	1	1	100,00%			
	terlaksananya evaluasi semester seksi P2	Kegiatan	1	1	100,00%			
	terlaksananya screening massal dilapas	Kegiatan	2	2	100,00%			
	terlaksananya pertemuan Tb DOTS RS	Kegiatan	5	5	100,00%			
	terlaksananya supervisi TB	Kegiatan	2	2	100,00%			
	terlaksananya penjangkaran kasus TB	Kegiatan	4	4	100,00%			
	terlaksananya belanja ATK	Kegiatan	3	3	100,00%			
	terlaksananya bongkar muat obat TB	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya belanja cetak	Kegiatan	4	4	100,00%			
	terlaksananya Pelayanan TB oleh Dokter Spesialis Paru	Paket	1	1	100,00%			
	terlaksananya Kegiatan pengawas menelan obat TBMDR	JP	24	24	100,00%			
	terlaksananya kegiatan screening contact TB MDR	keg	5	5	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	terlaksananya refreshing kader	keg	5	5	100,00%			
	terlaksananya penyisiran kasus TB di RS	Orang	75	75	100,00%			
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kusta	terlaksananya pendataan dan pemeriksaan kontak dan pemeriksaan kemoprofilaksis	Kegiatan	4	4	100,00%	45,78	45,11	98,54%
	terlaksananya rapat kordinasi kusta puskesmas	Kegiatan	1	1	100,00%			
	terlaksananya sosialisasi pemeriksaan kontak dan kemoprofilaksis bagi petugas kesehatan	Kegiatan	1	1	100,00%			
	terlaksananya monev pemeriksaan kontak dan kemoprofilaksis bagi petugas kesehatan	Kegiatan	1	1	100,00%			
	terlaksananya supervisi kusta	Kegiatan	4	4	100,00%			
	terlaksananya leprosy day	Kegiatan	1	-	0,00%			
	terlaksananya validasi kusta	Kegiatan	4	4	100,00%			
	terlaksananya konfirmasi diagnosa kusta	Kegiatan	8	8	100,00%			
	terlaksananya bongkar muat obat kusta	Kegiatan	4	4	100,00%			
	terlaksananya belanja atk	Kegiatan	1	1	100,00%			
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan HPISP (Hepatitis Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan)	terlaksananya pertemuan hepatitis dan thypoid pada faskes swasta	Kegiatan	2	2	100,00%	74,70	74,63	99,91%
	terlaksananya pertemuan ISPA pada faskes swasta	Kegiatan	2	2	100,00%			
	terlaksananya pertemuan Diare pada faskes swasta	Kegiatan	2	2	100,00%			
	terlaksananya rakor program TB HIV Hepatitis dengan Program KIA dan Imunisasi	Kegiatan	1	1	100,00%			
	terlaksananya supervisi program ISPA ,HPISP	Kegiatan	4	4	100,00%			
	terlaksananya belanja ATK	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Belanja Penggandaan (fotocopy)	Lembar	5.000	5.000	100,00%			
	terlaksananya belanja materai	Kegiatan	1	1	100,00%			
	terlaksananya bongkar muat logistik ISPA HPISP	Kegiatan	4	4	100,00%			
	Terlaksananya validasi ISPA HPISP	Kegiatan	4	4	100,00%			
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Lainnya	Melaksanakan Sosialisasi Kanker dan Pemeriksaan IVA Pada Masyarakat	Kegiatan	8	8	100,00%	191,20	189,13	98,91%
	Melaksanakan Penjaringan IVA	Kegiatan	4	4	100,00%			
	Melaksanakan Penjaringan PTM	Kegiatan	10	10	100,00%			
	Melaksanakan Supervisi Posbindu PTM	Kegiatan	8	8	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Melaksanakan Pelatihan PTM untuk pengelola program	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Sosialisasi PTM	Kegiatan	4	4	100,00%			
	Melaksanakan Rakoor Program PTM	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Seminar Faktor Resiko PTM Bagi Pekerja	Orang	95	95	100,00%			
	Melaksanakan Seminar Faktor Resiko PTM Bagi Guru dan Anak Sekolah	Orang	110	110	100,00%			
	Melaksanakan Pertemuan Lintas Sektor dalam Pengendalian PTM	Orang	60	60	100,00%			
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular hipertensi	Melaksanakan Sosialisai Hipertensi pada Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	60,00	40,20	67,00%
	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Bagi Kader Posbindu	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Rakor Program PTM	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Pelatihan Konseling sebaya UBM	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Sosialisai UBM bagi Guru	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Sosialisasi UBM pada anak sekolah	Kegiatan	1	2	200,00%			
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Diabetes Melitus	Melaksanakan Kegiatan Penjaringan DM (Anak Sekolah dan Ibu Hamil)	Kegiatan	16	16	100,00%	60,00	60,00	100,00%
	Melaksanakan Pelatihan Pendeteksian Dini DM Pada Ibu Hamil	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Sosialisasi DM Pada Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Validasi Data Penyakit Tidak Menular	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Melaksanakan Bimbingan Teknis PTM ke Puskesmas	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Melaksanakan Sosialisasi DM Di Posbindu	Kegiatan	8	8	100,00%			
	Melaksanakan Sosialisasi dan Senam DM	Kegiatan	8	8	100,00%			
	Melaksanakan Peringatan Hari Diabetes sedunia	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Sosialisasi Kesehatan Jiwa Lintas Sektor	Kegiatan	1	1	100,00%	148,80	148,80	100,00%
	Melaksanakan Sharing Kesehatan Jiwa Di Sekolah	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan Napza Pada Keluarga Pasien	Kegiatan	24	24	100,00%			
	Melaksanakan Kunjungan Rumah Pasien Pasung	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Pembentukan Posjitu (Pos Jiwa Terpadu) Tingkat Kelurahan	Kegiatan	1	4	400,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Melaksanakan Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan Napza Pada Anak Sekolah	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Melaksanakan Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan Napza Pada Swasta (BPS FKTP I dan FKTP Lanjutan)	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan Napza Pada Organisasi Kemasyarakatan	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Validasi Data Kesehatan Jiwa	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Seminar Kesehatan Jiwa	Kegiatan	1	1	100,00%			
Peningkatan Kesehatan Indera	Melaksanakan Supervisi Kesehatan Indera Ke Puskesmas	Puskesmas	8	8	100,00%	75,00	74,20	98,93%
	Melaksanakan penjangkauan Monitoring kesehatan indera	Sekolah	24	24	100,00%			
	Melaksanakan Pelatihan Gangguan Indera dan Fungsional	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Screning Katarak di Posbindu	Posbindu	20	20	100,00%			
	Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan indera Di Posbindu	Posbindu	20	14	70,00%			
	Melaksanakan Validasi Data kesehatan indera	Kegiatan	4	4	100,00%			
	Melaksanakan Sharing Kesehatan Indera Di Sekolah	Sekolah	24	24	100,00%			
	Melaksanakan Pendampingan Screning Katarak	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Pendampingan Operasi Katarak	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Melaksanakan Pendampingan Screening Bibir Sumbing	Kegiatan	1	-	0,00%			
	Melaksanakan Pendampingan Operasi Bibir Sumbing	Kegiatan	1	-	0,00%			
Survelinans	Terlaksananya penanggulangan KLB	Kegiatan	4	2	50,00%	142,68	71,99	50,46%
	Terlaksananya rakor situasi terkini dan kebijakan nasional surveilans	orang	50	50	100,00%			
	Terlaksananya surveilans kesehatan	orang	50	50	100,00%			
	Terlaksananya Refrest surveilans situasi terkini	orang	40	40	100,00%			
	Terlaksananya validasi surveilans PKM dan RS	orang	75	75	100,00%			
	Terlaksananya surveilans berbasis masyarakat	orang	55	55	100,00%			
Imunisasi	Terlaksananya imunisasi dasar lengkap	Orang	8.532	8.714	102,13%	162,21	117,55	72,47%
	Terlaksananya imunisasi pada anak sekolah	SD	193	199	103,11%			
	Terlaksananya imunisasi pada ibu hamil (TT2+)	Orang	8	7	81,56%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Terlaksananya pembinaan RS/RSIA/RB/BPS program imunisasi	Orang	70	60	85,71%			
	Terlaksananya rakor BIAS	Orang	80	75	93,75%			
	Terlaksananya evaluasi KIPi Tingkat Kota	Orang	80	-	0,00%			
	Terlaksananya kasus KIPi di kota cilegon	Kasus	5	1	20,00%			
	Terlaksananya penguatan imunisasi lanjutan	Orang	80	75	93,75%			
	Terlaksananya kegiatan DQS	Orang	40	40	100,00%			
	Terlaksananya validasi data triwulan	Orang	160	160	100,00%			
	Terlaksananya pembinaan pada bidan kelurahan	Orang	65	65	100,00%			
	Terlaksananya imunisasi berbasis masyarakat	Orang	100	100	100,00%			
	Terlaksananya service dan spare part kulkas vaksin	Kegiatan	3	-	0,00%			
Kesehatan Matra	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada arus mudik perayaan hari raya	Posko	5	6	120,00%	310,35	275,81	88,87%
	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada arus mudik perayaan tahun baru	Posko	5	5	100,00%			
Krisis Kesehatan Matra	Terlaksananya penanggulangan bencana di wilayah kota cilegon	kegiatan	6	5	83,33%	20,65	14,28	69,13%
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (UPTD Puskesmas Kecamatan Cibeber)						6,54	6,54	100,00%
Pemeriksaan Calon Haji	Terlaksananya Pemeriksaan Haji Tingkat Kecamatan	kegiatan	1	1	100,00%	6,54	6,54	100,00%
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (UPTD Puskesmas Kecamatan Grogol)						14,40	14,40	100,00%
Pemeriksaan Calon Haji	Terlaksananya pemeriksaan calon haji	Kegiatan	4	4	100,00%	14,40	14,40	100,00%
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (UPTD Puskesmas Kecamatan Purwakarta)						8,71	7,92	90,91%
Pemeriksaan Calon Jamaah Haji	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan haji tk.Kecamatan Purwakarta	box	360	320	88,89%	8,71	7,92	90,91%
	Tersedianya ATK	jenis	7	7	100,00%			
	Tersedianya Fototcopy	lembar	2.020	1.750	86,63%			
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (UPT Kesehatan P2KP)						3,60	3,60	100,00%
Pelaksanaan Kegiatan Rabu Sehat	Terlaksananya Kegiatan Rabu Sehat	Box	240	240	100,00%	3,60	3,60	100,00%

Program ini bertujuan mengendalikan dan menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan dari penyakit menular dan tidak menular, penyakit bersumber binatang, penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (PD3I) melalui pengembangan kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan kesehatan berwawasan kesehatan. Keberhasilan program ini di dukung oleh beberapa indikator yang mendukung program tersebut diantaranya :

1) Prevalensi HIV/AIDS

Penanggulangan HIV di Indonesia terdiri atas upaya pencegahan, termasuk peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan pemahaman akan hak-hak reproduksi; pengobatan, dukungan dan perawatan bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS; dan surveilans. Upaya pencegahan juga ditujukan kepada populasi beresiko tinggi seperti pekerja seks komersial dan pelanggannya, orang yang telah terinfeksi dan pasangannya parapengguna napza suntik serta pekerja kesehatan yang mudah terpapar oleh infeksi HIV/AIDS. Pada tahun 2019 Jumlah Penduduk laki-laki dan perempuan usia 15-49 tahun yang terinfeksi HIV 77 orang terhadap jumlah penduduk laki-laki dan perempuan usia 15-49 tahun 250.528 orang sehingga persentasenya sebesar 0,03% dengan target 0,5% maka capaian kinerjanya adalah sebesar 193,85 %. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan lebih baik. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HIV	terlaksananya monev pendampingan ODHA
	terlaksananya workshop LKB
	terlaksananya transport pendampingan ODHA
	terlaksananya transport ODHA
	terlaksananya monev Duta TB HIV
	terlaksananya sosialisasi layanan VCT lintas sektoral
	terlaksananya sosialisasi program TB HIV di perusahaan
	terlaksananya sosialisasi / survey komprehensif HIV AIDS di PT
	terlaksananya mobile VCT
	terlaksananya hari AIDS sedunia
	terlaksananya pertemuan program HIV AIDS dan IMS di RS
	terlaksananya sosialisai bagi kader
	terlaksananya supervisi P2 HIV
	terlaksananya bongkar muat logistik program HIV

Kegiatan	Output
	Terlaksananya (Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota Serang, Tangerang, Tangsel)
	Terlaksananya kegiatan pertemuan P2 HIV

2) Prevalensi Hipertensi

Pada tahun 2019 Jumlah Seluruh Penderita tekanan darah tinggi sebanyak 28.170 penderita terhadap jumlah penduduk 15 tahun keatas sebesar 317.090 jiwa sehingga persentasenya sebesar 8,88% dengan target sasaran 23,7% maka capaiannya adalah sebesar 162,52 %. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan lebih baik. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular hipertensi	Melaksanakan Sosialisai Hipertensi pada Masyarakat
	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Bagi Kader Posbindu
	Melaksanakan Rakor Program PTM
	Melaksanakan Pelatihan Konseling sebaya UBM
	Melaksanakan Sosialisai UBM bagi Guru
	Melaksanakan Sosialisasi UBM pada anak sekolah

3) Cakupan Penemuan Kasus TB (Case Detection Rate / CDR) yang diobati

Pada tahun 2019 Jumlah Pasien TB (Semua Tipe) yang dilaporkan dan diobati 1.294 Pasien terhadap Perkiraan jumlah semua kasus TB 1.394 pasien sehingga persentasenya sebesar 92,89% dengan target sasaran 90% maka capaiannya adalah sebesar 103,21%. Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular TB	terlaksananya validasi Tb HIV
	terlaksananya monev pokja TB HIV Tk. UPK, kolaborasi TB DM dan Kolaborasi TB Kusta
	terlaksananya monev pokja TB HIV Tk. Kota
	terlaksananya validasi data TB
	terlaksananya sosialisasi TB RO bagi petugas kesehatan swasta
	terlaksananya pertemuan rakor PPM Tk. Kota
	terlaksananya pertemuan sosialisasi TCM pada petugas
	terlaksananya pelaksanaan TB Day
	terlaksananya kolaborasi TB DM

Kegiatan	Output
	terlaksananya pelatihan SITTB TB 10.04
	terlaksananya evaluasi semester seksi P2
	terlaksananya screening massal dilapas
	terlaksananya pertemuan TB DOTS RS
	terlaksananya supervisi TB
	terlaksananya penjangkauan kasus TB
	terlaksananya bongkar muat obat TB
	terlaksananya Pelayanan TB oleh Dokter Spesialis Paru
	terlaksananya Kegiatan pengawas menelan obat TBMDR
	terlaksananya kegiatan screening contact TB MDR
	terlaksananya penyisiran kasus TB di RS

4) Menurunnya Prevalensi Kusta

Pada tahun 2019 Jumlah Kasus Kusta terdaftar pada suatu saat tertentu sebanyak 32 penderita terhadap jumlah penduduk pada tahun yang sama adalah sebesar 0,73/10.000 dengan target sasaran 1/10.000 Penduduk maka capaiannya adalah sebesar 126,81%.

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kusta	terlaksananya pendataan dan pemeriksaan kontak dan pemeriksaan kemoprofilaksis
	terlaksananya rapat kordinasi kusta puskesmas
	terlaksananya sosialisasi pemeriksaan kontak dan kemoprofilaksis bagi petugas kesehatan
	terlaksananya monev pemeriksaan kontak dan kemoprofilaksis bagi petugas kesehatan
	terlaksananya supervisi kusta
	terlaksananya validasi kusta
	terlaksananya konfirmasi diagnosa kusta
	terlaksananya bongkar muat obat kusta

5) Puskesmas yang melaksanakan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu

Capaian Kinerja Puskesmas yang melaksanakan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu di Kota Cilegon pada tahun 2019 adalah sebesar 8 puskesmas dengan target sasaran 8 Puskesmas maka capaian realisasi adalah sebesar 100,00%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Surveilans	Terlaksananya penanggulangan KLB
	Terlaksananya rakor situasi terkini dan kebijakan nasional surveilans
	Terlaksananya surveilans kesehatan
	Terlaksananya Refrest surveilans situasi terkini
	Terlaksananya validasi surveilans PKM dan RS
	Terlaksananya surveilans berbasis masyarakat

6) Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

UCI (Universal Child Immunization) adalah desa/kelurahan dimana ≥ 80 dari jumlah bayi yang ada di desa/ kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Pada tahun 2019 capaian kelurahan UCI sebesar 100 % (43 Kelurahan dari 43 Kelurahan di Kota Cilegon). Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Imunisasi	Terlaksananya imunisasi dasar lengkap
	Terlaksananya imunisasi pada anak sekolah
	Terlaksananya imunisasi pada ibu hamil (TT2+)
	Terlaksananya pembinaan RS/RSIA/RB/BPS program imunisasi
	Terlaksananya rakor BIAS
	Terlaksananya evaluasi KIPI Tingkat Kota
	Terlaksananya kasus KIPI di kota cilegon
	Terlaksananya penguatan imunisasi lanjutan
	Terlaksananya kegiatan DQS
	Terlaksananya validasi data triwulan
	Terlaksananya pembinaan pada bidan kelurahan
	Terlaksananya imunisasi berbasis masyarakat
	Terlaksananya service dan spare part kulkas vaksin

7) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

Capaian Kinerja Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu pada tahun 2019 sebesar 100% (8/8), Adapun kegiatan yang mendukung inidikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Diabetes Melitus	Melaksanakan Kegiatan Penjaringan DM (Anak Sekolah dan Ibu Hamil)
	Melaksanakan Pelatihan Pendeteksian Dini DM Pada Ibu Hamil
	Melaksanakan Sosialisasi DM Pada Masyarakat
	Melaksanakan Validasi Data Penyakit Tidak Menular
	Melaksanakan Bimbingan Teknis PTM

Kegiatan	Output
	ke Puskesmas
	Melaksanakan Sosialisasi DM Di Posbindu
	Melaksanakan Sosialisasi dan Senam DM
	Melaksanakan Peringatan Hari Diabetes sedunia
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular hipertensi	Melaksanakan Sosialisai Hipertensi pada Masyarakat
	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Bagi Kader Posbindu
	Melaksanakan Rakor Program PTM
	Melaksanakan Pelatihan Konseling sebaya UBM
	Melaksanakan Sosialisai UBM bagi Guru
	Melaksanakan Sosialisasi UBM pada anak sekolah

8) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)

Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) pada tahun 2019 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 7.308 terhadap 7.308 orang sehingga persentasenya sebesar 100% dengan target 100%. Capaian ini sudah sesuai dengan target sebesar 100%, maka capaian realisasi sebesar 100%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular TB	terlaksananya validasi Tb HIV
	terlaksananya monev pokja TB HIV Tk. UPK ,kolaborasi TB DM dan Kolaborasi TB Kusta
	terlaksananya monev pokja TB HIV Tk. Kota
	terlaksananya validasi data TB
	terlaksananya sosialisasi TB RO bagi petugas kesehatan swasta
	terlaksananya pertemuan rakor PPM Tk. Kota
	terlaksananya pertemuan sosialisasi TCM pada petugas
	terlaksananya pelaksanaan TB Day
	terlaksananya kolaborasi TB DM
	terlaksananya pelatihan SITTB TB 10.04
	terlaksananya evaluasi semester seksi P2
	terlaksananya screening massal dilapas
	terlaksananya pertemuan Tb DOTS RS

Kegiatan	Output
	terlaksananya supervisi TB
	terlaksananya penjangkauan kasus TB
	terlaksananya bongkar muat obat TB
	terlaksananya Pelayanan TB oleh Dokter Spesialis Paru
	terlaksananya Kegiatan pengawas menelan obat TBMDR
	terlaksananya kegiatan screening contact TB MDR
	terlaksananya penyaliran kasus TB di RS

9) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Capaian Realisasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV pada tahun 2019 sebesar 107.19% dengan target 100% maka capaian kinerja adalah sebesar 107,19%. Adapun indikator ini didukung melalui kegiatan:

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular TB	terlaksananya monev pendampingan ODHA
	terlaksananya workshop LKB
	terlaksananya transport pendampingan ODHA
	terlaksananya transport ODHA
	terlaksananya monev Duta TB HIV
	terlaksananya sosialisasi layanan VCT lintas sektoral
	terlaksananya sosialisasi program TB HIV di perusahaan
	terlaksananya sosialisasi / survey komprehensif HIV AIDS di PT
	terlaksananya mobile VCT
	terlaksananya hari AIDS sedunia
	terlaksananya pertemuan program HIV AIDS dan IMS di RS
	terlaksananya sosialisai bagi kader
	terlaksananya supervisi P2 HIV
	terlaksananya bongkar muat logistik program HIV
	Terlaksananya (Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota Serang, Tangerang, Tangsel)
	Terlaksananya kegiatan pertemuan P2 HIV

10) Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

Pada tahun 2019 Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan

skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 241.258 orang terhadap Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama 292.312 orang sehingga persentasenya sebesar 82,53% dari target 100% maka capaian kinerja sebesar 82,53%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Lainnya	Melaksanakan Sosialisasi Kanker dan Pemeriksaan IVA Pada Masyarakat
	Melaksanakan Penjaringan IVA
	Melaksanakan Penjaringan PTM
	Melaksanakan Supervisi Posbindu PTM
	Melaksanakan Pelatihan PTM untuk pengelola program
	Melaksanakan Sosialisasi PTM
	Melaksanakan Rakoor Program PTM
	Melaksanakan Seminar Faktor Resiko PTM Bagi Pekerja
	Melaksanakan Seminar Faktor Resiko PTM Bagi Guru dan Anak Sekolah
	Melaksanakan Pertemuan Lintas Sektor dalam Pengendalian PTM

11) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pada tahun 2019 Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 28.170 Penderita terhadap Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama sebanyak 66.906 penderita sehingga persentasenya sebesar 42,10% dengan target sasaran 100% maka capaian Realisasi adalah sebesar 42,10%. Karena data dari sarana pelayanan kesehatan swasta belum optimal di catat.

Rendahnya capaian indikator program ini salah satunya dikarenakan basis data dari sarana pelayanan kesehatan swasta belum optimal dan belum terintegrasi dengan data kesehatan di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah.

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular hipertensi	Melaksanakan Sosialisai Hipertensi pada Masyarakat
	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Bagi Kader Posbindu
	Melaksanakan Rakor Program PTM
	Melaksanakan Pelatihan Konseling sebaya UBM
	Melaksanakan Sosialisasi UBM bagi Guru
	Melaksanakan Sosialisasi UBM pada anak

Kegiatan	Output
	sekolah

12) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Pada tahun 2019 Jumlah penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 13.877 Terhadap Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama 21.879 Penyandang DM sehingga persentasenya adalah sebanyak 63,43 % dengan target sasaran 100% maka capaian kinerja adalah sebesar 63,43% .Karena data dari sarana pelayanan kesehatan swasta belum optimal di catat.

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Diabetes Melitus	Melaksanakan Kegiatan Penjaringan DM (Anak Sekolah dan Ibu Hamil)
	Melaksanakan Pelatihan Pendeteksian Dini DM Pada Ibu Hamil
	Melaksanakan Sosialisasi DM Pada Masyarakat
	Melaksanakan Validasi Data Penyakit Tidak Menular
	Melaksanakan Bimbingan Teknis PTM ke Puskesmas
	Melaksanakan Sosialisasi DM Di Posbindu
	Melaksanakan Sosialisasi dan Senam DM
	Melaksanakan Peringatan Hari Diabetes sedunia

13) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Pada tahun 2019 Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 564 ODGJ terhadap Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama 568 ODGJ persentasenya adalah sebanyak 99,23% dengan target sasaran 100% maka capaian kinerja adalah sebesar 99,23 % .Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Peningkatan Kesehatan Jiwa	Melaksanakan Sosialisasi Kesehatan Jiwa Lintas Sektor
	Melaksanakan Sharing Kesehatan Jiwa Di Sekolah

Kegiatan	Output
	Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan Napza Pada Keluarga Pasien
	Melaksanakan Kunjungan Rumah Pasien Pasung
	Melaksanakan Pembentukan Posjitu (Pos Jiwa Terpadu) Tingkat Kelurahan
	Melaksanakan Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan Napza Pada Anak Sekolah
	Melaksanakan Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan Napza Pada Swasta (BPS FKTP I dan FKTP Lanjutan)
	Melaksanakan Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan Napza Pada Organisasi Kemasyarakatan
	Melaksanakan Validasi Data Kesehatan Jiwa
	Melaksanakan Seminar Kesehatan Jiwa

14) Angka Penemuan Kasus Baru (CDR) Kusta

Capaian Realisasi Angka Penemuan Kasus Baru (CDR) Kusta pada tahun 2019 adalah sebanyak 6,40/100.000 penduduk dengan target sasaran 5/100.000 penduduk maka capaian Kinerja adalah sebesar 71,91 %. Capaian kinerja demikian berarti kinerja penemuan kasus baru cukup baik tapi di sisi lain data tersebut menunjukkan kasus kusta di kota Cilegon masih cukup tinggi diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kusta	terlaksananya pendataan dan pemeriksaan kontak dan pemeriksaan kemoprofilaksis
	terlaksananya rapat kordinasi kusta puskesmas
	terlaksananya sosialisasi pemeriksaan kontak dan kemoprofilaksis bagi petugas kesehatan
	terlaksananya monev pemeriksaan kontak dan kemoprofilaksis bagi petugas kesehatan
	terlaksananya supervisi kusta
	terlaksananya validasi kusta
	terlaksananya konfirmasi diagnosa kusta
	terlaksananya bongkar muat obat kusta

15) Persentase sekolah melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Pada tahun 2019 Jumlah Sekolah melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebanyak 200 sekolah (SD,SMP dan SMU) terhadap jumlah sekolah seluruhnya 354 sekolah baik negeri maupun swasta adalah sebanyak 56,50% dengan target sasaran 25% maka capaian Kinerja adalah sebesar 225,99 % .Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Lainnya	Melaksanakan Penjaringan PTM
	Melaksanakan Seminar Faktor Resiko PTM Bagi Guru dan Anak Sekolah

16) Persentase Anak Usia 0 Sampai 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (%)

Keberhasilan Kelurahan UCI sebesar 100% didukung indikator Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi 0-11 bulan yang sudah tercapai sebesar 105,79% dengan target sebesar 97% maka capaian kinerja telah mencapai sebesar 109,06%. Indikator ini menggambarkan kesadaran masyarakat yang sudah tinggi akan pentingnya melakukan upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Imunisasi	Terlaksananya imunisasi dasar lengkap
	Terlaksananya imunisasi pada anak sekolah
	Terlaksananya imunisasi pada ibu hamil (TT2+)
	Terlaksananya pembinaan RS/RSIA/RB/BPS program imunisasi
	Terlaksananya rakor BIAS
	Terlaksananya evaluasi KIPI Tingkat Kota
	Terlaksananya kasus KIPI di Kota Cilegon
	Terlaksananya penguatan imunisasi lanjutan
	Terlaksananya kegiatan DQS
	Terlaksananya validasi data triwulan
	Terlaksananya pembinaan pada bidan kelurahan
	Terlaksananya imunisasi berbasis masyarakat
	Terlaksananya service dan spare part kulkas vaksin

17) Angka Kesakitan DBD

Capaian realisasi angka kesakitan DBD pada tahun 2019 jumlah penderita DBD sebesar 578 penderita terhadap jumlah penduduk Kota Cilegon sehingga persentasenya sebesar 132 per 100.000 penduduk dengan target sasaran 49/100.000 penduduk, maka capaian Kinerja adalah sebesar 49,00%. Data tersebut menunjukkan kasus DBD di Kota Cilegon masih cukup tinggi diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Terlaksananya Bongkar Muat Bahan insektisida dan larvasida program P2BB

Kegiatan	Output
	Terlaksananya Fogging
	Terlaksananya Sosialisasi Leptospirosis pada swasta
	Terlaksananya sosialisasi Leptospirosis pada kader
	terlaksananya kegiatan Gerakan Serentak PSN
	Terlaksananya belanja BBM Fogging
	Terlaksananya pertemuan koordinasi Gerakan Serentak PSN
	Terlaksananya supervisi Jumantik di sekolah
	Terlaksananya kegiatan pertemuan P2BB

18) Jamaah haji yang dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan

Capaian Realisasi Jamaah haji yang dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan pada tahun 2019 Jumlah Jamaah Haji yang dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sebesar 756 jemaah haji terhadap 788 jemaah haji sehingga persentasenya sebesar 95,94% dengan target sasaran 90%, maka capaian Kinerja adalah sebesar 106,60%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Kesehatan Haji	Terlaksananya pemeriksaan haji lanjutan
	Terlaksananya pembinaan di masa tunggu
	Terlaksananya pembinaan di masa keberangkatan
	Terlaksananya pengukuran kebugaran jemaah haji
	Terlaksananya senam berhaji sehat
	Terlaksananya entry siskohatkes
	Terlaksananya pembinaan kesehatan calon jemaah haji di KBIH
	Terlaksananya skrining istithaah jemaah haji
	Terlaksananya istithaah

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit terdapat realisasi yang belum mencapai 75 % adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian Kegiatan Surveillans sebesar 100 % dengan total anggaran Rp.142.675.000 terealisasi sebesar Rp.71.993.150 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 50,46%, dikarenakan kejadian KLB di Kota Cilegon sebanyak 2 kasus dari target 4 kasus.
- 2) Capaian Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular hipertensi sebesar 100 % dengan total anggaran Rp.60.000.000 terealisasi sebesar

Rp.40.200.000 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 67,00%, dikarenakan efisiensi anggaran.

- 3) Capaian Kegiatan Imunisasi sebesar 77,04% dengan total anggaran Rp.162.206.100 terealisasi sebesar Rp.117.550.000 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 72,47%, dikarenakan tidak ada kasus KIPI berat, yang terjadi kasus KIPI ringan sehingga ada penurunan level narasumber. Untuk kegiatan servis cold chain tidak dilaksanakan karena teknisi dari Dometic Jakarta tidak hadir.
- 4) Capaian Kegiatan Krisis Kesehatan Matra sebesar 83,33% dengan total anggaran Rp.20.650.000 terealisasi sebesar Rp.14.275.000 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 69,13%, dikarenakan kegiatan tersebut menyesuaikan kejadian bencana alam di Kota Cilegon.

A.3 Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Tabel 3.1.2c

Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan						23.474,20	19.898,96	84,77%
	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	%	95,00	94,17	99,13%			
	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Angka	8,00	8,00	100,00%			
	Persentase jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP (memenuhi standar yang berlaku)	%	77,82	93,19	119,75%			
	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	Angka	8,00	8,00	100,00%			
	Puskesmas dan Jaringan yang memenuhi persyaratan Permenkes No. 75 Tahun 2014	Puskesmas	8,00	9,00	112,50%			
	Terbangunnya bangunan kesehatan	Bangunan	1,00	1,00	100,00%			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang ditingkatkan sarana dan prasarana sesuai standar	Faskes	9,00	9,00	100,00%			
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	98	100	102,04%			
Peningkatan Kesehatan Dasar	Terlaksananya Pertemuan Perkesmas	Kegiatan	1	1	100,00%	118,81	115,01	96,81%
	Terlaksananya Monitoring Program Yandas	Kegiatan	8	8	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Terlaksananya Pembinaan FKTP Berprestasi	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Lomba FKTP Berprestasi	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Rakontek Quick Win Pelayanan Darah	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Sosialisasi Quick Win Pelayanan Darah	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Pertemuan Manajemen Puskesmas	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Pertemuan Rakor Yandas	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Pertemuan Laboratorium	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Pertemuan Kesehatan Gigi dan Mulut	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Validasi Data	Kegiatan	10	9	90,00%			
Sistem Registrasi Kematian	Terlaksananya Pelatihan SRS (Wawancara Kasus Kematian)	Kegiatan	1	1	100,00%	332,81	327,63	98,44%
	Terlaksananya wawancara kasus kematian	Kasus	546	546	100,00%			
	Terlaksananya monitoring CRVS	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Terlaksananya pertemuan sistem registrasi kematian	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Terlaksananya workshop lokakarya pengembangan CRVS	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya pertemuan validasi data	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya pelatihan tentang data Rs	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya pelatihan sertifikasi medis penyebab kematian	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Terlaksananya sosialisasi CRVS	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Terlaksananya Pelatihan GELS	Orang	8	8	100,00%	113,38	112,06	98,84%
Peningkatan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Pelatihan Emergensi Dasar	Orang	40	40	100,00%			
	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan RS (2 RS Swasta)	RS	2	2	100,00%			
	Terlaksananya Monev Sistem Rujukan (30 FKTP Swasta dan Pemerintah)	FKTP	30	30	100,00%			
	Terlaksananya Validasi Data Rujukan (FKTP Swasta dan Pemerintah)	Orang	40	40	100,00%			
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan DVI	Orang	120	120	100,00%	364,05	358,91	98,59%
	Terlaksananya pelatihan perawatan luka	Orang	36	36	100,00%			
Peningkatan Obat, bahan dan alkes habis pakai	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian	Orang	50	50	100,00%	1.519,17	1.435,13	94,47%
	Terlaksananya Keg.Sosialisasi, Advokasi & Implementasi Formularium Nasional dan DOEN	Orang	50	50	100,00%			
	Terlaksananya Keg.Pembekalan Pengelolaan Vaksin	Orang	60	60	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Terlaksananya Keg.Penggunaan Obat Rasional	Orang	60	60	100,00%			
	Terlaksananya Keg.Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	Orang	100	100	100,00%			
	Terlaksananya Pembekalan/Peningkatan Kapasitas Tenaga Kefarmasian	Orang	50	50	100,00%			
	Terlaksananya Peningkatan kemampuan SDM dalam Pengelolaan Alkes & PKRT	Orang	50	50	100,00%			
	Terlaksananya Rapat Perencanaan Tim Perencanaan Obat Terpadu (TPOT)	Orang	35	35	100,00%			
	Terlaksananya Rapat Evaluasi Tim Perencanaan Obat Terpadu (TPOT)	Orang	35	35	100,00%			
	Terlaksananya Pengadaan Obat dan BMHP	Tahun	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Pemusnahan Obat dan BMHP	Kegiatan	1	1	100,00%			
Penyusunan Dokumen Lingkungan UKL UPL Puskesmas	Tersedianya UKL UPL	dokumen	2	2	100,00%	100,00	96,02	96,02%
Pelayanan Kesehatan Tradisional	Terlaksananya Pertemuan Pengembangan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Fasyankes	Orang	24	24	100,00%	97,46	97,43	99,97%
	Terlaksananya Pertemuan Penyehat Tradisional	Orang	40	40	100,00%			
	Terlaksananya Orientasi kader kelompok Asman Toga dan Akupresur	Orang	95	95	100,00%			
	Terlaksananya Pembinaan Penyehat Tradisional	Tempat	8	8	100,00%			
	Terlaksananya Pembinaan kelompok Asman TOGA dan Akupresur	Kegiatan	4	4	100,00%			
	Terlaksananya monitoring program pelayanan kesehatan Tradisional Puskesmas	Puskesmas	8	8	100,00%			
	Terlaksananya Lomba Asman Toga dan Akupresur TK KOTA	Puskesmas	8	8	100,00%			
	Terlaksananya Lomba Asman TOGA dan Akupresur TK Provinsi	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Validasi Data Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	Kegiatan	2	3	150,00%			
Pengawasan Obat dan Makanan	Terlaksananya Sosialisasi POM	Orang	120	120	100,00%	274,45	271,16	98,80%
	Terlaksananya Sosialisasi Kemanan Pangan	Orang	60	60	100,00%			
	Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal	Orang	60	60	100,00%			
	Terlaksananya Penyuluhan Kemanan Pangan	Orang	150	150	100,00%			
	Terlaksananya Sosialisasi Pangan Jajanan Anak Sekolah	SD	18	18	100,00%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Terlaksananya Belanja Percontohan	Sampel	500	500	100,00%			
	Terlaksananya Pengawasan Obat, Makmin dan Kosmetik di Sarana Distribusi	Tempat	105	89	84,76%			
	Terlaksananya Pengawasan Sarana IRT-P	Tempat	15	42	280,00%			
Peningkatan Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan	Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan tenaga kesehatan	Orang	180	60	33,33%	193,89	99,84	51,49%
	Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan sarana kesehatan	Orang	180	60	33,33%			
	Terlaksananya monitoring tenaga dan sarana kesehatan	Lokasi	120	33	27,50%			
ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	Terlaksananya rakornis ASPAK	Orang	30	30	100,00%	100,00	96,73	96,73%
	Terlaksananya updating data ASPAK	Orang	20	20	100,00%			
Peningkatan Managemen Jaminan Kesehatan Nasional	Terlaksananya pertemuan JKN	Kegiatan	12	12	100,00%	130,66	124,05	94,94%
	Terlaksananya Rakoor JKN	Kegiatan	12	12	100,00%			
	Terlaksananya Monitoring JKN	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Jumlah kebijakan teknis pengembanaan pembiayaan kesehatan & JKN/KIS	SK	6	6	100,00%			
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi lanjutan pustu ciwaduk	Kegiatan	1	1	100,00%	1.319,49	1.263,49	95,76%
	Terlaksananya rehabilitasi poskesdes pabean	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya rehabilitasi poskesdes tegal bunder	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya rehabilitasi poskesdes Gerem	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya rehabilitasi poskesdes Taman Sari	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya rehabilitasi puskesmas Cibeber	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana PLGDT	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya pengadaan pagar dan teralis gudang farmasi kota cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%			
	DED rehabilitasi poskesdes pabean	Kegiatan	1	1	100,00%			
	DED rehabilitasi poskesdes tegal bunder	Kegiatan	1	1	100,00%			
	DED rehabilitasi poskesdes Gerem	Kegiatan	1	1	100,00%			
	DED pembangunan sarana dan prasaran puskesmas cilegon DTP	Kegiatan	1	1	100,00%			
	DED rehabilitasi poskesdes Taman Sari	Kegiatan	1	1	100,00%			
	DED rehabilitasi puskesmas Cibeber	Kegiatan	1	1	100,00%			
	DED pembangunan sarana dan prasaran puskesmas purwakarta	Kegiatan	1	1	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	DED pembangunan sarana dan prasarana PLGDT	Kegiatan	1	1	100,00%			
	DED pengadaan teralis dan pagar gudang farmasi kota cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Penyusunan DED rehabilitasi lanjutan Pustu Ciwaduk	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya rehabilitasi lanjutan Puskesmas Cibeber	Kegiatan	1	1	100,00%			
Pendataan Tenaga Kesehatan di Sarana Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tenaga Kesehatan	Orang	200	100	50,00%	92,08	60,55	65,76%
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor	Orang	60	30	50,00%			
	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Tenaga Kesehatan di Fasyankes	Sarana	150	150	100,00%			
BOK Distribusi Obat & E-logistik (DAK)	Terlaksananya Distribusi Obat dan Pemanfaatan Sistem E-Logistik	UPTD	8	8	100,00%	120,00	99,03	82,52%
Akreditasi Puskesmas (DAK)	Terlaksananya survey akreditasi puskesmas	Puskesmas	2	2	100,00%	774,48	736,08	95,04%
	Terlaksananya pendampingan pasca akreditasi	Puskesmas	8	8	100,00%			
	Terlaksananya Workshop Pemahaman standar dan instrumen Akreditasi	Kegiatan	2	2	100,00%			
Penyediaan Obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	Tahun	1	1	100,00%	3.069,64	3.034,61	98,86%
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Tersedianya sarana alat kesehatan di Puskesmas DTP Citangkil dan Puskesmas DTP Cilegon	kegiatan	1	1	100,00%	2.127,27	986,64	46,38%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas	Puskesmas	2	2	100,00%	3.200,00	2.410,25	75,32%
	Tersedianya dokumen pengawasan pembangunan sarana dan prasarana puskesmas	Dokumen	2	2	100,00%			
Lomba Tenaga Kesehatan Teladan	Terlaksananya Lomba Tenaga Kesehatan teladan	Kegiatan	1	1	100,00%	81,87	76,05	92,90%
	Terlaksananya Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan	Kegiatan	1	1	100,00%			
Kajian Pembiayaan Kesehatan Daerah/DHA	Terlaksananya kajian analisa DHA Kota Cilegon	kegiatan	1	1	100,00%	120,49	119,03	98,80%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DID)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas	Puskesmas	2	2	100,00%	5.208,00	4.234,37	81,31%
	Tersedianya Dokumen Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Dokumen	2	2	100,00%			
Pembangunan Puskesmas Jombang (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya pembangunan puskesmas jombang	unit bangunan	1	1	100,00%	4.000,00	3.728,69	93,22%
Pendamping Dana DAK Pengadaan alat Kesehatan	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan di Puskesmas DTP Cilegon	kegiatan	1	1	100,00%	16,21	16,20	99,99%
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (UPTD)						10.678,43	8.370,58	78,39%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat)								
Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Non-Kapitasi	Terlaksananya Kegiatan pelayanan kesehatan non kapitasi	Bulan	12	12	100,00%	1.269,09	689,23	54,31%
	Terlaksananya pelayanan kesehatan non kapitasi	Bulan	12	12	100,00%			
	Terlaksananya pelayanan kesehatan non kapitasi (Prolanis)	Bulan	12	12	100,00%			
	Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Bidan	Bulan	12	12	100,00%			
	Terlaksananya pertemuan Rapat Koordinasi kegiatan Non Kapitasi	Bulan	12	12	100,00%			
	Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Kegiatan Non Kapitasi (Prolanis)	Bulan	12	12	100,00%			
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Melalui BPJS Kesehatan (APBD II)	Terlaksananya penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBD II	bulan	12	12	100,00%	7.369,79	5.807,44	78,80%
Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Terlaksananya Kegiatan JPKM	Bulan	12	12	100,00%	39,55	35,95	90,90%
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Rapat Koordinasi Bendaharan JKN dengan BPJS	Bulan	12	12	100,00%			
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kegiatan JPKM dengan Unsur RT, RW dan Kader	Bulan	12	12	100,00%			
	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Kegiatan JPKM dengan UKM dan Nelayan	Bulan	12	12	100,00%			
	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Kegiatan JPKM	Bulan	12	12	100,00%			
	Terlaksananya Rapat JKN Kegiatan JPKM dengan OPD/Instansi terkait	Bulan	12	12	100,00%			
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Melalui BPJS Kesehatan (DID)	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Melalui BPJS yang Bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID)	bulan	12	12	100,00%	2.000,00	1.837,97	91,90%
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu)						1.292,70	1.194,38	92,39%
Pelayanan Ambulan Rujukan Gratis	Terlaksananya pelayanan ambulan rujukan gratis	bulan	12	12	100,00%	502,94	485,47	96,53%
Pelayanan Ambulan Jenazah	Terlaksananya Pelayanan Ambulan Jenazah	Bulan	12	12	100,00%	31,02	27,99	90,22%
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Terlaksananya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Kegiatan	12	12	100,00%	195,86	134,39	68,61%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Publik Sefty Center (PSC)	Terlaksananya Sosialisasi Publik Sefety Center (PSC)	Kegiatan	1	1	100,00%	22,84	22,21	97,27%
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terlaksanya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Bulan	12	12	100,00%	444,04	428,33	96,46%
Replikasi Program SIJARIEMAS	Tersedianya Aplikasi SIJARIEMAS	Aplikasi	1	1	100,00%	96,00	96,00	100,00%
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)						30,45	19,95	65,50%
Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Magang Petugas Laboratorium Kesehatan	Kegiatan	2	2	100,00%	30,45	19,95	65,50%
	Terlaksananya Rujukan Uji Silang sediaan BTA se Kota Cilegon	Triwulan	4	4	100,00%			
	Terlaksananya Pemeriksaan Scrining Kimia Kesehatan	Kegiatan	40	-	0,00%			
	Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Mutu	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Seminar Tentang Laboratorium Kesehatan	Kegiatan	1	-	0,00%			
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (UPTD Puskesmas Kecamatan Cilegon (Kapitasi))						966,00	909,06	94,11%
Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)	Tersedianya Jasa pelayanan kesehatan	Bulan	12	12	100,00%	966,00	909,06	94,11%
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (UPTD Puskesmas Kecamatan Ciwandan (Kapitasi))						1.500,00	1.467,73	97,85%
Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)	Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan	bulan	12	12	100,00%	1.500,00	1.467,73	97,85%
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (UPTD Puskesmas Kecamatan Cibeber (Kapitasi))						1.260,77	1.257,02	99,70%
Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)	Tersedianya Jasa pelayanan kesehatan	bulan	12	12	100,00%	1.260,77	1.257,02	99,70%
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (UPTD Puskesmas Kecamatan Grogol (Kapitasi))						720,00	694,57	96,47%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)	Tersedianya jasa pelayanan kesehatan	Bulan	12	12	100,00%	720,00	694,57	96,47%
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (UPTD Puskesmas Kecamatan Pulomerak (Kapitasi))						1.264,80	1.176,96	93,06%
Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)	Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan	Bulan	12	12	100,00%	1.264,80	1.176,96	93,06%
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (UPTD Puskesmas Kecamatan Purwakarta (Kapitasi))						799,67	783,38	97,96%
Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)	Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan	Bulan	12	12	100,00%	799,67	783,38	97,96%
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (UPTD Puskesmas Kecamatan Jombang (Kapitasi))						1.056,00	1.027,48	97,30%
Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)	Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan	Bulan	12	12	100,00%	1.056,00	1.027,48	97,30%
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (UPTD Puskesmas Kecamatan Citangkil 1 (Kapitasi))						1.405,92	1.306,28	92,91%
Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)	Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan	Bulan	12	12	100,00%	1.405,92	1.306,28	92,91%

Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan, pembinaan terhadap sarana kesehatan swasta, pengawasan terhadap obat, makanan dan minuman termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika yang beredar di masyarakat. Beberapa indikator yang mendukung keberhasilan program ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (%)

Capaian Realisasi Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2019 jumlah penduduk

yang memiliki jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat (KIS) sebesar 396.891 penduduk terhadap jumlah penduduk se kota cilegon sebesar 421.448 penduduk sehingga persentasenya sebanyak 94,17% dengan target sasaran 95% maka capaian kinerja adalah sebesar 99,13 %. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Peningkatan Managemen Jaminan Kesehatan Nasional	Terlaksananya pertemuan JKN
	Terlaksananya Rakoor JKN
	Terlaksananya Monitoring JKN
	Jumlah kebijakan teknis pengembanaan pembiayaan kesehatan & JKN/KIS
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Melalui BPJS Kesehatan (APBD II)	Terlaksananya penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBD II

2) Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Yang Tersertifikasi Akreditasi (Puskesmas)

Capaian Realisasi Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi pada tahun 2019 adalah sebanyak 100% dengan target sasaran 8 Puskesmas maka capaian kinerja adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Akreditasi Puskesmas (DAK)	Terlaksananya survey akreditasi puskesmas
	Terlaksananya pendampingan pasca akreditasi
	Terlaksananya Workshop Pemahaman standar dan instrumen Akreditasi

3) Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP (Memenuhi Standar Yang Berlaku).

Pada tahun 2019 Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP (Memenuhi Standar yang berlaku) sebesar 2.150 Tenaga kesehatan terhadap jumlah seluruh tenaga kesehatan 2.307 tenaga kesehatan sehingga persentasenya sebanyak 93,19% dengan target sasaran 78% maka capaian kinerja adalah sebesar 119,48%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

Kegiatan	Output
Peningkatan Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan	Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan tenaga kesehatan
	Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan sarana kesehatan
	Terlaksananya monitoring tenaga dan sarana kesehatan

4) Persentase ketersediaan obat dan vaksin (%)

Capaian Realisasi Persentase ketersediaan obat dan vaksin pada tahun 2019 adalah sebanyak 100% dengan target sasaran 98% maka capaian kinerja adalah sebesar 102,04%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Peningkatan Obat, bahan dan alkes habis pakai	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian
	Terlaksananya Keg.Sosialisasi, Advokasi & Implementasi Formularium Nasional dan DOEN
	Terlaksananya Keg. Pembekalan Pengelolaan Vaksin
Pendataan Tenaga Kesehatan di Sarana Kesehatan	Terlaksananya Keg. Penggunaan Obat Rasional
	Terlaksananya Keg. Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat
	Terlaksananya Pembekalan/Peningkatan Kapasitas Tenaga Kefarmasian
	Terlaksananya Peningkatan kemampuan SDM dalam Pengelolaan Alkes & PKRT
	Terlaksananya Rapat Perencanaan Tim Perencanaan Obat Terpadu (TPOT)
	Terlaksananya Rapat Evaluasi Tim Perencanaan Obat Terpadu (TPOT)
	Terlaksananya Pengadaan Obat dan BMHP
	Terlaksananya Pemusnahan Obat dan BMHP

5) Puskesmas dan Jaringannya yang memenuhi persyaratan Permenkes No. 75 Tahun 2014

Capaian Realisasi Puskesmas dan Jaringannya yang memenuhi persyaratan Permenkes No. 75 Tahun 2014 pada tahun 2019 adalah sebanyak 9 Puskesmas dengan target sasaran 8 Puskesmas maka capaian kinerja adalah sebesar 112,50%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	Terlaksananya rakornis ASPAK
	Terlaksananya updating data ASPAK
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Terlaksananya rehabilitasi lanjutan Pustu Ciwaduk
	Terlaksananya rehabilitasi poskesdes Pabean
	Terlaksananya rehabilitasi poskesdes Tegal Bunder
	Terlaksananya rehabilitasi poskesdes

Kegiatan	Output
	Gerem
	Terlaksananya rehabilitasi poskesdes Taman Sari
	Terlaksananya rehabilitasi puskesmas Cibeber
	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana PLGDT
	Terlaksananya pengadaan pagar dan teralis gudang farmasi kota Cilegon
	DED rehabilitasi poskesdes Pabean
	DED rehabilitasi poskesdes Tegal Bunder
	DED rehabilitasi poskesdes Gerem
	DED pembangunan sarana dan prasarana puskesmas Cilegon DTP
	DED rehabilitasi poskesdes Taman Sari
	DED rehabilitasi puskesmas Cibeber
	DED pembangunan sarana dan prasarana puskesmas purwakarta
	DED pembangunan sarana dan prasarana PLGDT
	DED pengadaan teralis dan pagar gudang farmasi kota Cilegon
	Penyusunan DED rehabilitasi lanjutan Pustu Ciwaduk
	Terlaksananya rehabilitasi lanjutan Puskesmas Cibeber

6) Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (puskesmas)

Capaian Realisasi Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan pada tahun 2019 adalah sebanyak 8 Puskesmas dengan target sasaran 8 Puskesmas maka capaian kinerja adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Peningkatan Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan	Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan tenaga kesehatan
	Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan sarana kesehatan
	Terlaksananya monitoring tenaga dan sarana kesehatan
Pendataan Tenaga Kesehatan di Sarana Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tenaga Kesehatan
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor
	Terlaksananya Kegiatan Pendataan

Kegiatan	Output
	Tenaga Kesehatan di Fasyankes

7) Terbangunnya bangunan kesehatan

Capaian Realisasi Terbangunnya bangunan kesehatan pada tahun 2019 adalah sebanyak 1 Bangunan dengan target sasaran 1 Bangunan maka capaian kinerja adalah sebesar 100 %. Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Pembangunan Puskesmas Jombang (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya pembangunan puskesmas jombang

8) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang ditingkatkan sarana dan prasarana sesuai standar

Capaian Realisasi Jumlah Fasilitas Kesehatan yang ditingkatkan sarana dan prasarana sesuai standart pada tahun 2019 adalah sebanyak 9 Faskes dengan target sasaran 9 Faskes maka capaian kinerja adalah sebesar 100 %. Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Terlaksananya rehabilitasi lanjutan pustu Ciwaduk
	Terlaksananya rehabilitasi poskesdes Pabean
	Terlaksananya rehabilitasi poskesdes Tegal Bunder
Pendataan Tenaga Kesehatan di Sarana Kesehatan	Terlaksananya rehabilitasi poskesdes Gerem
	Terlaksananya rehabilitasi poskesdes Taman Sari
	Terlaksananya rehabilitasi puskesmas Cibeber
	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana PLGDT
	Terlaksananya pengadaan pagar dan teralis gudang farmasi kota Cilegon
	DED rehabilitasi poskesdes Pabean
	DED rehabilitasi poskesdes Tegal Bunder
	DED rehabilitasi poskesdes Gerem
	DED pembangunan sarana dan prasaran puskesmas Cilegon DTP
	DED rehabilitasi poskesdes Taman Sari
	DED rehabilitasi puskesmas Cibeber
	DED pembangunan sarana dan prasaran puskesmas Purwakarta
	DED pembangunan sarana dan prasarana PLGDT

Kegiatan	Output
	DED pengadaan teralis dan pagar gudang farmasi kota Cilegon
	Penyusunan DED rehabilitasi lanjutan Pustu Ciwaduk
	Terlaksananya rehabilitasi lanjutan Puskesmas Cibeber

PRIORITAS DAERAH

Kegiatan yang masuk dalam prioritas daerah pada tahun anggaran 2019 adalah

1. Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas DTP Cilegon anggaran Rp 525.362.000,- realisasi Rp.495.209.000,-
2. Pembangunan Pagar Puskesmas DTP Cilegon anggaran Rp. 924.000.000,- realisasi Rp.575.999.400,-
3. Urukan dan jalan Puskesmas DTP Cilegon anggaran Rp 1.710.000.000,- realisasi Rp.1.438.805.000
4. Pembangunan drainase dan resapan air Puskesmas DTP Cilegon anggaran Rp 700.000.000,- realisasi Rp 508.810.000,-
5. Penyusunan DED pembangunan Puskesmas Cilegon DTP anggaran Rp. 79.600.000,- realisasi Rp 73.830.000,-
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Citangkil II) Rp. 3.200.000.000,- realisasi Rp 2.420.247.200,-

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdapat realisasi yang belum mencapai 75% dapat adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian Kegiatan Peningkatan Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan sebesar 33,33% dengan Total Anggaran Rp.193.893.000 terealisasi sebesar Rp.99.837.000 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 51,49%, dikarenakan tidak adanya Permenkes yang terbaru untuk di sosialisasikan.
- 2) Capaian Kegiatan Pendataan Tenaga Kesehatan di Sarana Kesehatan sebesar 50,00% dengan Total Anggaran Rp. 92.084.000 terealisasi sebesar Rp. 60.554.000 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 65,76%, dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersamaan di kegiatan Peningkatan Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan, sehingga adanya efisiensi anggaran.
- 3) Capaian Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) sebesar 100 % dengan Total Anggaran Rp.2.127.265.000 terealisasi sebesar Rp. 986.635.981 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 46,38 %, dikarenakan Pagu Anggaran Rp. 2.127.265.000 adalah pagu usulan Krisna, padahal pagu final sesuai dengan Berita Acara dari Kementerian Kesehatan dengan adalah: Rp. 999.300.000.

- 4) Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi di UPTD JPKM sebesar 100% dengan Total Anggaran Rp.1.269.091.840 terealisasi sebesar Rp. 689.234.840 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 54,31%, dikarenakan adanya keterlambatan berita acara dari BPJS Kesehatan sehingga JPKM tidak bisa mencairkan anggaran untuk Puskesmas dan ada beberapa Puskesmas yang tidak mengklaim kegiatan Prolanis.
- 5) Capaian Kegiatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di UPTD P2KT sebesar 100% dengan total anggaran Rp.195.863.000 terealisasi sebesar Rp.134.385.000 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 68,61%, dikarenakan kegiatan/Event tahun 2019 tidak sebanyak Tahun sebelumnya.

Capaian Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah di UPTD Labkesda sebesar 100 % dengan Total Anggaran Rp.30.450.000 terealisasi sebesar Rp.19.945.000 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 65,50%, dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Pemeriksaan Skrining Kimia Kesehatan karena alatnya belum ada.

A.4 Program Peningkatan Pelayanan RSUD (RSUD)

Tabel 3.1.2d
Program Peningkatan Pelayanan RSUD (RSUD) Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan RSUD						32.282,65	30.181,12	93,49%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pasien RSUD	point	>80	71,86	89,83%			
	meningkatnya pelayanan yang efektif kepada seluruh pengunjung /pasien rawat inap dan rawat jalan	%	80	74,21	92,76%			
	presentase pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan alat keperawatan	%	80	60,00	75,00%			
Aplikasi Radiologi Information System (RIS) dan PACS (Picture Archiving and Communication System)	Tersedianya aplikasi Radiologi Information System (RIS) dan PACS (Picture Archiving and Communication System)	unit	2	2	95,93%	3.841,82	3.493,45	90,93%
Pendamping DAK Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rujukan	Terlaksananya pendamping kegiatan pengadaan Alat Kesehatan Rujukan DAK	kegiatan	21	21	100,00%	67,19	64,88	96,56%
Pengadaan Alat Kesehatan	Tersedianya alat kesehatan	Unit	10	10	100,00%	3.000,00	2.887,96	96,27%
Pembangunan Gedung Central Jantung (DID)	Terbangunnya Gedung Central Jantung	unit	1	1	83,95%	2.730,00	2.291,84	83,95%
Pengadaan Alat Kesehatan Rujukan (DAK)	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan dan kedokteran	jenis	20	20	100,00%	19.100,13	18.193,34	95,25%
Pengadaan Obat, Bahan alat habis pakai & alat bahan Habis Pakai Reagen	Terpenuhinya Kebutuhan Obat dan Bahan Alat Habis Pakai Rumah Sakit	Paket	2	2	93,46%	3.000,00	2.803,87	93,46%
Penggantian Pengolahan Darah	Terlaksananya Penggantian Biaya Darah	%	100	84	83,75%	500,00	418,76	83,75%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pendampingan DID Pembangunan Gedung Central Jantung	Terlaksananya Pengadaan Nourse Station (Meja Resepsionis)	Kegiatan	1	1	62,13%	43,50	27,03	62,13%
Program Peningkatan Pelayanan RSUD						79.122,11	74.074,09	93,62%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pasien RSUD	point	>80	71,86	89,83%			
	meningkatnya pelayanan yang efektif kepada seluruh pengunjung /pasien rawat inap dan rawat jalan	%	80	74,21	92,76%			
	presentase pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan alat keperawatan	%	80	60,00	75,00%			
Pelayanan Dan pendukung pelayanan RSUD	Terlaksananya kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan RSUD	subkeg	18	18	98,67%	79.122,11	74.074,09	93,62%

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok “melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD selalu di lakukan evaluasi guna untuk menjaga agar selalu konsisten tetap untuk menjalankan misinya sebagai institusi pelayanan sosial, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat banyak dan harus selalu memperhatikan etika pelayanan.

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja pada Program Peningkatan Pelayanan RSUD, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pasien RSUD

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pasien RSUD mempunyai tujuan secara umum adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di RSUD Kota Cilegon, menilai masing-masing unsur kepuasan pelayanan pada setiap tempat pelayanan, dan mengidentifikasi unsur pelayanan yang perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Komposisi Survey Kepuasan Masyarakat di setiap poli didalam RSUD Kota Cilegon.

SPELIALISASI LAYANAN	SKM	SPELIALISASI LAYANAN	SKM
Poli Spesialis Anak	74,90	ICU/ Patologi/ Operasi- Radiologi-Inap	70,48
Poli Spesialis Kulit & Kelamin	73,60	PKBRS	70,12
Poli Gizi	72,29	Poli Spesialis Mata	70,01
Poli Hemodialisa	71,94	Poli Spesialis Jantung	69,88

SPEKIALISASI LAYANAN	SKM	SPEKIALISASI LAYANAN	SKM
Poli Gigi	71,75	Poli Spesialis Kebidanan	69,85
Poli Umum	71,00	Poli Orthopedi	69,64
Poli Spesialis Rehabilitasi Medik	70,86	Poli Paru	69,57
Poli Diabetes Melitus	70,81	Instalasi Gawat Darurat	69,57
Poli Spesialis THT	70,73	Poli Spesialis Penyakit Dalam/ Interna	68,96
RSUD	70,66	Poli Spesialis Bedah Umum	68,93
Poli Spesialis Jiwa/ Psikiatri	70,52	Poli Spesialis Syaraf	68,81

Tabel Komposisi Survey Kepuasan Masyarakat

Berikut adalah Tabel Jumlah Sampel pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pasien RSUD Kota Cilegon.

No	Jumlah Sampel	Pencapaian Tertinggi	Pencapaian Terendah	Rata-Rata
1	100	74,90%	68,81%	71,86%

Pencapaian tertinggi sebesar 74,90%, pencapaian terendah sebesar 68,81% dengan rata-rata sebesar 71,86%. Dari target sebesar 80% sehingga capaian target sebesar 89,83%. Hal ini disebabkan karena sarana dan pra sarana yang kurang memadai, kepastian jadwal dokter yang masih belum sesuai serta kebersihan yang kurang terjaga.

2. *Meningkatnya Pelayanan Yang Efektif Kepada Seluruh Pengunjung/ Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan*

Pada indikator ini seluruh pengunjung/Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan yang mendapatkan pelayanan harus sesuai Standar Pelayanan Operasional (SPO). Tahun 2017 RSUD Kota Cilegon telah mendapatkan **sertifikat akreditasi paripurna** dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dilanjutkan tahun 2018 RSUD Kota Cilegon dilakukan kembali survey verifikasi ke 1 (satu) dan pada tahun 2019 dilakukan kembali survey verifikasi ke 2 (dua) yang bertujuan untuk evaluasi rekomendasi penilaian akreditasi. Adapun capaian indikator Meningkatkan Pelayanan Yang Efektif Kepada Seluruh Pengunjung/Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan, dari target 80% dapat direalisasikan 74,21% sehingga capaian kinerjanya sebesar 92,76%

3. *Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan dan Alat Keperawatan*

Tiga yang harus dikerjakan secara simultan dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan keperawatan yaitu :

- Pemenuhan kebutuhan akan penggantian alat lama yang sudah tidak bisa dipakai baik karena rusak maupun karena perubahan regulasi dan atau perkembangan teknologi kedokteran;
- Pemenuhan kebutuhan peralatan baru untuk melengkapi peralatan pada jenis pelayanan lama yang sudah ada, misalnya karena perkembangan regulasi atau tuntutan akreditasi;
- Pemenuhan kebutuhan peralatan baru dalam upaya menambah jenis pelayanan baru.

Adapun capaian indikator Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan dan Alat Keperawatan, dari target 80% dapat direalisasikan 60% hal ini disebabkan karena diperlukannya alat kesehatan dan keperawatan yang baru mengingat bertambahnya jenis pelayanan baru dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan seperti Pelayanan Hemodialisa, Patologi Anatomi dan Urologi, serta umur alat kesehatan dan keperawatan yang waktunya harus diganti.

Kegiatan pada program Program Peningkatan Pelayanan RSUD yang pencapaian kinerjanya dibawah 75 % adalah:

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor** dengan realisasi anggaran sebesar 51,59% hal ini dikarenakan ada 2 output kegiatan yang waktu pelelangan tidak mencukupi untuk dilaksanakan proses tender atau gagal lelang yaitu rehab ruang tunggu ICU dan rehab lantai koridor.
- Kegiatan Pendampingan DID Pembangunan Gedung Central Jantung** dengan realisasi anggaran sebesar 62,13% dikarenakan Kegiatan Pendampingan DID Pembangunan Gedung Central Jantung, pada belanja Bak Mandi Granit sudah dilakukan proses pengadaan, namun karena keterbatasan waktu sehingga pihak ketiga tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

A.5 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Kesehatan dan RSUD)

Tabel 3.1.2d Program Dukungan Layanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019
(Dinas Kesehatan dan RSUD)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS KESEHATAN)						16.098,73	12.901,45	80,14%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100,00	100,00	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100,00	80,00	80,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100,00	99,79	99,79%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100,00	85,85	85,85%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Cilegon)						177,86	145,97	82,07%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Ciwandan)						323,90	278,54	85,99%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Cibeber)						190,77	164,43	86,19%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Grogol)						129,16	107,25	83,03%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Pulomerak)						255,29	237,56	93,05%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Purwakarta)						239,85	211,03	87,98%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Jombang)						94,68	92,82	98,03%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Citangkil 1)						161,50	147,91	91,58%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPT Kesehatan P2KP)						14,27	14,27	100,00%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat)						70,60	56,40	79,88%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu)						99,27	73,80	74,34%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)						70,35	65,60	93,25%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Cilegon (Kapitasi))						414,00	284,07	68,62%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Ciwandan (Kapitasi))						642,85	605,28	94,16%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Cibeber (Kapitasi))						540,33	524,12	97,00%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Grogol (Kapitasi))						308,57	283,99	92,03%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Pulomerak (Kapitasi))						542,00	530,13	97,81%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Purwakarta (Kapitasi))						342,70	334,80	97,69%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Jombang (Kapitasi))						453,00	326,04	71,97%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas Kecamatan Citangkil 1 (Kapitasi))						602,50	560,53	93,03%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Puskesmas DTP Kecamatan Citangkil 2)						74,97	21,77	29,03%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (RSUD)						1.781,20	1.354,08	76,02%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	100	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	100	100,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	93	93,00%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	87	87,00%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

- 1) Belum optimalnya Sistem Informasi Kesehatan (SIK), dikarenakan masih belum maksimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait, diantaranya

afiliasi data kesehatan unit pelayanan kesehatan swasta, dan juga instansi vertikal lainnya.

- 2) Belum optimal penerapan Jampersal. Karena dengan UHC Kota Cilegon yang sudah mencapai 94,17% sehingga penjaminan biaya persalinan sebagian besar sudah terpenuhi oleh BPJS Kesehatan. Selain daripada itu masih ada komponen dari dana jampersal yang tidak direalisasikan, belum semua faskes dan BPM bekerjasama dengan Dinas Kesehatan berkaitan dengan jampersal, serta masih terkendala dengan juknis jampersal yang membatasi waktu penjaminan untuk pemanfaatan ibu dan bayi.
- 3) Masih rendahnya angka ketercapaian pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar karena kesadaran masyarakat masih kurang untuk melakukan kunjungan pemeriksaan kesehatan di posbindu, serta belum tercukupinya rasio kebutuhan jumlah Posbindu dengan kelompok masyarakat sasaran yaitu 1: 512 dari seharusnya 1:100. Selain itu kendala lain adalah karena pengumpulan data pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun dari faskes swasta belum optimal.
- 4) Masih perlunya peningkatan atau pemenuhan alat kesehatan dan keperawatan untuk pelayanan rumah sakit.
- 5) Menurunnya pendapatan rumah sakit akibat belum terevisinya tarif rumah sakit dan Pembentukan unit case manager.
- 6) Belum terwujudnya pelayanan dan manajemen rumah sakit yang efisien, cepat, mudah, akurat, aman, terpadu dan akuntabel;

B.2 Solusi

- 1) Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan akan menjadi prioritas kegiatan ditahun berikutnya sehingga koordinasi akan ditingkatkan dengan stakeholder terkait
- 2) Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dan memperluas kerjasama dengan Fasyankes di Kota Cilegon
- 3) Meningkatkan edukasi dan promosi pelayanan Posbindu, penambahan Posbindu sesuai jumlah rasio ideal dan koordinasi data dengan fasyankes
- 4) Pemenuhan alat kesehatan dan keperawatan yang baru, mengingat bertambahnya jenis pelayanan baru dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan seperti Pelayanan Hemodialisa, Patologi Anatomi dan Urologi, serta yang sudah tidak bisa dipakai baik karena rusak atau umur alat kesehatan dan keperawatan yang waktunya harus diganti diharapkan dapat meningkatkan kecepatan layanan rumah sakit dan meningkatkan mutu pelayanan.
- 5) Meningkatkan pendapatan rumah sakit melalui:
 - a. Penyesuaian tarif Rumah Sakit;



- b. Pembentukan unit case manager bertujuan untuk percepatan klaim agar tepat waktu.
- 6) Mewujudkan pelayanan yang lebih baik di RSUD, langkah yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan sistem pelayanan rumah sakit berbasis teknologi informasi secara terintegrasi melalui:
 - a. *Program Smart Hospital* yaitu implementasi kegiatan *Hospital Information System* (HIS), *Laboratory Information System* (LIS), *Radiology Information System* (RIS), Sistem Elektronik Registrasi Mandiri (SIREMAN), dan Sistem Aset Manajemen Rumah Sakit (SAMRS)
 - b. BerGas (berbenah dengan gegas) yaitu implementasi Kegiatan Pembangunan Sentral Gas Medis, Pembangunan Gedung 5 (lima) Lantai, Pembangunan Gedung Gizi, Pembangunan Gedung Laundry, Pembangunan Gedung IPRS, Pembangunan Gedung Rawat Jiwa, Pembangunan IPAL dan TPS B3, Pembangunan Gudang Logistik dan *Warehouse*, Gedung Sanitasi K3, serta Pengembangan Gedung Rawat Inap;
 - c. Pemenuhan SDM melalui perekrutan pegawai terutama di Pelayanan Sentral Jantung, dan Haemodialisa (dokter spesialis jantung minimal 2 (dua) orang, perawat, radiografer, kesehatan kerja, teknik elektromedis), Apotheker, dokter spesialis forensik, serta dokter spesialis bedah mulut.

3.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase Dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Tabel 3.1.3a

Target dan Realisasi Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase Dan Pengelolaan Sumber Daya Air						33.296,92	23.687,65	71,14%
	Persentase luasan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	%	94,57	78,51	83,02%			
	Persentase saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	76,24	71,09	93,25%			
	Persentase peningkatan panjang saluran/drainase perkotaan (tahun dasar : 2016)	%	3,00	2,30	76,67%			
Pengendalian Banjir dan Genangan (Prioritas Daerah)	Terlaksanannya kegiatan Pengendalian banjir	lokasi	5	-	0,00%	400,00	0,00	0,00%
Pemeliharaan Saluran/Drainase	Panjang saluran yg dipelihara	km / lokasi	2/22	8,4/39	420,00%	2.500,00	2.117,92	84,72%
Normalisasi Saluran/Drainase	Jumlah saluran /drainase yg dinormalisasi	lokasi	17	17	100,00%	4.500,00	4.177,80	92,84%
Perencanaan Teknis Bidang Sumber Daya Air	Jumlah dokumen	dok	15	15	100,00%	1.777,00	1.625,24	91,46%
Pembangunan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi	Jumlah lokasi pemb sal/drainase	lokasi	10	10	100,00%	6.149,92	4.282,08	69,63%
Peningkatan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi	Jumlah lokasi peningk saluran	lokasi	22	22	100,00%	4.544,27	3.950,49	86,93%
Pembangunan Tandon	Jumlah lokasi tandon	lokasi	3	3	100,00%	5.200,00	1.678,92	32,29%
Pengadaan Lahan Tandon	Jumlah lokasi lahan tandon	lokasi	3	3	100,00%	6.825,73	5.488,00	80,40%
Perencanaan Teknis (DED) Revitalisasi Situ Rawa Arum (Prioritas Daerah)	Jumlah dokumen	dok	1	1	100,00%	400,00	358,21	89,55%
Revitalisasi Situ Rawa Arum (Prioritas Daerah)	Luas situ yg direvitalisasi	m2	83.038	40.000	48,17%	1.000,00	9,00	0,90%

Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase, dan Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki tiga indikator, yaitu:

1. Persentase luasan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 2 jam),
2. Persentase saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik, dan
3. Persentase kolam retensi/tandon dan sumur resapan dalam kondisi baik.

Indikator persentase luasan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dari target RPJMD sebesar 94,57% dapat direalisasikan sebesar 78,51% atau capaiannya sebesar 83,02%. Capaian ini merupakan hasil dari penanganan banjir yang telah dilakukan pada areal seluas 19 Ha. Dari total luas genangan banjir 24,2 ha maka tersisa sebanyak 5,2 Ha yang masih dinyatakan sebagai luasan yang masih tergenang.

Indikator persentase saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik, dari target 76,24% dapat direalisasikan 71,09% atau capaiannya adalah 93,25% Capaian ini merupakan hasil dari kegiatan:

1. Pembangunan Saluran/Drainase dan jaringan irigasi sepanjang 2013,94 m'.
2. Peningkatan Saluran/Drainase dan jaringan irigasi sepanjang 2610,97 m'.
3. Normalisasi Saluran sepanjang 1657 m'.

Jumlah panjang saluran/drainase yang ditangani melalui ketiga kegiatan tersebut adalah 5,87 km. Pada tahun 2018 panjang saluran/drainase dalam kondisi baik adalah 118,54 km, sehingga total saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik pada akhir tahun 2019 adalah mencapai 124,82 km atau mencapai 71,09% dari total panjang saluran/drainase 175,59 km.

Target indikator persentase peningkatan panjang saluran/drainase pada tahun 2019 adalah sebesar 3,00%. Total peningkatan saluran/drainase sampai dengan tahun ini adalah 4,03 km atau 2,30% dari panjang total saluran/drainase 175,59 km.

Rencana tandon / kolam retensi yang akan dibangun berjumlah 3, yaitu: (1) Tandon Cibuntu, (2) Tandon Sukmajaya 2, (3) Tandon Bulakan. Pada tahun anggaran 2019 direncanakan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah untuk jalan akses Tandon Bulakan. Pada tahun anggaran 2019 ini pengadaan tanah untuk jalan akses Tandon Bulakan merupakan sisa kegiatan yang belum diselesaikan di tahun 2016. Dari ketiga tandon tersebut yang dapat terlaksana pada tahun 2019 ini adalah Tandon Bulakan, Tandon Sukmajaya 2, dan Cibuntu sehingga realisasi tahun 2019 ini adalah 3 dari 3 tandon atau 100%.

Kegiatan Pengendalian Banjir dan Genangan (Prioritas Daerah) tidak ada realisasi disebabkan pada tahun 2019 tidak terjadi banjir dan genangan yang masif, sehingga masih dapat tertangani oleh kegiatan Pemeliharaan Saluran/Drainase. Anggaran kegiatan pengendalian banjir dan genangan (prioritas daerah) bersifat dana taktis untuk penanggulangan banjir dan genangan.

Kegiatan Pembangunan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi di dalamnya terdapat pembayaran pengadaan tanah untuk jalan akses Tandon Bulakan, dari anggaran sebesar Rp 6.825.726.584,- dapat terealisasi sebesar Rp 5.464.141.000,-

Tabel.3.1.3a.1

Data Dasar Lokasi Banjir dan Genangan Kota Cilegon

No.	Lokasi (Kec.)	Titik Banjir	Luas Genangan (Ha)
I	Jombang	1. Seneja (Sal. Mitsubishi)	3
		2. Perum Bumi Panggung Rawi (BPI) 1	2
		3. Perum Bumi Panggung Rawi (BPI)	2
		4. Kp. Kranggot	4
		5. Perumahan Metro Cilegon	0.2
		6. Perumahan Taman Raya	0.1
		7. Belakang Mall Mayofield	3
		8. Masigit/SDN Masigit I, Kenanga	0.1
		9. Depan Kelurahan Masigit	2
		10. Perum PGRI	0.1
		11. Lingk. Sawah Besar	0.1
		12. Lingk. Rokal	0.1
		13. Lingk. Nyi Kambang	0.3
		14. Lingk. Cigiceh (Pabrik Tahu Tempe)	0.1
		15. Lingk. Samandaran Kel. PG. Rawi	0.3
II	Citangkil	16. Makam Balung Di Bagian Hulu	1
		17. Ramanuju Citangkil-Purwakarta	0.5
		18. Kubang Welut	2
		19. Lingk. Ciri	1
		20. Lingk. Ramanuju Baru (RGM)	0.1
III	Pulomerak	21. Lingk. Gamblang, Mekarsari	0.1
		22. Belakang Pasar, Tamansari	0.1
		23. Lingkungan Tamansari/Sudimampir	1.5
		24. Lingk. Temposo Lebak Gede	0.5
		25. Lingk. Kec. Pulomerak Lebak Gede	0.2
		26. Lingk. Batu Bolong	0.1
		27. Lingk. Langon sari Kali Medaksa	0.1
		28. Lingk. Sawah Kel. Tamansari	2
IV	Cilegon	29. Arjuna bagian hilir	0.2
		30. Pasar Kelapa Kapling Blok F (saluran jalan)	0.2
		31. Lingk. Palas (Saluran Purbaya) Kel. Bendungan	0.1
		32. RBK	1
V	Purwakarta	33. Kp. Penyairan, Kotabumi (hulu)	1
		34. Kp. Penyairan, Kotabumi (hilir)	0.1
		35. Kp. Dukuh Malang, Kel. Pabean	0.1
		36. Jl. Pasar baru Link. Kubang Welingi Kel. Purwakarta	0.5
		37. Perum Golf Asri Kel. Kebon Dalem	1.5
		38. Terowongan Tol Leweung Sawo	0.2
		39. Lingk. Belakang SDN Kenanga	0.3

No.	Lokasi (Kec.)	Titik Banjir	Luas Genangan (Ha)
		40. Lingk. Kaligandu	0.1
VI	Grogol	41. Perum. Arga Baja, Kel. Kotasari	0.5
		42. Perum. Arga Baja II, Kel. Kotasari	0.5
		43. Lingk. Ciore Waseh, Kel. Kota Sari di depan gerbang Tol Cilegon Barat	0.5
		44. Lingk. Ciore Kwista, Kel. Kota Sari Kec. Grogol	0.3
		45. Lingk. Keserangan, belakang kantor Samsat Rawa Arum	0.2
VII	Ciwandan	46. Lingk. Kebanjiran	1
		47. Tegal Ratu (Lingk. Dpn Kantor Kel)	3
		48. Simpul JLS dengan Jalan Negara, Ciwandan	3
		49. Lingk. Tegal Buntu	2
		50. Randakari (Kali Bapang)	3
		51. Lingk. Depan Korindo	0.5
		52. Lingk. Kel. Kepuh	0.5
VIII	Cibeber	53. Lingk. Cibeber Kulon	1
		54. Seruni, Kel. Kedaleman	0.1
		55. Lingk. Depan dan Belakang Polsek Cibeber	3
		56. Lingk. Ciberko	0.2
		57. Lingk. Pesantren Cibeber	0.2
		58. Perum Gedong Damai (Kel. Kalitimbang)	0.5
Total Luas Banjir Genangan			51,9

Salah satu upaya dalam penanggulangan banjir di Kota Cilegon adalah membuat kolam retensi/tandon di daerah hulu dan tengah sungai yang menimbulkan banjir. Adapun lokasi penanganan beserta luas genangan pada TA 2019 sebagai berikut:

Tabel.3.1.3a.2

Lokasi dan Luas Penanganan Genangan Banjir

No.	Lokasi	Luas (Ha)
1	Lingk. Kranggot	4
2	Lingk. Belakang Taman Sari	0.1
3	Lingk. Keserangan Belakang Samsat	0.2
4	Lingk. Cilurah - JLS	0.5
5	Lingk. Perum Taman Raya	0.1
6	Lingk. Depan Korindo	0.5
Total Luas		5,4

Kegiatan Pengendalian Banjir dan Genangan (Prioritas Daerah) tidak ada realisasi disebabkan pada tahun 2019 tidak terjadi banjir dan genangan yang masif, sehingga masih dapat tertangani oleh kegiatan Pemeliharaan Saluran/Drainase. Anggaran kegiatan pengendalian banjir dan genangan (prioritas daerah) bersifat dana taktis untuk penanggulangan banjir dan genangan.

Kegiatan Pembangunan Saluran/Drainase sudah terealisasi fisiknya sebesar 100%, namun realisasi anggaran hanya mencapai 69,63% dikarenakan terlambatnya proses administrasi pembayaran sehingga tidak dapat dibayarkan pada Tahun 2019 (Luncuran Pembayaran Tahun Anggaran 2020). Hal tersebut juga terjadi pada pembangunan tandon dimana realisasi anggarannya hanya sebesar 32,29%.

Pada Kegiatan Revitalisasi Situ Rawa Arum yang sudah terealisasi fisiknya sebesar 48,17% juga mengalami keterlambatan pembayaran sehingga pada Tahun 2019 realisasi anggarannya hanya sebesar 0,9%. Adapun beberapa hal yang menyebabkan terlambatnya proses keterlambatan pembayaran antara lain: (1) Faktor dari pihak pelaksana/ kontraktor yang lama dalam proses pengajuan pembayaran, sementara pekerjaan fisik di lapangan sudah selesai dikerjakan sebelum kontrak berakhir; (2) Faktor eksternal yang bersamaan dengan bidang lain saat melakukan permohonan pembayaran; (3) Terganggunya sistem jaringan komputer saat penginputan tagihan pembayaran pada SIMRAL.

Kegiatan Pemeliharaan Saluran/Drainase sifatnya swakelola dimana anggaran pada DPA berupa belanja jasa/upah tenaga kerja dan belanja bahan bahan/material dimana realisasi kinerja mencapai 8,4 km (39 lokasi) melebihi target sebesar 2 km (22 lokasi) dengan capaian kinerja sebesar 420%. Adapun titik lokasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan saluran/drainase sebagai berikut :

Tabel.3.1. 3a.3
Lokasi kegiatan pemeliharaan saluran/drainase

No	Lokasi Pekerjaan	Kelurahan/Kecamatan	Volume (m')	
1.	Kali Cibeber, Link. Ciberko	Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber	Penanganan	480,50
			Pasangan	-
2.	Saluran Sekunder Cibeber Kulon (Samping SDN Cibeber)	Kel. Cibeber/Kec. Cibeber	Penanganan	247,60
			Pasangan	-
3.	Saluran Sekunder Cibeber Kulon (Samping Eks. Puskesmas Cibeber)	Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber	Penanganan	271,00
			Pasangan	-
4.	Saluran Sekunder Seneja (Belakang Pasar Kranggut)	Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber	Penanganan	271,00
			Pasangan	-
5.	Sungai Grogol (Jembatan Komp. Puri Krakatau Hijau s.d. Jembatan Jl. Nasional)	Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber	Penanganan	307,97
			Pasangan	-
6.	Sungai Kedung Ingas (Link. Kenanga s.d. Pintu Air)	Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber	Penanganan	212,00
			Pasangan	-
7.		Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber	Penanganan	335,00



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

No	Lokasi Pekerjaan	Kelurahan/Kecamatan	Volume (m')	
	Saluran Tersier Cibeber Gede, Link. Cibeber Gede		Pasangan	-
8.	Saluran Karang Tengah Cibeber (Samping GOR Galaxy, Perum TCI)	Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber	Penanganan	209,00
			Pasangan	-
9.	Saluran Sekunder Kranggut	Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber	Penanganan	376,00
			Pasangan	-
10.	Sungai Cibeber Wetan, Samping Sarana Teknik	Kel. Kalitimbang/Kec. Cibeber	Penanganan	185,35
			Pasangan	-
11.	Saluran Sekunder Ramanuju/Sumampir Samping DPRD s.d. Belakang POLRES	Kel. Ramanuju/Kec. Purwakarta	Penanganan	419,00
			Pasangan	-
12.	Sungai Cijalumpang Jl. Negara Samping RM. Laguna dan Bank BRI	Kel. Kedaleman/Kec. Cibeber	Penanganan	156,00
			Pasangan	-
13.	Sungai Cibeber Depan Perum Praja Mandiri	Kel. Cibeber/Kec. Cibeber	Penanganan	300,00
			Pasangan	-
14.	Sungai Cibeber Wetan Samping Sarana Teknik	Kel. Cibeber/Kec. Cibeber	Penanganan	185,35
			Pasangan	-
15.	Saluran Sekunder Kubang Laban, belakang GOR Jombang Al-Ishlah	Kel. Jombang/Kec. Jombang	Penanganan	215,00
			Pasangan	-
16.	Lanjutan Saluran Sekunder Kubang Laban, belakang GOR Jombang, Al-Ishlah	Kel. Jombang/Kec. Jombang	Penanganan	210,00
			Pasangan	-
17.	Saluran Tersier belakang Perum BPI Panggung Rawi	Kel. Panggung Rawi/Kec. Jombang	Penanganan	272,70
			Pasangan	-
18.	Sungai Kedung Ingas samping RSUD Panggung Rawi	Kel. Panggung Rawi/Kec. Jombang	Penanganan	263,50
			Pasangan	-
19.	Saluran Purbaya II Link. Palas	Kel. Bendungan/Kec. Cilegon	Penanganan	489,30
			Pasangan	-
20.	Sungai Pabean Link. Kaligandu	Kel. Purwakarta/Kec. Purwakarta	Penanganan	236,80
			Pasangan	-
21.	Saluran Sekunder Pecek, Link. Pecek Baru	Kel. Gedong Dalem/Kec. Jombang	Penanganan	176,30
			Pasangan	-
22.	Saluran Sekunder Ramanuju, Link. Martapura	Kel. Masigit/Kec. Jombang	Penanganan	142,00
			Pasangan	-
23.	Sungai Kedung Ingas samping Kantor DINKES/DINDIK	Kel. Masigit/Kec. Jombang	Penanganan	225,40
			Pasangan	-
24.	Sungai Cijalumpang Link. Kadipaten	Kel. Kedaleman/Kec. Cibeber	Penanganan	124,70
			Pasangan	-
25.	Saluran Seneja Belakang Pasar Tahap II	Kel. Sukmajaya/Kec. Cibeber	Penanganan	281,20
			Pasangan	-
26.	Sungai Semar Bulakan	Kel. Bulakan/Kec. Cibeber	Penanganan	204,80
			Pasangan	-
27.	Sungai Kedung Ingas, Bonakarta	Kel. Masigit/Kec. Jombang	Penanganan	158,00
			Pasangan	-
28.	Sungai Medaksa, Link. Sawah	Kel. Mekarsari/Kec. Pulomerak	Penanganan	83,00
			Pasangan	-
29.	Lanjutan Sungai Medaksa Link. Sawah	Kel. Mekarsari/Kec. Pulomerak	Penanganan	89,30
			Pasangan	-
30.	Sungai Kedung Ingas Link. Cigiceh	Kel. Gedong Dalem/Kec. Jombang	Penanganan	160,00
			Pasangan	-
31.		Kel. Cibeber/Kec. Cibeber	Penanganan	180,00

No	Lokasi Pekerjaan	Kelurahan/Kecamatan	Volume (m')	
	Lanjutan Sungai Cibeber Samping Perum Griya Praja Mandiri		Pasangan	-
32.	Saluran Sekunder Seneja Jl. KH. Wasyid Pasar Kota Cilegon (Pasangan)	Kel. Sukmajaya/Kec. Jombang	Penanganan	137,30
			Pasangan	137,30
33.	Sungai Krotek (Pasangan)	Kel. Bulakan/Kec. Cibeber	Penanganan	30,00
			Pasangan	13,00
34.	Sungai Semar Belakang Link. Bentolo (Pasangan)	Kel. Bulakan/Kec. Cibeber	Penanganan	57,00
			Pasangan	57,00
35.	Sungai Kedung Ingas Samping RSUD Panggung Rawi (Pasangan)	Kel. Panggung Rawi/Kec. Jombang	Penanganan	67,00
			Pasangan	67,00
36.	Saluran Sekunder Ketileng RBK (Pasangan)	Kel. Ketileng/Kec. Cilegon	Penanganan	156,00
			Pasangan	66,00
37.	Sungai Kedung Ingas Makam Balung (Pasangan)	Kel. Taman Baru/Kec. Cilegon	Penanganan	42,00
			Pasangan	42,00
38.	Saluran Sekunder Seneja Pasar Kota	Kel. Jombang/Kec. Jombang	Penanganan	30,00
			Pasangan	30,00
39.	Sungai Sangkanila Hulu (Pasangan)	Kel. Mekarsari/Kec. Pulomerak	Penanganan	15,14
			Pasangan	15,14

Untuk Kegiatan Normalisasi Saluran/Drainase, capaian di Tahun Anggaran 2019 ini sepanjang 1.657,50 m', terdiri dari 17 (tujuh belas) lokasi tersebar di wilayah Kota Cilegon sebagai berikut :

Tabel.3.1.3a.4
Lokasi kegiatan Normalisasi saluran/drainase

No	Uraian	Volume (m')	Keterangan
1	Normalisasi Saluran Tersier Kadipaten (Link. Belakang PCI Blok E) Kel. Kedaleman	92,00	Pas. Batu
2	Lanjutan Normalisasi Saluran Tersier Ciore Jaya Kel. Grogol Kec. Krogol	100,30	Pas. Batu
3	Normalisasi Sungai Cigobang Kel. Randakari Kec. Ciwandan	76,00	Pas. Batu
4	Normalisasi Sungai Sangkanila Hulu Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak	66,00	Pas. Batu
5	Normalisasi Sungai Panasepan Kel. Tegal Bunder Kec. Pulomerak	77,00	Pas. Batu
6	Normalisasi Sungai Cibuntu	80,00	Pas. Batu
7	Normalisasi Sungai Medaksa	121,60	Pas. Batu + Jembatan
8	Normalisasi Sungai Cikuasa	205,70	Pas. Batu
9	Nor. Sungai Pabean Link. Perum Taman Raya Cilegon Rw.05) Kel. Gedong Dalem	85,00	Pas. Batu
10	Lanj. Normalisasi Muara Sungai Medaksa (Link. Sukajadi Rt.02/02) Kel. Mekar Sari	84,00	Pas. Batu
11	Normalisasi Saluran Tersier Blok Slorot (Link. Sumampir Timur) Kel. Kebon Dalem	148,40	Pas. Batu
12	Normalisasi Saluran Skunder Kepuh (Link. Cilurah) Kel. Kepuh Kec. Ciwandan	79,00	Pas. Batu
13	Normalisasi Sungai Kepuh (Bagian Hilir) Kel. Kepuh	107,00	Pas. Batu
14	Lanjutan Normalisasi Sungai Medaksa (Link. Langon Poksor) Kel. Taman sari	60,00	Pas. Batu + Jembatan

No	Uraian	Volume (m')	Keterangan
15	Lanjutan Normalisasi Sungai Grogol (Link. Cikebel Bawah) Kel. Grogol	130,00	Pas. Batu
16	Normalisasi Sungai Taman Baru	68,00	Pas. Batu
17	Lanjutan Normalisasi Saluran Sekunder Grogol (Link. Cipinang Atas) Kel. Grogol	77,50	Pas. Batu

A.2 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Tabel 3.1.3b

Target dan Realisasi Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan						201.067,02	151.103,29	75,15%
	Persentase panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	%	94,00	84,41	89,80%			
	Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00%			
	Cakupan panjang jalan yang dipelihara	%	25,00	36,59	146,36%			
Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga	Jumlah dokumen perencanaan	dok	14	14	100,00%	1.300,00	961,80	73,98%
Pembangunan Jalan Lingkar Utara	Luas tanah yang dibebaskan	m2	312.469	121.193	38,79%	122.956,70	102.703,41	83,53%
Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	ruas / jemb	2/1	2/0	60,00%	17.283,09	10.470,54	60,58%
Penanganan Darurat Jalan	Jumlah permohonan yang dtangani	permohonan	10	8	80,00%	2.000,00	884,08	44,20%
Pemeliharaan Berkala	Jumlah ruas yang dipelihara	Ruas	34	34	100,00%	9.536,80	7.681,33	80,54%
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Jumlah ruas yang dipelihara	Ruas	26	25	96,15%	4.087,50	3.740,27	91,51%
Peningkatan Struktur Jalan (DAK)	Jumlah ruas yang ditingkatkan	Ruas	2	1	50,00%	12.363,45	8.331,60	67,39%
Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Bantuan Keuangan)	Panjang jalan yang ditangani	m'	1.800	1.523	84,61%	27.476,02	12.798,74	46,58%
Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement)	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan jadi beton	ruas	2	2	100,00%	4.063,45	3.531,52	86,91%

Pada tahun 2016, Kota Cilegon melakukan perubahan data jalan melalui SK Walikota Nomor : 620/Kep.510-DPU/2016 tentang Status Jalan Kota Cilegon. Berdasarkan SK ini, panjang jalan kota Cilegon mengalami penambahan dari panjang semula 348,31 km menjadi 420,09 km. Tahun 2018, SK jalan tersebut diganti dengan SK No : 620/Kep.372-DPUTR/2018 tentang Status Jalan Kota Cilegon dengan panjang

jalan menjadi 384,858 km. Hasil perhitungan pada tahun 2019 panjang jalan kondisi mantap adalah 326,000 Km 84,71 % dari total panjang 384,858 Km.

Ketidaktercapainya indikator kinerja kondisi jalan mantap sebagaimana ditargetkan pada TA. 2018 dikarenakan terjadi perubahan metode pengambilan data kondisi jalan, yang semula menggunakan metode visual, sejak tahun 2017 suvei kondisi jalan menggunakan alat NASSRA sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Selain itu, perubahan panjang jalan yang semula 420,09 km (652 ruas) menjadi 384,85 km (393 ruas) juga turut mempengaruhi capaian kinerja kondisi jalan mantap. Perubahan ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten terhadap LKPD Kota Cilegon Tahun 2017, dimana aset jalan yang tercantum dalam KIBD hanya berjumlah 393 ruas, yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 620/Kep.372-DPUTR/2018 tentang Status Jalan Kota Cilegon tanggal 11 Mei 2018. Adapun secara rinci panjang jalan Kota Cilegon TA.2019 dan kondisi permukaannya terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.3b.1
Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan Kota Cilegon Tahun 2019

Jenis Permukaan	Panjang (KM)
Hotmix	276,506
Beton	92,967
Aspal	3,747
Conblock	-
Tanah	11,638
Jumlah	384,858

Selanjutnya kondisi kemantapan jalan Kota Cilegon Tahun 2019 berdasarkan nilai IRI (*International Roughness Index*) sebagai berikut.

Tabel 4.1.3b.2
Kondisi Kemantapan Jalan Kota Cilegon Tahun 2019

Kondisi Mantap				Kondisi Tidak Mantap			
Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
km	%	km	%	km	%	km	%
52,860	13,74	273,140	70,97	38,276	9,95	20,582	5,35
Jumlah :				Jumlah :			
326,000 km (84,71%)				58,858 km (15,29%)			

Target indikator persentase jumlah jembatan dalam kondisi mantap tahun 2019 adalah 100%. Jumlah jembatan di Kota Cilegon adalah 53 buah dan jumlah jembatan dalam kondisi baik adalah 53 buah, jadi capaian indikator adalah 100%.

Target indikator persentase jalan dan jembatan yang dibangun atau ditingkatkan terhadap total panjang jalan dan jembatan perkotaan adalah 0%. Akan tetapi pada Tahun 2019 ada pekerjaan peningkatan struktur jalan sepanjang 4.572,00 km.

Kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 75% adalah :

1. Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga

Realisasi kegiatan Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga adalah 73,98%. Dari 14 (empat belas) pekerjaan dalam DPA terdapat 2 (dua) pekerjaan yang tidak terbayarkan yaitu : (1) Survey Kerataan Jalan Kota Cilegon dengan nilai kontrak Rp. 98,403,800.00 dan (2) FS Pelebaran Jalan Bagendung Raya (Curug Katimaha(JLS) - Krotek (JLS)) dengan nilai kontrak Rp. 177,485,000.00 yang disebabkan oleh penagihan tidak sempat terinput didalam SIMRAL sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dan akan dibayarkan di Tahun Anggaran 2020.

2. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Realisasi kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan adalah 60,58%. Dari 3 (tiga) pekerjaan dalam DPA terdapat 1 (satu) pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu Penggantian Jembatan Ciberko. Pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sisa waktu tahun anggaran berjalan tidak mencukupi untuk waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.

3. Peningkatan Struktur Jalan (DAK)

Realisasi kegiatan Peningkatan Struktur Jalan (DAK) adalah 67,39%. Dari 2 (dua) pekerjaan dalam DPA terdapat 1 (satu) pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu Peningkatan Struktur Jl. Kh. Achmad Dahlan (244). Pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena penyaluran DAK Fisik Tahun 2019 Tahap 1 yaitu 25% dengan dokumen persyaratan paling lambat hari Senin 22 Juli 2019 harus sudah terinput di OMSPAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia sementara itu proses pekerjaan masih dalam tahap pelelangan dan diperkirakan SPK melebihi tanggal 22 Juli 2019. Kegiatan ini dianggarkan kembali di perubahan anggaran menggunakan APBD perubahan.

4. Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Bantuan Keuangan)

Realisasi kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara adalah 46,58%. Hal ini disebabkan oleh progres pekerjaan pembentukan badan jalan tidak mencapai 100% dan juga penagihan tidak sesuai progress akhir pekerjaan. Adapun rincian progres pekerjaan tersebut sebagai berikut :

- ❖ Pembentukan Badan Jalan Lingkar Utara STA 12+000 s/d STA 12+664 pada akhir tahun 2019 mencapai progress 53,49% ,

sehingga diberikan perpanjangan waktu selama 19 hari sehingga tercapai progres sebesar 99,01%. Dari nilai kontrak sebesar Rp. 11.089.948.000,- yang terserap sebesar Rp. 2.217.989.600,-. Untuk sisa anggaran yang belum terbayarkan, akan dibayarkan di Tahun Anggaran 2020

- ❖ Pembentukan Badan Jalan Lingkar Utara STA 08+550 s/d STA 09+150 dengan progress 98,02% sebesar Rp. 7.106.174.073,- dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.249.718.500,- dan yang terserap sebesar Rp. 6.488.498.057,- untuk sisa yang belum terbayarkan sebesar Rp. 617.676.017,- dan akan dibayarkan di Tahun Anggaran 2020
- ❖ Pembentukan Badan Jalan Lingkar Utara STA 04+600 s/d STA 05+200 dengan progress 97,50% sebesar Rp. 6.145.659.975,- dari nilai kontrak sebesar Rp. 6.303.241.000,- dan yang terserap sebesar Rp. 4.052.983.963,- untuk sisa yang belum terbayarkan sebesar Rp. 2.092.676.012,- dan akan dibayarkan di Tahun Anggaran 2020

Capaian kegiatan lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Lingkar Utara

Sebagai upaya percepatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon telah melaksanakan pengadaan lahan Jalan Lingkar Utara berdasarkan daftar nomintaif yang telah dikeluarkan oleh BPN. Berikut daftar rincian bidang tanah yang telah dibayarkan :

Tabel 4.1.3b.3
Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara tahun 2019

JUMLAH BIDANG TANAH	LUAS (m2)	REALISASI TA 2018			REALISASI TOTAL TA 2019 (Desember)			KET
		Bidang Tanah	Luas (m2)	Anggaran (Rp)	Bidang Tanah	Luas (m2)	Anggaran (Rp)	
172	66.654	119	26.846	18.462.061.081	19	3.930	3.718.348.397	
140	56.547	-	-	-	61	20.169	9.924.433.870	
189	56.006	-	-	-	168	50.279	40.342.318.601	
134	37.040	-	-	-	86	28.658	29.919.142.802	
12	35.068	-	-	-	-	-	-	
57	28.426	43	23.730	10.013.651.490	13	4.026	2.522.814.000	
110	27.178	-	-	-	44	14.035	15.805.359.678	
17	5.023	4	1.697	2.568.309.290	1	6	40.785.000	
831	311.942	166	52.273	31.044.021.861	392	121.103	102.273.202.348	

Kebutuhan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara adalah sebanyak 831 bidang dengan luas 311.942 m². Realisasi pengadaan tanah pada tahun 2018 tercapai sebanyak 166 bidang dengan luas 52.273 m², sedangkan pada tahun 2019 pengadaan tanah yang dapat direalisasikan sebanyak 392 bidang dengan luas 121.103 m². Jadi total lahan yang sudah terbebaskan sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 558 bidang tanah seluas 173.376 m², sehingga sisa yang belum terbebaskan adalah sebanyak 273 bidang tanah seluas 138.566 m². Salah satu kendala lambatnya proses pengadaan tanah adalah adanya tanah wakaf yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih lama, banyaknya tanah yang masih bersengketa kepemilikan, adanya warga yang masih keberatan dengan nilai penggantian tanah dari appraisal, serta banyaknya tanah swasta yang tidak lengkap dokumen kepemilikannya.

2. Peningkatan Struktur Jalan (Rigid Pavement) baik melalui anggaran APBD maupun DAK.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan umur rencana jalan, Pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini Dinas PUTR Kota Cilegon melaksanakan pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan dengan Rigid Pavement (beton). Keuntungan penggunaan perkerasan jalan dengan menggunakan beton ini diantaranya adalah jalan lebih tahan terhadap air, serta umur jalan juga lebih lama dibandingkan dengan jalan aspal. Daya dukung jalan beton untuk menahan beban kendaraan yang berat juga lebih kuat.

Pada TA.2019 kegiatan peningkatan struktur jalan diselenggarakan dengan total panjang 4,572 km. Adapun ruas-ruas jalan yang ditingkatkan konstruksinya menjadi perkerasan beton (*rigid pavement*) adalah Jl. Ir. Sutami (084) sepanjang 2.525 meter, Jl. Wilulang (145) sepanjang 200 meter, Jl. KH Ach. Dahlan (244) sepanjang 725 meter, Jalan Tembus Akses Kel. Panggungrawi (Kubang Laban – Panggungrawi (448)) sepanjang 442 meter, serta Jalan Bonakarta – Masigit (450) sepanjang 680 meter.

3. Kegiatan Pemeliharaan Jalan baik melalui Pemeliharaan Berkala maupun Rutin Jalan.

Sebagai upaya mempertahankan kondisi jalan di Kota Cilegon, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon pada Tahun Anggaran 2019 telah melaksanakan pemeliharaan jalan pada 59 ruas jalan dengan total pemeliharaan jalan sepanjang 24,51 km, yang terdiri dari pemeliharaan berkala sebanyak 34 ruas sepanjang 17,925 kilometer, dan 7,71 km melalui pekerjaan pemeliharaan rutin sebanyak 27 ruas.

A.3 Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan Dan Pengendalian Reklame

Tabel 3.1.3c
Target dan Realisasi Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan Dan Pengendalian Reklame Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan Dan Pengendalian Reklame						30.611,99	26.782,37	87,49%
	Persentase unit gedung negara/pemerintahan yang laik fungsi	%	57,69	83,20	144,21%			
	Persentase bangunan berizin terhadap seluruh jumlah bangunan yang ada	%	9,00	27,81	309,00%			
	Persentase reklame berizin terhadap seluruh jumlah reklame yang ada	%	9,00	100,00	1111,11%			
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan	Jumlah gedung negara yang dibangun/direhab	unit	7	6	85,71%	3.286,99	1.399,14	42,57%
Perencanaan Teknis Ciptakarya	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	5	5	100,00%	300,00	293,55	97,85%
Penerbitan standar laik fungsi bangunan	Jumlah gedung yang laik fungsi	gedung	5	5	100,00%	185,00	155,00	83,78%
Penertiban Media luar ruang	Jumlah lokasi yang ditertibkan	lokasi	2	2	100,00%	40,00	39,22	98,05%
Pembuatan papan himbauan IMB	Jumlah papan himbauan IMB yang dibuat	paket	1	1	100,00%	200,00	198,48	99,24%
Pemeliharaan Papan Hibauan IMB	Jumlah papan himbauan IMB yang dipelihara	paket	1	1	100,00%	50,00	47,27	94,53%
Perencanaan Teknis Cipta Karya (Prioritas Daerah)	Jumlah dokumen perencanaan	dok	5	5	100,00%	450,00	431,57	95,90%
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan (Prioritas Daerah)	Jumlah gedung negara yang dibangun/direhab	unit	3	2	66,67%	25.800,00	23.923,54	92,73%
Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Media Luar Ruang	Jumlah lokasi JPO yang dipelihara	lokasi	15	15	100,00%	150,00	148,00	98,67%
Kajian Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (DID)	Jumlah dokumen	dokumen	1	1	100,00%	50,00	48,20	96,40%
Penyusunan Gambar Teknis Gedung Pemerintahan	Jumlah dokumen	dokumen	10	10	100,00%	100,00	98,42	98,42%

Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame merupakan salah satu program yang tertuang dalam RPJM Kota Cilegon tahun 2016-2021, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) berupaya keras untuk merealisasikan target kinerja yang sudah ditentukan. Indikator keberhasilan program ini ada 3 indikator, yaitu meningkatnya persentase unit gedung

negara/pemerintahan yang laik fungsi, meningkatnya persentase bangunan berizin dan meningkatnya perizinan reklame.

Pembangunan prasarana gedung perkantoran pemerintahan berupa peningkatan atau rehabilitasi gedung perkantoran harus sesuai dengan perkembangan kebutuhan untuk mempermudah pelayanan masyarakat, sederhana dan transparan. Saat ini jumlah gedung perkantoran pemerintahan di Kota Cilegon sebanyak 86 gedung yang terdiri dari gedung kantor kecamatan 8 unit, gedung kantor kelurahan 43 unit dan gedung dinas dan badan sebanyak 35 unit. Adapun dari jumlah tersebut kondisi gedung pemerintahan yang laik fungsi/sesuai dengan standar teknis dan administrasi adalah 71 unit atau 83,20 %. Target indikator persentase unit gedung negara/pemerintahan yang laik fungsi adalah 57,69% sedangkan realisasinya sebesar 83,2%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 144,22%.

Berkaitan dengan pelayanan teknis perizinan pada tahun 2019 jumlah bangunan yang telah diterbitkan IMB sebanyak 822 unit. Target kinerja indikator persentase bangunan berizin terhadap seluruh jumlah bangunan yang ada adalah sebesar 9,00%, sedangkan realisasinya sebesar 8,8%, karena adanya peningkatan bangunan ber-IMB menjadi 10.117 unit dari total bangunan yang ada sebanyak 114.939 unit.

Jumlah total reklame pada tahun 2019 adalah sebanyak 410 unit. Dari jumlah tersebut, unit reklame yang sudah berizin adalah sebanyak 410 unit (100%) Target kinerja DPUTR Kota Cilegon untuk indikator persentase reklame berizin terhadap jumlah reklame yang ada tahun 2019 adalah sebesar 9% dengan realisasi sebesar 100,0%, dengan demikian capaian kinerja adalah 1111,11%.

Secara umum kegiatan di bawah Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan, dan Pengendalian Reklame dapat direalisasikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran program sebesar Rp 26.782.369.350,- dari total pagu sebesar Rp 30.611.990.000,- atau mencapai 87,49%. Dari jumlah total sebanyak 11 kegiatan, sebanyak 10 kegiatan mampu merealisasikan anggaran di atas 80%, hanya satu kegiatan yang realisasinya di bawah 75%, yaitu kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan dengan serapan anggaran sebesar 42,57%.

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan direncanakan menangani 7 unit gedung, yaitu : (1) Rehabilitasi Gedung Dinas Kesehatan, (2) Lanjutan Pembangunan Training Centre, (3) Lanjutan Pembangunan Kelurahan Tegal Ratu, (4)

Rehabilitasi Gedung Kantor Lma Dinas Sosial, (5) Renovasi Tampak Muka Gedung Kantor Walikota, (6) Rehab Gedung Kantor Lama Dinas PUTR, dan (7) Rehab Kantor KODIM. Dari ketujuh pekerjaan tersebut, renovasi tampak muka gedung kantor walikota tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan gagal lelang dan waktu yang tersedia tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

A.4 Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Tabel 3.1.3d Target dan Realisasi Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi						515,36	432,57	83,94%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral urusan pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan	%	85,00	90,00	105,88%			
	Rasio pelayanan alat berat	%	76,92	80,77	105,01%			
	Prosentase ketersediaan data layanan informasi jasa konstruksi	%	100,00	90,00	90,00%			
	Prosentase ketersediaan alat laboratorium	%	87,78	90,00	102,53%			
Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP)	Jumlah dokumen	dok	1	1	100,00%	20,12	20,12	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen	dok	1	1	100,00%	28,55	28,55	100,00%
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen	dok	4	4	100,00%	17,65	17,65	100,00%
Penyusunan Dokumen Tabel Monitoring Pengadaan Barang / Jasa	Jumlah dokumen	dok	2	2	100,00%	22,42	11,20	49,97%
Penyusunan Dokumen Harga Upah, Alat dan Bahan Ke-PU-an PUTR	Jumlah dokumen	dok	2	2	100,00%	40,00	39,60	99,00%
Penyusunan Booklet Pembangunan PUTR	Jumlah dokumen	dok	50	50	100,00%	40,00	38,72	96,80%
Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta	org	50	50	100,00%	31,70	30,20	95,26%
Pelatihan Sertifikasi Tenaga Terampil	Jumlah peserta	org	105	48	45,71%	259,00	197,09	76,10%
Biaya Penunjang Penerbitan Rekomendasi SIUJK	Jumlah dokumen	dok	12	12	100,00%	35,48	30,54	86,07%
Pemutakhiran Data Layanan SIPJAKI	Jumlah dokumen	dok	2	2	100,00%	20,46	18,92	92,47%
Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi (UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium)						545,96	400,69	73,39%
Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Jenis ATK	Jenis	13	13	100,00%	7,01	7,01	100,00%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Berat dan Peralatan Perbengkelan	Jumlah alat berat yang dieprbaiki/dipelihara	Unit	15	15	100,00%	424,15	279,60	65,92%
Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Laboratorium	Jumlah alat lab yang dipelohara	Unit	8	8	100,00%	114,80	114,07	99,37%

Realisasi indikator persentase ketersediaan data layanan informasi jasa konstruksi adalah sebesar 80% dari target sebesar 80% atau capaian indikatornya adalah 100% . Data Layanan Informasi Jasa Konstruksi dihitung berdasarkan bobot sebagaimana Tabel 4.1.3d.1 berikut :

Tabel 3.1.3d.1
Bobot 7 Layanan Informasi

No	Jenis Informasi	Bobot (%)
1	Izin Usaha Konstruksi yang <i>ter-update</i> secara berkala	35
2	Data Badan Usaha Konstruksi yang <i>ter-update</i> secara berkala	10
3	Data tenaga kerja jasa konstruksi yang <i>ter-update</i> secara berkala	10
4	Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya	10
5	Tanda daftar usaha perorangan yang <i>ter-update</i> secara berkala	10
6	Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang <i>ter-update</i> secara berkala	15
7	Profil Tim Pembina jasa konstruksi di kab/kota	10

Dari ketujuh jenis informasi tersebut Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi telah memenuhi 5 jenis layanan, yaitu: (1) Izin Usaha Konstruksi yang *ter-update* secara berkala, (2) Data Badan Usaha Konstruksi yang *ter-update* secara berkala, (3) Data tenaga kerja jasa konstruksi yang *ter-update* secara berkala, (4) Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang *ter-update* secara berkala, dan (5) Profil Tim Pembina jasa konstruksi di kab/kota. Kelima jenis layanan tersebut jika dijumlahkan adalah sebesar 80%.

Kegiatan yang capainya di bawah 75% adalah Penyusunan Dokumen Tabel Monitoring Pengadaan Barang / Jasa, dan kegiatan Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Berat dan Peralatan Perbengkelan. Penyusunan Dokumen Tabel Monitoring Pengadaan Barang / Jasa serapannya hanya 49,97% disebabkan dalam DPA terdapat

alokasi untuk sisa anggaran sebesar Rp 11.215.000,- yang semula dianggarkan untuk peningkatan SDM, sehingga tidak diserap.

Kegiatan Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Berat dan Peralatan Perbengkelan serapannya hanya 65,92%, hal ini terjadi karena mulai tahun 2019, sesuai dengan arahan Inpsektorat, bahwa BBM dikeluarkan hanya untuk pemanasan alat dan operasional, tidak termasuk ketika ada sewa pihak ketiga.

A.5 Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Tabel 3.1.3e

Target dan Realisasi Program Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang						850,85	337,52	39,67%
	Rasio bangunan ber-IMB	%	88,00	11,00	12,50%			
	Persentase jumlah KRK yang sesuai tata ruang terhadap jumlah KRK yang diajukan	%	85,00	60,00	70,59%			
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Tersedianya peta dasar Kota Cilegon yang Mutakhir	Dokumen	1	1	100,00%	500,00	38,53	7,71%
Penyediaan Penunjang Operasional Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)	Terlaksananya pelayanan publik dalam penerbitan SKRK yang efektif dan optimal	Dokumen	350	475	135,71%	13,72	13,72	100,00%
Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terinformasikannya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kepada Masyarakat di Tingkat Kelurahan	Kegiatan	1	1	79,92%	141,75	113,29	79,92%
Pengadaan Alat Penunjang Pengukuran dan Pemetaan	Terpenuhinya Alat Penunjang Pengukuran dan Pemetaan	Unit	3	3	100,00%	27,00	26,88	99,54%
Operasional TKPRD Kota Cilegon	Terlaksananya Kegiatan TKPRD	Kegiatan	16	11	68,75%	68,39	47,41	69,32%
Evaluasi Site Plan Kawasan Industri	Tersedianya Dokumen Evaluasi Siteplan Kawasan Industri	Dokumen	1	1	100,00%	100,00	97,70	97,70%

Dari tiga kegiatan yang ada pada seksi perencanaan penataan ruang, permasalahan kinerja yang tidak sesuai target terdapat pada kegiatan Operasional TKPRD, dimana target sebanyak 16 kegiatan namun realisasi hanya 11 kegiatan. Hal ini disebabkan target tersebut merupakan target revisi (target sebelumnya adalah 10 kegiatan/dokumen), untuk mengakomodir permintaan Kementerian ATR/BPN dalam rangka fasilitasi kegiatan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Insdal Pemanfaatan Ruang sekitar Jalan Tol dan Insdal PLTU Suralaya) berupa pembahasan dengan TKPRD terkait substansi Insdal.

Sementara itu, permasalahan rendahnya realisasi anggaran pada seksi perencanaan terdapat pada kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pekerjaan Pemutakhiran Peta Penunjang RDTR. Hal ini disebabkan proporsi terbesar anggaran dialokasikan pada belanja Jasa Konsultansi Pemutakhiran Peta Penunjang RDTR (Pihak Ketiga), dimana terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain pada tahap awal pelelangan pekerjaan sempat terjadi gagal lelang sehingga perlu dilakukan lelang ulang, pada tahap pelaksanaan pekerjaan diperlukan asistensi/konsultasi dengan pihak Badan Informasi Geospasial (BIG) yang ternyata memerlukan waktu yang panjang dan tidak dapat diprediksi, sehingga dilakukan adendum waktu pelaksanaan pekerjaan semula selesai 16 Desember 2019 menjadi 30 Desember 2019. Namun dikarenakan pada saat yang bersamaan terdapat banyak tagihan pekerjaan yang belum selesai diproses, pencairan kegiatan Penyusunan RDTR tidak dapat diproses sampai saat ini sehingga menyebabkan realisasi anggaran untuk kegiatan ini masih jauh dari target dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020. Namun demikian, target kinerja untuk kegiatan ini telah tercapai.

A.6 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)

Tabel 3.1.3f

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2019 (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)						5.349,80	4.869,87	91,03%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	90	107,14%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	76	90,48%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	92	92	100,00%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	80	94,12%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Perlengkapan, Perbengkelan dan Laboratorium)						97,47	96,19	98,68%

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**B.1. Permasalahan**

1. Keterlambatan proses pengadaan pekerjaan pembangunan Tandon Bulakan dan Tandon Cibuntu karena menunggu selesainya proses lelang galian tanah tandon melalui KPKNL.
2. Keterlambatan pekerjaan fisik Situ Rawa Arum disebabkan karena keterlambatan proses pengadaan DED Situ Rawa Arum.
3. Keterlambatan pekerjaan fisik pemeliharaan berkala jalan disebabkan karena keterlambatan penyusunan Perjanjian Kerjasama sebagai turunan dari MoU antara PT. Chandra Asri Petrochemical dengan Dinas PUTR dalam penggunaan aspal plastik dalam pekerjaan pemeliharaan berkala jalan. Selain itu, dalam tahap pelaksanaan terkendala pada keterbatasan Penyedia Aspal Mixing Plan/AMP yang bersertifikasi dalam melaksanakan pencampuran antara aspal biasa dengan material plastik, sehingga menjadikan daftar tunggu bagi penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.
4. Tidak tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan lelang ulang pada pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan (DAK) terkait dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh juknis DAK 2019.
5. Salah satu kendala lambatnya proses pengadaan tanah adalah adanya tanah wakaf yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih lama, banyaknya tanah yang masih bersengketa kepemilikan, adanya warga yang masih keberatan dengan nilai penggantian tanah dari appraisal, serta banyaknya tanah swasta yang tidak lengkap dokumen kepemilikannya. Selain itu juga adanya restrukturisasi pejabat BPN sehingga berpengaruh pada kebijakan BPN Kota Cilegon, dimana harus dilakukan revisi terhadap data nominatif dan peta bidang.
6. Keterlambatan kegiatan Pemutakhiran Peta Penunjang RDTR disebabkan karena proses Kegiatan Pemutakhiran Peta Penunjang RDTR memerlukan waktu yang sangat panjang untuk memperoleh rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG), dibutuhkan tahapan asistensi sampai dinyatakan peta tersebut dapat digunakan untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Karena kurang optimalnya koordinasi antara Kementerian ATR/BPN, konsultan pelaksana kegiatan dan Dinas PUTR dalam proses penyusunan pemutakhiran peta ini, maka kendala ini tidak terprediksi dari awal.

B.2 Solusi

1. Mempercepat proses pengadaan pada triwulan I atau triwulan II, sehingga proses fisik dan administrasi pekerjaan serta proses pemeriksaan hasil pekerjaan sampai dengan pembayaran dapat dilakukan lebih cepat.
2. Mempercepat proses pengadaan DED untuk setiap pekerjaan dan menjadwalkan pembuatan DED tidak bersamaan dengan pekerjaan fisik.
3. Melakukan monitoring tahapan pekerjaan, mulai dari proses pengadaan, pekerjaan fisik sampai dengan proses administrasi kegiatan pembayaran, sehingga lebih mudah melakukan pengawasan dalam kemajuan kinerja pekerjaan dan proses pembayaran.
4. Memberikan peluang sebesar besarnya kepada AMP di Lingkungan Kota Cilegon melalui sosialisasi dan pembekalan kepada AMP tersebut agar dapat dipergunakan dan menjadikan alternative pilihan bagi pengguna jasa AMP.
5. Dinas PUPR Kota Cilegon harus lebih pro aktif dalam konsultasi dan koordinasi dengan kementrian ATR/BPN atau instansi terkait lainnya, dengan ditunjang operasional dan SDM yang memadai.
6. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang memerlukan prosedur yang sangat panjang karena harus memperoleh rekomendasi dari beberapa instansi. Oleh karena itu waktu pelaksanaan nya harus disusun dari mulai awal tahun TW I sehingga dapat diantisipasi apabila terdapat hambatan dan dapat diselesaikan dalam 1 tahun anggaran.

3.1.4 Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Penataan Perumahan dan Permukiman

Tabel 3.1.4a
Target dan Realisasi Program Penataan Perumahan dan Permukiman
Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penataan Perumahan dan Permukiman						22.795,00	19.969,70	87,61%
	Prosentase luas penanganan kawasan kumuh	%	19,14	14,50	75,76%			
	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik/ Tidak rusak	%	72,37	81,01	111,93%			
	Persentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik/ Tidak rusak	%	91,78	68,84	75,01%			
	Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air bersih dengan non perpipaan	%	15,94	5,74	36,01%			
Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum PDAM (Prioritas Daerah)	Tersedianya jaringan perpipaan untuk persediaan air bersih bagi masyarakat	km	5,065	5,065	100,00%	8.814,87	7.531,97	85,45%
Penataan Kawasan Kumuh	Pemasangan Paving tersebar dan Pembangunan Drainase lingkungan	Lok/ha	15/ 3,9	15/ 14,33 ha	100,00%	2.000,00	1.900,62	95,03%
Pendampingan Kegiatan KOTAKU	Terselenggaranya Kegiatan Pendukung KOTAKU	Kota Cilegon	-	-	0,00%	100,00	20,62	20,62%
Pemasangan Paving jalan lingkungan	Terselenggaranya pembangunan paving	lokasi	17	17	100,00%	2.350,00	2.248,58	95,68%
Normalisasi saluran/drainase lingkungan	Terselenggaranya Pembangunan Drainase	lokasi	13	13	100,00%	1.750,00	1.681,77	96,10%
Rehab Rumah Terkena Bencana	Terehabilitasinya rumah yang terkena bencana	paket	1	-	0,00%	200,00	0,00	0,00%
Rehabilitas dan pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman	Terselenggaranya Pemeliharaan Paving dan Drainase Serta Normalisasi Drainase	Kecamatan	3	3	100,00%	1.500,00	1.460,72	97,38%
Pembangunan sumur bor	Terbangunnya Sumur bor/dalam (deepwell)	lokasi	5	5	100,00%	1.080,00	1.029,93	95,36%
Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman	Tersedianya dokumen perencanaan teknis perumahan dan permukiman	dokumen	11	11	100,00%	2.150,00	1.973,13	91,77%
Penyusunan Data Fasilitas PSU Kawasan Perumahan	Tersedianya Data Tentang Kondisi dan Ketersediaan Fasilitas PSU di Kawasan Permukiman	dokumen	1	1	97,20%	300,00	276,59	92,20%
Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	Terbangunnya Tembok Penahan Tanah (TPT)	Lokasi	6	6	97,74%	1.235,14	1.207,17	97,74%
Pembangunan Sumur Bor (DID)	Terbangunnya sumur bor/sumur dalam (deepwell)	lokasi	4	3	75,00%	865,00	597,27	69,05%
Pengadaan Mobil Tangki dan Perlengkapannya	Tersedianya Mobil Tangki dan Perlengkapannya	Unit	1	1	100,00%	450,00	41,34	9,19%

No	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL
1	Prosentase luas Penanganan Kawasan kumuh	19,14%	$\frac{\text{Jumlah luas penanganan kawasan kumuh}}{\text{jumlah luas kawasan kumuh yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{12,99}{89,54} \times 100\%$ $= 14,50 \%$
2	Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	72,37%	$\frac{\text{Jumlah jalan lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{jalan lingkungan yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{80.307,7}{99.122} \times 100\%$ $= 81,01 \%$
3	Prosentase drainase lingkungan dalam kondisi baik/ tidak rusak	91,78%	$\frac{\text{Jumlah drainase lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{jumlah drainase lingkungan yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{30.424}{44.192,1} \times 100\%$ $= 68,84 \%$
4	Prosentase penduduk yang mendapat pelayanan air bersih non perpipaan	15,94%	$\frac{\text{Prosentase penduduk yang mendapat pelayanan air bersih dengan non perpipaan}}{\text{jumlah penduduk yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{8 (\text{lok}) \times 360 (\text{KK}) \times 6 (1 \text{ kk} = 6 \text{ jiwa})}{0,71 \times 423.362} \times 100\%$ $= 5,74 \%$

1. Realisasi indikator Prosentase luas penanganan kawasan kumuh mencapai 83,59 % dari target 19,14%. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini diperoleh dari Jumlah luas penanganan kawasan kumuh seluas 12,99 Ha dibagi jumlah luas kawasan kumuh yang ada seluas 89,54 Ha, karena dalam pelaksanaan dikerjakan tidak hanya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tapi dikerjakan juga oleh Program DPWKEKEL dan juga Program KOTAKU
2. Realisasi Indikator Kinerja Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik sebesar 81,01%. Perhitungan ini diperoleh dari Jumlah jalan lingkungan dalam kondisi baik sepanjang 80.307,7 m dibagi dengan jalan lingkungan yang ada sepanjang 99.122 m, prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik melebihi yang ditargetkan karena dalam pelaksanaannya dikerjakan tidak hanya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tapi dikerjakan juga oleh Program DPWKEKEL dan KOTAKU.
3. Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik/ tidak rusak mencapai 68,84 dari target 91,78 %. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini diperoleh dari Jumlah drainase lingkungan dalam kondisi baik seluas 30.424 m² dibagi jumlah drainase lingkungan yang ada seluas 44.192,10 m². Realisasi ini belum

memperhitungkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Program DPWKEKEL dan KOTAKU.

4. Realisasi indikator kinerja Prosentase penduduk yang mendapat pelayanan air bersih non perpipaan yaitu jumlah penduduk yang mendapat pelayanan air bersih non perpipaan sebesar 17.280 jiwa dibagi jumlah total penduduk yang mendapat air bersih dari non perpipaan sehingga dapat diperoleh sebesar 5,74 % dari target 15,94 %. Perhitungan ini hanya memperhitungkan akses pelayanan air bersih dari non perpipaan, dan tidak memperhitungkan akses air bersih perpipaan.

Kegiatan yang relalisasi anggaranya dibawah 75% adalah sebagai berikut :

1. *Pendampingan Kegiatan KOTAKU Tahun 2018 20,62%*

Kota Cilegon sudah tidak mengalokasi anggaran untuk program KOTAKU yang bersumber dari APBN. Karena Penataan Kawasan Kumuh di Kota Cilegon sudah di bawah 18 % untuk kegiatan pelaksanaan Revitalisasi Kawasan Kumuh. Karena dianggap sudah tidak ada lagi Kawasan Kumuh berdasarkan perhitungan numerik dari ASKOT KOTAKU namun demikian program KOTAKU tetap dijalankan di Cilegon karena kondisi perkumuhan sifatnya dinamis untuk anggaran Kegiatan Pendampingan KOTAKU tahun 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan Kegiatan LOKAKARYA. Anggaran yang tidak diserap adalah biaya Perjalanan Dinas yang kami anggap tidak begitu penting. Penyerapan anggaran hanya pada LOKAKARYA karena penting untuk Kolaborasi Tingkat Kota dalam pencegahan kumuh.

2. *Rehab Rumah Terkena Bencana 0%*

Pada tahun 2019 cuaca di Kota Cilegon mengalami musim kemarau cukup panjang, sementara musim penghujan dimulai pada awal bulan Desember dengan terjadinya beberapa kali cuaca ekstrim. Di pertengahan bulan Desember terjadi cuaca ekstrim yang mengakibatkan beberapa unit rumah mengalami kerusakan cukup parah. BPBD selaku OPD yang menangani masalah kebencanaan melayangkan surat ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 16 Desember 2019 mengingat terdapat alokasi anggaran untuk Rehab Rumah Terkena Bencana. Dengan sisa waktu yang cukup singkat sampai akhir masa anggaran tidak mencukupi untuk melakukan penyerapan anggaran rehab sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa.

3. *Pembangunan Sumur Bor (DID) 59,05%*

Pembangunan Sumur Bor yang berasal dari sumber dana DID terdapat di 4 (empat) lokasi. Sampai akhir Desember 2019 ada 1 (satu) lokasi yang tidak dapat

dilaksanakan karena sudah dibangun secara swadaya oleh masyarakat yaitu di Lingkungan Pringori Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak.

4. *Pengadaan Mobil Tangki dan Perlengkapan 9,19%*

Dalam uraian rincian DPA pada APBD-P terdapat Pengadaan Mobil Tanki 1 (satu) unit dan 4 (empat) unit tanki air. Pada pelaksanaannya, Dealer kendaraan tidak mempunyai persediaan truck tanki yang siap pakai karena spesifikasi tanki dengan kapasitas 3000 Liter harus dibuat khusus, sehingga pengadaan truk tanki tersebut harus dilelang secara umum yang membutuhkan waktu lebih lama. Realisasi penyerapan anggaran DPA ini hanya untuk pengadaan 4 (empat) unit tanki air yang berlokasi di Kelurahan Gerem dan Pabean yang mengalami masalah kekeringan.

A.2 Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota

Tabel 3.1.4b

Target dan Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota Tahun 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota						15.597,21	11.052,00	70,86%
	Rasio Realisasi Taman Kota, Taman Perumahan, dan Lingkungan Terhadap kebutuhan luas RTH Publik Yang Seharusnya Tersedia	%	10,34	4,32	41,78%			
	Rasio Taman Kota Terpelihara Terhadap Taman Kota Yang Ada	%	77,33	66,56	86,07%			
	Persentase ketersediaan prasarana Kota terhadap kebutuhan	%	68	42,86	63,03%			
	Cakupan pemanfaatan tempat pemakaman umum oleh penduduk	%	10	0,10	1,00%			
Pemeliharaan Prasarana Arsitektur Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Tugu Selamat datang dan Landmark Kota	lokasi	3	3	100,00%	361,25	355,35	98,37%
Pemeliharaan Sarana dan Arsitektur Kota	Terpeliharanya Alun-alun Kota, Taman Kota dan Jalur Hijau	%	100	100	100,00%	2.861,21	2.500,57	87,40%
Perencanaan Teknis Sarana dan Arsitektur Kota	Tersusunnya Perencanaan Teknis Sarana dan Arsitektur Kota	paket	2	2	100,00%	300,00	268,76	89,59%
Penataan Pemakaman	Terlaksananya Penataan Area Pemakaman Umum Cikerai	paket	1	1	100,00%	290,00	267,41	92,21%
Pembangunan Sarana Arsitektur Kota	Terbangunnya Taman Kota Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Cibeber	paket	2	1	50,00%	5.428,31	2.065,81	38,06%
Peningkatan/Penataan Sarana Arsitektur Kota (Prioritas Daerah)	Tertatanya Alun-alun Kota, Jalur Hijau dan Taman Kota	Paket	19	19	100,00%	4.759,86	4.406,20	92,57%
Pemeliharaan Peralatan Sarana Arsitektur Kota	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Sarana dan Arsitektur Kota	Unit	11	11	100,00%	1.596,59	1.187,91	74,40%

No	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL
1	Rasio realisasi taman kota, taman perumahan dan lingkungan terhadap kebutuhan luas RTH publik yang seharusnya tersedia	10,34%	$\frac{\text{Realisasi taman kota dan jalur hijau yang ada}}{\text{kebutuhan luas RTH Publik yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$ $= \frac{415.139,10 \text{ m}^2}{9.602.590 \text{ m}^2} \times 100\%$ $= 4,32\%$
2	Rasio taman kota terpeliharanya terhadap taman kota yang ada	77,33%	$\frac{\text{Jumlah Taman Kota terpelihara}}{\text{Taman Kota yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{276.306,14}{415.139,1} \times 100\%$ $= 66,56$
3	~~Rasio panjang trotoar dan median jalan yang terpelihara terhadap panjang trotoar dan median jalan yang ada~~	58,47%	$\frac{\text{Panjang Trotoar dan median jalan yang terpelihara}}{100\%} \times 100\%$ $= \frac{0}{\text{Panjang trotoar dan median jalan yang ada}} \times 100\%$ $= 0\%$
4	Presentase ketersediaan prasarana kota terhadap kebutuhan	68%	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan Prasarana kota yang terbangun}}{100\%} \times 100\%$ $= \frac{3}{7} \times 100\%$ $= 42,86 \%$
5	Cakupan pemanfaatan tempat pemakaman umum oleh penduduk	10%	$\frac{\text{Jumlah Makam yang dimanfaatkan}}{\text{Ketersediaan Makam yang dapat dimanfaatkan}} \times 100\%$ $= \frac{101}{10.128} \times 100\%$ $= 0,10 \%$

Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kab yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Realisasi pembangunan taman kota, taman perumahan dan lingkungan pada tahun 2019 sebesar 4,32%. Realisasi Indikator Kinerja ini didapat dari perhitungan Realisasi Taman Kota dan Jalur Hijau yang ada dibagi dengan Kebutuhan Luas RTH Publik yang seharusnya tersedia. Target indikator sebesar 10,34 % tidak tercapai salah satunya karena tahun 2019 Kegiatan Pembangunan Taman Kota Cibeber tidak dapat dilaksanakan karena mengalami gagal lelang.

Realisasi rasio taman kota terpeliharanya terhadap taman kota yang ada Pemeliharaan Taman kota baru mencapai 66,56 % dari target 86,07%. Perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini didapat dari perhitungan Jumlah Taman Kota terpelihara seluas 276.306,14 m² dibagi dengan Taman Kota yang ada seluas

415.139,10 m². Ketidaktercapaian target indikator ini karena kurangnya personil pemeliharaan taman yang mencakup pekerjaan penyiraman, penyiangan, pemupukan, pembersihan sampah dan pengelolaan taman. Pada saat ini hanya di alun-alun kota Cilegon yang mempunyai personel pengurus taman dan Pamdal (pengamanan dan pengendalian), sementara di lokasi taman lainnya baru ada pengurus taman. Konsekuensi dengan semakin bertambahnya lokasi taman (RTH) maka personel dan anggaran perlu ada penambahan serta pemilihan jenis tanaman yang lebih memudahkan dalam pemeliharaan.

Pada tahun 2019 Pemeliharaan Median dan Trotoar ini tidak dilaksanakan lagi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman karena tugas pokok dan fungsi pemeliharaannya berada di DPUTR.

Rasio prosentase ketersediaan prasarana kota terhadap kebutuhan didefinisikan sebagai landmark dan sculpture yang perlu dibangun untuk memperindah estetika kota. Perhitungan indikator diperoleh Jumlah ketersediaan Prasarana kota yang terbangun sebanyak 3 lokasi dibagi dengan Jumlah Prasarana Kota yang dibutuhkan sebanyak 7 lokasi. Pada tahun 2019, capaian indikator mencapai 42,86 % dari 64 %. Pembuatan prasarana arsitektur kota yang sudah terealisasi berada di 3 (tiga) lokasi yang dalam hal ini Landmark Simpang Tiga, Gerbang Kota Cilegon Timur dan Gerbang Kota Ciwandan.

Realisasi indikator Cakupan Pemanfaatan TPU Cikerei adalah penduduk setempat hanya 0,10 %. Perhitungan ini diperoleh dari Jumlah Makam yang dimanfaatkan sebanyak 101 dibagi dengan Ketersediaan Makam yang dapat dimanfaatkan sebanyak 10.128 Makam. Dengan kondisi TPU Cikerei yang belum tertata, dan masyarakat lebih banyak memakai lahan di TPU terdekat yang dikelola oleh masyarakat.

Kegiatan yang realisasi anggaranya dibawah 75 % adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana Arsitektur Kota 38,05%

Pada tahun 2018 dialokasikan anggaran kegiatan DED Taman Kota Kecamatan Cibeber, namun pada pelaksanaannya mengalami gagal lelang.

Tahun 2019 dialokasikan kembali melalui perubahan rincian anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 143.500.000, pada tahun yang sama telah dianggarkan kegiatan Pembangunan Taman Kota Kecamatan Cibeber sebesar Rp. 2.812.940.000 dan Pengadaan serta Penanaman bibit Tanaman di Kecamatan Cibeber sebesar Rp. 200.000.000, dan Pengawasan sebesar Rp. 70.000.000 namun dalam pelaksanaannya mengalami 2 (dua) kali gagal lelang dan keterbatasan waktu pelaksanaan.

2. Pemeliharaan Peralatan Sarana Arsitektur Kota 74,40%

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Sarana Arsitektur Kota dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi dalam penyerapan anggaran karena kebutuhan belanja perawatan kendaraan bermotor serta Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas dan Pelumas sesuai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.

A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Tabel 3.1.4c

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun 2019
(Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN)						8.438,76	8.257,80	97,86%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	92,00	100,00	108,70%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	92,00	97,59	106,08%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	91,00	97,72	107,38%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	99,00	57,86	58,44%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Kegiatan Rehab Rumah Terkena Bencana
2. Dalam kegiatan Perencanaan dan Pembangunan dilaksanakan di tahun yang sama.
3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Arsitektur Kota setiap tahunnya mengalami eskalasi harga karena kondisi perekonomian nasional yang tidak menentu

B.2 Solusi

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai mekanisme penyerapan anggaran Rehab Rumah Terkena Bencana yang melibatkan OPD terkait (Lintas OPD).
2. Untuk Kegiatan Perencanaan Teknis Sarana dan Arsitektur Kota sebaiknya dilaksanakan pada n-1 dan pelaksanaannya tidak bersamaan dengan Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Penataan Sarana Arsitektur Kota,
3. Untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana Arsitektur Kota sudah harus memperhitungkan eskalasi harga

3.1.5 Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)

Tabel 3.1.5a

Target dan Realisasi Program Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran Tahun 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran						2.273,39	2.222,17	97,75%
	Persentase Kapasitas Penanganan Kebakaran Pada WMK	%	42,81	32,88	76,81%			
Pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan alat proteksi kebakaran bangunan gedung	objek	65	65	100,00%	30,60	30,19	98,66%
Pendataan Bangunan Gedung	Terdatanya jumlah dan jenis bangunan gedung serta sistem informasinya	kegiatan	1	1	100,00%	106,63	106,54	99,92%
Pengadaan Peralatan Damkar	Tersedianya peralatan damkar	jenis	5	5	100,00%	199,59	194,77	97,59%
Pemeliharaan Peralatan Damkar dan Rescue	Terpeliharanya alat pemadam kebakaran serta tersedianya stok bahan pemadam (hydrant 10 unit, pengisian tabung 40 tabung)	jenis	2	2	100,00%	79,72	78,61	98,60%
Penyusunan naskah akademis evaluasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 (Prioritas Daerah)	Terlaksananya revisi perda	kegiatan	1	1	100,00%	129,80	120,94	93,17%
Pengadaan Kendaraan Pemadam kebakaran (DID)	Tersedianya mobil pemadam kebakaran	unit	1	1	100,00%	1.400,00	1.371,00	97,93%
Pengadaan Peralatan Rescue	Tersedianya peralatan rescue	jenis	1	1	100,00%	107,05	106,51	99,50%
Pemasangan Hidrant Kota	Terpasangnya hydrant kota (3 unit JLS, 1 unit Jl. leumpang raya kel Citangkil)	Unit	4	4	100,00%	120,00	116,84	97,36%
Kajian klasifikasi potensi resiko kebakaran	Tersedianya dokumen klasifikasi kebakaran	%	100	100	100,00%	100,00	96,79	96,79%

Untuk mendukung capaian kinerja pada Program Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase kapasitas penanganan kebakaran pada WMK. Indikator ini dihitung dengan cara membandingkan (jumlah bangunan pemadam, personil dan mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter) yang ada dengan jumlah kebutuhan (jumlah bangunan pemadam, personil dan mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter) pada WMK. Realisasi persentase kapasitas penanganan kebakaran pada WMK pada tahun 2019 sebesar 32,88% dari target sebesar 42,81% dengan capaian kinerja sebesar 76,79%. Capaian tidak memenuhi target yang telah ditetapkan disebabkan karena masih minimnya personil, masih terbatasnya jumlah kendaraan pemadam dan

masih kurangnya pos pemadam kebakaran. Pada Program Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran terdapat 9 (sembilan) kegiatan dalam program ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan semua kinerja dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari serapan anggarannya, dari semua kegiatan tersebut serapan anggarannya rata-rata sudah melebihi dari 95 %.

A.2 Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Pemadam Kebakaran)

Tabel 3.1.5b

Target dan Realisasi Program Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran Tahun 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan						575,55	564,14	98,02%
	Persentase capaian waktu dalam penanggulangan kebakaran di permukiman	%	53,00	55,26	104,26%			
Pengamanan Hari RAYA/Kegiatan Keagamaan/Olahraga, Hari Jadi Kota Cilegon dan Hari Besar Nasional	Tersedianya mamin dan honorarium	jenis	3	3	100,00%	92,99	90,28	97,09%
Siaga Tim Penanggulangan Kebakaran	Terlaksananya makan minum 1 x 24 jam	orang	58	58	100,00%	279,97	279,64	99,88%
Diklat / Kursus Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Diklat/kursus Pemadam Kebakaran	orang	11	10	92,03%	62,70	57,70	92,03%
Workshop Penyelamatan dan Evakuasi dari Beda Ketinggian	Terlaksananya Workshop Penyelamatan dan Evakuasi dari Beda Ketinggian	orang	20	20	100,00%	29,61	29,61	100,00%
Peningkatan kompetensi anggota pemadam kebakaran	Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi water rescue	kegiatan	1	1	96,94%	110,28	106,90	96,94%

Pada Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase capaian waktu dalam penanggulangan kebakaran di permukiman. Indikator ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap (sejak diterimanya informasi/laporan kebakaran dan unit sampai ke lokasi dan siap memberikan layanan) kurang dari atau sama dengan 15 menit dengan jumlah keseluruhan kasus kebakaran di pemukiman dikali 100 %. Pada tahun 2019 Dari 38 (tiga puluh delapan) kejadian kebakaran, ada sebanyak 21 (dua puluh satu) kejadian yang dapat tertangani dalam waktu tanggap dan ada 17 (tujuh belas) kejadian yang tertangani lebih dari waktu tanggap.

Kejadian Kebakaran dlm Waktu Tanggap (< 15 menit)		Kejadian Kebakaran dlm Waktu Tanggap (> 15 menit)	
Kecamatan	Kejadian	Kecamatan	Kejadian
Grgogol	-	Grgogol	5

Pulomerak	3	Pulomerak	-
Purwakarta	-	Purwakarta	4
Citangkil	2	Citangkil	1
Ciwandan	1	Ciwandan	1
Jombang	9	Jombang	-
Cibeber	4	Cibeber	1
Cilegon	2	Cilegon	3
Luar Cilegon	-	Luar Cilegon (Kramatwatu)	2
Jumlah	21	Jumlah	17

Maka realisasi kinerja indikator diperoleh dari hasil pembagian 21 kejadian yang tertangani dalam waktu tanggap dibagi total 38 kejadian dikali 100% diperoleh 55,26%. Target kinerja indikator Persentase capaian waktu dalam penanggulangan kebakaran di permukiman tahun 2019 sebesar 53%. Maka capaian realisasi persentase capaian waktu dalam penanggulangan kebakaran di permukiman tahun 2019 sebesar 104,26%.

Pada Program Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan terdapat 5 (lima) kegiatan dalam program ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan semua kinerja dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari serapan anggarannya, dari semua kegiatan tersebut serapan anggarannya sudah melebihi dari 80%.

A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)

Tabel 3.1.5c

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN)						3.484,74	3.222,88	92,49%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	90,00	100,00	111,11%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	90,00	72,37	80,41%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	90,00	79,07	87,86%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	90,00	68,14	75,71%			

B.1. PERMASALAHAN DAN SOLUSI (Dinas Pemadam Kebakaran)**B.1a Permasalahan**

1. Masih adanya kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu lebih dari 15 (lima belas) menit, yaitu sebesar 44,73%. Kebakaran banyak terjadi pada lahan/kebun. (belum memenuhi standar pelayanan SPM)
2. Pada program pengendalian operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan, khusus tindakan penyelamatan masih belum optimal dilakukan.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran. Beberapa kasus kebakaran yang terjadi adalah merupakan akibat kelalaian, ketidaktahuan ataupun kecerobohan masyarakat, misalnya karena lupa mematikan kompor, membiarkan kompor menyala saat meninggalkan rumah, membiarkan peralatan elektronik tetap tertancap di saklar, dll

B.1b Solusi

1. Upaya untuk memenuhi target kinerja indikator persentase kapasitas penanganan kebakaran pada WMK yaitu dengan memenuhi kebutuhan infrastruktur di dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Seperti membangun pos pemadam kebakaran pada daerah-daerah rawan kebakaran, pengadaan dan ketersediaan peralatan pemadam kebakaran yang andal, pengadaan kendaraan pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas keandalan anggota pemadam kebakaran, pemasangan hidrant kota secara merata dan tersebar khususnya pada daerah-daerah rawan kebakaran, keandalan bangunan gedung yang ada di Kota Cilegon.
2. Untuk mengoptimalkan tindakan penyelamatannya sendiri hal yang pertama dilakukan adalah dengan peningkatan kapasitas keandalan anggota penyelamatan (*rescue*) itu sendiri, kemudian memenuhi kelengkapan peralatan pendukungnya yang andal berdasarkan potensi kecelakaan yang mungkin terjadi.
3. Melakukan sosialisasi secara intensif dan terus menerus tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran, melalui media cetak, elektronik maupun melalui tatap muka langsung. Serta membentuk Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) atau Forum Komunikasi sebagai partisipasi masyarakat dalam hal mengatasi ancaman bahaya kebakaran dan bagian dari pelayanan pemadaman serta dapat memberikan informasi kejadian kebakaran ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan melakukan pemadaman dini sebelum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan datang ke lokasi kebakaran.

A.4 Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah (Satpol PP)

Tabel 3.1.5d

Target dan Realisasi Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah						632,16	560,55	88,67%
	Cakupan penegakan peraturan daerah	%	100	100	100,00%			
Sosialisasi Penyuluhan Perda dan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan Perda dan Perundang Undangan	Perda	3	3	100,00%	77,12	76,55	99,26%
Pembinaan dan Pelatihan Personil Anti Huru Hara	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Anti Huru Hara	Kegiatan	24	22	91,67%	60,00	55,10	91,83%
Peningkatan Kapasitas PPNS	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPNS	Kegiatan	6	6	100,00%	41,35	40,44	97,79%
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan lainnya	Terlaksananya Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang Undangan	Kegiatan	55	55	100,00%	453,69	388,46	85,62%

Dari empat kegiatan yang teradapat dalam Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah, tiga diantaranya nilai capaian kinerjanya 100% dan satu kegiatan yang nilai capaian kinerjanya 91,67% dengan nilai serapan anggaran kesemuanya yang diatas 80%. Dukungan anggaran yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk dalam Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah. Untuk kegiatan Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang Undangan Lainnya meski capaian kinerjanya sangat baik namun nilai serapan anggarannya hanya sebesar 85,62 %. Belum maksimalnya kegiatan yustisi pada tahun 2019 menjadi alasan kurang maksimalnya serapan anggaran kegiatan Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang Undangan Lainnya.

A.5 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP)

Tabel 3.1.5e

Target dan Realisasi Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum						883,74	704,32	79,70%
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota	%	100,0	100,0	100,00%			
	Rasio Personil Satpol PP per Jumlah 10.000 Penduduk	per 10.000 penduduk	9,9	9,9	100,00%			
Operasional Patroli Protokol dan Jalan Lingkar Selatan	Terlaksananya Operasional Patroli Protokol, Jalan Lingkar Selatan dan RTH/Taman Kota	Bulan	12	12	100,00%	60,00	58,75	97,92%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pengendalian Ketentraman Ketertiban Masyarakat Kota Cilegon	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kegiatan	96	66	68,75%	505,00	352,96	69,89%
Pembinaan Fisik, Mental dan Spiritual Anggota Satpol PP	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental dan Spiritual Anggota Satpol PP	Kegiatan	37	34	91,89%	238,68	217,28	91,03%
Pengamanan Kegiatan Khusus	Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Khusus / Tertentu	Kegiatan	14	14	100,00%	80,06	75,33	94,09%

Dari empat kegiatan yang masuk dalam Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagian besar capaian kinerjanya diatas 90%. Dengan kekuatan pleton anggota sebanyak 4 (empat) pleton menambah tingkat kuantitas serta efektivitas kegiatan patroli rutin di lapangan. Dukungan anggaran yang cukup juga menjadi faktor pendukung tercapainya target kinerja Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Namun untuk kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Cilegon dari target 96 (sembilan puluh enam) kegiatan pada tahun 2019 tercapai 71 (tujuh puluh satu) kegiatan sehingga diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 73,96 %. Selain itu nilai serapan anggaran juga belum maksimal dimana dari target yang rencanakan sebesar Rp. 505.000.000,- hanya terserap sebesar Rp. 352.958.500,- sehingga diperoleh nilai capaian anggaran sebesar 69,89 %. Hal ini dikarenakan untuk pelaksanaan kegiatan insidental dan pengamanan aksi unjuk rasa yang merupakan bagian dari kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Cilegon disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan yang ada saat itu. Selain itu keterlambatan pengurusan proses pengadaan (lelang) juga mempengaruhi pada nilai capaian realisasi.

A.6 Program Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)

Tabel 3.1.5f

Target dan Realisasi Program Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Perlindungan Masyarakat						417,00	389,12	93,31%
	Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	per 10.000 penduduk	35	35	100,00%			
	Cakupan peningkatan kapasitas dan pembinaan anggota linmas Kota Cilegon	%	100	100	100,00%			
Bintek Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Publik	Terlaksananya Bintek Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Publik	Kegiatan	4	4	100,00%	60,00	60,00	100,00%
Revitalisasi Peran Serta/Tugas dan Fungsi Anggota Satlinmas	Terlaksananya Revitalisasi Peran Serta / Tugas dan Fungsi Anggota Satlinmas	Bulan	12	11	91,67%	357,00	329,12	92,19%

Dari 2 (dua) kegiatan yang masuk dalam program Program Perlindungan Masyarakat kesemuanya besar capaian kinerjanya diatas 80%. Meskipun dari segi realisasi

anggarannya tidak 100% namun nilai penyerapannya sudah diatas 80%. Tidak adanya kegiatan dan tidak terserapnya anggaran kegiatan pada bulan januari dan beberapa faktor lainnya menjadi penyebab kurang maksimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan Revitalisasi Peran Serta Tugas dan Fungsi Anggota Satlinmas. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan capaian kinerjanya baik atau tercapai sesuai target.

A.7 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Satpol PP)

Tabel 3.1.5g

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Satpol PP)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)						5.287,08	5.127,86	96,99%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	90,00	100,00	111,11%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	90,00	88,70	98,56%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	80,00	89,04	111,30%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	90,00	96,99	107,77%			

B.2. PERMASALAHAN DAN SOLUSI (Dinas Satpol PP)

B.2a Permasalahan

1. Pelaksanaan kinerja Satpol PP belum didukung oleh sarana prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaannya belum optimal;
2. Penindakan penanganan masalah sosial dan keamanan wilayah belum tertangani secara komprehensif, karena pelaksanaannya masih sektoral (belum terintegrasi);
3. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terkait regulasi tentang penegakan Peraturan Daerah.

B.2b Solusi

1. Meningkatkan sarana prasarana pendukung kinerja Satpol PP khususnya terkait kendaraan dalmas untuk kegiatan patroli dan pengendalian massa di lapangan serta alat komunikasi beserta repeater;
2. Meningkatkan koordinasi baik secara internal maupun eksternal (dengan perangkat daerah terkait) dalam penanganan masalah sosial dan keamanan wilayah;
3. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat terkait regulasi penegakan Perda.

3.1.6 Bidang Urusan Sosial

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial

Tabel 3.1.6a

Target dan Realisasi Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial						1.563,78	1.410,82	90,22%
	Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis keluarga dan masyarakat)	%	2,70	7,74	286,67%			
	Presentasi anak yang mendapatkan layanan dan rehabilitasi sosial diluar panti	%	17,80	15,28	85,84%			
	Presentase lanjut usia terlanter yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti	%	13,30	45,79	344,29%			
Penanganan bagi ODGJ	terlaksananya Penanganan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa	Kegiatan	1	1	100,00%	357,70	332,83	93,05%
Hari Lanjut Usia Nasional	Terlaksananya Kegiatan Hari Lanjut usia nasional	Kegiatan	1	1	100,00%	44,93	34,82	77,49%
Bantuan sembako bagi Lansia	Terlaksananya Bantuan Sembako Bagi Lansia	orang	120	120	100,00%	128,62	120,70	93,84%
Penanganan anjal, Gepeng dan WPS	Terlaksananya kegiatan Penanganan Anjal, Gepeng dan WPS	Kegiatan	3	3	100,00%	182,69	127,12	69,58%
Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas	Orang	30	30	100,00%	70,30	66,49	94,58%
Pengelolaan Pondok Sosial	Terlaksananya pengelolaan Pondok Sosial	Kegiatan	1	1	100,00%	370,78	331,68	89,45%
Pembinaan dan peningkatan kapasitas PMKS	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas PMKS	orang	252	150	59,52%	148,70	146,05	98,22%
Rehabilitasi Sosial Anak di Luar Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Anak Luar Panti	Kegiatan	1	1	100,00%	113,51	110,22	97,10%
Sosialisasi Adopsi anak	Terlaksananya Sosialisasi Adopsi Anak	Orang	120	120	100,00%	34,55	29,93	86,65%
Lomba kreativitas anak	Terlaksananya Lomba Kreativitas Anak	Kegiatan	1	1	100,00%	112,01	110,98	99,08%

Pada Program *Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial* terdapat empat indikator program yaitu :

- *Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis keluarga dan masyarakat)*

Pada Tahun 2019 Indikator Pada Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis keluarga dan masyarakat), dari target 2,7% dapat direalisasikan 7,74% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 281,70 %

Adapun keberhasilan pencapaian indikator program ini merupakan bentuk sinergisitas antara Pusat, Provinsi, dan Daerah, Penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan rehabilitasi di luar panti sebanyak 110 orang terhadap jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang ada sebanyak 1.421 orang.

Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti

$$= \frac{110}{1421} \times 100 \%$$

$$= 7,74 \%$$

$$\text{Capaian kinerja tahun 2019} = (7,6/2,1) \times 100\% = 286,70\%$$

Rincian bantuan bagi penyandang disabilitas sebagai berikut :

NO	Sumber	Jumlah
1	APBN	3 orang
2	APBD Provinsi	77 orang
3	APBD Kota	30 orang
	Jumlah	110 orang

- ***Presentasi anak yang mendapatkan layanan dan rehabilitasi sosial diluar panti***

adapun pada tahun 2019 jumlah anak yang mendapatkan layanan dan rehabilitasi social diluar panti sebanyak 392 anak terhadap Jumlah anak keseluruhan yang seharusnya mendapatkan bantuan sebanyak 2.566 anak.

Indikator Pada Presentasi anak yang mendapatkan layanan dan rehabilitasi sosial diluar panti, dari target 17,8% dapat direalisasikan 15,28% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 85,82 %.

Presentase anak terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti

$$= \frac{392}{2.566} \times 100 \%$$

$$= 15,28\%$$

$$\text{Capaian kinerja tahun 2019} = (15,28/17,8) \times 100\% = 85,82\%$$

Keberhasilan pencapaian indikator program ini merupakan bentuk sinergisitas antara Pusat, Provinsi, dan Daerah dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada anak – anak rentan yang memerlukan perlindungan khusus (Anak jalanan/anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial)

Rincian rehabilitasi anak sebagai berikut :

NO	Sumber	Jumlah
1	APBD Provinsi	200 orang
2	APBD Kota	192 orang
	Jumlah	392 orang

Indikator ini di dukung oleh kegiatan Rehabilitasi Sosial anak diluar panti dan Sosialisasi Adopsi Anak.

- ***Presentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti***

Indikator ini mengukur jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan sosial diluar panti terhadap jumlah lanjut usia terlantar. Pada tahun 2019 melalui Dinas Sosial jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dari luar panti sebanyak 539 orang terhadap jumlah keseluruhan lanjut usia terlantar yang seharusnya mendapatkan pelayanan sosial di luar panti sebanyak 1.177 orang

Indikator Pada Presentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti, dari target 13,3% dapat direalisasikan 45,79% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 344,32 %

$$\begin{aligned} \text{Presentase LU terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti} \\ &= \frac{539}{1.177} \times 100 \% \\ &= 45,79 \% \end{aligned}$$

$$\text{Capaian kinerja tahun 2019} = (45,79/13,3) \times 100\% = 344,32\%$$

Keberhasilan ketercapaian indikator program ini merupakan bentuk sinergisitas antara Pusat, Provinsi, dan Daerah dalam memberikan bantuan khusus masyarakat Kota Cilegon bagi seseorang telah mencapai usia 60 tahun keatas untuk mendapatkan penyuluhan sosial, bimbingan, konseling, bantuan, santunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia atas.

Rincian sebagai berikut :

NO	SUMBER	JUMLAH
1	APBN	46 orang
2	APBD Provinsi	375 orang
3	APBD KOTA	118 orang
Jumlah		539 orang

- ***Presentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis keluarga dan masyarakat)***

Pencapaian kinerja melalui Dinas Sosial dalam mentertibkan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Cilegon telah dilakukan dalam upaya memberikan rehabilitasi kepada PMKS, Adapun pada tahun 2019 Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis masyarakat) sebanyak 119 orang (gepeng)

Indikator Pada Presentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis keluarga dan masyarakat), dari target 100% dapat direalisasikan 100%, Faktor keberhasilan indikator ini didukung oleh adanya SATGAS anjal gepeng dan Wanita Pekerja Seks serta kerjasama dengan pihak kementerian perhubungan wilayah Banten dalam hal ini pengelola terminal.

Kegiatan pada program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial yang pencapaian kinerjanya dibawah 75 % adalah:

- Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kapasitas PMKS realisasi kinerja sebesar 59,52% dikarenakan yang semula direncanakan 252 peserta untuk 1 hari menjadi 150 peserta untuk 5 hari, hal ini dalam rangka optimalisasi meningkatkan kualitas pembinaan PMKS, akan tetapi capaian realisasi anggaran sebesar 98,22%.
- Pada Penanganan Anjal, Gepeng dan WPS realisasi keuangan sebesar 69,58% dikarenakan biaya operasional penanganan Anjal, Gepeng dan WPS disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, adapun untuk capaian kinerjanya 100%.

A.2 Program Pemberdayaan Sosial

Tabel 4.1.6b
Target dan Realisasi Program Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pemberdayaan Sosial						1.232,75	1.162,43	94,30%
	Persentase pemberdayaan PSKS	%	7,80	10,14	130,00%			
	Persentase (%) fakir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi produktif	%	1,10	2,24	203,73%			
	Persentase penerima bantuan pangan Non tunai	%	100	96	96,41%			
	Persentase (%) rumah tidak layak huni yang dibangun	%	17,10	19,43	113,63%			
Pemberdayaan karang taruna	Terlaksananya Bulan Bhakti Karang Taruna	Paket	325	325	100,00%	140,36	138,96	99,01%
	Terlaksananya Bimtek Manajemen KT	orang	43	43	100,00%			
	Terlaksananya Latihan dasar	orang	43	43	100,00%			
	Terlaksananya seleksi KT Berprestasi	keg	1	1	100,00%			
Pemberdayaan Keluarga Plasma melalui FCU	Terlaksananya Pengembangan Keluarga Plasma	orang	50	50	100,00%	35,95	35,79	99,57%
Pemberdayaan TKSK	Terlaksananya Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan bagi TKSK	Orang	8	8	100,00%	35,94	35,40	98,50%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Keluarga Kesejahteraan (LK3)	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Dini Kekerasan Terhadap Anak	Orang	86	86	100,00%	51,74	51,74	100,00%
	Terlaksananya pelayanan mobil LK3 di CFD	Kegiatan	2	2	100,00%			
Pemberdayaan Organisasi Sosial	Terlaksananya Jambore LKSA	Orang	50	50	100,00%	100,00	97,90	97,90%
Pemberdayaan PSKS	Terlaksananya Bimbingan Teknis PSKS	Orang	50	50	100,00%	64,47	63,41	98,36%
Pemberdayaan Ekonomi Produktif	Terlaksananya Bimbingan Motivasi KUBE	Kelompok	33	33	100,00%	173,40	148,53	85,66%
Peningkatan Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN)	Kegiatan	1	1	100,00%	91,45	88,95	97,26%
Pembinaan Veteran dan keluarga veteran serta pejuang kemerdekaan	Terlaksananya Kegiatan Jaminan Veteran dan Keluarga Veteran serta Pejuang Kemerdekaan	Kegiatan	1	1	100,00%	21,26	20,21	95,03%
Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Terlaksananya Sosialisasi BPNT	orang	48	48	100,00%	243,82	211,56	86,77%
Pendampingan rehabilitasi Sosial RTLH	Keluarga masyarakat miskin yang akan mengajukan usulan bantuan RS-RTLH untuk tahun 2019	Bulan	12	12	100,00%	38,11	36,15	94,85%
Pendampingan CCSR	Terlaksananya Pendampingan Lembaga CCSR	Bulan	12	12	100,00%	236,25	233,83	98,97%
Program Pemberdayaan Sosial						274,24	273,14	99,60%
Penyusunan Data sektoral Bidang Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Penyusunan Data Bidang Kesejahteraan Sosial	Dokumen	3	3	100,00%	274,24	273,14	99,60%

Pada **Program Pemberdayaan Sosial** terdapat 4 (empat) indikator program yaitu :

- **Persentase pemberdayaan PSKS**

Indikator keberhasilan ini untuk mengukur sejauh mana tingkat pemberdayaan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Adapun pada tahun 2019 Jumlah PSKS yang dibina sebanyak 329 Orang terhadap jumlah PSKS seluruhnya yang ada di Kota Cilegon sebanyak 3.245 orang.

Adapun capaian indikator Persentase pemberdayaan PSKS, dari target 7,8 % dapat direalisasikan 1014% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 130 %

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pemberdayaan PSKS} &= \frac{\text{pemberdayaan PSKS yang dibina}}{\text{jumlah PSKS seluruhnya}} \times 100\% \\
 &= (329 / 3245) \times 100\% = 10,14\%
 \end{aligned}$$

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya sinergisitas kerjasama antara Pusat, Provinsi dan Daerah yaitu dengan melalui kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, Pemberdayaan keluarga plasma melalui FCU, Pemberdayaan TKSK, Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Keluarga Kesejahteraan (LK3), Pemberdayaan Organisasi Sosial, Pemberdayaan PSKS, Pembinaan Veteran dan keluarga veteran serta pejuang kemerdekaan dan Pendampingan CCSR.

- ***Persentase (%) fakir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi produktif***

Pada tahun 2019 Jumlah fakir miskin yg menerima pemberdayaan ekonomi produktif sebanyak 200 orang terhadap Jumlah fakir miskin yang seharusnya menerima pemberdayaan ekonomi produktif sebanyak 8.926 orang.

Indikator Persentase (%) fakir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi produktif dari target 1,1 % dapat direalisasikan 2,24% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 203,70 %

Persentase (%) FM yang menerima pem. ekonomi produktif

= $\frac{\text{Jumlah FM yg menerima pem. ekonomi produktif}}{\text{Jumlah FM yg seharusnya menerima pem. Ekonomi produktif}} \times 100 \%$

Jumlah FM yg seharusnya menerima pem. Ekonomi produktif

= $(200/8926) \times 100\% = 2,241\%$

Capaian realisasi tahun 2019 = $(2,241/1,1) \times 100 = 203,70 \%$

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya sinergisitas kerjasama antara Provinsi dan Daerah yaitu dengan melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan kegiatan bimbingan lanjutan bagi KUBE yang sudah terbentuk.

- ***Presentase penerima bantuan pangan Non tunai.***

Indikator ini untuk menghitung sejauh mana tingkat keberhasilan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai kepada penerima manfaat sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi kesenjangan, Adapun pada tahun 2019 Jumlah penerima bantuan pangan non tunai sebanyak 9.503 Keluarga Penerima Manfaat terhadap Jumlah masyarakat miskin sebanyak 9.857 Keluarga Penerima Manfaat.

Indikator Presentase penerima bantuan pangan non tunai, dari target 100% dapat direalisasikan 96,409% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 96,41 %

Presentase penerima bantuan pangan Non tunai

= $\frac{\text{Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai}}{\text{jumlah masyarakat miskin}} \times 100 \%$

jumlah masyarakat miskin

= $(9503/9857) \times 100\% = 96,41 \%$

Sebanyak 354 Keluarga Penerima Manfaat tidak terealisasi dikarenakan faktor ekonomi penerima manfaat sudah meningkat, tidak ditemukan, pindah dan meninggal.

- Persentase (%) rumah tidak layak huni yang dibangun.**

Indikator ini untuk menghitung sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendapatkan bantuan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 102 unit terhadap jumlah rumah tidak layak huni yang seharusnya mendapat bantuan sebanyak 585 unit.

Persentase (%) rumah tidak layak huni yang dibangun, dari target 17,1% dapat direalisasikan 19,43% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 113,62 %

Persentase (%) rumah tidak layak huni yang dibangun

$$= \frac{\text{Jumlah RTLH yang dibangun}}{\text{jumlah RTLH yang seharusnya mendapat bantuan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{102}{585} \times 100\% = 19,43 \%$$

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{19,43}{17,1} \times 100 = 113,62\%$$

JUMLAH RTLH YANG DI BANGUN

No	Sumber Data	Jumlah
1	DPW KEL	72 unit
2	Baznas	12 unit
3	CCSR	18 unit
	Jumlah	102 unit

Keberhasilan Indikator ini merupakan bentuk sinergisitas antara program Baznas, CCSR, dengan dinas sosial melalui kegiatan Pendampingan Rehabilitasi Sosial RTLH.

A.3 Program Perlindungan Jaminan Sosial

Tabel 3.1.6c

Target dan Realisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Perlindungan Jaminan Sosial						1.740,56	1.439,75	82,72%
	Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100,00	100,00	100,00%			
	Presentase Fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	%	73,00	80,11	109,74%			
	Presentase masyarakat yang menerima santunan kematian	%	100,00	100,00	100,00%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Presentase orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar sakit yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00%			
Buffer Stock	Terlaksananya penyediaan buffer stock	paket	4.000	2.000	50,00%	726,70	643,13	88,50%
Pemantapan KSB	Terlaksananya pemantapan KSB	orang	30	30	100,00%	36,00	36,00	100,00%
Pelatihan Tagana	Terlaksananya pelatihan TAGANA	orang	30	30	100,00%	162,43	157,62	97,04%
Pelayanan Orang Terlantar Dalam Perjalanan	Terlaksananya pelayanan bagi OT dalam perjalanan	orang	300	99	33,00%	126,83	61,12	48,19%
Pelayanan bagi Orang Terlantar Sakit	Terlaksananya pelayanan bagi orang terlantar sakit	orang	15	11	73,33%	102,11	37,32	36,55%
Pendampingan Program Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM)	Terlaksananya program JSCM	bulan/9 Orang	12	12	100,00%	306,00	301,63	98,57%
Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya pendampingan PKH	bulan/19 Orang	12	12	100,00%	68,27	65,38	95,76%
Pendampingan Program Santunan Kematian bagi Masyarakat Kota Cilegon yang Beresiko Sosial	Terlaksananya pendampingan Pendmpingan program santunan kematian bagi masuyarakat kota Cilegon beresiko tinggi	bulan	12	12	100,00%	43,03	27,01	62,78%
Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Jamsosda	Terlaksananya pendampingan penerima manfaat progtam Jamsosda	bulan/18 orang	12	12	100,00%	24,90	22,25	89,35%
Pelayanan Pemberian Rekomendasi PBI dan Pengaktifan BPJS Kelas 3 (Keadaan Darurat)	Jumlah rekomendasi PBI APBD	KK	260	304	116,92%	21,95	21,73	98,98%
Pelayanan Pemakaman Jenazah Terlantar	Jumlah jenazah terlantar	orang	25	15	60,00%	122,36	66,57	54,41%

Pada Program ***Program Perlindungan Jaminan Sosial*** terdapat empat indikator program yaitu :

- **Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar**

Penanganan korban bencana khususnya Kota Cilegon pada tahun 2019 sebanyak 2.439 jiwa dalam hal ini Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan instansi terkait terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelesaikan penanganan korban bencana dalam kebutuhan dasar.

Indikator Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar, dari target 100% dapat direalisasikan 100%.

Faktor keberhasilan didukung adanya Kampung Siaga Bencana di 3 Lokasi (Kec. Ciwandan, Kec. Cibeber dan Kec. Pulomerak), Tersedianya buffer stock dalam rangka pemenuhan kebutuhan selama masa tanggap darurat, tersedianya Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang terlatih.

- **Presentase Fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat**

Pada Tahun 2019 jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat sebanyak 8.318 jiwa terhadap jumlah keseluruhan fakir miskin sebanyak 10.383 jiwa.

Indikator Pada Presentase Fakir miskin, dari target 73% dapat direalisasikan 80,11% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 109,74 %

$$\begin{aligned}\text{Presentase Fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat} &= \frac{8.318}{10.383} \times 100 \% \\ &= 80,11 \%\end{aligned}$$

$$\text{Capaian kinerja} = (80,11/73) \times 100 = 109,74 \%$$

program-program yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi. Adapun rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	APBN	4.914
2	Jamsosratu	APBD I	1.718
3	Jaminan Sosial Cilegon Mandiri	APBD Kota	1.686
	JUMLAH		8.318

Keberhasilan Indikator ini merupakan bentuk sinergisitas antara Pusat, Provinsi, dan Daerah melalui kegiatan Pendampingan Program Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM), Pendampingan dan pembinaan penerima manfaat program Keluarga Harapan (PKH), Pendampingan program santunan kematian bagi masyarakat Kota Cilegon beresiko tinggi dan Pendampingan dan pembinaan penerima manfaat program Jamsosda.

- ***Presentase masyarakat yang menerima santunan kematian***

Pada tahun 2019 masyarakat Kota Cilegon yang mendapatkan layanan santunan kematian yang di berikan bantuan oleh Dinas Sosial sebanyak 270 jiwa dari jumlah masyarakat yang mengajukan santunan kematian sebanyak 270 jiwa.

Indikator Pada Presentase masyarakat yang menerima santunan kematian, dari target 100% dapat direalisasikan 100% keberhasilan ini didukung oleh kegiatan Pendampingan program santunan kematian bagi masyarakat Kota Cilegon yang beresiko Sosial.

- ***Presentase orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar sakit yang ditangani***

Pada tahun 2019 masyarakat yang mendapatkan layanan orang terlantar dalam perjalanan, pelayanan pemakaman jenazah terlantar maupun pelayanan orang terlantar sakit yang di tangani oleh Dinas Sosial sebanyak 125 orang.

Indikator Pada Presentase orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar sakit yang ditangani, dari target 100% dapat direalisasikan 100%

Rincian jumlah layanan tersebut sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah
1	Pelayanan orang terlantar dalam perjalanan	99 orang
2	Pelayanan pemakaman jenazah terlantar	15 orang
3	Pelayanan orang terlantar sakit	11 orang
Jumlah		125 orang

% orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar sakit yang ditangani = Jumlah orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar sakit yang ditangani dibagi jumlah pengaduan orang terlantar dalam perjalanan, jenazah dikali 100 %

$$\text{Realisasi kinerja} = (125/125) \times 100\% = 100\%$$

Keberhasilan pencapaian indikator ini bentuk sinergisitas melalui kerja sama antara Dinas Sosial, ASDP merak, Kepolisian, RSUD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, PT KAI dan Baznas Kota Cilegon dalam penanganan orang terlantar dalam perjalanan dan orang terlantar sakit diluar anggaran yang tersedia pada Dinas Sosial Kota Cilegon.

Adapun capaian Indikator ini yang didukung melalui kegiatan pada Dinas Sosial antara lain Kegiatan Pelayanan Orang terlantar dalam perjalanan, kegiatan Pelayanan bagi orang terlantar sakit, dan kegiatan Pelayanan pemakaman jenazah terlantar.

Kegiatan pada program Perlindungan Jaminan Sosial yang pencapaian kerjanya dibawah 75 % adalah:

- Kegiatan orang terlantar dalam perjalanan capaian anggaran sebesar 48,19% dikarenakan pelayanan yang diberikan sesuai dengan jumlah pengaduan orang terlantar yaitu 99 orang dari target 300 orang, akan tetapi secara kinerja capaian pelayanan orang terlantar 100%.
- Kegiatan Pelayanan Bagi Orang Terlantar Sakit capaian anggaran sebesar 36,55%, dikarenakan jumlah pelayanan orang terlantar sakit tahun 2019 sebanyak 11 orang dari target 15 orang, untuk biaya disesuaikan dengan real cost dari rumah sakit, akan tetapi secara kinerja capaian pelayanan orang terlantar sakit 100%.
- Pendampingan Kegiatan santunan kematian bagi masyarakat Kota Cilegon beresiko tinggi, capaian anggaran sebesar 62,78% terdapat efisiensi keuangan pada belanja untuk petugas survey dari 500 survey yang direalisasikan 270 survey sesuai pengajuan bantuan santunan kematian bagi masyarakat Kota Cilegon yang berisiko sosial akan tetapi secara kinerja capaian pelayanan santunan kematian bagi masyarakat Kota Cilegon 100%.

Kegiatan Pelayanan Pemakaman Jenazah terlantar capaian anggaran sebesar 54,41%, dikarenakan pada tahun 2019 jumlah pelayanan pemakaman jenazah terlantar sebanyak 15 jenazah dari target 25 orang, akan tetapi secara kinerja capaian pelayanan pemakaman jenazah terlantar bagi Kota Cilegon 100%

A.4 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Sosial)

Tabel 3.1.6d

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Sosial)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS SOSIAL)						2.442,43	2.164,81	88,63%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84,00	85,24	101,48%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	98,50	100,00	101,52%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	90,00	99,44	110,49%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	90,00	79,28	88,09%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Belum ditetapkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dari kemensos, dimana sistem ini sangat membantu dalam mengidentifikasi masyarakat miskin dan rentan miskin.
2. Belum adanya peraturan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut dari Permensos no.9 tahun 2018 pasal 6
3. Belum optimal penanganan PMKS secara komprehensif, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan.
4. Masih kurangnya jumlah pekerja sosial (relawan/non ASN) dan penyuluh sosial (ASN) yang tersertifikasi dalam pendampingan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

B.2 Solusi

1. Perlunya koordinasi yang intensif tentang percepatan pemanfaatan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan Dinas Sosial Provinsi Banten dan Kemensos guna mempermudah pelayanan terhadap masyarakat secara terpadu baik untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.
2. Penyusunan Peraturan Walikota mengenai penetapan SPM bidang Sosial
3. Perlunya sinergitas antara OPD terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Kemenag) dalam penanganan PMKS
4. Perlunya pengiriman pelatihan untuk pekerja sosial (relawan/non ASN) dan penyuluh sosial (ASN) di Badan pelatihan dari Kementerian sosial agar memiliki sertifikat.

3.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

3.2.1 Bidang Urusan Tenaga Kerja

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program peningkatan kualitas, produktivitas, serta kompetensi tenaga kerja

Tabel 3.2.1a

Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas serta Kompetensi Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program peningkatan kualitas, produktivitas, serta kompetensi tenaga kerja						4.665,18	4.019,50	86,16%
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	80,00	67,70	84,63%			
	Persentase tenaga kerja peserta pelatihan yang mendapatkan kesempatan pemagangan, diterima bekerja di perusahaan, maupun berwirausaha.	%	50,00	25,30	50,60%			
	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	45,00	23,30	51,78%			
Peningkatan Pelayanan Antar Kerja Menuju Management ISO 9001:2015	Terlaksananya Peningkatan Informasi Pasar Kerja Menuju Managemen ISO 9001:2015	Sertifikasi	1	1	90,90%	44,20	40,18	90,90%
Pelatihan menjahit	Terciptanya tenaga kerja dalam bidang menjahit	Orang	40	40	100,00%	113,35	112,98	99,68%
Pelatihan forklift	Terlaksananya Pelatihan Forklif	Orang	40	40	100,00%	240,65	223,45	92,85%
Pelatihan komputer	Terlaksananya Pelatihan Komputer	Orang	40	40	100,00%	117,75	117,56	99,84%
Pelatihan Alat Berat	Terlaksananya Pelatihan Operator Alat Berat	Orang	20	20	100,00%	117,85	113,36	96,19%
Pelatihan Otomotif Sepeda Motor	Terlaksananya Pelatihan Otomotif Sepeda Motor	Orang	20	20	100,00%	84,95	84,12	99,03%
Pelatihan Otomotif Mobil	Terlaksananya Pelatihan Otomotif Mobil	Orang	20	20	100,00%	86,15	85,64	99,40%
Pelatihan Menjahit Untuk Menunjang P2WKSS	Terciptanya Tenaga kerja terampil dalam Bidang Menjahit Keluarga P2WKSS	Orang	50	50	100,00%	151,95	150,32	98,93%
Pendidikan dan Pelatihan Security	Tercipta Tenaga Kerja Terampil di Bidang Security	Orang	100	100	100,00%	462,35	357,56	77,33%
Pelatihan Pertukangan Kayu dan Alumunium	Terlaksananya Pelatihan Pertukangan Kayu dan Alumunium	Orang	20	20	100,00%	80,65	80,26	99,52%
Pelatihan Body Repaers	Terlaksananya Pelatihan Body Repairs	Orang	20	20	100,00%	86,16	85,37	99,08%
Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat dalam Bidang Usaha Mandiri	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat dalam Bidang Usaha Mandiri	Peserta	96	96	100,00%	192,70	184,95	95,98%
Monitoring Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya Monitoring dan Lowongan Penempatan Tenaga Kerja	Perusahaan	30	30	100,00%	11,65	10,29	88,28%
Pelatihan Las Tingkat Lanjut (FCAW/GTAW)	Terciptanya tenaga kerja dalam bidang LAS FCAW	Orang	20	20	100,00%	178,55	168,73	94,50%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Sosialisasi TKI Ke Luar Negeri	Terlaksananya Sosialisasi TKI Ke Luar Negeri	Peserta	400	400	100,00%	113,20	111,48	98,48%
Pameran Bursa Kerja	Terlaksananya Pameran Bursa Kerja	Event	1	1	96,98%	210,35	203,99	96,98%
Pemagangan Lulusan BLK	Terlaksananya kegiatan pemagangan lulusan pelatihan BLK	Orang	79	20	25,32%	72,50	17,72	24,44%
Pelatihan Las SMAW	Terciptanya tenaga kerja dalam bidang LAS SMAW	Orang	20	20	100,00%	167,83	167,28	99,67%
Pengembangan BLK	Terlaksananya Review Pengembangan BLK	Dokumen	1	1	100,00%	1.109,94	866,03	78,02%
Pelatihan Kelistrikan	Terlaksananya kegiatan pelatihan kelistrikan	Orang	20	20	100,00%	99,15	94,61	95,42%
Pembinaan dan Monitoring Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Perusahaan	30	30	100,00%	17,35	17,35	100,00%
Penyuluhan Bimbingan Jabatan	Terlaksananya Penyuluhan Bimbingan Jabatan	Peserta	135	135	100,00%	25,35	25,35	100,00%
Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja terhadap bursa kerja khusus	Bursa kerja khusus	10	10	100,00%	10,85	10,35	95,39%
	Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja terhadap Perusahaan / Pemberi kerja	Perusahaan	20	20	100,00%			
Pelatihan Tata Rias Pengantin	Terciptanya tenaga kerja terampil dalam bidang Tata rias Pengantin	Orang	25	25	100,00%	75,35	74,09	98,32%
Pelatihan Tata Rias Rambut	Terciptanya tenaga kerja terampil dalam bidang tata rias rambut	Orang	25	25	100,00%	75,35	74,55	98,94%
Pelatihan MC / Public Speaking	Terciptanya Tenaga Kerja Terampil di Bidang MC / Publik Speaking	Orang	20	20	100,00%	65,35	64,90	99,31%
Pelatihan Bordir	Terciptanya Tenaga Kerja Terampil di Bidang Bordir	Orang	21	21	100,00%	70,35	69,74	99,13%
Pelatihan Sulam Pita	Terciptanya Tenaga Kerja Terampil di Bidang Sulam Pita	Orang	25	25	100,00%	75,35	74,67	99,09%
Pelatihan Welding Inspector	Terlaksananya Pelatihan Welding Inspector BNSP	Orang	10	10	100,00%	170,00	170,00	100,00%
Sertifikasi Kompetensi Kerja	Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja	Kegiatan	5	1	20,00%	288,00	114,30	39,69%
Identifikasi Pengangguran	Terlaksananya Identifikasi Angka Pengangguran	Dokumen	1	1	100,00%	50,00	48,35	96,69%
Program peningkatan kualitas, produktivitas, serta kompetensi tenaga kerja (UPTD Latihan Kerja)						50,00	48,00	96,00%
Pemeliharaan Alat dan Mesin Las	Terlaksananya Pemeliharaan Alat dan Mesin Pelatihan Las	Mesin	8	8	100,00%	50,00	48,00	96,00%

Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas serta Kompetensi Tenaga Kerja merupakan program Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dengan tujuan membina dan melatih tenaga-tenaga pencari kerja agar berdaya saing dalam memasuki dunia kerja serta mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja / Perusahaan. Sasaran dari program ini adalah menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan berbasis kompetensi dan berwawasan kewirausahaan mandiri serta menempatkan ke perusahaan-perusahaan yang berada di cilegon. Pembangunan Program

peningkatan kualitas, produktivitas serta kompetensi tenaga kerja dilaksanakan melalui pelayanan masyarakat pada bidang pelatihan penempatan ketenagakerjaan. Pelatihan penempatan tenaga kerja meliputi pelatihan kerja berbasis kompetensi dan berwawasan kewirausahaan mandiri.

Program peningkatan kualitas produktivitas serta kompetensi tenaga kerja memiliki indikator pembangunan dimana berdasarkan tabel diatas capaian kinerja indikator program sebagai berikut :

A. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Indikator ini menunjukkan jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi terhadap jumlah pendaftar pelatihan yang mengikuti proses seleksi. Adapun target yang ingin dicapai sebesar 80%, sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar 67.7%, hal ini dikarenakan jumlah pelatihan tidak sebanding jumlah peserta yang mendaftar dan mengikuti seleksi sehingga komposisi pelatihan sangat sedikit terutama pelatihan forklift dan pelatihan las. Dari data UPTD Latihan kerja pada tahun 2019, total jumlah peserta yang mendaftar pelatihan sebanyak 2254 orang, selanjutnya mengikuti seleksi sebanyak 901 orang yang terbagi menjadi 2 kriteria anggaran yaitu anggaran APBD 499 orang dan anggaran tugas pembantuan 452. Sedangkan yang mendapatkan pelatihan sebanyak 610 orang yang sumber dananya terdiri dari APBD dan anggaran tugas pembantuan dari pusat. Adapun pelatihan yang sumber dana APBD terbagi dalam 13 kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta 290 orang sedangkan yang sumber dana nya dari tugas pembantuan sebanyak 6 pelatihan dengan peserta sebanyak 320 orang.

Dalam mencapai kinerja yang sudah ditetapkan, Indikator di atas didukung oleh beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan Menjahit

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan menjahit. Serapan anggaran sebesar Rp.98.852.200,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- persentase serapan anggaran 98.85% dengan capaian kinerja sebanyak 20 orang dari target kinerja sebanyak 20 orang. Pelatihan menjahit bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pencari kerja dalam bidang menjahit, agar dapat bersaing di dunia industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia industri mengenai kualitas lulusan BLK.

2. Pelatihan Forklift

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan forklift. Serapan anggaran sebesar Rp.248.178.930,- dari pagu anggaran sebesar Rp.

250.000.000,- persentase serapan anggaran 99.27% dengan capaian kinerja sebanyak 40 orang dari target kinerja sebanyak 40 orang. Pelatihan Forklif bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pencari kerja dalam bidang pengoprasian forklif, agar dapat bersaing di dunia industri, namun masih perlu ditunjang dengan sertifikasi K3 yang dikeluarkan oleh PJK3 dan Surat Ijin Operator yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia industri dan siap bekerja.

3. Pelatihan Komputer

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan komputer. Serapan anggaran sebesar Rp.297.425.350,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- persentase serapan anggaran 99.14% dengan capaian kinerja sebanyak 100 orang dari target kinerja sebanyak 100 orang. Pelatihan Komputer bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pencari kerja dalam bidang Komputer, agar dapat bersaing di dunia industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia industri mengenai kualitas lulusan BLK.

4. Pelatihan Alat Berat

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan alat berat. Serapan anggaran sebesar Rp.247.665.800,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- persentase serapan anggaran 99.07% dengan capaian kinerja sebanyak 40 orang dari target kinerja sebanyak 40 orang. Pelatihan Alat Berat bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pencari kerja dalam bidang pengoprasian Alat Berat, agar dapat bersaing di dunia industri, namun masih perlu ditunjang dengan sertifikasi K3 yang dikeluarkan oleh PJK3 dan Surat Ijin Operator yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia industri dan siap bekerja

5. Pelatihan Otomotif Sepeda Motor

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan otomotif sepeda motor. Serapan anggaran sebesar Rp.98.875.750,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- persentase serapan anggaran 98.88% dengan capaian kinerja sebanyak 20 orang dari target kinerja sebanyak 20 orang. Pelatihan Otomotif Sepeda Motor bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pencari kerja dalam bidang Otomotif Sepeda Motor, agar dapat bersaing di dunia industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia industri mengenai kualitas lulusan BLK.

6. Pelatihan Otomotif Mobil

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan otomotif mobil. Serapan anggaran sebesar Rp.97.376.510,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- persentase serapan anggaran 76.59% dengan capaian kinerja sebanyak 20 orang dari target kinerja sebanyak 20 orang. Pelatihan Otomotif Mobil bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pencari kerja dalam bidang otomotif mobil, agar dapat bersaing di dunia industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia industri mengenai kualitas lulusan BLK.

7. Pelatihan Body Repair

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan body repaers. Serapan anggaran sebesar Rp.117.640.435,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 124.000.000,- persentase serapan anggaran 94.87% dengan capaian kinerja sebanyak 20 orang dari target kinerja sebanyak 20 orang. Pelatihan Body repaers bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pencari kerja dalam bidang body repaers, agar dapat bersaing di dunia industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia industri mengenai kualitas lulusan BLK.

8. Pelatihan Pertukangan Kayu dan Alumunium

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan Pertukangan Kayu dan Alumunium. Serapan anggaran sebesar Rp.114.878.060,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- persentase serapan anggaran 76.59% dengan realisasi kinerja sebanyak 10 orang dari target kinerja sebanyak 20 orang. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2018 Pelatihan pertukangan kayu dan alumunium peminatnya berkurang. Pelatihan Pertukangan Kayu dan Alumunium bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pencari kerja dalam bidang pertukangan, agar dapat bersaing di dunia industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia industri mengenai kualitas lulusan BLK.

9. Pelatihan Las Smaw

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan las SMAW. Serapan anggaran sebesar Rp.316.016.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.

320.000.000,- persentase serapan anggaran 98.76% dengan capaian kinerja sebanyak 40 orang dari target kinerja sebanyak 40 orang. Pelatihan Las SMAW bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pencari kerja dalam bidang pengelasan, agar dapat bersaing di dunia industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia industri mengenai kualitas lulusan BLK.

10. Pelatihan Las Tingkat Lanjut FCAW

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan las tingkat lanjut. Serapan anggaran sebesar Rp.295.318.580,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- persentase serapan anggaran 98.44% dengan capaian kinerja sebanyak 40 orang dari target kinerja sebanyak 40 orang. Pelatihan Las Tingkat Lanjut bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pencari kerja dalam bidang pengelasan las FCAW/GTAW, agar dapat bersaing di dunia industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia industri mengenai kualitas lulusan BLK.

11. Pelatihan Kelistrikan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan kelistrikan. Serapan anggaran sebesar Rp.149.732.450,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- persentase serapan anggaran 99.82% dengan capaian kinerja sebanyak 20 orang dari target kinerja sebanyak 20 orang. Pelatihan kelistrikan bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pencari kerja dalam bidang teknik listrik, agar dapat bersaing di dunia industri maupun dunia usaha, namun masih perlu ditunjang dengan Uji Kompetensi Profesi (UJK) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia industri mengenai kualitas lulusan BLK.

12. Pelatihan Welding Inspector

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan welding inspector, persentase serapan anggaran sebesar 100% dari pagu sebesar Rp. 170.000.000, untuk capaian kinerja pun sepenuhnya terlaksana dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang sesuai dengan target kinerja kegiatan tersebut.

13. Sertifikasi Kompetensi Kerja

Pada kegiatan sertifikasi kompetensi kerja merupakan kegiatan untuk memberikan legalitas dalam bentuk sertifikat kepada para pekerja sehingga mempunyai kompetensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk capaian kinerja kegiatan ini terealisasi 20% dan capaian anggaran sebesar Rp. 39.69% dari target kinerja yang diharapkan sebesar 100%. Pada kegiatan ini mempunyai 5 output kegiatan yaitu sertifikasi Kemenaker (forklift) sebanyak 40 orang dari target sebesar 40 orang. Untuk sertifikasi BNSP (bidang las, otomotif sepeda motor, kelistrikan dan komputer) tidak terealisasi dikarenakan jumlah peserta kurang dari kuota sebanyak 64 orang, hal ini dikarenakan pendaftar hanya sebanyak 20 orang dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang sertifikasi kompetensi keahlian, sertifikasi ini merupakan modal yang harus dimiliki calon pekerja. sehingga pendaftar yang masuk belum bisa memenuhi kuota standar minimum peserta dalam kegiatan sertifikasi kompetensi kerja.

Kegiatan sertifikasi kompetensi kerja bertujuan untuk mensertifikasi dan melisensi pencari kerja / peserta dan alumni pelatihan forklift BLK yang sudah dibekali kompetensi kerja diuji secara terukur (kompeten atau belum kompeten) pada tahun 2019 kegiatan sertifikasi kompetensi kerja untuk sertifikasi lisensi kemenaker pelatihan forklift serapan anggarannya sebesar Rp. 114.300.000 dari target anggaran Rp. 288.000.000,- dengan prosentase capaian 39.69%, Pengadaan sarana workshop

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan alat/mesin pelatihan. Serapan anggaran sebesar Rp.788.810.000 ,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 820.000.000,- persentase serapan anggaran 96.19%. Pengadaan sarana workshop bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pelatihan pada UPTD BLK, walaupun masih banyak kekurangan.

14. Pengembangan BLK

Kegiatan Pengembangan BLK memiliki beberapa output yaitu:

- Terlaksananya Review (DED) Pengembangan BLK, dengan target 1 Dokumen
- Terlaksananya Renovasi Musholla BLK, dengan target 1 Gedung
- Terlaksananya Pemasangan Paving Blok Jalan BLK, dengan target 1 Jalan
- Terlaksananya Pembangunan hanggar alat berat, dengan target 1 Bangunan
- Terlaksananya Pembangunan Gapura dengan target 1 bangunan
- Terlaksananya Pembangunan Pagar Depan dengan target 1 Bangunan

Serapan anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 866.031.060 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.109.944.000 dengan persentase capaian sebesar 78.02%, hal ini dikarenakan pembangunan pagar depan tidak dapat dilaksanakan mengingat efektif waktu penganggaran APBDP hanya 1,5 bulan dengan anggaran Rp. 172.314.000, sedangkan lama pekerjaan pembangunan pagar memerlukan waktu 2 bulan. Selain itu untuk kegiatan pemasangan paving blok adanya penawaran yang jauh lebih rendah dari

pagu yang ada dalam DPA, akan tetapi memiliki kualitas yang sama sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 40.370.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 402.065.000 .

B. Indikator Persentase tenaga kerja peserta pelatihan yang mendapatkan kesempatan pemagangan, diterima bekerja di perusahaan, maupun berwirausaha dengan target 50% dengan realisasi tahun 2019 sebesar 25.3% sehingga capaian kinerjanya 50,6%, hal ini dikarenakan dari target 79 peserta pelatihan yang akan dimagangkan hanya 20 orang yang mendapatkan kesempatan pemagangan di 7 perusahaan, hal tersebut dikarenakan masih kurang responsifnya perusahaan terhadap peserta magang serta adanya peserta pemagangan yang menolak / belum siap untuk dimagangkan bekerja di perusahaan tertentu yang sudah dipilhkan.

Dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan, Indikator persentase tenaga peserta pelatihan yang mendapatkan kesempatan pemagangan bekerja di perusahaan maupun berwirausaha, didukung oleh kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Pelatihan Menjahit untuk menunjang (P2WKSS)

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Menjahit untuk menunjang P2WKSS dengan peserta 30 orang. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 150.318.000,- dari target 151.950.000,- persentase capaian anggaran sebesar 98.93%.

2. Kegiatan Pelatihan Security

Pemerintah kota cilegon melalui dinas tenaga kerja melakukan kegiatan pelatihan security dalam meningkatkan keahlian keamanan yang dikerjasamakan dengan Polda Banten memiliki target kinerja sebanyak 100 orang dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 orang, sedangkan untuk capaian anggaran sebesar Rp. 357.556.000,- dari pagu sebesar Rp. 462.350.000,- sedangkan realisasinya 77.33%, adapun dalam pelaksanaan kegiatan ini mengingat waktu pelaksanaan kegiatan pada bulan November dan Desember 2019 hanya dilaksanakan selama 12 hari setiap angkatan dari 18 hari yang ditentukan, sehingga ada belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan yang tidak terserap.

3. Kegiatan Pemagangan Lulusan BLK

Output dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan pemagangan Lulusan Pelatihan BLK dengan target peserta yang magang di perusahaan sebanyak 79 orang. Adapun serapan anggaran kegiatan ini Rp. 17.719.000,- dari target anggaran Rp. 72.500.000,- Persentase anggaran tercapai 24.44%, hal ini dikarenakan realisasi dari target peserta pelatihan yang

dimagangkan hanya 20 orang dari target 79 orang yang dimagangkan, hal tersebut dikarenakan masih kurang responsifnya perusahaan terhadap peserta magang, serta kualifikasi dari peserta magang yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan untuk belanja uang saku peserta sebanyak 59 orang tidak terserap.

4. Kegiatan Sosialisasi TKI ke Luar Negeri

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi TKI Ke Luar Negeri dengan target kinerja 210 peserta. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 111.480.000,- dari Rp. 113.200.000,- persentase capaian anggaran 98.48%.

5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Dalam Bidang Usaha Mandiri

Output dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Dalam Bidang Usaha Mandiri terhadap 96 peserta . Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 184.950.000 dari target anggaran Rp. 192.700.000,- persentase capaian anggaran 95.98% . Dari Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan calon wirausaha baru

6. Kegiatan Identifikasi Pengangguran

Output dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Identifikasi angka pengangguran sehingga didapatkan rekomendasi dan laporan hasil identifikasi pengangguran sebagai acuan untuk pengurangan angka pengangguran. Adapun serapan anggaran dari kegiatan ini Rp. 48.347.466, dari pagu Rp. 50.000.000 dengan presentase 96.69%

7. Kegiatan Pelatihan Tata Rias Pengantin

Output dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tata Rias pengantin dengan target kinerja tercapai sepenuhnya 25 peserta. Adapun serapan anggarannya Rp. 74.087.500 dari pagu sebesar Rp. 75.350.000 dengan persentase capaian anggaran 98.32%

8. Kegiatan Pelatihan Tata Rias Rambut

Output dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tata Rias Rambut dengan peserta 25 orang. Adapun serapan anggarannya Rp. 74.550.500 dari pagu sebesar Rp. 75.350.000 dengan persentase capaian anggaran 98.94%

9. Kegiatan Pelatihan Bordir

Output dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Bordir dengan jumlah peserta 21 orang. Adapun serapan anggarannya Rp. 69.735.800 dari pagu sebesar Rp. 70.350.000 dengan persentase capaian anggaran 99.13%

10. Kegiatan Pelatihan Sulam Pita

Output dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Sulam Pita dengan target kinerja sepenuhnya tercapai 25 orang peserta. Adapun serapan anggarannya Rp. 74.666.250 dari pagu sebesar Rp. 70.350.000 dengan persentase capaian anggaran 99.09%

11. Kegiatan Pelatihan MC/Public Speaking

Output dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Mc/Public Speaking dengan target kinerja sepenuhnya tercapai 20 peserta. Adapun serapan anggarannya Rp. 64.897.000 dari pagu sebesar Rp. 65.350.000 dengan persentase capaian anggaran 99.31%

C. Indikator Besaran pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2019 dari data pencari kerja yang terdaftar sebanyak 9735 orang yang ditempatkan sebanyak 2301 di 102 perusahaan. Dari data tersebut diperoleh realisasi kinerja nya sebesar 23.6% dari target yang ditetapkan 45%, sehingga capaian kinerjanya 52%. Tidak tercapainya realisasi kinerja tersebut disebabkan peningkatan jumlah pencari kerja yang terus meningkat sedangkan jumlah kesempatan kerja yang terbatas, serta masih adanya perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan lowongan kerja maupun penempatannya.

Untuk mencapai Indikator tersebut dibuatlah program kegiatan diantaranya:

1. Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja

Output dari kegiatan ini Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja sebanyak 20 perusahaan dan 10 Bursa kerja khusus. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 10.3540.000 dari target Rp. 10.850.000 Dengan pesentase capaian anggaran sebesar 95.39%. Dari kegiatan ini diharapkan semua perusahaan dan bursa kerja khusus (BKK) memahami dan menjalankan mekanisme penempatan tenaga kerja sesuai peraturan yang berlaku / ada. Agar dapat membantu pemerintah dalam hal pengurangan pengangguran.

2. Kegiatan Monitoring lowongan dan penempatan tenaga kerja

Output dari Kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan sebanyak 30 perusahaan. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 10.285.000,- dari target Rp. 11.650.000,- dengan persentase capaian anggaran 88.28%. Dari kegiatan tersebut juga diperoleh data lowongan kerja sebanyak 2123 dan penempatan tenaga kerja sebanyak 2301 orang. Dari data penempatan tersebut di peroleh pesrsentase sebesar 23.6% itu merupakan perbandingan antara jumlah penempatan 2301 orang terhadap pencari kerja yang terdaftar sebanyak 9735.

3. Kegiatan Pameran Bursa Kerja

Output dari Kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Pameran Bursa Kerja sebanyak 1 Event. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 203.990.000,- dari Rp. 210.350.000,- persentase capaian anggaran 96.98%. Dalam kegiatan tersebut ada 40 perusahaan yang mengikuti pameran bursa kerja, dengan jumlah lowongan sebanyak 1013 lowongan. Berdasarkan hasil evaluasi bahwa kegiatan pameran Bursa Kerja ini tidak terlalu efektif untuk penyerapan pencari kerja kota cilegon, karena kegiatan ini bersifat terbuka untuk pencari kerja seluruh indonesia. Oleh karenanya kegiatan ini kita rubah konsepnya yaitu pameran bursa kerja mini yaitu memfasilitasi perusahaan-perusahaan untuk melakukan rekrut di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

4. Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan sebanyak 135 peserta dari 3 sekolah. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 25.350.000 dari target sebesar Rp. 25.350.000. Dalam kegiatan dijelaskan kepada siswa-siswi sekolah yang merupakan calon pencari kerja tentang jabatan-jabatan yang ada di perusahaan. Dan juga dijelaskan tentang kesempatan kerja / lowongan kerja yang ada di perusahaan di kota cilegon. Agar para calon pencari kerja ini mengetahui peluang kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan Kota Cilegon dan juga untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

5. Monitoring dan Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Monitoring dan Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 17.350.000 dari target sebesar Rp. 17.350.000 persentase capaian anggaran 100% Dari kegiatan ada sebanyak 30 perusahaan pengguna TKA yang kita monitoring dan kita lakukan pembinaan. Dari kegiatan ini diperoleh data jumlah Tenaga Kerja Asing yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sebanyak 1246 TKA. Dari kegiatan ini diharapkan agar perusahaan pengguna TKA dalam hal penggunaan TKA sesuai dengan aturan.

6. Kegiatan Peningkatan Informasi Pasar kerja Menuju Manajemen ISO 9001:2015

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Peningkatan Informasi Pasar Kerja Menuju Manajemen ISO 9001:2015 sebanyak 1 kegiatan/sertifikasi ISO. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 40.180.000,- dari target Rp. 44.200.000,- dengan persentase capaian anggaran 90.90%. Dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan

standar pelayanan antar kerja dalam hal melayani pencari kerja maupun perusahaan yang mengacu kepada berstandar manajemen ISO 9001:2015.

Diharapkan dengan adanya program kegiatan tersebut di atas, secara keseluruhan dapat mempengaruhi besaran jumlah pencari kerja yang dapat terserap atau ditempatkan di perusahaan sehingga dapat memenuhi capaian kinerja yang ditargetkan.

A.2 Program peningkatan hubungan industrial

Tabel 3.2.1b
Target dan Realisasi Program Peningkatan Hubungan Industrial
Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program peningkatan hubungan industrial						979,68	706,67	72,13%
	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	70,00	88,00	125,71%			
	Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan	%	60,00	77,90	129,83%			
	Proporsi perusahaan yg telah memiliki Sarana Hubungan Industrial	%	12,00	21,80	181,67%			
Pembinaan Persyaratan Kerja	Terlaksananya Pembinaan Persyaratan Kerja	Kegiatan	1	-	0,00%	52,20	0,00	0,00%
Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan	Terlaksananya Perumusan kebijakan ketenagakerjaan	Kegiatan	1	-	0,00%	50,00	0,00	0,00%
Sosialisasi Upah Kerja	Terlaksananya kegiatan sosialisasi upah kerja	Kegiatan	1	1	100,00%	36,33	36,33	100,00%
Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Berserikat dan Berkumpul	Terlaksananya kegiatan pembinaan tentang hak-hak tenaga kerja dalam berserikat dan berkumpul	Orang	4.000	4.000	100,00%	322,32	271,29	84,17%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Perselisihan	Peserta	150	-	0,00%	104,48	0,00	0,00%
Perumusan UMK dan UMSK	Terumuskannya Rekomendasi UMK dan UMSK	Kegiatan	1	1	100,00%	364,36	351,53	96,48%
Penanganan Demo/Unjuk Rasa	Terlaksananya Pengamanan Demo / Unjuk Rasa	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	47,52	95,04%

Hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pengusaha, karyawan dan pemerintah, sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Sasaran Pelayanan pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon kepada dunia usaha/industri yang sedang memiliki konflik dengan pekerja. Bentuk peranan pemerintah dalam hubungan industrial yaitu menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan perselisihan Hubungan Industrial dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pekerja dan perusahaan, maka Bidang Hubungan Industrial perlu adanya langkah-langkah antisipasi yang meliputi Pembinaan dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, memberdayakan pekerja serikat pekerja, mensosialisasikan pembentukan dan pembinaan LKS Bipartit, Memberdayakan peran LKS Tripartit, mengoptimalkan fungsi Dewan pengupahan kota, dan mengupayakan agar semua tenaga kerja mengikuti program jamsostek serta mengupayakan agar perusahaan yang mempekerjakan 10 orang wajib memiliki peraturan perusahaan dan memiliki SP/SB agar membuat Perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan pekerja.

Keberhasilan pembangunan pada program Hubungan Industrial melalui tiga indikator, adapun penjelasan dari tabel diatas sebagai berikut :

A. Indikator Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dicapai sebesar 88% dari target sebesar 70%, tingginya capaian didasarkan dari 50 kasus yang tercatat, 44 kasus sudah diselesaikan, serta bertambahnya sumber daya manusia atau mediator hubungan industrial yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena pada tahun sebelumnya petugas mediator sebanyak 1 orang yang menjadi 3 orang pada tahun 2019.

B. Capaian Indikator Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan sebesar 77,90% dari target sebesar 60%, tinggi capaian ini di dasarkan atas tingginya perusahaan yang mendaftarkan buruh / pekerja sebagai anggota BPJS. Data Keanggotaan BPJS pekerja sampai dengan tahun 2019 sebanyak 70.207 orang yang tersebar di 1866 perusahaan dan 1291 perusahaan yang melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, sedangkan untuk jumlah buruh yang tercatat pada tahun 2019 sebanyak 90.166 orang, sehingga ada 19.959 orang yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

C. Indikator Proporsi perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial

Untuk pencapaian indikator proporsi perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial dari target yang direncanakan dalam RPJMD 12% atau 155 perusahaan memiliki tingkat realisasi kinerja sebesar 21.8% atau 281 perusahaan, faktor yang mendorong capaian ini melebihi target dikarenakan meningkatnya frekuensi pembinaan persyaratan kerja ke perusahaan-perusahaan di Kota Cilegon sehingga perusahaan-perusahaan tersebut sadar dan paham akan pentingnya memiliki sarana hubungan industrial.

Pada tahun 2019 Program Peningkatan Hubungan Industrial prosentase rata-rata serapan belanjanya 56.67%, hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- Kegiatan Pembinaan Persyaratan Kerja dan Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan, output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan persyaratan kerja dengan tujuan meningkatnya jumlah sarana hubungan industrial yang dimiliki oleh perusahaan di kota cilegon, adapun kegiatan yang dialokasikan APBD sebesar 52.200.000 dengan tingkat capaian realisasi 0%,- kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan sudah terbentuknya Forum HRD di 50 perusahaan sehingga memudahkan dalam berkomunikasi efektif dengan perusahaan dan kesadaran perusahaan dalam melakukan kewajibannya.
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan, hasil dari kegiatan ini adalah memberikan Pertimbangan, Saran dan Pendapat kepada Walikota dan Pihak terkait dalam Penyusunan Kebijakan dan Pemecahan Masalah Ketenagakerjaan di Wilayah Kota Cilegon, kegiatan ini dianggarkan APBD sebesar Rp. 52.200.000,- dengan tingkat capaian anggaran 0%,- adapun kegiatan ini tidak dilaksanakan karena telah dilakukan saran pertimbangan pendapat kepada walikota cilegon pada rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Kota Cilegon dalam kegiatan Perumusan UMK-UMSK sehingga anggaran dapat diefisiensi.
- Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, output dari kegiatan ini adalah Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kegiatan ini dibiayai APBD sebesar Rp. 104.480.000, dengan tingkat realisasi capaian sebesar 0%,- adapun target pada kegiatan ini terselenggaranya sosialisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 150 orang . Dengan berjalannya waktu kegiatan ini tidak dilaksanakan, karena berdasarkan hasil analisa kegiatan ini dapat dilaksanakan secara maksimal melalui pendekatan kepada perusahaan-perusahaan secara langsung dan lebih mengefektifkan dalam menyerap aspirasi perusahaan dan pekerja secara langsung, dimana terbukti penyelesaian perselisihan tahun 2018 yang semula 82% menjadi 88% di Tahun 2019.

Adapun kegiatan-kegiatan di Bidang Hubungan Industrial yang telah tercapai baik kinerja maupun serapan anggarannya adalah

1. Kegiatan Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Dalam Berserikat dan Berkumpul
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Dalam Berserikat dan Berkumpul sebanyak 1 Kegiatan. Adapun anggaran yang diserap sebesar Rp. 276.665.000,- dari target Rp. 287.715.000,- dan capaian serapan anggaran sebesar 84.17%. Dari Realisasi Kegiatan tersebut telah dilaksanakan Perayaan Mayday dalam rangka mengisi Hari Buruh di Pemkot

Cilegon, agar kerumunan massa dari pekerja/buruh terpusat di satu titik sehingga ketertiban dan keamanan di kota cilegon dapat terjaga.

2. Kegiatan Sosialisasi Upah Kerja

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi Upah kerja dengan target 130 orang perwakilan dari perusahaan di Kota Cilegon. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 58.125.000,- dari target Rp. 60.000.000,- dengan capaian anggaran sebesar 97%.

3. Kegiatan Perumusan Usulan UMK-UMSK

Output dari kegiatan ini adalah perumusan kebijakan dan perlindungan pengupahan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Permenaker nomor 15 tahun 2018 tentang upah minimum. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 311.135.000,- dari target Rp. 325.005.000 dengan capaian anggaran sebesar 96%, Keberhasilan ini disebabkan karena Dinas Tenaga Kerja sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan monitoring pengupahan ke beberapa perusahaan dan negoisasi yang intensif antara serikat dengan perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah, selain itu Dinas Tenaga Kerja dan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Kota Cilegon melakukan kunjungan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya dalam hal observasi UMK-UMSK, dari ke 3 upaya ini maka kegiatan perumusan UMK-UMSK dapat disepakati yang kemudian direkomendasikan kepada Gubernur Propinsi Banten untuk ditetapkan.

4. Kegiatan Penanganan Demo/Unjuk Rasa

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya penanganan demo dan unjuk rasa, adapun serapan anggaran dari kegiatan ini adalah Rp, 47.520.000 dari target anggaran Rp. 50.000.000,- Dari realisasi kegiatan tersebut telah dilaksanakan penyelesaian / penanganan demo / unjuk rasa baik dari instansi pemerintah Kota Cilegon (Disnaker Cilegon dan Pol PP) serta kepolisian sehingga terciptanya ketertiban dan keamanan dalam setiap aksi demo/unjuk rasa.

A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Tenaga Kerja)

Tabel 3.2.1c

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2019 (Dinas Tenaga Kerja)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS TENAGA KERJA)						3.357,18	3.081,20	91,78%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	95,00	77,70	81,79%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	95,00	56,00	58,95%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	95,00	95,00	100,00%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85,00	85,75	100,88%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Belum sebanding antara minat masyarakat yang mengikuti pelatihan dengan kuota peserta pelatihan yang ada, serta masih minim sarana prasarana workshop BLK.
2. Belum adanya analisa kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga kurangnya penyerapan lulusan blk di industri.
3. Masih minimnya jumlah SDM dalam memberikan pelayanan perselisihan antara pekerja dan perusahaan yang saat ini hanya memiliki 3 mediator untuk memberikan pelayanan ke 1.291 perusahaan yang ada di kota cilegon.
4. Masih minimnya sertifikasi ketenagakerjaan keahlian

B.2 Solusi

1. Dalam menyusun anggaran mendatang, anggaran akan di prioritaskan untuk peningkatan kualitas/kuantitas sarana prasarana atau infrastruktur pelatihan yang sesuai dengan standar lembaga pendidikan pelatihan
2. Perlu dilakukan analisa kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
3. Menambah jumlah SDM sehingga dapat mendukung terciptanya pembinaan dan pelayanan ketenagakerjaan yang optimal ke 1.291 perusahaan
4. Melakukan kegiatan sertifikasi keahlian bagi para pekerja

3.2.2 Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (DP3AKB)

Tabel 3.2.2a

Target dan Realisasi Program Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak						1.624,90	1.557,09	95,83%
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan, Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100,00	100,00	100,00%			
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100,00	100,00	100,00%			
	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100,00	100,00	100,00%			
	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	100,00	100,00	100,00%			
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100,00	100,00	100,00%			
	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	100,00	100,00	100,00%			
	Cakupan Korban KDRT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan	%	80,00	1,95	2,44%			
	Cakupan Penanganan Kasus KDRT	%	100,00	100,00	100,00%			
	Persentase ketersediaan elemen pendukung kota layak anak	%	40,00	40,00	100,00%			
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Rakor, Workshop PATBM	Orang	50	50	100,00%	80,00	79,94	99,93%
Penguatan Kelembagaan P3KC	Terlaksananya Rubrik Konsultasi keluarga, iklan layanan masyarakat, bintek penanganan korban kekerasan, pendampingan dan home visit	Bulan	12	12	100,00%	452,00	450,36	99,64%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	terhadap korban kekerasan, Terlaksananya kaji Banding UPT. PPA							
Peringatan Hari Anak Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Anak Tingkat Kota Cilegon	Orang	600	600	100,00%	100,00	99,68	99,68%
pengembangan Kota Layak Anak	Terlaksananya Rapat Gugus Tugas KLA dan Terbentuknya Forum Anak Tingkat kelurahan	Kegiatan	4	4	100,00%	293,70	291,32	99,19%
Peningkatan Perlindungan Perempuan	Terlaksananya Workshop PKDRT	Orang	50	50	100,00%	100,00	97,56	97,56%
Pembinaan dan Perlindungan Khusus Anak	Terlaksananya Destinasi Wisata Anak Berkebutuhan Khusus	Orang	75	75	100,00%	75,00	73,76	98,34%
Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan	Kasus	85	6	7,05%	50,00	0,86	1,72%
Pembinaan dan aplikasi KLA	Terealisasinya aplikasi KLA	Aplikasi KLA	1	1	100,00%	75,00	70,40	93,86%
Peningkatan forum anak	Terpilihnya duta anak	kegiatan	1	1	100,00%	50,00	49,88	99,76%
Regulasi KLA	Terbitnya Perda KLA	kegiatan	1	1	100,00%	100,00	97,49	97,49%
Peringatan Hari Anak Disabilitas	Terselenggaranya Peringatan Hari Disabilitas Tingkat Kota Cilegon	kegiatan	1	1	97,22%	100,00	97,22	97,22%
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan	Meningkatnya Pemahaman tentang pentingnya Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Industri	%	70	70	100,00%	75,00	74,47	99,30%
Perlindungan Perempuan dan Anak dari Perdagangan Orang	Terdokumentasinya Rencana Aksi Daerah (RAD) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Dokumen	1	1	100,00%	74,20	74,15	99,93%
Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (UPT Perlindungan Perempuan dan Anak)						35,00	34,35	98,14%
Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPT PPA)	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	orang	70	70	100,00%	35,00	34,35	98,14%

Pada **Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan** terhadap Perempuan dan Anak terdapat 9 (Sembilan) indikator program yaitu :

a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Pada tahun 2019 Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu sebanyak 153 pelaporan terhadap Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu sebanyak 153 Pelaporan, sehingga capaian Indikator kinerja sebesar 100% Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

Berikut adalah data sebaran jumlah pelapor berdasarkan domisili per kecamatan dan luar wilayah :

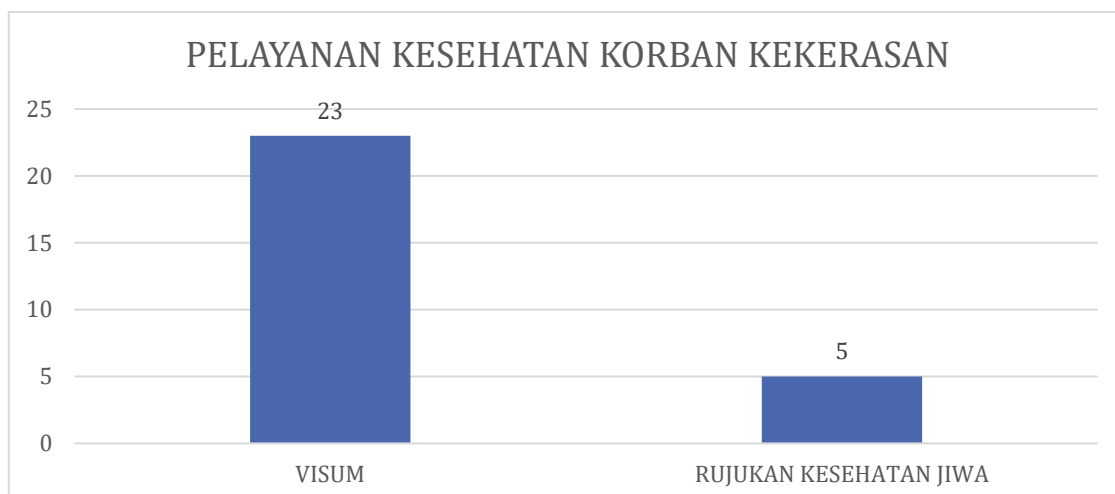
DATA PELAPOR KEKERASAN PER KECAMATAN				
KECAMATAN	JUMLAH	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	ANAK
CIBEBER	16	8	0	8
JOMBANG	38	19	2	17
CILEGON	17	10	2	5
CITANGKIL	21	14	1	6
CIWANDAN	4	3	0	1
PURWAKARTA	10	5	1	4
GROGOL	15	8	2	5
PULOMERAK	12	5	4	3
LUAR WILAYAH	20	7	3	10
TOTAL	153	79	15	59

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya dukungan melalui kegiatan pelayanan pendampingan dan Home Visite, sehingga sangat membantu dalam mendampingi dan menjangkau korban kekerasan perempuan dan anak, dilaksanakannya pelayanan pendampingan psikologis oleh tenaga ahli psikolog setiap hari kerja dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

b. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Pada tahun 2019 Jumlah korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTP/A) yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas pada kurun waktu tertentu sebanyak 28 kasus terhadap Jumlah seluruh korban KTP/A sebanyak 28 kasus. Adapun penanganannya sebagai berikut : yang datang ke Puskesmas sebanyak 23 pelayanan Visum et repertum di RSUD dan RSKM, dan 5 klien dengan rujukan kesehatan jiwa yaitu 2 dirujuk ke RS Soeharto Heerdjan, dan 3 konsultasi dengan psikiater, sehingga capaian realisasi 100 %.

Berikut adalah tampilan data dalam grafik:



Adapun kegiatan yang mendukung dalam capaian indikator antarlain: Dilaksanakannya kegiatan pelayanan pendampingan dan home visite, sehingga sangat membantu dalam mendampingi dan menjangkau korban kekerasan perempuan dan anak, Dilaksanakannya pelayanan pendampingan psikologis oleh tenaga ahli psikolog setiap hari kerja dan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan

c. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Pada tahun 2019 Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial sebanyak 153 orang . Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial sebanyak 153 orang, maka capaian realisasi 100 % dari target yang ditetapkan adalah 100 %.

Faktor keberhasilan dari indikator ini didukung melalui kegiatan Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPT PPA)

d. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pada tahun 2019 Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 23 kasus terhadap Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan 23 kasus maka capaian realisasi 100 % dari target yang ditetapkan adalah 100 %.

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya dukungan melalui kegiatan Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPT PPA), Peningkatan Perlindungan Perempuan, Pembinaan dan Perlindungan Khusus Anak dan Penguatan kelembagaan P3KC.

e. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Pada tahun 2019 Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum sebanyak 23 orang terhadap Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum sebanyak 23 orang maka capaian realisasi 100 % dari target yang ditetapkan adalah 100 %.

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya kegiatan Penguatan Kelembagaan P3KC dan Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPT PPA).

f. Cakupan Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Pada tahun 2019 Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan reintegrasi sosial adalah 153 orang dan korban kekerasan yang telah dipersatukan kembali ke keluarga adalah 153 orang, maka capaian realisasi 100 % dari target yang ditetapkan adalah 100%.

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya dukungan melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan P3KC, Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPT PPA) dan Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan.

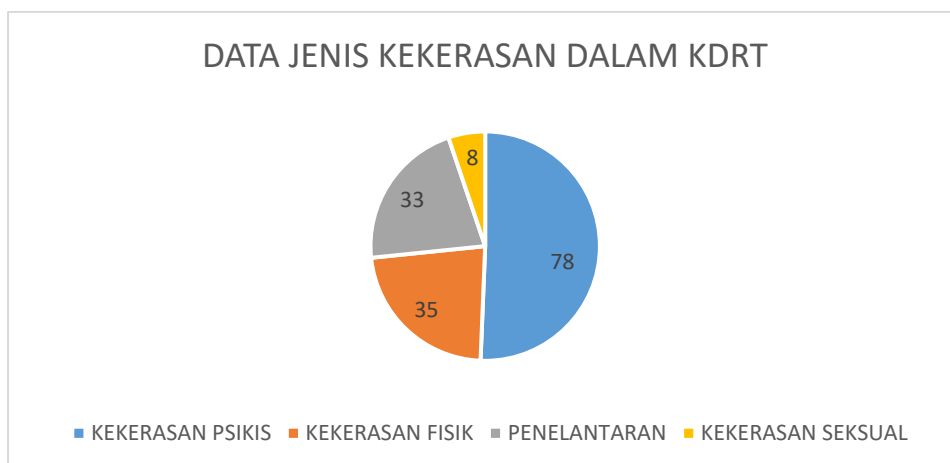
g. Cakupan Korban KDRT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan

Pada tahun 2019 jumlah korban KDRT 154 orang terhadap jumlah yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sebanyak 3 orang Maka capaian sebesar 1.95 % dari target 80% sehingga capaian indikator ini sebesar 2,44% adapun indikator ini tidak mencapai target dikarenakan ada kesalahan dalam perencanaan bantuan dari Provinsi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Capaian indikator ini dukungan oleh provinsi berupa pelatihan tata boga serta penyertaan bantuan alat – alat kebutuhan tata boga.

h. Cakupan Penanganan Kasus KDRT

Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melapor ke unit pelayanan terpadu sebanyak 154 orang terhadap jumlah Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani sebanyak 154 orang maka dapat direalisasikan 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Berikut adalah grafik kasus kekerasan dalam KDRT tahun 2019 di Kota Cilegon:



Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya dukungan melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan P3KC, Peningkatan Perlindungan Perempuan, Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan, Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPT PPA).

i. Persentase ketersediaan elemen pendukung kota layak anak

Pada Tahun 2019 pembentukan untuk ketersediaan elemen pendukung kota layak anak yang sudah terbentuk antara lain :

- Forum anak kecamatan 8 dan Forum Anak Kelurahan sebanyak 43
- Pembentukan Kecamatan ramah anak 1 kecamatan Cilegon
- Pembentukan Kelurahan ramah anak 3 kelurahan : kelurahan Ciwedus, Citangkil, Rawaarum.
- Pembentukan Raperda Pengembangan Kota Layak Anak.
- Pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang bersumber dari APBN
- Sekolah ramah anak yang sudah di SK kan melalui Dinas Pendidikan sebanyak 99 sekolah (PAUD, SD, SMP).

Dengan terpenuhinya elemen pendukung kota layak anak tahun 2019 Kota Cilegon berhasil mendapatkan **predikat penghargaan kota layak anak tingkat Madya** di tingkat Nasional.

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya dukungan melalui kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional, pengembangan Kota Layak Anak, Pembinaan dan Perlindungan Khusus Anak, Pembinaan dan aplikasi KLA, Peningkatan forum anak, Regulasi KLA.

A.2 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 3.2.2b

Target dan Realisasi Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan						2.879,97	2.807,34	97,48%
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan/atau berperan dalam program/kegiatan pemerintahan	%	49,60	39,60	79,84%			
	PKK Aktif (Rasio Jumlah PKK Aktif terhadap Jumlah PKK yang Ada)	Jumlah	52,00	52,00	100,00%			
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif	%	14,29	10,00	69,98%			
	Jumlah Organisasi Perempuan di Bina	Organisasi	39,00	39,00	100,00%			
Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis fasilitator PPRG	Orang	35	35	100,00%	60,00	48,90	81,50%
Gender dalam Pembangunan	Terselenggaranya kegiatan TOF (Training Of Fasilitator) PUG	Orang	50	50	100,00%	195,00	186,02	95,40%
Pelatihan Entrepreneurship untuk Perempuan	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Entrepreneurship untuk perempuan	Orang	280	280	100,00%	150,97	149,07	98,74%
Peningkatan Kualitas Keluarga dan Organisasi Perempuan	Terlaksananya kegiatan pelatihan sistem ketahanan keluarga,tersedianya sistem ketahanan keluarga	aplikasi	1	1	100,00%	190,00	185,88	97,83%
Peningkatan Peranan wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Terlaksananya Sosialisasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan P2WKSS.	Tahun	1	1	100,00%	550,00	545,01	99,09%
Pembinaan Peningkatan Organisasi Dharma wanita (DWP)	1. Terlaksananya pembinaan peningkatan organisasi dharma wanita (DWP)	Tahun	1	1	100,00%	250,00	245,95	98,38%
Pembinaan dan Pengembangan GOW	Terlaksananya Rapat Kerja GOW	tahun	1	1	100,00%	495,00	476,45	96,25%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga	terlaksananya kegiatan pertemuan rutin PKK Tingkat Kota Cilegon	Tahun	1	1	100,00%	700,00	688,05	98,29%
Pembinaan GSI	Terlaksananya refitalisasi GSI	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	46,14	92,27%
Peringatan Hari Besar Perempuan	Terselenggaranya peringatan Hari ibu dan Hari kartini	kegiatan	2	2	100,00%	100,00	98,21	98,21%
Pengembangan Industri Rumahan	Terlaksananya Sosialisasi Industri Rumahan, Terlaksananya Pelatihan Manajemen Keuangan	kecamatan	8	8	100,00%	139,00	137,66	99,04%

Pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdapat 5 (Lima) indikator program yaitu :

a. PKK aktif (rasio jumlah PKK aktif terhadap total jumlah PKK yang ada)

Pada tahun 2019 jumlah PKK aktif sebanyak 52 PKK terhadap Total jumlah PKK sebanyak 52 PKK maka capaian realisasi 100% dari target yang ditetapkan adalah 100 %

Faktor keberhasilan capaian indicator ini didukung melalui kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga, dalam rangka percepatan pembangunan untuk peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kota Cilegon.

No	Uraian kegiatan	Keterangan
1	Terlaksannya Pembinaan Rutin Anggota PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Cilegon dilaksanakan (10 kali Kegiatan) pada bulan : Januari, Februari, Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2019. Pesertanya sebanyak 150 Orang per kegiatan dari Anggota PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Cilegon	Pencapaian pelaksanaan kegiatan 100 %.
2	Terlaksannya Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK Kota Cilegon yang dilaksanakan di bulan Maret 2019, Pesertanya sebanyak 150 orang bertempat di Aula PKK Kota Cilegon	Pencapaian pelaksanaan kegiatan 100 %.
3	Terlaksannya Rapat Koordinasi PKK Kota Cilegon yang di ikuti Oleh 150 orang dari Anggota PKK Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 23 Juli 2019 bertempat di Aula PKK Kota Cilegon	Pencapaian pelaksanaan kegiatan 100 %.
4	Terlaksannya Pelaksanaan Lomba-lomba HKG PKK yang Kelurahan/ Kecamatan se- Kota Cilegon di laksanakan di bulan Februari 2019.	Pencapaian pelaksanaan kegiatan 100 %.
5	Terlaksannya Kegiatan Pengajian Rutin PKK Kota Cilegon yang dilaksanakan selama 10 bulan di Minggu ke 3 (Rabu) bertempat di Masjid Nurul Iman Pemda Kota Cilegon pesertanya dari PKK/Majlis Taklim dan Masyarakat sebanyak 150 Orang.	Pencapaian pelaksanaan kegiatan 100 %.
6	Terlaksannya Kegiatan Pelatihan Pokja I (Simulasi PAAR) yang pesertanya sebanyak 80 oranga dari Pokja I TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Cilegon	Pencapaian pelaksanaan kegiatan 100 %.
7	Terlaksannya Kegiatan Pelatihan Pokja II yang pesertanya sebanyak 80 oranga dari Pokja II TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Cilegon	Pencapaian pelaksanaan kegiatan 100 %.
8	Terlaksannya Kegiatan Pelatihan Pokja III (Hatinya PKK) yang pesertanya sebanyak 80 oranga dari Pokja III TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Cilegon	Pencapaian pelaksanaan kegiatan 100 %.
9	Terlaksannya Kegiatan Pelatihan Pokja IV (PHBS) yang pesertanya sebanyak 80 oranga dari Pokja IV TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Cilegon	Pencapaian pelaksanaan kegiatan 100 %.
10	Terlaksananya Kegiatan Harganas Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat, TP. PKK Kota Cilegon sifatnya menghadiri Peringatan Hari Keluarga yang diselenggaran di Manado pada Tanggal : 4,5,6 Juli 2019	Pencapaian pelaksanaan kegiatan 100 %.
11	Terlaksananya Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat, TP. PKK Kota Cilegon sifatnya menghadiri yang diselenggaran di Padang pada Tanggal : 24,25,26 Juli 2019	Pencapaian pelaksanaan kegiatan 100 %.
12	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas UP2K PKK yang dilaksanakan di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sebagai Juara I UP2K Tingkat Nasional tahun 2019 kegiatan ini di selenggarakan pada Tanggal : 13,14,15 November 2019	Pencapaian pelaksanaan kegiatan 100 %.
13	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Ibu Tingkat Kota Cilegon yang diselenggarakan di The Royale Krakatau pada Tanggal 19 Desember 2019 pesertanya dari PKK,DWP, Jalasenastri, Persit, Bhayangkari, dan Gabungan Organisasi Wanita se-Kota Cilegon sebanyak 200 orang	Pencapaian pelaksanaan kegiatan 100 %.



No	Uraian kegiatan	Keterangan
14	Terlaksananya Baksos Ramadhan dengan membagikan Paket Sembako sebanyak 150 Paket untuk Kaum Duafah di Lingkungan Ciwedus Kecamatan Cilegon – Kota Cilegon	Pencapaian pelaksanaan kegiatan 100 %.

b. Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintahan dan/atau berperan dalam program/kegiatan Pemerintah

Pada tahun 2019 Jumlah penduduk perempuan yang bekerja sebanyak 14.180 Perempuan terhadap Jumlah ASN Perempuan sebanyak 3.063 ASN di lembaga pemerintahan & 2550 kader Cilegon mandiri yang tersebar di 43 kelurahan, sehingga capaian Indikator Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintahan dan/atau berperan dalam program/kegiatan Pemerintah, dari target 49,6 % dapat direalisasikan 39,6 % sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 80,82 %.

Indikator ini didukung melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Organisasi Perempuan, Pembinaan Peningkatan Organisasi Dharma wanita (DWP), Gender dalam Pembangunan dan Pelatihan Entrepreneurship untuk Perempuan.

c. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Pada tahun 2019 Jumlah Perempuan di lembaga legislatif berjumlah 4 orang, dari jumlah anggota legislatif sebanyak 35 orang, Indikator Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif, dari target 14,29% dapat direalisasikan 10% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 69 %. Indikator ini dukungan melalui kegiatan Pelatihan Entrepreneurship untuk Perempuan dan Gender dalam Pembangunan.

d. Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina

Pada tahun 2019 jumlah organisasi perempuan yang dibina sebanyak 39 organisasi, terhadap 39 organisasi yang ada, maka capaian realisasi 100% dari target yang ditetapkan adalah 100 %, Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan GOW (Pelatihan membuat).

A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas PP, PA dan KB)

Tabel 3.2.2c

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas PP, PA dan KB)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS PP, PA DAN KB)						4.092,02	3.725,12	91,03%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100,00	100,00	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100,00	78,50	78,50%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100,00	89,14	89,14%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100,00	95,07	95,07%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Belum optimalnya OPD dan Instansi/Lembaga terkait yang tergabung di Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak melalui pembangunan yang peduli pada pemenuhan hak anak.
2. Kurangnya tenaga ahli (Psikolog, Pekerja Sosial) di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dan di PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) serta RP3 (Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan)
3. Belum optimalnya sarana prasarana Ramah Anak dalam rangka mewujudkan Cilegon Kota Layak Anak
4. Belum optimalnya OPD dan Lembaga terkait yang tergabung dalam POKJA Pengarusutamaan Gender dalam mendukung pembangunan yang responsive gender

B.2 Solusi

1. Meningkatkan Konsistensi dalam mengadakan rapat koordinasi kepada OPD, media massa dan dunia usaha tentang Kota Layak Anak
2. Memanfaatkan tenaga yang ada, dan perekrutan untuk mengisi tenaga baik TKK, THL, maupun PNS yang berkompeten
3. Meningkatkan Koordinasi dengan OPD yang melakukan infrastruktur guna mewujudkan Kota Layak Anak
4. Meningkatkan koordinasi POKJA Pengarusutamaan Gender secara berkesinambungan

3.2.3 Bidang Urusan Pangan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Konsumsi, Diversifikasi Dan Keamanan Pangan

Tabel 3.2.3a Realisasi Program Konsumsi, Diversifikasi Dan Keamanan Pangan 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Konsumsi, Diversifikasi Dan Keamanan Pangan						1.396,34	1.340,95	96,03%
	Peningkatan pencapaian tingkat konsumsi energi	%	88,30	88,21	99,90%			
	Peningkatan pencapaian tingkat konsumsi protein	%	100,00	113,70	113,70%			
	Prosentase tingkat minimal cadangan pangan pemerintah	%	100,00	68,70	68,70%			
	Tingkat pengawasan pangan segar asal tumbuhan	%	> 80	94	117,75%			
peningkatan konsumsi pangan	Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan ketahanan pangan di link. Sekolah	orang	120	120	100,00%	560,00	533,23	95,22%
	Terlaksananya dukungan keg. Buffer Stock tanaman (Dukungan keg. Kampung KB, Kota sehat, Lomba Toga, Hatinya PKK)	Btg	3	3	100,00%			
	Terlaksananya kegiatan Bimtek panganekaragaman konsumsi pangan non beras	Org	150	150	100,00%			
	Terlaksananya Penyusunan Pola Pangan Harapan	Org	51	51	100,00%			
	Terlaksananya dukungan Kegiatan (P2WKSS)	Kelurahan	2	2	100,00%			
	Terlaksananya bimtek pengolahan pangan lokal	Org	42	42	100,00%			
	Terlaksananya one day ni rice	Org	600	600	100,00%			
	Terlaksananya pembinaan B2SA pada kelompok masyarakat	Org	150	150	100,00%			
penganeekaragaman konsumsi pangan	- Terlaksananya Sosialisasi B2SA dan Lomba Cipta Menu B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal Tk. Kota Cilegon	orang	150	150	100,00%	668,34	650,49	97,33%
	Terlaksananya pembinaan KRPL	Org	100	100	100,00%			
	Terlaksananya pemberdayaan pekarangan sumber pangan	Org	150	150	100,00%			
	Terlaksananya HPS tingkat Nasional	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya bimtek pengolahan pangan lokal	Org	42	42	100,00%			
	Terlaksananya one day no rice	Org	600	600	100,00%			
	Terlaksananya pembinaan B2SA pada kelompok masyarakat	Org	150	150	100,00%			
peningkatan keamanan pangan	Terlaksananya Pembinaan Pengawasan Keamanan Pangan	Org	55	55	100,00%	168,00	157,23	93,59%
	Terlaksananya uji laboratorium pangan segar	Komoditi	12	12	100,00%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Terlaksananya workshop keamanan pangan	Org	55	55	100,00%			
	Terlaksananya uji rafid tes kit	Sampel	69	69	100,00%			
	Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan	Org	280	280	100,00%			

Dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Disebutkan juga bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu, dan gizi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas guna menguatkan peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sepanjang tahun 2019 telah menjalankan Program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan, terdapat 3 (tiga) indikator yang ditetapkan sebagai alat ukur kinerja pada program ini yakni :

1. Peningkatan pencapaian tingkat konsumsi energi

Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi energi berupa kalori yang dikonsumsi per hari oleh masyarakat Kota Cilegon sbb :

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat konsumsi energy} &= \frac{\text{Jumlah Energi yang dikonsumsi}}{\text{Standar kebutuhan energi}} \times 100 \% \\
 &= \frac{1.895,9}{2.150} \times 100 \% \\
 &= 88,18 \%
 \end{aligned}$$

Tingkat konsumsi energi pada tahun 2019 sebesar 88,18 %, hal ini menggambarkan bahwa konsumsi energi yang berasal dari selain padi-padian sangat perlu ditingkatkan lagi misalnya yang berasal dari umbi-umbian, perlu upaya diversifikasi pangan sumber energi. Untuk target pencapaian tingkat konsumsi energy yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 88,3 %, maka realisasi capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 99,86 %.

2. Peningkatan pencapaian tingkat konsumsi protein

Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi protein yang dikonsumsi per hari oleh masyarakat kota Cilegon sbb :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat konsumsi protein} &= \frac{\text{Jumlah protein yang dikonsumsi}}{\text{Standar kebutuhan protein}} \times 100 \% \\ &= \frac{64,8}{57} \times 100 \% \\ &= 113,7 \%\end{aligned}$$

Tingkat konsumsi portein pada tahun 2019 sebesar 113,7 %, hal ini menggambarkan bahwa konsumsi protein masyarakat Kota Cilegon telah memenuhi standar kebutuhan minimal yang ditentukan. Target pencapaian tingkat konsumsi protein yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 100 %. Maka capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 113,7 %.

3. Prosentase tingkat minimal cadangan pangan pemerintah

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2018 tentang Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa cadangan pangan (beras) pemerintah kota Cilegon ditetapkan sebesar 180 ton. Sampai dengan tahun 2019 cadangan pangan yang disediakan baru mencapai 68,7 ton. Penetapan jumlah cadangan pangan pemerintah dalam RPJMD ditargetkan sebesar 100 ton pada tahun 2019. Sehingga realisasi kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 68,7 ton/100 ton = 68,7 %.

4. Tingkat pengawasan pangan segar asal tumbuhan.

Pangan segar asal tumbuhan yang dimaksud disini adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung, dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan jenis pangan asal tumbuhan yang dikonsumsi tidak memiliki cemaran residu pestisida, logam berat dan mikroba.

Indikator ini menggambarkan tingkat keamanan pangan segar yang memenuhi standar yang beredar di kota Cilegon dengan cara membandingkan jumlah sampel yang di uji dengan hasil sampel yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat pengawasan PSAT} &= \frac{\text{Jumlah sampel PSAT aman}}{\text{Banyaknya sampel PSAT}} \times 100 \% \\
 &= \frac{65}{69} \times 100 \% \\
 &= 94,20 \%
 \end{aligned}$$

Tingkat pengawasan PSAT pada tahun 2019 sebesar 94,2 %, hal ini menggambarkan bahwa pangan segar yang beredar di Kota Cilegon memenuhi standar keamanan pangan. Target pencapaian tingkat pengawasan keamanan PSAT yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar > 80 %. Maka capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 117,75 %.

Secara keseluruhan semua kegiatan dapat mendukung indikator pada program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari serapan anggaran tahun 2019 adalah 96,3 %.

A.2 Program Peningkatan Distribusi Dan Cadangan Pangan

Tabel 4.2.3b Realisasi Program Peningkatan Distribusi Dan Cadangan Pangan 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Distribusi Dan Cadangan Pangan						937,27	923,36	98,52%
	Pencapaian tingkat ketersediaan energi	%	90,00	102,32	113,69%			
	Pencapaian tingkat ketersediaan protein	%	90,00	101,78	113,09%			
	Pencapaian stabilitas harga pangan (beras)	%	CV < 10%	55,78	100,00%			
peningkatan ketersediaan energi dan protein	Terlaksananya penyusunan ketersediaan energi dan protein	%	100	100	100,00%	209,31	203,72	97,33%
	Terlaksananya apresiasi hasil analisa ketersediaan energi dan protein	%	100	100	100,00%			
	Terlaksananya sosialisasi dan penyusunan inventarisasi sumberdaya pangan	%	100	100	100,00%			
	Terlaksananya apresiasi hasil penyusunan inventarisasi sumber daya pangan	%	100	100	100,00%			
	Terlaksananya bimtek budidaya hidroponik sederhana	%	100	100	100,00%			
	Meningkatnya ketersediaan energi dan protein	%	100	100	100,00%			
peningkatan distribusi pangan	Rapat pokja DKP, sosialisasi program ketahanan pangan Tk. Kecamatan, rakor dan sidang tahunan	%	100	100	100,00%	235,45	234,35	99,53%
	Terlaksananya pengolahan data analisa data dan pasokan pangan daerah di kota cilegon	%	100	100	100,00%			
	Terlaksananya apresiasi harga dan pasokan pangan daerah dikota cilegon	%	100	100	100,00%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
pengendalian kerawanan pangan	Persentase ketersediaan data SKPG di Kota Cilegon	%	100	100	100,00%	92,51	91,49	98,90%
	Persentase ketersediaan dokumen FSVA Kota Cilegon	%	100	100	100,00%			
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Persentase tersedianya beras cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)	%	100	100	100,00%	400,00	393,80	98,45%
	Persentase terlaksananya sewa angkutan beras CPPD	%	100	100	100,00%			

Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sepanjang tahun 2019 telah menjalankan Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan. Terdapat 3 (tiga) indikator yang ditetapkan sebagai alat ukur kinerja pada program ini yaitu :

1. Pencapaian tingkat ketersediaan energi. Indikator ini menggambarkan jumlah penyediaan pangan terutama ketersediaan energi per kapita. Pengukurannya dengan cara menganalisa neraca bahan makanan terhadap 11 jenis bahan makanan. Pada tahun 2019 tingkat ketersediaan energi diperoleh sebesar 102,32 %, hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan energy yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat di Kota Cilegon sudah melebihi batas minimum ketersediaan, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 90%, maka capaian kinerja tahun 2019 sebesar 113,69 %. Hal ini dapat dicapai melalui ketersediaan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang ada di kota Cilegon maupun yang didatangkan dari luar kota Cilegon.
2. Pencapaian tingkat ketersediaan protein. Indikator ini untuk menggambarkan jumlah penyediaan pangan terutama ketersediaan protein per kapita. Pengukurannya dengan cara menganalisa neraca bahan makanan. Pada tahun 2019 tingkat ketersediaan protein diperoleh dengan realisasi sebesar 101,78 % dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 90 % maka capaian kinerja tahun 2019 mencapai 113,09 %. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan protein di Kota Cilegon sudah melebihi batas minimum. Upaya pencapaian ini dapat dipenuhi melalui ketersediaan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang ada di Kota Cilegon maupun yang didatangkan dari luar kota Cilegon.
3. Pencapaian stabilitas harga pangan (beras). Indikator ini untuk menggambarkan perkembangan stabilitas harga beras ditingkat konsumen melalui pemantauan/pengumpulan data di pedagang (eceran dan grosir) data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Hal ini untuk menjamin bahwa harga pangan (beras) sepanjang tahun tetap mengalami kestabilan yang ditunjukkan dengan nilai CV (*coefficient variability*) < 10%, artinya fluktuasi harga pangan tidak melebihi 10%, dengan hasil CV sebesar 5,578%. Perlu diketahui bahwa sepanjang tahun 2019 fluktuasi harga pangan

(beras) diperoleh maksimal hanya 5,578%, sehingga capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%.

Secara keseluruhan kegiatan yang mendukung target indikator pada Program peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari serapan anggaran tahun 2019 adalah sebesar 97,52 %.

A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)

Tabel 3.2.3c Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun 2019 (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)						4.069,01	3.935,86	96,73%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100,00	100,00	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100,00	71,06	71,06%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100,00	95,60	95,60%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100,00	61,36	61,36%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Kawasan Pertanian Terpadu)						21,90	12,68	57,88%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan)						133,96	96,74	72,21%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Budidaya Ikan Air Tawar dan Air Payau)						17,00	16,28	95,78%

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Ketepatan waktu saat pengumpulan data oleh petugas pengumpul data/enumerator masih kurang baik, data seringkali belum dilaporkan lewat batas waktu yang telah disepakati, sehingga penyusunan laporan bulanan dan pengiriman laporan SKPG ke Provinsi dan Pusat terhambat, dan mengurangi esensi SKPG sebagai instrumen isyarat dini dan intervensi kerawanan pangan yang sifatnya berkesinambungan tiap bulan.
2. Ketersediaan energy dan protein dalam bentuk pangan sudah lebih dari cukup, namun yang perlu menjadi perhatian dan catatan penting bagi Pemerintah Kota Cilegon bahwa berdasarkan hasil olahan Neraca Bahan Makanan (NBM) pada tahun 2018 mengatakan produksi pangan lokal di Kota Cilegon hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan sebesar 21,59% sehingga ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah Cilegon sangat tinggi yaitu sebesar 78,41%.



3. Ketersediaan beras CPPD Kota Cilegon sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar 68,7 ton masih jauh dari yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2018 tentang Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah yaitu sebesar 182 ton beras. Untuk itu di tahun anggaran berikutnya harus diadakan penambahan ketersediaan beras CPPD Kota Cilegon secara bertahap.
4. Kemudian data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon hingga tahun 2019 ini masih terdapat daerah rentan rawan pangan yaitu kelurahan Cikerei dan Kepuh disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan, infrastruktur, sanitasi dan kurangnya luas sawah terhadap luas wilayah. Serta kelurahan Grogol, Tamansari, Mekarsari, Deringo disebabkan karena perilaku dan pola asuh orangtua terhadap keluarga tentang sumber-sumber makanan terutama diversifikasi pangan untuk keluarga masih sangat kurang.

B.2 Solusi

1. Untuk mengatasi masalah keterlambatan pengiriman laporan, digunakan penerapan pola pengiriman data menggunakan pelaporan melalui email ke petugas pengolah data SKPG di DKPP.
2. Perlunya pemahaman pemerintah dan masyarakat terhadap upaya diversifikasi pangan local dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan marginal sebagai salah satu potensi sumber pangan sehingga mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah Cilegon.
3. Pemerintah Kota Cilegon berupaya memenuhi ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) berupa pengadaan beras secara bertahap hingga mencapai 182 ton beras sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2018 tentang Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah, melalui mekanisme kerja sama jual beli dan penyimpanan beras CPPD antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Bulog Subdivre Serang.
4. Perlunya kegiatan sosialisasi, bimtek maupun apresiasi pada kegiatan pemahaman tentang pentingnya diversifikasi pangan sebagai upaya peningkatan ketersediaan pangan. Dan penguatan peran penggerak ketahanan pangan ditingkat RT/RW.

3.2.4 Bidang Urusan Pertanahan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah (Dinas Pekerjaan Umum)

Tabel 3.2.4a

Target dan Realisasi Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah						278,72	216,11	77,54%
	Persentase aset lahan pemda yang bersertifikat	%	88,00	84,50	96,02%			
INVENTARISASI TANAH JALAN	Jumlah ruas jalan	ruas	120	128	106,67%	205,42	194,17	94,52%
Pembinaan Pertanahan	Jumlah kegiatan	keg	2	2	100,00%	23,30	9,90	42,49%
Pembuatan Peta Bidang	Jumlah dokumen	dok	57	53	92,98%	50,00	12,04	24,07%

Kegiatan Pembinaan Pertanahan, dan kegiatan Pembuatan Peta Bidang. Kegiatan Pembinaan Pertanahan hanya mampu direalisasikan sebesar 42,49%. Hal ini disebabkan oleh penyelenggaraan acara pembinaan/sosialisasi mendapat respon yang kurang dari peserta/undangan, baik dari unsur masyarakat hingga narasumber, sehingga anggaran yang disediakan tidak dapat diserap; selain itu, anggaran untuk publikasi tidak dapat dilaksanakan karena sisa waktu yang tersedia tidak mencukupi.

Sedangkan kegiatan Pembuatan Peta Bidang terealisasi sebesar 24,07% yang disebabkan oleh : (1) masih belum jelasnya titik koordinat (3 titik), sehingga pengukuran peta tidak dapat dilakukan; (2) masih terdapat beberapa dokumen tanah yang belum balik nama dan bidang tanah belum ada; (3) peta bidang yang didaftarkan lebih kecil daripada yang tercantum dalam DPA; (4) masih ada pihak yang belum bersedia menjual tanah untuk ruas Ketileng-Cikerut; (5) Proses di BPN memerlukan waktu yang relatif lama.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Proses pembuatan peta bidang membutuhkan waktu yang relatif lama.
2. Respon masyarakat terkait pembinaan pertanahan masih kurang.
3. Batas administrasi antar keluarahan kurang jelas.

B.2 Solusi

1. Koordinasi dengan BPN agar lebih ditingkatkan.
2. Perlu pendekatan persuasif untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya pembinaan pertanahan.
3. Pihak kelurahan agar meningkatkan pemahaman tentang batas-batas kelurahan.

3.2.5 Bidang Urusan Lingkungan Hidup

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tabel 3.2.5a

Target dan Realisasi Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup						5.150,57	4.594,35	89,20%
	Rata-rata tingkat pencemaran udara Kota Cilegon atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	.	100,00	85,00	85,00%			
	Tingkat pencemaran air Kota Cilegon	%	10,00	-	100,00%			
	Proporsi titik pemantauan kualitas air sungai	%	100,00	66,67	66,67%			
	Proporsi titik pemantauan kualitas udara	%	100,00	66,67	66,67%			
	Proporsi pabrik yang memenuhi baku mutu limbah	%	95,00	76,72	80,2%			
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara	%	95,00	37,04	38,99%			
	Persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa	%	82,57	81,00	98,10%			
	Persentase wilayah industri manufaktur yang mendapatkan supervisi	%	100,00	100,00	100,00%			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Lingkungan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan	Paket	2	2	100,00%	100,00	88,80	88,80%
Pemeliharaan alat laboratorium dan ISPU	Terlaksananya pemeliharaan alat ISPU	Unit	2	2	100,00%	290,00	282,65	97,46%
Kajian Identifikasi Permasalahan Pemulihan Kualitas Sungai	Terlaksananya kajian identifikasi permasalahan pemulihan kualitas sungai	Dokumen	1	1	100,00%	193,85	183,18	94,49%
Pemantauan Kualitas Tanah Akibat Produksi Bio massa	Terpantauanya kualitas tanah akibat produksi biomassa di wilayah Kota Cilegon	Dokumen	1	1	100,00%	90,05	88,09	97,82%
Pengadaan dan Pembangunan Alat Instalasi Stasiun Pemantau Udara (ISPU)	Tersedianya Stasiun Alat Pemantau Kualitas Udara (Fixed Station)	Unit	2	2	100,00%	2.100,00	2.028,99	96,62%
Pemantauan Kualitas Lingkungan non institusi / non kumulatif	Tersedianya laporan hasil analisa laboratorium kualitas lingkungan non institusi / non kumulatif	Dokumen	2	2	100,00%	800,00	708,04	88,51%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pemantauan Kualitas Lingkungan Institusi / Kumulatif	Terpantauanya kualitas lingkungan institusi / kumulatif di wilayah Kota Cilegon	Dokumen	1	1	100,00%	400,00	314,19	78,55%
Kajian Penentuan/penetapan Baku mutu Lingkungan Udara	Terlaksananya penyusunan kajian penetapan baku mutu kualitas udara	Dokumen	1	1	100,00%	395,00	173,66	43,97%
Kajian Penentuan/penetapan Kelas Badan air Penerima	Terlaksananya penyusunan kajian penetapan kelas air	Dokumen	1	1	100,00%	400,00	372,26	93,07%
Pelaksanaan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	Terlaksananya pemulihan kerusakan lingkungan	Kegiatan	1	1	100,00%	381,67	354,49	92,88%

Pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdapat 8 (delapan) indikator dengan capaian kinerja pada indikator tersebut di atas sepanjang tahun 2019 adalah :

1. Realisasi indikator rata-rata tingkat pencemaran udara Kota Cilegon atau Indeks Standar Pencemar Udara / ISPU sebesar 85%. Capaian tersebut masih di bawah target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Hal ini disebabkan pada titik-titik tertentu masih ada beberapa parameter seperti SO₂ dan O₃ yang terpantau melebihi baku mutu. Selanjutnya agar target indikator rata-rata tingkat pencemaran udara Kota Cilegon atau Indeks Standar Pencemar Udara / ISPU dapat terpenuhi di tahun yang akan datang maka perlu dilakukan upaya yaitu melakukan upaya pelayanan pencegahan pencemaran udara serta upaya penghijauan lingkungan agar terus ditingkatkan. Pemantauan kualitas udara akan terus dilakukan dengan 4 (empat) alat ISPU yang ditempatkan pada lokasi Simpang Tiga, di Kantor Kelurahan Gunung Sugih, di Kecamatan Grogol dan di Jalan Aat Rusli (JLS).
2. Realisasi Indikator tingkat pencemaran air Kota Cilegon (kualitas baku mutu air tanah) Tahun 2019 capaiannya sebesar 100 % yakni dari jumlah sampel air tanah yang dipantau sebanyak 4 (empat) sampel semuanya memenuhi baku mutu.
3. Indikator proporsi titik pemantauan kualitas air sungai sebesar 66,67 %, artinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah melakukan pemantauan terhadap 60 (enam puluh) titik pantau air sungai dari total kebutuhan titik pantau sebanyak 90 (Sembilan puluh) titik. Perlu diketahui bahwa Kota Cilegon memiliki 17 (tujuh belas) kali/sungai.
4. Indikator proporsi titik pemantauan kualitas udara sebesar 66,67%, artinya terdapat 100 (seratus) titik pemantauan kualitas udara yang sudah dilakukan dari 150 (seratus lima puluh) titik pemantauan kualitas udara seluruhnya.
5. Indikator proporsi pabrik yang memenuhi baku mutu limbah cair sebesar 76,2%, artinya terdapat 16 (enam belas) pabrik yang memenuhi baku mutu

limbah cair dari 21 (dua puluh satu) pabrik yang dipantau. Kemudian proporsi pabrik yang memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebesar 95 % artinya dari 21 (dua puluh satu) jumlah pabrik yang dipantau, terdapat 20 (dua puluh) pabrik yang memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Capaian indikator tidak dapat memenuhi 100% karena masih ada pabrik yang belum memenuhi baku mutu. Upaya selanjutnya agar indikator tersebut dapat memenuhi 100% maka akan dilakukan upaya pembinaan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang masih belum dapat memenuhi baku mutu.

6. Realisasi indikator jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara sebesar 37,04 %, artinya terdapat 10 (sepuluh) usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis dari 27 (dua puluh tujuh) usaha dan/atau kegiatan yang diawasi sedangkan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) usaha dan/atau kegiatan tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan yakni sebesar 95%. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakseriusan perusahaan dalam menindaklanjuti hasil temuan pengawasan. Maka perlu dilakukan upaya yaitu adanya sanksi administrasi yang lebih berat berupa sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak taat terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, agar target indikator dapat tercapai di tahun mendatang.
7. Indikator persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa sebesar 81 % artinya luas lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun 2019 seluas 1.101.117 M2 terhadap luas lahan yang diperuntukan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa seluas 1.359.404 M2.
8. Indikator persentase wilayah industri manufaktur yang mendapatkan supervisi sebesar 100%, artinya dari 159 (seratus lima puluh sembilan) dokumen yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) dokumen dilakukan supervisi evaluasi dokumen lingkungan, 15 (lima belas) dokumen adalah kasus yang ditindaklanjuti, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dan usaha dan / atau kegiatan adalah pengawasan usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH serta sebanyak 72 (tujuh puluh dua) usaha dan / atau kegiatan pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 telah dilakukan supervisi.

Secara keseluruhan semua kegiatan untuk mencapai target indikator pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ini sepanjang tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari serapan anggaran

pada seluruh kegiatan adalah 89,20%. Namun masih ada beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih di bawah 80% yakni:

1. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Institusi / Kumulatif sebesar 78,55% yang disebabkan karena adanya efisiensi hasil lelang.
2. Kegiatan Kajian Penentuan /penetapan baku mutu lingkungan 43,97% yang disebabkan karena adanya gagal lelang sampai dengan dua kali sehingga mengoptimalkan waktu yang semula waktu pelaksanaan selama 3 bulan menjadi 1 bulan. Sehingga harus dilakukan penyesuaian harga perkiraan sendiri (HPS)

A.2 Program Penataan Lingkungan

Tabel 3.2.5b
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Program Penataan Lingkungan

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penataan Lingkungan						1.940,41	1.804,21	92,98%
	Proporsi jumlah perusahaan yang memiliki dokumen terkait lingkungan hidup	%	93,33	122,77	131,54%			
	Cakupan supervisi kesesuaian operasional perusahaan terhadap dokumen lingkungan hidup	%	6,20	40,00	645,33%			
	Tingkat Prosentase Lahan RTH di Kota Cilegon	%	99,42	88,12	88,64%			
	Tingkat Pemenuhan bangunan Konservasi air	%	78,63	78,00	99,19%			
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (NIRWASITA TANTRA)	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja dan Status Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Kegiatan	1	1	100,00%	64,00	62,18	97,15%
Penyusunan IKLH	Tersusunnya Dokumen IKLH	Dokumen	1	1	100,00%	54,00	53,23	98,56%
Penyediaan Bibit Tanaman	Terlaksananya Penyediaan Bibit Tanaman	Batang	2.000	2.000	100,00%	122,00	119,58	98,02%
Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Kualitas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Daya Dukung dan daya Tampung Kualitas Lingkungan Hidup	Parameter	7	7	100,00%	600,00	566,59	94,43%
Pemeliharaan Hutan Kota	Terpeliharanya Hutan Kota	Kegiatan	1	1	100,00%	43,00	33,76	78,51%
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Tersusunnya Dokumen RPPLH / Inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100,00%	400,00	388,43	97,11%
Penyusunan DED-Hutan Kota	Tersusunnya DED-Hutan Kota	Kegiatan	1	1	100,00%	45,00	44,66	99,23%
Penghijauan di Kawasan Perlindungan Setempat	Terlaksananya Penghijauan di Kawasan Perlindungan Setempat, Pohon Pelindung	Batang	1.400	1.400	100,00%	162,00	159,84	98,67%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pengadaan sarana Untuk Mendukung adaptasi dan mitigasi kampung iklim	Terlaksananya Pengadaan Sarana untuk mendukung adaptasi dan mitigasi kampung iklim	Lingkungan	6	6	100,00%	98,41	77,92	79,18%
Pembinaan Kampung Iklim	Terbentuknya Kampung Iklim	Lingkungan	6	6	100,00%	60,00	60,00	100,00%
Evaluasi Dokumen Lingkungan Hidup	Tersusunnya data hasil evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan	Perusahaan	45	45	100,00%	150,00	144,88	96,58%
Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan	Tersedianya basis data dan sistem informasi	Aplikasi	1	1	100,00%	92,00	91,20	99,13%
Pembuatan Sertifikat Lahan Hutan Kota	Tersedianya dokumen sertifikat lahan hutan kota	Dokumen	1	1	100,00%	50,00	1,95	3,90%

Terdapat 4 (empat) indikator untuk melaksanakan program Penataan Lingkungan. Adapun capaian kinerja pada indikator tersebut diatas yaitu :

1. Realisasi indikator Proporsi jumlah perusahaan yang memiliki dokumen terkait lingkungan hidup Tahun 2019 sebesar 122,78 %, artinya jumlah perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan hidup sebanyak 814 (delapan ratus empat belas) perusahaan dari 663 (enam ratus enam puluh tiga) perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup.
2. Realisasi Indikator cakupan supervisi kesesuaian operasional perusahaan terhadap dokumen lingkungan hidup sebesar 40 %, artinya jumlah perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan hidup yang disupervisi sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) dari 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan hidup.
3. Realisasi Indikator tingkat persentase lahan RTH di Kota Cilegon Tahun 2019 sebesar 88, 12%, artinya luas RTH meliputi hutan kota, sempadan sungai dan mata air yang telah dihindarkan seluas 31,51 Ha dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 35,76 Ha.
4. Realisasi Indikator tingkat Pemenuhan bangunan konservasi air Tahun 2019 sebesar 78%, artinya jumlah bangunan konservasi air yang dibuat berupa sumur resapan dan lubang resapan biopori sebanyak 3.687 unit terhadap jumlah bangunan konservasi air yang direncanakan sebanyak 4.727 unit.

Secara keseluruhan semua kegiatan untuk mencapai target indikator pada Program Penataan Lingkungan ini dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari serapan anggaran sepanjang tahun 2019 adalah sebesar 92,98%. Namun masih ada beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih di bawah 80% yakni:

1. Kegiatan Pemeliharaan hutan kota sebesar 78,51% yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam kode rekening uraian belanja plang papan nama sehingga tidak dapat direalisasikan.

2. Kegiatan Pengadaan sarana untuk mendukung adaptasi dan mitigasi kampung iklim 79,18% yang disebabkan karena adanya kelebihan anggaran untuk honorarium PPK dan P2BJ dan adanya efisiensi dari harga tempat sampah terpilah dan komposter.
3. Pembuatan sertifikat lahan hutan kota sebesar 3,9% yang disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan perubahan 2019, namun begitu output realisasi pembuatan sertifikat telah tercapai. Terdapat beberapa belanja yang tidak harus dilaksanakan semua.

A.3 Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.2.5c

Target dan Realisasi Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup						707,69	545,03	77,02%
	Cakupan Pembinaan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/komunitas	%	86,42	80,00	92,57%			
	Persentase jumlah kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00%			
Pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH	Terawasinya penanggung jawab usaha/kegiatan yang menerima izin lingkungan dan izin PPLH	usaha/kegiatan	60	27	45,00%	222,05	133,13	59,95%
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	Terselesaikannya jumlah kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilaporkan dan dapat ditindaklanjuti	kasus	15	15	100,00%	48,30	21,39	44,30%
Pembinaan Saka Kalpataru	Pembinaan 3 Krida terhadap anggota Saka Kalpataru	orang	70	70	100,00%	54,77	54,77	100,00%
Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari-Hari Lingkungan	kegiatan	1	1	100,00%	92,54	82,42	89,07%
Pembinaan Program ADIPURA	Pembinaan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran Sampah	kegiatan	1	1	100,00%	39,48	37,65	95,37%
Peningkatan jumlah sekolah peraih Adiwiyata	Jumlah sekolah adiwiyata Mandiri, Nasional, Provinsi dan Kota	Sekolah	32	32	100,00%	93,85	93,81	99,96%
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang terkena sanksi	Terawasinya penanggung jawab usaha/kegiatan yang terkena sanksi administratif yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan perintah sanksi administratif	usaha/kegiatan	10	10	100,00%	43,05	21,71	50,44%
Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup	Tersosialisasinya peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	kegiatan	1	1	100,00%	38,67	28,34	73,28%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Bintek Monitoring dan Pelaporan penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan Hidup	Terlaksananya bintek monitoring dan pelaporan penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan	orang	20	20	100,00%	16,70	15,25	91,32%
Pembuatan Pos Pengaduan dan sistem informasi penerimaan Pengaduan Berbasis Online	Tersedianya sarana pos pengaduan dan sistem informasi pengaduan berbasis online	kegiatan	1	1	100,00%	58,28	56,54	97,01%

Terdapat 2 (dua) indikator untuk melaksanakan program Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Adapun capaian kinerja sepanjang tahun 2019 antara lain :

1. Realisasi indikator Cakupan Pembinaan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/komunitas tahun 2019 sebesar 80%, artinya jumlah kelompok masyarakat atau komunitas (masyarakat umum, sekolah dan usaha/kegiatan) yang telah dibina pada tahun 2019 sebanyak 325 orang terhadap total jumlah kelompok masyarakat tersebut sebanyak 405 orang yang akan dibina. Indikator ini belum mencapai target maka agar target indikator Cakupan Pembinaan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/komunitas dapat tercapai di tahun mendatang perlu dilakukan upaya yaitu dalam perencanaan harus membuat jadwal rencana pelaksanaan kegiatan lebih matang.
2. Realisasi Indikator persentase jumlah kasus dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sebesar 100%, artinya jumlah kasus dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon pada tahun 2019 sebanyak 15 (lima belas) kasus terhadap jumlah total 15 (lima belas) kasus yang masuk dalam bentuk hasil pengaduan masyarakat maupun hasil supervisi.

Secara keseluruhan semua kegiatan yang dijalankan untuk mencapai target indikator pada Program Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup ini dapat terlaksana dengan baik, serapan anggaran sepanjang tahun 2019 sebesar 77,02%. Namun masih ada beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih di bawah 80% yakni:

1. Kegiatan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH realiasi sebesar 59,95%, yang disebabkan karena terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dimana dalam melaksanakan pengawasan harus melibatkan PPLH (Undang – undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Perlu diketahui bahwa jumlah PPLH yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon hanya berjumlah 4 (empat) orang, sehingga pelaksanaan kegiatan ini menjadi tidak maksimal. Selain itu ada jadwal yang waktunya bersamaan dengan jadwal pendampingan pengawasan oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga tidak semua dalam pengawasan tersebut ada pengambilan sampel akan tetapi di sesuaikan dengan kebutuhan, dan juga di Kota Cilegon belum ada laboratorium yang terakreditasi sehingga harus dilakukan di luar Kota Cilegon dan itu memerlukan waktu yang panjang, selain itu karena adanya perubahan atau mutasi pejabat di level eselon 3 dan 4 di pertengahan tahun sehingga untuk melaksanakan program dan kegiatan membutuhkan waktu untuk adaptasi.

2. Kegiatan penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup realisasi hanya sebesar 44,30% karena pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 15 (lima belas) pengaduan, dan sebagian pengaduan dan penanganan kasus tidak memerlukan uji sampel selain itu ada efisiensi anggaran dari biaya makan dan minum pelaksanaan pekerjaan.
3. Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang terkena sanksi sebesar 50,44 % karena dari 10 (sepuluh) usaha / kegiatan yang terkena sanksi pada pelaksanaannya ada yang memerlukan anggaran makan dan minum dan ada yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan, oleh karenanya ada sisa anggaran makan dan minum pelaksanaan yang tidak direalisasikan.
4. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup realisasi sebesar 73,28 %, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan sosialisasi anggaran untuk narasumber tidak di realisasikan karena narasumbernya dari intern DLH, sedangkan narasumber dari KLHK tidak bisa hadir karena ada kesibukan yang lainnya.

A.4 Program Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3

Tabel 3.2.5d

Target dan Realisasi Program Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 Tahun 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3						12.472,49	11.859,08	95,08%
	Persentase penanganan persampahan	%	70,00	69,88	99,83%			
	TPS per satuan penduduk (Rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk)	m3 per penduduk	2,25	3,90	173,33%			
	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	%	0,45	0,51	113,33%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pembinaan dan sosialisasi kebersihan	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Kebersihan pada daerah aliran sungai	Daerah aliran sungai	4	4	100,00%	147,56	142,01	96,24%
Pengelolaan sampah TPST pasar kranggot	Pemanfaatan Sampah menjadi kompos	m3/hari	2	2	100,00%	51,40	41,90	81,52%
Pengamanan kebersihan kegiatan khusus daerah	Terlaksananya Penanganan Kebersihan pada kegiatan hari-hari besar nasional dan hari-hari besar lainnya	kegiatan	6	6	100,00%	304,40	301,30	98,98%
Penyelenggaraan hari peduli sampah nasional	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional	Kegiatan	1	1	100,00%	25,90	24,23	93,53%
penyelenggaraan jumat bersih	Kegiatan gotong royong kebersihan Kota Cilegon	Kegiatan	9	9	100,00%	75,00	59,60	79,47%
Lomba Kebersihan	Terlaksananya Kegiatan lomba kebersihan tingkat Kota Cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%	100,00	98,30	98,30%
Peyemprotan Lalat TPSA Bagendung dan Lingkungan Sekitar	Terjaganya Lingkungan TPSA Bagendung dan lingkungan sekitar	lokasi	2	2	100,00%	124,74	123,04	98,64%
Pemeliharaan Rutin/berkala lingkungan TPSA Bagendung	Tersedianya bahan baku bangunan pemeliharaan gedung kantor TPSA Bagendung	kegiatan	4	4	100,00%	106,30	100,36	94,41%
Penyediaan Peralatan Sarana Kebersihan	Tersedianya Sarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan	jenis	14	14	100,00%	198,70	197,15	99,22%
Pengadaan papan penerangan	Tersedianya Papan Penerangan	Unit	10	10	100,00%	61,85	51,29	82,92%
Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan operasional kebersihan	Tersedianya kendaraan operasional yang siap pakai	Bulan	12	12	100,00%	6.189,38	5.878,75	94,98%
Pemeliharaan alat angkut persampahan	terpeliharanya alat angkutan persampahan (7 Pick Up, 15 Dump Truck, 15 Bak Kontrainer)	jenis	3	3	100,00%	295,50	292,30	98,92%
Pemantauan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3	Terlaksananya pemantauan Dan Pengawasan pengolahan limbah B3	perusahaan	72	72	100,00%	40,00	36,36	90,90%
Penyusunan Masterplan dan DED pengelolaan air limbah terpadu skala kawasan	Tersedianya master plan dan DED sistem pengelolaan Air limbah terpadu skala kawasan	dokumen	2	2	100,00%	500,00	467,88	93,58%
Pengadaan alat berat excavator	Tersedianya Kendaraan Alat Berat Excavator	unit	1	1	100,00%	1.311,26	1.302,40	99,32%
Pembangunan trans depo	Tersedianya Bangunan Transfer Depo untuk penunjang pelayanan Kebersihan	Lokasi	1	1	100,00%	1.050,55	945,96	90,04%
Pembinaan Bank Sampah	Terselenggaranya bimbingan terhadap Bank Sampah	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	47,12	94,24%
Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah	Terlaksananya Pelatihan dan Sosialisasi Bank Sampah pada tingkat Kelurahan	Bank Sampah	4	4	100,00%	100,00	94,40	94,40%
Pengadaan Kendaraan operasional Pick Up	Tersedianya Kendaraan Pick Up sampah	jenis (4 unit)	1	1	100,00%	586,03	545,64	93,11%
Pemeliharaan TPS/ Transfer Depo	Meningkatnya Sarana Pelayanan Kebersihan	Lokasi	4	4	100,00%	143,92	140,84	97,86%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Penyusunan Sistem Informasi Data Limbah B3	Tersedianya sistem informasi data limbah b3	dokumen	1	1	100,00%	50,00	49,73	99,47%
Kajian Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DID)	Tersedianya Kajian Evaluasi Potensi Retribusi Persampahan/Kebersihan (DID)	Dokumen	1	1	100,00%	50,00	48,80	97,59%
Pembangunan TPST 3R	Pembuatan pagar Dan paving blok	Lokasi	1	1	100,00%	310,00	306,10	98,74%
Revitalisasi/ Penataan Kawasan TPSA Bagendung/ Perluasan Lahan	Terbangunnya TPT; Terbangunnya drainase Terpasangnya listrik di kantor TPSA dan Workshop	Kegiatan	1	1	100,00%	600,00	563,62	93,94%

Terdapat 3 (tiga) indikator untuk melaksanakan program Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3. Adapun capaian kinerja pada indikator tersebut diatas sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Indikator Persentase penanganan persampahan tahun 2019 sebesar 69,88%, artinya volume sampah yang diangkut ke TPSA baik yang diangkut oleh armada dari DLH atau dibuang langsung oleh masyarakat sebanyak 377.935 m3 terhadap volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Cilegon sebanyak 540.845 M3.
2. Realisasi Indikator untuk TPS per satuan penduduk (rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk) sebesar 3,90%, artinya hingga tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah memiliki TPS sebanyak 206 unit dengan daya tampung setiap TPS adalah 8 M3, sehingga total daya tampung TPS sebesar 1.648 M3 terhadap total jumlah penduduk Kota Cilegon Tahun 2019 sebanyak 423.362 jiwa (sumber data dari DKCS Kota Cilegon). Capaian ini memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 2,22 m3 per penduduk.
3. Realisasi Indikator persentase pengurangan sampah di perkotaan sebesar 0,51 %, yakni jumlah sampah yang dilakukan upaya pengurangan sebesar 2.766,52 m3 terhadap volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Cilegon sebanyak 423.362 m3. Hingga tahun 2019 telah dilakukan upaya dalam pengurangan produksi sampah melalui sistem 3R yaitu reduce, recycle dan reuse, dimana sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis akan dipilah dan dikelola melalui lembaga bernama Bank Sampah dan TPS 3R. Sampah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis kemudian diangkut dan dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir sampah). Perlu diketahui jumlah bank sampah hingga tahun 2019 sebanyak 26 (dua puluh enam) bank sampah yang dapat mengelola sampah hingga 1072,08 m3/tahun dan 3 (tiga) unit TPS 3R yang dapat mengelola sampah hingga 1693,44 m3/tahun terhadap volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Cilegon sebanyak 423.362 m3. Capaian ini memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 0,45%.

Secara keseluruhan sepanjang tahun 2019 semua kegiatan yang dapat mendukung capaian indikator pada Program Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 ini dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari serapan anggaran

sepanjang tahun 2019 adalah sebesar 95,08%. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya masih di bawah 80 % yakni :

1. Kegiatan penyelenggaraan jumat bersih sebesar 79,47% yang disebabkan karena adanya pengurangan dalam kegiatan jumsih karena waktu bulan Ramadhan dan Idul Fitri sehingga ada sisa anggaran dari makan dan minum pelaksanaan kegiatan.

A.5 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Lingkungan Hidup)

Tabel 3.2.5e Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Lingkungan Hidup)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)						17.700,16	16.454,79	92,96%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100,00	100,00	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100,00	88,39	88,39%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100,00	98,00	98,00%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100,00	82,67	82,67%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah I)						116,98	115,36	98,61%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II)						116,31	113,70	97,76%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah III)						116,31	112,07	96,36%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah IV)						116,31	113,61	97,68%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Tempat Pengolahan Sampah Akhir)						65,66	64,84	98,75%

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Cilegon pada tahun 2019 berstatus waspada, artinya sudah terjadi degradasi lingkungan hidup. Butuh sinergitas dalam penyelesaian masalah kasus lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan penegakkan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) juga masih sangat kurang. Penindakan masih sebatas menunggu pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon saja.
3. Kurangnya jumlah SDM pengawas lingkungan terutama Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan belum tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), untuk merespon secara cepat atas adanya dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga penanganan pada pengaduan kasus lingkungan hidup menjadi tidak maksimal.

4. Kinerja pengelolaan sampah masih menggunakan sistem pola kumpul, angkut dan buang langsung ke TPA Bagendung dan bersifat *open dumping*. Upaya pengurangan dari sumber timbulan sampah masih kurang.
5. Masih ada kegiatan yang waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan cash budget hal ini disebabkan karena kurangnya kapasitas SDM terhadap pemahaman tahapan dan urutan pekerjaan berikut kebutuhan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan pekerjaan, termasuk tahapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

B.2 Solusi

1. Rencana kerja dan kegiatan pada setiap bidang di Dinas Lingkungan Hidup semestinya harus berdasarkan isu dan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat, salah satunya dimulai dari hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup dan hasil analisa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dari data tersebut akan tergambarkan upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui program dan bidang masing-masing serta keterlibatan dan koordinasi antar sector lainnya.
2. Peran penegakkan hukum atas pelanggaran PPLH dapat ditingkatkan, tidak saja hanya menunggu pengaduan tetapi dengan melihat data-data pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup dan analisa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mengajukan usulan penambahan SDM dan kegiatan Diklat Pengawasan Lingkungan Hidup dan Diklat-diklat lain yang menunjang kegiatan Petugas Pengawas Lingkungan Hidup, baik ke BKD Kota Cilegon, BKD Provinsi Banten maupun Kementerian Lingkungan Hidup sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan menambah jumlah PPLH Kota Cilegon. Untuk pengadaan laboratorium lingkungan perlu dimulai dari perencanaan dahulu direview kembali dokumen-dokumen yang pernah dikeluarkan.
4. Upaya pengurangan dan penanganan sampah seharusnya sudah mulai diidentifikasi dan menjadi program kerja pemerintah. Pada upaya pengurangan adalah : pendirian TPS 3R dan bank sampah sebanyak mungkin terutama pada sumber timbulan sampah, sosialisasi dan pelaksanaan (pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, pendauran ulang). Untuk upaya penanganan adalah : sosialisasi dan pelaksanaan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, fungsi TPA). Upaya-upaya tersebut perlu didukung dengan regulasi yang mengaturnya.
5. Dalam menetapkan suatu rencana kegiatan sebaiknya memperhatikan permasalahan dan jumlah kebutuhan sumber daya yang harus disediakan, sehingga dalam penyusunan anggaran dapat menjawab seluruh kebutuhannya.

3.2.6 Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Tabel 3.2.6a Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						392,50	388,07	98,87%
	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	93,50	93,40	99,89%			
	Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pendaftaran penduduk	hari	1	1	100,00%			
Pelayanan Langsung Dokumen Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Langsung Pendaftaran Penduduk di 24 Kelurahan dan 8 Sekolah	kelurahan, sekolah	24 ; 8	24 ; 8	100,00%	206,90	203,77	98,49%
Pengawasan Dokumen Kependudukan Orang Asing	Terlaksananya Pengawasan Dokumen Kependudukan Orang Asing di Kota Cilegon	Kecamatan	8	8	100,00%	45,60	45,60	100,00%
Pendataan Penduduk Rentan dan penduduk non permanen	Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen	Kelurahan	43	43	100,00%	140,00	138,70	99,07%

1. **Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk** yang dilaksanakan oleh DKCS Kota Cilegon terus berupaya selalu meningkatkan kinerja pelayanan secara maksimal Adapun capaian indikator Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dari target 93,50 % dapat direalisasikan 93,40% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 99,89 % ketercapaian realisasi indikator program dapat dihitung melalui 5 jenis pelayanan yang dilakukan antara lain :

a. Cakupan Kepemilikan KTP-el

KTP el adalah Kartu tanda penduduk yg dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara Komputerisasi, cakupan KTP el merupakan jumlah KTP el yg diterbitkan terhadap jumlah Wajib KTP.

Tahun 2019 jumlah KTP el yg diterbitkan sebanyak 298.849 KTP el dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP Sebesar 300.775 KTP el atau capaian sebesar **99,35%**.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah KTP el yg diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\% \\
 &= \frac{298.849}{300.775} \times 100\% = 99,35\%
 \end{aligned}$$

b. Cakupan Penerbitan KK

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga.

Pada Tahun 2019 jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan sebanyak 133.147 KK dibagi Jumlah Kepala Keluarga Sebesar 133.147 KK atau capaian sebesar 100%

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah KK yg diterbitkan Pd Tahun } n}{\text{Jumlah Kepala Keluarga Pd Tahun } n} \times 100\% \\ &= \frac{133.147}{133.147} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

c. Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Cilegon

Surat keterangan pindah keluar kota Cilegon merupakan surat pengantar untuk Warga yg akan melakukan Pindah dan sebagai Pengantar untuk Pembuatan Dokumen Kependudukan di tempat yang baru.

Pada Tahun 2019 jumlah SKP yang diterbitkan sebanyak 7.547 SKP terhadap Jumlah pemohon penerbitan SKP sebanyak 7.547 SKP dengan capaian 100 %

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah SKP yg diterbitkan}}{\text{Jumlah Permohonan Penerbitan SKP}} \times 100\% \\ &= \frac{7.547}{7.547} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

d. Cakupan Penerbitan KIA

KIA adalah Kartu Identitas Anak yg diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi anak yg berusia 0-17 tahun kurang 1 hari sebagai Identitas bagi Anak yang Wajib dimiliki oleh setiap Anak.

Pada Tahun 2019 Jumlah KIA yang diterbitkan sebanyak 105.476 kartu KIA terhadap Jumlah anak dibawah usia wajib KTP yang memiliki akta kelahiran sebanyak 155.817 anak dengan capaian 67,69%

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah KIA yg diterbitkan}}{\text{Jumlah Anak dibawah usia wajib KTP yg memiliki akta Kelahiran}} \times 100\% \\ &= \frac{105.476}{155.817} \times 100\% = 67,69\% \end{aligned}$$

Cakupan Penerbitan KIA pada tahun 2019 belum memenuhi target dikarenakan belum Optimalnya dukungan dari Stakeholder lain seperti Kelurahan, Kecamatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial dalam meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak.

e. Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan Orang Asing

Dokumen Kependudukan Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal Bagi Orang Asing yg bekerja di Kota Cilegon, yang mempunyai kewajiban melaporkan keberadaannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk selanjutnya dibuatkan SKTT.

Pada Tahun 2019 Jumlah dokumen kependudukan orang asing yang diterbitkan sebanyak 999 SKT terhadap jumlah permohonan dokumen kependudukan orang asing sebanyak 999 orang dengan capaian 100%

$$= \frac{\text{Jumlah Dok Kependudukan Orang Asing yg diterbitkan}}{\text{Jumlah Permohonan Dok Kependudukan Orang Asing}} \times 100\%$$
$$= \frac{999}{999} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan yang mendukung didalam capaian indikator kinerja **Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk** adalah Kegiatan Pelayanan Langsung Dokumen Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Pengawasan Dokumen Kependudukan Orang Asing dan Kegiatan Pendataan Penduduk Rentan dan Penduduk non Permanen.

2. Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pendaftaran penduduk

Waktu Rata-rata pada setiap layanan pada bidang Pendaftaran Penduduk tahun 2019 mencapai target yaitu 1 hari kerja dari Target yg telah ditetapkan yaitu 1 hari yang dihitung dari Jumlah waktu pelayanan dari berbagai jenis pelayanan terhadap jumlah jenis pelayanan pendaftaran penduduk sebagai berikut :

Rata-rata Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah

1. KK	: 1 hari
2. KTP-el	: 1 hari
3. SKPD	: 1 hari
4. SKP	: 1 hari
5. SKPLN	: 1 hari
6. SKDLN	: 1 hari
7. SKTT	: 1 hari
8. Legalisasi	: 1 hari
9. KIA	: 1 hari

Jumlah total 9 hari

Indikator waktu rata - rata penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan, dari target 1 hari dapat diselesaikan dalam 1 hari sehingga Pencapaian indiktor ini sebesar 100%

A.2 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Tabel 3.2.6b
Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun
Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil						406,29	396,24	97,53%
	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	%	82,50	95,82	116,15%			
	Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pencatatan sipil	hari	1	1,19	84,03%			
Pembinaan Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Pelayanan Langsung Akta Perkawinan	Terlaksananya pembinaan pencatatan perkawinan, perceraian dan pelayanan langsung Akta Perkawinan	orang	100	100	100,00%	56,29	55,80	99,14%
Sosialisasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian	Terlaksananya penyampaian informasi tentang status anak, pewarganegaraan, kematian dan Keluarga Binaan P2WKSS kepada Masyarakat di Kota Cilegon	orang	250 ; 25	250 ; 25	100,00%	45,00	45,00	100,00%
Sosialisasi dan Pelayanan Langsung Akte Kelahiran	Terlaksananya Pelayanan langsung Akte Kelahiran di 43 Kelurahan	kelurahan	43	43	100,00%	120,00	119,37	99,47%
Pendokumentasian Permohonan dan Register Akte Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pendokumentasian Permohonan dan register akte kelahiran	buku	100	100	100,00%	25,00	24,75	99,00%
Pelayanan Langsung Akta Kematian	Terlaksananya Pelayanan Langsung akta kematian di setiap kecamatan	kecamatan	8	8	100,00%	160,00	151,33	94,58%

1. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelayanan memenuhi kebutuhan setiap masyarakat Kota Cilegon melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga.

Adapun capaian indikator cakupan pelayanan pencatatan sipil dari target 82,50% dapat direalisasikan 95,82% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 116,15% ketercapaian realisasi indikator program dapat dihitung melalui 4 jenis pelayanan yang dilakukan antara lain :

a. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak usia 0-18 Tahun

Capaian pada Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebesar 83,27% didapat dari Jumlah Anak Usia 0-18 yang memiliki Akta Kelahiran sebesar 115.191 akta dibagi Jumlah Anak Usia 0-18 tahun sebesar 138.326 anak

$$= \frac{\text{Jumlah Anak Usia 0 – 18 Tahun yg memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 Tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{115.191}{138.326} \times 100\% = 83,27\%$$

b. Cakupan Penerbitan Akte Kematian

Cakupan Akta kematian merupakan Akta bagi orang yang sudah meninggal yg berdomisili di Kota Cilegon, dan melaporkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon.

Capaian pada Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian sebesar 100% didapat dari Jumlah Kutipan Akta Kematian yg diterbitkan sebesar 1.808 akta kematian dibagi Jumlah Kematian yg terjadi sebesar 1.808 kematian.

$$\frac{\text{Jumlah Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kematian yg terjadi}} \times 100\%$$
$$= \frac{1.808}{1.808} \times 100\% = 100\%$$

c. Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim

Capaian pada Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim yang diajukan sebesar 100 %, didapat dari Jumlah Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim yang diajukan sebesar 90 Akta dibagi Jumlah Akta Perkawinan Non Muslim yg diterbitkan sebesar 90 Akta.

$$= \frac{\text{Jumlah Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim yg diajukan}}{\text{Jumlah akta Perkawinan non Muslim yg di terbitkan}} \times 100\%$$
$$= \frac{90}{90} \times 100\% = 100\%$$

d. Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim

Capaian pada Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim yang diajukan sebesar 100 % didapat Jumlah Kutipan Akta Perceraian Non Muslim yang diajukan sebanyak 5 Dokumen dibagi Jumlah akta perceraian non muslim yang diterbitkan tahun 2019 sebesar 5 Dokumen

$$= \frac{\text{Jumlah Kutipan Akta perceraian non muslim yang di ajukan}}{\text{Jumlah akta Perceraian non muslim yg di terbitkan}} \times 100\%$$
$$= \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

2. Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pencatatan Sipil

Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

Rata-rata Penyelesaian Pelayanan Pencatatan Sipil adalah

1 Akte Kelahiran	: 1 hari
2 Akte Kematian	: 1 hari
3 Akte Perkawinan	: 1 hari
4 Akte Perceraian	: 1 hari
5 Akte Pengangkatan Anak	: 1 hari
6 Akte Pengesahan Anak	: 1 hari
7 Akte Pengakuan Anak	: 1 hari
8 Akte Perubahan Nama	: 2 hari
9 Pembatalan AktPerkawinan	: 2 hari
10 Surat Keterangan Lahir Mati	: 1 hari
11 Perubahan Peristiwa Penting Lainnya	: 1 hari
12 Perubahan Status Kewarganegaraan	: 1 hari
13 Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri	: 1 hari
14 Laporan Perkawinan WNI Di Luar Negeri	: 1 hari
15 Legalisir Akta-Akta Pencatatan Sipil	: 1 hari
16 <u>Pembatalan Akta Perceraian</u>	: <u>2 hari</u>

19 hari

$$\frac{19 \text{ hari}}{16 \text{ jenis layanan}} = 1,19 \text{ hari}$$

Penyelesaian pelayanan pencatatan Sipil adalah Waktu Rata-rata pada setiap layanan pada bidang Pencatatan Sipil. Pada tahun 2019 waktu rata-rata penyelesaian Berbagai Pelayanan mencapai target yaitu 1,19 hari dari target 1 hari kerja sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 84,03%

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung dengan kegiatan antara lain : Mengikuti Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil di yang diadakan oleh Dirjen Dukcapil dan Provinsi Banten, Sosialisasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian yang bertujuan agar masyarakat Kota Cilegon dengan mudah mengetahui Informasi tentang pentingnya Akta-Akta Pencatatan Sipil, Pelayanan Keliling percepatan Akte Kelahiran 0-18 Tahun di 8 kecamatan dan 43 Kelurahan se-kota Cilegon, Pelayanan Keliling Ke sekolah SMA/SMK/MAN Sekota Cilegon dan Pelayanan Car free day serta even-even tertentu, melaksanakan Pelayanan Langsung Akta Kematian di 8 Kecamatan, pembinaan pencatatan perkawinan, perceraian dan pelayanan langsung akta perkawinan non muslim, Pembinaan P2WKSS memberikan pelayanan akta – akta pencatatan sipil.

A.3 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tabel 3.2.6c

Target dan Realisasi Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						518,51	510,68	98,49%
	Tingkat validasi, akurasi, dan up to datenya data	%	95	95,12	100,13%			
Pemeliharaan SIAK	Terpeliharanya jaringan aplikasi SIAK Dinas dan Kecamatan	bulan	12	12	100,00%	126,20	125,71	99,61%
Pengelolaan SIAK	Terpenuhinya Tata Kelola, SDM teknologi, Informasi dan Komunikasi baik di Kecamatan maupun dinas	tenaga operator	50	50	100,00%	177,31	176,66	99,64%
Pembinaan dan Penyusunan Buku Induk Penduduk	Tersedianya Pelaporan dan Penyusunan Buku Induk Penduduk	Buku	43	43	100,00%	65,00	61,37	94,41%
Percepatan Perekaman Usia Wajib KTP	Terpenuhinya perekaman KTP-el di sekolah	Sekolah	20	20	100,00%	150,00	146,95	97,97%

Program Peningkatan Data dan Informasi Kependudukan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dalam mengolah data akan disimpan ke dalam satu basis data yang terintegrasi secara nasional melalui jaringan Internet sehingga data-data tersebut menjadi sumber basis data kependudukan secara nasional yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pada Program *Program Peningkatan Data dan Informasi Kependudukan* terdapat satu indikator program yaitu :

1. Tingkat Validasi, Akurasi, dan Up To Date nya Data

Yaitu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan/kebenaran data suatu instrument yang akurat terhadap data yg bermasalah, Pada Tahun 2019 jumlah data terverifikasi dan tervalidasi sebanyak 423.362 data terhadap data anomaly (data bermasalah) sebanyak 445.083 data.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Data terverifikasi dan tervalidasi}}{\text{Data Anomali (Data bermasalah)}} \times 100\% \\
 &= \frac{423.362}{445.083} \times 100\% = 95,12\%
 \end{aligned}$$

Indikator Pada Presentase Fakir miskin, dari target 95% dapat direalisasikan 95,12% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 100,12 % Keberhasilan Indikator ini didukung melalui kegiatan pengelolaan SIAK, percepatan perekaman penduduk usia KTP el.

A.4 Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Tabel 3.2.6d

Target dan Realisasi Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan						424,73	410,98	96,76%
	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan terhadap target instansi	Instansi	15	15	100,00%			
	Jumlah Buku Profil yang diselesaikan	buku	125	125	100,00%			
Sosialisasi Kerjasama Penyelenggaraan Dokumen Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Kerjasama Penyelenggaraan Dokumen Kependudukan	orang	40	40	100,00%	40,75	36,74	90,15%
Promosi Pelayanan Publik Dokumen Kependudukan	Terlaksananya Promosi Pelayanan Publik Dokumen Kependudukan	tayang	4	4	100,00%	64,00	63,62	99,40%
Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan	buku	125	125	100,00%	60,25	60,17	99,87%
Penyusunan Dokumen Analisa Kependudukan	Tersusunnya Dokumen Analisis Kependudukan	buku	45	45	100,00%	14,98	14,90	99,47%
Peningkatan Inovasi Pelayanan di Bidang Kependudukan	Terlaksananya Peningkatan Inovasi Pelayanan di Bidang Kependudukan	Kegiatan	2	2	100,00%	64,75	64,65	99,85%
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dalam pemanfaatan Data Kependudukan	Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kerjasama dalam pemanfaatan data Kependudukan Oleh Instansi terkait	orang	65	65	100,00%	30,00	27,01	90,03%
Pengembangan/Peningkatan Pelayanan Publik Masyarakat	Tersedianya Informasi Layanan Publik	Paket	2	2	100,00%	150,00	143,90	95,93%

Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kerjasama, Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan serta inovasi pelayanan. Terdapat dua indikator program yaitu :

1. **Jumlah Buku Profil Kependudukan yg terselesaikan** pada tahun 2019 sebanyak **125** buku dari target **125** buku dengan capaian sebesar **100%**
2. **Cakupan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan terhadap target Instansi**

dari target kinerja **15 instansi** realisasi **20 Instansi** capaian kinerja **135%**

$$= \frac{\text{Jumlah Instansi yang melakukan kerjasama}}{\text{Jumlah target instansi (15 instansi)}} \times 100\%$$

$$= \frac{20}{15} \times 100\% = 135\%$$

Bentuk kerjasama instansi yang sudah terjalin antara lain :

- Perjanjian kerjasama dalam rangka peningkatan cakupan akta kelahiran dengan Instansi Terkait (3 Rumah Sakit Umum, 3 RSIA, 6 Klinik Bersalin, 2 OPD)
- Perjanjian kerjasama dalam rangka pemanfaatan dokumen kependudukan untuk Dokumen (KIA), sebanyak 4 pelaku usaha Antara lain : ASA Sport Centre, The Royal Krakatau (Krakatau Water Word, The Level, dan Krakatau Garden), Metro Sport Centre dan KFC.
- Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data 1 OPD dan 1 lembaga (BPRS)

A.5 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Tabel 3.2.6e

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)						6.019,40	5.589,07	92,85%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	100	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	66,49	66,49%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	98,47	98,47%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	92,14	92,14%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

- 1) Belum optimalnya Peran dan Dukungan dari Stakeholder lain seperti kelurahan dan kecamatan dalam mensosialisasikan pentingnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk .
- 2) Belum maksimalnya Informasi yang diterima masyarakat tentang Updatenya data kependudukan .
- 3) Faktor alam dan cuaca yang sangat berpengaruh terhadap koneksi jaringan SIAK.
- 4) Sering terjadinya trouble pada jaringan Telkom untuk pelayanan KTP-el baik rekam maupun cetak.
- 5) Terjadinya kerusakan pada peralatan KTP-el.
- 6) Masih perlunya komitmen dalam pemanfaatan data dan inovasi oleh berbagai pihak.



B.2 Solusi

- 1) Perlunya Melibatkan Stakeholder dalam merealisasikan aspirasi pelayanan penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk
- 2) Mensosialisasikan Pentingnya Update Dokumen Kependudukan Keseluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan potensi penyebaran Informasi yang optimal seperti media social
- 3) Melaksanakan supervisi dan pemeliharaan SIAK secara berkala dan kontinyu/rutin.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Jarkomdat Ditjen melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- 5) Melakukan inventarisasi peralatan KTP-el yang rusak untuk di perbaiki yang dikordinasikan melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- 6) Perlunya penguatan Komitmen terhadap instansi yang diajak untuk berkerjasama dalam pemanfaatan data inovasi yang di dukung dalam penguatan Regulasi

3.2.7 Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Dinas Sosial)

Tabel 3.2.7a

Target dan Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						1.442,10	1.368,91	94,93%
	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap inovasi Teknologi Tepat Guna	%	69,30	105,00	151,52%			
	Cakupan pembentukan Posyantek	%	15,69	100,00	637,35%			
	Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	25,00	25,83	103,32%			
Pemasyarakatan dan Pengembangan TTG	Terlaksananya Sosialisasi Program TTG	orang	1.265	1.265	100,00%	286,19	258,56	90,35%
	Terlaksananya LCI TTG ke 13	keg	1	1	100,00%			
	Terlaksananya lomba menggambar TTG ke 9	keg	1	1	100,00%			
	Terlaksananya gelar TTG XV Tk.Prov.Banten	keg	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Gelar TTG Nasional	keg	1	1	100,00%			
Penguatan Lembaga Posyantek	Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Posyantek	kali	4	4	100,00%	380,64	368,96	96,93%
	Terlaksananya pembinaan dan penguatan Posyantek	keg	2	2	100,00%			
	Terlaksananya Bimtek pengurus Posyantek Kel	angkatan	3	3	100,00%			
	Terlaksananya monitoring tim Kota ke Posyatek Kelurahan	keg	2	2	100,00%			
	Terlaksananya lomba pengelolaan posyantek ke 9 tk. Kota	keg	1	1	100,00%			
	Terlaksananya monitoring tim kota ke posyantek kec	kec	8	8	100,00%			
	Terlaksananya Gelar TTG Nasional XXI reward bagi posyantek kel	keg	1	1	100,00%			
Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	orang	510	510	100,00%	425,25	395,98	93,12%
Pendampingan DPWkel	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan DPW Kelurahan	kelurahan	43	43	100,00%	242,79	238,90	98,40%
Penyuluhan Pemberdayaan masyarakat dan informasi program pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Wilayah Kelurahan	Terlaksananya Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Wilayah Kelurahan	orang	640	400	62,50%	107,23	106,51	99,32%

Pada Program **Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan** terdapat empat indikator program yaitu :

- **Tingkat partisipasi masyarakat terhadap inovasi Teknologi Tepat Guna,**

Capaian indikator program ini menunjukkan semakin banyak produk inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam perlombaan Teknologi

Tepat Guna dan juga untuk lebih mengenalkan Teknologi Tepat Guna secara lebih luas dengan melalui kegiatan-kegiatan seperti gelar/pameran teknologi tepat guna. Pada Tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti inovasi Teknologi Tepat Guna sebanyak 63 orang dari jumlah peserta yang diharapkan mengikuti inovasi Teknologi Tepat Guna hanya sebanyak 60 orang.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap inovasi TTG:

$$\frac{\text{jumlah partisipasi masyarakat terhadap inovasi TTG}}{\text{Jumlah peserta yang diharapkan mengikuti inovasi TTG}} \times 100 = \frac{63}{60} \times 100\% = 105\%$$

Indikator Pada Tingkat partisipasi masyarakat terhadap inovasi Teknologi Tepat Guna, dari target 69,3% dapat direalisasikan 105% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 151,52 %

- **Cakupan pembentukan Posyantek**, merupakan indikator yang mengukur jumlah Posyantek yang terbentuk di Kota Cilegon. Berdasarkan **Peraturan Kementerian Desa nomor 23 Tahun 2017** menyatakan bahwa kelurahan dan kecamatan harus membentuk Posyantek, adapun pada tahun 2019 telah terbentuk di 43 kelurahan melalui anggaran DPWkel.
- **Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif** merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan dalam memerlihora kesadaran dan tanggungjawab sosial generasi muda untuk berperan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Presentase lembaga kemasyaarakatan yang aktif =

$$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyaarakatan yang aktif}}{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan}} \times 100 = \frac{86}{333} \times 100\% = 28,83\%$$

Indikator Pada Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, dari target 25% dapat direalisasikan 25,83% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 103,32 %

Keberhasilan capaian program indikator diatas disebabkan keterlibatan lembaga kemasyarakatan melalui program Dana Pembangunan Wilayah kelurahan (DPWKel) serta adanya kegiatan workshop mengenai sinergitas kelembagaan/ LPM dengan RT/RW.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam peningkatan program pemberdayaan masyarakat

B.2 Solusi

Perlunya penguatan koordinasi yang intensif antar lembaga kemasyarakatan dengan dinas sosial agar peran masyarakat dalam meningkatkan program pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, terukur dan mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan wilayah kelurahan.

3.2.8 Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Tabel 3.2.8a

Target dan Realisasi Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk						8.209,51	8.157,71	99,37%
	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (CU/PUS)	%	66,50	76,13	114,48%			
	Cakupan pelayanan KB	%	100,00	100,00	100,00%			
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB namun tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,00	8,32	144,53%			
	Cakupan Klasifikasi Posyandu Mandiri, Purnama, Pratama	Posyandu	374,00	374,00	100,00%			
Pengembangan Promosi dan Informasi Program KB-KRR	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Promosi dan Informasi Program KB-KRR	Kegiatan	3	3	100,00%	67,00	65,40	97,61%
Orientasi KIE bagi TOGA/TOMA se-Kota Cilegon	Terlaksananya Kegiatan Orientasi KIE Bagi TOGA/TOMA Se-Kota Cilegon	Peserta	240	240	100,00%	100,00	99,74	99,74%
Pendampingan Pendataan Keluarga dan Pengelolaan Data Basis	Terlaksananya pendampingan pendataan keluarga dan pengelolaan data basis	Kader Pendata	1.133	1.027	90,66%	72,00	65,27	90,66%
Penguatan Kelembagaan Posyandu	Terselenggaranya koordinasi dengan pokjanal posyandu	posyandu	374	374	100,00%	668,74	647,49	96,82%
Peningkatan Kapasitas Kader Cilegon Mandiri	Tersalurkannya Operasional Kader Cilegon Mandiri	Kader	2.550	2.550	100,00%	6.281,52	6.280,16	99,98%
Pembinaan Posyandu	Terbinanya Kader Posyandu	Posyandu	374	374	100,00%	77,06	77,06	100,00%
Pelatihan KIP Konseling KB bagi Pengelola Program KB	Terlaksananya Pelatihan KIP Konseling KB dalam Pelaksanaan Program KB	Orang	210	210	100,00%	75,00	74,96	99,95%
Temu Pengelola KB/KS	Terlaksananya Temu Pengelola KB/KS	Orang	200	200	100,00%	79,00	77,65	98,28%
Pembinaan Institusi dan Pengelola Program KB	Terlaksananya pembinaan Pengelola Program KB	orang	280	280	100,00%	70,00	68,07	97,24%
Dukungan Media KIE (DAK)	Terealisasinya Penyediaan Dukungan Media KIE	%	100	100	100,00%	162,80	161,00	98,89%
Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader (DAK)	Tersedianya Operasional Pendukung Kegiatan Pembinaan Program KB	Kelurahan	43	43	100,00%	206,40	205,37	99,50%
Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak bagi Kader Posyandu	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak Bagi Kader Posyandu	Kader	1.850	1.850	100,00%	350,00	335,55	95,87%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (UPT KCM I)						11,19	11,19	100,00%
Pembinaan Kader KCM wilayah I	Terlaksananya Kegiatan Kader KCM Wilayah I	Kader KCM	150	150	100,00%	1,75	1,75	100,00%
Biaya Operasional Penyuluhan (DAK)	Terlaksananya Penyuluhan KB di Balai Penyuluhan KB	%	100	100	100,00%	9,44	9,44	100,00%
Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (UPT KCM II)						14,12	14,12	100,00%
Pembinaan Kader KCM wilayah II	Terlaksananya Pembinaan Kader KCM Wilayah II	Orang	157	157	100,00%	3,19	3,19	100,00%
Biaya Operasional Penyuluhan (DAK)	Terlaksananya Penyuluhan KB Balai Penyuluhan KB	%	100	100	100,00%	10,93	10,93	100,00%
Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (UPTD Keluarga Berencana)						174,69	159,81	91,48%
Biaya Operasional Penyuluhan (DAK)	Terlaksananya Kegiatan Operasional Keluarga Berencana	Persen	100	94	93,73%	119,63	112,14	93,73%
Pembinaan Kader KCM UPT KB	Terlaksananya Pembinaan BKB	Orang	60	52	86,59%	55,06	47,68	86,59%

Pada **Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk** terdapat 4 (empat) Indikator Program yaitu :

a. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif (CU/PUS)

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami isteri yang sah yang isterinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2019 jumlah PUS / Pasangan usia subur yang ada di Kota Cilegon sebanyak 87.348 PUS terhadap jumlah peserta KB aktif sebanyak 66.501 peserta KB. Sehingga capaian indikator Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif (CU/PUS), dari target 67 % dapat direalisasikan 76,13% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 114 %.

Faktor Keberhasilan ini didukung dengan adanya pembinaan dan penyuluhan mengenai program KB, pembinaan TRIBINA (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia)

b. Cakupan Pelayanan KB

Tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Pelayanan KB Keliling adalah memperluas jangkauan program KB terutama daerah-daerah terpencil dengan mendatangi tempat/ lokasi calon peserta keluarga berencana dan memberikan pelayanan kontrasepsi di tempat. Pada Tahun 2019 Jumlah Pasangan usia subur yang datang ingin ber KB aktif sebanyak 66.501 orang terhadap Jumlah Pasangan usia subur

yang dilayani sebanyak 66.501 orang peserta KB aktif sehingga capaian indikator Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif (CU/PUS), dari target 100 % sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 100 %.

Faktor Keberhasilan ini didukung adanya kegiatan Pelayanan KB, Pelayanan KB Keliling, Biaya Operasional Distribusi Alokasi (DAK), Kampung KB dan Biaya Operasional Penyuluhan UPT.KB (DAK)

c. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani disebut unmet need, Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB. Pada tahun 2019 Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 7.271 orang terhadap Jumlah PUS di wilayah tersebut sebanyak 87.348.

Adapun capaian indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need), dari target 15 % dapat direalisasikan 8,32% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 144,53 %.

Faktor Keberhasilan ini didukung adanya pembinaan dan penyuluhan mengenai program KB, pembinaan TRIBINA (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia)

d. Cakupan Klasifikasi Posyandu Mandiri, Purnama, Pratama

Cakupan Klasifikasi Posyandu Pratama, Madya, Purnama, Mandiri adalah atas dasar yang digunakan sebagai penyaring atau penentu tingkat kemandirian Posyandu. Posyandu dapat digolongkan menjadi 4 Tingkatan Pada Tahun 2019 pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu terdapat Jumlah Posyandu 374, Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya kegiatan Pembinaan Posyandu dan Penguatan Kelembagaan Posyandu.

JUMLAH POSYANDU SE KOTA CILEGON TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH POSYANDU	TINGKATAN POSYANDU			
			PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
1.	Kecamatan Cilegon	38	0	36	1	1
2.	Kecamatan Citangkil	67	0	60	6	1
3.	Kecamatan Cibeber	48	0	42	5	1
4.	Kecamatan Ciwandan	43	0	37	5	1

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH POSYANDU	TINGKATAN POSYNDU			
			PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
5	Kecamatan Pulomerak	55	0	51	3	1
6.	Kecamatan Purwakarta	40	0	34	5	1
7.	Kecamatan Jombang	44	0	38	5	1
8.	Kecamatan Grogol	39	0	34	4	1
JUMLAH		374	0	332	34	8

Faktor keberhasilan dari indikator ini adanya dukungan dari kegiatan rapat antar forum posyandu, Menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu, Meningkatkan kualitas kemampuan dan ketrampilan kader posyandu, Meningkatkan fasilitas Posyandu, Meningkatkan motivasi pengeloan dalam pelayanan posyandu, Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesinambungan kegiatan posyandu, Meningkatkan fungsi pendampingan dan kualitas penguatan Kelembagaan posyandu, Meningkatkan motivasi dan kinerja dalam pencatatan Sistim Informasi Posyandu yang benar.

A.2 Program Bina Keluarga Sejahtera

Tabel 3.2.8b
Target dan Realisasi Program Bina Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Bina Keluarga Sejahtera						1.903,48	1.873,35	98,42%
	Rasio kapasitas pelayanan posyandu	%	100,00	100,00	100,00%			
	Proporsi posyandu yang memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebutuhan	%	60,00	80,00	133,33%			
	Rasio PLKB di setiap kelurahan	%	60,00	18,60	31,00%			
	Peningkatan proporsi jumlah kelompok catur bina terhadap jumlah balita	%	0,78	0,35	44,87%			
	Proporsi peningkatan kompetensi kader tribina	%	156,00	150,00	96,15%			
	Prevalensi Peserta KB Aktif	%	67,00	57,79	86,25%			
	Presentasi Peserta KB Baru	%	100,00	114,00	114,00%			
	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif MKJP	%	13,00	19,90	153,08%			
pelayanan KB	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan KB dalam rangka Bhaksos IBI Kes, Bhaksos TNI KB Terpadu, Pelayanan KB dalam rangka Satuan Gerak PKK, Pelayanan KB dalam rangka Hari Besar Nasional Tingkat Kota,	Even	4	4	100,00%	100,00	100,00	100,00%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Pertemuan UPT KB Se-Kota Cilegon							
Pelayanan KB Keliling	Terlaksananya Pelayanan KB Mobile	Zona	43	43	100,00%	125,00	125,00	100,00%
Penyelenggaraan Hari Keluarga	Terlaksananya Lomba Harganas tingkat Kota, tingkat Provinsi dan tingkat Nasional	Kategori	12	12	100,00%	350,00	340,47	97,28%
Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Program Kampung KB di Kota Cilegon	Kelurahan	9	9	100,00%	150,00	144,06	96,04%
Pembinaan Pendapatan Ekonomi Keluarga (PPEK)	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Perempuan	orang	80	80	100,00%	100,00	99,76	99,76%
Pembinaan Kader Tribina Keluarga	Terlaksananya Pembinaan Kader Tri Bina Keluarga	Orang	150	150	100,00%	71,00	68,71	96,77%
penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	Terlaksananya Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Orang	40	40	100,00%	53,22	51,66	97,07%
Penguatan Kelembagaan Saka Kencana Pramuka	Terlaksananya Penguatan Saka Kencana dalam Program KB	Orang	80	80	100,00%	42,00	41,99	99,96%
Biaya Operasional Distribusi Alokasi (DAK)	Terlaksananya Pelayanan KB Mobile	Kecamatan	8	8	100,00%	25,00	21,67	86,69%
Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK)	Terlaksananya Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB	Orang	15	15	100,00%	760,00	755,41	99,40%
Dukungan Manajemen (DAK)	Tercapainya Biaya Dukungan Pengelolaan Dana BOKB	Tahun	1	1	100,00%	127,26	124,62	97,93%

Pada **Program Bina Keluarga Sejahtera** terdapat 8 (delapan) indikator program yaitu :

a. Rasio Kapasitas Pelayanan Posyandu

Jumlah Posyandu di Kota Cilegon pada tahun 2019 sebanyak 374 posyandu sedangkan jumlah balita sebanyak 33.125 balita, dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita yang ada di Kota Cilegon mencapai 1:89 Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu melayani untuk 89 balita, dengan adanya DPW-Kel. sangat membantu dalam peningkatan sarana dan prasarana Posyandu di wilayah Kota Cilegon, jumlah posyandu yang di bangun melalui DPW-kel mencapai 38 unit Posyandu.

b. Proporsi Posyandu Yang Memiliki Sarana Dan Prasarana Yang Memenuhi Standar Kebutuhan

Pada Tahun 2019 Proporsi posyandu yang memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebutuhan sebanyak 299 Posyandu terhadap Jumlah keseluruhan Posyandu yang ada sebanyak 374 Posyandu.

Indikator Proporsi Posyandu Yang Memiliki Sarana Dan Prasarana Yang Memenuhi Standar Kebutuhan dari target 60% dapat direalisasikan 80% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 133 %, standar untuk kebutuhan sarana dan

prasarana Posyandu diantaranya seperti Pembangunan Gedung, timbangan, meja, kursi, lemari dan velbed.

Faktor keberhasilan peningkatan sarana dan prasarana didukung melalui kegiatan Anggaran 2019 sarpras wilayah DPW kel yang terbangun 20 posyandu dan pendukung sarana prasarana berupa velbed yang peruntukannya 374 posyandu.

c. Rasio PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) di setiap Kelurahan

Pada tahun 2019 Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana /PLKB di Kota Cilegon sebanyak 8 orang, sedangkan jumlah Kelurahan sebanyak 43 Kelurahan maka capaian realisasi 18,60% dari target yang ditetapkan 60 % sehingga capaian kinerja sebesar 31%. Capaian indikator ini rendah dikarenakan Satu orang PLKB bertanggung jawab terhadap 5 Kelurahan atau lebih, maka berdampak pada beban kerja PLKB yang berat.

Mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) bahwa satu orang PLKB harus menangani 2 kelurahan dari 43 kelurahan (Standart yang dibutuhkan 21 s/d 22 orang untuk 43 kelurahan).

d. Prevalensi Peserta KB Aktif

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Suami Istri yang syah atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan, Pada Tahun 2019 Adapun Jumlah Peserta Program KB Aktif sebanyak 57.798 peserta dibanding Jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 74.424 orang, sehingga capaian indikator Prevalensi Peserta KB Aktif, dari target 67% dapat direalisasikan 57,79% sehingga Pencapaian indikator kinerjanya ini sebesar 77,66 %, Faktor Keberhasilan ini didukung adanya Pelayanan KB, Pelayanan KB Keliling.

e. Presentasi Peserta KB Baru

Peserta KB Baru adalah Peserta KB yang baru pertama kali menggunakan salah alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi Peserta KB setelah melahirkan atau keguguran, Pada tahun 2019 jumlah peserta KB baru adalah 9.746 orang dari jumlah Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) sebesar 8.549 orang, sehingga capaian indikator Presentasi peserta KB Baru, dari target 100% dapat direalisasikan 114%, keberhasilan indikator ini didukung melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan mengenai program KB, Pelayanan KB Keliling.

f. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif MKJP

Pada tahun 2019 jumlah PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) sebanyak 11.503 orang terhadap jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 57.798 orang, sehingga capaian indikator menjadi peserta KB aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), dari target 13% dapat direalisasikan 19,90% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 153 %, Keberhasilan indikator ini didukung melalui kegiatan Pelayanan KB, Pelayanan KB Keliling, dan Operasional Distribusi Alokon (DAK).

g. Peningkatan Proporsi Jumlah Kelompok Catur Bina Terhadap Jumlah Balita

Balita adalah anak yang usianya dibawah lima tahun. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (Balita), Peningkatan Proporsi jumlah kelompok catur bina terhadap jumlah balita, adapun pada tahun 2019 Jumlah Balita sebanyak 35.519 di bagi Kelompok BKB,BKR,BKL sebanyak 124 Kelompok. Sehingga persentase realisasinya adalah 0,35%, dari target 1% maka capaian kinerjanya sebesar 34,90%. Dengan melihat capaian tersebut masih diperlukannya penambahan/pembentukan kelompok BKB,BKR dan BKL di Kota Cilegon, dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan bagi para ibu dalam membina tumbeuh kembang anak.

h. Proporsi peningkatan kompetensi kader tribina (KBKS)

Program BKB, BKR dan BKL merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial melalui peningkatan kepedulian, pengetahuan dan sikap keluarga dalam mengasuh, membina tumbuh kembang balita, anak dan remaja, serta peningkatan kualitas hidup lansia.

Pada Tahun 2019 Proporsi peningkatan kompetensi kader tribina adalah Jumlah kader Tribina yang melakukan pembinaan sebanyak 150 dari target sebanyak 156 maka capaian kinerjanya sebanyak 96,15%, indikator ini didukung melalui kegiatan Pembinaan Kader Tribina Keluarga.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**B.1 Permasalahan**

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pada Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB dalam rangka menghasilkan program KB
2. Belum memiliki *Grand Design* Kependudukan Kota Cilegon (Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga)
3. Belum optimalnya peran kader dan Pos KB dalam pembantu penyuluhan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga.

B.2 Solusi

1. Memanfaatkan PLKB dan PKB yang ada dan mengusulkan tenaga Petugas Lapangan KB yang ahli
2. Berkoordinasi dengan Bappeda (Bidang Litbang) Kota Cilegon agar terbentuknya *Grand Design* Kependudukan Kota Cilegon
3. Meningkatkan peran kader melalui pembinaan rutin, pelatihan teknis konseling, dan pelatihan KIE

3.2.9 Bidang Urusan Perhubungan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tabel 3.2.9a
Target dan Realisasi Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						3.110,41	2.952,22	94,91%
	Cakupan fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, Guard Rail, Marka)	%	80,00	62,71	78,39%			
	Cakupan Penunjang Sistem Angkutan Umum Massal (Saum)	%	3,00	17,85	595,00%			
	Rasio kepatuhan awak angkutan umum terhadap standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota	Unit	1.270	1.329	104,65%			
Pembinaan dan Pemilihan Awak dan Angkutan Umum Teladan (AKUT)	tersedianya dan terpasangnya stiker jurusan angkutan perkotaan KOTA Cilegon	orang	100	100	100,00%	43,10	43,00	99,77%
Bina disiplin Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Kota	Berkurangnya waktu tempuh jalan kota pada peak hour	km/jam	30	30	100,00%	396,77	375,88	94,74%
Stikerisasi Angkutan Kota	Tersedianya dan Terpasangnya stiker Jurusan pada angkutan Perkotaan kota cilegon	lembar	600	600	100,00%	44,40	43,08	97,03%
Pemeliharaan Rutin Rambu-rambu Bersuara di Jalan Kota	Terpeliharanya Rambu-rambu Lalu Lintas di ruas Kota Cilegon	Jenis	5	5	100,00%	44,95	44,60	99,23%
Pemeliharaan Rutin Rambu-rambu tidak Bersuara di Jalan Kota	Terpeiharanya Rambu-rambu Lalu Lintas di ruas Kota Cilegon	Unit	32	47	146,88%	86,49	84,77	98,01%
Pembangunan Kantong Parkir Angkutan Barang	Tersedianya dok.perencanaan pembangunan kantong parkir	Dokumen	1	1	100,00%	250,00	226,82	90,73%
Penyusunan Kebijakan Pembuatan Taman Lalu Lintas Layak Anak	Tersedianya penyusunan kebijakan pembuatan taman lalu lintas layak anak	Dokumen	1	1	100,00%	99,25	95,43	96,15%
Pengadaan Sarana dan Prasarana SAUM (DID)	Terbangunnya Halte Bus di Jalan Lingkar Selatan	Unit	4	4	100,00%	300,00	245,65	81,88%
Operasional SAUM (DID)	Beroperasinya armada bus SAUM	UNIT	2	2	100,00%	484,59	476,51	98,33%
Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (DID)	Terlaksananya Pengadaan Rambu Rambu	unit	78	34	43,59%	377,46	368,90	97,73%
Kajian Potensi Retribusi Parkir; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Terminal; Retribusi Ijin Trayek (DID)	Tersedianya Kajian Potensi Retribusi Parkir; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Terminal; Retribusi Ijin Trayek	Dokumen	1	1	100,00%	50,00	47,30	94,60%
Dukungan Operasional SAUM (Prioritas Daerah)	Terlaksananya Dukungan Operasional SAUM	Bulan	10	10	100,00%	115,00	110,54	96,12%
Pengadaan Kendaraan Khusus	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	1	1	94,47%	53,40	50,45	94,47%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Forum Lalu Lintas	Melaksanakan Kegiatan Forum Lalu Lintas	%	100	100	100,00%	150,00	134,67	89,78%
Pendataan angkutan barang di wilayah Kota Cilegon	Melaksanakan Kegiatan Pendataan Angkutan Barang di wilayah Kota Cilegon	%	100	100	100,00%	100,00	99,56	99,56%
Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpenuhinya Rambu Lalu Lintas dan Tiang F	buah	64	49	76,56%	265,00	256,11	96,65%
Penataan dan Penertiban Terminal Seruni	Tersedianya Kegiatan Penataan dan Penertiban Terminal Seruni	%	100	100	100,00%	250,00	248,94	99,58%
Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)						168,80	163,44	96,82%
Operasional Kegiatan Terminal	Tersedianya Operasional kegiatan terminal lainnya	Kegiatan	2	2	100,00%	168,80	163,44	96,82%
Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UPTD Parkir)						29,84	29,33	98,29%
Operasional Kegiatan UPT Parkir	tertatanya penyelenggaraan parkir di kota cilegon	%	100	100	100,00%	29,84	29,33	98,29%

Ketercapaian program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari tiga indikator yaitu: indikator cakupan fasilitas perlengkapan jalan, cakupan penunjang sistem angkutan umum masal (SAUM) dan Rasio kepatuhan awak angkutan umum terhadap standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota.

1. **Realisasi Indikator cakupan fasilitas perlengkapan jalan** sebesar 62.71% dari target kinerja 80 % merupakan target akumulatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sehingga capaian kinerja sebesar 78.38% . untuk perhitungan Indikator cakupan fasilitas perlengkapan jalan dibagi menjadi 2 item yaitu :

- a) **Rambu** cara penghitungan : Rambu yang ada/Kebutuhan rambu * 100

$$\frac{763 \text{ unit}}{1765} \times 100 = 43.22\%$$

1765

- b) **Guadrail** cara penghitungan : Guadrail yang ada/ Kebutuhan * 100

$$\frac{111 \text{ m}^2}{1792 \text{ unit}} \times 100 = 6.2\%$$

1792 unit

Dari data yang diatas maka diasumsikan total presentase realisasi tahun 2019 dari rambu dan guadrail adalah **24.71% dengan perhitungan sebagai berikut $(\%Rambu + \%Guadrail)/2$ dengan hasil $(43.22\% + 6.2\%)/2 = 24.71$, sedangkan data akumulatif dihitung berdasarkan $(\%2018 + \%2019)$ dengan hasil $(24.71\% + 38\% = 62.71\%)$.**

Sementara target kinerja sebesar 80% hal ini terjadi dikarenakan pagu anggaran yang tidak mencukupi sehingga realisasi hanya 62.71%.

- a. Realisasi **Indikator Cakupan penunjang sistem angkutan umum masal (SAUM)** sebesar 17,85 % target 3% sehingga capaian kinerjanya overtarget sebesar 595%. Perhitungan Indikator diperoleh dari **3 item yaitu** : Shelter, bus dan rambu. Pada tahun 2019 capaian kinerja melampaui target karena pada target RPJMD sebesar 3%. Kondisi tersebut disebabkan oleh perhitungan definisi operasional hanya dari shelter 4 unit dan 2 armada Bus pada 1 koridor sehingga realisasi sebesar 17.85%. Cara perhitungannya diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.2.9a.1 Cakupan Penunjang Sistem Angkutan Massal

Indikator	Rumusan	Realisasi 2018	Ket
Cakupan penunjang sistem Angkutan umum Massal (SAUM)		Maka perhitungannya adalah :Total presentase /3 $25\% + 28.57\% / 3 = 17.85\%$	
Shelter		25%	
	Shelter yg ada	4	
	Jumlah Kebutuhan shelter	16	
BUS		28.57%	
	Jumlah Bus	2	
	Kebutuhan Bus	7	
Rambu		0%	
	Jumlah Rambu	0	
	Kebutuhan Rambu	32	

2. Realisasi indikator **Rasio kepatuhan awak angkutan umum terhadap standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota** sebesar 1329 unit dari target 1270 unit. Dari hasil penghitungan diatas telah melebihi target RPJMD sebanyak 1270 unit menjadi 1329 unit. Hal ini diketahui pada saat dilakukan pengawasan dan pendataan ulang terhadap pemilik angkutan perkotaan ternyata berjumlah 1329 unit, sehingga pelayanan trayek dan non trayek melampaui target RPJMD.

Tabel 4.2.9a.2 Jumlah Trayek dan Angkutan Kota

Trayek	Jumlah unit
Cilegon – Merak	660 unit
Cilegon – Anyer	378 unit
Cilegon – Bojonegara	69 unit
Cilegon Pci	185 unit
Jumlah	1292 unit

Tabel 4.2.9a.3 Jumlah Angkutan Non Trayek

Non Trayek	Jumlah unit
Angkutan Karyawan	37 Unit
Jumlah	37 Unit

Terdapat 19 (Sembilan belas) kegiatan pada program pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan. Perhitungan capaian dilakukan dengan cara pengukuran capaian kinerja dan capaian serapan anggaran. Secara umum, capaian kinerja untuk setiap kegiatan pada program ini terlaksana dengan capaian lebih dari 75%.

A.2 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tabel 3.2.9b

Target dan Realisasi Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun Anggaran 2018

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan						20.104,37	16.117,77	80,17%
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengujian kendaraan	%	75,00	79,75	106,33%			
	Prosentase ketersediaan halte	%	100,00	53,33	53,33%			
	Prosentase ketersediaan PJU	%	75,00	63,28	84,37%			
Pembangunan POS DISHUB	Terlaksananya pekerjaan pembangunan pos dishub	Unit	1	1	100,00%	63,10	60,11	95,27%
Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Tersedianya alat uji kendaraan bermotor memadai	unit	8	8	100,00%	148,90	146,47	98,37%
Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan Angkutan Lebaran	Kendaraan yang laik jalan	unit	2.000	2.000	100,00%	24,40	23,52	96,39%
Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan Angkutan Umum dan Barang	Terlaksananya pengujian kelaikan angkutan umum dan angkutan barang di kendaraan	unit	2.000	2.000	100,00%	36,80	36,80	100,00%
Rehabilitasi Halte	Terlaksananya Rehabilitasi Halte	unit halte	2	1	50,00%	187,90	91,85	48,88%
Pemasangan PJU	Terpasangnya Penerangan Jalan umum	Titik	197	194	98,48%	2.500,00	1.095,14	43,81%
Pemeliharaan PJU	Terlaksananya Pemeliharaan PJU	Kegiatan	1	1	100,00%	828,70	744,52	89,84%
Verifikasi Tagihan PJU	Tersedianya Verifikasi Tagihan Listrik PJU	Bulan	12	12	100,00%	70,24	59,94	85,34%
Pembayaran Listrik PJU	Terciptanya Pembayaran Listrik PJU	Tahun	1	1	100,00%	15.500,00	13.279,25	85,67%
Penunjang Pelayanan PJU	Terlaksananya Penunjang Pelayanan PJU	Kegiatan	1	1	100,00%	170,58	160,44	94,05%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pembangunan Halte	terlaksananya pembangunan halte	unit halte	1	1	100,00%	93,40	89,73	96,07%
Pembuatan Database titik PJU Swakelola	Tersedianya Aplikasi Data Base PJU Swakelola	Aplikasi	1	1	100,00%	42,40	41,51	97,90%
Pengadaan Peralatan Pendukung PJU	Terlaksananya Peralatan Pendukung Pelayanan PJU	Item	3	2	66,67%	10,50	4,00	38,10%
Pengadaan Hardware SIM PKB	Terlaksananya Pelayanan Penguji kendaraan bermotor berbasis computer	Unit	13	5	38,46%	116,42	73,29	62,96%
Upgrading SIM PKB	Terlaksananya Pelayanan Pada Pengujian Kendaraan	aplikasi	1	1	100,00%	111,03	109,73	98,83%
Sosialisasi Penerapan SMART CARD SIM PKB (Prioritas 1)	Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Smart Card SIM PKB (Prioritas 1)	Kegiatan	1	1	100,00%	75,00	74,30	99,06%
Kajian Kebutuhan prasarana lalu lintas JL. KH. Wasyid	Tersedianya Kajian Kebutuhan Prasarana Lalu Lintas Jl. KH. Wasyid	Dokumen	1	-	0,00%	100,00	3,45	3,45%
Pemasangan Pagar Taman Layak Anak Terminal Seruni	Tersedianya Pemasangan Taman Pagar Layak Anak Terminal Seruni	Meter	100	100	100,00%	25,00	23,74	94,94%

Ketercapaian program Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari tiga indikator yaitu indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Pengujian Kendaraan), Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dan indikator cakupan fasilitas penerangan jalan umum (PJU).

1. Realisasi **Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Pengujian Kendaraan)** realisasi 79.75% dari target kinerja 75% sehingga capaian 106.33% . Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pada pelayanan pengujian kendaraan yang melibatkan 60 responden penerima pelayanan public di Kota Cilegon, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut mencapai point 79.75 point dimana ada beberapa variable yang menjadi penilaian.

Responden yang dijadikan sampel Pengujian Kendaraan ini adalah responden yang setiap hari berada di area Pengujian Kendaraan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berjumlah 60 orang responden, dan merupakan sampel jenuh dari total responden yang ada. Berdasarkan hasil olah data karakteristik responden di pelayanan Pengujian Kendaraan sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 13.3% dan laki-laki sebanyak 86.7%.

Berdasarkan hasil olah data aplikasi APAQIA, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebesar 79.75 poin termasuk dalam kategori **BAIK**. Jika melihat dari 9 indikator yang ada, Hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan

Pengujian Kendaraan Bermotor dipersepsikan BAIK dengan perolehan nilai sebesar 79.75 poin. Penilaian terbaik yang dipersepsikan oleh masyarakat adalah pada indikator sarana dan prasarana yaitu ketersediaan gedung yang dirasakan oleh masyarakat dianggap telah representatif dengan perolehan nilai 91.75 termasuk dalam kategori SANGAT BAIK. Kemudian pada indikator perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana dan waktu pelayanan juga dipersepsikan baik dengan nilai diatas 80 poin. Keramahan petugas pelayanan maupun penguji dinilai sangat positif oleh masyarakat yang datang untuk melakukan pengujian kendaraannya. Selanjutnya kompetensi penguji dan petugas loket juga dinilai kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta waktu penyelesaian dianggap positif sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Adapun nilai masing-masing indikator tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel. 07

Nilai IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	INDIKATOR	NILAI RATA-RATA	NILAI PER UNSUR	KATEGORI
1.	Persyaratan	3.15	78.75	Baik
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3.13	78.25	Baik
3.	Waktu Penyelesaian	3.22	80.50	Baik
4.	Biaya/Tarif	2.90	72.50	Kurang Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2.93	73.25	Kurang Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3.25	81.25	Baik
7.	Prilaku Pelaksana	3.40	85.00	Baik
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.07	76.75	Baik
9.	Sarana dan Prasarana	3.67	91.75	Sangat Baik
Nilai IKM		3.19	79.75	Baik

Persepsi indikator yang masih dinilai kurang baik oleh masyarakat adalah Biaya / Tarif memperoleh nilai 72.50 termasuk dalam kategori KURANG BAIK. Rendahnya persepsi masyarakat terhadap tingkat kepuasan masyarakat pada indikator ini dikarenakan adanya indikasi praktek percaloan yang dilakukan oleh sejumlah oknum antara supir dan pengusaha. Selain biaya/tariff, indikator Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan juga termasuk yang mendapat persepsi KURANG BAIK yaitu 73.25 poin.

2. Realisasi **Indikator Cakupan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU)** sebesar 63.28% dari target 75 % RPJMD merupakan target akumulatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sehingga capaian 84.37%. Dimana hasil tersebut di dapat dari perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah fasilitas penerangan jalan umum (PJU) yang ada}}{\text{Jumlah kebutuhan PJU selama lima tahun}} \times 100\%$$

Berdasarkan data PJU sampai tahun anggaran 2019 sebanyak 5379 unit (data ini komulatif dari tahun 2018) dan Jumlah kebutuhan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) selama lima tahun adalah 8.500 unit maka penghitungannya adalah :

$$\frac{5379 \text{ unit}}{8500 \text{ unit}} \times 100\% = \mathbf{63.28\%}$$

Dari hasil penghitungan diatas pencapaian target kinerja 63.28% merupakan akumulatif dari tahun 2018 dan tahun 2019, capaian tersebut tidak memenuhi target RPJMD dikarenakan keterbatasan pagu anggaran sehingga tidak memenuhi target .

3. Pada **Indikator Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek** sebesar 53.33% dari target kinerja 100 % RPJMD merupakan target akumulatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sehingga capaian 53.33% . Dimana hasil tersebut di dapat dari :

$$\frac{\text{Jumlah halte yang sudah ada yang dilayani angkutan umum dalam trayek}}{\text{Jumlah kebutuhan halte yang dilayani angkutan umum dalam trayek}} \times 100\% \\ \frac{8 \text{ halte}}{15 \text{ halte}} \times 100\% = \mathbf{53.33\%}$$

Dari hasil penghitungan diatas pencapaian target kinerja (53.33 %) tidak mencapai target RPJMD dikarenakan baru terbangun sebanyak 8 (delapan) halte dari halte yang dibutuhkan selama lima tahun sebanyak 15 (lima belas) dan target RPJMD terlalu tinggi sehingga tidak terserap.

Terdapat 18 (delapan belas) kegiatan pada **Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan** Perhitungan capaian dilakukan dengan cara pengukuran capaian kinerja dan capaian serapan anggaran. Secara umum, capaian kinerja untuk setiap kegiatan pada program ini terlaksana dengan capaian lebih dari 75%. Namun terdapat 5 (lima) kegiatan yang capaiannya kurang dari 75%, yaitu :

1. **Rehabilitasi Halte**, dengan capaian presentasi anggaran sebesar 48.88 % dengan alasan halte yang akan direhabilitasi adalah halte seneja yang pada waktu perencanaan rehab halte kondisi halte masih ada dan pada saat akan dilakukan rehab halte kondisi halte sudah tidak ada dikarenakan ada pembangunan trotoar di wilayah tersebut sehingga diperlukan pembangunan halte kembali dan bukan kegiatan rehabilitasi, sementara dana yang tersedia hanya untuk rehabilitasi dan bukan untuk pembangunan halte
2. **Pemasangan PJU**, dengan nilai kegiatan Rp 2.500.000.000 realisasi anggarannya hanya Rp 1.095.140.200 atau 43,81 %. Kegiatan ini tidak mencapai target anggaran

sebesar Rp 1.404.859.800 karena efisiensi dari pemasangan PJU 8 Kecamatan, BPUJL (Biaya penyambungan listrik PJU), dan terdapat Kegiatan Pemasangan PJU di JLS Tahap 8. Kegiatan ini direncanakan memasang PJU sebanyak 40 (empat puluh) titik di lokasi JLS dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender. Dikarenakan Proses lelang pengadaan barang dan jasa untuk pemasangan PJU mengalami dua kali gagal lelang pada bulan Juli dan Agustus 2019 dan ketika diajukan kembali lelang ulang tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis sehingga lelang tidak dapat dilanjutkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan

3. **Pengadaan Peralatan Pendukung PJU**, dengan capaian presentasi anggaran sebesar 38.10% dengan alasan :

Kegiatan pengadaan belanja modal peralatan alat Oxy Cutting Portable dengan anggaran Rp. 6.000.000,- tidak dapat direalisasikan, hal tersebut terjadi dikarenakan PJU Kota Cilegon hanya memiliki penyimpanan barang (Gudang PJU) tetapi belum memiliki *workshop*.

4. **Pengadaan Hardware SIM PKB**, nilai capaian presentasi anggaran sebesar 62.96% hal ini dikarenakan Pada perencanaan awal diperuntukan untuk pengadaan Videotron Outdoor, akan tetapi harga yang dimasukan kedalam pagu anggaran untuk belanja videotron indoor. Sehingga tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan pagu anggaran.
5. **Kajian Kebutuhan Prasarana Lalu Lintas Jl. KH. Wasyid**, nilai capaian presentasi anggaran sebesar 3.45%. hal tersebut karena waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan .

A.3 Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut

Tabel 3.2.9c Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut						890,00	147,96	16,62%
	Jumlah TUKS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan lainnya mengenai kepelabuhanan di Kota Cilegon	TUKS	18,00	18,00	100,00%			
	Cakupan pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir	km	24,00	24,00	100,00%			
Legal Consulting Kepelabuhan	Penegakan Hukum terhadap UU dan Perda	Kegiatan	1	1	100,00%	85,00	84,91	99,89%
Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Pelayanan diwilayah perairan Cilegon	unit	1	-	0,00%	740,00	0,00	0,00%
Pendataan Alur Pelayaran/Sounding	Jumlah TUKS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang	Alur pelayaran	24	24	100,00%	65,00	63,05	97,00%



undangan dan lainnya mengenai
kepelabuhanan di kota Cilegon

Ketercapaian program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut terdiri dari **2 indikator** yaitu dengan Indikator Jumlah TUKS (Terminal untuk kepentingan sendiri) yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan lainnya mengenai kepelabuhanan di Kota Cilegon dan indikator Cakupan pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir. Adapun penjelasan dari kedua indikator yaitu:

1. Realisasi Jumlah TUKS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan lainnya mengenai kepelabuhanan di Kota Cilegon sebesar 18 TUKS dari target 18 TUKS sehingga capaian 100 %. Dimana hasil tersebut di dapat dari perhitungan pelayanan TUKS :

$$\frac{\text{Jumlah TUKS yang dilayani}}{\text{Jumlah TUKS yang ada}} \times 100\%$$

$$\frac{18 \text{ TUKS}}{18 \text{ TUKS}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

2. Realisasi Cakupan Pengawasan dan Pengendalian kawasan Pesisir capaian realisasi kinerja sebesar 24 KM.

Terdapat 3 (tiga) kegiatan pada **Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut** Perhitungan capaian dilakukan dengan cara pengukuran capaian kinerja dan capaian serapan anggaran. Secara umum, capaian kinerja untuk setiap kegiatan pada program ini terlaksana dengan capaian lebih dari 75%. Namun terdapat 1 (satu) kegiatan yang capaiannya kurang dari 75%, yaitu :

1. **Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)** capaian presentasi anggaran sebesar 0% dengan alasan:
 - a. Keterbatasan waktu dalam rangkaian pelaksanaan pengadaan unit SBNP dimana rangkaian tersebut mencakup survey, rekomendasi izin, persiapan lelang sampai dengan waktu pelaksanaan.
 - b. Keterbatasan tenaga ahli di dalam Perusahaan.
 - c. Adanya penanganan *Force Majeure* terhadap unit SBNP yang sudah ada/terpasang yaitu berupa lepasnya unit dari jangkar terpasang di karenakan putus rantai sehingga hanyut terbawa gelombang, serta tidak/belum dilengkapinya dengan kegiatan pemeliharaan menjadikan penanganan *Force Majeure* menjadi sulit dan terhambat yang pada akhirnya berkurangnya konsentrasi terhadap rencana pemasangan unit berikutnya.

A.4 Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas

Tabel 3.2.9d Target dan Realisasi Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas						1.221,46	1.183,42	96,89%
	Tingkat penanganan kemacetan	Titik	10	10	100,00%			
Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Khusus Daerah	Terlaksananya Pengamanan Lalu Lintas Khusus Daerah	kegiatan	7	7	100,00%	357,13	345,17	96,65%
Penyuluhan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar di Kota Cilegon	Terlaksananya bimbingan keselamatan berlalu lintas bagi pelajar	orang	150	150	100,00%	82,97	81,54	98,28%
Pendukung Operasional Keselamatan Lalu Lintas	Terlaksananya operasional patroli jalan protokol dan jalan lingkar selatan Kota Cilegon	%	75	75	100,00%	136,95	136,70	99,82%
Pengadaan Peralatan Pendukung Keselamatan Lalu Lintas	Terciptanya Ketertiban Lalulintas darat	Kegiatan	1	1	100,00%	36,00	25,00	69,44%
Operasional Penertiban Parkir Liar	Terlaksananya Pengawasan Parkir dan Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas	%	60	60	100,00%	200,00	197,30	98,65%
Penunjang pengawasan pengendalian keselamatan lalu lintas	Tersedianya Kelengkapan Pengawasan Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas	%	85	85	100,00%	110,00	109,33	99,39%
Pembinaan Angkutan Barang	Terlaksananya Bimbingan Keselamatan lalu Lintas	ORANG	50	50	100,00%	48,68	48,68	100,00%
Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas	Terlaksananya Patroli Di Wailaya Kota Cilegon	Unit	1	1	100,00%	249,73	239,71	95,99%

Ketercapaian program Pengendalian keselamatan Lalu Lintas pada indikator Tingkat Kelancaran Lalu Lintas Jalan.

1. Realisasi Indikator Tingkat Kelancaran Lalu Lintas Jalan target kinerja Sebesar 10 titik dari target , sehingga capaian 100%.

Dalam perjalanannya, terjadi perubahan indikator kinerja pada Rensta Dinas Perhubungan, yang semula adalah Tingkat Kelancaran Lalu Lintas menjadi Tingkat Penanganan Kemacetan dengan definisi operasional yaitu : Jumlah penangan titik kemacetan/jumlah titik kemacetan yang ada. Titik kemacetan yang dimaksud yaitu:

1. Simpang Mayofield	6. Simpang Sucofindo
2. Simpang Al hadid	7. Simpang Hotel Sukma
3. Simpang Jombangkali	8. Simpang BJB
4. Simpang Sate Cilegon	9. Simpang PCI
5. Simpang Rumah Dinas	10. Simpang Terminal Seruni

Terdapat 8 (delapan) kegiatan pada program pengendalian keselamatan lalu lintas. Perhitungan capaian dilakukan dengan cara pengukuran capaian kinerja dan

capaian serapan anggaran. Secara umum, capaian kinerja untuk setiap kegiatan pada program ini terlaksana dengan capaian lebih dari 75%. Namun terdapat 1 (satu) kegiatan yang capaiannya kurang dari 75%, yaitu :

1. **Pengadaan peralatan pendukung keselamatan lalu lintas** capaian presentasi anggaran sebesar 69.44% dengan alasan:
Bahwa untuk Belanja Cetak Spanduk tidak diserap mengingat sudah ada Cetak Spanduk dari partisipasi public swasta, antara lain dari Bank BJB dan Bank BJB Syariah.

A.5 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Perhubungan)

Tabel 3.2.9e Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Perhubungan)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS PERHUBUNGAN)						10.086,22	8.394,33	83,23%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100,00	100,00	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100,00	65,00	65,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100,00	92,00	92,00%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100,00	82,25	82,25%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Tidak tersedianya tempat tujuan akhir angkutan umum di pusat kota, berdampak terhadap terjadinya kemacetan di jalan protokol.
2. Belum optimalnya penggunaan Bus SAUM
3. Belum optimalnya pemanfaatan terminal seruni, khususnya oleh kendaraan bus dan angkutan umum;
4. Kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk menjaga rambu yang telah terpasang sehingga menyebabkan lebih cepat rusak dan hilang.
5. Masih banyaknya parkir liar terutama kendaraan truk di sepanjang jalur JLS
6. Belum tersedianya ruang layanan uji kendaraan yang representatif serta belum optimalnya pemanfaatan layanan uji kendaraan
7. Pembangunan sarpras seringkali terkendala dengan tidak tersedianya kajian teknis, dengan belum adanya SDM yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi;
8. Adanya perbedaan pemahaman antara Pemda dan Pemprov Banten terhadap regulasi terkait zona pengelolaan wilayah 12 mil laut;
9. Belum tersedianya pedoman teknis tentang pelayanan kepelabuhanan khususnya terkait pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir.

10. Terdapat titik-titik kemacetan ataupun potensi kemacetan baru yaitu di transmart, CCM, Perlintasan Kereta Api Sebidang di Jalan Maulana Yusuf Tegal Cabe dan Simpang Tiga Palas

B.2 Solusi

1. Dibangunnya sub terminal type C di wilayah sekitar kota diringi dengan revisi trayek angkutan umum yang terintegrasi dengan terminal.
2. Mensosialisasikan lebih luas tentang layanan SAUM kepada masyarakat, serta menyusun tata kelola layanan dan kelembagaan SAUM agar efisien.
3. Melakukan koordinasi dengan Bidang LLAJ dan Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Cilegon terkait penertiban Bus agar masuk ke dalam Terminal Seruni, diiringi dengan peningkatan sarana prasarana dan layanan terminal.
4. Melakukan pengawasan yang lebih intens terhadap rambu
5. Meningkatkan pengawasan terhadap parkir liar diiringi dengan peningkatansarana prasarana pengawasan, meliputi mobil derek, alat komunikasi, gembok parkir untuk mobil besar dan mobil kecil, serta kendaraan operasional.
6. Menyediakan ruang layanan yang representatif khususnya ruang pelayanan dan ruang tunggu, merevisi regulasi serta melakukan inovasi layanan melalui uji keliling;
7. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD yang memiliki teknik pembangunan sarpras serta mengajukan permohonan pengadaan SDM yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi;
8. Mengundang Provinsi untuk melakukan rapat evaluasi terbatas terkait regulasi zona pengelolaan wilayah 12 mil laut;
9. Menetapkan peraturan walikota tentang pelayanan kepelabuhanan di Kota Cilegon yang komprehensif.
10. Melakukan rekayasa arus lalu lintas serta meningkatkan pengawasan lalu lintas yang didukung dengan penambahan personil dan dukungan operasional

3.2.10 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi

Tabel 3.2.10a

Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi						3.456,90	2.238,34	64,75%
	Tingkat kualitas dan kapabilitas jaringan infrastruktur TIK	%	100,00	95,50	95,50%			
	Tingkat kualitas layanan e-government	%	100,00	100,00	100,00%			
	Tingkat ketersediaan aplikasi TIK	%	100,00	100,00	100,00%			
Optimalisasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Dokumen laporan pelaksanaan review, evaluasi, dan/atau perumusan isu strategis terkait dengan pelaksanaan dan perkembangan SPBE Kota Cilegon	Laporan	3	3	100,00%	60,50	59,56	98,45%
Penyediaan Bandwith Kota Cilegon	Terlaksananya penyediaan Bandwidth Kota Cilegon	Mbps	300	300	100,00%	612,98	533,32	87,00%
Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan SPBE	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di 38 SKPD lingkungan Pemerintah Kota Cilegon	SKPD	37	32	86,49%	178,09	174,63	98,06%
Pengembangan aplikasi Smart Governance dan Pendukungnya	Jumlah laporan pengembangan aplikasi Smart Governance	Aplikasi	1	1	100,00%	329,35	326,90	99,26%
	Aplikasi Smart Governance dan Server SIMRAL Yang Di Sewa	Unit/Thn	1	1	100,00%			
Pengembangan Sistem Pemantauan Terintegrasi berbasis teknologi informasi	Sistem Pemantauan Terintegrasi berbasis Teknologi Informasi pada titik-titik sentral di Kota Cilegon	Jumlah Titik	25	25	100,00%	709,89	0,00	0,00%
Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Integrated Control City System and Room (Prioritas Daerah)	Terlaksananya pemenuhan infrastruktur dasar data center dan ICCSR	set	1	1	100,00%	500,00	170,01	34,00%
Pengelolaan Smart City (Prioritas Daerah)	Terlaksananya pengembangan dan/atau pengelolaan Aplikasi Smart City	Aplikasi Smart City	2	2	100,00%	450,00	403,50	89,67%
Pengelolaan Panggilan Darurat Terpadu (Prioritas Daerah)	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Panggilan Darurat Terpadu	Laporan	12	12	100,00%	250,00	233,44	93,38%
Pemeliharaan Sistem Keamanan dan Helpdesk TIK	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan layanan helpdesk	laporan	12	12	100,00%	5,28	5,28	100,00%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pengadaan Peralatan Pendukung Jaringan SPBE	Terlaksananya penyediaan peralatan pendukung pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon	SKPD	37	32	86,49%	360,81	331,69	91,93%

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informasi Sandi dan Statistik Kota Cilegon dalam meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam hal peningkatan pelayanan pengelolaan dan pengendalian tentang peningkatan teknologi Informasi.

Ketercapaian program **Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi** melalui peningkatan fasilitas tingkat kualitas layanan E-Gov, tingkat kualitas kapabilitas jaringan infrastruktur TIK dan tingkat ketersediaan aplikasi TIK.

Realisasi **indikator** Tingkat kualitas layanan *e-government* 100% sehingga memenuhi target 100 %. Hasil pencapaian kinerja sebesar 100% ini terpenuhi dengan terlaksananya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan target capaian nilai Index Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Cilegon adalah 3,27 (kategori Baik), optimalisasi pencapaian smart city pada aspek perencanaan (Master Plan) sehingga Pemerintah Kota Cilegon termasuk ke dalam jajaran 100 kabupaten/kota yang siap menuju smart city, peningkatan dan tata kelola aplikasi e-government meliputi pemanfaatan cloud system dan email dinas.

Realisasi **indikator** Tingkat kualitas dan kapabilitas jaringan infrastruktur jaringan TIK mencapai 95,5% . Hasil pencapaian kinerja sebesar 95,5% ini terpenuhi dengan Jaringan infrastruktur di 3 (tiga) titik utama, yakni titik sentral di Gedung Bappeda dan Kominfo serta titik repeater di Gedung Plaza Mandiri serta 32 OPD sebagai sebaran titik koneksi internet dan 100 Mbps untuk data Center dan penguatan Kapasitas Jaringan Bandwidth sebesar 200 Mbps (untuk OPD), selain itu juga telah dilaksanakannya penambahan 2 (dua) titik pengadaan peralatan pendukung jaringan internet/pemasangan tower triangle dan penambahan 2 (titik) wifi area publik.

Realisasi **indikator** Tingkat Ketersediaan aplikasi TIK mencapai 100% sehingga memenuhi target. Hasil pencapaian kinerja sebesar 100% ini dipenuhi dengan target aplikasi TIK yang dibuat pada tahun 2018 adalah 3 menu tambahan

dalam aplikasi SIMRAL yaitu : perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan daerah.

Terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang ada pada program peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, namun 1 (satu) kegiatan tidak dilaksanakan yaitu :

✚ Pengembangan Sistem Pemantauan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi.

Kegiatan Pengembangan Sistem Pemantauan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi pada Tahun Anggaran 2019 tidak dilaksanakan karena keterbatasan SDM serta waktu dalam proses pelaksanaan pengadaan (masih terfokus pada penyusunan laporan Gerakan 100 Smart City). Namun telah dilakukan Perencanaan pembahasan integrasi akses CCTV.

Selain itu, terdapat 1 kegiatan dimana serapan anggaran dan capaian kinerjanya kurang dari 80%, yaitu :

✚ Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Integrated Control City System and Room (Prioritas Daerah)

Serapan anggaran kegiatan ini sebesar Rp 170.012.720,- (34% dari pagu anggarannya) dan capaian kinerjanya sebesar 66,6% . Hal ini dikarenakan belum dibangunnya ruangan pusat data elektronik pada Dinas Kominfo sehingga berpengaruh terhadap belanja yang lainnya.

Kegiatan lainnya yaitu :

a. Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Capaian kinerja untuk kegiatan ini 100% dengan dihasilkannya 3 laporan pelaksanaan review, evaluasi, dan/atau perumusan isu strategis terkait dengan pelaksanaan dan perkembangan SPBE Kota Cilegon. 3 (tiga) laporan dimaksud adalah laporan index Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, laporan Master Plan Cilegon Smart City, dan laporan Bimbingan Teknis Pembahasan Road Map Cilegon Smart City.

b. Penyediaan Bandwith Kota Cilegon

Capaian kinerja untuk kegiatan ini 100% dengan dilaksanakannya penyediaan bandwith jaringan dimana kapasitasnya sebesar 300 Mbps untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet di lingkungan Pemkot Cilegon dengan 100 Mbps untuk data Center dan penguatan Kapasitas Jaringan Bandwidth sebesar 200 Mbps (untuk OPD). Selain itu, Dinas Kominfo telah menyediakan sarana internet (wifi) gratis dari 6 (enam) titik menjadi 8 (delapan) titik wifi area publik yaitu :



1. Taman Kota (RTH) Kecamatan Jombang
 2. Taman Kota (RTH) Kecamatan Cilegon
 3. Taman Layak Anak (samping gedung Dewan)
 4. Pers room (gedung setda II)
 5. Aula Setda II
 6. Taman Rumah Dinas Walikota Cilegon
 7. Pasar Blok F Cilegon
 8. Ruang CCSR Kota Cilegon
- c. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan SPBE
Capaian kinerja untuk kegiatan ini 86.5% dengan dilaksanakannya pemeliharaan dan pengembangan jaringan SPBE untuk 32 OPD. Masih terdapat 5 OPD yang belum diakomodir jaringan SPBE karena beberapa kendala, diantaranya gedung kantor masih sewa dan terbatasnya lahan/tempat untuk penempatan perangkat pendukung jaringan Internet/tower triangle
- d. Pengembangan Aplikasi Smart Governance dan Pendukungnya
Capaian kinerja untuk kegiatan ini 100% dengan dilaksanakannya integrasi Sistem Perencanaan, Penatausahaan keuangan dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- e. Pengelolaan Smart City (Prioritas Daerah)
Capaian kinerja untuk kegiatan ini 100% dengan dilaksanakannya penyediaan infrastruktur dasar pendukung smart city berupa mini command center dan beberapa perangkat pendukungnya.
- f. Pengelolaan Panggilan Darurat Terpadu (Prioritas Daerah)
Capaian kinerja untuk kegiatan ini 100% dengan dilaksanakannya layanan panggilan darurat terpadu selama 12 (dua belas) bulan, dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23.00.
- g. Pemeliharaan Sistem Keamanan dan Helpdesk TIK
Capaian kinerja untuk kegiatan ini 100% dengan dilaksanakannya layanan helpdesk dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- h. Pengadaan Peralatan Pendukung Jaringan SPBE
Capaian kinerja untuk kegiatan ini 100% dengan dilaksanakannya pemasangan tower tiangle di 2 (dua) titik sebagai perangkat pendukung jaringan internet.

A.2 Program Pengembangan Komunikasi Dan Pengelolaan Informasi Daerah

Tabel 3.2.10b

Target dan Realisasi Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Daerah Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengembangan Komunikasi Dan Pengelolaan Informasi Daerah						2.294,87	2.113,31	92,09%
	Cakupan pelayanan informasi publik terkait pembangunan daerah	%	90	90	100,00%			
Pengelolaan Informasi Daerah	Terselenggaranya pengelolaan informasi pemerintah Kota Cilegon	Kegiatan	4	4	100,00%	36,56	26,68	72,99%
sosialisasi, promosi dan propaganda pemerintah daerah	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Promosi dan Propaganda Pemerintah Daerah Tahun 2019	Pemberitaan	75	75	100,00%	1.513,15	1.449,39	95,79%
Penyusunan media informasi daerah	Terlaksananya Penyusunan Informasi Daerah	jenis	2	2	100,00%	312,40	304,68	97,53%
Pengembangan kelompok informasi masyarakat	terlaksananya pembinaan kegiatan KIM	orang	100	100	100,00%	45,07	43,97	97,56%
Desiminasi/penyebaran media ruang luar	terlaksananya penyebaran informasi melalui media ruang luar	m2	350	350	100,00%	28,00	28,00	100,00%
Peningkatan SDM Pengelola Website Pemerintah Kota Cilegon	Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM pengelola Website Pemerintah Kota Cilegon	Peserta	152	152	100,00%	73,80	42,58	57,70%
Peningkatan sarana dan SDM LPPL	Terselenggaranya Kegiatan Siaran Radio yang Berkualitas	%	100	100	100,00%	24,20	14,37	59,39%
Optimalisasi penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Siaran Radio	%	100	100	100,00%	261,69	203,64	77,82%
Program Pengembangan Komunikasi Dan Pengelolaan Informasi Daerah						380,73	380,73	100,00%
Peningkatan sarana dan SDM LPPL	Terselenggaranya Kegiatan Siaran Radio Yang Berkualitas	%	100	100	100,00%	15,80	15,80	100,00%
Optimalisasi penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui siaran radio	%	100	100	100,00%	350,91	350,91	100,00%
Dukungan Operasional Radio Cilegon Mandiri	Tersedianya Dana/ Anggaran Dukungan Operasional Penyiaran Radio	unit	1	1	100,00%	14,03	14,03	100,00%

Keberhasilan program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Daerah dapat diukur melalui beberapa indikator program yang mencapai 100 %, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran bagian komunikasi dan informatika dalam menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan informasi pembangunan daerah

kepada masyarakat. Terdapat (enam) kegiatan yang ada pada program pengembangan komunikasi dan pengelolaan informasi daerah, serta 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Radio. Namun, sejak bulan 30 Mei 2019, sesuai dengan Perwal No. 20 Tahun 2019, Radio Mandiri FM yang semula Unit Pelayanan Teknis (UPT) melebur dalam Seksi Diseminasi.

Secara umum, semua kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan dan menyampaikan data-data pembangunan secara terpadu melalui media masa baik cetak maupun elektronik, pemanfaatan website pemerintah kota cilegon dan pemanfaatan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon maupun melalui PPID Pembantu di OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon terkait kebijakan pembangunan daerah, penyebaran informasi pembangunan daerah. Adapun dari capaian tersebut, dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat Kasi diseminasi informasi publik telah melakukan kegiatan dan program melalui optimalisasi pengelolaan website di lingkungan pemerintah kota cilegon yang tersebar di 37 OPD dan tahun 2019 cakupannya telah diperluas sehingga 43 kelurahan. Untuk memaksimalkan pengelolaan website penyebarluasan informasi kepada masyarakat diperkuat dengan pengelolaan media sosial seperti Instagram, facebook dan twitter. Kedepannya diharapkan ada anggaran khusus untuk pengelolaan media social

Contoh website kelurahan



Kegiatan Bimtek Operator Pengelola Website :



- Pengelolaan dan penguatan pelayanan informasi daerah Kota Cilegon melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pengembangan dan penguatan PPID pembantu yang ada pada 38 OPD se Kota Cilegon selama 12 bulan.
- Publikasi dan sosialisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan kota Cilegon melalui media cetak dan elektronik. Untuk itu, Pemkot Cilegon telah menjalin kerjasama dengan 35 media cetak dan elektronik, yaitu :

No	Jenis Media	
	Media Cetak	Media Elektronik
1.	RADAR BANTEN	RCTI
2.	BANTEN RAYA	TV ONE
3.	KABAR BANTEN	METRO TV
4.	HARIAN PELITA	ANTV
5.	BANTEN POS	BARAYA TV
6.	SPIRIT NEWS	ANTARA TV
7.	KORAN RAKYAT BANTEN	JAWA POS TV
8.	KOMPASIANA	RRI PRO 1
9.	SATELIT NEWS	KIS FM CILEGON
10.		Progresnews.com
11.		Banten News.Co.Id
12.		Berita Cilegon.Co.Id
13.		Banten Hari ini
14.		Fakta Banten.Co.Id
15.		Gerbang Banten
16.		Bidik Banten.Com
17.		Seputarcilegon.com
18.		Klik Banten.Com
19.		Titik Nol.Co.Id
20.		Banten Hits.Com
21.		Berita Karya.Co.Id
22.		Radar Banten.Com
23.		Local1news.com
24.		Detik.com

No	Jenis Media	
	Media Cetak	Media Elektronik
25.		Selatsunda.com
26.		Radio Mandiri FM

Serta penayangan 20 jenis pemberitaan yang terdiri dari :

No	Jenis Pemberitaan	No	Jenis Pemberitaan
1.	Iklan Ucapan Selamat dan dukacita	11.	Pemberitaan Rubrik Khusus Halaman Cilegon
2.	Pemberitaan Advetorial Ukuran ½ Halaman	12.	Publikasi Melalui Media Elektronik
3.	Pemberitaan Potret Cilegon Membangun	13.	Pemberitaan Advetorial Tabloid/ Majalah Lokal
4.	Iklan Ucapan Selamat dan dukacita uk ¼ Halaman	14.	Pemberitaan Lensa Event
5.	Pemberitaan Rubrik Cilegon City	15.	Iklan Display Ucapan Selamat dukacita ¼ Halaman
6.	Pemberitaan Parade Foto	16.	Pemberitaan Liputan Khusus/ Advetorial
7.	Iklan Ucapan Selamat Khusus/ Advetorial 1 halaman	17.	Publikasi Media Online
8.	Pemberitaan Media Online	18.	Publikasi Advetorial Media Cetak
9.	Pemberitaan Rubrik Cilegon Kita	19.	Publikasi Majalah/ Tabloid
10.	Iklan Ucapan Selamat Uk ½ Halaman	20.	Iklan Display Ucapan Selamat dan dukacita

- Penyebarluasan informasi ditempuh pula melalui lembaga-lembaga yang tumbuh di masyarakat, salah satunya melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 8 kecamatan dan tahun 2019 cakupannya telah diperluas dengan membentuk KIM tingkat Kelurahan

Kegiatan KIM Tingkat Kecamatan



- Untuk kegiatan diseminasi/penyebarluasan media luar ruang, penyebaran informasi dilakukan melalui spanduk dan baliho
- Penyusunan Media Informasi Daerah, yang menghasilkan
 1. Buletin Suara Cilegon Mandiri yang terbit sebanyak 4 edisi dimana setiap edisi dicetak 800 exemplar
 2. Buku Hari Jadi Kota Cilegon tahun 2019, yang dicetak sebanyak 1.000 exemplar, diterbitkan pada Hari Jadi Kota Cilegon

A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Kominfo, Sandi dan Statistik)

Tabel 3.2.10c

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Kominfo, Sandi dan Statistik)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK)						2.419,37	2.182,84	90,22%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100,00	100,00	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	80,00	90,19	112,74%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	80,00	98,16	122,70%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85,00	77,41	91,07%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Belum dibangunnya ruangan pusat data elektronik pada Diskominfo sehingga berpengaruh terhadap belanja yang lainnya.
2. Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang IT dan pengembangan Smart City
3. Belum meratanya trigger inovator di setiap OPD dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

B.2 Solusi

1. Penyiapan infrastruktur dasar dan penyediaan infrastruktur perangkat Mini Command Center dan pendukungnya
2. Koordinasi dengan BKPP terkait perekrutan pegawai yang kompeten di bidang IT
3. Pelatihan inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk semua OPD di lingkungan Kota Cilegon

3.2.11 Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro & Kecil

Tabel 3.2.11a

Target dan Realisasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil						2.183,16	2.050,42	93,92%
	Persentase Koperasi aktif dengan pengelolaan keuangan yang sehat	%	72,50	75,87	104,65%			
Operasional Pusat Inkubator Wirausaha dan klinik UMKM (PIWKU)	Terlaksananya Kegiatan Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik UMKM (PIWKU)	Bulan	12	12	100,00%	353,00	314,61	89,13%
Pameran Unggulan produk UMKM	terselenggaranya pameran produk unggulan UMK	pameran	4	5	125,00%	349,88	345,14	98,64%
Pameran APEKSI	Terlaksananya Pameran UMK Dalam Rangka Apeksi	produk UMKM	20	20	100,00%	203,59	200,04	98,26%
Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Keterampilan CWUB	Tumbuhnya WUB	CWUB	600	450	75,00%	144,43	143,70	99,50%
	berkembangnya usaha mitra binaan	MB	300	300	100,00%			
	terbinanya mitra binaan bermasalah	MB	500	500	100,00%			
Operasional UPT PEM	Tersedianya Operasional UPT PDB- Menigkatnya Jangkauan Akses Pelayanan Dana Bergulir Kepada Masyarakat- Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Pengelola Dana Bergulir	Wilayah dan Tingkat kota	4	4	100,00%	561,64	525,70	93,60%
	peningkatan pengetahuan dan kemampuan pendamping kelurahan	kelurahan	43	43	100,00%			
	peningkatan pengetahuan dan kemampuan Pengelola UPT PDB	orang	66	66	100,00%			
Pelatihan Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Produk UMK	peserta	50	50	100,00%	57,54	48,54	84,36%
Pelatihan Manajemen Pembukuan Keuangan UMKM	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pembukuan Keuangan UMK	peserta	50	50	100,00%	57,54	47,76	83,00%
Pelatihan Kemasan, label dan perlindungan produk UMKM	Terlaksananya Pelatihan Kemasan, Label dan Perlindungan Produk UMK	peserta	150	150	100,00%	176,95	148,71	84,04%
Pengelolaan data UMKM Kota Cilegon	pemisahan data UMK kota Cilegon	kelurahan	43	43	100,00%	110,07	109,29	99,29%
Enterpreneurs Award/Pemberian Penghargaan pada UMKM Berprestasi	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada UMK Berprestasi	Mitra Binaan	300	382	127,33%	168,52	166,95	99,06%
Program Pemberdayaan dan						4.815,78	3.359,57	69,76%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (UPT Pengelola Dana Bergulir)								
	Persentase Koperasi aktif dengan pengelolaan keuangan yang sehat	%	72,50	75,87	104,65%			
Operasional BLUD UPT - Dana Bergulir	Terlaksananya Pembelian Produk	Paket	1	1	100,00%	4.815,78	3.359,57	69,76%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan langkah yang strategis dalam rangka meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia. Diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Koperasi-UMK dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Huruf Q (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) diantaranya untuk Sub Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota :

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yaitu pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota;
2. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yaitu pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
3. Pengembangan UMKM yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Dari uraian matriks tersebut di atas, Pemerintah Kota Cilegon menjadikan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil sebagai salah satu program pada Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi-UMK dan produk usaha mikro;
2. Meningkatkan kemandirian Koperasi-UMK dan pelaku usaha mikro;
3. Meningkatkan produktivitas Koperasi-UMK dan usaha mikro;
4. Meningkatkan daya saing Koperasi-UMK;

5. Meningkatkan kelas usaha dari skala usaha mikro menjadi skala usaha kecil.

Dalam pemberdayaan dan pengembangan UMK, Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon memfokuskan kepada pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha skala mikro yang memang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana yang tertera dalam matriks tersebut di atas, dengan sasaran pelaksanaannya :

- a. Pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro agar mampu tumbuh dan menjadi usaha yang produktif, berkualitas, bersaing dan mandiri;
- b. Pengembangan terhadap pelaku usaha mikro yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300 juta/tahun atau Rp. 25 juta/bulan, meningkat skala usahanya menjadi skala usaha kecil yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta/tahun sampai dengan paling banyak Rp. 2.5 Milyar/tahun.

Dalam menjalankan program ini Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon pada Tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. *Pengelolaan Data UMK Kota Cilegon*

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pembaharuan database pelaku UMK yang ada di Kota Cilegon. Pembaharuan ini dilakukan setiap tahun, hal ini diperlukan sebagai dasar informasi untuk menetapkan kebijakan yang tepat dalam melaksanakan pemberdayaan pelaku usaha mikro yang ada di Kota Cilegon. Sehingga melalui pembaharuan database UMK, akan diketahui kondisi riil para pelaku UMK baik dari pertumbuhan UMK baru, jenis usahanya, dan klasifikasi kelas usaha yang setiap tahunnya bisa berubah-ubah. Adapun jumlah pelaku UMK hasil pendataan tahun 2019 se-Kota Cilegon adalah sebanyak 8.202 pelaku UMK.

2. *Entrepreneurs Award/Pemberian Penghargaan Kepada UMK Berprestasi*

Pemberian penghargaan kepada UMK dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan Pemerintah Kota Cilegon, kepada para pelaku UMK yang berprestasi. Dengan tujuan agar termotivasi untuk terus meningkatkan produk dan kualitas usahanya, sehingga menjadi yang terbaik di Kota Cilegon. Seleksi UMK berprestasi dilaksanakan dari mulai tingkat kelurahan, dimana ditargetkan akan didapatkan 300 pelaku UMK terbaik kelurahan dari 3 kategori usaha yaitu kuliner, fashion dan kerajinan. Dalam pelaksanaannya didapatkan pelaku UMK terbaik kelurahan sebanyak 382 pelaku UMK. Dari 382 pelaku UMK tersebut diseleksi untuk mewakili terbaik ditingkat kecamatan menjadi 24 pelaku UMK terbaik kecamatan. Yang akan dan dikirim ketingkat kota menjadi 15 terbaik tingkat kota. Pelaku UMK terbaik tingkat kecamatan dan kota diberikan penghargaan pada Kegiatan Entrepreneurs Award dari Pemerintah Kota Cilegon.

3. *Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Keterampilan Calon Wirausaha Baru (CWUB)*

Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya bagi CWUB di Kota Cilegon yang dilaksanakan disetiap kecamatan, dengan melakukan pembekalan peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada CWUB sebanyak 450 orang. Sehingga *outcome* dari kegiatan ini pada tahun 2019 diharapkan akan terus bertumbuh CWUB dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan serta pengentasan kemiskinan.

4. *Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan Pelaku UMK dan Pengurus Koperasi UMK*

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberdayakan pelaku UMK dan pengurus koperasi UMK agar mampu tumbuh dan menjadi usaha yang produktif, berkualitas, bersaing dan mandiri. Maka dalam rangka mewujudkan hal tersebut sangat perlu diberikan dasar pengetahuan dan keterampilan terkait usahanya. Pada tahun 2019 sebanyak 250 pelaku UMK telah diberikan pembekalan pengetahuan sesuai kebutuhannya melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelatihan pemasaran kepada 50 orang pelaku UMK;
- b. Pelatihan manajemen pembukuan keuangan UMK kepada 50 orang pelaku UMK;
- c. Pelatihan kemasan, label dan perlindungan produk UMK kepada 150 orang pelaku UMK;

5. *Operasional Kegiatan Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik UMK (PIWKU)*

PIWKU didirikan untuk melaksanakan inkubasi wirausaha dan pelayanan klinik UMK, namun karena keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya maka PIWKU lebih difokuskan dalam pelayanan klinik UMK. Pelayanan Klinik UMK ini dengan memberikan pendampingan konsultasi masalah UMK dan fasilitasi UMK dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMK Kota Cilegon. Kegiatan pelayanan ini dilakukan dan dipusatkan setiap hari kerja di gedung PIWKU selama 12 bulan.

6. *Pameran Dalam Rangka Promosi dan Pengembangan Pasar Produk Unggulan UMK*

Pameran produk unggulan UMK & Pameran APEKSI , dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Mempromosikan produk-produk unggulan UMK Kota Cilegon agar lebih dikenal dan membuka akses jangkauan pasar produk UMK diluar Daerah Propinsi Banten. Hal ini dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pendapatan penjualan dari para pelaku UMK dan koperasi UMK.
- b. Sebagai wahana edukasi bagi para pelaku UMK dan pengurus koperasi UMK untuk meningkatkan teknik dan upaya mempromosikan produknya sehingga dapat bersaing dengan produk-produk peserta pameran dari kota lain.

- c. Menambah wawasan untuk melakukan inovasi usahanya setelah melakukan pembandingan dengan peserta pameran dari kota lain melalui prinsip Amati, Tiru dan Modifikasi (ATM). Sehingga dapat diadopsi dalam rangka meningkatkan kualitas produksi usaha mereka.

Pada event pameran ini produk unggulan yang dipamerkan adalah produk-produk yang telah diseleksi aman untuk dikonsumsi, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Produk UMK unggulan Kota Cilegon (lebih diutamakan) dan berbahan baku lokal.
- b. Produk UMK yang telah memiliki legalitas usaha.
- c. Produk UMK yang telah memiliki izin edar.
- d. Produk UMK yang telah memiliki merek dan label.
- e. Produk UMK yang memiliki kemasan yang baik.

Pameran produk UMK Kota Cilegon pada Tahun 2019 telah dilaksanakan pada beberapa kegiatan pameran antar lain :

- Pameran di Kota Surabaya.
- Pameran di Kota Yogyakarta.
- Pameran HUT Propinsi Banten bertempat di Kawasan Banten Lama.
- Pameran di Kota Batam.
- Pameran pada kegiatan peringatan HUT Koperasi.
- Pameran pada kegiatan APEKSI di Kota Semarang.

Adapun dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi, yang menjadi indikator sasaran program adalah *persentase koperasi aktif dengan pengelolaan keuangan yang sehat*. Indikator ini merupakan sasaran capaian program kepada koperasi yang ada di Kota Cilegon, karena koperasi merupakan suatu lembaga yang bertujuan dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Realisasi indikator program ini di Tahun 2019 sebesar 75,87% dari target kinerja sebesar 72,5%, dengan capaian kinerja mencapai 104,65% sebagaimana tertera dalam Tabel 4.2.11a di atas.

Sasaran yang dicapai dalam pembangunan terhadap koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, makmur dan tangguh melalui penguatan dan pembinaan terhadap 434 koperasi aktif dari jumlah koperasi sebanyak 572 yang ada di Kota Cilegon sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini :



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

REKAPITULASI DATA KOPERASI BERDASARKAN KELOMPOK USAHA YANG DIKELOLA															
KOTA CILEGON															
POSISI : DESEMBER 2019															
		Koperasi (unit)				Manajer (orang)			Karyawan (orang)				Modal Luar	Volume Usaha	SHU
No	Kelompok Koperasi	JML	Aktif	Tidak Aktif	RAT (unit)	JML	L	P	JML	L	P	Modal Sendiri (Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	KUD	1		1	-										
2	Kop. Pertanian	2	2		-							5,622	3,456	12,356	3,561
4	Kop. Peternakan	1	1	-	-							2,800			
5	Kop. Nelayan	6	4	2	-							14,578	9,949	27,058	1,200
7	Kopti	1	1	-	-							1,400			
9	Kopinkra	3	1	2	-										
10	Koppontren	11	6	5	4	6	1	5	23	7	16	357,649	689,176	609,203	44,196
11	Kopkar	136	100	36	48	30	6	24	1,271	226	1,045	112,162,051	349,661,297	905,392,168	24,168,137
16	Kop. Serba Usaha	56	53	3	2	1	-	1	24	7	17	1,062,091	34,103	252,139	12,834
17	Kop. Pasar	5	2	3	-				-			9,642	453	7,895	2,456
18	Kop. Simpan Pinjam	5	5	-	-				-			6,000,000			
28	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	44	38	6	21	4	-	4	45	17	28	22,892,331	7,748,215	44,435,298	4,404,177
31	Kop. Wanita	4	4	-	3	-	-	-	19	6	13	277,687	201,077	428,152	28,636
32	Kop. Profesi	19	13	6	2	-	-	-	-	-	-	340,798	22,197	934,070	71,188
33	Kop. Veteran	1	1	-	-				-			1,589	567	2,015	402
34	Kop. Wredatama	4	4	-	1				5	1	4	795,319	165,240	3,777,667	92,376
36	Kop. Mahasiswa	5	5		-				-						
37	Kop. Pemuda	3	3		1	2		2	6		6	133,909	17,803	102,485	242,071
39	Kop. Pedagang Kaki Lima				-				-			28,290	26,230	44,509	5,002
41	KJKS			-	-				-			18,000			
42	Kop. Lainnya	258	191	74	14	15	2	13	63	13	50	2,110,986	1,330,644	5,827,347	510,466
	Jumlah	572	434	138	96	58	9	49	1,184	914	270	138,693,773	359,274,490	958,020,149	28,898,852

Dalam mencapai sasaran program tersebut didukung oleh beberapa kegiatan sebagai dukungan ketercapaian sasaran pembangunan, secara umum pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan rata-rata serapan anggaran mencapai 93,92%.

A.2 Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan

Tabel 3.2.11b
Target dan Realisasi Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan						1.522,34	1.448,48	95,15%
	Persentase UMKM yang dibina/dilatih	%	2,5	4,02	160,08%			
	Proporsi usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	%	> 4	1,88	47%			
Fasilitas Pembuatan Badan Hukum Koperasi	terlaksananya pembuatan badan hukum koperasi	koperasi	11	11	100,00%	82,82	80,76	97,51%
Sosialisasi Perkoperasian untuk Usaha Produktif/Kelompok Usaha	tersosialisasikannya perkoperasian untuk usaha produktif/kelompok usaha	orang	100	100	100,00%	128,26	125,03	97,49%
Pengawasan, Pemeriksaan Koperasi dan UMK	Terlaksananya Bimtek Pengawasan Menuju Koperasi Yang Sehat	Orang	180	180	100,00%	221,98	217,13	97,82%
Bimtek tentang Pendirian Koperasi	Terlaksananya Bimtek Tentang Pendirian Koperasi Meliputi	peserta	180	180	100,00%	221,50	219,69	99,18%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Perkoperasian, Pembuatan Laporan RAT dan Lap. Keuangan Koperasi							
Penyelenggaraan Hari Koperasi Tk. Kota	Terlaksananya Hari Koperasi Tingkat Kota Cilegon	kegiatan	1	1	100,00%	246,01	234,02	95,13%
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Pemasaran UMK berbasis online	pelaku usaha	40	40	100,00%	470,00	420,63	89,50%
	Terlaksananya bimbingan penyuluhan koperasi tidak aktif	Angkatan	3	3	100,00%			
	Terlaksananya pendampingan paska pelatihan	3 kegiatan	3	-	0,00%			
	terlaksananya diklat akuntansi berbasis software	Angkatan	3	2	66,67%			
Fasilitasi Rakorda dan Musda Dekopinda	Terlaksananya RAKORDA DEKOPINDA	PESERTA	20	20	100,00%	151,77	151,22	99,64%
	Terlaksananya Fasilitasi SDM dekopinda	peserta	25	25	100,00%			

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon, dalam penataan, penertiban dan peningkatan kualitas maupun kuantitas baik lembaga maupun para pelaku usaha Koperasi dan UMK yang ada di Kota Cilegon.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana tertuang dalam matriks pembagian urusan pada Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten/Kota sebagaimana diuraikan dalam lampiran undang-undang tersebut yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Huruf (Q) Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka batasan sasaran dibatasi pada pelaksanaan urusan sbb :

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI & UMKM

NO	SUB URUSAN	URUSAN YANG MENJADI KEWENAGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Izin Usaha Simpan Pinjam	1) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/ kota. 2) Penerbitan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota
2	Pengawasan dan pemeriksaan	1) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. 2) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayahkeanggotaan nya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) aerah provinsi. yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota

NO	SUB URUSAN	URUSAN YANG MENJADI KEWENAGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, & Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
7	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Adapun yang menjadi indikator kinerja dari program ini adalah :

1). Persentase UMKM yang dibina/dilatih

Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM dari sisi produksi, manajemen usaha, pemasaran dan kualitas produk. Sehingga pelaku UMK dapat mengembangkan sistem usahanya. Sasaran pembinaan dan pelatihan yang dilakukan yaitu kepada Calon Wira Usaha Baru (CWUB), Wira Usaha Baru (WUB) dan Wira Usaha (WU) yang telah berjalan. Adapun realisasi pelatihan UMKM yang telah dilaksanakan Tahun 2019 sebanyak 1.180 yang terdiri dari peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan CWUB yang ditargetkan sebanyak 600 CWUB, peningkatan SDM dalam pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan pelaku UMK sebanyak 404 UMK, pemasaran melalui pameran 20 UMK, fasilitasi pengurusan sertifikat UMK 72 UMK serta kegiatan pembinaan daya saing terhadap UMK calon penerima penghargaan entrepreneur award sebanyak 84 UMK.

Rekapitulasi Jumlah UMK yang dibina/dilatih Th 2019

NO	JENIS PEMBINAAN	OUT PUT
		JUMLAH UMK
1	Kegiatan Peningkatan SDM pelaku UMK melalui Pelatihan	404
2	Kegiatan Pembekalan pengetahuan wirausaha bagi calon wirausaha	600
3	Kegiatan Promosi dan pameran produk pelaku UMK telah mengikut sertakan pelaku UMK	20
4	Kegiatan pembinaan daya saing terhadap UMK calon penerima penghargaan Entrepreneur award	84
5	Kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat UMK	72
TOTAL UMK DIBINA PADA TAHUN 2019		1180
TOTAL UMK DI KOTA CILEGON		8202

Sedangkan jumlah UMK Kota Cilegon sebanyak 8.202 UMK dari pembaharuan/updating data UMK pada Tahun 2019. Sehingga persentase UMK yang dilatih sebesar 11,40%, dengan capaian kinerja program 553,332%, tingginya capaian ini dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk melaksanakan pembinaan dan pelatihan pelaku usaha mikro dan kecil sehingga target sasaran UMK dapat menjadi lebih banyak untuk dilatih.

REKAPITULASI DATA USAHA MIKRO & KECIL KOTA CILEGON														
TAHUN 2019														
NO	NAMA KECAMATAN	JENIS USAHA												TOTAL
		Industri Pengolahan			Perdagangan Besar dan		Pertanian,		Pengadaan Listrik,			Pengelolaan Sampah & Limbah	Jasa	
		Kuliner	Kerajinan	Garmen	Perdagangan	Reparasi	Pertanian	Perikanan	Penyedia	Pengadaan	Pengadaan			
									Makan Minum	Listrik	Gas		Lainnya	
1	KEC. CIBEBER	171	42	8	591	28	4	1	146	2	8	-	47	1048
2	KEC. CILEGON	86	23	32	494	17	2	2	259	2	1	1	54	973
3	KEC. CITANGKIL	86	17	4	736	30	5	5	151	2	2	-	38	1076
4	KEC. CIWANDAN	38	26	1	696	19	5	2	118	-	1	-	17	923
5	KEC. GEROGOL	56	4	1	563	9	-	-	178	1	7	-	32	851
6	KEC. PULOMERAK	62	13	2	587	11	36	11	276	-	7	2	41	1048
7	KEC. PURWAKARTA	93	16	4	631	24	14	6	291	2	9	-	105	1195
8	KEC. JOMBANG	112	31	3	558	10	10	-	310	-	5	-	49	1088
JUMLAH		704	172	55	4856	148	76	27	1729	9	40	3	383	8202
* Keterangan														
MIKRO		KECIL												
8048 UMK		154 UMK												
Total 8202 UMK														

2). Proporsi Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil

Indikator bertujuan meningkatkan atau mengetahui jumlah usaha mikro dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun berikutnya. Sasaran dari indikator adalah mengetahui jumlah usaha mikro menjadi kecil pada tiap tahunnya. Upaya yang dilakukan pada indikator ini adalah mengupdate/mengelola jumlah usaha mikro dan kecil yang ada di Kota Cilegon. Hasil update tahun 2019 bahwa jumlah usaha mikro sebanyak 8048, dan usaha mikro kecil sebanyak 154 UMK atau sebesar 1,88% dari target pencapaiannya hanya sebesar 47%.

Tahun pendataan	Data jumlah Usaha Mikro	Data jumlah Usaha Kecil	Total jumlah usaha Mikro & Kecil	% proporsi Usaha kecil
2019	7936	266	8202	3.2
2018	6446	100	6546	1.5

REKAPITULASI DATA USAHA MIKRO & KECIL KOTA CILEGON														
TAHUN 2019														
NO	NAMA KECAMATAN	JENIS USAHA												TOTAL
		Industri Pengolahan			Perdagangan Besar dan		Pertanian,		Pengadaan Listrik,				Jasa	
		Kuliner	Kerajinan	Garmen	Perdagangan	Reparasi	Pertanian	Perikanan	Penyedia	Pengadaan	Pengadaan	Pengelolaan Sampah & Limbah	Lainnya	
1	KEC. CIBEBER	171	42	8	591	28	4	1	146	2	8	-	47	1048
2	KEC. CILEGON	86	23	32	494	17	2	2	259	2	1	1	54	973
3	KEC. CITANGKIL	86	17	4	736	30	5	5	151	2	2	-	38	1076
4	KEC. CIWANDAN	38	26	1	696	19	5	2	118	-	1	-	17	923
5	KEC. GEROGOL	56	4	1	563	9	-	-	178	1	7	-	32	851
6	KEC. PULOMERAK	62	13	2	587	11	36	11	276	-	7	2	41	1048
7	KEC. PURWAKARTA	93	16	4	631	24	14	6	291	2	9	-	105	1195
8	KEC. JOMBANG	112	31	3	558	10	10	-	310	-	5	-	49	1088
JUMLAH		704	172	55	4856	148	76	27	1729	9	40	3	383	8202
* Keterangan														
MIKRO		KECIL												
8048 UMK		154 UMK												
Total 8202 UMK														

Dalam mencapai sasaran program tersebut didukung beberapa kegiatan sebagai dukungan ketercapaian sasaran pembangunan, secara umum pelaksanaan berjalan dengan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan rata-rata serapan anggaran sebesar 96,61%.

A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Koperasi dan UMK)

Tabel 3.2.11c

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Koperasi dan UMK)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS KOPERASI DAN UMK)						3.681,79	3.534,59	96,00%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100,00	100,00	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	88,00	92,67	105,31%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100,00	63,45	63,45%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Kesulitan dalam akses permodalan usaha bagi koperasi dan UMK untuk meningkatkan skala usahanya.
2. Belum ada sentra UMK sebagai sarana pemasaran produk yang terlokalisasi sehingga memudahkan pembeli mendapatkan produk UMK Kota cilegon.
3. Masih ada koperasi yang memiliki izin koperasi namun tidak memiliki anggota koperasi, tidak melaksanakan kegiatan rutin koperasi, tidak melaksanakan

Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak membuat laporan keuangan koperasi. Namun masih terdata sebagai lembaga koperasi yang ada di Kota Cilegon, sehingga mempengaruhi terhadap data koperasi yang ada.

4. Sebagian besar pelaku UMK tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang dikelola secara turun temurun dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas produk dan pengembangan usahanya.
5. Masih banyak pelaku UMK belum memiliki legalitas usaha dan legalitas produk yang menjadi persyaratan diterimanya suatu produk pada pasar retail modern dan ekspor.
6. Keterbatasan promosi dan pemasaran produk UMK yang ada di Kota Cilegon.

B.2 Solusi

1. Memfasilitasi para pelaku usaha koperasi dan mikro kecil dalam mengakses permodalan usaha dengan stakeholder yang ada baik dengan lembaga keuangan daerah, perbankan dan perusahaan-perusahaan (Swasta/BUMN) yang ada di Kota Cilegon.
2. Penyediaan sentra UMK bagi para pelaku UMK di Kota Cilegon.
3. Melakukan pendataan terhadap keberadaan seluruh koperasi yang berdiri di Kota Cilegon, sehingga menjadi bahan masukan dalam evaluasi dan perencanaan pemberdayaan koperasi di Kota Cilegon.
4. Peningkatan sumber daya manusia para pelaku UMK melalui pelatihan dan pembinaan dengan kolaborasi oleh seluruh stakeholder yang ada baik pemerintah maupun swasta dalam menyongsong era teknologi 4.0.
5. Memfasilitasi dalam pengurusan legalitas usaha dan legalitas produk bagi para pelaku UMK agar bisa bersaing di pasar global.
6. Memfasilitasi para pelaku UMK untuk mempromosikan dan memasarkan produknya baik secara offline maupun online dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui pasar e-commerce, sehingga jangkauan promosi dan pemasaran produknya lebih dikenal secara luas baik nasional maupun internasional.

3.2.12 Bidang Urusan Penanaman Modal

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Promosi Dan Pengembangan Penanaman Modal

Tabel 3.2.12a Target & Realisasi Program Promosi Dan Pengembangan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Promosi Dan Pengembangan Penanaman Modal						490,30	489,00	99,74%
	Pertumbuhan Rencana Investasi	%	6	108,5				
Promosi investasi	Terlaksananya Pameran Promosi Tingkat Nasional	kegiatan	2	2	100,00%	283,91	283,63	99,90%
Penyusunan potensi dan peluang investasi	Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal Kota Cilegon dan Peta Potensi & peluang investasi	Kegiatan	2	2	100,00%	121,63	120,62	99,18%
Fasilitasi dan koordinasi percepatan penanaman modal	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Penanaman Modal	Kegiatan	1	1	100,00%	84,77	84,76	99,99%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal merupakan bagian dari pelayanan investasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon meliputi Promosi Investasi, Fasilitasi Investasi, dan Pengembangan Investasi guna menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Kota Cilegon yang biasa dikenal dengan kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Salah satu indikator pembangunan pada program tersebut adalah pertambahan rencana investasi yang masuk ke Kota Cilegon, melalui Izin Prinsip. Izin Prinsip (IP) adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah dalam hal ini dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang harus dimiliki oleh setiap investor yang ingin memulai atau membuka usaha maupun menanamkan modal (investasi) di Indonesia dalam ruang lingkup PMA dan PMDN.

Akan tetapi semenjak diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS), izin prinsip sudah tidak berlaku lagi yang berakhir pada Bulan Mei 2018. Sehingga sejak tidak berlaku lagi Izin Prinsip (IP) dengan dikeluarkan peraturan pemerintah tersebut di atas, para pelaku usaha baik PMA maupun PMDN harus mendaftarkan usahanya melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS). Adapun OSS sendiri adalah sistem perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau

Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui Sistem Elektronik yang terintegrasi, yang meliputi Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan /atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional yang keluarannya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Pendaftaran melalui OSS ini berlaku bagi para pelaku usaha baik baru maupun yang sudah lama. Oleh karena itu bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip (IP) diwajibkan pula untuk mendaftarkan usaha melalui OSS ini untuk mendapatkan NIB sebagai pengganti dari IP yang dimiliki. Hal ini pun berlaku bagi usaha yang melakukan perluasan ataupun penambahan kapasitas produksi.

Berdasarkan data dari Sistem OSS, NIB yang berlokasi di Cilegon, periode Januari-Desember 2019 berjumlah 1.060 NIB (PMA dan PMDN) dengan jumlah investasi mencapai Rp. 807,448,935,756,492. Namun dari jumlah NIB tersebut di atas terdapat 167 NIB bermasalah dengan nilai investasi mencapai Rp.2.674,079,197,570, hal ini dikarenakan NIB double data. Jumlah Investasi tersebut belum dapat terverifikasi karena sistem OSS belum dapat memilah mana investasi lama, baru, pengembangan atau perluasan. Sistem juga belum dapat memilah izin mana yang efektif atau tidak dari sejumlah izin yang ganda tersebut, sehingga data tersebut belum dapat dijadikan acuan rencana investasi di Kota Cilegon.

Pelaksanaan kegiatan program ini yang di dukung beberapa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan baik secara anggaran maupun dan teknis rata-rata serapan anggaran pada program ini 99,58%.

A.2 Program Peningkatan Pelayanan Informasi Dan Pengaduan

Tabel 3.2.12b

Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Dan Pengaduan						793,90	780,93	98,37%
	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait perizinan	%	100	100	100,00%			
Fasilitasi pengaduan masyarakat dunia usaha	Terfasilitasinya Pengaduan Masyarakat Dunia Usaha dan Pemberitaan Rubrik Khusus Halaman Cilegon	kegiatan	1	1	100,00%	41,50	41,40	99,76%
Sosialisasi Media Cetak dan Elektronik	Tersampainya Informasi Perizinan Melalui Media Cetak dan Elektronik	paket	3	3	100,00%	108,20	107,41	99,27%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pemeliharaan berkala sistem informasi pelayanan perizinan online	Tersedianya server dan hardisk internal dan terpeliharanya sistem informasi perizinan online secara berkala	Jaringan	1	1	94,93%	100,00	94,93	94,93%
Penyusunan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan	Tersedianya data dan pelaporan perizinan dan non perizinan	bulan	12	12	99,87%	44,21	44,15	99,87%
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (DID)	Mengintegrasikan Perizinan Secara Elektronik	Jenis Izin	71	71	100,00%	500,00	493,05	98,61%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program peningkatan pelayanan informasi dan pengaduan memiliki maksud dan tujuan untuk dapat memberikan kemudahan dalam akses informasi publik dan merealisasikan keterbukaan informasi pada masyarakat luas, khususnya masyarakat dunia usaha. Dengan didukung oleh proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang saat ini seluruh perizinan dan nonperizinan diproses melalui mekanisme daring (online). Kemudahan akses informasi diwujudkan dalam kegiatan sosialisasi media cetak dan elektronik dimana sebagai sarana atau informasi kepada masyarakat pada umumnya dan kepada masyarakat dunia usaha pada khususnya, untuk mendapatkan informasi yang juga dapat bersifat dua arah agar kegiatan usaha yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Selain itu kegiatan ini ditujukan untuk menyampaikan layanan informasi secara lebih luas dengan segmentasi masyarakat yang lebih heterogen melalui berbagai macam sumber informasi yang digunakan, semua segmentasi tersebut dapat diraih melalui sosialisasi media cetak, media elektronik (radio) dan juga media online. Selain sebagai sarana informasi program peningkatan pelayanan Informasi dan pengaduan juga sebagai fasilitator bagi masyarakat khususnya masyarakat dunia usaha dalam menyampaikan layanan informasi pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dan untuk memberikan ruang opini pada masyarakat dunia usaha seputar layanan pengaduan di DPMPTSP Kota Cilegon terhadap kinerja sehingga pemerintah daerah dapat melakukan koreksi atau perbaikan terhadap pelayanan masyarakat dan mengukur tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Cilegon. DPMPTSP merupakan instansi yang memiliki fungsi administratif dimana melalui program peningkatan pelayanan Informasi dan pengaduan yang juga mengolah dan menyajikan data permohonan Perizinan dan Non perizinan yang di proses secara rapih dan terstruktur dalam rekapitulasi yang dilaporkan kepada OPD Teknis dan Walikota tiap bulannya.

Program peningkatan pelayanan informasi dan pengaduan dapat terlaksana dengan baik karena adanya regulasi yang mengatur yang dituangkan dalam Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang di berlakukan sesuai dengan regulasinya dalam hal pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan. Bidang data dan informasi merupakan pusat data dan informasi yang mendukung pelayanan perizinan dan non perizinan melalui SIPECI, yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola perizinan mulai dari pengajuan, pemerosesan sampai dengan mengeluarkan surat izin. Semua proses tersebut saat ini dikelola melalui aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik Cilegon (SIPECI) yang diproses secara online. Semua itu merupakan hasil kinerja yang di capai oleh program peningkatan pelayanan Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Cilegon.

Pada Tahun 2019 terdapat 44 pengaduan yang masuk secara online melalui website www.dpmptsp.cilegon.go.id dan terselesaikan melalui mekanisme online. Adapun 1 (satu) pengaduan yang masuk secara langsung ke sub bidang informasi dan pengaduan DPMPTSP Kota Cilegon juga dapat terselesaikan dengan baik melalui Berita Acara Penyelesaian (BAP) Pengaduan sesuai dengan mekanisme SOP pengaduan yang berlaku. Pengaduan tersebut ditangani dengan baik dan sesuai dengan tujuan sampai permasalahan tersebut selesai sehingga persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait perizinan yaitu 100%.

Pelaksanaan kegiatan program ini yang di dukung beberapa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan baik secara anggaran maupun dan teknis, rata-rata serapan anggaran pada program ini 98.49%, adapun kegiatan yang serapan optimal.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2019

TRIWULAN	Jumlah Responden	Nilai IKM
Triwulan I	177 Orang	77.93 poin
Triwulan II	164 Orang	81.06 poin
Triwulan III	335 Orang	81.27 poin
Triwulan IV	173 Orang	77.24 poin
POIN NILAI IKM		79.38 poin (BAIK)

Sumber data : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mandiri DPMPTSP

Keterangan:

Rumus perhitungan IKM :

Jumlah nilai per unsur :

A = 1, B = 2, C = 3, D = 4

- Nilai Responden Per unsur (NRP) : $\frac{\text{Jumlah Nilai per unsur pelayanan}}{\text{Jumlah Kuesioner yang diisi}}$
- NRP tertimbang per unsur : NRP per unsur x 0,071
- IKM unit pelayanan: NRP per unsur x 25

A.3 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tabel 3.2.12c

Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						200,00	183,87	91,93%
	Laju pertumbuhan investasi	%	2,50	4,55	182,00%			
Pembinaan penanaman modal	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pembinaan penanaman modal	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	46,26	92,52%
Penertiban penanaman modal	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sosialisasi peraturan Kepala BKPMRI	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	44,26	88,52%
Forum Investasi	Terlaksananya Kegiatan Forum Investasi	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	44,13	88,26%
Sosialisasi Pengendalian Penanaman Modal	Terlaksananya sosialisasi pengendalian penanaman modal	%	100	100	100,00%	50,00	49,22	98,44%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah program yang bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal melalui pengawasan, pembinaan dan penertiban terhadap para pelaku usaha pada tahap pra konstruksi, masa konstruksi dan tahap komersial. Sasaran atau fokus pengendalian penanaman modal yaitu pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan investasi di Kota Cilegon melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Perka BKPM RI No 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan penanaman modal dengan indikator pembangunan yaitu laju pertumbuhan investasi maksud dari indikator pembangunan sebagai **“Tolak ukur perubahan mendasar realisasi investasi”** adapun capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

1). Laju Pertumbuhan Investasi

Laju pertumbuhan investasi adalah *“kenaikan pertumbuhan nilai investasi pada tahun yang sedang berjalan dibandingkan dengan total investasi sampai dengan tahun sebelumnya”* capaian kinerja pada tahun 2019 investasi sebesar **Rp.8.414.135.529.500** Sedangkan pada tahun 2018 sebesar **Rp. 8.244.000.000.000** .atau **4.67%**, jadi laju pertumbuhan investasi sampai dengan tahun 2019 sebesar **4,55 %** indikator ini dengan realaisasi sebesar **Rp. 193.489.135.529.500** dari target RPJMD sebesar 2,5%.

TABEL REALISASI INVESTASI PERTAHUN (2011-2019)

TAHUN	PMA Rp TRILIUN	PMDN Rp TRILIUN	TOTAL Rp TRILIUN
2011	12,5	0,07	12,57
2012	0,62	1,02	1,64
2013	3,19	1,05	4,24
2014	45,12	0,35	45,47
2015	9,53	4,51	14,04
2016	24,006	1,526	25,532
2017	7,658	1,807	9,466
2018	7,466	0,798	8,245
2019	4,378	4,085	8,414

TAHUN	PMA Rp. TRILIUN	%	PMDN Rp. TRILIUN	%	TOTAL Rp. TRILIUN	LAJU PERTUMBUHAN INVESTASI %
2009	47,16	10,73	15,73	13,57	62,89	11,42
2010	48,14	2,07	15,73	0	63,87	1,55
2011	60,64	25,97	15,8	0,45	76,44	19,68
2012	61,26	1,02	16,82	6,46	78,08	2,15
2013	64,45	5,21	17,87	6,26	82,32	5,43
2014	109,57	70,55	18,22	1,95	127,79	55,6
2015	119,1	8,7	22,73	24,75	141,83	10,99
2016	143,106	20,16	24,26	6,73	167,36	18,00
2017	150,764	5,35	26,067	7,45	176,826	5,66
2018	158,21	4,70	26,865	2,97	185,075	4,66
2019	162,538	2,74%	30,950	15,21%	193,489	4,55

Dukungan kegiatan indikator ini didukung sebanyak tiga kegiatan, hal ini dalam rangka mencapai sasaran kinerja program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Realiasi kegiatan secara umum dengan rata-rata serapan anggaran sebesar 89,23%, adapun hasil adalah adanya efesiensin anggaran.

A.4 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DPMPTSP)

Tabel 3.2.12d

Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (DPMPTSP)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP)						4.363,71	4.141,08	94,90%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	65,00	100,00	153,85%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	67,00	59,40	88,66%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	95,00	90,14	94,88%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	80,00	71,45	89,31%			

B. PERMASALAHAN & SOLUSI**B.1 Permasalahan**

1. Pelaku usaha/penanaman modal banyak yang kurang memahami laporan kegiatan penanaman modal (LKPM);
2. Adanya perubahan peraturan dan keputusan baik dari Presiden, Kepala BKPM RI maupun Kementerian dalam rangka mempermudah berinvestasi;
3. Pelaku usaha/penanaman modal banyak yang kurang memahami sistem online yang berlaku;
4. Belum adanya peta investasi yang sesuai dengan kegiatan usahanya;
5. Banyaknya perubahan data penanaman modal pada pelaku usaha;
6. Belum lengkapnya sarana dan prasarana di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Banyaknya aplikasi dari pusat yang harus digunakan dan diintegrasikan dengan sistem yang ada di daerah sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan hak akses terhadap aplikasi-aplikasi dari pusat tersebut;
8. Perubahan regulasi terkait perizinan & nonperizinan yang berubah dengan cepat;
9. Belum terpenuhi tenaga ahli (IT) untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP Kota Cilegon karena proses pelayanan perizinan dan nonperizinan sudah 100% berbasis online;
10. Belum terlaksananya pengarsipan dokumen perizinan dan nonperizinan manual secara elektronik.

B.2 Solusi

1. Perlu adanya sosialisasi dan pembinaan Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal yang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perlu adanya Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Latihan tentang Penanaman Modal baik di tingkat aparaturnya dan pelaku usaha;
4. Dibuatnya peta lokasi investasi tentang Penanaman Modal yang sesuai dengan kegiatan usahanya dan tata letak dan kelola perkecamatan;
5. Kegiatan Updating Data Penanaman Modal untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan kegiatan data investasi;
6. Perlu adanya sarana dan prasarana pendukung di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Perlu adanya sosialisasi teknis (pelatihan/TOT) dan peningkatan SDM mengenai aplikasi-aplikasi yang ada dipusat dan daerah serta kejelasan hak akses terhadap aplikasi tersebut;
8. Adanya regulasi turunan di daerah terkait perubahan regulasi tentang pelayanan perizinan dan nonperizinan;
9. Pengadaan tenaga ahli (IT) untuk operasional pemeliharaan dan pengembangan sistem perizinan dan nonperizinan online;
10. Melaksanakan kegiatan digitalisasi arsip untuk dokumen arsip pelayanan perizinan dan nonperizinan secara manual.

3.2.13 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

Tabel 3.2.13a

Target dan Realisasi Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2018

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemuda Dan Olahraga						35.970,00	32.194,38	89,50%
	Tingkat pemenuhan infrastruktur olahraga perkotaan	%	15,00	12,00	80,00%			
	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana olahraga	%	30,00	66,36	221,20%			
Pembangunan Sport center (Prioritas Daerah)	Terbangunnya Tribun Utara, Timur dan Selatan, Perlindungan Atletik, Lanscape	Paket	4	3	75,00%	35.000,00	31.608,08	90,31%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat	Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat (bola voli, bola basket, bola sepak dan bola futsal)	Buah	480	480	100,00%	130,00	128,85	99,11%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga pemuda	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Set	25	25	100,00%	130,00	125,00	96,15%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi	Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk olahraga prestasi (tinju, karate, senam, tae kwon do, pencak silat dan biliard)	Set, buah, meter, unit	256	-	0,00%	370,00	0,00	0,00%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga (lapangan tenis pci, ring tinju, lapangan bola voly dan panjat tebing)	Paket	3	3	100,00%	340,00	332,45	97,78%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Untuk Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga ini memiliki 2 indikator kinerja program, dengan rincian capaian kinerja :

- Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga secara konsistensi telah menjalankan dalam pemenuhan infrastruktur olahraga perkotaan dengan menunjang beberapa kegiatan dalam mendukung ketercapaian Indikator Program dengan target yang tercantum dalam RPJMD sebesar 15% dengan realisasi capaian sebesar 12%.

- Untuk Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon melakukan berbagai upaya dalam konsistensi Anggaran yang diimplementasikan dalam Kegiatan yang mendukung Indikator Program ini yang memiliki target 30% ketercapaian, dari beberapa Sarana dan Prasarana yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Cilegon diantaranya bola voli, bola basket, bola sepak, bola futsal, dan tenda regu. Dalam memenuhi nilai capaian realisasi Indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya :
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Sehingga Capaian Kinerja Indikator Program ini sebesar 66,36% dengan tingkat capaian kinerja 221,2%.

Pada program ini, ada beberapa kegiatan dengan realisasi dibawah 80% diantaranya:

Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi memiliki target 256 (Set,buah,meter) Dengan pagu anggaran sebesar Rp.370.000.000,- kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan tidak terpenuhinya spesifikasi persyaratan dokumen teknis pada pihak penyedia sehingga dilakukan lelang ulang dan belum juga ada yang memenuhi standar dokumen kualifikasi yang telah dipersyaratkan oleh PPK sehingga pada akhirnya proses lelang tersebut tidak dapat dilakukan lagi karena terbentur dengan waktu pelaksanaan melawati tahun berjalan.

Pada Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga terdapat Capaian Kegiatan yang dibawah 80%, yaitu:

Kegiatan Pembangunan Sport Center (Prioritas Daerah) yang memiliki capaian Kinerja 75%, hal ini disebabkan ada pekerjaan pembangunan Landscape yang tidak terealisasi, karena tidak terpenuhinya spesifikasi persyaratan dokumen teknis pada pihak penyedia sehingga dilakukan lelang ulang dan belum juga ada yang memenuhi standar teknis yang telah ditentukan oleh PPK sehingga pada akhirnya proses lelang tersebut tidak dapat dilakukan lagi karena terbentur dengan waktu pelaksanaan melawati tahun berjalan

hal ini disebabkan ada pekerjaan pembangunan Landscape yang tidak terealisasi, karena tidak terpenuhinya spesifikasi persyaratan dokumen teknis pada pihak penyedia sehingga dilakukan lelang ulang dan belum juga ada yang memenuhi standar teknis yang telah ditentukan oleh PPK sehingga pada akhirnya proses lelang tersebut tidak dapat dilakukan lagi karena terbentur dengan waktu pelaksanaan melawati tahun berjalan.



A.2 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Tabel 3.2.13b
Target dan Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tahun
Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga						4.518,40	4.420,40	97,83%
	Cakupan atlet cabang olahraga yang dibina	%	12	12	100,00%			
	Proporsi cabang olahraga yang berprestasi	%	65	65	100,00%			
O2S SMP Tingkat Cilegon	Terlaksananya O2s SMP Dengan Peserta Seluruh Atlet Pelajar SMP se kota Cilegon	SMP	42	38	90,48%	135,00	133,96	99,23%
O2S SD Tingkat Propinsi	Terlaksananya Kegiatan O2SN SD Tingkat Provinsi	Orang	45	45	100,00%	97,00	95,77	98,73%
O2S SKH Tingkat Propinsi	Terlaksananya kegiatan O2SN SKH Tingkat Provinsi	Orang	35	35	100,00%	67,50	66,07	97,88%
O2S SMP Tingkat Propinsi	Terlaksananya Kegiatan O2SN SMP Tingkat Provinsi	Orang	50	50	100,00%	95,00	88,24	92,88%
O2S Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan O2S tingkat kecamatan	Sekolah	180	160	88,89%	107,00	106,24	99,29%
Taman Kanak Kanak	Terlaksananya Kegiatan O2S Taman kanak-kanak Tingkat Kota Cilegon	Sekolah	100	100	100,00%	68,00	66,91	98,40%
O2S SKH Tingkat Kota Cilegon	Terlaksananya Kegiatan O2S SKH Tingkat Kota Cilegon	Sekolah	4	4	100,00%	48,80	48,37	99,11%
O2S SD Tingkat Kota Cilegon	Terlaksananya kegiatan O2S SD Tingkat Kota Cilegon	Sekolah	170	165	97,06%	147,40	145,50	98,71%
Training Center (TC) SD	Terlaksananya Kegiatan Training Center (TC) SD	Orang	71	71	100,00%	145,70	142,38	97,72%
Training Center (TC) SMP	Terlaksananya kegiatan Training Center (TC) SMP	Orang	79	79	100,00%	148,00	145,76	98,48%
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Atletik	Terlaksananya Kegiatan kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Atletik	Orang	90	90	100,00%	146,00	132,45	90,72%
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Basket	Terlaksananya Kegiatan kejuaraan olahraga Prestasi Cabang Basket	Orang	60	60	100,00%	148,00	142,56	96,32%
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Bola Voli	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi cabang Bola Voli	Orang	90	90	100,00%	147,00	143,40	97,55%
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Bulutangkis	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Bulutangkis Kota Cilegon	Orang	54	50	92,59%	107,00	105,63	98,72%
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Catur	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Catur Kota Cilegon	Orang	18	18	98,63%	50,00	49,31	98,63%
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Futsal	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Futsal Kota Cilegon	Club	30	29	96,67%	67,50	66,18	98,04%
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tinju	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tinju Kota Cilegon	Orang	36	34	94,44%	50,00	49,15	98,31%
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Panjat Tebing	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Panjat Tebing Kota Cilegon	Orang	14	14	98,88%	53,00	52,41	98,88%
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Pencak Silat	Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi	Orang	24	24	100,00%	50,00	49,26	98,52%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Cabang Pencak Silat Kota Cilegon							
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Sepak Takraw	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Sepak Takraw Kota Cilegon	Orang	30	30	100,00%	100,00	99,03	99,03%
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Sepakbola	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Sepak Bola Kota Cilegon	Club	40	40	100,00%	226,00	220,73	97,67%
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tae Kwon Do	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tae Kwon Do Kota Cilegon	Club	34	32	94,12%	87,00	85,81	98,63%
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tenis Lapangan	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tenis Lapangan Kota Cilegon	Club	15	10	66,67%	83,00	79,70	96,03%
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tenis Meja	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tenis Meja Kota Cilegon	Club	25	24	96,00%	57,00	55,89	98,05%
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Karate	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Karate Kota Cilegon	Orang	62	60	96,77%	50,00	49,03	98,05%
KEJURDA Cabang Olahraga Atletik	Terlaksananya kegiatan KEJURDA Cabang Olahraga Atletik	Orang	22	22	100,00%	107,00	105,32	98,43%
KEJURDA Cabang Olahraga Basket	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Basket	Orang	20	20	100,00%	91,00	89,96	98,86%
KEJURDA Cabang Olahraga Bola Volly	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Bola Volly	Orang	24	24	100,00%	155,00	151,29	97,61%
KEJURDA Cabang Olahraga Bulutangkis	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Bulutangkis	Orang	12	12	100,00%	63,00	62,06	98,51%
KEJURDA Cabang Olahraga Futsal	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Futsal	Orang	22	22	100,00%	130,00	127,96	98,43%
KEJURDA Cabang Olahraga Pencak Silat	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Pencak Silat	Orang	12	12	100,00%	85,00	83,03	97,68%
KEJURDA Cabang Olahraga Renang	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Renang	Orang	14	14	100,00%	81,00	79,90	98,64%
KEJURDA Cabang Olahraga Sepak Takraw	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Sepak Takraw	Orang	14	14	100,00%	84,50	83,37	98,67%
KEJURDA Cabang Olahraga Tenis Meja	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Tenis Meja	Orang	12	12	100,00%	80,00	79,05	98,81%
KEJURDA Cabang Olahraga Tinju	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Tinju	Orang	10	10	100,00%	65,00	64,11	98,63%
KEJURDA Cabang Olahraga Karate	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Karate	Orang	14	14	100,00%	83,00	82,03	98,84%
Kejuaraan Cabang Olahraga Bola Volly antar Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Cabang Olahraga Bola Volly Antar kecamatan	Kecamatan	8	8	100,00%	67,00	65,88	98,32%
Kejuaraan Cabang Olahraga Bola Volly antar Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan cabang Olahraga Bola volly Antar kelurahan	kelurahan	43	35	81,40%	90,00	89,15	99,06%
Penataran Pelatih Cabang - Cabang Olahraga	Terlaksananya Kegiatan Penataran pelatih cabang	Orang	68	68	100,00%	200,00	194,05	97,02%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Olahraga Pencak Silat dan karate							
POMKOT	Terlaksananya Pekan Olahraga Mahasiswa Kota Cilegon	Universitas	11	9	81,82%	65,00	64,26	98,86%
POSPEKOT	Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga Pondok Pesantren Kota Cilegon	Pondok	24	20	83,33%	65,00	64,11	98,63%
Kejuaraan Cabang Olahraga Prestasi Renang	Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Cabang Olahraga Prestasi Renang	Club	15	13	86,67%	83,00	82,04	98,84%
Kejurda Cabang Olahraga Tae Kwon Do	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Tae Kwon Do	Orang	14	14	100,00%	81,00	78,71	97,18%
Training Center (TC) SKH	Terlaksananya kegiatan Training Center (TC) SKH	Orang	45	45	100,00%	77,00	73,70	95,71%
Uji Kompetensi Instruktur Senam	Terselenggaranya uji kopetensi bagi instruktur senam	org	50	50	100,00%	35,00	34,25	97,86%
POSPEDA	Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga Pondok Pesantren Tingkat Provinsi	Orang	45	45	100,00%	150,00	148,29	98,86%
Pembinaan Pelatih Cabang Olahraga Sepak Takraw	Terlaksananya Kegiatan Penataran Pelatih dan wasit Cabang Sepak Takraw	Orang	30	30	100,00%	100,00	98,14	98,14%
Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga						4.691,44	4.429,35	94,41%
PLCOB Sepak Takraw	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Sepak Takraw	Orang	14	14	100,00%	423,12	415,71	98,25%
PLCOB Tae Kwon Do	Terlaksananya PLCOB Tae kwon do	Orang	14	14	100,00%	424,58	417,34	98,30%
PLCOB Tennis Meja	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Tennis meja	Orang	13	13	100,00%	397,31	389,58	98,05%
PLCOB Bulutangkis	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Bulutangkis	Orang	12	12	100,00%	356,60	348,99	97,87%
PLCOB Atletik	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Atletik	Orang	15	15	100,00%	209,99	202,09	96,24%
PLCOB Futsal	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Futsal	Orang	24	24	100,00%	814,44	793,14	97,38%
PLCOB Karate	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Karate	Orang	14	14	100,00%	400,50	394,47	98,49%
PLCOB Pencak Silat	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Pencak Silat	Orang	12	12	100,00%	446,88	439,85	98,43%
PLCOB Tinju	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Tinju	Orang	11	11	100,00%	166,71	164,42	98,63%
PLCOB Bola Volly	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Bola Volly	Orang	12	12	100,00%	323,85	318,65	98,39%
PLCOB Bola Basket	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Bola Basket	Orang	14	12	85,71%	230,57	227,85	98,82%
Dukungan Pelayanan Stadion Seruni	Terlaksananya Dukungan Pelayanan Stadion Seruni	Bulan	12	12	100,00%	496,90	317,27	63,85%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja program dalam RPJMD, dengan rincian capaian kinerja :

- Dalam Ketercapaian Indikator Cakupan atlet cabang olahraga yang dibina, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sangat konsisten untuk pengembangan pembinaan atlet cabang olahraga yang saat ini mencapai 3.383 orang. Pada indikator ini telah ditetapkan

sebesar 12% dengan capaian kinerja 100%. Dalam hal ini ada beberapa Kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Program guna membina atlet cabang olahraga melalui Kegiatan O2S, Kejuaraan Olahraga Prestasi, dan KEJURDA. Sehingga untuk capaian Pembinaan Prestasi Atlet yang telah dilakukan Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 406 orang.

- Selain itu pada indicator Proporsi cabang olahraga berprestasi, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan berbagai langkah-langkah guna meningkatkan prestasi cabang olahraga yang ada di Kota Cilegon melalui Kegiatan O2S, Kejuaraan Olahraga Prestasi, dan KEJURDA. Selain itu, pembinaan dan pengembangan cabang olahraga prestasi dilakukan secara khusus melalui 11 (sebelas) Pemusatan Latihan Cabang Olahraga Binaan (PLCOB). Pada target indicator ini sebesar 65% yaitu dengan jumlah 22 cabang yang dibina terhadap cabang olahraga yang ada 34, dengan realisasi capaian sebesar 65% atau dengan jumlah, sehingga tingkat capaian kinerja indicator ini sebesar 100%.

Pada program ini, ada beberapa kegiatan dengan realisasi dibawah 80% diantaranya :

1. Kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tenis Lapangan dengan besar Anggaran Rp. 83.000.000,- dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 79.703.000 atau sebesar 96.3% sedangkan untuk tingkat capaian kinerjanya dengan target 15 club dan realisasinya sebesar 10 club dengan tingkat capaian kinerja 66,67%. Hal ini dikarenakan pada saat proses pendaftaran hanya ada 10 club yang mendaftar ke Panitia sehingga Output Kegiatan tersebut tidak tercapai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan Dukungan Pelayanan Stadion Seruni dengan Anggaran Rp.496.903.367,- dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.317.273.600,- atau sebesar 63,85% sedangkan untuk tingkat capaian kinerjanya dengan target 12 bulan dan realisasinya hanya 8 bulan dengan tingkat capaian kinerja 66,67%. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan pengajuan pada tahap awal proses lelang dan selanjutnya dilakukan proses pengajuan lelang ulang sehingga Kegiatan ini dapat terlaksana pada Triwulan II.

A.3 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda

Tabel 3.2.13c
Target dan Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda						1.914,05	1.850,25	96,67%
	Cakupan pembinaan organisasi pemuda	%	100	80	80,00%			
	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	%	45	57	126,67%			
Pelatihan Karakter Bulding dan Kepemimpinan	Terlaksananya Pelatihan Karakter Bulding dan Kepemimpinan	Orang	110	110	100,00%	93,35	92,57	99,17%
Pra Pemusatan Paskibraka	Terlaksananya Pra Pemusatan Paskibraka	Orang	85	85	100,00%	140,35	138,78	98,88%
Seleksi Paskibraka	Terlaksananya Seleksi Paskibraka	Orang	130	130	100,00%	110,00	107,78	97,98%
Pemusatan Paskibraka	Terlaksananya Pemusatan Paskibraka	Peserta dan Pelatih	72	72	100,00%	500,00	476,87	95,37%
LTUB SD, SMP dan SMA Tk. Kota Cilegon	Terlaksananya LTUB SD, SMP dan SMA Tingkat Kota Cilegon	Orang	1.620	1.620	100,00%	92,45	91,44	98,90%
Kursus Mahir Dasar	Terlaksananya Kursus Mahir Dasar	Orang	80	80	100,00%	93,00	91,08	97,93%
Pelatihan Kewirausahaan Kepemudaan	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Kepemudaan	Orang	100	100	100,00%	90,00	87,34	97,04%
Pengembangan Wawasan Purna Paskibraka	Terlaksananya Pengembangan Wawasan Purna Paskibraka	Orang	100	100	100,00%	250,00	235,76	94,30%
Gebyar Pramuka 8 Kwarran	Terlaksananya Gebyar Pramuka 8 Kwarran di Kota Cilegon Tingkat Siaga dan Tingkat Penggalang	Orang	1.000	1.000	100,00%	139,40	136,79	98,13%
Kwarran Tergiat	Terlaksananya Lomba Kwarran Tergiat	Kwarran	8	8	100,00%	92,50	91,65	99,08%
Pusdiklatsar Paskibraka	Terlaksananya Pusdiklatsar Paskibraka	Peserta dan Pelatih	175	175	100,00%	93,00	91,07	97,93%
Lomba Keterampilan Baris Berbaris	Terlaksananya Lomba Keterampilan Baris Berbaris	Orang	864	864	100,00%	110,00	102,10	92,82%
Seleksi dan pengiriman pertukaran pemuda antar Negara	Terlaksananya Seleksi dan pengiriman pertukaran pemuda antar Negara	Orang	100	100	100,00%	110,00	107,02	97,29%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga terus secara serius untuk meningkatkan pembinaan pemuda baik melalui pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan diri pemuda. Hal ini sangat berguna dalam meningkatkan kemampuan pemuda guna memanfaatkan, mengembangkan partisipasi pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, selain itu pemuda juga harus dapat meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial, kepedulian pada lingkungan sosial dan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas pemuda sebagai pewaris nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta

meningkatnya kualitas kepemimpinan pemuda sebagai kader penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Pada program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.914.050.000,- dengan serapan sebesar Rp 1.850.246.050,- atau dengan prosentase capaian realisasi sebesar 96,67%. Ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Sasaran pada Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda memiliki 2 indikator yaitu:

1. Cakupan Organisasi Kepemudaan yang dibina

Cakupan Organisasi Kepemudaan yang di bina dengan tingkat capaian realisasi sebesar 80% atau terdiri dari 65 organisasi yang di bina oleh bidang Pembinaan dan Pengembangan Pemuda yang terdiri dari 56 organisasi pemuda dan terdiri dari 8 kwarran 1 kwarcab yang ada di Pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan yang telah terealisasi terdiri dari 43 organisasi kepemudaan melalui wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cilegon dan 8 kwarran 1 kwarcab melalui wadah Pramuka Kota Cilegon.

2. Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dengan target sebesar 45% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 126,50% dari 2.600 pemuda yang ada terdiri dari 2.240 pemuda dibawah naungan KNPI Kota Cilegon dan 360 dibawah naungan Pramuka Kota Cilegon dan telah terealisasi sebanyak 1.480 atau 50% orang pemuda yang teridiri dari 1.120 pemuda dibawah naungan KNPI Kota Cilegon dan 360 dibawah naungan Pramuka Kota Cilegon yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Capaian keberhasilan pada program ini adalah dengan meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan yang bergerak dibidang sosial, budaya, lingkungan dan lain-lain, ini mengindikasikan bahwa pemuda di Kota Cilegon antusias dalam mengikuti berbagai kegiatan yang ada, baik yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun Organisasi-Organisasi kepemudaan dibawah naungan KNPI dan Pramuka di Kota Cilegon, metode yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan pemuda sehingga keinginan untuk maju dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu keberhasilan juga dapat dilihat dari capaian indikator kinerja kegiatan dengan dengan realisasi sebesar 97%, ini membuktikan indikasi seluruh kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada program ini, ada beberapa kegiatan dengan realisasi dibawah 80% diantaranya :

1. Kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tennis Lapangan dengan besar Anggaran Rp. 83.000.000,- dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 79.703.000 atau sebesar 96.3% sedangkan untuk tingkat capaian kinerjanya dengan target 15 club dan realisasinya sebesar 10 club dengan tingkat capaian kinerja 66,67%. Hal ini dikarenakan pada saat proses pendaftaran hanya ada 10 club yang mendaftar ke Panitia sehingga Output Kegiatan tersebut tidak tercapai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan Dukungan Pelayanan Stadion Seruni dengan Anggaran Rp.496.903.367,- dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.317.273.600,- atau sebesar 63,85% sedangkan untuk tingkat capaian kinerjanya dengan target 12 bulan dan

realisasinya hanya 8 bulan dengan tingkat capaian kinerja 66,67%. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan pengajuan pada tahap awal proses lelang dan selanjutnya dilakukan proses pengajuan lelang ulang sehingga Kegiatan ini dapat terlaksana pada Triwulan II.

A.4 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Pemuda dan Olahraga)

Tabel 3.2.13d

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Pemuda dan Olahraga)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)						2.962,36	2.499,98	84,39%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100,00	100,00	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100,00	95,81	95,81%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100,00	82,37	82,37%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100,00	66,38	66,38%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan :

1. Belum optimalnya prestasi diberbagai kejuaraan nasional
2. Belum meratanya pembangunan sarana prasarana olahraga sesuai standar
3. Belum memiliki gedung pemuda sebagai wadah/tempat mengembangkan kreatifitas pemuda
4. Belum representatifnya gedung kantor Dinas Pemuda dan olahraga

B.2 Solusi :

1. Peningkatan kualitas pelatih melalui Pemusatan Latihan Cabang Olah Raga berprestasi (PLCOB) , Peningkatan prestasi olahraga melalui penyelenggaraan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang, dan berkelanjutan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat, Peningkatan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa, penyandang cacat dan masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional, Mengikutsertakan atlet Kota Cilegon pada *event* olahraga tingkat daerah, nasional dan internasional, Peningkatan kapasitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemberian penghargaan dan kesejahteraan bagi pelaku olahraga berprestasi;
2. Melengkapi kebutuhan sarpras olahraga dengan membangun sport centre dan prasarana lainnya sesuai dengan standar kelayakan bagi atlit
3. Membangun gedung pemuda sebagai wadah/tempat mengembangkan kreatifitas pemuda
4. Membangun gedung Dispora yang representatif

3.2.14 Bidang Urusan Statistik

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah (Dinas Kominfo, Sandi dan Statistik)

Tabel 3.2.14

Target dan Realisasi Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah						526,31	510,95	97,08%
	Persentase ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan tepat waktu	%	100	100	100,00%			
Penyusunan Statistik Ekonomi Kota Cilegon	Tersusunnya Statistik Ekonomi Kota Cilegon	dokumen	1	1	100,00%	128,55	127,02	98,81%
Penyusunan statistik sosial Kota Cilegon	Tersusunnya Statistik Sosial Kota Cilegon	dokumen	1	1	100,00%	152,75	148,05	96,93%
Forum data pembangunan Kota Cilegon	Jumlah peserta forum data pembangunan kota cilegon	orang	200	200	100,00%	27,92	26,93	96,44%
Penyusunan Profil pembangunan Kota Cilegon	Tersusunnya Profil Pembangunan Kota Cilegon	dokumen	2	2	100,00%	217,09	208,95	96,25%

Realisasi **indikator** Persentase ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan tepat waktu mencapai 100%. Hasil pencapaian kinerja program ini dipenuhi dengan terpenuhinya 4 (empat) dokumen statistik yang tersusun pada tahun 2019 yaitu : Dokumen statistik ekonomi kota Cilegon, dokumen statistik sosial kota Cilegon, profil pembangunan kota Cilegon, dan film pendek mengenai pembangunan kota Cilegon. Adapun dari capaian serapan anggaran dimaksud, diperoleh output kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan data-data statistik ekonomi sekunder, publikasi *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) menurut lapangan usaha, sebagai indikator makro pencapaian ekonomi daerah kota Cilegon (*target output 1 buku dan realisasi output sesuai 1 buku*).
2. Penyusunan data-data statistik sosial sekunder, publikasi IPM indikator kesejahteraan rakyat (INKESRA) sebagai gambaran makro hasil pembangunan yang telah dicapai pemerintah kota cilegon dalam upaya meningkatkan pemberdayaan manusia di kota Cilegon (*target output 1 buku + DVD System dan realisasi output sesuai 1 buku + DVD System*).
3. Kegiatan Forum Data Pembangunan Kota Cilegon, dilaksanakan dengan baik dalam bentuk forum/sosialisasi data-data tentang potret secara statistik keadaan, situasi yang mencakup sektor kegiatan pembangunan di Kota

Cilegon (target output 1 kegiatan forum/sosialisasi dan realisasi output sesuai 1 kegiatan forum/sosialisasi).

4. Penyusunan data-data sektoral profil pembangunan kota Cilegon, berisikan kompilasi data, informasi indikator makro pembangunan dan informasi layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (*target output 1 buku dan realisasi output sesuai 1 buku*). Serta penyusunan data-data sektoral dalam bentuk visualisasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) (*target output 1 DVD/Visual dan realisasi output sesuai 1 DVD/Visual*).

Terdapat 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan untuk Bidang Urusan Statistik. Secara umum, capaian kinerja maupun serapan anggaran untuk keempat kegiatan telah memenuhi target.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi keahlian/ jabatan fungsional statistisi.
2. Kurangnya ketersediaan data-data yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memberikan data/informasi secara cepat, tepat dan akurat.

B.2 Solusi

1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kompetensi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan koordinasi dengan BKPP untuk merekrut tenaga PNS sesuai dengan kompetensi jabatan
2. Meningkatkan koordinasi dan pemahaman tentang pentingnya data sektoral antar organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kota Cilegon.

3.2.15 Bidang Urusan Persandian

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Penyelenggaraan Persandian (Dinas Kominfo, Sandi dan Statistik)

Tabel 3.2.15

Target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Persandian Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penyelenggaraan Persandian						297,65	140,78	47,30%
	Tingkat penyelenggaraan persandian	%	100	100	100%			
Pengelolaan persandian dan jaringan komunikasi	Terlaksananya Pengelolaan Persandian dan jaringan komunikasi	Kegiatan	1	0	0,00%	107,60	3,50	3,25%
Pembinaan pengelolaan keamanan informasi	Terlaksananya pembinaan Pengelolaan Keamanan Informasi OPD, Keluarahan dan UPTD	Unit Kerja	85	85	100,00%	43,48	35,41	81,45%
Sterilisasi penginderaan ruang kerja pimpinan	Pengamanan informasi ruang kerja pimpinann dan OPD	OPD	6	6	100,00%	46,57	29,08	62,44%
Penerapan Sertifikat Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Secara Elektronik	Orang	40	40	100,00%	50,00	38,52	77,04%
Penilaian Keamanan Informasi	Terlaksananya Pengamanan Aplikasi	Org	60	60	100,00%	50,00	34,28	68,55%

Penyelenggaraan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan keamanan informasi dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem Persandian Negara.

Persandian merupakan upaya untuk mengamankan, melindungi, dan menjamin originalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah, merupakan hal yang sangat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Pelaksanaan Pemerintahan akan sangat bergantung dengan didukung oleh pengguna teknologi informasi di segala aspek, mulai dari administrasi perkantoran (e-office), Perencanaan (e-planning), Keuangan (e-budgeting), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking*, dan berbagai ancaman lainnya.

Realisasi **indikator** Presentase Tingkat penyelenggaraan persandian mencapai 100%. Hasil pencapaian kinerja ini dipenuhi dengan terpenuhinya 4 (empat) kegiatan, walaupun secara serapan anggaran masih kurang dari 80% dan 1(satu) kegiatan pemeliharaan jaringan telekomunikasi yang merupakan penunjang / tidak terkait langsung dari kegiatan persandian.

Secara umum, capaian kinerja untuk kelima kegiatan memenuhi target, namun terdapat 4 (empat) kegiatan dimana serapan anggarannya kurang dari 80%, yaitu :

1. Pengelolaan Persandian dan Jaringan Komunikasi

Penyerapan anggaran pada kegiatan Pengelolaan Persandian dan Jaringan Komunikasi sebesar 3,2% karena pada kegiatan tersebut diperuntukan pemasangan jaringan telekomunikasi pada gedung Sekretariat

Daerah yang rencana akan di renovasi. Pada pelaksanaannya tidak ada renovasi, sehingga anggaran tersebut tidak terserap.

2. Sterilisasi Penginderaan Ruang Kerja Pimpinan

Serapan anggaran pada kegiatan Sterilisasi Penginderaan Ruang Kerja Pimpinan sebesar 62,4% karena pada kegiatan tersebut sangat tergantung pada tenaga ahli/narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang sangat terbatas, karena harus melayani seluruh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia

3. Penerapan Sertifikat Elektronik

Serapan anggaran pada kegiatan Penerapan Sertifikat Elektronik sebesar 77,0% karena pada kegiatan tersebut sangat tergantung pada tenaga ahli/narasumber dari Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang sangat terbatas, karena harus melayani seluruh pemerintah daerah Se-Indonesia dan dalam penerapan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh aplikasi yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh BSrE.

4. Penilaian Keamanan Informasi

Serapan anggaran pada kegiatan Penilaian Keamanan Informasi sebesar 68,5% karena pada kegiatan tersebut sangat tergantung pada tenaga ahli/narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang sangat terbatas, karena harus melayani seluruh pemerintah daerah Se-Indonesia dan adanya penyerapan anggaran di bawah harga yang telah ditentukan dalam SAB sehingga adanya efisiensi anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Tidak adanya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang persandian (tidak ada fungsional sandiman) dan Tenaga IT (*information technology*) sebagai penunjang pelaksanaan persandian.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan persandian, serta terbatasnya Tenaga ahli atau Narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara, yang harus melayani di bidang persandian pada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

B.2 Solusi

1. Koordinasi dengan BKPP agar merekrut personil yang mempunyai kompetensi dibidang persandian dan peningkatan sumber daya manusia dengan melalui pendidikan dan pelatihan persandian
2. Melaksanakan kerjasama dengan badan siber dan sandi Negara (BSSN) Jakarta dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan persandian.

3.2.16 Bidang Urusan Kebudayaan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pembinaan Dan Pelestarian Seni, Budaya Dan Sejarah Daerah

Tabel 3.2.16a

Target dan Realisasi Program Pembinaan Dan Pelestarian Seni, Budaya Dan Sejarah Daerah Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pembinaan Dan Pelestarian Seni, Budaya Dan Sejarah Daerah						2.149,29	2.098,25	97,63%
	Jumlah Sanggar yang dibina	%	87,00	86,66	99,61%			
	jumlah peguron yang dibina	%	56,00	59,62	106,46%			
	Cakupan Kajian seni	%	50,00	73,30	146,60%			
	Cakupan Fasilitas Seni	%	70,00	71,00	101,43%			
	Cakupan Gelar seni	%	100,00	100,00	100,00%			
	Cakupan Misi kesenian	%	100,00	100,00	100,00%			
	Cakupan SDM Kesenian	%	25,00	50,00	200,00%			
	Cakupan Tempat Kesenian	%	100,00	100,00	100,00%			
	Cakupan Organisasi Kesenian	%	67,00	66,67	99,51%			
	Cakupan cagar budaya (benda, bangunan, kawasan dan struktur cagar budaya) yang dilesatarkan	%	29,00	-	0,00%			
Festival Maulid	Terlaksananya Festival Maulid Tingkat Kota Cilegon	Kecamatan/ Jenis lomba	8 ; 4	8 ; 4	100,00%	215,00	214,16	99,61%
Festival Golok Day	Terselenggaranya Kegiatan Festival Golok Day	Orang	1.700	1.700	100,00%	300,00	298,61	99,54%
Pembinaan Seni Budaya Daerah Kota Cilegon	Terselenggaranya event kebudayaan di dalam dan luar kota cilegon	Event	7	7	100,00%	679,29	662,81	97,57%
Pengadaan Alat-alat Kesenian	Terlaksananya Pengadaan Alat Musik Tradisional	Jenis Pencak Silat & paket Marawis	3	3	100,00%	75,00	72,19	96,25%
Kegiatan Penggalan Tokoh Sejarah Cilegon	Penggalan Tokoh Sejarah Cilegon	Dokumen	1	1	100,00%	120,00	101,43	84,52%
Misi Kesenian Daerah	Terlaksananya Pagelaran seni tradisional di Luar Daerah	Orang	30	30	100,00%	240,00	238,19	99,25%
Saresehan Budaya	Terlaksananya saresehan budaya	Budayawan	200	200	100,00%	140,00	139,63	99,74%
Penyusunan Perda Kebudayaan Daerah	Ditetapkannya Perda Kebudayaan	Dokumen	2	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Kajian Study Kelayakan Desa Budaya Kota Cilegon	Terlaksananya Kajian Study Kelayakan Desa Budaya Kota Cilegon	Dokumen	1	1	100,00%	60,00	57,31	95,52%
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Dokumen	1	1	100,00%	70,00	67,50	96,43%
Lawatan Budaya dan Sejarah Daerah	Terlaksananya Lawatan Budaya dan Sejarah Daerah	Kegiatan	1	1	100,00%	100,00	97,61	97,61%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Festival Kesenian Islami	Terlaksananya Kegiatan Festival Kesenian Islami	Kegiatan	1	1	100,00%	150,00	148,82	99,22%
Program Pembinaan Dan Pelestarian Seni, Budaya Dan Sejarah Daerah (UPTD Balai Budaya)						433,12	418,41	96,60%
Kegiatan Workshop dan Pagelaran	Terlaksananya Kegiatan Workshop dan Pagelaran	Event	5	5	100,00%	433,12	418,41	96,60%

Analisis ketercapaian program dan kegiatan tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik melalui indikator-indikator standar pelayanan minimal (SPM) yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Kesenian, maupun amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Nasional serta amanat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Untuk lebih jelasnya ketercapaian Program Pembinaan Dan Pelestarian Seni, Budaya Dan Sejarah Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Ketercapaian Indikator Jumlah seni yang dibina

Ragam seni merupakan identifikasi dan klasifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan dan pelestarian seni yang berkembang di Kota Cilegon. Identifikasi dan klasifikasi ragam seni ini telah dilakukan melalui dokumen kajian action plan kebudayaan kota Cilegon tahun 2008. Berdasarkan hasil kajian tersebut terdapat 21 ragam seni yang dimiliki oleh Kota Cilegon sebagai aset yang perlu dikembangkan dan dilestarikan melalui kegiatan-kegiatan, sehingga keberadaannya terus dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon.

Terkait pencapaian sasaran target dan realisasi pada Tahun 2019 jumlah seni yang dibina berdasarkan tabel diatas adalah sebanyak 15 jenis ragam seni dari target tahun 2019 sebanyak 15 ragam seni secara realisasi target indikator ini telah tercapai **100%**.

Adapun 15 ragam seni tersebut adalah **Bandrong Lesung, Debus, Patingtung, Marhaban/Panjang Mulud, Yalil, Marawis, Qasidah, Rebana, Pantun Bambu, Rampag Bedug, Terbang Gede, Pencak Silat, Teater, Ubrug, dan Hadroh.**

Dari 15 ragam seni yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat beberapa diantaranya mampu melahirkan **prestasi** membanggakan di tingkat Nasional seperti Festival Qasidah yang di naungi oleh LASQI dengan menjuarai Juara Umum Tk. Provinsi Banten tahun 2019 dan Juara ke-2 di tingkat Nasional tahun 2019.

Selain itu pula terdapat fasilitasi **kegiatan-kegiatan ragam seni lainnya seperti kegiatan** prosesi seni, fasilitasi kesenian pada event-event Tk. Kota Cilegon, Tk. Propinsi Banten, maupun Tk. Nasional (Festival Payung di Candi Prambanan).

Faktor pendukung keberhasilan dari indikator ini adalah sebagai berikut :



- a. Pembinaan terhadap ragam seni yang berkelanjutan, khususnya ragam seni yang memiliki minat dan ajang prestasi baik di tingkat propinsi maupun tingkat nasional seperti Festival Qasidah. Pembinaan yang dimaksud diatas melalui penyelenggaraan seleksi tingkat Kota Cilegon dan tingkat Propinsi Banten.
- b. Dukungan penganggaran melalui APBD Kota Cilegon, walupun bentuk penganggaran tersebut bersifat fasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ragam seni yang dibina.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan terhadap lembaga-lembaga seni yang masih melestarikan ragam seni yang ada di Kota Cilegon.

Dari keseluruhan capaian target dan realisasi indikator diatas diwujudkan melalui kegiatan **Pembinaan Seni Budaya Daerah** dengan target capaian 7 kegiatan di Tahun 2019. Diantara kegiatan tersebut adalah ***Festival Qasidah, Pementasan Kesenian dalam dan Luar Daerah dan Lomba Tari Tradisi dengan tema Dolanan Anak dan Lomba Vokal Grup kategori Lagu Daerah (Gembrung Budaya)***

2. Ketercapaian Indikator Jumlah sanggar yang dibina

Proporsi indikator diatas pada tahun 2019 ditarget sebesar 87% dan pada akhir 2019 capaian realisasi Jumlah sanggar yang dibina sebanyak 26 dari 30 sanggar yang ada di kota cilegon dengan capaian sebesar 86.66% artinya pencapaian realisasi secara keseluruhan tahun 2019 adalah 99.62%.

Pencapaian target pada indikator jumlah sanggar seni ini pula diikuti dengan prestasi yang membanggakan bagi Pemerintah Kota Cilegon yaitu Menjadi Juara II pada Lomba Parade Musik Tradisi dan Juara III Lomba Tari Tradisi pada event **Pagelaran Festival Budaya Nusantara 3 di Kota Tangerang**.

Selain itu, target pencapaian indikator jumlah sanggar yang dibina pula dilaksanakan melalui berbagai bentuk fasilitasi kesenian dengan mengirimkan beberapa sanggar dalam event-event daerah seperti MTQ Kota Cilegon, HUT Kab/Kota Di tingkat Propinsi Banten, fasilitasi kesenian pada lembaga dan instansi Pemerintah serta pagelaran Gembrung Budaya.

Dalam pencapaian target indikator ini terdapat faktor pendukung keberhasilan diantaranya adalah :

1. Pembinaan terhadap sanggar-sanggar melalui koordinasi dengan UPT. Balai Budaya dalam pembuatan produk kesenian daerah.
2. Pemberian bantuan sarana dan prasarana berupa alat kesenian dan fasilitasi kegiatan.
3. Sinergitas kegiatan-kegiatan sanggar baik internal maupun eksternal.

Untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan pada indikator ini, adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah **Pembinaan Seni Budaya Daerah dan Pengadaan Alat-alat Kesenian**.

Secara perhitungan target pencapaian kegiatan di tahun 2019 untuk pembinaan seni budaya daerah mencapai 100% dengan target 7 kegiatan dan pada kegiatan pengadaan alat kesenian mencapai 100%.

3. Ketercapaian Indikator Jumlah peguron yang dibina

Berdasarkan inventarisasi data yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon jumlah peguron di Kota Cilegon sebanyak 161 peguron yang tersebar di 8 Kecamatan.

Peguron-peguron tersebut terhimpun dalam sebuah wadah yang dibentuk dengan nama Himpunan Peguron Persilatan Banten (HPPB). HPPB di Kota Cilegon merupakan wadah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pelestarian tradisi berbentuk “*silat*” dengan berkoordinasi dengan IPSI Kota Cilegon sebagai wadah pembinaan prestasi atlet silat.

Berdasarkan pencapaian target dan realisasi indikator jumlah peguron yang dibina pada tahun 2019 sebanyak 96 peguron dari 161 peguron yang ada di kota cilegon dengan presentase sebesar 59.62% dari target 56%, secara keseluruhan target capaian pada indikator ini telah terpenuhi sebesar 106%.

Pada tahun 2019 fasilitasi kegiatan yang menunjang pada indikator ini berupa kegiatan Festival Pencak Silat/Kendang Pencak dengan melaksanakan Lomba rampak kendang pencak silat Patingtung Tk. Kota Cilegon dan Festival Pencak Silat Nusantara serta penyelenggaraan **Event Golok Day** yang menjadi Ikon dan Identitas Daerah sebagai Kota yang memiliki Seribu Peguron.

Event Golok Day yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini tidak hanya diikuti oleh Tingkat Kota saja namun sudah merambah pada event Nusantara atau tingkat Nasional serta Mancanegara, hal ini dibuktikan dengan antusias peserta yang terdiri dari berbagai negara seperti Inggris, Swiss, Perancis, USA, Belanda, Malaysia, dan Singapura.

Untuk mendukung indikator ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon menyusun kegiatan khusus yaitu Kegiatan Festival Golok Day.

4. Ketercapaian Indikator SPM Bidang Kesenian

Standar Pelayanan Minimal atau SPM merupakan indikator dasar yang wajib diacu dari tahun 2010 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor 106 tentang SPM Bidang Kesenian, dalam konteks pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyusun laporan SPM setiap tahun baik secara capaian target dan realisasi.

Secara umum ketercapaian indikator-indikator SPM Bidang Kesenian ini dibagi menjadi 2 jenis pelayanan dasar yaitu ***Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian dan Sarana Prasarana***, dari kedua jenis layanan dasar tersebut terdapat pengukuran target capaian melalui indikator-indikator sesuai dengan definisi operasional Permendikbud Nomor 85 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Kesenian.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, untuk jenis pelayanan dasar Bidang Kesenian sub jenis Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan, indikatornya adalah Cakupan Kajian Seni 50%, Cakupan Fasilitasi Seni 30%, Cakupan Gelar Seni 75%, Cakupan Misi Kesenian 100% dan batas waktu pencapaian secara nasional pada tahun 2014. Untuk jenis pelayanan dasar Bidang Kesenian sub jenis pelayanan dasar Sarana dan Prasarana, indikatornya adalah Cakupan Sumberdaya Kesenian 25%, Cakupan Tempat Kesenian 100%, dan Cakupan Organisasi 34% dan



batas waktu pencapaian secara nasional pada tahun 2014, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013.

Untuk lebih jelasnya capaian target realisasi pada indicator SPM bidang kesenian akan dijelaskan melalui uraian berikut ini :

4.a Cakupan Kajian Seni 50%

Berdasarkan definisi operasional propinsi / kab / kota sekurang-kurangnya melaksanakan 50% dari indicator ini, jika dirumuskan berdasarkan definisi diatas maka setiap propinsi atau kab/kota harus melaksanakan 7 kegiatan dari 15 kegiatan yang termasuk dalam kegiatan cakupan indicator kajian seni. Dari 15 kegiatan yang mencakup dalam indicator cakupan kajian seni adalah ***Seminar, Saresehan, Diskusi, Workshop, Penyerapan Narasumber, Study Kepustakaan, Penggalan, Eksperimental, Rekonstruksi, Revitalisasi, Konservasi, Study Banding, Inventarisasi, dan Dokumentasi bahan kajian.***

Proporsi cakupan kajian seni yang telah dilakukan berdasarkan indikator diatas pada tahun 2019 sebanyak 11 indikator dari 15 indikator yang ada di cakupan kajian seni, dengan presentase sebesar 73.3 % dari target tahun 2019 sebesar 50%, sehingga persentase realisasi terhadap SPM sebesar 147%.

Sebagai bahan data pencapaian sasaran target indicator kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mendukung capaian realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

- Kajian FS Desa Budaya, Seminar Seni Marawis dan seminar Golok Day yang masuk dalam lingkup kategori **Seminar**.
- Saresehan Desa Budaya Tk. Kota Cilegon dan Sarasehan Desa Budaya Tk. Kecamatan Ciwandan yang masuk dalam lingkup kategori **Saresehan**.
- Rintisan Desa Budaya di Kelurahan Kubangsari dan FGD FS Desa Budaya yang masuk dalam lingkup kategori **Diskusi**.
- Workshop seni kriya anyamdi UPT Sanggar Seni Budaya yang masuk dalam lingkup kategori **Bengkel Seni (Workshop)**.
- Narasumber sarasehan Desa Budaya, Seminar Marawis, Workshop di UPT Balai Budaya Budaya, narasumber Festival Golok Day dan FGD FS Desa Budaya yang masuk dalam lingkup kategori **Penyerapan Narasumber**.
- Penggalan Tokoh Sejarah Kota Cilegon masuk dalam lingkup kategori **penggalan**
- Tari Anteb, Tari dan Musik Meketen Niki Wong Cilegon masuk dalam lingkup kategori **Eksperimental**.
- Melakukan lawatan budaya dan sejarah ke Cirebon dan Kuningan masuk dalam lingkup kategori **Studi Banding**.
- Penggalan jenis baju adat/tradisi masyarakat Kota Cilegon masuk dalam kategori **Rekonstruksi**
- Memberikan pandangan dan masukan terkait hak inisiatif DPRD Kota Cilegon dalam penyusunan Perda Pelestarian Kebudayaan Daerah masuk dalam kategori **Kepustakaan**

- k. Penyusunan dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan kajian penggalian tokoh sejarah Cilegon masuk dalam Lingkup **Dokumentasi bahan Kajian**

Dari seluruh kegiatan ini tidak seluruhnya dibiayai oleh APBD kota Cilegon namun adapula bentuk sinkronisasi kegiatan bersama Pemerintah Propinsi Banten serta Lembaga Non Profit dan Lembaga Swasta.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pada indikator ini adalah meningkatnya koordinasi antara lembaga/instansi dengan pihak-pihak terkait yang membidangi urusan kebudayaan.

4.b Cakupan Fasilitas Seni 30%

Berdasarkan definisi operasional propinsi / kab / kota sekurang-kurangnya melaksanakan 30% dari indikator ini, jika dirumuskan berdasarkan definisi diatas maka setiap propinsi atau kab/kota harus melaksanakan 2 kegiatan dari 7 kegiatan yang termasuk dalam kegiatan cakupan indikator fasilitas seni.

Proporsi cakupan fasilitas seni yang telah dilakukan berdasarkan indikator diatas pada tahun 2019 sebanyak 5 indikator dari 7 indikator yang ada di cakupan fasilitas seni, dengan presentase sebesar 71 % dari target tahun 2019 sebesar 70% sehingga prosentase capaian indikator fasilitas seni sebesar 101%.

Sebagai bahan data pencapaian sasaran target indikator kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mendukung capaian realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

- Kegiatan **Pengadaan Alat-alat kesenian** berupa kegiatan yang mengakomodir kebutuhan alat-alat kesenian yang diperlukan dalam pelatihan siswa/i pada UPT Balai Budaya Disparbud Kota Cilegon masuk dalam lingkup kategori **Pemberian Bantuan**.
- Seni musik islami Hadroh yang baru terbentuk masuk dalam lingkup kategori **Bimbingan Organisasi**.
- Dewan Kesenian Cilegon (DKC) masuk dalam lingkup kategori **Kaderisasi**.
- Kegiatan kesenian diluar daerah (Garut), Festival Budaya Nusantara III Di Kota Tangerang dan bulan promosi budaya dan pariwisata dalam rangka HUT Provinsi Banten di TMII dan Apeksi ke Semarang merupakan salah satu dalam lingkup kategori **Promosi**.
- Pembuatan Brosur, leaflet gembrung budaya, festival pencak silat dan Festival Golok Day merupakan masuk kategori **penerbitan dan pendokumentasian**

Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada cakupan fasilitas seni ini melalui APBD kota Cilegon. Sedangkan faktor pendukung keberhasilan pada indikator ini adalah meningkatnya koordinasi antara lembaga/instansi dengan pihak-pihak terkait yang membidangi urusan kebudayaan dan sinkronisasi kegiatan dalam penyelenggaraan event-event budaya di luar daerah.

4.c Cakupan Gelar Seni 75%

Pencapaian target indicator gelar seni terwujud dalam 4 kegiatan yang masuk dalam cakupan gelar seni yaitu ***Pagelaran, Lomba, Festival dan Pameran.***

Berdasarkan capaian target dan realisasi pada tahun 2019 sebesar kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam 4 unsur kegiatan cakupan gelar seni sebesar 100%. Adapun kegiatan yang mendukung pada indikator gelar seni ini adalah sebagai berikut :

- a. Festival Golok Day***
- b. Festival Maulid Kota Cilegon***
- c. Pagelaran Gembrung Budaya Kota Cilegon***
- d. Pameran Senjata Pusaka Nusantara***

4.d Misi Seni 100%

Pada Tahun 2019 pencapaian misi seni telah dilaksanakan dengan capai realisasi sebesar 100% (1kali kegiatan), bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mendukung indikator ini adalah Kegiatan Misi Seni Budaya Daerah yang setiap tahunnya diikuti dalam rangka event APEKSI dan Kegiatan Pementasan Kesenian di TMII, karena kita sudah melakukan dua kali kegiatan maka realisasi sebesar 200%.

4.e SDM Kesenian 25%

Pada Tahun 2019 pencapaian SDM telah dilaksanakan dengan capai realisasi sebesar 50%, atau 4 unsur cakupan yang termasuk kedalam cakupan SDM kesenian seperti, Seniman/Budayawan, Insan Media Massa, Pengusaha dan Penyandang Dana. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh DISPARBUD dalam peningkatan SDM Kesenian berupa pengiriman SDM kesenian ke Workshop, Seminar atau Bimtek yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah.

Pada Tahun 2019 pengiriman SDM kesenian ini telah mengikuti beberapa seperti Diskusi Terpimpin Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten, Pementasan dan Pameran Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

4.f Tempat Kesenian 100%

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal:

1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan
 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.
- Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mendorong dan membuka peluang bagi masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui Kesenian.

Pada Tahun 2019 pencapaian Tempat Kesenian telah dilaksanakan dengan capai realisasi sebesar 100%.



Dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 sarana dan prasarana berupa tempat kesenian telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Cilegon.

4.g **Organisasi Kesenian 34%**

Organisasi kesenian merupakan salah satu unsur struktur kelembagaan yang terbentuk dibawah struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hal ini dibentuk untuk mengembangkan kesenian daerah di tingkat kelurahan ataupun kecamatan yang masih belum terinventarisir oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Salah satu organisasi bentukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dewan Kesenian Cilegon (DKC) dibentuk oleh SK Kepala Dinas dan memiliki peraturan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada Tahun 2019 pencapaian organisasi Kesenian telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar 66.67% secara target tahunan telah mencapai 100%.

Proporsi ketercapaian target dan realisasi organisasi kesenian di Tahun 2019 telah tercapai 100%, hal ini diwujudkan berdasarkan lembaga kesenian yang terbentuk, selain UPT. Balai Budaya yang telah terbentuk pada tahun 2013, Kota Cilegon juga memiliki Dewan Kesenian Kota Cilegon sebagai partner dalam urusan kesenian, serta Lembaga Budaya Cilegon yang konsen di bidang adat dan tradisi.

5. **Ketercapaian Indikator Cakupan cagar budaya (benda, bangunan, kawasan dan struktur cagar budaya) yang dilesatarikan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya mengamanatkan untuk melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang ada di daerah.

Secara Inventarisasi Data Cagar Budaya Kota Cilegon memiliki 29 Cagar Budaya yang telah di data baik berupa, benda, bangunan, kawasan dan struktur cagar budaya. Pada tahun 2012 dan 2014 Dinas Pariwisata telah bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Kanwil Prop Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Lampung untuk melaksanakan penilaian terhadap cagar budaya Kota Cilegon. Dari 29 cagar budaya yang telah diinventarisasi terdapat pemeringkatan terhadap 9 cagar budaya yang masuk dalam kategori regional dan local.

Pada Tahun 2019 target cakupan cagar budaya Kota Cilegon sebesar 29 %. berdasarkan perwal nomor 63 tahun 2019 tentang rencana strategis perangkat daerah 2016-2021, maka target yang semula 29% menjadi 0 atau di revisi.

6. **Cakupan Bahasa dan adat istiadat/nilai-nilai budaya daerah**

Berdasarkan perwal nomor 63 tahun 2019 tentang rencana strategis perangkat daerah 2016-2021, maka cakupan bahasa dan istiadat cakupan kajian seni yang telah dilakukan berdasarkan indicator diatas pada tahun 2019 sebanyak 2 kegiatan dengan presentase sebesar 100 % dari target tahun 2019 sebesar 2 kegiatan.

Adapun kegiatan cakupan bahasa dan adat istiadat/nilai-nilai budaya daerah yaitu:



- Kegiatan lomba vocal lagu berbahasa daerah.
- Kegiatan penyusun perwal nomor 57 tahun 2018 terlebih dipertajam dan instruksi walikota Cilegon nomor 1 tahun 2018 tentang penggunaan, pengembangan dan memelihara bahasa jawa Cilegon.

7. Cakupan Sejarah/kepurbakalaan dan Museum

Berdasarkan perwal nomor 63 tahun 2019 tentang rencana strategis perangkat daerah 2016-2021, maka Cakupan Sejarah/kepurbakalaan dan Museum yang telah dilakukan berdasarkan indicator diatas pada tahun 2019 sebanyak 1 kegiatan dengan presentase sebesar 100 % dari target tahun 2019 sebesar 1 kegiatan

Adapun kegiatan yang dimaksud diatas yaitu kegiatan lawatan sejarah dan budaya ke kota Cirebon dan kekuningan.

Dari sedi sejarahnya kita memiliki latar belakang yang sama yaitu dari sejarah kesultanan di Cirebon, dimana salah satu putranya menjadi sultan di banten (sultan maulana yusuf), sejarah masa lampau sampai saat ini Cilegon mempunyai riwayat sejarah yang tokoh-tokoh sejarah yang memiliki latar belakang agama/pendidikan pondok pesantren.

B.1 Permasalahan

Dalam melaksanakan upaya pengembangan dan pelestraian kebudayaan daerah terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Minimnya pengalihan-penggalian sejarah local sebagai sumber pengetahuan, khususnya bagi generasi muda atau generasi milenial.
2. Perlu tindak lanjut pembentukan Desa Budaya berdasarkan kajian FS Desa Budaya yang telah dirumuskan.
3. Minimnya alokasi anggaran yang diberikan untuk fasilitasi kegiatan dalam rangka memenuhi event-event dalam dan luar daerah.

B.2 Solusi

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah, maka disusunlah rumusan problem solving yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019. Diantaranya adalah :

1. Menyusun Kajian atau penelitian tentang kesejarahan local sebagai tindak lanjut dari penulisan sejarah Kota Cilegon, solving problem ini dilakukan melalui Kegiatan Penyusunan Penggalan Tokoh Sejarah Cilegon pada tahun 2019.
2. Roadshow penggalian dan identifikasi potensi-potensi kebudayaan yang ada di kecamatan dan kelurahan yang terdapat di Kota Cilegon, solusi ini dilakukan melalui kegiatan pelestarian budaya daerah dalam sub kegiatan sasehan budaya guna mewujudkan rintisan desa budaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.
3. Optimalisasi anggaran terhadap fasilitasi kegiatan seni dengan melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi, solusi ini dilakukan melalui kegiatan pembinaan seni budaya daerah pada sub kegiatan fasilitasi kegiatan seni.

3.2.17 Bidang Urusan Kearsipan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah

Tabel 3.2.17a
Target dan Realisasi Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah						448,77	435,94	97,14%
	Rasio Jumlah Unit Kerja Berstandar baku dalam pengelolaan kearsipan terhadap total unit kerja binaan	%	84,44	53,33	63,16%			
	Cakupan Akuisisi Arsip Bernilai Guna	OPD	1,00	1,00	100,00%			
Akuisisi dan Penyelamatan Arsip	Tersedianya Arsip bernilai guna	OPD	1	1	100,00%	14,00	13,95	99,64%
Pembinaan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis	Meningkatnya profesionalisme kerja arsiparis dan tersedianya penetapan angka kredit kumulatif arsiparis	Arsiparis	17	17	100,00%	11,40	11,40	100,00%
Penelusuran Arsip Statis Kota Cilegon	Tersedianya arsip sejarah ota Cilegon	Tema/Tokoh	1	1	100,00%	70,06	69,86	99,71%
Pelaporan dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan SKPD	Tersedianya data arsip dinamis dan terpantaunya pengelolaan arsip SKPD	OPD/Unit Kerja	135	135	100,00%	98,73	97,48	98,73%
Pendataan dan Penataan Arsip SKPD	Terlaksananya Pendataan dan Penataan Arsip SKPD	Unit Kerja	1	1	100,00%	64,56	56,95	88,22%
Penyusunan Regulasi Kearsipan (Jadwal Retensi Arsip)	Terciptanya jadwal Retensi Arsip sebagai Pedoman Penyusutan	Perwal	2	2	100,00%	77,32	75,64	97,84%
Digitalisasi Arsip	Tersedianya arsip media baru	Kegiatan	1	1	100,00%	52,59	51,04	97,05%
Program Arsip Vital	Terselamatkannya arsip vital baik fisik maupun informasinya	Unit Kerja	3	3	100,00%	45,30	44,80	98,90%
Supervisi / Pengawasan Kearsipan	Terciptanya pemantauan pengelolaan arsip berdasarkan standar kearsipan	Laporan Audit	10	10	100,00%	14,82	14,82	100,00%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah ini memiliki 2 indikator kinerja program, dengan rincian capaian kinerja :

- Ketercapaian Indikator Kinerja Rasio Unit Kerja Berstandar Baku dalam Pengelolaan Kearsipan terhadap total unit kerja Binaan mencapai 63.16 %. Dengan target 84.45% dan realisasi hanya 53.33%. Capaian ini berkurang dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja ini diperoleh dengan memantau pelaporan situasi kondisi arsip unit kerja melalui pengisian data arsip dinamis surat masuk dan surat keluar. Dari 135 unit kerja terpantau hanya sekitar 72 unit kerja yang sudah melakukan mengisi data

arsip dinamis Tahun 2019 dalam sistem e-arsip. Dalam kurun waktu 3 tahun ini indikator ini memiliki ketercapaian yang cenderung stagnan bahkan menurun. Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya lagi evaluasi on the spot, hanya pemantauan evaluasi melalui sistem e-arsip saja. Kegiatan yang seharusnya mendukung ketercapaian program ini adalah Pembinaan dan Penilaian Angka Kredit Jafung Arsiparis, Pelaporan dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan SKPD, Supervisi/Pengawasan Kearsipan.

- Ketercapaian Indikator Kinerja Cakupan Akuisisi Arsip bernilai guna mencapai 100%. Dengan target 1 OPD yang terakuisisi setiap tahunnya. Yaitu dengan Mengakuisisi arsip-arsip Statis milik OPD yang bernilai guna permanen untuk disimpan di lembaga Kearsipan. Pada tahun 2019 ini ditargetkan satu OPD yang terakuisisi dan diperoleh arsip-arsip statis yang bernilai guna permanen. Sampai dengan tahun 2019 ini DPAD sudah mengakuisisi arsip milik 4 OPD yaitu Dinas Perkim, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, serta Bagian organisasi Setda Kota Cilegon.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon sebagai Lembaga Kearsipan Daerah pada tahun 2019 ini telah memperoleh gelar sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Terbaik Tingkat Nasional, melalui ajang ANRI AWARD yaitu Penghargaan terhadap Juara I Lembaga Kearsipan Tingkat Nasional. Prestasi ini diraih sudah tentu tidak terlepas dari Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Cilegon melalui support Anggaran dan kebijakan serta kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam upaya pengelolaan dan penyelamatan arsip daerah milik Kota Cilegon maupun arsip milik masyarakat Kota Cilegon.

Keunggulan yang dimiliki oleh Lembaga Kearsipan Cilegon adalah dukungan dan kepedulian pemerintah daerah terhadap arsip keperdataan milik masyarakat yang merupakan arsip vital yaitu dengan membantu masyarakat di Wilayah Kecamatan Cibeer yang terkena musibah banjir melalui pelaksanaan Preservasi Arsip korban bencana (Pembenahan terhadap arsip yang rusak). Melalui gerakan ini banyak arsip vital keperdataan milik masyarakat sekitar 170 arsip terselamatkan dan dapat dimanfaatkan kembali.

Kegiatan Program Peningkatan Pengelolaan Arsip daerah yang berbasis Kinerja dan Anggaran APBD pada tahun 2019 ini rata-rata mencapai serapan 100% untuk kinerja dan 95% untuk anggaran, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- Akuisisi dan Penyelamatan Arsip dengan serapan kinerja 100% dan serapan anggaran 99,64 % dengan mengakuisisi arsip-arsip ketatalaksanaan dan kelembagaan Pemerintah Kota Cilegon yang ada di Bagian Organisasi Setda Kota Cilegon.



- Pembinaan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis dengan ketercapaian kinerja 100% dan anggaran serapan anggaran 100%. Kegiatan ini dengan melakukan pembinaan dan penyusunan angka kredit arsiparis untuk dapat diajukan pada penilaian setiap awal tahun. Dan pada tahun 2019 ini Kota Cilegon telah memiliki 13 jabatan fungsional dan di akhir Tahun 2019 ini terdapat 4 orang yang telah lulus mengikuti ujian Inpassing arsiparis.
- Penelusuran Arsip Sejarah dengan ketercapaian kinerja 100% dan anggaran 99,71%. Pada Penelusuran Tahun ini DPAD Kota Cilegon menelusur dan mengumpulkan arsip-arsip pribadi milik Tokoh Fatulloh Syamun dan kemudian dihimpun dan dibukukan. Dengan demikian DPAD Kota Cilegon sampai dengan tahun 2019 ini telah menerbitkan 3 Buku Arsip Tokoh yaitu :
 1. Tb. Aat Syafaat mantan Walikota Cilegon
 2. Rusli Ridwan mantan Wakil Walikota Cilegon
 3. Fatulloh Syamun mantan Ketua DPRD Kota Cilegon
- Pelaporan dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan SKPD dengan ketercapaian kinerja 100% dan anggaran 98,73%. Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan pengelola arsip dari 135 unit kerja untuk diberikan pembinaan melalui materi yang diberikan oleh narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Sekaligus dilakukan pemantauan terhadap pengisian data arsip dinamis dalam e-arsip. Melalui kegiatan ini terdapat sekitar 10% OPD yang menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan pembinaan khusus guna pebaikan terhadap pengelolaan arsip di unit kerjanya.
- Pendataan dan Penataan Arsip SKPD dengan ketercapaian kinerja 100% dan Anggaran 88,22%. Adapun Pendataan dan penataan Arsip di tahun 2019 ini dilaksanakan pada Bagian Organisasi Setda Kota Cilegon. Dengan memisahkan dan mendata arsip arsip Inaktif serta arsip-arsip statis yang bernilai guna permanen.
- Penyusunan Regulasi Kearsipan dengan ketercapaian kinerja 100% dan anggaran 97,84%. Penyusunan Regulasi Kearsipan pada tahun 2019 ini adalah Refisi JRA Keuangan dan JRA Kepegawaian serta penyusunan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif non Kepegawaian dan non Keuangan yang terkait dengan klasifikasi umum yaitu perencanaan dan dan klasifikasi pengawasan. Ketersediaan JRA ini dapat dimanfaatkan oleh OPD sebagai pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan OPD tersebut.
- Digitalisasi Arsip dengan ketercapaian kinerja 100% dan anggaran 97,84%. Kegiatan ini adalah dengan mendigitalkan arsip-arsip statis yang bernilai guna permanen agar terdapat back up berupa arsip digital. Arsip

yang dialihmediakan dalam bentuk digital pada Tahun 2019 ini adalah arsip-arsip IMB hasil akuisisi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman .

- Program Arsip Vital dengan ketercapaian kinerja 100% dan anggaran 98,90%. Kegiatan program arsip vital ini adalah penyelamatan arsip vital milik masyarakat. Program arsip vital ini dilaksanakan di Kelurahan Kalitimbang yang merupakan wilayah yang terkena dampak banjir dan kemungkinan menjadi wilayah yang akan dilewati banjir di masa mendatang dilihat dari segi geografisnya. Sehingga dipandang perlu adanya upaya pencegahan sebelum terjadinya bencana kembali. Selain itu juga dilakukan Penyelamatan arsip di di SMP 10 dimana di sekolah tersebut terdapat banyak arsip vital terutama ijazah siswa yang rusak akibat factor alam dan lingkungan.
- Supervisi/Pengawasan Kearsipan dengan ketercapaian kinerja 100% dan anggaran 100%. Supervisi ni dilakukan dengan menilai 10 OPD menggunakan instrumen pengawasan kearsipan yang baku sehingga dapat diketahui tingkat kepatuhan OPD dalam melaksanakan pengelolaan kearsipan berdasarkan kaidah kearsipan yang berlaku. Adapun 10 OPD yang sudah dilakukan pengawasan kearsipan adalah:
 1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
 2. BKPP,
 3. Disnaker,
 4. Dinas Kesehatan,
 5. BPKAD,
 6. Dinas Pendidikan,
 7. Dinas Sosial,
 8. Damkar,
 9. Inspektorat, dan
 10. Dinas Kominfo.

Secara Keseluruhan Penyerapan anggaran untuk Program Peningkatan Pengelolaan Arsip daerah Sangat baik dengan Anggaran sebesar **Rp. 448.765.000 dan Realisasi Rp. 435.935.751,-** sehingga ketercapaian program sebesar **97,14%**. Namun demikian, meskipun ketercapaian kinerja program dan anggaran dari Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah ini sudah baik , masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pengelolaan arsip di OPD-OPD. Pemahaman akan pentingnya arsip masih harus terus ditekankan agar arsip dapat diperlakukan dengan baik sehingga pencarian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Upaya Akuisisi Arsip IMB milik Perusahaan dan Perorangan dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 270 Box atau sekitar 2500 lembar oleh Bidang Kearsipan DPAD yang telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dimana terdapat beberapa masyarakat dan Perusahaan yang mencari data arsip IMB yang mereka miliki dan informasi tersebut dapat diakses pada Layanan Arsip DPAD. Perusahaan yang telah mengakses data dan arsip IMB di DPAD diantaranya PT. Bluescope, PT. Daekyung Indah Heavy Industry, PT. Sehat Premiere Indonesia, BJB Syariah. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan DPAD sebagai Lembaga Kearsipan Daerah yang mempunyai Tupoksi dalam penyelamatan arsip Statis yang bernilai guna permanen.

Gerakan sadar arsip perlu digaungkan baik pada lingkup pemerintahan maupun masyarakat umum agar penyelamatan terhadap informasi dan fisik arsip dapat dilakukan sehingga ditemukan arsip-arsip yang bernilai guna sejarah dan permanen untuk memperkaya khazanah arsip daerah.

A.2 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah)

Tabel 3.2.17b

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH)						1.505,70	1.449,60	96,27%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	95,00	75,00	78,95%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84,00	74,46	88,64%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	92,00	86,75	94,29%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	95,00	91.61	96,43%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis dan statis di OPD atau Unit Kerja.
2. Belum tersedianya Record Centre pada setiap OPD, menyebabkan arsip ditumpuk di sudut-sudut ruangan dan bercampur dengan bahan non arsip.
3. Terbatasnya naskah sumber arsip sejarah di Kota Cilegon serta sulitnya ijin untuk memperoleh arsip sejarah tersebut.
4. Belum dilakukannya penyusutan arsip pada OPD sehingga volume arsip yang disimpan sangat banyak tanpa diimbangi dengan ketersediaan sarana, prasarana dan SDM.

5. Kurangnya pemahaman arsiparis terhadap peraturan baru mengenai tugas kerja fungsional arsiparis terutama untuk arsiparis-arsiparis yang diangkat melalui jalur inpassing.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyimpanan arsip-arsip Vital keperdataan milik pribadi sehingga salah dalam penyimpanan dan perawatannya.

B.2 Solusi

1. Memberikan pengayaan dan pembinaan terhadap pengelolaan arsip dan cara mengidentifikasi arsip agar dapat ditentukan nilai guna nya sehingga dapat dipisahkan dan dibedakan penanganannya antara arsip biasa, arsip penting, dan arsip yang bernilai guna permanen. Menetapkan Pengelola arsip tiap unit kerja dan bidang-bidang pada OPD, sehingga pengelolaan arsip dapat berkesinambungan dan pengisian data e-arsip dapat berlanjut.
2. Berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan mengusulkan dalam RPJM untuk penyediaan/pembangunan Record Centre di setiap OPD. Di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon baru terdapat 9 OPD yang memiliki Record Centre. Di antaranya DPAD, BPKAD, Dinkes, Perkim, PTSP, BKPP, BPBD, Setwan, dan Kecamatan Citangkil. Untuk Kecamatan merupakan record centre bagi kelurahan-kelurahan, sehingga diupayakan agar Kecamatan dapat memiliki Record Centre tersebut.
3. Melakukan penelusuran arsip organisasi atau lembaga yang berskala nasional namun bertempat di Cilegon agar dapat memperoleh arsip naskah sumber sejarah
4. Berupaya memenuhi penyusunan Jadwal retensi Arsip 34 Urusan pemerintah daerah untuk dijadikan pedoman dalam penyusutan arsip.
5. Pembinaan secara berkesinambungan terhadap fungsional arsiparis dan mengusulkan kepada BKPP agar memfasilitasi Diklat terkait profesi pada jabatan fungsional arsiparis yang diangkat dari jalur inpassing.
6. Perlu adanya penyuluhan, sosialisasi dan gerakan masyarakat sadar arsip secara berkesinambungan agar masyarakat dapat menyelamatkan arsip-arsip Vital keperdataan milik pribadi.

3.2.18 Bidang Urusan Perpustakaan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pengembangan Perpustakaan Daerah

Tabel 3.2.18
Target dan Realisasi Program Pengembangan Perpustakaan Daerah Tahun
Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah						523,62	510,99	97,59%
	Persentase Pengunjung Perpustakaan terhadap Populasi yang harus dilayani	%	25,83	25,87	100,14%			
	Cakupan Anggota Perpustakaan	Orang	2.106	2.054	97,53%			
	Persentase Jumlah Perpustakaan Kelurahan yang terkelola terhadap Jumlah Perpustakaan Kelurahan	%	20,93	20,93	100,00%			
	Peningkatan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	%	95,91	100,30	104,58%			
Peningkatan Layanan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Daerah	kegiatan	1	1	100,00%	51,35	51,35	100,00%
Pembinaan Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah	Terciptanya pemahaman pengelolaan perpustakaan yang sesuai standar	Perpustakaan	100	100	100,00%	31,27	31,27	100,00%
Lomba Bercerita	Menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca melalui cerita budaya lokal daerah	Orang	90	90	100,00%	121,45	120,01	98,81%
Lomba Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan kelurahan dan sekolah sesuai standar baku	Perpustakaan	100	100	100,00%	56,40	56,40	100,00%
Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	Meningkatnya jumlah koleksi bahan pustaka	Eksemplar	1.000	1.316	131,60%	106,08	104,52	98,53%
Pengadaan Sarana Perpustakaan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perpustakaan	kegiatan	1	1	100,00%	123,12	113,49	92,18%
Pemeliharaan Koleksi Bahan Pustaka	Terpeliharanya dan terdatanya koleksi perpustakaan secara akurat	Klasifikasi	10	10	100,00%	33,96	33,96	100,00%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Untuk Program Peningkatan Layanan Perpustakaan ini memiliki 4 indikator kinerja program, dengan rincian capaian kinerja :

- Ketercapaian Indikator Kinerja Presentase Pengunjung Perpustakaan terhadap populasi yang harus dilayani mencapai 100,15% sedikit melebihi target. Dimana target Pengunjung pada Tahun ini adalah 77.500 pengunjung dibandingkan 300.000 populasi yang harus dilayani atau



setara 25,83%. Pada akhir tahun 2019 ini diperoleh 77.618 pengunjung atau setara 25,87% . Indikator ini didukung oleh kegiatan peningkatan Layanan Perpustakaan yang didalamnya terdapat pelaksanaan Perpustakaan Keliling. Dan juga didukung oleh kegiatan pengadaan sarana perpustakaan untuk melengkapi fasilitas pengunjung di ruang baca perpustakaan.

- Ketercapaian Indikator Kinerja Cakupan Anggota perpustakaan yang merupakan indikator local mencapai 97,53% juga seiring dengan peningkatan presentase Pengunjung Perpustakaan. Jumlah Anggota pada Tahun 2019 ini ditargetkan sebanyak 2.106 orang dan tercapai sebanyak 2.054 orang. Indikator ini juga didukung oleh Kegiatan Lomba Bercerita yang dapat menjaring siswa untuk menjadi anggota perpustakaan.
- Ketercapaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Perpustakaan Kelurahan yang terkelola terhadap Jumlah Perpustakaan Kelurahan mencapai 100%. Dengan target penambahan 1 Kelurahan yang dapat melayani Perpustakaannya untuk masyarakat. Indikator ini didukung dengan adanya kegiatan Pembinaan Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah serta Lomba Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah. Sehingga bertambah 1 Perpustakaan Kelurahan yang dapat dilayankan kepada masyarakat dan diikutsertakan untuk Lomba Perpustakaan Kelurahan tingkat Provinsi di Tahun 2019 ini. Sampai dengan tahun ini sudah terdapat 9 Kelurahan yang melayani Perpustakaannya Yaitu :
 1. Perpustakaan Kelurahan Bendungan,
 2. Perpustakaan Kelurahan Samangraya,
 3. Perpustakaan Kelurahan Panggungrawi,
 4. Perpustakaan Kelurahan Ciwedus,
 5. Perpustakaan kelurahan Kebonsari,
 6. Perpustakaan Kelurahan Cibeber,
 7. Perpustakaan kelurahan Deringo,
 8. Perpustakaan Kelurahan Purwakarta,
 9. Perpustakaan Kelurahan Banjarnegara.
- Ketercapaian Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka mencapai 104,59% melebihi dari target yang ditetapkan. Bahkan pada tahun 2019 ini sudah tercapai target lima tahunan yaitu 30.000 eksemplar di akhir periode renstra dan Tahun ini telah mencapai 30.090 eksemplar. Indikator ini didukung dengan kegiatan Pengadaan dan Pengolahan bahan Pustaka yang menambah jumlah koleksi Bahan Pustaka secara berkala setiap tahunnya guna memenuhi kebutuhan pemustaka. Selain itu juga



didukung oleh kegiatan Pemeliharaan Koleksi Bahan Pustaka dengan merawat bahan pustaka agar dapat terus dimanfaatkan oleh pemustaka.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon melalui Program Peningkatan Layanan Perpustakaan terus berupaya meningkatkan kinerjanya untuk melayani masyarakat dalam penyediaan informasi kepastakaan yang berkualitas. Upaya yang dilakukan ini tidak terlepas dari Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Cilegon yang turut mendorong peningkatan minat dan budaya bacamasyarakat Cilegon. Dukungan Pemerintah daerah ini terlihat salah satunya dengan pemberian anggaran tambahan di APBD-Perubahan untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Perpustakaan yang diberikan Kepada Pesantren di Kota Cilegon. Pada Tahun ini tahap awal terdapat 10 Pesantren yang mendapat bantuan Sarana berupa Rak beserta koleksi Buku untuk Perpustakaan Pesantren. Dari Pemberian Sarana kepada Perpustakaan Pesantren ini terlihat keseriusan Pemerintah daerah untuk turut memajukan Perpustakaan-Perpustakaan sebagai Kepanjangangan Tangan Perpustakaan Daerah agar dapat menyediakan informasi kepastakaan kepada seluruh elemen masyarakat.

Berkat Dukungan dari Walikota Cilegon, Penyediaan informasi melalui Perpustakaan Digital telah disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah di Area Alun-alun Kota Cilegon, guna menyediakan informasi secara digital kepada masyarakat yang tidak memiliki sarana untuk mengaksesnya. Pengelolaan Perpustakaan Digital di Alun-alun DPAD bekerja sama dengan Dinas Pemukiman dan Tata Ruang dalam hal penyediaan ruangan dan bekerjasama dengan Dinas Kominfo dalam penyediaan fasilitas internet.

Dengan adanya Dukungan Pemerintah daerah tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon pada Tahun 2019 pada Program Peingkatan Layanan Perpustakaan ini memiliki Anggaran reguler sebesar **Rp.473.618.000** dengan Anggaran tambahan pada APBD-Perubahan Rp. 50.000.000,- sehingga menjadi **Rp. 523.618.000,-**

Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan Kegiatan :

- Peningkatan Layanan Perpustakaan dengan ketercapaian kinerja dan anggaran 100% untuk peningatan kapasitas SDM Pengelola Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah yang memberikan Layanan Informasi Kepustakaan di Kelurahan dan Sekolah serta mengelola Perpustakaan dan Sekolah. Dengan memberikan pengayaan materi tentang Penggunaan Program **Inlislite** yang diunakan dalam Pengoperasian Layanan Perpustakaan. Selain itu juga untuk mendukung perpustakaan keliling. Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Kota Cilegon hanya memiliki 3 Mobil Perpustakaan keliling yang digunakan untuk melayani permintaan Kunjungan oleh stakeholder dan masyarakat. Untuk satu mobil

Perpustakaan Keliling diperlukan 1 Supir dan 1 Operator Layanan yang juga masih kesulitan untuk dipenuhi karena keterbatasan SDM. Sedangkan Lokasi-lokasi utama yang sudah dijadwalkan rutin untuk dikunjungi adalah Lapas kelas IIc Kota Cilegon pada Setiap hari Senin dan Kamis yang sudah tercantum dalam MoU. Lokasi Krakatau Junction Setiap hari Minggu. Sekolah SD dan SMP yang dijadwalkan setiap hari, serta permintaan dari mahasiswa KKM yang ada di Lingkungan Kota Cilegon. Selain itu juga untuk membuka layanan pada acara-acara tertentu sesuai permintaan OPD.

- Pembinaan Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah dengan ketercapaian kinerja dan anggaran 100% . Kegiatan ini dengan membina 43 Perpustakaan Kelurahan dan 57 Perpustakaan Sekolah mengenai cara Pengelolaan Perpustakaan yang meliputi pengolahan bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan dengan tujuan agar perpustakaan Kelurahan dan Sekolah ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan siswa.
- Lomba bercerita dengan ketercapaian kinerja 100% dan anggaran 98.81%. Kegiatan ini dengan mengadakan Lomba bercerita bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs, Guru PAUD sebanyak 90 peserta untuk mempersiapkan peserta lomba pada Tingkat Provinsi dan Nasional disamping tujuan utamanya untuk menggali potensi siswa dalam mengembangkan bakatnya yang diasah melalui membaca. Selain itu untuk memperkenalkan budaya dan cerita Lokal kepada siswa agar menambah kecintaannya pada budaya local.
- Lomba Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah dengan ketercapaian kinerja dan anggaran 100%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan Peserta lomba Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah pada Tingkat Provinsi dan Nasional. Dan untuk menggiatkan Perpustakaan-perpustakaan di wilayah Kelurahan sebagai kepanjangan tangan Perpustakaan Daerah. Pada tahun 2019 ini Perpustakaan kelurahan Banjarnegara menjadi Juara I tingkat Kota Cilegon yang kemudian dipersiapkan untuk mewakili Cilegon pada Lomba Perpustakaan Kelurahan Tingkat Provinsi Banten di tahun 2020 nanti. Sedangkan Perpustakaan Kelurahan yang mengikuti Lomba Perpustakaan Tingkat Provinsi di Tahun 2019 ini adalah Perpustakaan kelurahan Bendungan dan meraih Juara ke-3 Tingkat Provinsi Banten.
- Pengadaan dan Pengolahan bahan pustaka dengan ketercapaian kinerja 131,60% dan Anggaran 98,53%. . Dengan target pembelian buku 1000 eksemplar dan dapat terbeli 1.316 eksemplar. Pada kegiatan ini kinerja dapat dicapaimelibihi target karena buku yang direncanakan untuk dibeli tidak tersedia di penerbit sehingga DPAD mengganti dengan buku lain

yang serupa namun harganya lebih murah. Selain itu ketidaktersediaan Buku disiasati dengan membeli buku dalam bentuk digital .

- Pengadaan Sarana Perpustakaan dengan ketercapaian kinerja 100% dan anggaran 92,18%. Kegiatan ini berupa pembelian sarana perpustakaan untuk perpustakaan daerah yaitu monitor pengunjung yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah pengunjung secara otomatis. Serta pembelian sarana perpustakaan berupa Rak buku dan Bahan Pustaka yang diberikan kepada 10 Pesantren di Wilayah kota Cilegon, Adapun Pesantren yang memperoleh bantuan Sarana tersebut adalah
 1. Ponpes Al Munawaroh Gerem,
 2. Ponpes Bani Shaleh An Nawawi Puwakarta,
 3. Ponpes Banu Al Qomar Purwakarta,
 4. Ponpes Al-Quran Al-Istiqomah Ciwandan,
 5. Ponpes Darul Falah Cilegon,
 6. Ponpes Nurul A'la Jombang,
 7. Ponpes Darul Ihsan Jombang,
 8. Ponpes Al Khairiyah Citangkil,
 9. Ponpes Bani Syafii Cibeber, dan
 10. Ponpes Al-Insan Cibeber.
- Pemeliharaan Koleksi bahan pustaka dengan ketercapaian kinerja dan anggaran 100%. Kegiatan ini berupa pemeliharaan dan penghitungan Koleksi bahan Pustaka serta memperbaiki Bahan pustaka yang rusak dan mendata bahan pustaka yang hilang akibat dipinjam oleh pemustaka. Pada tahun 2019 ini dari data Stock opname terdapat 29.913 eksemplar buku yang di stock opname, dan 29.741 tercatat tersedia. Sedangkan 84 eksemplar buku tercatat dipinjam dan belum kembali, serta 172 eksemplar buku tercatat dalam kondisi rusak.

Secara Keseluruhan Penyerapan anggaran untuk Program Peingkatan Layanan Perpustakaan Sangat baik dengan Anggaran sebesar **Rp. 523.618.000 dan Realisasi Rp. 510.989.150,-** sehingga ketercapaian program sebesar **97,59%**. Namun demikian, meskipun ketercapaian kinerja program dan anggaran dari Program Peningkatan Layanan Perpustakaan ini sudah baik , masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan minat dan budaya baca masyarakat serta beberapa kendala dalam pengembangan perpustakaan-perpustakaan serta komunitas-komunitas literasi yang belum dapat terlayani dan terbina oleh DPAD. Untuk itu DPAD akan terus berupaya meningkatkan kinerja di tahun mendatang dalam penyediaan informasi kepustakaan yang berkualitas di wilayah Kota Cilegon.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**B.1 Permasalahan**

1. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat pemustaka karena gedung perpustakaan yang belum representative dengan ruangan baca perpustakaan yang masih kurang luas dan kurang nyaman serta sarana pendukung dalam pelayanan perpustakaan.
2. Perlunya penyusunan regulasi bidang perpustakaan yang mampu memberikan pedoman dan perlindungan serta arah kebijakan terhadap pelayanan perpustakaan kepada masyarakat melalui pelayanan perpustakaan kelurahan dan pelayanan perpustakaan keliling.
3. Masih terbatasnya jumlah mobil perpustakaan keliling dan SDM yang mengoperasikan perpustakaan keliling. Perpustakaan belum menjadi prioritas untuk kelurahan sehingga belum dikelola dengan baik, belum terpenuhi sarana dan prasarana, dan belum terdapat petugas khusus yang mengelola perpustakaan. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan lomba perpustakaan kelurahan dan sekolah.
4. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perpustakaan yang sesuai standar, dan petugas khusus yang mengelola perpustakaan.
5. Belum optimalnya pencatatan keluar masuk buku pustaka.

B.2 Solusi

1. Mengusulkan pembangunan gedung perpustakaan dan menyediakan sarana yang tidak memerlukan ruang yang luas. Untuk pembangunan gedung perpustakaan sendiri sudah direncanakan pada tahun 2021, sedangkan untuk DED gedung perpustakaan pada Tahun 2020 ini sudah masuk dalam anggaran Dinas Pekerjaan Umum dengan Lokasi di Wilayah Tanah Bengkok Kelurahan Masigit dengan luas sekitar 3000 m², namun digunakan bersama untuk gedung kantor, gedung perpustakaan dan gedung arsip.
2. Merencanakan Pembuatan Perda Perpustakaan yang akan diusulkan pada APBD-perubahan Tahun 2020. Sedangkan untuk Naskah Akademisnya pada tahun 2019 ini sudah disusun oleh Bagian Hukum. DPAD sendiri sudah menyusun Peraturan Walikota di Tahun 2019 namun belum dapat melingkupi keseluruhan kegiatan pengelolaan perpustakaan.
3. Mengutamakan untuk mengakomodir permohonan kunjungan perpustakaan, dan menjadwalkan tempat-tempat tertentu untuk dikunjungi. Serta akan mengusulkan pada anggaran tahun berikutnya Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling 1 Mobil untuk 1 Wilayah Kecamatan, agar dapat melayani permintaan Mobil perpustakaan untuk sekolah-sekolah sesuai wilayah kecamatannya dalam satu waktu yang bersamaan.
4. Memberikan pembinaan pengelolaan perpustakaan secara berkesinambungan dan meminta agar adanya tenaga pengelola perpustakaan. Dan akan mengusulkan melalui dana DPW Kel agar dianggarkan untuk pengadaan sarana perpustakaan pada tiap Kelurahan.
5. Melakukan koordinasi dengan bagian asset agar dapat melakukan penghapusan data Asset Buku yang sudah hilang. Selain itu Melakukan jemput bola agar bahan pustaka dapat kembali serta mengatur suhu serta kelembaban udara untuk menghindari kerusakan bahan pustaka dengan mengusulkan adanya fumigasi terhadap bahan pustaka agar tidak rusak karena faktor alam. Sedangkan agar dapat memberikan bantuan kepada komunitas literasi akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak aset dan inspektorat agar terdapat kejelasan untuk pemberian bantuan kepada komunitas literasi. Dengan salah satu cara yang akan ditempuh berupa silang layan.

3.3 URUSAN PILIHAN

3.3.1 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pengembangan Perikanan

Tabel 3.3.1
Target dan Realisasi Program Pengembangan Perikanan Tahun 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengembangan Perikanan						744,09	699,28	93,98%
	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	378,60	237,40	62,70%			
	Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar	Ton	286,27	219,00	76,50%			
Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap	Terlaksananya Bintek Manajemen Kelompok Nelayan	kelompok	5	5	100,00%	487,81	451,13	92,48%
	Terlaksananya Temu Teknis Nelayan	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Terlaksananya Pelatihan Keselamatan dasar	Orang	25	25	100,00%			
	Terlaksananya Pelatihan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Orang	25	25	100,00%			
	Terlaksananya Pelatihan Perawatan/Perbaikan Perahu Fiber	Kelompok	5	5	100,00%			
	Terlaksananya Monitoring dan Perbaikan Spot Ikan	Tahun	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Perikanan Tangkap	Tahun	1	1	100,00%			
	Tersedianya Sarana dan Prasarana TPI	Tahun	1	1	100,00%			
	Tersedianya Peralatan Selam	Paket	2	2	100,00%			
Pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya	Terselenggaranya Pelatihan Pengolahan Perikanan	orang	25	25	100,00%	256,28	248,15	96,83%
	Terselenggaranya kegiatan Penumbuh Kembangan Kelompok	Kelompok	3	3	100,00%			
	Terselenggaranya Temu Teknis Budidaya	Orang	60	60	100,00%			
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Paket	2	2	100,00%			
	Tersedianya Data Statistik Perikanan	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Uji Mutu Hasil Perikanan	Sampel	60	60	100,00%			
	Terlaksananya Pameran dan Promosi Perikanan	Kegiatan	1	1	100,00%			

Terdapat 2 (dua) indikator untuk melaksanakan program Pengembangan Perikanan. Adapun capaian kinerja pada indikator tersebut diatas sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah produksi perikanan tangkap. Indikator ini untuk menggambarkan jumlah produksi perikanan tangkap selama satu tahun. Pengukurannya adalah dengan cara pendataan statistik secara berkala setiap bulan maka diperoleh produksi perikanan tangkap sebesar 237,4 ton pada tahun 2019. Target produksi perikanan tangkap sebagaimana RPJMD adalah sebesar 393,1 ton. Maka capaian kinerja tahun 2019 hanya sebesar 60% dari target yang telah ditetapkan. Sebenarnya potensi produksi perikanan tangkap di perairan Kota Cilegon masih terbilang tinggi, karena Kota Cilegon memiliki sumber daya pesisir berupa pulau-pulau kecil yaitu : Pulau Merak Besar, Pulau Merak Kecil, Pulau Tempurung, Pulau Ular dan Pulau Florida. Kemudahan akses dari pantai ke jalan nasional pun seharusnya menjadi suatu keuntungan bagi nelayan. Nelayan di kota Cilegon saat ini merupakan nelayan kecil hingga kini berjumlah 608 orang yang mana jumlah nelayan terbesar sekitar 256 nelayan berada di Kecamatan Pulomerak. Namun peluang itu tidak akan bisa ditangkap apabila beberapa permasalahan yang dihadapi oleh nelayan sebagai pelaku usaha perikanan tangkap belum diselesaikan oleh pemerintah.
2. Target produksi perikanan budidaya air tawar tahun ini hanya mencapai 219 ton dari yang ditetapkan sebesar 286,27 ton, artinya capaian kinerja sepanjang tahun 2019 adalah 76,5%. Pada sektor perikanan budidaya sampai dengan saat ini permintaan terutama pada komoditas ikan lele selain ikan gurame, nila dan bawal belum dapat terpenuhi sehingga masih mengambil dari daerah lain. Peluang tersebut tidak akan pernah terpenuhi jika kendala dan permasalahan pada sektor ini belum ada campur tangan dari pemerintah.

Secara keseluruhan serapan anggaran pada program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah cukup baik dengan nilai 96,83% dan Perikanan Tangkap sebesar 92,48%.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Beberapa permasalahan teknis perikanan tangkap adalah :
 - a) Ruang pada daerah pesisir pantai di Kota Cilegon merupakan kawasan perindustrian, sehingga nelayan memiliki akses yang sangat terbatas untuk melaut dengan jangkauan hanya 2-4 mil menggunakan perahu < 5 GT.
 - b) Belum mempunyai tempat labuh dermaga nelayan beserta fasilitas pokok dan fasilitas penunjangnya sehingga pemasaran hasil tangkapan ikan menyebar dan harga ikan dari nelayan menjadi rendah karena dimonopoli oleh pengumpul setempat

- c) Rendahnya pengetahuan nelayan terhadap teknologi perikanan termasuk alat tangkap ikan
- 2. Beberapa permasalahan perikanan budidaya air tawar adalah :
 - a) Harga pakan yang belum stabil dan cenderung tinggi menyebabkan biaya produksi tinggi, hal ini mempengaruhi harga jual ikan menjadi kalah bersaing dengan daerah lain.
 - b) Ketersediaan lahan budidaya beserta kualitas air yang baik masih terbatas
 - c) Teknik budidaya masih rendah
 - d) Adanya penyakit dan hama
 - e) Keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha budidaya

B.2 Solusi

- 1. Beberapa solusi perikanan tangkap adalah :
 - a) Penyempurnaan Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur agar nelayan Cilegon masih dapat mengakses laut pada sebagian pesisir pantainya
 - b) Pemerintah segera membangun tempat pelabuhan perikanan beserta fasilitas pokok dan fasilitas pendukungnya termasuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar nelayan memiliki tempat pemasaran ikan yang layak, kemudian memasukkan pelabuhan perikanan tersebut ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. Menyediakan system informasi dan data statistic hasil perikanan tangkap beserta informasi harga pasar ikan melalui aplikasi (*online*) bertujuan untuk melindungi nelayan terhadap harga pasar
 - c) Penguatan fungsi penyuluh untuk nelayan guna penguatan lembaga dan manajemen termasuk asuransi, informasi pentingnya kawasan perlindungan dan biodata yang dilindungi, pelatihan pengelolaan alat tangkap terbarukan dan ramah lingkungan
- 2. Beberapa solusi perikanan budidaya air tawar adalah :
 - a) Pelatihan pembuatan alternative pakan ikan
 - b) Pengembangan teknologi budidaya dan penambahan lahan budidaya untuk mengatasi keterbatasan lahan, peningkatan akses mendapatkan pasokan air
 - c) Penyuluhan dan pelatihan terkait budidaya dengan cara yang baik dan benar, peningkatan kualitas jenis kolam, bantuan sarana dan prasarana budidaya, membangun sentral budidaya sebagai kawasan budidaya terpadu
 - d) Pelatihan pengendalian hama dan penyakit serta manajemen kualitas

3.3.2 Bidang Urusan Pariwisata

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 3.3.2a

Target dan Realisasi Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						2.368,61	2.246,29	94,84%
	Capaian pengembangan destinasi wisata	%	40,00	60,00	150,00%			
	Capaian pembinaan usaha pariwisata	%	57,00	57,00	100,00%			
	capaian pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif	%	42,00	42,00	100,00%			
	peningkatan jumlah kunjungan wisnu dan wisman	%	15,00	20,00	133,33%			
Cilegon Etnik Carnival	Terlaksananya Event Cilegon Etnik Carnival	Event	2	2	100,00%	662,60	603,48	91,08%
Pembinaan Kepariwisataa Daerah	Terlaksananya kegiatan Pembinaan kepariwisataa daerah	Kegiatan	3	3	100,00%	154,29	140,32	90,95%
Promosi Seni Budaya dan Pariwisata Kota Cilegon	Terlaksananya kegiatan promosi seni budaya dan pariwisata kota cilegon	Event	4	4	100,00%	250,22	227,12	90,77%
Pembinaan Paduan Suara Kota Cilegon dan Audisi Gita Bahana Nusantara	Terlaksananya Kelompok Padus GSCM ;	Kelompok ; Bulan	1; 12	1 ; 12	100,00%	270,24	268,18	99,24%
Pembinaan Marching Band Kota Cilegon	Terlaksananya Pembinaan Marching Band di kota cilegon	Orang ; Kelompok	75 ; 1	75 ; 1	100,00%	810,98	790,51	97,48%
Saka Wisata Kota Cilegon	Terlaksananya Kegiatan Saka Pariwisata	Kegiatan	2	2	100,00%	84,20	82,19	97,61%
Pembinaan Duta Wisata dan Budaya	Terlaksananya Pembinaan Duta Wisata dan Budaya	Kegiatan	1	1	100,00%	136,09	134,50	98,83%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Pada Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon dapat disampaikan capaian kinerja sebagaimana tersebut dibawahini:

Capaian pengembangan destinasi wisata pada tahun 2019telah sesuai dengan target yang di rencanakan sebesar 40%, adapun detail capaian pengemabang destinasi wisata adalah:

- Tahun 2017 kegiatan yang laksanakan yaitu Sosialisasi Kampung Wisata Cikera
- Tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan yaitu Revitalisasi Situ Rawa Arum



- Tahun 2019 Terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Kota Cilegon.

Berdasarkan Data tersebut diatas, diperoleh hitungan persentase capaian Pengembangan Destinasi yaitu 3 kegiatan dari 5 target kegiatan di kali 100 sama dengan 60%. Capaian Tahun 2019 mencapai 66% telah melebihi target yang telah di tentukan.

Capaian Pembinaan Usaha Pariwisata pada tahun 2019 telah sesuai dengan target yang direncanakan yaitu sebesar 57%. Adapun detail capaian pembinaan usaha pariwisata adalah:

Tahun 2017 Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembinaan usaha travel dan pembinaan usaha pramuwisata.

- Tahun 2018 Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembinaan usaha wisata tirta.
- Tahun 2019 Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembinaan usaha hotel.

Berdasarkan data tersebut diatas diperoleh hitungan persentase capaian pembinaan usaha pariwisata yaitu 4 jenis usaha dibagi 7 target usaha dikali 100% sama dengan 57%. Capaian tahun 2019 telah sesuai dengan target yang telah di tentukan.

Capaian pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif pada tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 42%. Adapun detail capaian pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif adalah :

- Tahun 2017 kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembuatan film pendek yang berjudul GOLOK serta lomba pembuatan film pendek.
- Tahun 2018 Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembinaan paduan suara kota Cilegon dan audisi gita bahana nusantara.
- Tahun 2019 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembinaan marching band dan pembinaan paduan suara kota Cilegon dan audisi gita bahan nusantara.

Berdasarkan data tersebut diatas diperoleh hitungan persentase capaian pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif yaitu 3 kegiatan di bagi 7 target kegiatan dikali 100% sama dengan 42%. Capaian tahun 2019 sebesar 42% telah sesuai dengan target yang di tentukan.

Dalam hal kunjungan wisatawan realisasi jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal/nusantara maupun wisatawan mancanegara telah melebihi target yang direncanakan yaitu sebesar 15% secara akumulatif dengan kenaikan pertahun sebesar 5%. Adapun detail peningkatan jumlah kunjungan wisata nusantara dan wisatawan mancanegara adalah:

- Tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan yaitu 643.968 orang

- Tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan yaitu 814.368 orang

Berdasarkan data tersebut diatas, diperoleh hitungan sebagai berikut yaitu jumlah kunjungan tahun 2019 sebanyak 814.368 dikurangi jumlah kunjungan wisatawan tahun 2018 sebanyak 643.968 sama dengan 170.400 orang.

Untuk diperoleh hitungan persentase jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yaitu 170.400 orang dibagi 814.368 orang dikali 100% sama dengan 20%. Capaian tahun 2019 sebesar 20% telah melebihi target yang ditentukan.

A.2 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

Tabel 3.3.2b

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)						2.421,17	2.206,69	91,14%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	97,50	100,00	102,56%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	97,50	79,00	81,03%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	97,50	80,00	82,05%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	97,50	92,62	94,99%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

Kota Cilegon belum menjadi daerah tujuan wisata dikarenakan tidak adanya destinasi/objek yang layak dan memadai, beberapa objek wisata dikota Cilegon memiliki potensi atau daya tarik wisata, namun potensi atau daya tarik tersebut belum tertata dan terkelola dengan baik dan optimal.

B.2 Solusi

Perlu adanya dukungan untuk menciptakan dan mewujudkan keberadaan destinasi wisata unggulan di kota Cilegon dimana salah satunya adalah situ rawa arum, situ rawa arum perlu untuk mendapatkan prioritas pembangunan di kota Cilegon. Perlu adanya upaya pemilihan/pembinaan duta wisata dan budaya dikarenakan ada keterkaitan dengan pembinaan generasi muda dan juga sebagai salah cara mempromosikan wisata di daerah. Serta diperlukan kegiatan perencanaan dan pengembangan destinasi wisata agar program – program yang telah direncanakan dalam rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

3.3.3 Bidang Urusan Pertanian

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pengembangan Pertanian

Tabel 3.3.3a

Target dan Realisasi Program Pengembangan Pertanian Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengembangan Pertanian						12.017,44	11.013,90	91,65%
	Proporsi peningkatan luasan penangkaran kacang tanah per tahun	%	20,00	-40,00	-200,00%			
	Proporsi peningkatan provitas jagung per tahun	%	1,00	-11,27	-1127,00%			
	Proporsi peningkatan provitas kacang tanah per tahun	%	0,50	-7,10	-1420,00%			
	Proporsi peningkatan produksi melon per tahun	%	10,00	133,90	1339,00%			
	Proporsi peningkatan produksi cabe per tahun	%	10,00	1,57	15,70%			
	Cakupan pembinaan pengolah hasil pertanian	%	20,00	-	0,00%			
Peningkatan Produksi Hortikultura	Terlaksananya Pengadaan Tanaman Perkebunan Damar Lahan KPT	batang	197	197	100,00%	1.042,19	1.026,23	98,47%
	Terlaksananya Demplot melon bagi penyuluh	Ha	2	2	100,00%			
	Terlaksananya demplot budidaya nanas madu lahan samandaran	Batang	1.000	1.000	100,00%			
	terlaksananya demplot budidaya buah naga lahan samandaran	Batang	500	500	100,00%			
	terlaksananya Sekolah Lapang (SL) peningkatan produksi melon bagi kelompok tani	Kelompok tani	8	-	0,00%			
	Terlaksananya magang budidaya melon	Petani/Orang	20	20	100,00%			
	Terlaksananya pengadaan bibit tanaman buah tahunan dan perkebunan	Batang	1.400	1.400	100,00%			
	Terlaksananya temu kegiatan peningkatan kualitas produksi buah melon	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Terlaksananya pengadaan bibit tanaman buah tahunan dan perkebunan (Kota Sehat)	Batang	460	460	100,00%			
	Penyusunan S.O.P Budidaya Melon	Kegiatan	1	1	100,00%			
Peningkatan produksi tanaman Pangan	Terlaksananya BinteK Penangkaran Kacang Tanah	Kegiatan	3	3	100,00%	509,00	459,76	90,32%
	Terlaksananya Gerakan Tanam Jagung	Kegiatan	1	1	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Terlaksananya Gerakan Tanam Padi	Kegiatan	3	3	100,00%			
	Terlaksananya Bintek jajar LegowoSuper pada Tanaman Padi	Kegiatan	3	3	100,00%			
	Terlaksananya Temu Lapang Kaji Terap Tumpang sariKacang tanah dan Jagung	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya WorkshopPenetapan sasaran Indikatif Tanaman Pangan	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Demplot Kacang tanah	Ha	15	15	100,00%			
	Terlaksananya Demplot Padi Jarwo	Ha	25	25	100,00%			
	Terlaksananya Kaji Terap Tumpang sari Kacang Tanah dan jagung	Ha	0,5	1	200,00%			
Peningkatan sarana prasarana dan perlindungan tanaman	Terlaksananya Penyediaan Pestisida untuk Perlindungan Tanaman	paket	1	1	100,00%	466,24	438,75	94,10%
	Terlaksananya penyediaan ZPT dan PPC untuk perkembangan tanaman	Paket	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	Kelompok tani	10	10	100,00%			
	Terlaksananya gerakan pengendalian hama dan penyakit	Ha	250	250	100,00%			
	Terlaksananya Sekolah Lapang Iklim (SLI)	Kegiatan	4	4	100,00%			
	Terlaksananya bintek perbengkelan alat dan mesin pertanian	Orang	20	20	100,00%			
	Tersedianya sistem informasi sarana dan prasarana pertanian	Paket	1	1	100,00%			
	Tersedianya sarana dan prasarana untuk brigade proteksi tanaman	Unit pompa air	2	2	100,00%			
	Tersedianya tempat penyimpanan sarana dan prasarana untuk brigade proteksi tanaman	Buah kontainer box	4	4	100,00%			
Kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu (prioritas daerah)	Tersedianya Pengadaan Tanah Kawasan Pertanian Terpadu (KPT)	Paket	1	1	100,00%	10.000,00	9.089,16	90,89%
	Tersedianya serifikasi tanah kawasan pertanian terpadu	Paket	1	1	100,00%			
	Terlaksananya pematangan lahan kawsan pertanian terpadu	Paket	1	1	100,00%			
	Terlaksananya pematokan lahan	Keg	1	1	100,00%			
Program Pengembangan Pertanian (UPTD)						211,95	196,29	92,61%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Kawasan Pertanian Terpadu								
Kegiatan UPT Kawasan Pertanian Terpadu	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluh pertanian	tahun	1	1	92,79%	211,95	196,29	92,61%

Untuk menjalankan Program Pengembangan Pertanian tahun 2019 Pemerintah Kota Cilegon menetapkan alat ukur kinerja dalam 6 (enam) indikator yang telah ditetapkan didalam RPJMD, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Proporsi peningkatan luasan penangkaran kacang tanah per tahun. Indikator ini menggambarkan peningkatan luasan penangkaran kacang tanah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kacang tanah merupakan jenis tanaman budidaya local yang perlu mendapat perhatian pemerintah mengingat jenis tanaman ini sangat cocok dikembangkan di Kota Cilegon, sehingga berpotensi sebagai sumber pangan local dalam hal memenuhi ketersediaan dan kebutuhan energy dan protein untuk masyarakat. Pada tahun 2019 luasan penangkaran kacang tanah hanya sebesar 15 Ha dibandingkan capaian pada tahun 2018 adalah 25 Ha, ini artinya luas penangkaran pada tahun 2019 mengalami penurunan target sebesar -40%. Pengukuran kinerja ini adalah dengan cara jumlah luasan penangkaran pada tahun n dikurangi tahun $(n-1)$ dibagi dengan luasan penangkaran tahun $(n-1)$ dikali 100%. Penurunan proporsi peningkatan luasan penangkaran kacang tanah pada tahun 2019 disebabkan karena kesulitan petani dalam pemasaran benih kacang tanah
2. Proporsi peningkatan produktivitas jagung per tahun. Indikator ini menggambarkan peningkatan produktivitas jagung dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jagung merupakan jenis tanaman budaya local yang sudah menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai potensi sumber pangan penghasil energy untuk masyarakat. Pada tahun 2018 produktivitas jagung sebesar 35,65 Ku/Ha sementara pada tahun 2019 sebesar 31,63 Ku/Ha, artinya produktivitas jagung pada tahun 2019 mengalami penurunan target sebesar -11,27 %. Target peningkatan proposi produktivitas jagung sebagaimana RPJMD adalah sebesar 1 % per tahun. Pengukurannya adalah dengan cara jumlah produktivitas jagung pada tahun n dikurangi tahun $(n-1)$ dibagi dengan produktivitas jagung tahun $(n-1)$ dikali 100%. Penurunan produktivitas tahun ini terjadi karena berbagai hal seperti luas panen lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, petani memanen jagung pada usia jagung masih muda dan adanya keterlambatan penanaman yang disebabkan karena cuaca yang tidak mendukung sehingga baru mulai

penanaman di akhir tahun 2019 maka sebagian tanaman baru akan dipanen pada tahun 2020, adanya penggunaan pupuk yang tidak sesuai anjuran, serta adanya penyakit jamur.

3. Proporsi peningkatan produktivitas kacang tanah per tahun. Indikator ini menggambarkan peningkatan produktivitas kacang tanah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengukurannya adalah dengan cara jumlah produktivitas kacang tanah pada tahun n dikurangi tahun $(n-1)$ dibagi dengan produktivitas kacang tanah tahun $(n-1)$ dikali 100%. Pada tahun 2018 produktivitas kacang tanah sebesar 13,52 Ku/Ha dan tahun 2019 sebesar 12,68 Ku/Ha, artinya produktivitas kacang tanah pada tahun 2019 mengalami penurunan target sebesar -7,1%. Target peningkatan proposi produktivitas kacang tanah sebagaimana RPJMD adalah sebesar 0,5 % per tahun. Mengalami penurunan produktivitas dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan karena adanya penurunan luas panen dibandingkan tahun sebelumnya serta masih adanya penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan anjuran, maka untuk dapat meningkatkan capaian di tahun mendatang agar sesuai target RPJMD perlu dilakukan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada petani agar menggunakan pupuk berimbang, pembinaan, serta bantuan sarana produksi.
4. Proporsi peningkatan produksi melon per tahun. Indikator ini menggambarkan peningkatan produksi melon dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Melon merupakan jenis tanaman budidaya local yang perlu mendapat perhatian pemerintah mengingat jenis tanaman ini sangat cocok dikembangkan di Kota Cilegon, sehingga berpotensi sebagai sumber pangan local untuk masyarakat. Pada tahun 2018 produksi melon sebesar 76,9 ton dan tahun 2019 sebelumnya 179,87 ton buah segar, artinya terjadi peningkatan produksi melon pada tahun 2019 sebesar 133,9 %. Pengukurannya adalah dengan cara jumlah produksi melon pada tahun n dikurangi tahun $(n-1)$ dibagi dengan produksi melon tahun $(n-1)$ dikali 100%. Target peningkatan proposi produksi melon sebagaimana RPJMD adalah sebesar 10 % per tahun. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti hama dan penyakit, pemasaran masih terbatas untuk varietas tertentu. Maka untuk dapat meningkatkan capaian di tahun mendatang akan dilakukan upaya pembinaan, bantuan SL PHT, bantuan sarana produksi, peningkatan kapasitas SDM, temu usaha dan promosi.
5. Proporsi peningkatan produksi cabe per tahun. Indikator ini menggambarkan peningkatan produksi cabe dibandingkan tahun sebelumnya. Pengukurannya adalah dengan cara jumlah produksi cabe pada tahun n dikurangi tahun $(n-1)$ dibagi dengan produksi cabe tahun $(n-1)$ dikali 100%. Pada tahun 2018 produksi cabe sebesar 3953,59 kw dan tahun 2019 sebesar 4015,7 kw buah

segar, artinya bahwa terdapat peningkatan produksi pada tahun 2019 sebesar 1,57 %. Namun target ini lebih kecil dari yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar kenaikan 10% per/tahun. Namun demikian masih terdapat kendala seperti hama dan penyakit. Maka untuk dapat meningkatkan capaian di tahun mendatang perlu dilakukan upaya pembinaan, bantuan SL PHT, bantuan sarana produksi, peningkatan kapasitas SDM, temu usaha dan promosi.

6. Cakupan pembinaan pengolah hasil pertanian. Indikator ini menggambarkan capaian cakupan pembinaan pengolahan hasil pertanian pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh kelompok pengolahan hasil pertanian. Pengukurannya adalah dengan membagi realisasi jumlah kelompok pengolah hasil pertanian yang dibina dengan total jumlah seluruh kelompok pengolah hasil pertanian dikali 100%. Pada tahun 2019 capaian cakupan pembinaan pengolah hasil pertanian sebesar (-)%. Target sebagaimana RPJMD adalah sebesar 20 % per tahun. Program ini tidak berjalan pada tahun 2019 ini karena kegiatan pembinaan pengolah hasil pertanian sudah dilaksanakan melekat pada masing-masing seksi.

Secara keseluruhan serapan anggaran pada program Pengembangan Pertanian adalah cukup baik dengan nilai 91,63%.

A.2 Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Tabel 3.3.3b

Target dan Realisasi Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan						1.533,32	1.498,69	97,74%
	Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	%	0,50	0,84	168,00%			
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan	%	14,00	15,77	112,64%			
	Cakupan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	6,00	16,99	283,17%			
pengembangan dan pengelolaan pembibitan dan produksi peternakan	Terlaksananya Demplot Peternakan	ekor kelinci	30	30	100,00%	678,95	667,91	98,37%
	Terlaksananya Pelatihan Teknis Peternakan	Orang	20	20	100,00%			
	- Tersedianya Bangunan Kandang Kelinci	Unit	1	1	100,00%			
	- Tersedianya Mesin Perah	Unit	1	1	100,00%			
	Terlaksananya kegiatan pemetaan peternakan	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya perawatan Pagar Demplot Peternakan	meter	150	150	100,00%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB)	ekor	17	17	100,00%			
	Sosialisasi asuransi ternak	orang	20	20	100,00%			
Pengendalian Penyakit Hewan Zoonosis	Terselenggaranya vaksinasi rabies	ekor	300	300	100,00%	520,53	500,57	96,17%
	Terselenggaranya vaksinasi ND	ekor	30.000	30.000	100,00%			
	Tersedianya sarana dan prasarana Puskesmas	paket	1	1	100,00%			
	Tersedianya obat-obatan hewan	paket	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Surveilans Penyakit zoonosis	paket	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Surveilans Penyakit Bruselosis	paket	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Surveilans Hewan Qurban	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya sosialisasi keswan	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Terlaksananya Sosialisasi/ Publikasi melalui media masa	Paket	1	1	100,00%			
Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan	Terlaksananya sosialisasi kesmavet	orang	30	30	100,00%	333,84	330,21	98,91%
	Terlaksananya workshop/ pelatihan penyembelihan	orang	40	40	100,00%			
	Terlaksananya workshop/ pelatihan penyembelihan	orang	60	60	100,00%			
	Pemantauan Bahan Pangan Asal Hewan	dokumen	1	1	100,00%			
	Pengambilan dan Pengujian Bahan Pangan Asal Hewan	sampel	80	80	100,00%			
Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan						553,91	540,37	97,56%
Peningkatan Kualitas pelayanan RPH, pasar hewan dan puskesmas	tersedianya feasibility study pengembangan pasar hewan, DED taman pekarangan dan parkir rumah potong hewan	Dokumen	2	2	100,00%	553,91	540,37	97,56%
	Tersedianya instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan Pagar RPH	paket	2	2	100,00%			
	Tersedianya DED los Pasar Hewan	Dokumen	1	1	100,00%			
	Peningkatan pelayanan untuk menghasilkan produk daging RPH yang ASUH (aman sehat utuh halal)	tahun	1	1	100,00%			

Untuk menjalankan Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan sepanjang tahun 2019 Pemerintah Kota Cilegon menetapkan alat ukur kinerja dalam 3 (tiga) indikator yang telah ditetapkan didalam RPJMD, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia.

Indikator ini untuk menggambarkan seberapa besar peningkatan populasi ternak ruminansia di kota Cilegon. Pengukurannya adalah dengan cara populasi ternak ruminansia tahun n dikurangi populasi tahun (n-1) dibagi populasi tahun (n-1) dikali 100%.

Populasi ternak ruminansia Tahun 2019 sebesar 10.875 ekor sementara tahun 2018 sebesar 10.784 ekor maka diperoleh peningkatan populasi pada tahun 2019 sebesar 0,84 %. Target peningkatan populasi ternak ruminansia sebagaimana RPJMD adalah sebesar 0,5 % per tahun sehingga capaian kinerja tahun 2019 sebesar 168 %.

Hal ini dapat dicapai melalui beberapa upaya seperti sosialisasi introduksi reproduksi ternak, perlindungan betina produktif melalui program Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau (AUTSK), pendampingan dan penyuluhan usaha peternakan, penyebaran bibit hijauan pakan ternak yang berkualitas, peningkatan pengetahuan peternak kambing dan petugas penyuluhan ke Balai Pengembangan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden Purwokerto. Selain itu ditunjang pula oleh Pelayanan Kesehatan Hewan pada ternak ruminansia sebanyak 1,283 ekor sangat mendukung peningkatan populasi ternak ruminansia.

2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan.

Indikator ini untuk menggambarkan seberapa besar cakupan pelayanan kesehatan hewan terhadap populasi hewan keseluruhan di kota Cilegon. Pengukurannya dilakukan dengan cara membagi jumlah hewan yang terlayani dengan jumlah populasi hewan dikali 100%.

Jumlah pasien terlayani tahun 2019 sebanyak 53.914 ekor sementara populasi sebesar 341.711 ekor maka diperoleh cakupan pelayanan kesehatan hewan tahun 2019 sebesar 15,77 %. Target Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana RPJMD sebesar 14% maka pencapaian kinerja tahun 2019 sebesar 121,30 %.

Pencapaian ini dapat diperoleh melalui berbagai upaya seperti penyediaan obat-obatan hewan, penyediaan sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan, pelaksanaan vaksinasi rabies, vaksinasi ND (*Newcastle Disease*), pemeriksaan dan pengobatan helminthiasis (kecacingan), surveilans penyakit hewan menular startegis (PHMS), pemeriksaan kesehatan hewan kurban, pelayanan kesehatan hewan di puskesmas dan pelayanan kesehatan hewan secara aktif dengan mobil puskesmas keliling, sosialisasi kesehatan hewan dan media massa lokal.

3. Cakupan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Indikator ini untuk menggambarkan seberapa besar cakupan pelayanan kesehatan masyarakat kesehatan hewan terhadap pelaku usaha produk asal hewan keseluruhan di kota Cilegon. Pengukurannya dilakukan dengan cara membagi jumlah pelaku usaha yang terlayani dengan jumlah pelaku usaha produk asal hewan dikali 100%.

Jumlah pelaku usaha (kesmavet) terlayani tahun 2019 sebesar 211 dari 1242 pelaku usaha produk asal hewan maka diperoleh cakupan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner tahun 2019 sebesar 16,99 %. Target Cakupan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner menurut RPJMD sebesar 6% maka pencapaian kinerja tahun 2019 sebesar 339,8 %.

Pencapaian tahun 2019 ini dapat diperoleh melalui berbagai upaya seperti: pemantauan unit usaha produk asal hewan; Inspeksi mendadak (sidak) menjelang Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI); pengambilan dan pengujian sampel produk asal hewan; Sosialisasi higienis dan sanitasi kepada pedagang pasar; sosialisasi penyembelihan hewan kurban; Pemantauan Penyembelihan Hewan Qurban; Pelatihan Pengolahan Produk Asal Hewan berbahan susu dan daging; pendampingan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner; Publikasi melalui media masa lokal.

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator pada Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada serapan anggaran sebesar 97,74%.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Berdasarkan analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) pada tahun 2019 mengatakan produksi pangan local di Kota Cilegon hanya mampu memenuhi kebutuhan panga sebesar 12,9%, berarti sisanya sebesar 87,10% kebutuhan pangan penduduk di Kota Cilegon didatangkan dari luar daerah. Dalam upaya penyediaan bahan pangan local tersebut maka perlu pencapaian indicator peningkatan produksi termasuk sektor pertanian dan peternakan. Secara umum petani di Kota Cilegon merupakan petani kecil yang hanya mengolah/menggarap lahan < 2 Ha/orang. Perlu upaya pemerintah dalam hal perlindungan dan pemberdayaan petani. Berbagai permasalahan banyak dihadapi oleh para petani hingga saat ini yang menjadi halangan utama dalam peningkatan produksi maupun kesejahteraannya, yaitu adanya dorongan alih fungsi lahan melalui masuknya investasi di sector non pertanian sehingga kecenderungan makin berkurangnya luasan lahan pertanian terus terjadi, adanya keterbatasan sumber daya air, masih kurangnya pengetahuan teknis para petani terutama dalam penerapan pertanian yang berbasis teknologi serta masih terdapatnya kendala pada hama dan penyakit.
2. Pada program Pengembangan dan Kesehatan Hewan beberapa faktor yang menjadi kendala, yaitu makin berkurangnya luasan lahan pengembangan



peternakan akibat adanya alih fungsi lahan dan keterbatasan sumber daya alam (air), masih terbatasnya jumlah dan kapasitas penyuluh peternakan, terbatasnya bibit ternak/hewan unggul, masih terbatasnya prasarana peternakan. Khusus untuk sub sektor kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, kemungkinan masuknya penyakit hewan menular strategis (PHMS) masih sangat besar karena posisi kota Cilegon yang merupakan jalur lalu lintas antar Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian selama ini pemerintah Kota Cilegon masih mensubsidi kebutuhan dasar terhadap sarana prasarananya terutama pada pelayanan hewan-hewan peliharaan. Diharapkan pada masa yang akan datang sub sektor ini khusus pada pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dapat ditingkatkan pengelolannya secara mandiri, yaitu menjadi sebuah UPT.

B.2 Solusi

Pada program Pengembangan Pertanian dan Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk tetap dapat meningkatkan produksi dan tingkat kesejahteraan para petani yang secara langsung akan mempengaruhi juga tingkat produksi, maka upaya yang dilakukan melalui perlindungan dan pemberdayaan petani adalah berupa mempertegas pelaksanaan regulasi tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai UU 41 Tahun 2009 melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Revisi RTRW, sosialisasi pentingnya ketersediaan pangan berupa tanaman pangan lokal yang cocok ditanam pada kondisi geografis Kota Cilegon saat ini terutama tanaman yang bisa menghasilkan energi dan protein, pengadaan sarana produksi seperti pupuk benih, menggali potensi sumur air dalam untuk pengairan pertanian, peningkatan jumlah dan kapasitas penyuluh pertanian, pembimbingan dan pelatihan teknis/keterampilan peningkatan sistem manajemen, sosialisasi berbagai teknologi yang berkembang dalam budidaya usaha tani, penerapan teknologi pasca panen, sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya kelompok tani dan pembentukan badan hukum usaha (koperasi).

3.3.4 Bidang Urusan Perdagangan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pengendalian Perdagangan

Tabel 3.3.4 a

Target dan Realisasi Program Pengendalian Perdagangan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan						542,40	514,45	94,85%
	Persentase Penurunan Barang Tidak Layak Edar	%	33,33	40	120,12%			
	Tingkat pemantauan ketersediaan harga dan pasokan pangan	%	58,33	181	310,30%			
Opoerasional KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk)	Terlaksananya Pemantauan Pupuk Bersubsidi	Pemantauan	20	20	100,00%	48,06	41,94	87,26%
Operasional TPID (Tim Inflasi)	Terlaksananya Pengendalian Inflasi Daerah	Komoditas	20	20	100,00%	131,30	116,85	88,99%
Survey Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Survey Distribusi Perdagangan	Survey	20	20	100,00%	40,64	39,58	97,40%
Survey Pengawasan Distribusi Barang Berbahaya (B2)	Terlaksananya Pengawasan Distribusi bahan Berbahaya	Pengawasan	5	5	100,00%	43,00	43,00	100,00%
Stabilisasi Harga Barang Pokok	Pemantauan Harga Bahan Pokok	Pasar	3	3	100,00%	92,40	88,88	96,19%
	Terlaksananya Pengawasan Distribusi bahan Berbahaya	Pengawasan	5	5	100,00%			
Media Center Tera Menuju Pasar Tradisional Kota Cilegon Tertib Ukur	Terselenggaranya sidang tera dan pos ukur ulang timbang (pulangbang)	Pedagang	200	475	237,50%	87,00	86,65	99,60%
Promosi Perdagangan Dalam Negeri	Tersosialisasikannya Program Perdagangan dalam negeri hasil pembangunan Pemerintah Daerah	Event	1	1	100,00%	100,00	97,55	97,55%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program Pengendalian Dan Pengembangan Perdagangan adalah Program yang membidangi urusan pemerintah tentang perdagangan, dimana perdagangan ini untuk menggerakkan perekonomian daerah. Tujuan dari program ini adalah dalam rangka peningkatan sistem distribusi dan pengawasan peredaran barang/jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta penguatan sektor ekspor impor. Adapun sasarannya adalah meningkatnya sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan serta ekspor impor dan meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha.

Urusan perdagangan yang menangani pengendalian dan pengembangan program sebagai sasaran capaian program dengan target dan realisasi tahun 2019 sebagai berikut :

1) Persentase Penurunan Barang Tidak Layak Edar

Prosentasi penurunan barang yang tidak layak edar yang dicapai pada tahun 2019 adalah 40% dari target 33,33%. ini menunjukkan bahwa barang tidak layak edar di masyarakat menurun. Jika prosentase yang dicapai menunjukkan lebih kecil, berarti barang yang tidak layak edar di masyarakat lebih banyak. Dengan tercapainya persentase lebih besar, menunjukan bahwa pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan berhasil. Ini didukung dari survey dan pengawasan yang dilakukan secara kontinue yaitu sebanyak 134 kali pemantauan dan hasil pemantauan ditemukan sebanyak 5 barang yang tidak layak edar. Ini juga merupakan langkah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen/masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Tingkat pemantauan ketersediaan harga dan pasokan pangan

Banyaknya pantauan terkait ketersediaan harga dan pasokan pangan yang dilakukan di tahun 2019 sebanyak 21 Varian komoditi sedangkan banyaknya pantauan terkait ketersediaan harga dan pasokan pangan yang seharusnya dilakukan sebanyak 21 Varian Komoditi. Realisasi capaian ini sebesar 181% dikarenakan pelaksanaan survey komoditasi barang di pedagang meningkat. Kinerja yang di capai dari indikator ini sebesar 310,30% hal ini di sebabkan karena banyak nya varian yang disurvei sebanyak 38 varian. Definisi indikator ini adalah **“Banyaknya varian komoditi barang yang dipantau terkait ketersediaan harga & pasokan pangan yang dilakukan berbanding banyaknya varian komoditi barang pantauan yang telah ditetapkan terkait ketersediaan harga & pasokan pangan”**

Dasar untuk mengukur indikator program ini adalah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dimana PP tersebut terdapat 21 Varian Komoditi yang dipantau, angka varian tersebut dipakai sebagai pembilang banyaknya varian komoditi yang dilakukan pemantauan, sedangkan data yang dipakai sebagai penyebut didapat dari angka varian komoditi barang kebutuhan pokok yang terdapat di pasar yang seharusnya dipantau.

**TABEL JENIS KOMODITI DAN VARIAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN
NO.71 TAHUN 2015**

JENIS KOMODITI DAN VARIAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO.71 TAHUN 2015				KOMODITI DAN VARIAN YANG DISURVEY OLEH INDAG	
KOMODITI		VARIAN		YANG DISURVEY	
1	Beras	1	Premium	1	Premium
		2	Medium	2	Medium
		3	Termurah	3	Termurah
2	Gula Pasir Lokal	4	Gula Pasir Lokal	4	Gula Pasir Lokal
3	Minyak Goreng	5	Kemasan	5	Kemasan
		6	Tanpa Merk/Curah	6	Curah
4	Daging	7	Sapi Murni	7	Sapi Murni
		8	Ayam Broiler	8	Ayam Ras
				9	Ayam Kampung
5	Telur	9	Ayam Broiler	10	Ayam Ras
6	Kedelai	10	Ekspor	11	Impor
		11	Lokal	12	Lokal
7	Tepung Terigu	12	Tepung Terigu	13	Curah
				14	Kemasan
8	Cabe Merah	13	Keriting	15	Keriting
		14	Biasa	16	Besar/TW
				17	Cabe Hijau
9	Cabe Rawit	15	Hijau	18	Hijau
		16	Merah	19	Merah
10	Bawang	17	Merah	20	Merah
		18	Putih	21	Putih
				22	Kating
11	Ikan Segar	19	Tongkol/Tuna/Cakalang	23	Teri Asin Medan
		20	Bandeng	24	Bandeng
		21	Kembung	25	Kembung
				26	Mas
				27	Bawal
				28	Garam : Bata Beryodium
				29	Halus Beryodium
				30	Kacang Tanah
				31	Kacang Ijo
				32	Ubi Kayu
				33	Ubi Jalar
				34	Tomat
				35	Wortel
				36	Kentang
				37	Kol
				38	Jagung Pipil

Dari tabel program dan kegiatan diatas bahwa kegiatan terlaksana dengan sesuai apa yang telah direncanakan dengan rata-rata serapan anggaran sebesar 84,27%,

Disampaikan bahwa pada Kegiatan Operasional Komisi Pengawasan Pupuk (KP3) terdapat 5 Kios yang diawasi dari Target terdapat 3 Kios yang masih operasional. Penyebabnya adalah lahan-lahan pertanian yang sering digunakan untuk menyalurkan pupuk tersebut telah berkurang maka 2 Kios pupuk lainnya ditutup. Apabila 2 Kios tersebut tetap di buka maka akan terjadi kerugian karena pupuk yang ada di 2 Kios tersebut tidak dapat tersalurkan.

A.2 Program Pembinaan Dan Pengelolaan Pasar

Tabel 3.3.4 b

Target dan Realisasi Program Pembinaan Dan Pengelolaan Pasar Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pembinaan Dan Pengelolaan Pasar						8.433,79	6.936,81	82,25%
	Tingkat Kepuasan Pengunjung Pasar	Poin	> 5 %	12,50	250%			
	Realisasi pendapatan daerah dari pengelolaan pasar	%	> 5 %	57,87	1157%			
	Rasio jumlah pasar rakyat terhadap jumlah kebutuhan pasar rakyat di Cilegon	Poin	63,00	100,00	158,73%			
	Rasio jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar rakyat	%	75,00	62,50	83,33%			
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Terlaksananya Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cilegon	Kecamatan	8	8	100,00%	200,00	137,00	68,50%
Revitalisasi dan Penataan Pasar Rakyat (Prioritas Daerah)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Kecamatan Cilegon, Jombang, Cibeber, Citangkil, Grogol, Ciwandan dan Pulomerak	pasar	7	7	100,00%	5.062,10	4.975,56	98,29%
Intensifikasi Pendapatan Pasar	Meningkatnya Kesadaran Pedagang Terhadap Hak dan Kewajiban dalam Hal Angsuran dan Retribusi Pasar	pertemuan	3	3	100,00%	100,00	79,28	79,28%
Pengadaan Penunjang Kegiatan Pasar (DID)	Tersedianya excavator	unit	1	1	100,00%	1.750,00	1.690,03	96,57%
Peningkatan Pelayanan Kemetrolgion (DAK)	Tersedianya alat ukur	paket	1	1	100,00%	1.271,69	5,25	0,41%
	Tersedianya kendaraan dinas UPT. Metrologi	unit	2	-	0,00%			
Kajian Potensi Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (DID)	Tersedianya Kajian Potensi Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (DID)	buku	1	1	100,00%	50,00	49,69	99,38%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program pembinaan dan pengelolaan pasar merupakan program yang mengelola pasar rakyat atau tradisional pada aset pemerintah Kota Cilegon. Peranan bagi pemerintah adalah sebagai penunjang kelancaran pembangunan dan sebagai sumber pendapatan daerah. Adapun kegunaan pasar bagi ekonomi masyarakat adalah Merupakan tempat menjual hasil produksi yang dihasilkan masyarakat, menjadi tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung, menjadi tempat transaksi jual beli barang atau jasa, membantu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembangunan program pengembangan dan pengelolaan pasar yang telah dicapai yang dijadikan empat indikasi keberhasilan atau ketercapaian pembangunan. Capaian Indikasi pembangunan berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) **Tingkat Kepuasan Pengunjung Pasar**

Untuk tingkat kepuasan pengunjung, dilihat dari jumlah pasar tradisional yang ada (8 pasar tradisional kecamatan), terdapat hanya 1 pasar yang membuat pengunjung puas karena sarana dan prasarannya terpenuhi serta keamanan dan kenyamanan berbelanja juga didapat (yaitu di pasar Blok F).

2) **Realisasi pendapatan daerah dari pengelolaan pasar**

Pendapatan daerah dari pengelolaan pasar merupakan Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Perdagangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Definisi operasional indikator ini adalah realisasi pendapatan pasar terhadap target yang ditetapkan. Pembangunan tahun 2019 dalam sektor pendapatan pasar dengan realisasi sebesar Rp.1.200.453.616,- dan target pendapatan pasar yang akan dicapai sebesar Rp. 2.074.223.212, atau 57,87 % yang tercapai dari target tersebut. Ketidaktercapaian ini dikarenakan tingkat pencapaiannya kecil adalah dari realisasi capaian pendapatan cicilan kios. Dari target Rp.1.047.733.21,- tercapai hanya Rp.105.412.878,- atau 10,06 %. Sedangkan realisasi dari retribusi pelayanan pasar, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan MCK rata-rata capaiannya 118,97%, pendapatan pasar ini terdiri dari pendapatan retribusi pasar, retribusi kekayaan daerah lain-lain PAD yang sah MCK umum.

3) **Rasio jumlah pasar rakyat terhadap jumlah kebutuhan pasar rakyat di Cilegon**

Indikator ini menjelaskan bahwa pasar Pasar merupakan salah satu tempat utama dalam perputaran roda perekonomian suatu negara/daerah.

Dan juga sebagai fungsi pasar salah satunya adalah sebagai distribusi barang. Oleh karena itu Kota Cilegon dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan yaitu membangun pasar tradisional di setiap kecamatan. Sampai dengan Tahun 2019 bahwa pasar tradisional di Kota Cilegon sudah memiliki 8 (delapan) pasar tradisional/kecamatan, Sehingga target sudah dapat tercapai di tahun 2019. Yang menjadi kewajiban selanjutnya adalah memenuhi sarana dan prasarana pasar yang ada tersebut. Untuk tahun 2019, baru 1 pasar tradisional yang sudah dapat terpenuhi sarana dan prasarananya yaitu Pasar Blok F.

- 4) Rasio jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar rakyat

Pembinaan dan Pengelolaan Pasar merupakan salah satu kegiatan bidang Pasar yang mempunyai peran strategis dalam rangka membangun dan menata pasar tradisional sehingga pasar tradisional di Kota Cilegon dapat memberikan kepuasan pengunjung, meningkatkan pendapatan daerah, membuat pasar menjadi nyaman, aman dan layak. Agar pasar tradisional menjadi pasar yang layak dan nyaman tersebut, maka kewajiban pemerintah Kota Cilegon untuk melakukan Pembinaan dan pengelolaan pasar serta merevitalisasi pasar Tradisional di Kota Cilegon.

Pada pelaksanaan kegiatan di bidang pasar, terdapat kegiatan Peningkatan Pelayanan Kemetrollogian (DAK) yang penyerapannya hanya 0,41%. Ini tidak dapat dilaksanakan keseluruhan karena pada proses lelang tidak ada pihak ketiga yang ikut menjadi peserta lelang, sehingga terjadi gagal lelang. Ini dikarenakan pihak ketiga tidak ada yang dapat memenuhi sesuai spek yang dibutuhkan. Oleh karena itu anggaran yang tidak terserap dikembalikan ke kas daerah dan tidak dianggarkan kembali pada tahun 2020.

A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)

Tabel 4.3.4 c

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)						7.373,18	6.942,73	94,16%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	64,29	64,29%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	96,88	96,88%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	97,57	97,57%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	126,63	126,63%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Adanya sewa menyewa dan jual beli kios di bawah tangan tanpa sepengetahuan UPTD Pasar.
2. Dalam rangka menciptakan pasar bersih higienis yang berstandar nasional untuk meningkatkan daya saing pasar setiap daerah, dari hal itu masih diperlukannya menambah/meningkatkan sarana prasarana untuk memenuhi pasar SNI.
3. Pelaksanaan sanksi terhadap pedagang pasar sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 tahun 2013 pasal 27 tentang ketentuan pidana belum secara optimal dilaksanakan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung, sehingga sebagian pasar kecamatan belum digunakan sebagaimana peruntukannya.
5. Belum terbentuknya zona-zona untuk relokasi PKL di Kota Cilegon.

B.2 Solusi

1. Melakukan intensifikasi bekerjasama dengan APH (aparatus penegak hukum) melalui MOU antara Disperind dengan Kejaksaan Negeri Cilegon.
2. Meningkatkan/membangun sarana dan prasarana pasar yang ber Standar Nasional Indonesia.
3. Dilaksanakannya ketentuan sanksi sesuai dengan perda nomor 10 tahun 2013 pasal 27.
4. Dipenuhinya sarana dan prasarana pendukung pasar kecamatan agar dapat segera digunakan sebagaimana peruntukannya.
5. Regulasi tentang zonasi PKL di Kota Cilegon

3.3.5 Bidang Urusan Perindustrian

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pengembangan Kemitraan Industri

Tabel 3.3.5

Target dan Realisasi Program Pengembangan Kemitraan Industri Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengembangan Kemitraan Industri						595,69	569,74	95,65%
	Pertumbuhan jumlah industri kecil	%	> 3,4 %	2,09	61,00%			
	Proporsi industri kecil dan menengah yang sesuai dengan tata kelola dan regulasi	%	84,00	40,00	47,62%			
	Tingkat pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	74,00	44,40	60,00%			
	Tingkat Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah	%	74,00	46,00	62,16%			
Penumbuhan Sentra Industri Kecil Aneka (IK. Sarung Tangan dan IK. Majun (Prioritas Daerah)	Terlaksananya Kemitraan Industri	org	30	30	100,00%	120,00	117,33	97,77%
	Terlaksananya Pelatihan AMT	org	40	40	100,00%			
Penunjang kegiatan dan Pengembangan Dekranasda Kota Cilegon	Terlaksananya Studi Komparatif Peningkatan Kapasitas Daya Saing dan Kreatifitas	Kegiatan	1	1	100,00%	181,50	170,01	93,67%
	Terlaksananya Kegiatan Lomba Desain Batik dan Pembuatan Cenderamata	Kegiatan	1	1	100,00%			
Penataan dan Pengembangan Kawasan Sentra Industri Kecil Pangan Ik. Tempe	Sertifikat uji umur simpan	IKM	40	40	100,00%	93,00	92,44	99,40%
	Pelatihan tentang sertifikat pangan	IKM	40	40	100,00%			
Penataan dan Pengembangan Kawasan Sentra Industri Kecil Batik	Terlaksananya Pelatihan Batik	org	20	20	100,00%	90,00	79,75	88,61%
	Fasilitasi HAKI	motif	10	10	100,00%			
Bintek Teknologi Pengolahan Pangan bagi IKM Agro	Terlaksananya Bintek Teknologi Pengolahan Pangan Bagi IKM Agro	org	40	40	100,00%	50,00	49,43	98,85%
Pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi industri / kegiatan usaha	Pelaku IKM di Kota Cilegon	IKM	150	150	100,00%	61,19	60,79	99,35%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program Pengembangan industri merupakan program pembangunan pada industri usaha masyarakat agar usaha yang dibidangi oleh masyarakat menjadi meningkat pada produksi, kualitas, dan jaringan usaha. Sasaran dari program ini

adalah pelaku usaha yang mengolah bahan baku sampai dengan produksi serta pemasaran (Industri Kecil / IK).

Indikator ini menunjukkan sebagai indikasi pembangunan pada industri kecil yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, yaitu :

1) Pertumbuhan jumlah industri kecil

Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perindustrian No. 3 tahun 2014 merupakan tanggungjawab pemerintah dan /atau pemerintah daerah untuk mewujudkan Industri Kecil Menengah (IKM) yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang atau jasa industri untuk diekspor. Untuk mewujudkan industri kecil dan menengah tersebut diatas maka perlu adanya Program Pengembangan Kemitraan Industri.

Program Pengembangan Kemitraan Industri memiliki tujuan untuk mewujudkan sentra-sentra industri yang ada menjadi potensial dan meningkatkan unit usaha IKM yang produktif dengan produk yang lebih inovatif. Sedangkan sasaran yang ingin dituju adalah terwujudnya pengembangan Sistem dan Jaringan Perindustrian Daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah. Pada tahun 2018 jumlah industri kecil adalah 956. Untuk tahun 2019 jumlah IKM sebesar 976 IKM. Dengan demikian kenaikan sejumlah 20 IKM atau pertumbuhan jumlah indudtri kecil tahun 2018-2019 sebesar 2,09%, capaian kinerja yang dicapai tahun 2019 sebesar 61 %. Tidak tercapainya capaian kinerja dari target dikarenakan pembinaan atau pelatihan kepada sasaran IKM tidak terakomodir dari yang di targetkan dalam rencana RPJMD, yang mana dalam RPJMD program ini dijadikan program prioritas daerah. Mulai tahun 2018 program ini tidak lagi menjadi program prioritas daerah berikut pagu anggarannnya sehingga ada beberapa kegiatan pendukung program ini yang tidak ada akan tetapi disisi lain target indikator masih dijadikan sebagai target prioritas daerah..

2) Proporsi industri kecil dan menengah yang sesuai dengan tata kelola dan regulasi

Keberadaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Cilegon layak mendapatkan perhatian yang lebih dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar dapat bersaing dipasar Nasional. Realisasi untuk indikator ini hanya mencapai 40% sedangkan target tahun 2019 sebesar 84%. Sehingga capaian kinerja hanya sebesar 47,61%, capaian kinerja ini tidak mencapai target dikarenakan berkurangnya pagu anggaran sehingga kelompok IKM yang mendapat bantuan binaan menjadi berkurang dari tahun sebelumnya.

3) Tingkat pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Realisasi capaian di tahun 2019 ini sebesar 44,4% lebih kecil dari target yang direncanakan (74%). Sehingga capaian kinerja sebesar 59,46%. Hal ini dikarenakan ada kegiatan yang dilakukan pada perubahan anggaran, sehingga peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi dan pemasaran belum dapat terlihat dari IKM yang baru dibina. Adapun realisasi tingkat Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 111 (serratus sebelas) IK terhadap Jumlah IKM yang telah dibina sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) IK atau 44,4%.

4) Tingkat Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah

Indikator ini merupakan indikator program pembangunan yang mana pelaku usaha yang menggunakan sistem produksi dengan menggunakan IPTEK. Pada tahun 2019 jumlah IKM yang berkembang berdasarkan peningkatan IPTEK sebanyak 115 (serratus lima belas) IKM dari jumlah IKM yang dibina sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) IKM atau 46 %, sehingga capaian kinerja yang dicapai sebesar 62,16 % dari target 75%. Hal ini dikarenakan ada beberapa pengetahuan dan teknologi baik dalam hal teknik produksi maupun peralatan atau mesin produksi yang belum bias diterapkan dengan baik oleh IKM yang telah dibina.

Dalam mencapai sasaran program pembangunan yaitu pada indicator pogram yang mana di dukung 5 (lima) kegiatan, yang mana kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana dan rata-rata serapan anggaran sebesar 96,28%

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**B.1 Permasalahan**

1. Masih kurangnya dukungan fasilitasi bagi IKM agar kelompok atau sentra IKM yang dibina menjadi lebih berkembang, sehingga dapat menjadi sentra IKM yang berdaya saing.
2. Masih kurangnya pengembangan IKM dalam hal kualitas produk, kapasitas produksi dan pemasaran produk.
3. Masih kurangnya pengembangan kapasitas IPTEK IKM.

B.2 Solusi

1. Diberikan lebih banyak lagi fasilitasi sertifikasi-sertifikasi bagi kelompok atau sentra IKM dan kemudahan dalam hal legalitas untuk mendukung tata kelola dan regulasi. Agar kelompok atau sentra IKM mempunyai *competitive advantage* dibandingkan dengan daerah lain, sehingga dapat berdaya saing dengan daerah lain.
2. Dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan para IKM, serta kegiatan maupun event-event promosi/pemasaran baik ditingkat provinsi maupun nasional.
3. Pembinaan peningkatan motivasi berusaha/jiwa berwirausaha (Entrepreneurship) bagi para IKM, pengetahuan dunia digital dan teknologi dalam berusaha. Serta fasilitasi peralatan/mesin produksi yang berteknologi untuk pengembangan kualitas produksi IKM.



3.4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

3.4.1 Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan (Setda Bagian Pemerintahan)

Tabel 3.4.1a
Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Tahun
Anggaran 2019 (Setda Bag. Pemerintahan)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan						2.606,67	2.394,81	91,87%
	Nilai Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Kriteria (Sangat Tinggi)	3,00	3,34	111,17%			
Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Tersusunnya Dokumen Pembangunan di 8 Kecamatan	Dokumen	1	1	100,00%	75,00	65,65	87,53%
APEKSI	Terjalannya Kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Cilegon dengan sesama Pemerintah Kota di Seluruh Indonesia dalam rangka akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Agenda	2	2	100,00%	100,00	86,25	86,25%
Penyusunan LPPD	Meningkatnya Status Nilai Kinerja LPPD	Dokumen	1	1	100,00%	170,00	169,47	99,69%
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan/Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Wawasan dan Pengetahuan Para Camat dan Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Orang	51	51	100,00%	235,00	203,66	86,66%
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN	Laporan	1	1	100,00%	110,00	103,69	94,27%
Pembinaan Kewilayahan Kota Cilegon	Tersusunnya Dokumen Pembinaan Kewilayahan Kota Cilegon	Dokumen	12	12	100,00%	1.176,67	1.114,70	94,73%
Penerimaan Kunjungan Kerja/Pejabat/Departemen/Pemerintah/Tamu	Tersusunnya Petunjuk	Dokumen	1	1	100,00%	20,00	19,60	98,00%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Pelaksanaan Penerimaan Kunjungan Kerja							
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah	Kegiatan	1	1	100,00%	169,25	166,90	98,61%
Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum, Trantibum dan Linmas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum, Trantibum dan Linmas	Laporan	4	4	100,00%	30,00	23,25	77,49%
Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah Kelurahan di Kota Cilegon untuk Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Kelurahan	43	43	100,00%	160,00	152,91	95,57%
Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Dokumen	1	1	100,00%	70,00	56,95	81,36%
Penataan Batas Daerah/Rupa-rupa Bumi/Toponimi	Tersusunnya Dokumen Batas Daerah/ Rupabumi/ Toponimi	Dokumen	1	1	100,00%	75,00	62,58	83,44%
Desk Pemilu	Jumlah Dokumen Desk Pemilu yang dibuat	Dokumen	1	1	100,00%	200,00	161,37	80,69%
Koordinasi urusan sumberdaya aparatur dan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Urusan Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan	Laporan	2	2	100,00%	15,75	7,83	49,71%

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Nilai Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Cilegon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan penilaian Status Kinerja Kota dari mulai **“Tinggi”** menjadi **“Sangat Tinggi”** kemudian peningkatan peringkat Kota Se-Indonesia dan mendapatkan Apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri RI Kinerja Pemerintahan Daerah **“Sangat Tinggi”** dengan **Peringkat ke 27 dari 93 Kota Se-Indonesia** dan Kategori **Kota Bintang Dua (**)**. Berbagai penghargaan pun telah diterima oleh Pemerintah Kota Cilegon atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik di Tingkat Provinsi sampai Kementerian Dalam Negeri. Pada Tahun 2019 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Cilegon mendapatkan nilai LPPD Tahun 2018 Tingkat Provinsi oleh Tim Nasional Kemendagri mendapatkan **Skor 3,3335** dengan Kinerja Status Kota **“Sangat Tinggi”** dan

menunggu hasil rekapitulasi skoring peringkat kota se-Indonesia menuju Kinerja Pemerintahan Daerah **“Sangat Tinggi dan Kota Berbintang”**. Secara keseluruhan LPPD Kota Cilegon Terhadap EKPPD Tahun 2019 memperoleh **Skor 3,335** dan telah melampaui target RPJMD Kota Cilegon Tahun 2019 dengan target **Skor 3** dengan persentase capaian **111,17%**.

Selanjutnya kegiatan yang capaian kinerja atau capaian realisasi anggaran di bawah 80%, diantaranya :

1. Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum, Trantibum dan Linmas. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 4 Laporan dari yang ditargetkan 4 Laporan, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 77,49%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan dialihkan ke Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Daerah dan adanya **Perubahan Nomenklatur SOTK** Pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Cilegon yang semula Sub Bagian Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan menjadi Sub Bagian Kerjasama sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
2. Koordinasi urusan sumberdaya aparatur dan pengawasan. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 2 Laporan dari yang ditargetkan 2 Laporan, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 49,71%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan dialihkan ke Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Daerah dan adanya **Perubahan Nomenklatur SOTK** Pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Cilegon yang semula Sub Bagian Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan menjadi Sub Bagian Kerjasama sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
3. Fasilitasi perumusan urusan sumberdaya aparatur dan pengawasan. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 0 Dokumen dari yang ditargetkan 2 Dokumen, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan dan tidak direalisasikan dikarenakan anggarannya dialihkan untuk Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dan adanya **Perubahan Nomenklatur SOTK** Pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Cilegon yang semula Sub Bagian Sumber Daya Aparatur dan pengawasan menjadi Sub Bagian Kerjasama sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

4. Monitoring dan evaluasi urusan sumberdaya aparatur dan pengawasan. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 0 Laporan dari yang ditargetkan 2 Laporan, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan dan tidak direalisasikan dikarenakan anggarannya dialihkan untuk Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah dan adanya **Perubahan Nomenklatur SOTK** Pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Cilegon yang semula Sub Bagian Sumber Daya Aparatur dan pengawasan menjadi Sub Bagian Kerjasama sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka program dan kegiatan dapat dilaksanakan sangat baik, untuk ketercapaian kegiatan secara umum kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan rata-rata realisasi kinerjanya mencapai 100% dan sedangkan realisasi anggarannya mencapai 91,87%. Maka ketercapaian tersebut, berhasil dalam memfasilitasi, melayani dan mengkoordinasikan perangkat daerah di lingkup Bagian Pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan mengoptimalkan kinerja aparatur dengan melakukan penatakelolaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sehingga diraihnya nilai LPPD dengan predikat kriteria nilai **Skor 3,335** dengan Kinerja Status Kota **“Sangat Tinggi”**. Sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

A.2 Program Penataan dan Pengembangan Produk hukum Daerah (Setda Bagian Hukum dan HAM)

Tabel 3.4.1b

Target dan Realisasi Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah						1.245,65	1.162,41	93,32%
	Proporsi jumlah Raperda yang disahkan menjadi perda	%	70,00	53,85	76,93%			
	Proporsi jumlah perwal yang ditetapkan terhadap raperwal (usulan perwal)	%	90,00	100,00	111,11%			
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan Penyuluhan Hukum	orang	80	80	100,00%	290,53	286,97	98,77%
Pemberian Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada aparatur	bantuan hukum	5	5	100,00%	89,52	89,06	99,49%
Dokumentasi Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	Jumlah CD dan buku produk hukum daerah	CD dan buku	100	100	100,00%	110,22	58,61	53,18%
Penataan Administrasi Produk Hukum	Jumlah dokumen produk hukum	Dokumen	4	4	100,00%	755,38	727,76	96,34%

Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah merupakan bentuk instrumen kebijakan yang bertujuan meningkatkan produk-produk hukum yang berkualitas dengan memproses naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) agar disetujui dan disahkan untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) ataupun Rancangan Peraturan Walikota (Raperwal) agar disetujui dan disahkan untuk dijadikan Peraturan Walikota (Perwal). Selain itu juga, memfasilitasi dengan memberikan bantuan hukum kepada aparat yang tersangkut permasalahan hukum perdata dan penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Proporsi jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda;
2. Proporsi jumlah Perwal yang ditetapkan terhadap Rancangan Perwal.

Adapun ketercapaian indikator program tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proporsi jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja program untuk mengukur proporsi jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baik itu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ataupun dari Kepala Daerah (Walikota), yang telah diparipurnakan, disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dijadikan Peraturan Daerah. Maka pengertian Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota. Selain itu juga, Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum yang bersifat mengatur secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah melalui prosedur yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mencakup tahapan yaitu; perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Terbentuknya Perda agar dapat mewujudkan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi.

Maka untuk mengetahui Proporsi jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda, diperlukan perumusan dan perhitungannya yaitu; jumlah Raperda yang disahkan dibagi per jumlah Perda dikali 100 (seratus) persen. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah diparipurnakan, disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 7 Perda dari jumlah Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 13 Raperda dan realisasi kinerjanya mencapai 53,85%.

Sehingga Proporsi jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda realisasi kinerjanya mencapai 53,85% dari yang ditargetkan 70%, maka capaiannya 77%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, berhasil membentuk Peraturan Daerah yang berkualitas dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat/aparatur, agar memberikan rasa keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat/aparatur guna mengatur dan menciptakan kondisi daerah yang aman, tentram, tertib dan teratur. Meskipun terdapat 1 Raperda yang tidak direalisasikan dikarenakan adanya Perubahan Peraturan Perundang-undangan di tingkat Pusat, 3 Raperda yang masih dilakukan proses fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Banten dan 2 Raperda pembahasan dilanjutkan di Tahun 2020.

2. Proporsi jumlah Perwal yang ditetapkan terhadap Rancangan Perwal merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja program untuk mengukur proporsi jumlah Rancangan Peraturan Walikota (Raperwal) yang dibentuk berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan Walikota tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk disahkan menjadi Peraturan Walikota (Perwal). Maka pengertian Peraturan Walikota adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Maka untuk mengetahui Proporsi jumlah Perwal yang ditetapkan terhadap Rancangan Perwal, diperlukan perumusan dan perhitungannya yaitu; jumlah Raperwal yang disahkan dibagi per jumlah Perwal dikali 100 (seratus) persen. Rancangan Peraturan Walikota (Raperwal) yang ditetapkan dan disahkan Walikota menjadi Peraturan Walikota (Perwal) sebanyak 89 Perwal dari jumlah Rancangan Peraturan Walikota sebanyak 89 Raperwal dan realisasi kinerjanya mencapai 100%. Sehingga Proporsi jumlah Perwal yang ditetapkan terhadap Rancangan Perwal realisasi kinerjanya mencapai 100% dari yang ditargetkan 90%, maka capaiannya 100%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, berhasil membentuk Peraturan Walikota yang berkualitas dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat/aparatur, agar memberikan rasa keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat/aparatur guna mengatur dan menciptakan kondisi daerah yang aman, tentram, tertib dan teratur.

Selanjutnya, untuk kegiatan yang capaian kinerja atau capaian realisasi anggaran di bawah 80%, yaitu pada kegiatan Dokumentasi Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah. Kegiatan ini realisasi anggarannya hanya 53,18%, Hal ini disebabkan karena penyerapan belanja Internet yang realisasinya berdasarkan tagihan hanya 26,00% dari rencana anggaran dan Belanja Modal peralatan komputer tidak dapat direalisasikan, dikarenakan untuk belanja modal diarahkan oleh Bidang Aset ke Bagian Umum Setda.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka program dan kegiatan secara telah dilaksanakan dengan baik. Ketercapaian kegiatan pada Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah rata-rata realisasi kinerjanya mencapai 88,50% dan sedangkan realisasi anggarannya mencapai 93,32%. Beberapa kegiatan yang terlaksana memiliki keluaran seperti; terlaksananya pembinaan dan penyuluhan hukum yang dihadiri 80 Orang Siswa, pemberian bantuan hukum kepada aparaturnya yang tersangkut permasalahan hukum yang terdiri dari 5 Perkara Perdata, tersedianya jaringan dokumentasi dan informasi hukum dalam bentuk 100 CD yang berisikan informasi produk hukum daerah, buku himpunan peraturan perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan tersedianya 4 Dokumen Naskah Akademis Raperda. Hasil fasilitasi penyusunan produk-produk hukum daerah dan mengembangkan kebijakan produk hukum daerah yang berkualitas, baik produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah ataupun Peraturan Wali Kota yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi aparaturnya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, sedangkan bagi masyarakat untuk dapat diketahui dan dapat mematuhi Peraturan Daerah ataupun Peraturan Wali Kota agar terciptanya suasana kondisi lingkungan yang aman, tentram, tertib dan teratur.

B.2. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.2a Permasalahan

1. Belum tercapainya target penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) disebabkan adanya Perubahan Peraturan Perundang-undangan di tingkat Pusat dan adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang membutuhkan waktu fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Banten yang lebih lama;
2. Belum tercapainya target terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi aparaturnya disebabkan kurangnya pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal proses penanganan Perkara Hukum dan proses di tingkat Pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama sampai diperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

B.2b Solusi

1. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum ditetapkan pada tahun anggaran 2019, diusulkan kembali pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2020 dan akan dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan terlebih dahulu menyusun skala Prioritas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon;
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Pemberian Bantuan Hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait proses penanganan Perkara Hukum.

A.3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (Setda Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi)

Tabel 3.4.1c

Target dan Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah						2.009,34	1.876,53	93,39%
	Nilai mutu pelayanan kepuasan masyarakat tingkat kota	A/B/C/D	75	73	97,84%			
	Proporsi SKPD yang memiliki SOP (<i>standard operating procedure</i>) yg komprehensif	%	60	68	112,62%			
	Nilai Integritas Organisasi	Level	3	3	105,67%			
	Persentase ketersediaan pengisian jabatan terhadap syarat dan kompetensi jabatan	%	60	48	80,25%			
	Nilai rata-rata Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Unit	700	3	N/A			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	nilai	BB	B	75,00%			
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	point	B	B	100,00%			
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Tersusunnya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen	1	1	100,00%	110,35	107,35	97,28%
Penyusunan Evaluasi Jabatan	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Jabatan	Dokumen	1	1	100,00%	102,10	94,98	93,02%
Penyusunan ABK (Analisis Beban Kerja)	Tersusunnya Dokumen Analisis Beban Kerja	Dokumen	1	1	100,00%	181,55	166,50	91,71%
Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab)	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan	Dokumen	1	1	100,00%	123,00	122,57	99,65%
Penyusunan Regulasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Raperda/raperwal kelembagaan	Dokumen	1	1	100,00%	131,95	111,37	84,40%
Penyusunan SOP Kota Cilegon	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SOP	OPD	10	10	100,00%	31,09	30,55	98,25%
Survey Kepuasan Masyarakat kota Cilegon	Tersusunnya Dokumen Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Cilegon	Dokumen	2	2	100,00%	358,90	355,66	99,10%
Kompetisi Pelayanan Publik	Tersusunnya Dokumen Laporan Kompetisi Pelayanan Publik	Dokumen	1	1	100,00%	399,38	382,78	95,84%
Penyediaan Produk Ketatalaksanaan	Tersedianya Stempel Perangkat Daerah dan Stempel Jabatan	Buah	39	39	100,00%	119,15	103,26	86,67%
Optimalisasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Laporan Optimalisasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	100,00%	62,00	50,78	81,90%
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik	Tersusunnya Dokumen Laporan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Dokumen	1	1	100,00%	81,88	79,93	97,62%
Pelaksanaan Survey Kapasitas Organisasi	Tersusunnya Survey Kapasitas Organisasi	Dokumen	1	1	100,00%	100,00	99,28	99,28%
Penyusunan Laporan Pencapaian SPM 2018	Tersusunnya Dokumen Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Cilegon	Dokumen	1	1	100,00%	58,00	28,50	49,14%
Penyusunan Laporan Kinerja Tingkat Kota Tahun N	Tersusunnya Dokumen Laporan Akutabilitas Kinerja Kota Cilegon	Dokumen	1	1	100,00%	150,00	143,03	95,35%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah memiliki tujuan meningkatkan sumberdaya aparatur melalui kegiatan penyusunan standar

kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu juga, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah dan kepuasan masyarakat dengan melakukan penilaian kinerja pada unit penyelenggara pelayanan publik supaya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penempatan jabatan sesuai dengan syarat dan kompetensi jabatan, mengevaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan mengevaluasi reformasi birokrasi.

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja, yaitu :

1. Nilai mutu pelayanan kepuasan masyarakat tingkat kota;
2. Proporsi OPD yang memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) yang komprehensif;
3. Nilai Integritas Organisasi (Nilai Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah);
4. Persentase ketersesuaian pengisian jabatan terhadap syarat dan kompetensi jabatan;
5. Nilai rata-rata Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Adapun ketercapaian indikator program tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai mutu pelayanan kepuasan masyarakat tingkat kota merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja program untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil penilaian responden atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Maka untuk mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibutuhkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengukur sampai sejauhmana mutu pelayanan kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. SKM dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat mengetahui kinerja aparatur dan kedepannya dapat menetapkan kebijakan, penataan sistem, mekanisme dan prosedur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dalam pasal 1 ayat (1) *Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun*. Adapun unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terdapat 9 (sembilan) unsur indikator penilaian yaitu; (1) Persyaratan, (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, (3) Waktu Penyelesaian, (4) Biaya/Tarif, (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, (6) Kompetensi Pelaksana, (7) Perilaku Pelaksana (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, (9) Sarana dan Prasarana.

Dari kesembilan unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut, dilakukan analisa sehingga diperoleh nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat guna memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pada tahun 2019, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Cilegon bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Agung Tirtayasa (UNTIRTA) menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Cilegon untuk program DPW-Kel pada Kelurahan sebanyak 43 (*empat puluh tiga*) Kelurahan. Adapun hasil dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelaksanaan Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kota Cilegon secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Persepsi Kepuasan DPW-Kel Kota Cilegon

Kepuasan Persepsian	Kelurahan	Persentase
Sangat Puas	3	7%
Puas	36	84%
Kurang Puas	4	9%
Jumlah	43	100%

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa dari 43 Kelurahan yang ada di Kota Cilegon, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kota Cilegon sebanyak 84%/36 Kelurahan menyatakan **Puas**, sebanyak 7%/3 Kelurahan

menyatakan **Sangat Puas** dan sisanya 9%/4 Kelurahan menyatakan **Kurang Puas**. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh masing-masing Kelurahan dengan kegiatan utama *Pembangunan Paving Blok Jalan Lingkungan, Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu* sudah dilaksanakan dengan kategori **baik**.

Adapun hasil dari Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), terhadap Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di seluruh Kecamatan Se-Kota Cilegon sebagai berikut :

- A. Kecamatan Cibeber**, Hasil dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelaksanaan Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Skor dan Kriteria Persepsi Kepuasan DPWKel Kecamatan Cibeber

Kecamatan	Kelurahan	Skor (Skala 100)	Kriteria Persepsi Kepuasan
CIBEKER	Kelurahan Kedaleman	79,51	Puas
	Kelurahan Cibeber	77,06	Puas
	Kelurahan Kalitimbang	73,16	Puas
	Kelurahan Karangasem	74,24	Puas
	Kelurahan Bulakan	79,91	Puas
	Kelurahan Cikera	72,62	Puas

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon sebanyak 6 Kelurahan (100%) menyatakan **Puas**. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh masing-masing Kelurahan dengan kegiatan utama *Pembangunan Paving Blok Jalan Lingkungan, Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Pembangunan/ Rehabilitasi Posyandu* sudah dilaksanakan dengan kategori **baik (76,08)**;

- B. Kecamatan Cilegon,** Hasil dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelaksanaan Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Skor dan Kriteria Persepsi Kepuasan DPWKel Kec. Cilegon

Kecamatan	Kelurahan	Skor (Skala 100)	Kriteria Persepsi Kepuasan
CILEGON	Kelurahan Ciwaduk	79,44	Puas
	Kelurahan Ketileng	74,39	Puas
	Kelurahan Bendungan	76,59	Puas
	Kelurahan Ciwedus	78,54	Puas
	Kelurahan Bagendung	75,32	Puas

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa dari 5 Kelurahan yang ada di Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Cilegon Kota Cilegon sebanyak 5 Kelurahan (100%) menyatakan **Puas**. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Cilegon Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh masing-masing Kelurahan dengan kegiatan utama *Pembangunan Paving Blok Jalan Lingkungan, Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu* sudah dilaksanakan dengan kategori **baik (76,86)**;

- C. Kecamatan Citangkil,** Hasil dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelaksanaan Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Skor dan Kriteria Persepsi Kepuasan DPWKel Kec. Citangkil

Kecamatan	Kelurahan	Skor (Skala 100)	Kriteria Persepsi Kepuasan
	Kelurahan Citangkil	72,73	Puas
	Kelurahan Tamanbaru	59,42	Kurang Puas

Kecamatan	Kelurahan	Skor (Skala 100)	Kriteria Persepsi Kepuasan
CITANGKIL	Kelurahan Kebonsari	69,34	Puas
	Kelurahan Lebakdenok	64,86	Kurang Puas
	Kelurahan Samangraya	67,32	Puas
	Kelurahan Warnasari	74,46	Puas
	Kelurahan Deringo	71,00	Puas

Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa dari 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon sebanyak 5 Kelurahan (71%) menyatakan **Puas** dan 2 Kelurahan (29%) menyatakan **Kurang Puas**. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh masing-masing Kelurahan dengan kegiatan utama *Pembangunan Paving Blok Jalan Lingkungan, Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Pembangunan/ Rehabilitasi Posyandu* sudah dilaksanakan dengan kategori **baik (68,45)**;

- D. **Kecamatan Ciwandan**, Hasil dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelaksanaan Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Skor dan Kriteria Persepsi Kepuasan DPWKel Kecamatan Ciwandan

Kecamatan	Kelurahan	Skor (Skala 100)	Kriteria Persepsi Kepuasan
CIWANDAN	Kelurahan Banjarnegara	64,90	Puas
	Kelurahan Kubangsari	80,23	Puas
	Kelurahan Tegalratu	75,61	Puas
	Kelurahan Kepuh	81,64	Sangat Puas
	Kelurahan Randakari	79,60	Puas
	Kelurahan Gunungsugih	72,29	Puas

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah

Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon sebanyak 5 Kelurahan (83%) menyatakan **Puas** dan 1 Kelurahan (17%) menyatakan **Sangat Puas**. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh masing-masing Kelurahan dengan kegiatan utama *Pembangunan Paving Blok Jalan Lingkungan, Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu* sudah dilaksanakan dengan kategori **baik (75,71)**;

- E. **Kecamatan Grogol**, Hasil dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelaksanaan Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Grogol Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6
Skor dan Kriteria Persepsi Kepuasan DPWKel Kecamatan Grogol

Kecamatan	Kelurahan	Skor (Skala 100)	Kriteria Persepsi Kepuasan
GROGOL	Kelurahan Grogol	62,16	Kurang Puas
	Kelurahan Kotasari	64,47	Puas
	Kelurahan Rawa Arum	63,92	Kurang Puas
	Kelurahan Gerem	73,30	Puas

Berdasarkan Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa dari 4 Kelurahan yang ada di Kecamatan Grogol Kota Cilegon, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Grogol Kota Cilegon sebanyak 2 Kelurahan (50%) menyatakan **Puas** dan 2 Kelurahan (50%) menyatakan **Kurang Puas**. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Grogol Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh masing-masing Kelurahan dengan kegiatan utama *Pembangunan Paving Blok Jalan Lingkungan, Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu* sudah dilaksanakan dengan kategori **baik (65,96)**;

- F. **Kecamatan Jombang**, Hasil dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelaksanaan Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Jombang Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Skor dan Kriteria Persepsi Kepuasan DPWKel Kecamatan Jombang

Kecamatan	Kelurahan	Skor (Skala 100)	Kriteria Persepsi Kepuasan
JOMBANG	Kelurahan Jombang Wetan	82,50	Sangat Puas
	Kelurahan Panggung Rawi	75,83	Puas
	Kelurahan Gedong Dalem	85,14	Sangat Puas
	Kelurahan Masigit	75,43	Puas
	Kelurahan Sukmajaya	76,98	Puas

Berdasarkan Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa dari 5 Kelurahan yang ada di Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Jombang Kota Cilegon sebanyak 3 Kelurahan (60%) menyatakan **Puas** dan 2 Kelurahan (40%) menyatakan **Kurang Puas**. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Jombang Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh masing-masing kelurahan dengan kegiatan utama *Pembangunan Paving Blok Jalan Lingkungan, Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu* sudah dilaksanakan dengan kategori **baik (79,18)**;

- G. **Kecamatan Pulomerak**, Hasil dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelaksanaan Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Skor dan Kriteria Persepsi Kepuasan DPWKel Kecamatan Pulomerak

Kecamatan	Kelurahan	Skor (Skala 100)	Kriteria Persepsi Kepuasan
PULOMERAK	Kelurahan Lebak Gede	76,84	Puas
	Kelurahan Mekarsari	78,10	Puas
	Kelurahan Tamansari	61,29	Puas
	Kelurahan Suralaya	67,57	Puas

Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa dari 4 Kelurahan yang ada di Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon sebanyak 4 Kelurahan (100%) menyatakan **Puas**. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh masing-masing Kelurahan dengan kegiatan utama *Pembangunan Paving Blok Jalan Lingkungan, Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu* sudah dilaksanakan dengan kategori **baik (70,95)**;

- H. Kecamatan Purwakarta**, Hasil dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelaksanaan Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9
Skor dan Kriteria Persepsi Kepuasan DPW-Kel
Kecamatan Purwakarta

Kecamatan	Kelurahan	Skor (Skala 100)	Kriteria Persepsi Kepuasan
PURWAKARTA	Kelurahan Ramanuju	71,25	Puas
	Kelurahan Kebondalem	72,04	Puas
	Kelurahan Kotabumi	78,75	Puas
	Kelurahan Pabean	74,86	Puas
	Kelurahan Purwakarta	75,29	Puas
	Kelurahan Tegal Bunder	70,83	Puas

Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kebijakan atau Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon sebanyak 6 Kelurahan (100%) menyatakan **Puas**. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh masing-masing Kelurahan dengan kegiatan utama *Pembangunan Paving Blok Jalan*

Lingkungan, Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu sudah dilaksanakan dengan kategori **baik (73,84)**.

Maka berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut diatas, diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Cilegon pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10
Skor Nilai IKM pada DPW-Kelurahan
Kecamatan Se-Kota Cilegon

No.	DPW-Kel Kecamatan	Nilai IKM
1.	Cibeber	76,08
2.	Cilegon	76,86
3.	Citangkil	68,45
4.	Ciwandan	75,71
5.	Grogol	65,96
6.	Jombang	79,18
7.	Pulomerak	70,95
8.	Purwakarta	73,84
Jumlah Total IKM DPW-Kel		73,38

Sehingga hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut diatas, diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada DPW-Kelurahan Kecamatan Se-Kota Cilegon dengan nilai 73,38. Maka Nilai mutu pelayanan kepuasan masyarakat tingkat kota mendapatkan nilai 73,38 dari yang ditargetkan sebesar 75, maka capaiannya 97,84%. Maka dikatakan berhasil dalam meningkatkan sarana dan parasarana untuk Pembangunan Wilayah Kelurahan dengan mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Disamping itu juga, maka dari ketercapaian nilai IKM tersebut di atas. Terdapat beberapa Kelurahan dari 8 (delapan) Kecamatan yang harus memperbaiki pelaksanaan program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan sebagai berikut :

- 1) **Kelurahan Tamanbaru** Kecamatan Citangkil, dengan Kriteria Persepsi Kepuasan dengan label **Kurang Puas**, agar diperbaiki untuk *Pembangunan Paving Blok Jalan Lingkungan* dan dengan label **Kurang Puas**, agar diperbaiki untuk *Pembangunan Drainase dan Tembok Penahan Tanah (TPT)*;



- 2) **Kelurahan Lebak Denok** Kecamatan Citangkil, dengan Kriteria Persepsi Kepuasan dengan label **Kurang Puas**, agar diperbaiki untuk *Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu*;
 - 3) **Kelurahan Grogol** Kecamatan Grogol, dengan Kriteria Persepsi Kepuasan dengan label **Kurang Puas**, agar diperbaiki untuk *Pembangunan Paving Blok Jalan Lingkungan* dan dengan label **Kurang Puas**, agar diperbaiki untuk *Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu*;
 - 4) **Kelurahan Rawa Arum** Kecamatan Grogol, dengan Kriteria Persepsi Kepuasan dengan label **Kurang Puas**, agar diperbaiki untuk *Pembangunan Paving Blok Jalan Lingkungan* dan dengan label **Kurang Puas**, agar diperbaiki untuk *Pembangunan /Rehabilitasi Posyandu*.
2. Proporsi OPD yang memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) yang komprehensif merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja program untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan ketatalaksanaan, dengan parameter sejauhmana perangkat daerah memiliki Standar Operasional Prosedur yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2019, diperoleh hasil Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 10 Perangkat Daerah yang memiliki SOP yaitu; Sekretariat DPRD sebanyak 20 SOP, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) sebanyak 18 SOP, Inspektorat sebanyak 25 SOP, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) sebanyak 5 SOP, Dinas Pendidikan (Dindik) sebanyak 3 SOP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebanyak 9 SOP, Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik (DKISS) sebanyak 7 SOP, Badan Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 15 SOP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) sebanyak 13 SOP dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebanyak 10 SOP. Maka jumlah total SOP pada Tahun 2019 sebanyak 125 SOP. Maka jumlah total keseluruhan perangkat daerah yang sudah menyesuaikan SOP sampai sekarang sebanyak 25 Perangkat Daerah dari 37 Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Daerah Kota Cilegon, Sehingga mendapatkan hasil realisasi kinerjanya mencapai 67,57%. Dengan kata lain, Proporsi OPD yang memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) yang komprehensif realisasi kinerjanya mencapai 67,57% dari yang ditargetkan 60%, maka capaiannya 112,62%.

Adapun perangkat daerah yang belum menyesuaikan SOP diantaranya; Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil (Diskop & UMK), Dinas Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, (DKPP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kecamatan Jombang, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Grogol, Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Ciwandan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, jumlah SOP di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon adalah sebanyak 1.191 SOP.

3. Nilai Kapasitas Organisasi merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja program untuk mengukur kapasitas organisasi dengan melaksanakan survei internal kepada aparatur sebagai responden dan sejumlah pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu alat ukur dalam peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sasaran dari survei ini adalah untuk mendapatkan data primer kapasitas organisasi Pemkot Cilegon untuk digunakan sebagai salah satu acuan didalam pengukuran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Survei tahun 2019 dilakukan terhadap 37 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dengan jumlah seluruh target responden di Pemerintah Kota Cilegon adalah 125 Responden Pegawai yang bertugas di lingkungan pemerintah Kota Cilegon yang terdiri dari Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan pelaksana. Berikut adalah hasil survei kapasitas organisasi Tahun 2019 :

Tabel 11
Hasil Survei Kapasitas Organisasi
Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2019

Pertanyaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah Nilai Perunsur	382	404	399	401	394	398	416	406	397	400	398	399	418	404	405	370	391
Nilai rata-rata Per Unsur	3,21	3,4	3,35	3,37	3,31	3,35	3,5	3,41	3,35	3,36	3,35	3,35	3,51	3,4	3,4	3,11	3,29
Nilai Rata-rata Tertimbang	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,2	0,19	0,19	0,17	0,18
Nilai Kapasitas Organisasi	3,17																

Berdasarkan pada tabel diatas, maka Hasil Survei Kapasitas Organisasi Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 berada pada level 3,17 dari target di level 3, maka capaiannya 105,67%.

Berdasarkan hasil survei kapasitas organisasi terdapat rekomendasi agar Pemerintah Daerah Kota Cilegon ke depannya melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian perangkat organisasi dengan melakukan fasilitasi melalui; asistensi, pemberian arahan,

pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, serta kerja sama sehingga meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap peraturan kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi;

2. Melakukan evaluasi secara sistemik meliputi; input, proses, output, dan outcome untuk meningkatkan efektivitas perangkat organisasi meliputi penyesuaian kewenangan, penataan mekanisme, dan tata laksana kerja.
4. Persentase keteresuaian pengisian jabatan terhadap syarat dan kompetensi jabatan merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja program untuk mengukur tingkat kebutuhan penempatan posisi jabatan yang seharusnya terdapat pada Perangkat Daerah dan kemampuan apa yang dibutuhkan untuk menempati posisi kedudukan sesuai dengan syarat dan kompetensi jabatan yang diperlukan untuk pengisian nama jabatan tertentu.

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur tersebut, dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan organisasi agar pelaksanaan tugas sesuai program dan kegiatan agar terlaksana dengan baik. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS yang meliputi; JA (Jabatan Administrasi), JF (Jabatan Fungsional), dan JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi).

Pengisian syarat dan kompetensi jabatan pada Pemerintah Daerah Kota Cilegon yang telah dilaksanakan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Perangkat Daerah dengan kondisi jabatan dan pegawai dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 12
Kondisi Jabatan dan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK)
Pada Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2019

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai	Jabatan Terisi	Kekurangan Pegawai
1.	Eselon II	36	34	2
2.	Eselon III	139	130	9
3.	Eselon IV	653	640	13
4.	Jabatan Fungsional Umum (JFU) Pelaksana	3.489	1.316	2.173
5.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	5.627	2.687	2.940
Jumlah Total Pegawai		9.944	4.807	5.137

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mengetahui persentase pengisian jabatan sesuai dengan syarat dan kompetensi jabatan guna mendapatkan penempatan posisi jabatan sebanyak 4.807 Pegawai dari jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 9.944 Pegawai, maka realisasi penempatan pegawai sesuai dengan posisi nama jabatan yang terisi capaiannya 48,34%. Maka Persentase keteresuaian pengisian jabatan terhadap syarat dan kompetensi jabatan capaiannya 48,34% dari yang ditargetkan 60%, maka capaiannya 80,57%. Sehingga berhasil dalam menempatkan pegawai pada suatu nama jabatan sesuai syarat dan kompetensi jabatan untuk menempati posisi jabatan tertentu dalam memenuhi kebutuhan pegawai disetiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cilegon. Walaupun pada saat pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian syarat dan kompetensi jabatan yang dicantumkan oleh pegawai di dalam dokumen sehingga dalam kesesuaian pengisian jabatan tidak sesuai syarat dan kompetensi jabatan yang telah diberlakukan dalam penyusunan dokumen tersebut.

Disamping itu juga, terdapat kekurangan jumlah pegawai untuk menempatkan sejumlah formasi untuk beberapa nama jabatan dikarenakan adanya perangkat daerah yang membutuhkan pegawai disamping itu juga terdapat pegawai yang memasuki masa pensiun. Maka jumlah kekurangan pegawai sebanyak 5.137 Pegawai dari jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 9.944 Pegawai. Maka persentase kebutuhan pegawai sebesar 51,66%. Sehingga diharapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat mengakomodir sejumlah kebutuhan pegawai sesuai kuota kebutuhan formasi jabatan yang diajukan dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada saat adanya pembukaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Cilegon, supaya dapat mengoptimalkan kinerja pada setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cilegon.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cilegon melaksanakan evaluasi atau penilaian kinerja sebanyak 38 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik diperoleh angka indeks dari beberapa aspek penilaian diantaranya yaitu; 1). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan nilai 4,12 (Sangat Baik); 2). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan nilai 4,04 (Sangat Baik); 3). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan nilai 3,82 (Baik); 4). Dinas Pendidikan (Dindik) dengan nilai 3,78 (Baik); 5). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan nilai 3,64 (Baik); 6). Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dengan nilai 3,56 (Baik); 7). Dinas Sosial (Dinsos) dengan nilai 3,37 (Baik Dengan Catatan); 8). Dinas Perhubungan (Dishub) dengan nilai 2,33 (Cukup Dengan Catatan); 9). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan nilai 2,25 (Cukup Dengan Catatan); 10). Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) dengan nilai 1,95 (Buruk); 11).

Kecamatan Cibeber dengan nilai 4,25 (Sangat Baik); 12) Kecamatan Purwakarta dengan nilai 3,52 (Baik); 13). Kecamatan Pulomerak dengan nilai 3,49 (Baik Dengan Catatan); 14). Kecamatan Jombang dengan nilai 3,45 (Baik Dengan Catatan); 15). Kecamatan Ciwandan dengan nilai 3,39 (Baik Dengan Catatan); 16). Kecamatan Cilegon dengan nilai 3,17 (Baik Dengan Catatan); 17). Kecamatan Citangkil dengan nilai 3,07 (Baik Dengan Catatan); 18) Kecamatan Grogol dengan nilai 2,84 (Cukup); 19). Puskesmas Pulomerak dengan nilai 4,11 (Sangat Baik); 20). Puskesmas Cibeber dengan nilai 4,01 (Sangat Baik); 21). Puskesmas Purwakarta dengan nilai 3,73 (Baik); 22). Puskesmas Jombang dengan nilai 3,44 (Baik Dengan Catatan); 23.) Puskesmas Ciwandan dengan nilai 3,44 (Baik Dengan Catatan); 24). Puskesmas Grogol dengan nilai 3,42 (Baik Dengan Catatan); 25). Puskesmas Cilegon dengan nilai 3,31 (Baik Dengan Catatan); 26). Puskesmas Citangkil dengan nilai 2,81 (Cukup); 27). Unit Pelaksana Teknis Pajak Wilayah III dengan nilai 3,94 (Baik); 28). Unit Pelaksana Teknis Pajak Wilayah I dengan nilai 2,94 (Cukup); 29). Unit Pelaksana Teknis Pajak Wilayah IV dengan nilai 2,64 (Cukup); 30). Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir dengan nilai 3,21 (Baik Dengan Catatan); 31). Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja dengan nilai 2,57 (Cukup); 32). Unit Pelaksana Teknis Pajak Wilayah II dengan nilai 2,54 (Cukup); 33). Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Terpadu dengan nilai 2,40 (Cukup dengan Catatan); 34). Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan dengan nilai 2,13 (Cukup Dengan Catatan); 35). Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Wilayah III dengan nilai 1,90 (Buruk); 36). Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Wilayah I dengan nilai 1,53 (Buruk); 37). Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Wilayah IV dengan nilai 1,38 (Sangat Buruk); dan 38). Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Wilayah II dengan nilai 0,76 (Gagal).

Maka diperoleh hasil penilaian per Unit Penyelenggara Pelayanan yang berdasarkan aspek penilaian dengan Nilai Rata-Rata Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,06 Poin, dengan memperoleh Indeks Rata-rata Kategori “C” Cukup untuk Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sehingga Nilai Rata-Rata Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik realisasi kinerjanya mencapai 3,06 Poin, dari yang ditargetkan 700 Poin, maka capaiannya N/A. Berdasarkan metodologi dari PERMENPAN & RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik menjadi PERMENPAN & RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dapat disimpulkan bahwa pencapaian angka 3,06 poin termasuk dalam katagori **Baik (Dengan Catatan)**.

5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP (Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) yang dilakukan oleh Kementrian PAN & RB. Inspektorat Pemerintah Provinsi Banten membantu melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Pemerintah Daerah Kota Cilegon dengan supervisi dari tim bersama yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Komponen penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah meliputi; yang meliputi; 1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, yang terdiri dari sub komponen yaitu; a. Rencana Strategis (10%), yang meliputi; Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%), dan Implementasi Renstra (3%); b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), yang meliputi; Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%); 2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%, yang terdiri dari sub komponen yaitu; a. Pemenuhan pengukuran (5%); b. Kualitas pengukuran (12,5%); c. Implementasi pengukuran (7,5%); 3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%, yang terdiri dari sub komponen yaitu; a. Pemenuhan pelaporan (3%); b. Kualitas pelaporan (7,5%); c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%); 4. Evaluasi Internal dengan bobot 10%, yang terdiri dari sub komponen yaitu; a. Pemenuhan evaluasi (2%); b. Kualitas evaluasi (5%); c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) dan 5. Capaian Kinerja dengan bobot 20%, yang terdiri dari sub komponen yaitu; a. Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%); b. Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%); c. Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan penilaian hasil evaluasi laporan kinerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil panel yang dilaksanakan oleh Tim Kemenpan RB, didapatkan nilai 64,93 dengan kategori B, dari yang ditargetkan dengan kategori BB (70,00), maka capaiannya 92,76%. Secara resmi penyampaian Penilaian Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020 Di Bukit Indah Sukajadi Residential Area Kota Batam Kepulauan Riau.

Sehingga berdasarkan ketercapaian tersebut diatas, berhasil meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Cilegon yang sebelumnya Pada Tahun 2018 memperoleh Nilai AKIP sebesar 62,32 dengan predikat kategori B (Baik) menjadi Pada Tahun 2019 memperoleh Nilai AKIP sebesar 64,93 dengan predikat kategori B (Baik).

6. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja program untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilaksanakan melalui Road Map Tahun 2016-2020 dengan tujuan untuk mengamati Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Cilegon dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Tahun 2019 menghasilkan penilaian pada area perubahan pada tabel sebagai berikut :

No.	Unsur	Capaian	Prosentase (%)
A. Pengungkit (60%)			
1.	Manajemen Perubahan (5%)	2,59	51,62
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan (5%)	3,18	63,63
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi (6%)	4,92	82,01
4.	Penataan Tatalaksana (5%)	3,64	72,84
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)	12,10	80,68
6.	Penguatan Akuntabilitas (6%)	4,90	81,68
7.	Penguatan Pengawasan (12%)	5,91	49,24
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6%)	3,93	65,51
Total Unsur Pengungkit/ Nilai Sub Total Komponen Pengungkit		41,17	68,61
B. Hasil (40%)			
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20%)	8,74	43,72
2.	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (10%)	3,01	30,00
3.	Kualitas Pelayanan Publik (10%)	7,35	73,50
Total Unsur Hasil/ Nilai Sub Total Komponen Hasil		19,1	55,52
Total Nilai Indek Reformasi Birokrasi (%)		60,27	

Berdasarkan data di atas, hasil evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon, nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cilegon memperoleh Nilai



Indeks Reformasi Birokrasi 60,27%, atau dikategorikan predikat B sesuai dengan yang ditargetkan B pada tahun 2019.

Pembangunan Reformasi Birokrasi di Kota Cilegon sudah menunjukkan perkembangan yang baik dengan peningkatan predikat dari CC (54,49) menjadi B (60,27). Peningkatan nilai tersebut, sehubungan dengan adanya perbaikan di beberapa area perubahan seperti Penataan Kelembagaan, Penataan Tata Laksana dan Penguatan Akuntabilitas.

Selanjutnya kegiatan yang capaian kinerja atau capaian realisasi anggaran di bawah 80%, diantaranya adalah kegiatan Penyusunan Laporan Pencapaian SPM 2018. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 1 Dokumen dari yang ditargetkan 1 Dokumen, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 49,14%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, terutama untuk honorarium transportasi dan akomodasi sama honorarium narasumber. Hal tersebut dikarenakan Peruntukan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, tidak diserap disebabkan pada Triwulan ke IV (empat) harus sudah penyusunan laporan pencapaian SPM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Maka narasumber untuk Sosialisasi Permendagri tersebut, tidak bisa mengalokasikan waktu sehubungan bertepatan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Semester 2.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka program dan kegiatan dapat dilaksanakan sangat baik untuk ketercapaian kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan rata-rata realisasi kinerjanya mencapai 94,00% dan sedangkan realisasi anggarannya mencapai 93,39%. Maka capaian tersebut, berhasil dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan daerah dengan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Selain itu juga, terdapat keberhasilan dalam pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik. Pada Tahun 2019 mendapatkan Penghargaan TOP 45 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan Inovasi Kader Gerakan Warga Binaan Peduli Kesehatan (Gegana Pedes) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Cilegon melalui Kerjasama Puskesmas Cibeber dan Lapas Kelas III Kota Cilegon. Atas penghargaan tersebut Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) kurang lebih sebesar Rp. 8 Milyar.



B.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI (Bag. Organisasi Sekretariat Daerah)

B.3a Permasalahan

1. Kriteria penilaian ke arah pemanfaatan Aplikasi SAKIP yang belum menunjukkan progres penilaian kinerja program dan sasaran, baru sebatas kinerja kegiatan. Disamping itu, masih terdapat beberapa kesalahan (error) dalam sistem (SIMRAL) yang harus ditangani bersama dengan BPPT;
2. Pemerintah Daerah Kota Cilegon masih mengandalkan hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB), karena baru pertama kali melakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi melalui mekanisme PMPRB. Sehingga aspek yang dinilai belum di verifikasi lengkap;
3. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan hanya untuk DPWKel, belum pada keseluruhan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon belum sepenuhnya dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat perangkat Daerah belum memenuhi aspek dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Belum adanya pedoman yang jelas dari Pemerintah Pusat terkait penyusunan Survei namun Pemerintah Daerah dituntut untuk tetap melakukan Survei karena menjadi salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi;
7. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) masih dalam tahap validasi oleh Kemenpan & RB sehingga belum ditetapkan dalam Perwal.

B.3b Solusi

1. Koordinasi Kelompok Kerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pokja SAKIP), dan terus menampung permasalahan dari OPD terkait pemanfaatan sistem;
2. Membangun Rencana Aksi Tahunan dalam pencapaian Reformasi Birokrasi;
3. Mendorong Perangkat Daerah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara Mandiri;
4. Melakukan pendampingan dan pembinaan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Perangkat Daerah;
5. Mendorong Kemenpan & RB untuk menyusun indikator penilaian pada Perangkat Daerah fungsi penunjang (Pelayanan Administrasi);
6. Survei Kapasitas Organisasi (SKO) dilakukan secara Mandiri dengan berkonsultasi kepada Kemenpan & RB terkait instrumen Survei;
7. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) baru sampai pada tahap penyusunan dan dilanjutkan dengan proses konsultasi kepada Kemenpan & RB.

A.4 Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan (Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Tabel 3.4.1d

Target dan Realisasi Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan						4.563,69	3.973,42	87,07%
	Tingkat kondusifitas kehidupan antar umat beragama	%	100	100	100,00%			
	Proporsi cakupan layanan usulan hibah dan bansos bidang keagamaan	%	100	60	60,00%			
Koordinasi dan Konsultasi Urusan Kependudukan Capil Pemberdayaan Perempuan PA KB	Terlaksananya Koordinasi Urusan Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA KB	Kegiatan	2	1	50,00%	30,00	4,60	15,32%
Koordinasi dan Konsultasi Urusan Pemuda Olahraga, Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	Terlaksananya Koordinasi Urusan Pemuda Olahraga, Komunikasi, Informasi, Sandi dan Statistik	Kegiatan	2	1	50,00%	30,00	4,69	15,63%
Pendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji	Tersusunnya Juklak Pendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji	Dokumen	1	1	83,99%	806,30	677,21	83,99%
Penyelenggaraan MTQ	Tersusunnya Juklak MTQ Tingkat Kota Cilegon	Juklak	1	1	100,00%	2.326,66	2.158,77	92,78%
Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemuda olahraga, komunikasi, informatika, sandi dan statistik	Tersusunnya produk kebijakan Urusan Pemuda Olahraga komunikasi, informatika, sandi dan statistik	Dokumen	2	1	50,00%	30,00	2,77	9,22%
Monitoring dan evaluasi kinerja urusan pemuda olahraga, komunikasi, informatika, sandi dan statistik	Jumlah laporan hasil Monitoring dan evaluasi kinerja urusan pemuda olahraga, komunikasi, informatika, sandi dan statistik	Dokumen	2	1	50,00%	30,00	5,11	17,04%
Fasilitasi penyelenggaraan urusan kependudukan capil pemberdayaan perempuan PA KB	Tersusunnya produk kebijakan Urusan kependudukan capil pemberdayaan perempuan PA KB	Dokumen	2	1	50,00%	30,00	1,80	6,00%
Monitoring dan evaluasi kinerja urusan kependudukan capil pemberdayaan perempuan PA KB	Jumlah laporan hasil Monitoring dan evaluasi kinerja urusan kependudukan capil pemberdayaan perempuan PA KB	Dokumen	2	1	50,00%	30,00	2,32	7,73%
Kegiatan PHBI dan Istighosah	Jumlah Acara Peringatan Hari Besar Islam dan Istighosah	Acara	9	9	100,00%	445,20	380,20	85,40%
Pembinaan Keagamaan dan SDM	Tersusunnya Juklak Pembinaan Keagamaan dan SDM	Juklak	1	1	100,00%	480,53	452,01	94,07%
Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Hibah	Tercapainya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hibah Terhadap Lembaga Keagamaan di Kota Cilegon	Kegiatan	5	4	79,12%	20,00	15,82	79,12%
Pembinaan SDM Penerima Hibah	Tersusunnya Juklak Pembinaan SDM Penerima	Lembaga	9	9	100,00%	30,00	16,34	54,46%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Hibah terhadap lembaga keagamaan							
Pembinaan Pengurus DKM	Tersusunnya Juklak Pembinaan Pengurus DKM	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	47,27	94,54%
Peringatan Hari Santri	Terlaksananya Peringatan Hari santri tingkat kota Cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%	150,00	136,63	91,09%
Bimbingan Teknis Perhakiman LPTQ	Jumlah Calon Dewan Hakim yang mengikuti bimbingan Teknis Perhakiman LPTQ	Kegiatan	129	129	100,00%	75,00	67,89	90,52%

Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan memperoleh alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah dan berupaya memfasilitasi, melayani dan mengoordinasikan perangkat daerah di lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Adapun tujuannya agar meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dalam menjalankan ibadah dengan saling menjaga kondusifitas dan keharmonisan kerukunan kehidupan umat beragama serta meningkatkan sarana dan prasarana sosial dengan menindaklanjuti bantuan hibah dan sosial kepada masyarakat agar terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana peribadatan atau lembaga keagamaan.

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

- 1) Tingkat kondusifitas kehidupan antar umat beragama;
- 2) Proporsi cakupan layanan usulan hibah dan bansos bidang keagamaan.

Adapun ketercapaian indikator program tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tingkat kondusifitas kehidupan antar umat beragama merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja program untuk mengukur tingkat kondusifitas situasi kondisi kehidupan sosial dalam menjalankan dengan berbagai aktifitas peribadatan keagamaan untuk semua lapisan masyarakat. Untuk mengetahui Tingkat kondusifitas kehidupan antar umat beragama, diperlukan perumusan atau perhitungannya yaitu; jumlah pelaksanaan hari-hari besar keagamaan yang berlangsung tanpa adanya konflik dibagi per jumlah permasalahan terhadap seluruh pelaksanaan hari-hari besar keagamaan dikali 100 (seratus) persen. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cilegon melaksanakan kegiatan keagamaan sebanyak

9 (sembilan) kegiatan hari-hari besar keagamaan tanpa adanya konflik, dan ke 9 (sembilan) kegiatan tersebut, meliputi; kegiatan Isro Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Hari Raya Idul Fitri, Halal Bi Halal, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Santri Nasional, dan Istighosah yang dilaksanakan tanpa adanya permasalahan pada saat diselenggarakannya acara-acara tersebut, maka realisasi kinerjanya mencapai 100%. Sehingga Tingkat kondusifitas antar umat beragama realisasi kinerjanya mencapai 100%, dari yang ditargetkan 100%, maka capaiannya 100%.

- 2) Proporsi cakupan layanan usulan hibah dan bansos bidang keagamaan merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja program untuk mengukur proporsi cakupan layanan bagi pemohon pengajuan bantuan hibah dan bantuan sosial baik itu dari badan, lembaga, dan organisasi masyarakat lainnya. Untuk mengukur Proporsi cakupan layanan usulan hibah dan bansos bidang keagamaan, diperlukan perumusan dan perhitungannya yaitu; jumlah usulan proposal hibah atau bansos keagamaan yang memenuhi syarat dibagi per jumlah proposal hibah atau bansos keagamaan yang diusulkan dikali 100 (seratus) persen. Pada tahun 2019, proposal hibah yang terealisasi sesuai dengan kelengkapan persyaratan dan layak untuk mendapatkan bantuan hibah sebanyak 9 lembaga keagamaan dari jumlah total proposal hibah lembaga keagamaan yang diterima sebanyak 15 (lima belas) proposal hibah lembaga keagamaan maka realisasi kinerjanya mencapai 60%. Sehingga Proporsi cakupan layanan usulan hibah bidang keagamaan realisasi kinerjanya mencapai 60% dari yang ditargetkan 100%, maka capaiannya 60%.

Selanjutnya, untuk kegiatan yang capaian kinerja atau capaian realisasi anggaran di bawah 80%, yaitu;

1. Koordinasi dan Konsultasi Urusan Kependudukan Capil Pemberdayaan Perempuan PA KB. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 1 Kegiatan dari yang ditargetkan 2 Kegiatan, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 15,32%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan adanya regulasi Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan bergantinya nomenklatur dari Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan menjadi Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2. Koordinasi dan Konsultasi Urusan Pemuda Olahraga, Komunikasi, Informasi, Sandi dan Statistik. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 1 Kegiatan dari yang ditargetkan 2 Kegiatan, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 15,63%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan adanya regulasi Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja



Sekretariat Daerah, dengan bergantinya nomenklatur dari Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan menjadi Bagian Kesejahteraan Rakyat;

3. Fasilitas penyelenggaraan urusan pemuda olahraga, komunikasi, informatika, sandi dan statistik. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 1 Dokumen dari yang ditargetkan 2 Dokumen, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 9,22%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan adanya regulasi Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dengan bergantinya nomenklatur dari Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan menjadi Bagian Kesejahteraan Rakyat;
4. Monitoring dan evaluasi kinerja urusan pemuda olahraga, komunikasi, informatika, sandi dan statistik. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 1 Dokumen dari yang ditargetkan 2 Dokumen, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 17,04%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan adanya regulasi Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dengan bergantinya nomenklatur dari Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan menjadi Bagian Kesejahteraan Rakyat;
5. Fasilitas penyelenggaraan urusan kependudukan capil pemberdayaan perempuan PA KB. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 1 Dokumen dari yang ditargetkan 2 Dokumen, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 6,00%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan adanya regulasi Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dengan bergantinya nomenklatur dari Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan menjadi Bagian Kesejahteraan Rakyat;
6. Monitoring dan evaluasi kinerja urusan kependudukan capil pemberdayaan perempuan PA KB. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 1 Dokumen dari yang ditargetkan 2 Dokumen, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 7,73%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan adanya regulasi Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dengan bergantinya nomenklatur dari Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan menjadi Bagian Kesejahteraan Rakyat;
7. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hibah. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 9 Lembaga dari yang ditargetkan 9 Lembaga, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 79,12%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan adanya regulasi Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dengan bergantinya nomenklatur dari Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan menjadi Bagian Kesejahteraan Rakyat;

8. Pembinaan SDM Penerima Hibah. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 9 Lembaga dari yang ditargetkan 9 Lembaga, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 54,46%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan adanya regulasi Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dengan bergantinya nomenklatur dari Bagian Bimbingan Mental dan Keagamaan menjadi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang berdampak pada metode pembayaran yang seharusnya sistem Ganti Uang (GU) menjadi sistem LS, akibatnya nilai pencairan di bawah Rp. 10.000.000,- tidak bisa dilakukan dengan sistem LS.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, untuk ketercapaian kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan rata-rata realisasi kinerjanya mencapai 80,00% dan sedangkan realisasi anggarannya mencapai 87,07%. Sehingga berhasil dalam melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Peringatan Hari Santri, MTQ, Pembinaan Keagamaan dan Pengurus DKM, Bintek Perhakiman LPTQ dan berhasil memfasilitasi dalam memberikan bantuan hibah pembangunan sarana dan prasarana sosial kepada masyarakat Kota Cilegon untuk pembangunan tempat peribadatan dan lembaga keagamaan.

B.4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.4a Permasalahan

1. Belum optimalnya pengkaderan sumber daya masyarakat yang unggul untuk mewujudkan qori dan qori'ah terbaik di Kota Cilegon.
2. Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi dalam kebutuhan peningkatan nilai-nilai agama.

B.4b Solusi

1. Pelaksanaan STQ (Seleksi Tilawatil Qur'an) di 43 kelurahan melalui kegiatan DPWKel, sebagai tahap awal dalam mencari bibit-bibit qori dan qori'ah yang unggul dari seluruh kelurahan untuk berpartisipasi dalam MTQ di berbagai jenjang hingga jenjang nasional.
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan mandatori DPWKel di setiap kelurahan, yaitu kegiatan Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemsyarakat Kelurahan yang di dalamnya terdapat pelaksanaan PHBI/PHBN, Dukungan Majelis Taqlim kelurahan, serta STQ tingkat kelurahan.

A.5a Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Setda Bagian Perekonomian dan Pembangunan)

Tabel 3.4.1e

Target dan Realisasi Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam						108,41	108,41	100,00%
	Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)	%	70	70	100,00%			
	Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)	%	70	70	100,00%			
	Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah koordinasi bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)	%	100	100	100,00%			
FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PM, PTSP, KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	Tersedianya perumusan kebijakan dan pedoman kebijakan urusan PM-PTSP, Ketenagakerjaan dan dan Transmigrasi	Dokumen	3	3	100,00%	21,20	21,20	100,00%
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Urusan PM, PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja pada PM-PTSP, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Laporan	3	3	100,00%	25,03	25,03	100,00%
FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN KOPERASI, UKM, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	Tersedianya perumusan kebijakan, NSPK berupa pedoman kebijakan urusan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan	Dokumen	3	3	100,00%	13,40	13,40	100,00%
Koordinasi dan Konsultasi Urusan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan	Terlaksananya sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian program kegiatan dan pekerjaan lingkup perangkat daerah yang di koordinasikan urusan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan	Laporan	3	3	100,00%	7,58	7,58	100,00%
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Urusan Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan	Terlaksananya pencapaian program pada OPD Koperasi dan UKM serta Industri dan Perdagangan	Laporan	3	3	100,00%	23,11	23,11	100,00%
Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dan BUMD	Tersedianya rancangan peraturan di bidang perhubungan dan BUMD, Tersedianya masukan dari	Dokumen	4	4	100,00%	0,90	0,90	100,00%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	pakar/ahli/akademisi di dalam pelaksanaan tugas atau pengelolaan di bidang perhubungan dan BUMD, Terlaksananya pelaksanaan trilateral meeting							
Koordinasi dan Konsultasi Urusan Perhubungan dan BUMD	Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi antara bagian perekonomian dengan mitra OPD dan BUMD	Dokumen	4	4	100,00%	13,77	13,77	100,00%
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Urusan Perhubungan dan BUMD	Terlaksananya pemantauan dalam rangka mengamati dan mengetahui perkembangan, kemajuan permasalahan serta upaya pencegahan pelaksanaan program atau kegiatan pada dinas perhubungan dan BUMD	Laporan	4	4	100,00%	3,44	3,44	100,00%
Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam						227,41	159,51	70,14%
	Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)	%	70	70	100,00%			
	Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)	%	70	70	100,00%			
	Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah koordinasi bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)	%	100	100	100,00%			
Fasilitasi, Koordinasi / Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja urusan Koperasi UKM, INDAG dan Pertanian	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Koperasi UKM, Indag dan Pertanian	Laporan	10	10	100,00%	39,44	32,98	83,63%
Fasilitasi, Koordinasi / Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja urusan PM,PTSP, Perhubungan, BUMD, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Tersedianya rancangan peraturan di bidang perhubungan dan BUMD	Dokumen	7	5	100,00%	73,14	48,23	65,94%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang BUMD	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan di Bidang BUMD	Laporan	1	1	100,00%	22,83	12,13	53,13%
Rapat Koordinasi Urusan BUMD	Terlaksananya Rapat Koordinasi / Rakoor BUMD milik Pemerintah Kota Cilegon	Dokumen	2	2	100,00%	92,00	66,17	71,92%

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

1. Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD) dengan target indikator kinerja 70 %;
2. Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD) dengan target indikator kinerja 70 %;
3. Tingkat efektifitas koordinasi terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD) dengan target indikator kinerja 100 %;

Adapun capaian program dari beberapa indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD), Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kebijakan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang difasilitasi agar tercapainya sasaran dan tujuan yang telah direncanakan atau ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan efektif apabila organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat sepenuhnya mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dengan meningkatkan fasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memenuhi kebutuhan dan tuntutan perubahan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap OPD lingkup Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD), diperlukan perumusan dan perhitungannya yaitu; jumlah OPD yang difasilitasi rumusan kebijakan dibagi per jumlah OPD di lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan dikali 100 (seratus) persen. Maka jumlah lingkup perangkat daerah yang difasilitasi sebanyak 8 (delapan) OPD yang membutuhkan fasilitasi dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cilegon terutama Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi / Konsultasi, Monitoring dan

Evaluasi Kinerja Urusan Koperasi, UKM, Indas dg dan Pertanian realisasi kinerjanya 10 laporan dari yang ditargetkan 10 laporan, capaiannya 100%. Kegiatan Fasilitas, Koordinasi / Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Urusan PM, PTSP, Perhubungan, BUMD, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi realisasi kinerjanya 5 Dokumen dari yang ditargetkan 7 Dokumen, capaiannya 71,43%, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang BUMD realisasi kinerjanya 1 laporan dari yang ditargetkan 1 laporan, capaiannya 100% dan Kegiatan Rapat Koordinasi Urusan BUMD realisasi kinerjanya 2 Dokumen dari yang ditargetkan 2 Dokumen, capaiannya 100%. Sehingga dari 4 kegiatan tersebut, total capaian kinerjanya mencapai 371, 43% dibagi 4 Kegiatan, maka capaiannya 92,86%.

Maka Tingkat efektifitas fasilitas terhadap OPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD) realisasi kinerjanya mencapai 92,86% dari yang ditargetkan 100%, maka capaiannya 92,86%.

Selanjutnya, kegiatan yang capaian kinerja atau capaian realisasi anggaran di bawah 80%, diantaranya :

1. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dan BUMD. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan Sebuah Pedoman Kebijakan Urusan Perhubungan dan BUMD, dimana kegiatan ini memiliki target kinerja 7 Dokumen laporan dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 73.135.498,-. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut hanya mencapai target sebanyak 5 dokumen laporan dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 48.227.660,- atau 65,94 %;
2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang BUMD, dimana kegiatan ini memiliki target kinerja 1 Dokumen laporan dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 22.830.000,-. dan dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut mencapai target sebanyak 1 dokumen laporan dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 12.130.000,- atau 53,13 %.
3. Kegiatan Rapat Koordinasi Urusan BUMD, dimana kegiatan ini memiliki target kinerja 2 Dokumen laporan dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 92.000.000,-. dan dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut mencapai target sebanyak 2 dokumen laporan dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 66.167.600,- atau 71,92 %.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara umum capaian realisasi kinerja kegiatan pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah dapat

dilaksanakan sangat baik, rata-rata ketercapaian Program Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk realisasi kinerjanya mencapai 92,86%, sedangkan realisasi anggarannya mencapai 70%.

B.5a. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**B.5a.1 Permasalahan**

1. Penyerapan OPD yang membindangi perekonomian belum terserap secara maksimal, walaupun penyerapannya diatas 80%.
2. Rendahnya inisiatif dari OPD dan BUMD berkenaan dengan pembahasan produk Hukum Daerah dan NSPK.
3. OPD yang membidangin kegiatan perekonomian belum melakukan pemetaan terhadap suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

B.5b.1 Solusi

1. Perlunya OPD dan BUMD melakukan inventarisasi produk hukum yang mereka diperlukan dalam melaksanakan aktivitas.
2. Perlunya evaluasi rutin terhadap kegiatan yang dilaksanakan OPD dengan melihat jadwal yang dibuat dan disepakati oleh semua pihak.
3. Perlunya OPD untuk saling berkoordinasi antar OPD dan instansi lainnya dalam memecahkan permasalahan di masyarakat

A.5b Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan (Setda Bagian Perekonomian dan Pembangunan)

Tabel 3.4.1f

Target dan Realisasi Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan						82,42	82,42	100,00%
	Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman	%	90	90	100,00%			
	Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman	%	90	90	100,00%			
	Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah koordinasi bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman	%	90	90	100,00%			
Fasilitasi penyelenggaraan urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya produk kebijakan urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup	laporan	2	2	100,00%	3,65	3,65	100,00%
Koordinasi dan Konsultasi Urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup	laporan	4	4	100,00%	11,05	11,05	100,00%
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup	laporan	4	4	100,00%	3,65	3,65	100,00%
Fasilitasi penyelenggaraan urusan PU, Tata Ruang, Pertanahan dan Perkim	Tersusunnya produk kebijakan urusan PU, Tata Ruang, Pertanahan dan Perkim	laporan	2	2	100,00%	9,13	9,13	100,00%
Koordinasi dan Konsultasi Urusan PU, Tata Ruang, Pertanahan dan Perkim	Jumlah laporan koordinasi urusan PU, Tata Ruang, Pertanahan dan Perkim	laporan	4	4	100,00%	21,08	21,08	100,00%
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Urusan PU, Tata Ruang, Pertanahan dan Perkim	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi urusan PU, Tata Ruang, Pertanahan dan Perkim pertanahan dan Perkim	laporan	4	4	100,00%	5,82	5,82	100,00%
Fasilitasi penyelenggaraan urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan	Tersusunnya produk kebijakan urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan	laporan	2	2	100,00%	7,95	7,95	100,00%
Koordinasi dan Konsultasi urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan	Jumlah laporan koordinasi urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan	laporan	4	4	100,00%	13,40	13,40	100,00%
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi urusan Perencanaan, Litbang dan Keuangan dan keuangan	laporan	4	4	100,00%	6,71	6,71	100,00%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Bagian Sosial Kemasyarakatan						573,51	450,21	78,50%
Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan						132,29	128,64	97,25%
	Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman	%	90	90	100,00%			
	Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman	%	90	90	100,00%			
	Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah koordinasi bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman	%	90	90	100,00%			
Fasilitasi, Koordinasi / Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja urusan PUPTR, Perkim dan LH	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi/Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta meningkatnya keterpaduan urusan PUPTR, Perkim dan LH	Laporan	10	10	100,00%	20,92	20,23	96,72%
Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Terkait Prioritas Daerah	Jumlah laporan koordinasi urusan Pangan, Pertanian dan Lingkungan Hidup	Laporan	1	1	100,00%	111,37	108,41	97,34%

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

1. Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman dengan target indikator kinerja 90 %;
2. Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman dengan target indikator kinerja 90 %;
3. Tingkat efektifitas koordinasi terhadap SKPD lingkup bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman dengan target indikator kinerja 90 %;

Adapun capaian program dari beberapa indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja

program untuk mengukur tingkat efektivitas fasilitasi dalam hal penyiapan perumusan, pelaksanaan program kebijakan Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang tugasnya.

Untuk mengetahui Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap OPD lingkup bidang pekerjaan umum, tata ruang, Perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup, diperlukan perumusan dan perhitungannya yaitu; jumlah OPD yang difasilitasi rumusan kebijakan dibagi per jumlah OPD di lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan dikali 100 (seratus) persen. Maka jumlah lingkup perangkat daerah terealisasi sebanyak 9 (Sembilan) OPD yang membutuhkan fasilitasi dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cilegon dan untuk jumlah OPD yang ada di lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan sebanyak 9 (Sembilan) OPD, maka capaiannya 100%.

Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap OPD lingkup bidang litbang, keuangan, pangan, pertanian, lingkungan hidup, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman realisasi kinerjanya mencapai 100% dari yang ditargetkan 90%, maka capaiannya 111,11%. Sehingga capaian tersebut, menandakan keberhasilan dalam meningkatkan jumlah regulasi yang dibutuhkan oleh OPD, sehingga meningkatnya efektifitas pada lingkup perangkat daerah yang membutuhkan fasilitasi terkait rumusan kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cilegon.

2. Tingkat efektifitas pelayanan terhadap OPD lingkup bidang pekerjaan umum, tata ruang, Perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja program untuk mengukur tingkat efektivitas pelayanan dalam hal penyiapan perumusan, pelaksanaan program kebijakan Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang tugasnya. Perumusan dan perhitungan indikator program ini yaitu; jumlah OPD yang dilayani dibagi per jumlah OPD lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan dikali 100 (seratus) persen. Maka jumlah lingkup perangkat daerah terealisasi sebanyak 9 (Sembilan) OPD yang dilayani dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cilegon untuk mendapatkan pendampingan rumusan kebijakan, sedangkan untuk jumlah OPD yang ada di lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan sebanyak 9 (Sembilan) OPD, maka capaiannya 100%.

Maka Tingkat efektifitas pelayanan terhadap OPD lingkup bidang pekerjaan umum, tata ruang, Perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan

hidup realisasi kinerjanya mencapai 100% dari yang ditargetkan 90%, maka capaiannya 111,11%.

3. Tingkat efektifitas koordinasi OPD dibawah koordinasi bidang pekerjaan umum, tata ruang, Perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja program untuk mengukur tingkat efektifivitas koordinasi dalam hal penyiapan perumusan, pelaksanaan program kebijakan Pemerintah Daerah kepada Dinas dan/atau Badan sesuai bidang tugasnya. Perumusan dan perhitungan indikator program ini yaitu; jumlah OPD yang berkoordinasi dibagi per jumlah OPD di lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan dikali 100 (seratus) persen. Maka jumlah OPD di lingkup perangkat daerah terealisasi sebanyak 9 (Sembilan) OPD dan 3 (tiga) BUMD yang berkoordinasi pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cilegon untuk mendapatkan pendampingan rumusan kebijakan, sedangkan untuk jumlah OPD yang ada di lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan sebanyak 9 (Sembilan) OPD, maka capaiannya 100%.

Maka Tingkat efektifitas koordinasi terhadap OPD lingkup bidang litbang, keuangan, pangan, pertanian, lingkungan hidup, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman realisasi kinerjanya mencapai 100% dari yang ditargetkan 90%, maka capaiannya 111,11%.

B.5b. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.5b.1 Permasalahan

1. Penyerapan anggaran pada OPD terkait infrastruktur yang tidak maksimal sehingga silpa yang diberikan cukup besar
2. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap jadwal dan cash budget yang telah ditentukan
3. Komitmen SDM yang melaksanakan kegiatan belum maksimal
4. Banyak perubahan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan

B.5b.2 Solusi

1. Perlu komitmen antara jadwal yang telah disusun dan cash budget yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan
2. Perlu kesadaran personil terhadap tanggung jawab yang diberikan
3. Perlu perencanaan yang komprehensif dari OPD terhadap suatu kegiatan, sehingga tidak terjadi perubahan dalam pelaksanaan kegiatan.

A.6a Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa (Badan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah)

Tabel 3.4.1g

Target dan Realisasi Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa						894,79	790,29	88,32%
	Tingkat kecepatan layanan, kualitas SDM, dan system layanan pengadaan barang/jasa pemerintah	%	85	57,14	67,22%			
	Tingkat ketersediaan sarana prasarana untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	%	85	92,10	108,35%			
Sosialisasi pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Keg	1	1	100,00%	41,14	39,65	96,36%
Optimalisasi Dukungan Pelayanan Barang dan Jasa	Terselenggaranya Pengadaan ATK	Jenis	33	33	100,00%	406,15	401,58	98,87%
Optimalisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Bulan	6	6	100,00%	377,50	281,12	74,47%
Peningkatan Mutu Kelompok Kerja	Terlaksananya Bimbingan Teknis/Workshop ESQ	orang	60	60	100,00%	70,00	67,95	97,07%

Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan memperoleh alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah dan berupaya memfasilitasi, melayani dan mengoordinasikan perangkat daerah di lingkup Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Adapun tujuannya untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya aparatur yang secara operasionalnya menggunakan sistem layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Maka Bagian Pengadaan Baranag dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon melaksanakan beberapa lelang pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikelola dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ataupun Non Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. Tingkat kecepatan layanan, kualitas SDM, dan sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;

2. Tingkat ketersediaan sarana prasarana untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Adapun ketercapaian indikator program tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat kecepatan layanan, kualitas SDM, dan sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Indikator ini dimaksudkan agar penyediaan kebutuhan proses penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan cepat, ketersediaan SDM yang kompeten dan sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi agar bertransaksi secara elektronik, perumusan dan perhitungannya yaitu; Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau yang ditangani UKPBJ terhadap jumlah usulan pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) atas usulan OPD dikali 100%. Sehingga Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau yang ditangani UKPBJ sebanyak 1.468 Paket Pekerjaan terhadap jumlah usulan pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) atas usulan OPD sebanyak 2.877 Paket Pekerjaan dikali 100%. Maka capaiannya 51,03%. Kemudian Tingkat kecepatan layanan, kualitas SDM, dan sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah realisasi kinerjanya 51,03% dari yang ditargetkan 85%, maka capaiannya 60,04%. Kurang optimalnya target yang diusulkan dikarenakan terdapat 1.409 Paket Pekerjaan yang masih ditangani oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon.
2. Tingkat ketersediaan sarana prasarana untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Indikator ini dimaksudkan agar proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan dan perlu didukung sarana prasarana operasional yang memadai dengan menyediakan Layanan Sistem Portal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dibangun, dengan perumusan dan perhitungannya yaitu; Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang ada BPBJ Kota Cilegon terhadap terhadap jumlah sarana dan prasarana BPBJ Kota Cilegon dikali 100%. Sehingga Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana 7 Item terhadap jumlah sarana dan prasarana BPBJ 7 Item yang meliputi; Ruang Pembuktian, Ruang Kantor (Office), Ruang Rapat, Ruang Pendaftaran Penyedia (Biding Room), Ruang Trainer, Ruang Server dan Ruang Arsip) maka realisasi kinerjanya 100% dari target 85%, dengan capaian 117,65%. Berdasarkan capaian tersebut, berhasil dalam memenuhi standarisasi dari salah satu ke 17 Item dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Selanjutnya kegiatan yang capaian kinerja atau capaian realisasi anggaran di bawah 80%, diantaranya :

1. Optimalisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 6 Bulan dari yang ditargetkan 6 Bulan, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 74,47%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan terjadi perubahan Nomenklatur OPD Setda yang berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang awalnya Badan Pengadaan Barang dan Jasa menjadi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka capaian realisasi kinerja kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon dapat dilaksanakan dengan baik, rata-rata ketercapaian Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa realisasi kinerjanya mencapai 88,85%, sedangkan realisasi anggarannya mencapai 88,32%. Ketercapaian tersebut, berhasil meningkatkan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

A.6b Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa (Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)

Tabel 3.4.1h

Target dan Realisasi Program Peningkatan Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						178,00	154,54	86,82%
	Tingkat ketersediaan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	%	85	80,42	94,61%			
Pendampingan pengadaan barang / jasa	Meningkatnya pendampingan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Cilegon tahun 2019	Laporan Pendampingan	8	8	93,85%	88,00	82,59	93,85%
Penyusunan Arsip Dokumen Persiapan Pengadaan dan Pemilihan	Terlaksananya dokumentasi dokumen pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Cilegon	dok	1.200	1.468	122,33%	90,00	71,96	79,95%

Program Layanan Data Dan Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan memperoleh

alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah dan berupaya memfasilitasi, melayani dan mengoordinasikan perangkat daerah di lingkup Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Adapun tujuannya untuk meningkatkan layanan data statistik sektoral terhadap data komposit yang merupakan data yang diolah dalam aplikasi data berbasis Elektronik/*Database*, supaya informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam mengolah kebijakan atau keputusan yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan. Data dan informasi dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon khususnya Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk disampaikan kepada masyarakat dapat berupa data Paket Pengadaan yang didampingi oleh TP4D ataupun data dokumen proses persiapan dan pemilihan pengadaan barang dan jasa di Kota Cilegon sehingga tercipta transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :

1. Tingkat ketersediaan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Adapun ketercapaian indikator program tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat ketersediaan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Indikator program ini dimaksudkan untuk mengetahui data yang disampaikan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan penyedia yang memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sistem aplikasi yang berbasis web. Perumusan dan perhitungan indikator ini yaitu; Jumlah data dan informasi paket yang ditangani BPBJ terhadap Jumlah usulan paket dari OPD dikali 100%. Sehingga Jumlah data dan informasi yang ditangani sebanyak 6 Sistem Data dan informasi yang disampaikan yang terdiri dari SIRUP, SAKIP, Online Shop, Katalog Elektronik, e-Purchasing dan e-Tendering/e-Selection terhadap Jumlah usulan paket OPD sebanyak 6 data dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat Kota Cilegon/pemangku kepentingan (*stakeholder*). Maka capaiannya 100%. Sehingga Tingkat ketersediaan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah capaiannya 100% dari yang ditargetkan 85%, dengan capaian 117,65%. Berdasarkan capaian tersebut, berhasil dalam menyampaikan data dan informasi Pengadaan Barang dan jasa melalui beberapa aplikasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa agar dimanfaatkan oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhannya.

Selanjutnya kegiatan yang capaian kinerja atau capaian realisasi anggaran di bawah 80%, diantaranya :

1. Penyusunan Arsip Dokumen Persiapan Pengadaan dan Pemilihan. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 1.468 Dokumen dari yang ditargetkan 1.200 Dokumen, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 79,95%.

Penyerapan anggarannya kurang optimal dikarenakan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara umum capaian realisasi kinerja kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon dapat dilaksanakan dengan baik, rata-rata ketercapaian Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa realisasi kinerjanya mencapai 117,65%, sedangkan realisasi anggarannya mencapai 86,82%. Maka ketercapaian tersebut, berhasil meningkatkan ketersediaan data dan informasi Pengadaan Barang/Jasa dengan dilaksanakannya pendampingan paket pekerjaan yang bermanfaat bagi pengguna layanan sebagai media perantara untuk pengambilan keputusan dan bagi penyedia dapat memberikan kemudahan untuk memantau beberapa paket-paket pekerjaan yang akan dilelang/ditenderkan yang berdasarkan pilihan kelompok maupun lokasi pengadaan yang dikehendaki oleh masing-masing penyedia.

A.6b.1 Permasalahan

1. Sarana prasarana pelayanan pengadaan yang masih kurang dan terdapat sarana prasarana yang masa pakainya lebih dari 5 Tahun;
2. Alokasi anggaran dalam memenuhi pelaksanaan dalam pengecekan kebenaran dokumen dari penyedia (*on the spot*) terkait kelayakan penyedia masih jauh dari harapan;
3. Masih kurangnya Sumberdaya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta perlunya peningkatan kompetensi SDM yang ada;
4. Pencapaian kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) masih dibawah level yang ditentukan;
5. Masih minimnya pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

A.6b.2 Solusi

1. Penambahan sarana prasarana;
2. Penambahan alokasi anggaran dalam pengecekan kebenaran dokumen dari penyedia (*on the spot*);
3. Perlunya penambahan dan peningkatan SDM dalam pengadaan barang/jasa;
4. Peningkatan level kematangan UKBJ;
5. Pemenuhan/Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur untuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa

A.7 Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (Setda Bagian Sosial dan Kemasyarakatan)

Tabel 3.4.1i
Target dan Realisasi Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Tahun
Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat						573,51	450,21	78,50%
	Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan daerah	%	70	100	142,86%			
	Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan daerah	%	90	100	111,11%			
	Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah koordinasi bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan daerah	%	90	100	111,11%			
Koordinasi Urusan Sosial, Dukcapil dan Kominfo	Jumlah laporan hasil Koordinasi Urusan Sosial, Dukcapil dan kominfo	laporan	2	2	100,00%	54,15	43,52	80,37%
Monitoring dan Evaluasi Urusan Sosial, Dukcapil dan Kominfo	Jumlah laporan hasil monitoring urusan Sosial, Dukcapil dan Kominfo	Laporan	4	6	150,00%	59,23	46,85	79,11%
Koordinasi Urusan Kesehatan, RSUD dan DP3AKB	Jumlah laporan koordinasi urusan Kesehatan, RSUD dan DP3AKB	laporan	4	4	100,00%	66,00	43,78	66,33%
Monitoring dan Evaluasi Urusan Kesehatan, RSUD dan DP3AKB	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Urusan Kesehatan, RSUD dan DP3AKB (4 laporan) Jumlah dokumen Evaluasi Urusan Kesehatan, RSUD dan DP3AKB	Laporan	4	4	100,00%	79,00	65,95	83,48%
Koordinasi Urusan Pendidikan, Budaya dan pariwisata, Perpustakaan dan Arsip serta Pemuda dan Olahraga	Jumlah laporan hasil Koordinasi Urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Dispora	laporan	3	3	100,00%	139,00	122,54	88,16%
Monitoring dan Evaluasi urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip serta Pemuda dan Olahraga	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Urusan Pendidikan, Budaya dan pariwisata, Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Dispora (4 Laporan)Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata,Pustakarda dan Dispora	Laporan	4	4	100,00%	50,00	46,10	92,20%
Fasilitasi perumusan urusan Sosial, Dukcapil dan Kominfo	Tersusunnya produk kebijakan urusan Sosial,Dukcapil dan Kominfo	Dokumen	2	2	100,00%	30,14	9,81	32,56%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi perumusan urusan kesehatan, RSUD dan DP3AKB	Tersusunnya produk kebijakan Urusan Kesehatan, RSUD dan DP3AKB	Dokumen	3	3	100,00%	46,00	39,96	86,87%
Fasilitasi perumusan urusan pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip serta Pemuda dan Olahraga	Tersusunnya Produk kebijakan urusan Pendidikan Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan arsip Daerah dan Dispota	Dokumen	3	3	100,00%	50,00	31,70	63,40%

Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan memperoleh alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah dan berupaya memfasilitasi, melayani dan mengoordinasikan perangkat daerah di lingkup Bagian Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Adapun tujuannya agar meningkatkan efektifitas fasilitasi, efektifitas pelayanan dan efektifitas koordinasi terhadap perangkat daerah di lingkup Bagian Sosial dan Kemasyarakatan.

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

1. Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap OPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip, Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA dan KB, Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi dan Statistik serta perpustakaan daerah;
2. Tingkat efektifitas pelayanan terhadap OPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip, Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA dan KB, Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi dan Statistik serta perpustakaan daerah;
3. Tingkat efektifitas koordinasi OPD di bawah koordinasi bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip, Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA dan KB, Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi dan Statistik serta perpustakaan daerah.

Adapun capaian program dari beberapa indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap OPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip, Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA dan KB, Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi dan Statistik serta perpustakaan daerah. Indikator ini

dimaksudkan untuk mengukur tingkat efektifitas dalam hal penyusunan rumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan program kebijakan, pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi, pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kebijakan lingkup Perangkat Daerah yang terfasilitasi pada Bagian Sosial Kemasyarakatan agar tercapainya rumusan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Perumusan dan perhitungannya yaitu; jumlah OPD yang difasilitasi rumusan kebijakan dibagi per jumlah OPD di lingkup Bagian Sosial Kemasyarakatan dikali 100 (seratus) persen. Maka lingkup perangkat daerah yang terealisasi sebanyak 10 (sepuluh) OPD yaitu; Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik (Diskominfo), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD), Dinas Pendidikan (Dindik) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang terfasilitasi kebutuhannya pada Bagian Sosial Kemasyarakatan dari jumlah lingkup perangkat daerah yang ada pada Bagian Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Cilegon sebanyak 10 (sepuluh) perangkat daerah dengan capaiannya 100%.

Sehingga Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap OPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip, Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA dan KB, Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi dan Statistik serta perpustakaan daerah, realisasi kinerjanya mencapai 100% dari yang ditargetkan 70%, maka capaiannya 142,86%.

2. Tingkat efektifitas pelayanan terhadap OPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip, Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA dan KB, Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi dan Statistik serta perpustakaan daerah. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat efektifitas dalam hal penyusunan rumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan program kebijakan, pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi, pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kebijakan lingkup Perangkat Daerah yang terlayani pada Bagian Sosial Kemasyarakatan agar tercapainya rumusan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Perumusan dan perhitungannya yaitu; jumlah OPD yang dilayani dibagi per jumlah OPD lingkup Bagian Sosial Kemasyarakatan dikali 100 (seratus) persen.

Maka lingkup perangkat daerah yang terealisasi sebanyak 10 (sepuluh) OPD yaitu; Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik (Diskominfo), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD), Dinas Pendidikan (Dindik) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang terlayani kebutuhannya pada Bagian Sosial Kemasyarakatan dari jumlah lingkup perangkat daerah yang ada pada Bagian Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Cilegon sebanyak 10 (sepuluh) perangkat daerah dengan capaiannya 100%.

Sehingga Tingkat efektifitas pelayanan terhadap OPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip, Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA dan KB, Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi dan Statistik serta perpustakaan daerah, realisasi kinerjanya mencapai 100% dari yang ditargetkan 90%, maka capaiannya 111,11%.

3. Tingkat efektifitas koordinasi OPD di bawah koordinasi bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip, Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA dan KB, Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi dan Statistik serta perpustakaan daerah. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat efektifitas dalam hal penyusunan rumusan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan program kebijakan, pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi, pemantauan pelaksanaan program kebijakan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kebijakan lingkup Perangkat Daerah yang dikoordinasikan pada Bagian Sosial Kemasyarakatan agar tercapainya rumusan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Perumusan dan perhitungannya yaitu; jumlah OPD yang berkoordinasi dibagi per jumlah OPD di lingkup Bagian Sosial dan Kemasyarakatan dikali 100 (seratus) persen. Maka jumlah kegiatan yang dikoordinasikan dan direalisasikan berjumlah 9 (sembilan) Kegiatan dari jumlah kegiatan yang diusulkan berjumlah 9 (sembilan) Kegiatan, maka capaiannya 100%.

Sehingga Tingkat efektifitas koordinasi OPD di bawah koordinasi bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip, Kependudukan Capil, Pemberdayaan Perempuan PA dan KB, Pemuda Olahraga, Komunikasi Informasi, Sandi dan Statistik serta perpustakaan daerah, realisasi kinerjanya mencapai 100% dari yang ditargetkan 90%, maka capaiannya 111,11%. Berdasarkan hal tersebut, maka berhasil mengkoordinasikan

kebutuhan perangkat daerah di lingkup Bagian Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Cilegon dengan melaksanakan pendampingan rumusan kebijakan program dan adanya kesesuaian antara kinerja perangkat daerah dengan target dan tolok ukur indikator program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan dan hasil kinerja mendekati targetnya dalam perencanaan dapat dikatakan efektif.

Selanjutnya kegiatan yang capaian kinerja atau capaian realisasi anggaran di bawah 80%, diantaranya :

1. Monitoring dan Evaluasi Urusan Sosial, Dukcapil dan Kominfo. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 6 Laporan dari yang ditargetkan 4 Laporan, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 79,11%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan terjadinya perubahan Nomenklatur pada Bagian sehingga berdampak pada sistem keuangan (Simral) dan berpengaruh pada pencairan GU yang tidak dapat direalisasikan dan diganti dengan sistem LS (Kontrak), sedangkan pencairan melalui LS anggaran Belanja yang diusulkan kurang dari ketentuan kontrak (kurang dari Rp. 10.000.000,-) sehingga penyerapan anggaran tidak dapat direalisasikan dengan maksimal;
2. Koordinasi Urusan Kesehatan, RSUD dan DP3AKB. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 4 Laporan dari yang ditargetkan 4 Laporan, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 66,33%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan adanya perubahan nomenklatur bagian yang menyebabkan anggaran kegiatan dibekukan semenjak tanggal perubahan nomenklatur (1 Juni 2019) sampai keluarnya DPA Perubahan pada tanggal 5 Oktober 2019, sehingga kegiatan tidak bisa optimal dilaksanakan;
3. Fasilitasi Perumusan Urusan Sosial, Dukcapil dan Kominfo. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 2 Dokumen dari yang ditargetkan 2 Dokumen, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 32,56%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan terjadi perubahan Nomenklatur OPD Setda yang berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Hal ini berdampak terhadap sistem keuangan (Simral) yang mengakibatkan sistem pencairan Ganti Uang (GU) pada Bagian Sosial Kemasyarakatan tidak bisa dicairkan, dan hanya bisa diganti dengan Sistem Langsung (LS) menggunakan Kontrak. Sedangkan untuk pencairan menggunakan Kontrak (LS) jumlah anggaran belanja yang diusulkan kurang dari jumlah ketentuan Kontrak (dibawah Rp. 10.000.000,-) sehingga tidak dapat direalisasikan;

4. Fasilitasi Perumusan Urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip serta Pemuda dan Olahraga. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 3 Dokumen dari yang ditargetkan 3 Dokumen, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 63,40%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan terjadi perubahan Nomenklatur OPD Setda yang berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Hal ini berdampak terhadap sistem keuangan (Simral) yang mengakibatkan sistem pencairan Ganti Uang (GU) pada Bagian Sosial Kemasyarakatan tidak bisa dicairkan, dan bisa diganti dengan sitem Langsung (LS) menggunakan Kontrak. Sehingga Pelaksanaannya tidak Optimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara umum capaian realisasi kinerja kegiatan pada Bagian Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Cilegon dapat dilaksanakan dengan sangat baik, rata-rata ketercapaian Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat untuk realisasi kinerjanya mencapai 121,69%, sedangkan realisasi anggarannya mencapai 78,50%. Maka ketercapaian tersebut, berhasil memfasilitasi, melayani dan mengoordinasikan perangkat daerah di lingkup Bagian Sosial Kemasyarakatan dengan memenuhi kebutuhan efektifitas fasilitas, efektifitas pelayanan dan efektifitas koordinasi terhadap perangkat daerah di lingkup Bagian Sosial dan Kemasyarakatan dengan melakukan pendampingan rumusan kebijakan program dan kegiatan secara efektif.

B.7. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.7a Permasalahan

1. Kompetensi dan kapasitas staf/pegawai masih belum mencukupi;
2. Sarana dan prasarana penunjang pelaksana kegiatan belum memadai;
3. Masih kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Tupoksi Bagian Sekretariat Daerah, terutama fungsi Pengendalian Pembangunan Bagian Sekretariat Daerah, sehingga agak sulit dalam berkoordinasi dan memperoleh data dari Perangkat Daerah;
4. Dalam melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tergantung pada kesiapan waktu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah koordinasi dan menyesuaikan dengan waktu pimpinan sebagai penanggung jawab kegiatan;
5. Terbenturnya pelaksanaan kegiatan dengan adanya Nomenklatur baru;
6. Perubahan Nomenklatur menyebabkan adanya pembekuan anggaran.



B.7b Solusi

1. Melaksanakan bimbingan melekat langsung dan mengusulkan Diklat/Bintek ke BKPP Kota Cilegon untuk staf/pegawai;
2. Pemanfaatan secara maksimal sarana pengolahan data yang ada, serta membuat usulan pengadaan Komputer/Laptop dan Printer;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (Sosial Kesra) khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan dan RSUD, dan perlu ada kebijakan yang lebih jelas terkait fungsi pengendalian Bagian Sekretariat Daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Bagian dan mensosialisasikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
4. Hendaknya diagendakan dan diinventarisir kegiatan yang memerlukan rapat koordinasi sehingga dalam menentukan waktu dan melaksanakan rapat koordinasi sesuai dengan *schedule* yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi penumpukan dalam 1 (satu) triwulan;
5. Perubahan Nomenklatur sebaiknya dipersiapkan lebih baik.

A.8a Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan (Setda Bagian Keuangan)

Tabel 3.4.1j
Target dan Realisasi Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Tahun
Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan						2.999,23	2.480,28	82,70%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	85,00	100,00	1,18			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85,00	91,02	1,07			
Penyediaan jasa pegawai non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS di lingkungan Setda yang menerima penghasilan	Pegawai	76	76	100,00%	2.544,12	2.071,76	81,43%
Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPM Penatausahaan Keuangan Setda Kota Cilegon	Dokumen	800	800	100,00%	122,40	122,40	100,00%
Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Yang Dihasilkan	Dokumen	3	3	100,00%	24,43	24,20	99,06%
Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, dan Semester	Dokumen	16	16	100,00%	58,50	54,13	92,53%
Visualisasi Capaian Realisasi Kinerja Keuangan Setda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Visualisasi Capaian Realisasi Kinerja Keuangan Setda Kota Cilegon	Dokumen	12	12	100,00%	30,44	28,86	94,82%
Peningkatan Pengelola Administrasi Keuangan di Lingkungan Setda	Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Pengelola Administrasi Keuangan	Dokumen	1	1	100,00%	12,36	12,21	98,82%
Kompilasi RKA dan DPA Setda	Jumlah Dokumen RKAP 2019, DPPA 2019 dan RKA 2020, DPA 2020 Setda Kota Cilegon	Dokumen	4	4	100,00%	19,45	8,36	42,96%
Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Buku Rencana Kerja Setda Kota Cilegon	Dokumen	3	3	100,00%	24,43	23,02	94,25%
Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang Terselenggara	Dokumen	3	3	100,00%	16,13	14,15	87,72%
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Cilegon	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Cilegon	Dokumen	32	32	100,00%	146,99	121,20	82,45%

Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Sekda II (Asda II). Asda II dipimpin oleh seorang Asisten berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah (Sekda). Asda II membidangi Perekonomian dan Pembangunan Daerah, dimana salah satu lingkup tugasnya membawahi Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Maka Sekretariat Daerah Kota Cilegon merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Cilegon.



Tugas dan Fungsi Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cilegon sebagaimana dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Cilegon Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Secara ringkas Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cilegon mempunyai tugas yaitu;

- a) Memfasilitasi perumusan kebijakan program kegiatan dan perumusan Renja Bagian Program dan Keuangan Setda dan penyiapan bahan Renstra Setda sesuai RPJM Daerah, serta sinkronisasi Renstra dan Renja lingkup Setda;
- b) Melayani urusan pembinaan aparatur, penganalisis alternatif pemecahan masalah, penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekretariat Daerah, penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan, pemberian rekomendasi/pertimbangan pemecahan masalah, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas, penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas, mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas, pengumpulan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban Walikota dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya;
- c) Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi, pembinaan program dan kegiatan pada Bagian Program dan Keuangan Setda dalam upaya peningkatan kinerja sekretariat daerah.

Adapun Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cilegon secara ringkas menyelenggarakan fungsinya yaitu; penyusunan rumusan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan program kebijakan, pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsi, pemantauan pelaksanaan program kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kebijakan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Sekda II sesuai bidang tugasnya. Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cilegon lingkup tugasnya membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu; 1). Sub Bagian Program dan Evaluasi; 2). Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi dan; 3). Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.

Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan memperoleh alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah dan berupaya memfasilitasi, melayani dan mengoordinasikan pada setiap Bagian di lingkup Sekretariat Daerah dengan Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Adapun tujuannya agar meningkatkan pelayanan administrasi program dan keuangan untuk Bagian yang ada di lingkup Sekretariat Daerah dengan memenuhi kebutuhan perencanaan program dan kegiatan di lingkup Bagian Setda

ataupun memenuhi ketersediaan data dan informasi sektoral yang berbentuk dokumen, serta meningkatkan pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cilegon secara efektif, efisien dan akuntabel. Sehingga pengelolaan anggaran untuk pengeluaran/penyerapan anggaran sesuai dengan target dan hasil kinerja (output) yang telah direncanakan dan adanya kesesuaian realisasi keuangan/anggaran yang berdasarkan anggaran kas (*cash budget*).

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral;
2. Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas).

Adapun capaian program dari beberapa indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja program untuk mengukur tingkat ketersediaan pemenuhan dokumen data yang terinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dengan mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah untuk dijadikan informasi kepada masyarakat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, kemudian data dan informasi sektoral dirangkum ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah untuk ditampilkan secara interaktif pada antar muka yang berbasis visual beserta analisisnya. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam pasal 274 *Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah*. Berdasarkan hal tersebut, maka data dan informasi dikelola ke dalam SIPD. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. Selain itu juga, Sistem Informasi Pembangunan Daerah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, di dalam Bab II Data Berbasis Elektronik/*E-Database* pasal 3 ayat (1) *Pemerintah Daerah melakukan pemetaan, pengumpulan, pengisian, validasi, serta evaluasi data pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database*. Oleh karena itu, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terdapat 4 (empat) fitur didalam aplikasi induk dengan ruang lingkup Informasi Pembangunan Daerah yang mencakup diantaranya; data berbasis elektronik/*e-Database* (*data*

pembangunan daerah yang meliputi; data statistik dasar dan data sektoral); perencanaan berbasis elektronik/e-Planning (perencanaan penyusunan dokumen yaitu; RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD dan Renja Perangkat Daerah); monitoring dan evaluasi berbasis elektronik/e-Monev (pelaksanaan yaitu; RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD dan Renja Perangkat Daerah); dan pelaporan berbasis elektronik/e-Reporting.

Maka untuk mengetahui Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral, diperlukan perumusan dan perhitungannya yaitu; jumlah pemenuhan dokumen dibagi per jumlah dokumen yaitu; Dokumen Laporan Keuangan, Dokumen LAKIP, Dokumen Perjanjian Kinerja dan Dokumen Penyusunan IKU yang ada dikali 100 (seratus) persen. Sehingga Jumlah data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terealisasi 4 Dokumen yaitu; Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah Kota Cilegon, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), dari yang ditargetkan 4 Dokumen, maka capaiannya 100%. Sehingga persentase ketersediaan data dan informasi sektoral realisasi kinerjanya 100% dari yang ditargetkan 85%, maka capaiannya 117,65%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka berhasil dengan sangat baik meningkatnya pelaporan dokumen yang berkualitas dengan tertibnya administrasi pengelolaan program dan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan program, pengendalian program dan evaluasi program secara efektif, efisien dan akuntabel yang didukung dengan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga data yang terinput ke dalam dokumen (pembangunan daerah) data secara makro dimasukan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Cilegon, agar masyarakat dapat mengetahui dan memperoleh informasi data yang berguna dengan berbagai keperluan baik itu, data berupa informasi perencanaan ataupun hasil pembangunan yang telah diwujudkan Pemerintah Daerah Kota Cilegon.

2. Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja program untuk mengukur tingkat kesesuaian antara realisasi penggunaan anggaran (keuangan) dengan mengakumulasi persentase proses pencairan pendanaan kegiatan yang sesuai dengan anggaran kas, yang berguna untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Maka untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah terutama anggaran kas sangat penting, karena dapat menjamin ketersediaan dana/anggaran yang dibutuhkan pada setiap Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cilegon untuk keperluan yang mendukung aktifitas dalam pelaksanaan tugas guna menjalankan

program dan kegiatan yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan target yang akan dicapai. Adapun tujuan Cash Budget (anggaran kas) untuk mengharmonisasikan pemasukan pendapatan daerah disatu pihak dan kebutuhan dana untuk belanja dan pembiayaan di pihak lain. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap kepala perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan penyusunan rancangan anggaran kas perangkat daerah. Sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, di dalam pasal 125 ayat (1) *Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD*, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) bersamaan dengan Rancangan DPA-SKPD. Selain itu juga, di dalam pasal 126 ayat (3) *Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah*.

Maka untuk mengetahui Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan *cash budget* (anggaran kas), dengan mengakumulasikan proses pencairan atau jumlah penarikan dana kegiatan yang sesuai dengan cash budget (anggaran kas), sehingga mendapatkan nilai persentase penyerapan capaian realisasi anggarannya dengan perumusan perhitungannya yaitu; jumlah total realisasi cash budget triwulan I, II, III dan IV (dalam %) dibagi per 4 (empat) triwulan. Maka Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cilegon pada APBD Tahun 2019, penyerapan realisasi anggarannya untuk semua Bagian yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cilegon sebesar Rp. 44.055.358.297,- dari pagu yang ditargetkan sebesar Rp. 48.403.941.618,- maka capaiannya 91,02%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan *cash budget* (anggaran kas) realisasi anggarannya mencapai 91,02% dari yang ditargetkan 85%, maka capaiannya 107,08%. Sehingga berhasil melebihi dari yang ditargetkan dengan meningkatnya pengendalian aliran kas daerah yang berdampak semakin membaiknya pengeluaran anggaran dan penyerapan anggaran kas sesuai dengan kebutuhan dan outputnya (keluaran) sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan.

Selanjutnya kegiatan yang capaian kinerja atau capaian realisasi anggaran di bawah 80%, diantaranya :

1. Kompilasi RKA dan DPA Setda. Kegiatan ini bertujuan yaitu; 1) Menyusun daftar perencanaan anggaran yang akurat dan tepat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran berjalan; 2) Melaksanakan pembinaan dan kontrol kepada Operator

Simral untuk melaksanakan penyusunan RKA dan DPA baik perubahan maupun regular sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 4 Dokumen selama 6 Bulan dari Triwulan III sampai dengan triwulan IV dari yang ditargetkan 4 Dokumen, sedangkan untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 42,96%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan pada belanja mamin kegiatan dengan kode rekening 5.2.2.11.04 pada poin belanja mamin Penyusunan Laporan RKAP 2020 dan DPPA 2020 Setda tidak bisa diserap dikarenakan ada kesalahan dalam membuat narasi uraian kegiatan, yang seharusnya “Belanja Mamin Penyusunan Laporan RKAP 2019 dan DPPA 2019 Setda”. Disamping itu juga, adanya efisiensi belanja ATK yang disesuaikan dengan harga pasar. Sehingga mempengaruhi penyerapan realisasi anggaran pada kegiatan ini, akan tetapi output atau capaian kinerjanya berhasil tercapai 100% yaitu sebanyak 4 dokumen sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara umum realisasi capaian kinerja kegiatan pada Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cilegon dapat dilaksanakan dengan sangat baik, rata-rata ketercapaian Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan untuk realisasi kinerjanya mencapai 100%, dan sedangkan realisasi anggarannya mencapai 82,70%. Maka ketercapaian tersebut, berhasil menciptakan ketertiban administrasi pengelolaan program dan kegiatan dalam bentuk pelaporan dokumen secara partisipatif dan terintegrasi antar lingkup Bagian Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Selain itu juga, semakin membaiknya pengelolaan kas anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel.

B.8. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.8a Permasalahan (Bag. Keuangan Setda)

1. Belum adanya pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Kemungkinan terdapat ketidaksinergian antara dokumen perencanaan tahunan dan dokumen perencanaan lima tahunan (ketidaksinergi antara dokumen Renstra dan RPJMD);
3. Belum optimalnya ketercapaian realisasi keuangan Setda berdasarkan Cash Budget;
4. Hasil rekonsiliasi asset tidak tepat waktu.

B.8b Solusi (Bag. Keuangan Setda)

1. Perlunya penyusunan SOP Renja;
2. Perlunya mensinkronkan kembali dokumen Renstra dan RPJMD;
3. Perlunya kedisiplinan dari semua Bagian dalam penyerapan anggaran sesuai dengan cash budget yang telah ditetapkan dan perlu pengendalian dari Bagian Program dan Keuangan kepada seluruh Bagian secara intensif agar realisasi keuangan sesuai dengan Cash Budget;
4. Perlunya perencanaan lebih baik lagi antar instansi terkait;
5. Melakukan rapat-rapat koordinasi internal dengan masing-masing Bagian dan eksternal dengan Bappeda.

A.8b Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan (Sekretariat DPRD)

Tabel 3.4.1k

Target dan Realisasi Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan						1.675,60	1.155,80	68,98%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	85,00	77,27	90,91%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85,00	77,27	90,91%			
Penyediaan jasa pegawai non PNS	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS (TKK 17 Orang, THL 10 Orang)	Ob	27	27	100,00%	964,28	890,97	92,40%
Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD	Bulan	12	12	100,00%	200,40	45,90	22,90%
Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Laporan Keuangan	Buku	50	50	100,00%	63,92	43,46	68,00%
Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP	Dokumen	1	1	100,00%	18,10	18,10	100,00%
Dokumentasi dan Penataan Arsip Keuangan Sekretariat DPRD	terlaksananya Dokumentasi dan Penataan Arsip Keuangan Sekretariat DPRD	Kegiatan	4	4	100,00%	59,24	44,71	75,46%
Penyusunan laporan pajak penghasilan	Terlaksananya Laporan Pajak Penghasilan	Semester	2	2	100,00%	43,81	23,75	54,22%
Sosialisasi Perencanaan Teknis Manajemen Kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi Perencanaan Teknis Manajemen Kegiatan	Dokumen	1	-	0,00%	159,51	0,00	0,00%
Penetapan Kinerja OPD	Terlaksananya Laporan/Dokumen Penetapan Kinerja OPD	Dokumen	1	1	100,00%	11,12	11,12	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD	Terlaksananya Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	2	2	100,00%	27,41	26,83	97,87%
Penyusunan Dokumen Penganggaran OPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penganggaran OPD	Dokumen	3	3	100,00%	111,58	34,73	31,13%
Penyusunan LPPD OPD	Terlaksananya Penyusunan LPPD OPD	Dokumen	1	1	100,00%	16,25	16,25	100,00%

Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu program yang terdiri dari beberapa kegiatan pengelolaan Keuangan DPRD Kota Cilegon.

Salah satu indikator keberhasilan **Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan** Adalah Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral **Target Capaian Kinerja 85%** pada tahun 2019 Realisasi **Capaian Kinerja mencapai 77.27%**

Sedangkan Anggaran pada **Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan** yang bersumber dari APBD T.A 2019 sebesar Rp. **1,675,604,600,-** (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan **Target Realisasi Anggaran 100%**

Adapun Penyerapan Anggaran **Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan** sampai dengan bulan desember 2019 sebesar Rp. **1,148,389,500,-** (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus*) dengan capaian presentase sebesar **68.54%**

Terdapat **efisiensi** anggaran pada **Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan** sebesar **Rp. 527,215,100,-** (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Dua Ratus Lima Belas Ribu Seratus Rupiah*) atau **16.46 %**

Kegiatan pada **Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan** yang capaian Realisasi Anggaran dibawah 80% yaitu :

1. Penatausahaan Keuangan SKPD **19,66 %** karena pada saat penyusunan anggaran masih menggunakan honor penatausahaan tapi pada pelaksanaan tahun berjalan didalam SAB 2019 hanya honor bendahara saja;
2. Penyusunan Laporan Keuangan **68,00%** karena harga satuan dalam rincian melebihi SAB maka direalisasikan sesuai SAB 2019 sehingga mempengaruhi realisasi anggaran;
3. Penyusunan laporan pajak penghasilan **52,16** karena Sebagai langkah efisiensi anggaran karena dilihat dari capaian output sudah tercapai;
4. Sosialisasi Perencanaan Teknis Manajemen **0,00 %** karena tidak adanya koordinasi dan korelasi antra kegiatan dengan pihak terkait yang lebih spesifik dalam hal sosialisasi;
5. Penyusunan Dokumen Penganggaran OPD **31,13%** karena Sebagai langkah efisiensi anggaran karena dilihat dari capaian output sudah tercapai.

A.9 Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah (Sekretariat DPRD)

Tabel 3.1.201

Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah						30.223,01	22.466,21	74,33%
	Proporsi hasil reses yang ditindaklanjuti	%	100,00	79,92	79,92%			
	Proporsi jumlah usulan raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran	%	100,00	79,92	79,92%			
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Pokok-Pokok Pikiran DPRD atas RKPDP Pemerintah Kota Cilegon 2019	Dokumen	1	1	100,00%	6,30	5,94	94,28%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Kajian Produk Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	Terlaksananya Pengkajian Produk Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kota Cilegon	Bulan	12	12	100,00%	322,47	100,00	31,01%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	10	10	100,00%	199,41	186,50	93,52%
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Kegiatan	3	3	100,00%	1.865,08	1.536,60	82,39%
Rapat-Rapat Paripurna DPRD	Terlaksananya rapat-rapat Paripurna DPRD	Naskah	95	2	2,11%	185,43	48,45	26,13%
Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah Untuk Pansus DPRD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah untuk Pansus	Bulan	12	12	100,00%	4.798,81	4.272,49	89,03%
Rapat Pembahasan LKPJ oleh Pansus	Terlaksananya Rapat Pembahasan LKPJ Oleh Pansus	Kegiatan	1	1	100,00%	479,11	349,65	72,98%
Rapat Kajian dan Pembahasan Prolegda dan LKPJ	Terlaksananya Rapat Pembahasan/Ekspose Hasil Kajian Terhadap Prolegda dan LKPJ	Kegiatan	6	3	50,00%	2.038,95	528,82	25,94%
Rapat Kajian dan Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD	Rapat Kajian dan Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD	Dokumen	10	8	80,00%	3.695,30	2.625,05	71,04%
Kunjungan Kerja DPRD (Study Banding) Baperdakot DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja BAPERDA DPRD Kota Cilegon	Kunjungan	7	7	100,00%	1.912,80	1.501,67	78,51%
Kunjungan Kerja DPRD (Study Banding) Badan Anggaran DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja/Study Banding Alat Kelengkapan Badan Anggaran DPRD	Kunjungan	7	7	100,00%	2.650,00	2.568,14	96,91%
Kegiatan reses DPRD	Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD	Kegiatan	3	2	66,67%	3.799,43	1.273,43	33,52%
Dokumentasi dan pendukung kegiatan perundang-undangan DPRD Kota Cilegon	Terlaksananya Penyediaan Dokumentasi dan Pendukung Kegiatan perundang- undangan DPRD Kota Cilegon	Bulan	12	-	0,00%	56,26	19,25	34,22%
Rapat kerja komisi pembahasan RKA SKPD	Terlaksananya Rapat Kerja Komisi Pembahasan RKA SKPD	Kegiatan	2	2	100,00%	1.846,21	1.624,24	87,98%
Kunjungan kerja DPRD (Studi banding) Badan Kehormatan dan Komisi DPRD Kota Cilegon	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD (Study Banding)	Kunjungan	28	28	100,00%	6.367,45	5.825,97	91,50%

Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah merupakan salah satu program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang memfasilitasi DPRD Kota Cilegon dalam membuat Peraturan Daerah.

Salah satu indikator keberhasilan **Program Pelayanan Lembaga Legislasi Daerah** Adalah Proporsi jumlah usulan raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran. capaian kinerja Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah pada tahun 2019 mencapai **79.92 %**

Sedangkan Anggaran pada **Program Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah** yang bersumber dari APBD T.A 2019 sebesar Rp. **30,223,013,865.00,-** (*Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*)



Adapun Penyerapan Anggaran **Program Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah** sampai dengan bulan desember 2019 sebesar Rp. **22,429,417,092.00,-** (*Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Sembilan Puluh Dua Rupiah*) dengan capaian presentase sebesar **74.21 %**

Terdapat **efisiensi** anggaran pada **Program Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah** sebesar **Rp.7,793,596,773,-** (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) atau **25,79 %**

Terdapat 7 (Tujuh) kegiatan pada Program Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah yang mempunyai serapan anggaran kurang dari 80 % yaitu :

1. Kajian Produk Penyusunan RAPERDA Inisiatif **31.01%** karena Banyaknya Raperda Inisiatif secara internal maupun pengusul yang tidak dilaksanakan;
2. Rapat-Rapat Paripurna DPRD **26.13%** karena Yang semulanya di rencanakan 2 stel seragam (PSH dan PSR) hanya diserap PSR nya saja karena PSH nya sudah direalisasikan dibagian umum;
3. Pembahasan LKPJ oleh PANSUS **72.98%** karena Tidak sesuai Lokus yang direncanakan dengan locus yang terealisasi dalam perjalanan dinas DPRD;
4. Rapat Kajian dan Pembahasan Prolegda dan LKPJ **25.94%** karena Prolegda semila 12 hanya terealisasi 10 calegda dikarenakan berbenturan dengan agenda politik nasional maupun agenda politik daerah;
5. Rapat Kajian dan Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD **71.04%** karena Kegiatan rapat pembahasan evaluasi Propinsi atas RAPBD Kota Cilegon tidak diserap;
6. Kunjungan Kerja DPRD (Study Banding) Baperdakot **78,51 %** karena Secara kinerja tercapai 7 kali kunjungan akan tetapi karena ada perbedaan penentuan lokus/tempat tujuan yang direncanakan dilaksanakan maka akan mempengaruhi penggunaan yang ada;
7. Kegiatan Reses DPRD **33.52%** karena Anggaran reses 2019 minimal dianggarkan dalam 1 tahun untuk 3 kali pelaksanaan masa reses, pada pelaksanaan reses ketiga tidak dilaksanakan dikarenakan peraturan. Pada masa jabatan untuk reses ketiga tidak bisa dilaksanakan, dan untuk masa reses kesatu periode 2019-2024 makanan dan minuman tidak semua anggota menyerap atau memakai penunjang reses; Untuk sewa perlengkapan dan peralatan kantor reses ketiga dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan kontrak ; Untuk masa reses kesatu periode 2019-2024 sewa penunjang reses mengalami 3x gagal lelang (sebelumnya tidak terserap);
8. Dokumentasi dan pendukung kegiatan perundang-undangan DPRD Kota Cilegon **34,22%** karena Karena untuk himpunan peraturan DPRD, SK dan sambutan masih menggunakan cara diperbanyak melalui fotokopi.

B.9. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.9a Permasalahan

1. Dukungan Sumber Daya Manusia di sekretariat DPRD yang kurang maksimal dikarenakan tidak sesuai kompetensinya
2. Penentuan lokasi kunjungan DPRD dalam tahun berjalan tidak pasti dalam artian sering berubah sehingga berpengaruh terhadap besaran serapan anggaran perjalanan dinas
3. Koordinasi yang belum maksimal antara bidang/bagian
4. Anggaran yang tidak sesuai kebutuhan
5. Anggaran Tahun 2019 yang berbenturan dengan agenda Politik Nasional dan agenda pemilihan Wakil Walikota Cilegon sisa masa jabatan 2016 - 2021
6. Adanya beberapa kontrak yang gagal lelang

B.9b Solusi

1. Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD perlu ditingkatkan sesuai kompetensi yang dibutuhkan
2. Perencanaan Lokasi kunjungan kerja DPRD harus sudah direncanakan dari awal tahun anggaran sehingga penyerapan anggaran dapat maksimal
3. Komunikasi antara bidang harus ditingkatkan
4. Perencanaan anggaran harus disesuaikan kebutuhan
5. Proses pengadaan barang jasa / Modal dilaksanakan diawal tahun anggaran

A.10 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (Seluruh Kecamatan)

A.10a KECAMATAN CILEGON

Tabel B.10a

Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Cilegon beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KECAMATAN CILEGON)						1.165,17	1.163,64	99,87%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	72	72	100,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	99,9	108,00%			
Penyusunan Profil Kecamatan	Tersedianya Dokumen Profil Kecamatan	Kegiatan	1	1	100,00%	20,00	20,00	100,00%
Pembinaan Administrasi Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	20,00	20,00	100,00%
Penataan Lingkungan Kecamatan	Terlaksananya Penataan Lingkungan Kecamatan	Kegiatan	1	1	100,00%	89,00	88,79	99,76%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pelaksanaan Jumat Bersih Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Jumat Bersih Kecamatan	%	98	98	100,00%	15,00	14,92	99,47%
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	Kegiatan	6	6	100,00%	100,00	99,94	99,94%
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	43,00	43,00	99,99%
Koordinasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Cilegon	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Pelaksanaan Musrenbangcam	Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbangcam	%	98	98	100,00%	61,30	61,26	99,93%
Sosialisasi Narkoba dan Miras	Terlaksananya Sosialisasi Narkoba dan Miras	Kegiatan	1	1	100,00%	24,00	24,00	100,00%
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	Terlaksananya Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Penyelenggaraan Paten	Terlaksananya Penyelenggaraan Paten	Bulan	13	13	100,00%	192,50	192,50	100,00%
Pengajian Rutin	Terlaksananya Pengajian Rutin	Kegiatan	1	1	100,00%	103,00	102,93	99,94%
Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN	Terlaksananya Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN	Kegiatan	6	6	100,00%	200,00	199,25	99,63%
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon	Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%	73,38	73,35	99,97%
Lomba Kelurahan	Terlaksananya Lomba Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	14,00	14,00	100,00%
Dialog/audiensi dengan Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat	Terselenggaranya Dialog/audiensi dengan Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat	Bulan	12	12	100,00%	150,00	149,70	99,80%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN CIWADUK)						1.501,94	1.498,01	99,74%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	72	72	100,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	100	108,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Tahun	1	1	100,00%	107,40	105,95	98,65%
Dukungan pencapaian kota sehat	Peningkatan Gerakan Pencapaian Kota Sehat Masyarakat Kelurahan Ciwaduk	Kegiatan	3	3	100,00%	45,00	45,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Peningkatan Program PKK Kelurahan Ciwaduk	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Pembangunan Paving Block, Pembangunan Drainase	Bulan	12	12	100,00%	584,15	584,15	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Tersedianya Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	27,94	27,65	98,96%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Kegiatan	12	12	100,00%	257,45	257,45	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya Simpul Paten	Bulan	12	12	100,00%	15,00	15,00	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Tersusunya Data Profile Kelurahan	Dokumen	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Paket	85	85	100,00%	80,00	79,42	99,27%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100,00%	40,00	39,55	98,88%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terciptanya Dukungan Penyelenggaraan PHBI/PHBN/PHBD Kelurahan Ciwaduk	Bulan	12	12	100,00%	85,00	83,90	98,71%
Dukungan Program Iklim	Peningkatan Dukungan Program Iklim Kelurahan Ciwaduk	Kegiatan	3	3	100,00%	40,00	40,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Peningkatan Dukungan Peningkatan Kegiatan Kepemudaan Kelurahan Ciwaduk	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Peningkatan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis	Kegiatan	2	2	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ciwaduk	Kegiatan	3	3	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Tersedianya SDM Berkualitas Kelurahan Ciwaduk	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Tersedianya Papan Nama Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	25,00	24,95	99,80%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN BENDUNGAN)						1.344,13	1.337,96	99,54%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%	72	72	100,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	100	108,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Monitoring berkala di lingkungan Kelurahan Bendungan	Bulan	12	12	100,00%	145,80	145,53	99,82%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya dukungan kota sehat	Kegiatan	7	7	100,00%	40,00	39,59	98,98%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terfasilitasinya Program Kerja PKK Kelurahan Bendunga	bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Pembangunan Paving Block	kegiatan	1	1	100,00%	462,99	462,98	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Plang Nama Jalan Lingkungan Kelurahan Bendungan	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	24,87	99,46%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Kelembagaan Masyarakat	Bulan	12	12	100,00%	202,40	202,40	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya Pelayanan Publik yang baik	Orang	2	2	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terkelolanya Informasi melalui websitetersusunya Kelurahan dalam Angka (Profil)	kegiatan	3	3	100,00%	30,00	30,00	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Tersedianya dideminasi informasi publik (brosur , spanduk/giant banner)							
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Partisi, Ruang Tunggu, Sistem Antrian, Ruang Reseptionis dan tersedianya pojok baca/perpustakaan kecil	kegiatan	1	1	100,00%	51,25	50,80	99,12%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Terlaksananya kegiatan papan nomor rumah	Buah	670	670	100,00%	21,42	21,22	99,07%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya Sarana Prasarana Trantibum dibeberapa titik yg terkoneksi di Kelurahan Bendungan	Kegiatan	1	1	100,00%	40,00	39,91	99,78%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pengajian Rutin Melalui Majelis Taklim	kegiatan	7	7	100,00%	85,00	84,33	99,21%
Dukungan Program Iklim	Terlaksananya Dukungan Program Iklim	Kegiatan	3	3	100,00%	40,00	39,62	99,05%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Terlaksananya dan Terfasilitasinya kegiatan kepemudaaan di Kelurahan Bendungan	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Sosialisai Penyuluhan Pendamping kasus kekerasan anak	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tersedianya identifikasi potensi calon wirausaha bar, usaha mikro kecil disetiap kelurahan (identifikasi terkait lokasi, jenis produk, modal, omzet dan pegawai)	Kegiatan	1	1	100,00%	75,00	71,50	95,33%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Meningkatnya kapasitas dan kualitas tenaga kerja	kegiatan	2	2	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Papan Nama Kelurahan Bendungan	Kegiatan	1	1	100,00%	15,27	15,22	99,65%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN BAGENDUNG)						1.455,94	1.406,30	96,59%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	72	72	100,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	99,99	108,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terpenuhinya Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Bulan	12	12	100,00%	88,20	88,19	99,99%
Dukungan pencapaian kota sehat	Tersedianya Dukungan pencapaian kota sehat	Keg	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Tersedianya Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Bln	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Tersedianya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	734,15	734,11	99,99%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terpenuhinya Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Bln	12	12	100,00%	141,65	141,65	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Bln	12	12	100,00%	15,00	15,00	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Tersedianya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Keg	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Keg	1	1	100,00%	80,00	64,68	80,85%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Keg	1	1	100,00%	45,00	44,84	99,63%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	bln	12	12	100,00%	85,00	84,99	99,99%
Dukungan Program Iklim	Tersedianya Program Kampung Iklim / Pengadaan dan Penanaman Pohon	Paket	50	50	100,00%	43,94	43,76	99,59%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Tersedianya Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tersedianya Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Keg	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tersedianya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Keg	1	1	100,00%	44,00	43,95	99,89%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Tersedianya Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Keg	1	1	100,00%	39,00	5,13	13,14%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terpenuhinya Pemasangan papan Nama Kelurahan	Paket	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN KETILENG)						1.323,17	1.214,66	91,80%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	72	72	100,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	100	108,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Tersedianya kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kegiatan	6	6	94,04%	97,80	90,25	92,28%
Dukungan pencapaian kota sehat	Tersedianya dukungan pencapaian kota sehat	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	37,05	74,09%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Tersedianya Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	24,00	96,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Tersedianya pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	520,25	519,90	99,93%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Tersedianya pemasangan plang nama jalan lingkungan kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	28,40	94,67%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tersedianya fasilitasi koordinasi kelembagaan masyarakat (RT/RW/LPM)	Kegiatan	1	1	100,00%	156,95	156,95	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersedianya peningkatan kualitas layanan publik (simpul paten)	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	12,36	82,40%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Tersedianya peningkatan kualitas data kewilayahan	Kegiatan	1	1	100,00%	5,23	5,23	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya peningkatan sarpras pelayanan publik	Kegiatan	1	1	92,83%	59,00	49,32	83,59%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Tersedianya pembuatan papan nomor rumah	Kegiatan	1	1	94,23%	15,00	14,14	94,23%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	91,33%	45,00	41,10	91,33%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Tersedianya fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	85,00	62,58	73,62%
Dukungan Program Iklim	Tersedianya dukungan program iklim	kegiatan	1	1	100,00%	50,00	38,90	77,79%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Tersedianya fasilitasi peningkatan kegiatan kepemudaan	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	17,44	69,76%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tersedianya fasilitasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	9,90	66,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tersedianya fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	43,60	87,20%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Tersedianya peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	41,87	83,73%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Tersedianya pemasangan papan nama kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	28,94	21,70	74,98%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN CIWEDUS)						1.441,36	1.423,52	98,76%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	72	72	100,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	100	108,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	bln	12	12	100,00%	136,62	135,89	99,46%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya kegiatan dukungan pencapaian kota sehat	keg	4	4	100,00%	40,00	39,50	98,75%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya kegiatan peningkatan fungsi dan peran PKK kelurahan	keg	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	Titik/Lokasi	10	10	100,00%	468,20	468,20	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemasangan plang nama jalan lingkungan kelurahan	paket	1	1	100,00%	30,00	29,70	99,00%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya kegiatan fasilitasi koordinasi kelembagaan masyarakat (RT/RW/LPM)	bln	12	12	100,00%	311,60	305,60	98,07%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas layanan publik (simpul paten)	bln	12	12	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas data kewilayahan	keg	6	6	100,00%	26,00	25,95	99,81%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terlaksananya kegiatan peningkatan sarpras pelayanan publik	keg	4	4	100,00%	80,00	79,34	99,18%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum /Pengadaan CCTV	keg	1	1	100,00%	45,00	44,55	99,00%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan	Terlaksananya kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan	keg	6	6	100,00%	80,00	78,70	98,38%
Dukungan Program Iklim	Terlaksananya kegiatan dukungan program iklim	keg	1	1	100,00%	50,00	49,95	99,90%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kegiatan kepemudaaan	keg	2	2	100,00%	20,00	20,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya kegiatan gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	keg	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya kegiatan fasilitas peningkatan perekonomian masyarakat kelurahan	keg	5	5	100,00%	50,00	49,89	99,78%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja	keg	1	1	100,00%	26,00	20,50	78,85%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemasangan papan nama kelurahan	unit	1	1	90,45%	22,94	20,75	90,45%

Salah satu indikator keberhasilan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yaitu Tingkat kinerja pelayanan perangkat kecamatan rata-rata realisasi kinerja capaiannya 100%. Hal ini didukung oleh beberapa faktor yang mendorong tercapainya tujuan dan sasaran indikator beberapa kegiatan didalamnya diantaranya meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di setiap perangkat Kecamatan dan Kelurahan dengan nilai kinerja pemerintah daerah (SKPD) LAKIP secara keseluruhan dengan nilai predikat B, meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan Kecamatan dan Kelurahan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan/Musrenbang, terfasilitasinya kegiatan keagamaan, kepemudaaan dan sosial serta meningkatnya pembinaan, pemeliharaan dan penegakkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kualitas pelayanan publik.

Ketercapaian Progam Teknis DPWkel Per Kelurahan

1. **Kelurahan Bendungan** OPD Kecamatan Cilegon terkait Belanja Kegiatan Penyediaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan Alokasi Anggaran Rp. 462.990.000,- target capaian kinerja sebesar 92 %, yang terealisasi Rp. 462.980.400 (100 %) dengan uraian kegiatan yaitu Pembangunan Posyandu berjumlah 1 Unit,Pembangunan Drainase Plat Duikeer di lingkungan RT wilayah kelurahan Bendungan.
2. **Kelurahan Ciwedus** OPD Kecamatan Cilegon terkait Belanja Kegiatan Penyediaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan Alokasi Anggaran Rp. 468.200.000,- target capaian kinerja sebesar 92 %, yang terealisasi Rp. 468.200.000, (100 %) dengan uraian kegiatan yaitu Pembangunan Drainase,Pembangunan Paving Blok,Pembangunan Tembok Penahan Tanah,Normalisasi saluran dilingkungan RT/RW wilayah Kelurahan Ciwedus.

3. **Kelurahan Ketileng** OPD Kecamatan Cilegon terkait Belanja Kegiatan Penyediaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan Alokasi Anggaran Rp. **520.250.000,-** target capaian kinerja sebesar 92 %, yang terealisasi Rp. **519.900.500,-** (99,93 %) dengan uraian kegiatan yaitu Pembangunan Paving Blok,Pembangunan Drainase,Pembangunan Rehab Rumah,Pembangunan Pagar Kuburan dilingkungan RT/RW wilayah Kelurahan Ketileng.
4. **Kelurahan Ciwaduk** OPD Kecamatan Cilegon terkait Belanja Kegiatan Penyediaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan Alokasi Anggaran Rp. 584.150.000,- target capaian kinerja sebesar 92 %, yang terealisasi Rp. 584.150.000,- (100 %) dengan uraian kegiatan yaitu Pembangunan Drainase,Pembangunan Paving Blok, Pembangunan Gapura Merah Putih,Pembangunan Pos Ronda,Pembangunan RTLH, Rehabilitasi Mushola,Pembangunan Pagar Kuburan,Pembangunan Posyandu, dan Normalisasi Saluran dilingkungan RT/RW Wilayah Kelurahan Ciwaduk.
5. **Kelurahan Bagendung** OPD Kecamatan Cilegon terkait Belanja Kegiatan Penyediaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan Alokasi Anggaran Rp. **734.150.000,-** target capaian kinerja sebesar 92 %, yang terealisasi Rp. **734.113.000,-** (99,99 %) dengan uraian kegiatan yaitu Pembangunan Drainase,Pembangunan Paving Blok,Pembangunan Gapura Merah Putih,Pembangunan Pos Ronda,Pembangunan RTLH,Rehabilitasi Mushola,Pembangunan Pagar Kuburan,Pembangunan Posyandu, dan Normalisasi Saluran dilingkungan RT/RW Wilayah Kelurahan Bagendung.

Tabel B.10a.1
Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWKel Tahun 2019 Tahun
Kecamatan Cilegon

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	DRAINASE	44,30	672,06	M3	CIWADUK	CILEGON
2	TPT	0,00	0,00	M3	CIWADUK	CILEGON
3	PAVING BLOK	142,85	2689,33	M2	CIWADUK	CILEGON
4	POSYANDU	1,00	2,00	UNIT	CIWADUK	CILEGON
5	RTLH	6,00	11,00	UNIT	CIWADUK	CILEGON
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	CIWADUK	CILEGON
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	3,00	3,00	UNIT	CIWADUK	CILEGON
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	CIWADUK	CILEGON
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	1,00	1,00	PAKET	CIWADUK	CILEGON
10	NORMALISASI SALURAN	1,00	1,00	LOKASI	CIWADUK	CILEGON
1	DRAINASE	132,15	734,44	M3	BENDUNGAN	CILEGON
2	TPT	0,00	0,00	M3	BENDUNGAN	CILEGON
3	PAVING BLOK	0,00	2421,51	M2	BENDUNGAN	CILEGON
4	POSYANDU	1,00	2,00	UNIT	BENDUNGAN	CILEGON
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	BENDUNGAN	CILEGON



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	BENDUNGAN	CILEGON
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	BENDUNGAN	CILEGON
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	BENDUNGAN	CILEGON
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	BENDUNGAN	CILEGON
10	NORMALISASI SALURAN	0,00	0,00	LOKASI	BENDUNGAN	CILEGON
1	DRAINASE	92,50	394,62	M3	BAGENDUNG	CILEGON
2	TPT	289,40	896,68	M3	BAGENDUNG	CILEGON
3	PAVING BLOK	1115,80	4405,03	M2	BAGENDUNG	CILEGON
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	BAGENDUNG	CILEGON
5	RTLH	8,00	8,00	UNIT	BAGENDUNG	CILEGON
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	BAGENDUNG	CILEGON
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	BAGENDUNG	CILEGON
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	BAGENDUNG	CILEGON
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	BAGENDUNG	CILEGON
10	NORMALISASI SALURAN	0,00	0,00	LOKASI	BAGENDUNG	CILEGON
1	DRAINASE	248,44	967,53	M3	KETILENG	CILEGON
2	TPT	0,00	0,00	M3	KETILENG	CILEGON
3	PAVING BLOK	818,14	2293,79	M2	KETILENG	CILEGON
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	KETILENG	CILEGON
5	RTLH	1,00	5,00	UNIT	KETILENG	CILEGON
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	KETILENG	CILEGON
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	KETILENG	CILEGON
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	KETILENG	CILEGON
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	KETILENG	CILEGON
10	NORMALISASI SALURAN	0,00	0,00	LOKASI	KETILENG	CILEGON
1	DRAINASE	139,00	457,45	M3	CIWEDUS	CILEGON
2	TPT	84,70	596,89	M3	CIWEDUS	CILEGON
3	PAVING BLOK	860,40	3676,38	M2	CIWEDUS	CILEGON
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	CIWEDUS	CILEGON
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	CIWEDUS	CILEGON
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	CIWEDUS	CILEGON
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	CIWEDUS	CILEGON
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	CIWEDUS	CILEGON
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	CIWEDUS	CILEGON
10	NORMALISASI SALURAN	2,00	2,00	LOKASI	CIWEDUS	CILEGON
1	DRAINASE	656,39	3226,09	M3	JUMLAH	CILEGON
2	TPT	374,10	1493,57	M3	JUMLAH	CILEGON
3	PAVING BLOK	2937,19	15486,03	M2	JUMLAH	CILEGON
4	POSYANDU	2,00	4,00	UNIT	JUMLAH	CILEGON
5	RTLH	15,00	24,00	UNIT	JUMLAH	CILEGON
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	JUMLAH	CILEGON
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	3,00	3,00	UNIT	JUMLAH	CILEGON
8	PEMAGARAN MAKAM	2,00	2,00	UNIT	JUMLAH	CILEGON
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	1,00	1,00	PAKET	JUMLAH	CILEGON
10	NORMALISASI SALURAN	3,00	3,00	LOKASI	JUMLAH	CILEGON

Permasalahan



1. Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait baik internal dan eksternal dan kegiatan yang berkoordinasi dengan provinsi.
2. Kurangmaksimalnya pelaksanaan kegiatan keterkaitan dengan uraian kebutuhan belanja.
3. Masih terdapat Uraian Belanja melebihi harga satuan dalam SSH
4. Kegiatan langsung dilaksanakan oleh Tim Kota Untuk Kegiatan Dukungan Pencapaian Kota Sehat.
5. Keterlambatan tagihan Premi Asuransi BPJS dan menunggak pembayaran Premi BPJS Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Pemeliharaan Kesehatan

Solusi

1. Melakukan Rapat Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait dan provinsi
2. Supaya ditingkatkan pembinaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kompetensinya dan lebih ditingkatkan bimbingan teknis dalam hal pengelolaan administrasi dokumen dalam perencanaan;
3. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi sehingga terselenggaranya kegiatan yang maksimal .
4. Di Anggarkan pada Perubahan Anggaran 2020.
5. Melakukan Konsultasi/Koordinasi dengan pihak BPJS keterkaitan pembayaran Jasa Jaminan/Pemeliharaan Kesehatan premi BPJS..



A.10b KECAMATAN CIBEBER

Tabel B.10b

Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Cibeber beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KECAMATAN CIBEBER)						1.153,73	1.147,93	99,50%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%	92	99,63	108,29%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	77,22	83,93%			
Penyusunan Profil Kecamatan	Terlaksananya penyusunan profil kecamatan	Dokumen	1	1	100,00%	3,16	3,16	100,00%
Pembinaan Administrasi Kelurahan	Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan	Kegiatan	1	1	83,57%	13,15	10,99	83,57%
Pelaksanaan Jumat Bersih Kecamatan	Terlaksananya Jumat Bersih	Kegiatan	11	11	100,00%	22,47	22,47	100,00%
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan MTQ Kota Cilegon Tk. Kecamatan Cibeber	Kegiatan	1	1	100,00%	106,67	105,52	98,92%
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	54,59	54,59	100,00%
Pelaksanaan Musrenbangcam	Terlaksananya musrenbangcam	Kegiatan	1	1	100,00%	33,67	33,61	99,85%
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	Terlaksananya penindakan pelanggaran perda dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100,00%	34,44	33,84	98,26%
Penyelenggaraan Paten	Terlaksananya penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Cibeber	Bulan	12	12	100,00%	183,00	183,00	100,00%
Pengajian Rutin	Terlaksananya Pengajian Rutin	Bulan	12	12	100,00%	149,40	149,40	100,00%
Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN	Terlaksananya PHBI, PHBN & PHBD	Kegiatan	8	8	100,00%	338,89	337,45	99,57%
Pembinaan Kewilayahan Kecamatan	Terbinanya wilayah kecamatan	Kegiatan	6	6	100,00%	19,80	19,80	100,00%
Lomba Kelurahan	Terlaksananya Lomba Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	15,95	15,90	99,69%
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMKA)	Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika	Kegiatan	12	12	100,00%	57,45	57,45	100,00%
Dialog/audiensi dengan Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya dialog/audiensi dengan Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial & Tokoh Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	75,00	74,84	99,78%
Penataan Lingkungan	Lingkungan Kecamatan yang tertata	Kegiatan	1	1	100,00%	46,09	45,90	99,60%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN KEDALEMAN)						1.521,75	1.464,13	96,21%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%	92	99,63	108,29%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	77,22	83,93%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terbinanya SATLINMAS Kelurahan Kedaleman	Bulan	12	12	100,00%	129,00	128,02	99,24%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Dukungan pencapaian kota sehat	Tercapainya Masyarakat Kelurahan Kedaleman yang Sehat	Keg	3	3	100,00%	50,00	48,75	97,51%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Meningkatnya Kegiatan PKK Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	25,81	25,81	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terpenuhinya Aspirasi Masyarakat Kelurahan	Paket	5	5	100,00%	566,35	563,02	99,41%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tersalurkannya Honor RT/RW dan LPM	Bulan	12	12	100,00%	267,65	267,60	99,98%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Bulan	12	12	100,00%	30,00	16,25	54,17%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Keg	3	3	100,00%	30,00	16,52	55,08%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terpenuhinya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik Kelurahan	Keg	2	2	100,00%	80,00	79,73	99,66%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	1	1	100,00%	45,00	44,98	99,96%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terciptanya Sinergitas antara Masyarakat dan unsur pemerintahan kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	85,00	76,02	89,44%
Dukungan Program Iklim	Terciptanya Kondisi Kebersihan Sekitar Kantor Kelurahan	Keg	12	12	100,00%	50,00	35,73	71,45%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Keg	3	3	100,00%	25,00	24,93	99,73%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	Keg	1	1	100,00%	15,00	14,76	98,40%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Keg	3	3	100,00%	50,00	49,81	99,62%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja	Keg	3	3	100,00%	50,00	49,73	99,45%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya Pemasangan papan Nama Kelurahan	Buah	40	40	100,00%	22,94	22,47	97,93%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN KALITIMBANG)						1.568,94	1.523,48	97,10%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	92	99,63	108,29%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	77,22	83,93%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Monitoring Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Kelurahan	bulan	12	12	100,00%	85,40	85,34	99,93%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya Dukungan pencapaian kota sehat	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	46,47	92,93%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya kegiatan rutin PKK kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Pembangunan TPT, Drainase, Paving Block, Rehab/ Pembangunan Posyandu dan Normalisasi Gorong-gorong	Paket	1	1	100,00%	746,15	746,10	99,99%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Tersedianya Plang Nama Jalan Lingkungan Kelurahan	Unit	40	40	100,00%	30,00	29,40	98,00%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tersedianya Fasilitas koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tahun	1	1	100,00%	179,45	179,45	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersedianya Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan	Paket	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Tersedianya Profil Kelurahan Kalitimbang	Dokumen	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Ruang Pelayanan Publik Kelurahan Yang Representatif	Paket	1	1	100,00%	80,00	63,67	79,58%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Ketertiban dan Keamanan Umum	Paket	1	1	100,00%	45,00	40,91	90,91%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terlaksananya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Kegiatan	7	7	100,00%	74,50	71,53	96,01%
Dukungan Program Iklim	Terlaksananya Dukungan Program Iklim	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	46,00	92,00%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Tersedianya Fasilitas Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	3	3	100,00%	25,00	24,27	97,07%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	10,68	71,17%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	2	2	100,00%	43,44	43,23	99,52%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	42,20	84,40%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya Pemasangan papan Nama Kelurahan	Paket	1	1	100,00%	25,00	24,25	97,00%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN KARANG ASEM)						1.759,66	1.718,99	97,69%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	92	99,63	108,29%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	77,22	83,93%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Tersedianya kebutuhan operasional RT/RW di Wilayah Kelurahan Karang Asem	Bulan	12	12	100,00%	138,60	133,78	96,52%
Dukungan pencapaian kota sehat	Tersedianya Dukungan Pencapaian Kota Sehat	Tahun	1	1	100,00%	50,00	47,55	95,10%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PKK di Kelurahan Karang Asem	Tahun	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	803,26	793,34	98,76%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Tersedianya fasilitas pemasangan plang nama jalan lingkungan Kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	30,00	29,06	96,87%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tersedianya kebutuhan operasional RT dan RW di Wilayah Kelurahan Karang Asem	Bulan	12	12	100,00%	229,85	229,85	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terpenuhinya peningkatan kualitas layanan publik (simpul paten)	Tahun	1	1	100,00%	15,00	14,96	99,70%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Tercapainya peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Tahun	1	1	100,00%	30,00	29,93	99,76%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya ruangan pelayanan publik yang representatif	%	100	100	100,00%	80,00	76,43	95,54%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Terpenuhinya Pembuatan Papan Nomor Rumah	Tahun	1	1	100,00%	15,00	14,87	99,13%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terpenuhinya sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tahun	1	1	100,00%	45,00	42,79	95,08%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan PHBI/PHBN	tahun	1	1	100,00%	85,00	80,99	95,28%
Dukungan Program Iklim	Tersedianya dukungan program kampung iklim	tahun	1	1	100,00%	50,00	46,05	92,10%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Tersedianya fasilitasi peningkatan kegiatan kepemudaan	tahun	1	1	100,00%	25,00	24,85	99,39%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tersedianya Fasilitasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	tahun	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karang Asem	tahun	1	1	100,00%	50,00	48,94	97,88%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	42,68	85,35%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya Pemasangan papan Nama Kelurahan	%	100	100	100,00%	22,94	22,94	99,99%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN CIKERAI)						1.601,94	1.579,65	98,61%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	92	99,63	108,29%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	77,22	83,93%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Tersedianya Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kegiatan	1	1	100,00%	85,80	85,48	99,62%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terpenuhinya dukungan pencapaian kota sehat	Kegiatan	4	4	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Tersedianya peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terpenuhinya pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	813,25	811,38	99,77%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terpenuhinya Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	28,99	96,62%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tersedianya operasioln RT/RW/LPM dan perangkatnya	Bulan	12	12	100,00%	129,95	123,65	95,15%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersediannya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Bulan	12	12	100,00%	15,00	15,00	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Tersedianya Informasi melalui website Kelurahan (Profil)	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	28,50	95,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Paket	3	3	100,00%	80,00	75,06	93,83%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jenis	5	5	100,00%	45,00	42,14	93,65%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	kegiatan	7	7	100,00%	85,00	85,00	100,00%
Dukungan Program Iklim	Tersedianya program dukungan Iklim	Tahun	1	1	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	kegiatan	2	2	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Fasilitas Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	50,00	49,70	99,40%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	48,16	96,32%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terpenuhinya pemasangan papan Nama kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	22,94	21,60	94,14%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN BULAKAN)						1.626,59	1.594,96	98,06%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	92	99,63	108,29%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	77,22	83,93%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terbinanya SATLINMAS Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	85,80	85,75	99,95%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya Dukungan Pencapaian Kota Sehat	Tahun	1	1	100,00%	50,00	45,26	90,52%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Fungsi dan Peranan PKK Kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	Paket	1	1	100,00%	808,45	808,45	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Plang Nama Jalan Lingkungan Kelurahan	Buah	35	35	100,00%	30,00	26,49	88,29%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Bulan	12	12	100,00%	179,40	179,38	99,99%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Orang	2	2	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Dokumen	1	1	100,00%	30,00	29,94	99,80%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Paket	1	1	100,00%	80,00	79,82	99,78%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Trantibum	Paket	1	1	100,00%	25,00	24,99	99,97%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Tersedianya Fasilitas Pelaksanaan PHBI, PHBN/D dan Majelis Taklim (Pengajian)	Kegiatan	6	6	100,00%	85,00	85,00	100,00%
Dukungan Program Iklim	Tersedianya Dukungan Program Iklim di Kelurahan Bulakan	Kegiatan	3	3	100,00%	50,00	49,98	99,95%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Tersediaanya Fasilitas Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Kegiatan	2	2	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tersedianya Fasilitas Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tahun	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tersedianya Dukungan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	3	3	100,00%	50,00	34,12	68,25%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Tersedianya Dukungan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	42,87	85,74%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Tersedianya Papan Nama Kelurahan	Paket	1	1	100,00%	22,94	22,91	99,87%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN CIBEBER)						1.450,44	1.422,27	98,06%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%	92	99,63	108,29%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	77,22	83,93%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Tersedianya Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kegiatan	12	12	100,00%	114,60	114,51	99,92%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya Dukungan Pencapaian Kota Sehat	Tahun	1	1	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Fungsi dan Peranan PKK Kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	Paket	1	1	100,00%	308,80	308,80	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Plang Nama Jalan Lingkungan Kelurahan	Unit	39	39	100,00%	30,00	29,77	99,23%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terselurkannya Honor RT/RW dan LPM	bulan	12	12	100,00%	454,10	454,10	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Tahun	1	1	100,00%	15,00	14,99	99,95%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Tahun	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	paket	1	1	100,00%	80,00	79,98	99,98%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	100,00%	45,00	44,98	99,95%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Terciptanya Sinergitas antara Masyarakat dan unsur pemerintahan kelurahan	bulan	12	12	100,00%	85,00	84,98	99,98%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Dukungan Program Iklim	Terciptanya Kondisi Kebersihan Sekitar Kantor Kelurahan	Kegiatan	12	12	100,00%	50,00	47,64	95,29%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	3	3	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	3	3	100,00%	50,00	49,89	99,78%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Kegiatan	2	1	50,00%	50,00	25,08	50,15%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Tersedianya Papan Nama Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	22,94	22,55	98,31%

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang berisi satu atau lebih indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan memperoleh alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah guna mendukung kegiatan non generik (program teknis) dalam memenuhi kebutuhan kegiatan teknis yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Program tersebut, merupakan strategi yang dicanangkan agar mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya dibuat kebijakan berupa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Cibeber agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana berpedoman berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Kecamatan Cibeber untuk tetap berkomitmen dengan terus meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepuasan publik.

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel);
2. Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan.

Adapun capaian program dari beberapa indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program untuk

mengukur proporsi ketercapaian pelaksanaan realisasi anggaran Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) dengan target anggaran Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) yang dana penggunaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon guna membiayai pembangunan sarana dan prasarana lokal di lingkungan Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut diatas, merupakan sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Kota untuk mengalokasikan anggaran 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi DAK, kepada Kelurahan. Sehingga sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cilegon untuk menginisiasi program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan yang bersumber dari APBD. Adapun tujuan diberikannya Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) ini agar meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan daerah dan mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk mengetahui Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) pada Kelurahan Se-Kecamatan Cibeber yang merupakan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan maka diperlukan perumusan atau perhitungannya yaitu; jumlah realisasi anggaran DPWKel dibagi per anggaran DPWKel dikali 100% (seratus) persen. Maka jumlah total pagu anggaran DPWKel yang terealisasi Pada Kelurahan Se-Kecamatan Cibeber sebesar Rp. 4.031.099.050,- dibagi jumlah total pagu per anggaran DPWKel pada Kelurahan Se-Kecamatan Cibeber sebesar Rp. 4.046.264.000,- dikali 100% (seratus) persen, maka capaiannya 99,63%. Sehingga Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) realisasi kinerjanya mencapai 99,63%, dari yang ditargetkan 92%, maka capaiannya 108,29%. Ketercapaian tersebut, telah melebihi dari yang ditargetkan dan dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum ataupun pembangunan infrastruktur/peningkatan jalan lingkungan. Hal ini dikarenakan terjalannya kerjasama yang baik kelompok masyarakat dalam melaksanakan pembangunan seperti; Drainase, Paving Blok/Conblok, Normalisasi Saluran Air/Gorong-Gorong, Tembok Penahan Tanah (TPT), Pos Kamling/Ronda, Gapura Merah Putih, Rehabilitasi Musholla/Masjid, Posyandu, Rutilahu, Pemagaran Makam/Kuburan. Sehingga diharapkan masyarakat Kota Cilegon secara bersama-sama dapat menjaga, memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan yang telah terbangun Pemerintah Daerah Kota Cilegon untuk kepentingan umum.

2. Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program untuk mengukur tingkat persentase dari beberapa jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Cibeber yang telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat dijadikan sebagai serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas perangkat daerah, yang berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh aparatur untuk melaksanakan/menyelenggarakan tugas pekerjaannya. Sehingga dalam Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebuah keharusan sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Selain itu juga, dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Maka Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ini bertujuan agar kinerja pemerintah daerah dapat berjalan secara tertib, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk mengetahui Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan, diperlukan perumusan atau perhitungannya yaitu; jumlah pelayanan yang memiliki SOP dibagi per jumlah pelayanan yang ada di Kecamatan dikali 100% (seratus) persen. Kecamatan Cibeber mempunyai 2 (dua) jenis pelayanan yaitu; Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan, maka pelayanan yang ada pada Kecamatan Cibeber yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 17 SOP dari 22 Pelayanan yang ada pada unit kerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Cibeber dengan capaiannya 77,27%. Adapun Pelayanan Perizinan yang mempunyai SOP sebanyak 9 (sembilan) pelayanan, meliputi : SOP Pelayanan Surat Pengantar Rekomendasi Izin Menara Telekomunikasi, SOP Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), SOP Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), SOP Prosedur Pelayanan Pemberian Izin Pendidikan, SOP Pelayanan Pemberian Izin Pemasangan Reklame, SOP Pelayanan Pemberian Izin Penyelenggaraan Hiburan Keliling, SOP Pelayanan Izin Usaha Mikro Kecil (SIUM & K), SOP Pemberian Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL), SOP Pelayanan Rekomendasi Izin Keramaian. Sedangkan untuk Pelayanan Non Perizinan yang mempunyai SOP sebanyak 8 (delapan), meliputi : SOP Pelayanan Administrasi Surat Pengantar SKCK, SOP Prosedur Pelayanan Surat Keterangan Pindah, SOP



Prosedur Pelayanan Surat Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan, SOP Pelayanan Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SOP Pelayanan Administrasi Pengantar Permohonan Pembuatan KK, SOP Pelayanan Pengantar Permohonan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang, SOP Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu. Maka dari beberapa jenis pelayanan yang memiliki SOP sebagian pelayanan akan dihapus dikarenakan adanya regulasi Peraturan Walikota Cilegon Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Keputusan Walikota Cilegon Nomor 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada DPMPTSP Kota Cilegon. Selanjutnya, maka Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Cibeber diperoleh realisasi kinerjanya mencapai 77,27%, dari yang ditargetkan 92%, maka capaiannya 83,99%. Sehingga ketercapaian tersebut, berhasil membuat Standar Operasional Prosedur pada setiap jenis pelayanan yang ada untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk tertulis dalam melaksanakan tugas aparatur guna meningkatkan kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Cibeber agar dapat berjalan secara efektif, efisien, tertib dan teratur yang berdampak pada meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Terdapat beberapa kegiatan Kecamatan Cibeber yang capaian kinerja atau capaian realisasi anggarannya di bawah 80%, diantaranya :

1. Kegiatan Pengadaan Lahan Masuk (Akses) Kantor Kelurahan Kedaleman. Kegiatan tersebut tidak direalisasikan dengan ketercapaian 0,00%, dikarenakan status tanah belum jelas sehingga anggaran dialihkan ke kegiatan lainnya. Sehingga tindak lanjutnya agar anggaran dialokasikan ke kegiatan pendukung pelayanan pemerintahan;

Sedangkan untuk Kelurahan Se-Kecamatan Cibeber, terdapat beberapa kegiatan yang capaian kinerja atau capaian realisasi anggarannya di bawah 80%, diantaranya :

Kelurahan Kedaleman kegiatan di bawah 80%, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten). Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya kualitas layanan publik (Simpul Paten) dengan meningkatkan kebutuhan seragam pegawai berupa batik tradisional atau batik biasa untuk mengikuti acara kegiatan Replikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 12 Bulan dari yang ditargetkan 12 Bulan, dengan penyerapan anggarannya mencapai 54,17%.

Rendahnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan Kegiatan Replika Sistem Informasi Pelayanan Publik tidak dilaksanakan secara maksimal;

2. Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan. Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya data kewilayahan Kelurahan dengan melaksanakan pendataan agar tersusunnya Profil Kelurahan. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 3 Kegiatan dari yang ditargetkan 3 Kegiatan, dengan penyerapan anggarannya mencapai 55,08%. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan kurangnya kesiapan dari personil pendataan kewilayahan untuk menyebarkan cetak blangko/form guna memperbaharui data pendukung profil pencacahan penduduk;
3. Dukungan Program Iklim. Kegiatan ini bertujuan agar terciptanya kondisi lingkungan kelurahan Kedaleman yang bersih, hijau dan asri dengan melaksanakan kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan dan penanaman bibit tanaman. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 12 Kegiatan dari yang ditargetkan 12 Kegiatan, dengan penyerapan anggarannya mencapai 71,45%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan makan dan minum untuk kegiatan kebersihan lingkungan yang tidak diserap disebabkan keterlambatan dalam mengajukan SPJ mamin tersebut.

Kelurahan Kalitimbang kegiatan di bawah 80%, sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik. Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya ruangan pelayanan publik Kelurahan yang representatif dengan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk masyarakat Kelurahan Kalitimbang. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 1 Paket dari yang ditargetkan 1 Paket, dengan penyerapan anggarannya mencapai 79,58%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak diserap, adanya kode rekening belanja modal menurut BPKAD Kota Cilegon yang bukan termasuk hal tersebut tetapi masuk ke belanja habis pakai. Sehingga tindak lanjutnya agar dikoordinasikan kepada pihak BPKAD Kota Cilegon mengenai kode rekening yang dimaksudkan;
2. Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan agar tercapainya Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kegiatan ini realisasi kinerjanya 1 Kegiatan dari yang ditargetkan 1 Kegiatan dan penyerapan anggarannya mencapai 71,17%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak dilaksanakan terutama untuk honor pendamping tidak dipergunakan. Sehingga tindak lanjutnya honor dana pendampingan tidak dialokasikan.

Kelurahan Cikerei kegiatan di bawah 80%, sebagai berikut :

1. Pembuatan Papan Nomor Rumah. Kegiatan ini bertujuan untuk tertib dan tertatanya data penomoran rumah warga sebagai petunjuk arah alamat rumah warga/masyarakat di lingkungan RT/RW Kelurahan Cikerei dengan menyediakan cetak papan nomor rumah. Kegiatan tersebut tidak direalisasikan dengan ketercapaian 0,00%, dikarenakan kegiatan dialihkan dikarenakan sudah terpenuhi. Sehingga kedepannya tidak dianggarkan.

Kelurahan Bulakan kegiatan di bawah 80%, sebagai berikut :

1. Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan dengan memfasilitasi berbagai kegiatan agar masyarakat dapat menambah wawasan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan khusus, baik itu melalui kegiatan bimbingan teknis ataupun pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 2 Kegiatan dari yang ditargetkan 3 Kegiatan, dengan penyerapan anggarannya mencapai 68,25%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak dilaksanakan terutama untuk Kegiatan Pelatihan Membatik tidak dilaksanakan hal ini adanya kebijakan penganggaran dan pengalokasiannya tidak sesuai dengan sasaran Uang Persediaan. Sehingga tindak lanjutnya agar definisi operasional perhitungan dan tema kegiatan akan lebih dipertimbangkan.

Kelurahan Cibeber kegiatan di bawah 80%, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja, Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan tenaga kerja agar dapat mengembangkan keahliannya supaya dapat meningkatkan kualitas dan dapat bersaing dengan dunia usaha dan dunia industri dengan menyelenggarakan pelatihan pengelasan ataupun pelatihan pertukangan kepada masyarakat Kelurahan Cibeber. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 1 Kegiatan dari yang ditargetkan 2 Kegiatan, dengan penyerapan anggarannya mencapai 50,15%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka program dan kegiatan dapat dilaksanakan sangat baik, untuk ketercapaian kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan rata-rata realisasi kinerjanya mencapai 96,14%. Sedangkan realisasi anggarannya mencapai 97,91%. Maka dapat disimpulkan berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diselenggarakan Kecamatan Cibeber dan Kelurahan secara professional dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan publik baik itu dari segi aspek pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan ketertiban umum dengan mengoptimalkan kinerja aparatur agar meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel B.10b.1
Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWkel 2017-2019
Kecamatan Cibeber

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	DRAINASE	137,79	3431,14	M3	BULAKAN	CIBEBER
2	TPT	274,90	606,40	M3	BULAKAN	CIBEBER
3	PAVING BLOK	566,00	3738,34	M2	BULAKAN	CIBEBER
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	BULAKAN	CIBEBER
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	BULAKAN	CIBEBER
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	BULAKAN	CIBEBER
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	4,00	4,00	UNIT	BULAKAN	CIBEBER
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	BULAKAN	CIBEBER
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	1,00	1,00	PAKET	BULAKAN	CIBEBER
10	NORMALISASI SALURAN	1,00	1,00	LOKASI	BULAKAN	CIBEBER
1	DRAINASE	0,00	179,30	M3	CIBEBER	CIBEBER
2	TPT	35,64	192,24	M3	CIBEBER	CIBEBER
3	PAVING BLOK	236,87	4265,26	M2	CIBEBER	CIBEBER
4	POSYANDU	0,00	1,00	UNIT	CIBEBER	CIBEBER
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	CIBEBER	CIBEBER
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	CIBEBER	CIBEBER
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	3,00	3,00	UNIT	CIBEBER	CIBEBER
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	CIBEBER	CIBEBER
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	1,00	1,00	PAKET	CIBEBER	CIBEBER
10	NORMALISASI SALURAN	3,00	3,00	LOKASI	CIBEBER	CIBEBER
1	DRAINASE	142,68	430,11	M3	CIKERAJ	CIBEBER
2	TPT	486,04	1856,97	M3	CIKERAJ	CIBEBER
3	PAVING BLOK	0,00	2200,36	M2	CIKERAJ	CIBEBER
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	CIKERAJ	CIBEBER
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	CIKERAJ	CIBEBER
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	CIKERAJ	CIBEBER
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	CIKERAJ	CIBEBER
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	CIKERAJ	CIBEBER
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	CIKERAJ	CIBEBER
10	NORMALISASI SALURAN	2,00	2,00	LOKASI	CIKERAJ	CIBEBER
1	DRAINASE	161,20	807,91	M3	KALITIMBANG	CIBEBER
2	TPT	438,00	1022,62	M3	KALITIMBANG	CIBEBER
3	PAVING BLOK	0,00	2482,86	M2	KALITIMBANG	CIBEBER
4	POSYANDU	1,00	1,00	UNIT	KALITIMBANG	CIBEBER
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	KALITIMBANG	CIBEBER
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	KALITIMBANG	CIBEBER
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	KALITIMBANG	CIBEBER
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	KALITIMBANG	CIBEBER
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	KALITIMBANG	CIBEBER
10	NORMALISASI SALURAN	1,00	1,00	LOKASI	KALITIMBANG	CIBEBER
1	DRAINASE	173,00	1017,68	M3	KARANG ASEM	CIBEBER
2	TPT	237,00	1099,98	M3	KARANG ASEM	CIBEBER
3	PAVING BLOK	1088,00	3439,90	M2	KARANG ASEM	CIBEBER
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	KARANG ASEM	CIBEBER
5	RTLH	7,00	7,00	UNIT	KARANG ASEM	CIBEBER

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	KARANG ASEM	CIBEBER
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	KARANG ASEM	CIBEBER
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	KARANG ASEM	CIBEBER
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	KARANG ASEM	CIBEBER
10	NORMALISASI SALURAN	0,00	0,00	LOKASI	KARANG ASEM	CIBEBER
1	DRAINASE	166,00	735,72	M3	KEDALEMAN	CIBEBER
2	TPT	0,00	422,39	M3	KEDALEMAN	CIBEBER
3	PAVING BLOK	338,48	2158,30	M2	KEDALEMAN	CIBEBER
4	POSYANDU	1,00	1,00	UNIT	KEDALEMAN	CIBEBER
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	KEDALEMAN	CIBEBER
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	KEDALEMAN	CIBEBER
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	3,00	3,00	UNIT	KEDALEMAN	CIBEBER
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	KEDALEMAN	CIBEBER
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	KEDALEMAN	CIBEBER
10	NORMALISASI SALURAN	2,00	2,00	LOKASI	KEDALEMAN	CIBEBER
1	DRAINASE	780,67	6601,86	M3	JUMLAH	CIBEBER
2	TPT	1471,58	5200,60	M3	JUMLAH	CIBEBER
3	PAVING BLOK	2229,35	18285,02	M2	JUMLAH	CIBEBER
4	POSYANDU	2,00	3,00	UNIT	JUMLAH	CIBEBER
5	RTLH	7,00	7,00	UNIT	JUMLAH	CIBEBER
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	JUMLAH	CIBEBER
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	10,00	10,00	UNIT	JUMLAH	CIBEBER
8	PEMAGARAN MAKAM	2,00	2,00	UNIT	JUMLAH	CIBEBER
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	2,00	2,00	PAKET	JUMLAH	CIBEBER
10	NORMALISASI SALURAN	9,00	9,00	LOKASI	JUMLAH	CIBEBER

Permasalahan

1. Keterbatasan kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Keterbatasan teknologi pendukung khususnya akses jaringan internet;
3. Adanya tumpang tindih titik kegiatan Infrastruktur dan Non- Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah lain tanpa koordinasi dengan Kecamatan, sehingga kalau ada permasalahan di masyarakat pihak Kecamatan tidak mengetahuinya;
4. Masih tingginya beban kerja Kecamatan dalam kegiatan Sosial Kemasyarakatan.

Solusi

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas/kualitas pegawai;
2. Perlu adanya penambahan akses teknologi jaringan internet.
3. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi antara Kecamatan dengan OPD lain yang akan melaksanakan kegiatan Infrastruktur dan Non-Infrastruktur agar bila ada persoalan di masyarakat dapat diselesaikan bersama;
4. Perlu adanya kegiatan Sosialisasi Kemasyarakatan pada program yang ada di Kecamatan sehingga terbentuknya sinergitas antara masyarakat, Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

A.10c KECAMATAN GROGOL

Tabel B.10c

Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Grogol beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KECAMATAN GROGOL)						1.013,20	998,33	98,53%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	100	100	100,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	71,43	79,37%			
Penyusunan Profil Kecamatan	Tersedianya Penyusunan Profil Kecamatan	kegiatan	1	1	100,00%	10,00	10,00	100,00%
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan	kegiatan	1	1	100,00%	70,09	68,47	97,69%
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	tahun	1	1	100,00%	39,00	38,99	99,97%
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pemandian Jenazah	kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Pelaksanaan Musrenbangcam	Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbangcam	kegiatan	1	1	100,00%	21,10	21,10	100,00%
Sosialisasi Narkoba dan Miras	Terlaksananya Sosialisasi Narkoba dan Miras	kegiatan	1	1	100,00%	12,00	12,00	100,00%
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	Terlaksananya Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	tahun	1	1	100,00%	10,00	10,00	100,00%
Penyelenggaraan Paten	Terlaksananya Penyelenggaraan PATEN	tahun	1	1	100,00%	190,35	190,35	100,00%
Pengajian Rutin	Terlaksananya Pengajian Rutin	tahun	1	1	100,00%	19,73	19,73	100,00%
Pelaksanaan Jumat Bersih	Terlaksananya Pelaksanaan Jumat Bersih	tahun	1	1	100,00%	12,00	12,00	100,00%
Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN	Terlaksananya Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN	tahun	1	1	100,00%	283,95	277,51	97,73%
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon	Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon	kegiatan	1	1	100,00%	130,00	129,28	99,44%
Pembinaan Ekonomi Kerakyatan Dan UMKM Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Ekonomi Kerakyatan dan UMK	kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Pembinaan Administrasi Pertanahan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pertanahan	kegiatan	1	1	100,00%	11,28	11,28	100,00%
Pembinaan Linmas	Terlaksananya Pembinaan Linmas	kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban	tahun	1	1	100,00%	15,00	9,90	66,00%
Lomba Kelurahan	Terlaksananya Lomba Kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan posyantek	kegiatan	1	1	100,00%	12,70	12,70	100,00%
Pendataan Sarana Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya Pendataan Sarana Sosial Kemasarakatan	kegiatan	1	1	100,00%	5,00	5,00	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan	kegiatan	1	1	100,00%	10,00	10,00	100,00%
Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat)	Terlaksananya Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat)	tahun	1	1	100,00%	16,00	16,00	100,00%
Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (Tomaliga)	Terlaksananya Peningkatan koordinasi kelembagaan masyarakat (Tomaliga)	kegiatan	1	1	100,00%	10,00	10,00	100,00%
Dialog/audiensi dengan Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Dialog/audiensi dengan Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat	kegiatan	1	1	100,00%	75,00	74,02	98,70%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN KOTASARI)						1.253,42	1.232,06	98,30%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	100	100	100,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	71,43	79,37%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Monitoring ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	bulan	12	12	100,00%	154,80	142,76	92,22%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya Dukungan Pencapaian Kota Sehat	kegiatan	1	1	100,00%	40,00	40,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Fungsi dan Peranan PKK kelurahan	tahun	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Sarana prasarana kewilayahan kelurahan swakelola	paket	1	1	100,00%	406,08	404,73	99,67%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya Pemasangan plang nama jalan lingkungan kelurahan	buah	40	40	100,00%	30,00	29,89	99,64%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya peningkatan koordinasi kelembagaan masyarakat (RT/RW/LPM)	bulan	12	12	100,00%	239,60	236,35	98,64%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terciptanya peningkatan kualitas layanan publik (simpul paten) di Kelurahan Kotasari	tahun	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terciptanya peningkatan kualitas data kewilayahan yang akurat dan transparan	dokumen	1	1	100,00%	20,00	20,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya layanan publik di lingkungan pemerintahan kelurahan	jenis	4	4	100,00%	30,00	29,81	99,37%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Tersedianya papan nomor rumah/bangunan warga di lingkungan kelurahan	lembar	1.000	1.000	100,00%	30,00	28,88	96,25%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya Peningkatan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang lebih baik dan aman	Jenis	2	2	100,00%	40,00	39,72	99,29%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terlaksananya Peningkatan fasilitas yang mendukung kualitas kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera	kegiatan	7	7	100,00%	75,00	74,88	99,83%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Dukungan Program Iklim	Terlaksanannya Dukungan Program Kampung Iklim	kegiatan	1	1	100,00%	30,00	29,11	97,03%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Terlaksanannya Peningkatan fasilitas yang mendukung kegiatan kepemudaan yang terampil	kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksanannya fasilitas peningkatan perekonomian masyarakat yang lebih sejahtera dan merata	kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksanannya fasilitas peningkatan perekonomian masyarakat yang lebih sejahtera dan merata	kegiatan	1	1	100,00%	35,00	34,58	98,80%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksanannya peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja guna meningkatkan perekonomian masyarakat di lingkungan kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terpasangnya Papan nama kelurahan kotasari	paket	1	1	100,00%	27,94	26,37	94,36%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN RAWA ARUM)						1.741,48	1.549,18	88,96%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	100	100	100,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	71,43	79,37%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksanannya Monitoring ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Tahun	1	1	100,00%	234,00	226,46	96,78%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksanannya Dukungan Pencapaian Kota Sehat	kegiatan	1	1	100,00%	50,00	45,94	91,88%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksanannya fungsi dan peran PKK Kelurahan	bulan	12	12	100,00%	25,00	24,09	96,38%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksanannya Peningkatan Saranan prasarana kewilayahan kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	670,74	657,59	98,04%
Pemasangan papan informasi pembangunan	Terlaksanannya Pemasangan Papan Informasi Pembangunan	kegiatan	1	1	100,00%	30,00	25,76	85,86%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksanannya Pemasangan plang nama jalan lingkungan kelurahan	titik	40	40	100,00%	30,00	28,70	95,65%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksanannya peningkatan koordinasi kelembagaan masyarakat (RT/RW/LPM)	Tahun	1	1	100,00%	288,80	247,65	85,75%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terciptanya peningkatan kualitas layanan publik (simpul paten) di Kelurahan	bulan	12	12	100,00%	15,00	2,33	15,52%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terciptanya peningkatan kualitas data kewilayahan yang akurat dan transparan	kegiatan	1	-	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya layanan publik di lingkungan pemerintahan kelurahan	paket	1	1	100,00%	50,00	48,76	97,52%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya Peningkatan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum ya lebih baik dan aman	Tahun	1	1	100,00%	45,00	44,41	98,69%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Terlaksananya Peningkatan fasilitas yang mendukung kualitas kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera	Tahun	1	1	100,00%	95,00	66,37	69,86%
Dukungan Program Iklim	Terlaksananya Dukungan Program kampung Iklim	kegiatan	1	1	100,00%	50,00	49,83	99,66%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya fasilitas peningkatan perekonomian masyarakat yang lebih sejahtera dan merata	kegiatan	1	1	100,00%	50,00	17,88	35,76%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja guna meningkatkan perekonomian masyarakat di lingkungan kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	50,00	39,80	79,60%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terpasangnya Papan nama kelurahan	paket	1	1	100,00%	27,94	23,62	84,53%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN GEREM)						1.865,94	1.825,54	97,83%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%	100	100	100,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	71,43	79,37%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Tersedianya Kegiatan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	bulan	12	12	100,00%	174,60	173,26	99,23%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	49,96	99,93%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PKK Kelurahan	Paket	1	1	100,00%	50,00	49,45	98,90%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Paving Block	Lokasi	4	4	100,00%	747,75	747,75	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya Pembuatan dan Pemasangan Plang Nama Jalan Lingkungan Kelurahan	Paket	1	1	100,00%	30,00	29,90	99,65%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tersedianya Kegiatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat RT/RW/LPM	Kelembagaan Masyarakat	3	3	100,00%	330,65	324,65	98,19%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersedianya Belanja Cetak dan ATK serta Pakaian Seragam Kegiatan Pelayanan Administrasi Kelurahan	paket	2	2	100,00%	10,00	9,99	99,85%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Tersedianya Kegiatan Pembuatan Website Kelurahan	paket	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Publik Kelurahan	tahun	1	1	100,00%	70,00	69,87	99,82%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Tersedianya Kegiatan Pembuatan Papan Nomor Rumah	paket	1	1	100,00%	30,00	29,81	99,35%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Alat Bantu Pemantauan Keamanan Lingkungan	paket	1	1	100,00%	45,00	44,56	99,02%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PHBI/PHBN	Kegiatan	8	8	100,00%	85,00	56,74	66,75%
Dukungan Program Iklim	Terlaksananya Kegiatan Jum'at Bersih	Bulan	11	11	100,00%	50,00	49,55	99,10%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Terlaksananya Kegiatan Keterampilan Menjahit	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Gerakan PATBM	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	49,67	99,34%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	49,33	98,65%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	22,94	21,06	91,79%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN GROGOL)						1.544,49	1.412,97	91,48%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	100	100	100,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	71,43	79,37%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terpenuhi Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	85,80	82,84	96,55%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya Dukungan pencapaian kota sehat	kegiatan	2	2	100,00%	50,00	35,96	71,92%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	tahun	1	1	100,00%	25,00	19,73	78,90%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya peningkatan sarana prasarana kewilayahan	paket	1	1	100,00%	806,50	789,99	97,95%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya ketertiban jalan lingkungan	kegiatan	1	1	100,00%	30,00	28,70	95,65%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya koordinasi kelembagaan	Tahun	1	1	100,00%	140,75	140,75	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya peningkatan kualitas layanan publik	Tahun	1	1	100,00%	13,50	6,95	51,48%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terpenuhi Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	11,73	39,08%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	paket	1	1	100,00%	80,00	61,82	77,27%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya peningkatan sarana prasarana ketertiban umum	Tahun	1	1	100,00%	45,00	44,36	98,58%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Terlaksananya peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	85,00	63,73	74,98%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	terlaksananya peningkatan kegiatan kepemudaan	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	23,00	92,00%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	45,70	91,40%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Tersempurnanya akan tenaga kerja lokal	kegiatan	1	1	100,00%	50,00	35,40	70,80%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terpasangnya Papan Nama Kelurahan Grogol	Titik	1	1	100,00%	27,94	22,32	79,89%

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan merupakan program teknis yang ada di Kecamatan, dimana program ini mempunyai target dengan 3 (tiga) indikator diantaranya :

1. Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan;
2. Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel).

Adapun capaian program berdasarkan 3 (tiga) indikator yang dapat dilaksanakan oleh Kecamatan Grogol pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Presentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Grogol dihitung berdasarkan pelayanan yang ada di Kecamatan sebanyak 7 (tujuh) pelayanan sesuai dengan aplikasi SIMAPAN, diantaranya :
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Kartu Keluarga;
 - Surat Pindah antar Kota/ Kabupaten;
 - SKCK;
 - SKTM;
 - Ijin Usaha Menengah Kecil (IUMK);
 - Surat Keterangan Daftar Usaha (SKDU).

Akan tetapi dari 7 (tujuh) pelayanan tersebut Kecamatan Grogol baru hanya bisa menerapkan 5 (lima) pelayanan sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh Kecamatan, diantaranya :

- Kartu Tanda Penduduk;
- Kartu Keluarga;
- Surat Pindah antar Kota/ Kabupaten;
- SKCK;
- SKTM;

Sehingga capaian Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan hanya terealisasi sebesar 71,43 % dari target 90 % dengan capaian 79,37 %.

2. Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel), diperoleh berdasarkan dari perhitungan realisasi kegiatan yang dilaksanakan : target kegiatan yang akan dilaksanakan x 100 %. Pada tahun 2019 ini, pelaksanaan pembangunan wilayah kelurahan DPWKel yang didanai melalui Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah

kelurahan sebanyak : 54 Kegiatan, dimana kegiatan tersebut terealisasi sebanyak 54 kegiatan atau dengan capaian 100 %, dengan penyerapan anggarannya sebagai berikut :

NO	NAMA WILAYAH	TARGET	CAPAIAN	%
1	DPWKEL GEREM	747.750.000.00,-	747.750.000.00,-	100
2	DPWKEL RAWAARUM	670.741.000.00,-	657.586.000.00,-	98
3	DPWKEL KOTASARI	406.077.000.00,-	404.727.000.00,-	100
4	DPWKEL GROGOL	806.500.000.00,-	789.993.000.00,-	98
JUMLAH		2.631.068.000,00,-	2.600.056.000,00,-	

Guna mengurangi tingkat penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka perlu adanya pemetaan permasalahan yang terjadi di tahun anggaran tersebut dan dicarikan solusinya agar hal tersebut tidak terulang di tahun anggaran berikutnya. Beberapa Kegiatan yang serapannya < 80 % dari target serta permasalahan yang dihadapi diantaranya :

KECAMATAN GROGOL

1. Kegiatan penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan, kegiatan ini pada tahun anggaran 2019 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 34.420.000,- akan tetapi pada pelaksanaannya hanya bisa terealisasi sebesar Rp. 11.016.000,- atau 68 %. Hal ini disebabkan karena untuk penyediaan jasa jaminan/ pemeliharaan kesehatan terdapat 2 alokasi anggaran, dimana dalam pelaksanaannya memprioritaskan dana yang bersumber dari alokasi dana DID, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya penyerapan anggaran untuk penyediaan jaminan/ pemeliharaan kesehatan yang bersumber dari APBD;
2. Kegiatan penyediaan jasa transaksi keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000,- akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya bisa terealisasi sebesar Rp. 90.000,- atau 18 %. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dilakukan sudah melalui proses non tunai dengan merujuk pada Peraturan Walikota Cilegon Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tatacara Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Secara Daring dan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
3. Kegiatan penyediaan jasa jaminan / pemeliharaan kesehatan (DID) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.478.471,- akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya bisa terealisasi sebesar Rp. 17.608.858,- atau 75%. Hal ini dikarenakan sebagian pegawai sudah dicover oleh keluarganya.
4. Kegiatan peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-, akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi sebesar Rp. 6.750.000,- atau 66 %. Hal ini disebabkan karena adanya Pembayaran honorarium melalui Non Tunai bagi Pegawai diluar Pemda



(Danramil, Kapolsek, dan Anggotanya) karena Buku rekening yang berbeda Bank yang mengakibatkan tidak terserapnya anggaran.

KELURAHAN KOTA SARI

1. Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan pagu anggaran Rp. 5.000.000,- akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi sebesar Rp. 3.500.000,- atau 70%, hal ini dikarenakan kode rekening yang ada didalam kegiatan ini adalah kode rekening kegiatan dalam daerah sehingga lingkup koordinasinya masih didalam lingkup kelurahan dan kecamatan saja yang tidak memerlukan SPPD untuk melaksanakannya.

KELURAHAN GROGOL

1. Kegiatan Dukungan Pencapaian Kota sehat Kelurahan Grogol dengan Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,-, akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi sebesar Rp. 35.960.000,- atau 71,92% hal ini disebabkan Pembayaran honorarium melalui Non Tunai bagi Pegawai diluar Pemda yang mengakibatkan tidak terserapnya anggaran.
2. Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan Grogol dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,- akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi sebesar Rp. 19.725.000,- atau 78,90% hal ini disebabkan Pembayaran honorarium melalui Non Tunai bagi pegawai diluar Pemda yang mengakibatkan tidak terserapnya anggaran.
3. Peningkatan kualitas Layanan publik (simpul paten) Kelurahan Grogol dengan pagu anggaran Rp. 13.500.000,- akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi sebesar Rp. 6.950.000,- atau 51,48% adapun yang tidak di serap atau hanya di serap 50% yaitu belanja cetak dan penggandaan dan belanja cetak spanduk.
4. Peningkatan kualitas data kewilayahan Kelurahan Grogol dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,- akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi sebesar Rp. 11.725.000,- atau 39,08% hal ini disebabkan belanja cetak yang tidak di serap sama sekali atau 0,00% dan belanja cetak spanduk dan mamin pelaksanaan kegiatan yang di serap hanya 50,56% di karenakan pembayaran mamin melalu non tunai.
5. Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik Kelurahan Grogol dengan pagu anggaran Rp. 80.000.000,- akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi Rp. 61.818.600, atau 64,78% hal ini disebabkan ada belanja jasa kantor dan belanja dekorasi yang tidak di serap sama sekali atau 0,00% dikarenakan kesulitan jasa penyedia yang tidak mempunyai rekening.
6. Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan Grogol dengan pagu anggaran Rp. 85.000.000,- akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi Rp. 63.734.000,- atau 74,98% hal ini disebabkan belanja barang jasa dan belanja bahan material yang di serap hanya 50,97 di akibatkan kesulitan jasa penyedia yang tidak memiliki rekening.

7. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja Kelurahan Grogol dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,- akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi Rp. 35.400.000,- atau 70,80% adapun yang tidak di serap yaitu, belanja barang dan jasa dan belanja pakai habis yang di serap hanya 37,74% dan belanja sertifikasi Rp.10.000.000,- yang tidak di serap sama sekali atau 0,00 dikarenakan jasa penyedia pembuatan sertifikat pelatihan tidak memiliki buku rekening.
8. Pemasangan Papan Nama Kelurahan Grogol dengan pagu anggaran Rp. 27.941.000,- akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi Rp.22.321.000,- atau 79,89.

KELURAHAN RAWA ARUM

1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul paten) Kelurahan Rawa Arum dengan pagu anggaran Rp.15.000.000,- akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi Rp. 2.328.000,- atau 15,52% hal ini dikarenakan adanya uraian kegiatan peningkatan kualitas layanan publik (simpul paten) yang belum sesuai dengan juknis ketika penyusunan DPA maka kegiatan tersebut belum bisa diserap sampai adanya tahapan anggaran perubahan, anggaran dapat di serap setelah adanya anggaran perubahan sehingga serapan anggarannya hanya Rp.2.328.000,- atau karena waktu penyerapan yang begitu singkat hal ini inilah yang menyebabkan serapan anggaran hanya 15,52%
2. Peningkatan Kualitas Data kewilayahan dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,- akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak di serap sama sekali atau 0,00% hal ini disebabkan adanya uraian kegiatan peningkatan kualitas data kewilayahan yang belum sesuai dengan juknis ketika penyusunan DPA maka kegiatan tersebut belum bisa di serap sampai adanya tahapan anggaran perubahan dan karena waktu penyerapan yang begitu singkat hal inilah yang menyebabkan anggaran tidak terserap.
3. Fasilitasi peningkatan kualitas Perekonomian Masyarakat Kelurahan Rawa Arum dengan pagu anggaran Rp, 50.000.000,- akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi Rp. 17.880.000,- atau 35,76% hal ini dikarenakan adanya kegiatan fasilitasi peningkatan perekonomian Masyarakat Kelurahan yang belum sesuai dengan juknis ketika penyusunan DPA maka kegiatan tersebut belum bisa sampai adanya tahapan anggaran perubahan, anggaran dapat di serap setelah adanya anggaran perubahan.
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja Kelurahan Rawa Arum dengan pagu anggaran Rp, 50.000.000,- akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi Rp.39.800.000,- atau 79,80% dikarenakan adanya uraian kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang belum sesuai dengan juknis ketika penyusunan DPA maka kegiatan tersebut belum bisa di serap sampai adanya tahapan anggaran perubahan.

KELURAHAN GEREM

1. Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan Kelurahan Gerem dengan pagu anggaran Rp.85.000.000,- akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi Rp.28.259.000,- atau 66,75% hal ini disebabkan belanja barang dan jasa hanya terserap 66,75% dan belanja dekorasi hanya 61,265 hal ini disebabkan karena pembayaran melalui Non Tunai

Solusi kedepan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali ditahun berikutnya, diantaranya :

1. Untuk kegiatan peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban, perlu dilakukan koordinasi yang intens dengan pihak terkait.
2. Untuk Kegiatan yang melibatkan Pegawai diluar Pemda akan di koordinasikan agar segera membuat Buku rekening Bank yang telah ditentukan.
3. Untuk Kegiatan jasa-jasa seperti jasa Dekorasi agar koordinasi dengan pihak penyedia agar membuat Buku rekening Bank.

Tabel B.10c.1
Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWkel 2019
Kecamatan Grogol

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	DRAINASE	18,14	315,63	M3	KOTASARI	GROGOL
2	TPT	158,85	326,68	M3	KOTASARI	GROGOL
3	PAVING BLOK	64,00	2127,87	M2	KOTASARI	GROGOL
4	POSYANDU	1,00	4,00	UNIT	KOTASARI	GROGOL
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	KOTASARI	GROGOL
6	JAMBAAN	0,00	0,00	UNIT	KOTASARI	GROGOL
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	KOTASARI	GROGOL
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	KOTASARI	GROGOL
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	KOTASARI	GROGOL
10	NORMALISASI SALURAN	3,00	3,00	LOKASI	KOTASARI	GROGOL
1	DRAINASE	32,27	253,75	M3	RAWA ARUM	GROGOL
2	TPT	0,00	324,74	M3	RAWA ARUM	GROGOL
3	PAVING BLOK	2298,69	7579,66	M2	RAWA ARUM	GROGOL
4	POSYANDU	0,00	1,00	UNIT	RAWA ARUM	GROGOL
5	RTLH	0,00	2,00	UNIT	RAWA ARUM	GROGOL
6	JAMBAAN	0,00	0,00	UNIT	RAWA ARUM	GROGOL
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	6,00	6,00	UNIT	RAWA ARUM	GROGOL
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	RAWA ARUM	GROGOL
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	1,00	1,00	PAKET	RAWA ARUM	GROGOL
10	NORMALISASI SALURAN	3,00	3,00	LOKASI	RAWA ARUM	GROGOL
1	DRAINASE	177,66	578,82	M3	GEREM	GROGOL
2	TPT	193,37	705,86	M3	GEREM	GROGOL
3	PAVING BLOK	930,27	5299,33	M2	GEREM	GROGOL
4	POSYANDU	1,00	1,00	UNIT	GEREM	GROGOL
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	GEREM	GROGOL
6	JAMBAAN	0,00	0,00	UNIT	GEREM	GROGOL
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	GEREM	GROGOL
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	GEREM	GROGOL
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	GEREM	GROGOL

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
10	NORMALISASI SALURAN	0,00	0,00	LOKASI	GEREM	GROGOL
1	DRAINASE	43,06	238,96	M3	GROGOL	GROGOL
2	TPT	182,08	748,69	M3	GROGOL	GROGOL
3	PAVING BLOK	416,81	4262,24	M2	GROGOL	GROGOL
4	POSYANDU	2,00	2,00	UNIT	GROGOL	GROGOL
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	GROGOL	GROGOL
6	JAMBA	0,00	0,00	UNIT	GROGOL	GROGOL
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	GROGOL	GROGOL
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	GROGOL	GROGOL
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	GROGOL	GROGOL
10	NORMALISASI SALURAN	2,00	2,00	LOKASI	GROGOL	GROGOL
1	DRAINASE	271,13	1387,16	M3	JUMLAH	GROGOL
2	TPT	534,30	2105,97	M3	JUMLAH	GROGOL
3	PAVING BLOK	3709,77	19269,10	M2	JUMLAH	GROGOL
4	POSYANDU	4,00	8,00	UNIT	JUMLAH	GROGOL
5	RTLH	0,00	2,00	UNIT	JUMLAH	GROGOL
6	JAMBA	0,00	0,00	UNIT	JUMLAH	GROGOL
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	6,00	6,00	UNIT	JUMLAH	GROGOL
8	PEMAGARAN MAKAM	3,00	3,00	UNIT	JUMLAH	GROGOL
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	1,00	1,00	PAKET	JUMLAH	GROGOL
10	NORMALISASI SALURAN	8,00	8,00	LOKASI	JUMLAH	GROGOL

Permasalahan

1. Kurangnya koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dimana masih banyak kekurangan sinkronisasi dalam pencapaian sasaran baik diKecamatan Grogol maupun antar Kelurahan di Kecamatan Grogol;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun standar operasional pelayanan;
3. Dukungan Kapasitas sarana dan prasarana kerja yang belum memadai.

Solusi

1. Meningkatkan peran seklur untuk koordinasi dengan kecamatan dalam segala hal yang akan direncanakan dan dilaksanakan;
2. Meningkatkan koordinasi baik didalam internal kecamatan maupun antar kelurahan yang ada dilingkungan Kecamatan Grogol;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pegawai terhadap perkembangan sistem informasi.

A.10d KECAMATAN PULOMERAK

Tabel B.10d

Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pulomerak beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KECAMATAN PULOMERAK)						903,44	887,24	98,21%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	100	99,91	99,91%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	100	111,00%			
Dialog/audiensi dengan Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan	Kegiatan	1	1	100,00%	74,65	73,44	98,37%
Pembinaan Administrasi Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	15,86	15,60	98,34%
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan TP PKK Kecamatan	Kegiatan	1	1	100,00%	58,91	58,91	100,00%
Pelaksanaan Musrenbangcam	Terlaksananya Murenbangcam	Kegiatan	1	1	100,00%	23,34	23,33	99,96%
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	Terlaksananya Penindakan Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	Kegiatan	4	4	100,00%	80,18	78,38	97,76%
Penyelenggaraan Paten	Terlaksananya Pelayanan PATEN	Kegiatan	1	1	100,00%	68,36	68,03	99,52%
Pengajian Rutin	Terlaksananya Pengajian Rutin	Kegiatan	12	12	100,00%	126,90	124,75	98,31%
Pelaksanaan Jumat Bersih	Terlaksananya Jumsih	Kegiatan	6	6	100,00%	28,17	25,92	92,01%
Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN	Terlaksananya Peringatan PHBI/PHBN	Kegiatan	8	8	100,00%	344,35	338,56	98,32%
Monitoring Kewilayahan Kecamatan	Monitoring Kewilayahan Kecamatan	Kegiatan	12	12	100,00%	32,49	30,89	95,07%
Pembinaan Ekonomi Kerakyatan Dan UMKM Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Ekonomi Kerakyatan Dan UMKM Kecamatan	Kegiatan	1	1	100,00%	12,85	12,85	100,00%
Pembinaan Administrasi Pertanahan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	8,33	7,53	90,39%
Lomba Kelurahan	Terlaksananya Lomba Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	2,66	2,66	100,00%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	Kegiatan	1	1	100,00%	26,41	26,41	100,00%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN LEBAK GEDE)						1.509,67	1.481,45	98,13%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	100	99,91	99,91%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	100	111,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan di kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	150,60	150,12	99,68%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya kegiatan dukungan Pencapaian Kota Sehat	kegiatan	3	3	100,00%	30,00	29,98	99,92%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Tercapainya Peningkatan Fungsi dan Peran PKK	bulan	12	12	100,00%	25,00	24,96	99,82%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Pembuatan TPT	Lokasi	3	3	100,00%	638,35	637,67	99,89%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Plang Nama Jalan Lingkungan	Unit	28	28	100,00%	20,97	20,69	98,66%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Teralokasikannya Honorarium untuk RT/RW se-kelurahan lebakgede	Bulan	12	12	100,00%	412,49	396,12	96,03%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Kegiatan	2	2	100,00%	15,00	14,87	99,13%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terciptanya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Kegiatan	1	1	100,00%	23,77	23,77	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terlaksananya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Kegiatan	1	1	100,00%	37,60	35,13	93,43%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya Peningkatan Sarana Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	10,89	10,56	96,97%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terciptanya Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	4	4	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terciptanya Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	14,85	99,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terciptanya Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	24,20	96,80%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	48,67	97,34%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya Papan Nama Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	24,87	82,89%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN TAMAN SARI)						1.481,89	1.444,43	97,47%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%	100	99,91	99,91%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	100	111,00%			
Pengajian Rutin	Terlaksananya Kegiatan Pengajian Rutin di Kelurahan Tamansari	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	18,14	72,56%
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	keg	2	2	100,00%	165,00	157,67	95,55%
Dukungan penyelenggaraan PHBI/PHBN	Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan PHBI/PHBN	kegiatan	4	4	100,00%	50,00	42,88	85,75%
Dukungan pencapaian kota sehat	Tercapainya masyarakat kelurahan Tamansari yang sehat	Kegiatan	3	3	100,00%	40,00	39,50	98,75%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya peningkatan fungsi dan peranan PKK Kelurahan	bulan	12	12	100,00%	25,00	20,33	81,32%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Kewilayahan Kelurahan	Paket	1	1	100,00%	659,25	657,81	99,78%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Plang nama Jalan Lingkungan Kelurahan	Buah	40	40	100,00%	30,00	29,14	97,14%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	orang	50	50	100,00%	274,70	274,70	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Pemutakhiran data Profil Kelurahan	Dokumen	1	1	100,00%	30,00	29,75	99,15%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban umum	Paket	1	1	100,00%	45,00	43,95	97,66%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kegiatan kepemudaan	Kegiatan	1	1	100,00%	20,00	19,35	96,75%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	14,20	94,67%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	35,00	35,00	100,00%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	kegiatan	1	1	100,00%	35,00	35,00	100,00%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terpasangnya Pemasangan papan Nama Kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	32,94	27,03	82,05%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN MEKAR SARI)						1.529,36	1.480,82	96,83%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	100	99,91	99,91%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	100	111,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya kegiatan monitoring ketentramandan ketertiban lingkungan di kelurahan	tahun	1	1	100,00%	141,00	140,84	99,88%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya Dukungan pencapaian Kelurahan sehat	Kegiatan	3	3	100,00%	50,00	49,99	99,97%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PKK Kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Tersedianya kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Kegiatan	6	6	100,00%	630,75	630,75	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Plang Nama JalanLingkungan	Titik	41	41	100,00%	30,00	29,97	99,91%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Teralokasikannya Honorarium untuk RT/RW sekelurahan mekarsari	Bulan	12	12	100,00%	274,67	268,67	97,82%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersedianya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terciptanya Peningkatan Kualitas DataKewilayahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	21,60	72,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Jenis	3	3	100,00%	66,00	39,49	59,83%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya alat komunikasi lintas Linmas dan Kelurahan	Unit	4	4	100,00%	10,00	9,80	98,00%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PHBI/PHBN Tingkat Kelurahan	Kegiatan	5	5	100,00%	85,00	85,00	100,00%
Dukungan Program Iklim	Terlaksananya Kegiatan Dukungan Program Iklim	Kegiatan	1	1	100,00%	22,60	22,53	99,69%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	kegiatan	3	3	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terciptanya Fasilitas Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	4	4	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Pelatihan Las dan Pertukangan	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	49,92	99,84%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Tersedianya Papan Nama Kelurahan Di Kelurahan Mekarsari	Kegiatan	1	1	100,00%	29,34	22,27	75,89%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN SURALAYA)						1.254,99	1.242,10	98,97%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	100	99,91	99,91%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	100	111,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan di kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	144,31	143,77	99,63%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya Kegiatan Dukungan pencapaian kota sehat	Bulan	12	12	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Tercapainya Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	kegiatan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	529,15	529,15	100,00%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Teralokasikannya Honorarium untuk RT/RW sekelurahan Suralaya	Tahun	1	1	100,00%	225,20	221,71	98,45%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Tahun	1	1	100,00%	30,00	29,95	99,82%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tahun	1	1	100,00%	45,00	42,97	95,48%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	85,00	79,81	93,90%
Dukungan Program Iklim	Tercapainya Kegiatan Dukungan Program Iklim	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	49,31	98,61%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Tahun	1	1	100,00%	17,70	17,70	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tahun	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terciptanya Pemasangan Papan Nama Kelurahan Di Kelurahan Suralaya	Unit	1	1	100,00%	23,63	22,75	96,27%

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang berisi satu atau lebih indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan memperoleh alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah untuk mendukung kegiatan non generik (program teknis) guna memenuhi kebutuhan kegiatan teknis yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Program tersebut, merupakan strategi yang dicanangkan agar mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya dibuat kebijakan berupa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pulomerak agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana yang berpedoman berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka Kecamatan Pulomerak untuk tetap berkomitmen dengan terus meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepuasan publik.

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel);
2. Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan.

Adapun capaian program dari beberapa indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program untuk mengukur proporsi ketercapaian pelaksanaan realisasi anggaran Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) dengan target anggaran Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) yang dana penggunaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon, untuk membiayai



pembangunan sarana dan prasarana lokal di lingkungan Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut merupakan sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Kota untuk mengalokasikan anggaran 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi DAK, kepada Kelurahan. Sehingga sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cilegon untuk menginisiasi program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan yang bersumber dari APBD. Adapun tujuan diberikannya Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) ini agar meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan daerah dan mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan daerah.

Maka untuk mengetahui Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) pada Kelurahan Se-Kecamatan Pulomerak yang merupakan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan, sehingga diperlukan perumusan atau perhitungannya yaitu; jumlah realisasi anggaran DPWKel dibagi per anggaran DPWKel dikali 100% (seratus) persen. Maka jumlah total pagu anggaran DPWKel yang terealisasi Pada Kelurahan Se-Kecamatan Pulomerak sebesar Rp. 2.455.373.750,- dibagi jumlah total pagu per anggaran DPWKel pada Kelurahan Se-Kecamatan Pulomerak sebesar Rp. 2.457.500.000,- dikali 100% (seratus) persen, maka capaiannya 99,91%. Sehingga Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) realisasi kinerjanya mencapai 99,91%, dari yang ditargetkan 100%, maka capaiannya 99,91%. Ketercapaian tersebut, berhasil dalam meningkatkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana umum dan perbaikan infrastruktur jalan lingkungan Kelurahan. Hal tersebut, dikarenakan adanya dukungan antara aparatur Kecamatan Pulomerak dan Kelurahan dengan masyarakat yang ikut serta berperan aktif dalam mendorong pencapaian pembangunan dengan merumuskan program yang akan direncanakan ataupun yang sedang berjalan/berlangsung. Adapun jenis pembangunan diantaranya; Tembok Penahan Tanah (TPT), Drainase Beton, Paving Blok, Rehab Rutilahu, Posyandu, Rehab Masjid/Musholla, Ruang Terbuka Lingkungan Hijau (RTLH). Sehingga hasil dari pembangunan yang sudah terwujud dapat dijaga secara bersama karena orientasi Pembangunan Wilayah Kelurahan semata-mata untuk warga/masyarakat umum yang menikmatinya agar dapat tetap terjalin keberlangsungan pembangunan secara bertahap pada periode mendatang.

2. Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program untuk mengukur tingkat persentase dari beberapa jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Pulomerak yang



telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dijadikan sebagai serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas organisasi perangkat daerah, yang berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh aparatur untuk melaksanakan/menyelenggarakan tugas pekerjaannya. Sehingga untuk Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebuah keharusan sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Selain itu juga, diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Maka Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ini bertujuan agar kinerja pemerintah daerah dapat berjalan secara tertib, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kemudian untuk mengetahui Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Pulomerak, diperlukan perumusan atau perhitungannya yaitu; jumlah pelayanan yang memiliki SOP dibagi per jumlah pelayanan yang ada di Kecamatan dikali 100% (seratus) persen. Kecamatan Pulomerak memiliki 2 (dua) jenis pelayanan yaitu; Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan, maka pelayanan yang ada pada Kecamatan Pulomerak yang mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 26 SOP dari 26 Pelayanan yang memiliki SOP ada pada unit kerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pulomerak dengan capaiannya 100%. Adapun Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan yang memiliki SOP tersebut meliputi; SOP Administrasi Izin IMB, SOP Rekomendasi Izin IMB, SOP Surat Pengantar Rekomendasi Izin Menara Telekomunikasi, SOP Penyelenggaraan Hiburan Keliling, SOP Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SOP Rekomendasi Izin Keramaian, SOP Pemberian Izin Tempat Usaha PKL, SOP Surat Keterangan Pindah, SOP Pengantar Permohonan Pembuatan KTP, SOP Permohonan Pembuatan KK, SOP Surat Keterangan Pindah Datang, SOP Pelayanan Surat Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, SOP Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), SOP Pengantar SKCK. Selain itu juga terdapat Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan yang akan dihapus sebanyak 12 Pelayanan yang memiliki SOP meliputi; SOP Perluasan Izin Gangguan (HO), SOP Daftar Ulang SITU, SOP Balik Nama SITU, SOP Perluasan SITU, SOP Rekomendasi SITU, SOP Pemberian Izin Gangguan (HO) Terhadap Usaha Intensitas Gangguan Kecil, SOP Daftar Ulang (HO), SOP Balik Nama (HO), SOP Perluasan (HO), SOP SITU Bebas Gangguan Tidak Berbadan Hukum, SOP Izin Pemasangan Reklame dan SOP

Rekomendasi Izin Hinder Ordonantie (HO). Hal tersebut, dikarenakan disesuaikan dengan adanya regulasi Peraturan Walikota Cilegon Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Keputusan Walikota Cilegon Nomor 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada DPMPTSP Kota Cilegon. Maka untuk mengetahui Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Pulomerak diperoleh realisasi kinerjanya mencapai 100%, dari yang ditargetkan 90%, maka capaiannya 111,11%. Sehingga ketercapaian tersebut, berhasil dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur pada setiap jenis pelayanan yang ada pada unit kerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pulomerak agar dijadikan sebagai petunjuk tertulis dalam melaksanakan tugasnya guna meningkatkan kinerja aparatur agar dapat berdaya guna dan berhasil guna secara efektif, efisien, tertib dan teratur yang berdampak pada meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, meskipun terdapat pengurangan/pemangkasan dari beberapa pelayanan perizinan yang memiliki SOP supaya menyesuaikan dengan adanya regulasi Perwal tersebut diatas, pengurangan beberapa pelayanan perizinnan tersebut dimaksudkan agar meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan investasi tidak terhambat yang akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, untuk Kecamatan Pulomerak capaian kinerja atau capaian realisasi anggarannya rata-rata diatas 80%. Sedangkan pada Kelurahan Se-Kecamatan Pulomerak, terdapat beberapa kegiatan yang capaian kinerja atau capaian realisasi anggarannya di bawah 80%, diantaranya :

Kelurahan Lebak Gede kegiatan di bawah 80%, sebagai berikut :

1. Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan agar pemuda Kelurahan Lebak Gede dapat meningkatkan wawasan pengetahuan dan selalu ikut serta berperan aktif dalam kegiatan kepemudaan yang bermanfaat yaitu Kegiatan Sosialisasi Dampak Penyalahgunaan Narkoba dan Sosialisasi HAM. Kegiatan tersebut tidak direalisasikan dengan ketercapaian 0,00%, dikarenakan adanya kebijakan untuk menghapus kegiatan tersebut.

Kelurahan Taman Sari kegiatan di bawah 80%, sebagai berikut :

1. Pengajian Rutin. Kegiatan ini bertujuan agar menambah wawasan pengetahuan keagamaan warga. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 12 Kegiatan dari yang ditargetkan 12 Kegiatan, dengan penyerapan anggarannya mencapai 72,56%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan ada perjalanan

dinas berupa SPDP perjalanan dinas yang tidak terserap karena tidak ada yang keluar daerah untuk melakukan perjalanan dinas.

Kelurahan Mekar Sari kegiatan di bawah 80%, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan. Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya data kewilayahan Kelurahan dengan melaksanakan pendataan agar tersusunnya Profil Kelurahan. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 1 Kegiatan dari yang ditargetkan 1 Kegiatan, dengan penyerapan anggarannya mencapai 72,00%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan Email dan Passwordnya hilang jadi tidak bisa diupdate data kewilayahan sehingga tidak diserap anggarannya;
2. Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana ruang baca, ruang tunggu dan ruang pelayanan (*Customer Service*). Kegiatan ini realisasi kinerjanya 3 Jenis dari yang ditargetkan 3 Jenis, dengan penyerapan anggarannya mencapai 59,83%. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan adanya perubahan kode rekening yang tidak disetujui karena anggaran sudah diserap sebagian untuk kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan tindak lanjutnya agar berkoordinasi dengan BPKAD Kota Cilegon terkait kode rekening kegiatan tersebut;
3. Pemasangan Papan Nama Kelurahan. Kegiatan ini bertujuan agar memberikan identitas petunjuk alamat Kantor Kelurahan Mekarsari dengan melaksanakan Pemasangan Papan Nama Kelurahan Mekarsari. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 1 Kegiatan dari yang ditargetkan 1 Kegiatan, dengan penyerapan anggarannya mencapai 75,89%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan anggarannya dialihkan ke kegiatan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, untuk ketercapaian kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan rata-rata realisasi kinerjanya mencapai 79,87% dan sedangkan realisasi anggarannya mencapai 97,92%. Maka dapat disimpulkan bahwa berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diselenggarakan Kecamatan Pulomerak dan Kelurahan secara efektif dan efisien yang berdampak pada meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan publik secara profesional dan akuntabel baik itu dari segi aspek pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan ketertiban umum dengan mengoptimalkan pelayanan prima kepada masyarakat terutama pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Meskipun turunnya ketercapaian realisasi kinerja program tetapi berhasil dalam meningkatkan pelayanan yang mempunyai SOP, turunnya

jumlah pelayanan SOP dikarenakan adanya regulasi peraturan dengan adanya pemangkasan dari beberapa pelayanan perizinan yang memiliki SOP, agar dapat mendorong pertumbuhan investasi sehingga meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat Kota Cilegon. Selain itu juga, untuk pembangunan wilayah kelurahan meningkat dengan terbangunnya beberapa fasilitas sarana dan prasarana umum seperti; pembangunan infrastruktur jalan lingkungan ataupun normalisasi saluran air.

Tabel B.10d.1
Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWKel 2019
Kecamatan Pulomerak

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	DRAINASE	26,25	362,47	M3	LEBAK GEDE	PULOMERAK
2	TPT	75,32	480,37	M3	LEBAK GEDE	PULOMERAK
3	PAVING BLOK	529,28	2468,74	M2	LEBAK GEDE	PULOMERAK
4	POSYANDU	2,00	2,00	UNIT	LEBAK GEDE	PULOMERAK
5	RTLH	5,00	5,00	UNIT	LEBAK GEDE	PULOMERAK
6	JAMBAK	0,00	0,00	UNIT	LEBAK GEDE	PULOMERAK
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	LEBAK GEDE	PULOMERAK
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	LEBAK GEDE	PULOMERAK
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	LEBAK GEDE	PULOMERAK
10	NORMALISASI SALURAN	0,00	0,00	LOKASI	LEBAK GEDE	PULOMERAK
1	DRAINASE	0,00	288,69	M3	TAMANSARI	PULOMERAK
2	TPT	83,78	791,92	M3	TAMANSARI	PULOMERAK
3	PAVING BLOK	480,16	1797,88	M2	TAMANSARI	PULOMERAK
4	POSYANDU	1,00	1,00	UNIT	TAMANSARI	PULOMERAK
5	RTLH	2,00	8,00	UNIT	TAMANSARI	PULOMERAK
6	JAMBAK	0,00	0,00	UNIT	TAMANSARI	PULOMERAK
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	1,00	1,00	UNIT	TAMANSARI	PULOMERAK
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	TAMANSARI	PULOMERAK
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	1,00	1,00	PAKET	TAMANSARI	PULOMERAK
10	NORMALISASI SALURAN	1,00	1,00	LOKASI	TAMANSARI	PULOMERAK
1	DRAINASE	112,75	224,15	M3	MEKARSARI	PULOMERAK
2	TPT	126,06	1012,39	M3	MEKARSARI	PULOMERAK
3	PAVING BLOK	1066,77	4772,10	M2	MEKARSARI	PULOMERAK
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	MEKARSARI	PULOMERAK
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	MEKARSARI	PULOMERAK
6	JAMBAK	0,00	0,00	UNIT	MEKARSARI	PULOMERAK
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	6,00	6,00	UNIT	MEKARSARI	PULOMERAK
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	MEKARSARI	PULOMERAK
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	MEKARSARI	PULOMERAK
10	NORMALISASI SALURAN	0,00	0,00	LOKASI	MEKARSARI	PULOMERAK
1	DRAINASE	29,15	66,98	M3	SURALAYA	PULOMERAK
2	TPT	248,11	1560,68	M3	SURALAYA	PULOMERAK
3	PAVING BLOK	509,90	2629,16	M2	SURALAYA	PULOMERAK
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	SURALAYA	PULOMERAK
5	RTLH	2,00	2,00	UNIT	SURALAYA	PULOMERAK

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
6	JAMBAK	0,00	0,00	UNIT	SURALAYA	PULOMERAK
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	SURALAYA	PULOMERAK
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	SURALAYA	PULOMERAK
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	SURALAYA	PULOMERAK
10	NORMALISASI SALURAN	1,00	1,00	LOKASI	SURALAYA	PULOMERAK
1	DRAINASE	168,15	942,29	M3	JUMLAH	PULOMERAK
2	TPT	533,27	3845,36	M3	JUMLAH	PULOMERAK
3	PAVING BLOK	2586,11	11667,88	M2	JUMLAH	PULOMERAK
4	POSYANDU	3,00	3,00	UNIT	JUMLAH	PULOMERAK
5	RTLH	9,00	15,00	UNIT	JUMLAH	PULOMERAK
6	JAMBAK	0,00	0,00	UNIT	JUMLAH	PULOMERAK
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	7,00	7,00	UNIT	JUMLAH	PULOMERAK
8	PEMAGARAN MAKAM	4,00	4,00	UNIT	JUMLAH	PULOMERAK
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	1,00	1,00	PAKET	JUMLAH	PULOMERAK
10	NORMALISASI SALURAN	2,00	2,00	LOKASI	JUMLAH	PULOMERAK

Permasalahan

1. Tatakelola perencanaan anggaran kegiatan diluar kegiatan non generik untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik setiap tahun harus diperhatikan kebutuhannya;
2. Tatakelola pengadministrasian dokumen terutama dalam perencanaan harus lebih ditingkatkan, hal ini dikarenakan belum sepenuhnya tatakelola pengadministrasian dokumen dilaksanakan dengan baik oleh Aparatur;
3. Tatakelola perencanaan Kode rekening anggaran perlu diperhatikan dengan baik oleh PPTK.

Solusi

1. Perhitungan Perencanaan anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik setiap tahun dihitung estimasinya;
2. Supaya ditingkatkan pembinaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kompetensinya dan lebih ditingkatkan bimbingan teknis dalam hal pengelolaan administrasi dokumen dalam perencanaan;
3. Kesalahan Kode Rekening harus diperhatikan sebelum kegiatan dimulai pada waktu perencanaan kegiatan.

A.10e KECAMATAN CIWANDAN

Tabel B.10e

Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Ciwandan beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KECAMATAN CIWANDAN)						744,85	739,28	99,25%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	95	93	98,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	95	94	99,00%			
Dialog/audiensi dengan Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat	Tersedianya dialog / audensi dengan pimpinan /anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	80,00	79,18	98,97%
Pembinaan Administrasi Kelurahan	Tersedianya Pembinaan Administrasi Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	16,98	16,31	96,07%
Penataan Lingkungan Kecamatan	Tersedianya Penataan Lingkungan Kecamatan	Kegiatan	1	1	100,00%	10,00	9,91	99,10%
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	Tersedianya Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	Kegiatan	1	1	100,00%	22,00	22,00	100,00%
Pelaksanaan Musrenbangcam	Tersedianya Pelaksanaan Musrenbangcam	Kegiatan	1	1	100,00%	57,00	57,00	100,00%
Penyelenggaraan Paten	Tersedianya Penyelenggaraan Paten	bulan	12	12	100,00%	215,63	215,63	100,00%
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon	Tersedianya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%	98,00	97,55	99,54%
Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan	Tersedianya Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	1	100,00%	55,00	54,73	99,50%
Lomba Kelurahan	Tersedianya Lomba Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	17,20	17,18	99,85%
Peringatan Hari Besar Islam	Tersedianya Peningkatan Hari Besar Islam yaitu : Peringatan Isri Mi'raj, Maulid Nabi Muhamad SAW, 1 Muharam , Pelaksanaan Tarjung dan Halal bi halal	Kegiatan	5	5	100,00%	96,05	92,90	96,72%
Peringatan Hari Besar Nasional	Tersedianya Peringatan Hari Besar Nasional	Kegiatan	1	1	100,00%	35,00	35,00	100,00%
Penindakan Pelanggaran Perda Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	Tersedianya penindakan pelanggaran Perda Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	Kegiatan	1	1	100,00%	42,00	41,91	99,78%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN RANDAKARI)						1.663,44	1.653,50	99,40%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	92	95	103,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	90	98,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Ketentraman dan ketertiban lingkungan	100%	100	100	100,00%	124,20	123,87	99,73%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya Dukungan Kota Sehat	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Peran Fungsi PKK Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan	%	100	100	100,00%	732,75	727,75	99,32%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksana nya Pemasangan Plang Nama Jalan Lingkungan kelurahan	%	50	50	100,00%	30,00	29,06	96,87%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	100%	100	100	100,00%	228,05	228,05	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersedianya Kualitas Layanan Publik	%	100	100	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	100%	100	100	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terlaksananya Pengadaan Sarpras Pelayanan Publik	100%	100	100	100,00%	80,00	79,28	99,09%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Terlaksananya Pembuatan Papan Nomor Rumah	100%	100	100	100,00%	15,00	14,60	97,35%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	100%	100	100	100,00%	40,50	39,00	96,30%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	72,94	72,94	100,00%
Dukungan Program Iklim	Dukungan Program Iklim	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Terlaksananya Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	80%	80	80	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	terciptanya Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	100%	100	100	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	1	1	98,50%	50,00	49,25	98,50%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	49,98	99,96%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksana nya Pemasangan Papan Nama Kelurahan	%	100	100	100,00%	30,00	29,72	99,06%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN KEPUH)						1.967,94	1.874,18	95,24%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	92	91	99,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	90	98,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya tugas-tugas tenaga linmas lingkungan di Kelurahan Kepuh	Org	30	30	100,00%	109,80	109,50	99,73%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya Dukungan Pencapaian Kota Sehat	3 Kegiatan	100	100	100,00%	46,84	46,56	99,40%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Tersedianya Peningkatan Fungsi dan Peran PKK Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Tersedianya pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	lokasi	35	35	100,00%	1.091,25	1.091,23	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Tersedianya Pemasangan Papan Nama Lingkungan kelurahan	Titik	40	40	100,00%	30,00	28,80	96,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan (RT/RW/LPM)	21 RT/4 RW	100	100	100,00%	183,95	183,95	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersedianya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	12 Bulan	90	90	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Tersedianya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Bulan	12	12	100,00%	30,00	29,50	98,33%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Paket	4	-	0,00%	80,00	0,00	0,00%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Tersedianya Pembuatan Papan Nomor Rumah	Bh	470	470	100,00%	15,00	14,06	93,73%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Bh	20	20	100,00%	45,00	43,70	97,11%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	85,00	79,25	93,24%
Dukungan Program Iklim	Dukungan Program Iklim	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	49,70	99,40%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Tersedianya Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tersedianya Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	2 Kegiatan	100	100	100,00%	15,00	14,16	94,40%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tersedianya Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	49,25	98,50%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Pengelasan dan Pertukangan	Dokumen	2	2	100,00%	50,00	49,95	99,90%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Tersedianya Papan Nama Kelurahan	Dokumen	1	1	100,00%	21,10	19,57	92,76%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN GUNUNGSUGIH)						1.653,94	1.642,26	99,29%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%	92	91	99,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	90	98,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Ketentraman dan ketertiban lingkungan	Orang	26	26	100,00%	107,40	106,42	99,09%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya Kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	46,50	93,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Fungsi dan Peran PKK Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan	Kegiatan	5	5	100,00%	849,15	849,05	99,99%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Plang Nama Jalan Lingkungan kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	29,09	96,95%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Set	1	1	100,00%	179,45	179,45	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	%	100	100	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Dokumen	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terlaksananya Pengadaan Sarpras Pelayanan Publik	Paket	1	1	100,00%	10,00	10,00	100,00%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Terlaksananya Pembuatan Papan Nomor Rumah	Buah	490	490	100,00%	15,00	14,27	95,10%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Paket	1	1	100,00%	45,00	44,40	98,67%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Tersedianya Kegiatan Pengajian Rutin	Bulan	12	12	100,00%	85,00	84,75	99,71%
Dukungan Program Iklim	Tersedianya Dukungan Program Iklim	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Terlaksananya Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Kegiatan	3	3	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	11,15	74,33%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tersedianya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Kegiatan, 1 unit alat	2	2	100,00%	50,00	49,25	98,50%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Papan Nama Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	22,94	22,94	100,00%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN BANJARNEGARA)						1.754,74	1.732,43	98,73%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	94	94	100,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	87	97,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Monitoring ketentraman dan ketertiban umum	Jenis	3	3	100,00%	45,00	45,00	100,00%
Dukungan pencapaian kota sehat	Tersedianya Dukungan Pencapaian Kota Sehat	Jenis Kegiatan	3	3	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Tersedianya Fungsi dan Peran PKK Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	Lokasi	35	35	100,00%	913,05	913,00	99,99%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya pemasangan plang nama jalan lingkungan kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	30,00	29,37	97,90%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Fasilitasi koordinasi kelembagaan masyarakat (RT/RW/LPM)	Bulan	12	12	100,00%	173,15	173,15	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Jenis	3	3	100,00%	15,00	14,62	97,44%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Bulan	12	12	100,00%	30,00	29,60	98,67%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Peningkatan sarpras pelayanan publik	Jenis	3	3	100,00%	84,80	83,20	98,11%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana dana ketertiban umum	Kegiatan	2	2	100,00%	85,80	79,60	92,77%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PHBI dan PHBN	Kegiatan	3	3	100,00%	82,94	82,89	99,94%
Dukungan Program Iklim	Tersedianya Dukungan Program Iklim	Jenis	3	3	100,00%	50,00	49,20	98,41%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Tersedianya Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Bulan	12	12	100,00%	25,00	23,42	93,68%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tersedianya Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tahun	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tersedianya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	50,00	46,40	92,80%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat	Tahun	1	1	100,00%	50,00	47,95	95,90%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya pemasangan papan nama kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	30,00	25,03	83,43%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN TEGAL RATU)						1.671,94	1.543,11	92,29%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	95	97	102,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	88	98,00%			
Dukungan pencapaian kota sehat	Tersedianya Dukungan pencapaian kota sehat	keg	1	1	100,00%	43,44	24,24	55,80%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Tersedianya Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	12	100	100	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Tersedianya Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	keg	100	100	100,00%	751,75	749,98	99,76%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	keg	1	1	100,00%	40,00	36,57	91,43%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tersedianya Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (1 LPM, 22 RT, 7 RW)	keg	1	1	100,00%	208,25	202,25	97,12%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersedianya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	keg	100	100	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	keg	100	100	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	OK	100	100	100,00%	80,00	78,38	97,97%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Tersedianya Pembuatan Papan Nomor Rumah	OK	100	100	100,00%	15,00	13,47	89,79%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	OK	100	100	100,00%	174,00	172,90	99,37%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan	Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan	Keg	1	1	84,59%	80,00	67,68	84,59%
Dukungan Program Iklim	Tersedianya Dukungan Program Iklim	keg	1	1	100,00%	50,00	49,06	98,12%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Terealisasinya Fasilitas Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Keg	100	100	100,00%	25,00	24,24	96,98%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tersedianya Fasilitas Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	keg	1	1	100,00%	15,00	15,00	99,97%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	keg	1	-	0,00%	50,00	0,00	0,00%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Tersedianya Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	keg	1	1	100,00%	50,00	39,35	78,70%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Tersedianya Pemasangan papan Nama Kelurahan	keg	100	-	0,00%	19,50	0,00	0,00%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN KUBANGSARI)						1.513,44	1.500,61	99,15%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	92	92	100,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	90	98,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Bulan	12	12	100,00%	107,40	107,10	99,72%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terwujudnya Masyarakat yang sehat dan dinamis dengan melaksanakan senam	Bulan	12	12	100,00%	45,00	44,50	98,89%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Pertemuan Rutin PKK	Bulan	12	12	100,00%	25,00	23,70	94,78%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	Kegiatan	3	3	100,00%	731,85	731,60	99,97%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Plang Nama Jalan Lingkungan Kelurahan Kubangsari	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	29,40	98,00%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tersedianya Honor RT/RW/LPM	Bulan	12	12	100,00%	140,75	140,75	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersedianya Petugas pelayanan Terpadu Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terselenggaranya Penyusunan Profil Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Sarpras Pelayanan Publik	Bulan	12	12	100,00%	30,50	30,20	99,02%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Tersedianya Pembuatan papan penomoran rumah	Bulan	12	12	100,00%	15,00	14,18	94,50%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Bulan	12	12	100,00%	45,00	44,18	98,17%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terselenggaranya Fasilitas peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	85,00	85,00	100,00%
Dukungan Program Iklim	Terlaksananya Kegiatan Program Iklim	Bulan	12	12	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tersedianya Fasilitas Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Bulan	12	12	100,00%	12,94	11,40	88,09%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Tersedianya Kapasitas dan Kualitas tenaga kerja	Bulan	12	12	100,00%	50,00	44,33	88,65%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Papan Nama Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	24,29	97,18%

Program peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat agar terciptanya tatakelola pemerintah Kecamatan dan Kelurahan secara transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, santun dan berwibawa, sehingga diharapkan masyarakat sejahtera.

Indikator keberhasilan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yaitu proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel) dan persentase penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di kecamatan. Rata-rata realisasi kinerja capaiannya 94% dari yang ditargetkan RENJA OPD sebesar 96%.

Program peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan terdapat beberapa kendala pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Kelurahan Gunungsugih
Kegiatan Peningkatan fasilitas Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat serapan anggarannya 74,33 % dari pagu anggaran sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas juta Rupiah), karena kurangnya perencanaan dan koordinasi dengan para stakeholder sehingga kegiatan tersebut tidak terserap. Hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran 74,33 %.
2. Kelurahan Kepuh
Kegiatan Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik serapan anggarannya 0 % dari pagu anggaran sebesar Rp.80,000,000- (Delapan Puluh juta Rupiah), karena kurangnya perencanaan dan koordinasi dengan para stakeholder sehingga kegiatan tersebut tidak terserap. Hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran 0%.
3. Kelurahan Tegalratu
Kegiatan Dukungan Pencapaian Kota Sehat serapan anggarannya 55,80 % dari pagu anggaran sebesar Rp.43,441,000- (Empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah), karena kurangnya perencanaan dan koordinasi dengan para stakeholder sehingga kegiatan tersebut tidak terserap. Hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran 55.80%;
Kegiatan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan serapan anggarannya 0 % dari pagu anggaran sebesar Rp.50,000,000- (Lima Puluh juta Rupiah), karena kurangnya perencanaan dan koordinasi dengan para

stakeholder sehingga kegiatan tersebut tidak terserap. Hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran 0%;

Kegiatan Pemasangan Papan Nama Kelurahan serapan anggarannya 0 % dari pagu anggaran sebesar Rp.19,500,000- (Sembilan Belas juta Lima ratus Ribu Rupiah), karena kurangnya perencanaan dan koordinasi dengan para stakeholder sehingga kegiatan tersebut tidak terserap. Hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran 0%.

Adapun progresi kegiatan PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH KELURAHAN yang termasuk program inovasi Dana Pembangunan Kewilayahan Kelurahan (DPWKel) di lingkup OPD Kecamatan Ciwandan, sebagai berikut:

Keberhasilan kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan dengan capaian realisasi 99,59% dari target 95% sehingga tercapai 104,83% untuk lingkup OPD Kecamatan Ciwandan dikarenakan:

1. Pelaksanaan teknis dan pengalokasian anggaran dan pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum (pedum) dan petunjuk teknis yang berlaku.
2. Antusiasme masyarakat dan tingginya partisipasi dalam mendukung kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan menghasilkan progres capaian keberhasilan kegiatan ini.

Tabel B.10e.1
Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWKel 2019
Kecamatan Ciwandan

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	DRAINASE	43,65	296,90	M3	RANDAKARI	CIWANDAN
2	TPT	86,42	86,42	M3	RANDAKARI	CIWANDAN
3	PAVING BLOK	2044,77	8782,83	M2	RANDAKARI	CIWANDAN
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	RANDAKARI	CIWANDAN
5	RTLH	0,00	12,00	UNIT	RANDAKARI	CIWANDAN
6	JAMBAAN	0,00	0,00	UNIT	RANDAKARI	CIWANDAN
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	3,00	3,00	UNIT	RANDAKARI	CIWANDAN
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	RANDAKARI	CIWANDAN
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	1,00	1,00	PAKET	RANDAKARI	CIWANDAN
10	NORMALISASI SALURAN	0,00	0,00	LOKASI	RANDAKARI	CIWANDAN
1	DRAINASE	86,63	402,49	M3	KEPUH	CIWANDAN
2	TPT	337,59	850,68	M3	KEPUH	CIWANDAN
3	PAVING BLOK	1777,02	11001,23	M2	KEPUH	CIWANDAN
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	KEPUH	CIWANDAN
5	RTLH	1,00	1,00	UNIT	KEPUH	CIWANDAN
6	JAMBAAN	15,00	15,00	UNIT	KEPUH	CIWANDAN
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	1,00	1,00	UNIT	KEPUH	CIWANDAN
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	KEPUH	CIWANDAN
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	KEPUH	CIWANDAN
10	NORMALISASI SALURAN	3,00	3,00	LOKASI	KEPUH	CIWANDAN



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	DRAINASE	41,33	757,36	M3	GUNUNG SUGIH	CIWANDAN
2	TPT	0,00	36,60	M3	GUNUNG SUGIH	CIWANDAN
3	PAVING BLOK	3667,21	8794,50	M2	GUNUNG SUGIH	CIWANDAN
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	GUNUNG SUGIH	CIWANDAN
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	GUNUNG SUGIH	CIWANDAN
6	JAMBAK	0,00	0,00	UNIT	GUNUNG SUGIH	CIWANDAN
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	GUNUNG SUGIH	CIWANDAN
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	GUNUNG SUGIH	CIWANDAN
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	GUNUNG SUGIH	CIWANDAN
10	NORMALISASI SALURAN	2,00	2,00	LOKASI	GUNUNG SUGIH	CIWANDAN
1	DRAINASE	103,21	422,27	M3	BANJARNEGARA	CIWANDAN
2	TPT	267,80	896,66	M3	BANJARNEGARA	CIWANDAN
3	PAVING BLOK	1353,00	5589,79	M2	BANJARNEGARA	CIWANDAN
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	BANJARNEGARA	CIWANDAN
5	RTLH	3,00	3,00	UNIT	BANJARNEGARA	CIWANDAN
6	JAMBAK	0,00	0,00	UNIT	BANJARNEGARA	CIWANDAN
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	BANJARNEGARA	CIWANDAN
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	BANJARNEGARA	CIWANDAN
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	1,00	1,00	PAKET	BANJARNEGARA	CIWANDAN
10	NORMALISASI SALURAN	3,00	3,00	LOKASI	BANJARNEGARA	CIWANDAN
1	DRAINASE	0,00	785,65	M3	TEGAL RATU	CIWANDAN
2	TPT	395,98	981,16	M3	TEGAL RATU	CIWANDAN
3	PAVING BLOK	1428,52	6598,55	M2	TEGAL RATU	CIWANDAN
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	TEGAL RATU	CIWANDAN
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	TEGAL RATU	CIWANDAN
6	JAMBAK	0,00	0,00	UNIT	TEGAL RATU	CIWANDAN
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	TEGAL RATU	CIWANDAN
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	TEGAL RATU	CIWANDAN
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	1,00	1,00	PAKET	TEGAL RATU	CIWANDAN
10	NORMALISASI SALURAN	3,00	3,00	LOKASI	TEGAL RATU	CIWANDAN
1	DRAINASE	197,36	493,00	M3	KUBANGSARI	CIWANDAN
2	TPT	162,36	777,77	M3	KUBANGSARI	CIWANDAN
3	PAVING BLOK	647,83	6027,29	M2	KUBANGSARI	CIWANDAN
4	POSYANDU	1,00	1,00	UNIT	KUBANGSARI	CIWANDAN
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	KUBANGSARI	CIWANDAN
6	JAMBAK	0,00	0,00	UNIT	KUBANGSARI	CIWANDAN
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	KUBANGSARI	CIWANDAN
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	KUBANGSARI	CIWANDAN
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	KUBANGSARI	CIWANDAN
10	NORMALISASI SALURAN	3,00	3,00	LOKASI	KUBANGSARI	CIWANDAN
1	DRAINASE	472,18	3157,67	M3	JUMLAH	CIWANDAN
2	TPT	1250,15	3629,29	M3	JUMLAH	CIWANDAN
3	PAVING BLOK	10918,35	46794,19	M2	JUMLAH	CIWANDAN
4	POSYANDU	1,00	1,00	UNIT	JUMLAH	CIWANDAN
5	RTLH	4,00	16,00	UNIT	JUMLAH	CIWANDAN
6	JAMBAK	15,00	15,00	UNIT	JUMLAH	CIWANDAN
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	4,00	4,00	UNIT	JUMLAH	CIWANDAN
8	PEMAGARAN MAKAM	5,00	5,00	UNIT	JUMLAH	CIWANDAN
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	3,00	3,00	PAKET	JUMLAH	CIWANDAN



NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
10	NORMALISASI SALURAN	14,00	14,00	LOKASI	JUMLAH	CIWANDAN

Permasalahan

1. Kurang meningkatnya tatakelola penatausahaan keuangan dilaksanakan dengan baik oleh Aparatur;
2. Belum optimalnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan di lingkup OPD Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
3. Belum maksimalnya penyerapan dana secara maksimal, sehingga anggaran yang tersedia masih ada yang tersisa.

Solusi

1. Peningkatan tatakelola penatausahaan keuangan dengan melakukan pembinaan administrasi dan bimbingan teknis di Kecamatan dan Kelurahan;
2. Optimalisasi koordinasi dalam upaya menggali permasalahan dan sekaligus mencari solusinya bekerja sama dengan OPD teknis terkait, guna mencapai kualitas kegiatan yang berhasil guna dan tepat guna;
3. Maksimalisasi intensitas kegiatan rapat koordinasi teknis antara pejabat pengelolaan keuangan seperti PPTK, Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan, P2BJ, penerima hasil pekerjaan, pengendali, Pengguna Anggaran ataupun Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga penyerapan realisasi dan target kinerja sesuai yang diharapkan.

A.10f KECAMATAN CITANGKIL

Tabel B.10f

Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Citangkil beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KECAMATAN CITANGKIL)						1.214,46	1.122,08	92,39%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	100	97,97	97,97%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	100	90,15	90,15%			
Dialog/audiensi dengan Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya dialog/audiensi dengan pimpinan/anggota organisasi sosial dan tokoh masyarakat	kegiatan	1	1	100,00%	105,48	104,54	99,10%
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	Tersedianya kegiatan kemasyarakatan	kegiatan	1	1	100,00%	228,30	223,24	97,78%
Penyusunan Profil Kecamatan	Adanya profil kecamatan	Buku	10	10	100,00%	5,57	5,52	99,10%
Pembinaan Administrasi Kelurahan	Terselenggaranya Pembinaan administrasi kelurahan se-kecamatan citangkil	Kelurahan	7	7	100,00%	6,44	6,44	100,00%
Pelaksanaan Jumat Bersih Kecamatan	Terlaksananya kegiatan jumsi di lingkungan kecamatan citangkil	bulan	12	12	100,00%	27,95	27,95	100,00%
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	Adanya peran PKK kecamatan citangkil	bulan	12	12	100,00%	50,00	49,99	99,97%
Pelaksanaan Musrenbangcam	Terlaksananya Kegiatan Musrenbangcam	kegiatan	1	1	100,00%	25,42	23,92	94,10%
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	Terlaksananya kegiatan penegakan perundang-undangan dan keamanan lingkungan kecamatan citangkil	bulan	12	12	100,00%	26,50	20,72	78,17%
Pengajian Rutin	Terlaksananya Pengajian Rutin di Kecamatan Citangkil	bulan	11	11	100,00%	29,90	26,95	90,13%
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon	Terlaksananya kegiatan MTQ	Kegiatan	1	1	100,00%	52,05	52,05	100,00%
Pembinaan Ekonomi Kerakyatan Dan UMKM Kecamatan	Tersedianya pembinaan bagi pelaku ekonomi di kecamatan	kegiatan	1	1	100,00%	10,35	10,35	100,00%
Monitoring DPW Kelurahan	Tersusunnya pengawasan melekat (waskat) sekecamatan Citangkil	kegiatan	12	12	100,00%	10,90	10,40	95,41%
Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan	Tersedianya pembinaan/seleksi untuk para peserta MTQ Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	1	100,00%	21,45	21,45	100,00%
Lomba Kelurahan	Terlaksananya lomba kelurahan di kelurahan se-kecamatan citangkil	kegiatan	1	1	100,00%	16,93	16,93	100,00%
Pengadaan Prasarana dan Sarana Kebersihan	adanya sarana dan prasarana kebersihan lingkungan kecamatan citangkil	buah	218	218	100,00%	80,00	78,06	97,58%
Peringatan Hari Besar Islam	Terlaksananya kegiatan PHBI	kegiatan	6	6	100,00%	118,35	97,53	82,41%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya kegiatan PHBN	kegiatan	7	7	100,00%	113,04	62,77	55,53%
Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan citangkil	kegiatan	1	1	100,00%	13,96	13,96	100,00%
Dukungan Pameran Produk Lokal	Terlaksananya pameran produk lokal kecamatan citangkil	kegiatan	1	1	100,00%	10,05	10,05	100,00%
Penyediaan Jasa Pedoman Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Citangkil	Bulan	12	12	100,00%	190,80	189,26	99,19%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Adanya Kegiatan dukungan Kepemudaan	kegiatan	1	1	100,00%	5,69	4,69	82,43%
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMKA)	Adanya Dukungan Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMKA)	bulan	12	12	100,00%	65,34	65,34	100,00%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN CITANGKIL)						1.730,79	1.629,47	94,15%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	100	99,88	99,88%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	100	90,46	90,46%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Monitoring ketentraman dan ketertiban	Kegiatan	11	11	100,00%	162,60	150,18	92,36%
Dukungan pencapaian kota sehat	Tercapainya masyarakat kelurahan Citangkil yang sehat	Kegiatan	3	3	100,00%	40,00	38,70	96,75%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terselenggaranya peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya pemasangan paving blok wilayah Kelurahan Citangkil	Lokasi	7	7	100,00%	624,35	624,23	99,98%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terselenggaranya pemasangan plang nama jalan lingkungan kelurahan	Buah	42	42	100,00%	30,00	29,81	99,35%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya fasilitasi koordinasi kelembagaan masyarakat (RT/RW/LPM)	Orang	177	177	100,00%	364,40	328,10	90,04%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya peningkatan kualitas layanan publik (Simpul Paten)	Bulan	12	12	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya peningkatan kualitas data kewilayahan	Kegiatan	3	3	100,00%	30,00	29,90	99,67%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terpenuhiya peningkatan sarpras pelayanan publik	Kegiatan	1	1	100,00%	66,65	54,09	81,16%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100,00%	31,50	31,18	98,98%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Kegiatan	2	2	100,00%	85,00	78,44	92,28%
Dukungan Program Iklim	Tersedianya dukungan program iklim	Kegiatan	5	5	100,00%	43,29	40,29	93,07%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kegiatan kepemudaan	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	14,30	95,33%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya peningkatan perekonomian masyarakat kelurahan	Kegiatan	3	3	100,00%	50,00	49,59	99,17%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Kegiatan	3	3	100,00%	50,00	47,23	94,45%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya pengadaan papan nama kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	23,00	22,48	97,72%
Pembangunan tugu selamat datang kelurahan	Terlaksananya pembangunan Tugu Selamat Datang Kampung Lukis	paket	1	1	100,00%	50,00	25,97	51,94%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN KEBONSARI)						1.554,74	1.456,15	93,66%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	100	100	100,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	100	90	90,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	bulan	12	12	100,00%	136,20	131,71	96,70%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya kegiatan dukungan pencapaian kota sehat	kegiatan	2	2	100,00%	50,00	25,68	51,35%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Meningkatnya fungsi dan peran PKK Kelurahan	bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kewilayahan	Kegiatan	1	1	100,00%	635,65	633,01	99,58%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya Pembuatan Plang Nama Jalan Lingkungan Kelurahan	unit	40	40	100,00%	30,00	29,80	99,33%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	bulan	12	12	100,00%	256,95	256,95	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya simpul paten	bulan	12	12	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Penyusunan Kualitas Data Kewilayahan	kegiatan	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Sarpras Pelayanan Publik	jenis	5	5	100,00%	70,00	67,06	95,81%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Tersedianya Papan Nomor Rumah Masyarakat	paket	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan	jenis	2	2	100,00%	38,00	33,55	88,29%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PHBI/PHBN dan Kesosialan Masyarakat	kegiatan	6	6	100,00%	85,00	69,08	81,26%
Dukungan Program Iklim	Terlaksananya kegiatan dukungan iklim	kegiatan	1	1	100,00%	42,94	42,94	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Terlaksananya kegiatan kepemudaan	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	19,50	78,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	kegiatan	1	1	100,00%	15,00	14,40	96,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha	kegiatan	1	-	0,00%	30,00	0,00	0,00%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pengelasan	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya pembuatan Papan Nama Kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	30,00	22,48	74,93%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN WARNASARI)						1.451,94	1.445,68	99,57%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%	100	99	99,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	100	99	99,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya monitoring ketentraman dan ketertiban	Kegiatan	11	11	100,00%	201,00	198,81	98,91%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terciptanya Masyarakat Kelurahan Warnasari yang sehat	Kegiatan	3	3	100,00%	50,00	49,75	99,50%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terselenggaranya peningkatan fungsi dan peran PKK kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	99,98%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Wilayah Kelurahan	Paket	7	7	100,00%	418,75	418,43	99,92%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terselenggaranya Pemasangan Plang Nama Jalan Lingkungan Kelurahan	unit	26	26	100,00%	20,00	20,00	100,00%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya fasilitasi koordinasi kelembagaan masyarakat (RT/RW/LPM)	Orang	143	143	100,00%	289,25	288,00	99,57%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terciptanya pelayanan Publik yang tertib	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terbentuknya Kualitas data Kewilayahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terciptanya peningkatan pelayanan publik yang tertib	Kegiatan	3	3	100,00%	65,00	64,50	99,23%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Terbentuknya fasilitasi tertib lingkungan	modal	1	1	100,00%	15,00	14,45	96,33%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	45,00	44,73	99,40%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terciptanya Kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Kegiatan	7	7	100,00%	85,00	85,00	100,00%
Dukungan Program Iklim	Terciptanya Dukungan Program Iklim	Kegiatan	12	12	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Terciptanya peningkatan kegiatan kepemudaan	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	24,58	98,32%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terbentuknya gerakan perlindungan anak terpadu	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terciptanya Perekonomian masyarakat kelurahan warnasari	Kegiatan	1	1	100,00%	45,94	45,62	99,30%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terciptanya Masyarakat yang berkualitas	orang	8	8	100,00%	35,00	34,99	99,98%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya pemasangan papan nama kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	22,00	21,82	99,18%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN SAMANGRAYA)						1.616,94	1.575,30	97,42%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%	100	98	98,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	100	96	96,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Kegiatan	11	11	100,00%	162,60	158,39	97,41%
Dukungan pencapaian kota sehat	Tercapainya masyarakat kelurahan Citangkil yang sehat	kegiatan	1	1	100,00%	45,00	44,10	98,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	terfasilitasinya program kerja PKK	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Paket	1	1	100,00%	645,35	643,24	99,67%
Pemasangan papan informasi pembangunan	Pemasangan papan informasi pembangunan	Paket	1	1	100,00%	30,00	23,29	77,63%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Paket	1	1	100,00%	30,00	27,80	92,67%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Orang	121	121	100,00%	246,05	245,40	99,74%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Bulan	12	12	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terpenuhinya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	%	100	100	100,00%	80,00	78,25	97,81%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Terpenuhinya Pembuatan Papan Nomor Rumah	%	100	100	100,00%	7,50	7,50	100,00%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Paket	1	1	100,00%	35,00	34,20	97,71%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	kegiatan	5	5	100,00%	85,00	78,11	91,89%
Dukungan Program Iklim	terlaksananya kegiatan dukungan program iklim kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	45,00	44,88	99,73%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	terlaksananya kegiatan peningkatan kepemudaan	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	24,80	99,20%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	terlaksananya kegiatan gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	terlaksananya kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	45,44	41,99	92,41%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya kegiatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja	kegiatan	2	2	100,00%	50,00	38,36	76,72%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN LEBAK DENOK)						1.546,84	1.535,63	99,28%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%	100	100	100,0%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	100	94	94,0%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Monitoring ketentraman dan ketertiban	bulan	12	12	100,00%	101,10	100,80	99,70%
Dukungan pencapaian kota sehat	Tersedianya Dukungan pencapaian kota sehat	keg	3	3	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Tersedianya Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	bulan	12	12	100,00%	22,00	22,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Drainase Wilayah Kelurahan Lebak Denok	Lokasi	9	9	100,00%	716,75	716,75	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Tersedianya Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	unit	50	50	100,00%	30,00	27,76	92,53%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tersedianya Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	bulan	12	12	100,00%	174,05	174,05	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersedianya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	bulan	12	12	100,00%	15,00	14,95	99,67%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya peningkatan kualitas data kewilayahan	Kegiatan	3	3	100,00%	40,00	40,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terlaksananya peningkatan sarpras pelayanan publik	Kegiatan	1	1	100,00%	76,94	75,80	98,52%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	1	1	100,00%	50,00	48,95	97,89%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan permasyarakatan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan permasyarakatan kelurahan	kegiatan	2	2	100,00%	85,00	84,85	99,82%
Dukungan Program Iklim	Tersedianya dukungan program iklim	kegiatan	5	5	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kegiatan kepemudaan	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya peningkatan perekonomian masyarakat kelurahan	kegiatan	3	3	100,00%	46,00	46,00	100,00%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja	kegiatan	2	2	100,00%	50,00	43,73	87,46%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN TAMAN BARU)						1.502,89	1.450,51	96,51%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	100	99	99,00%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	100	94	94,00%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Monitoring ketentraman dan ketertiban	kegiatan	2	2	100,00%	133,20	130,80	98,20%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terciptanya Dukungan Pencapaian Kota Sehat	kegiatan	3	3	100,00%	50,00	48,15	96,30%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Meningkatnya Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Pembangunan Paving Blok	Lokasi	5	5	100,00%	583,55	583,08	99,92%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terpasangnya nama plang nama jalan lingkungan Kelurahan	unit	40	40	100,00%	30,00	29,45	98,17%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya fasilitasi koordinasi kelembagaan masyarakat (RT/RW/LPM)	Bulan	12	12	100,00%	279,20	271,32	97,18%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya peningkatan kualitas layanan publik (Simpul Paten)	Bulan	12	12	100,00%	15,00	13,45	89,65%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya peningkatan kualitas data kewilayahan	kegiatan	3	3	100,00%	30,00	23,26	77,53%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terlaksananya peningkatan sarpras pelayanan publik	kegiatan	2	2	100,00%	54,05	50,30	93,06%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Terlaksananya pemasangan nomor rumah	buah	475	475	100,00%	15,00	14,16	94,40%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	1	1	100,00%	24,00	23,80	99,17%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terealisasinya Fasilitas peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	%	100	100	100,00%	84,64	79,25	93,63%
Dukungan Program Iklim	Terlaksananya Kegiatan Program Iklim	kegiatan	2	2	100,00%	39,25	38,55	98,22%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	22,30	89,20%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	kegiatan	1	1	100,00%	15,00	14,15	94,33%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	kegiatan	2	2	100,00%	50,00	44,03	88,05%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja	kegiatan	2	2	100,00%	50,00	39,47	78,94%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN DRINGO)						1.635,37	1.456,48	89,06%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	100	98,81	98,81%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	100	80,12	80,12%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kegiatan	1	1	100,00%	103,20	93,72	90,81%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya Dukungan pencapaian kota sehat di Kelurahan Dringo	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	37,30	74,60%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	22,00	12,72	57,80%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Kegiatan	2	2	100,00%	723,55	720,52	99,58%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terselenggaranya Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Buah	40	40	100,00%	30,00	29,90	99,67%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Orang	150	150	100,00%	226,25	207,93	91,90%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terkasananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Bulan	12	12	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	20,57	68,57%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terlaksananya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Kegiatan	2	2	100,00%	77,00	76,06	98,78%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Terlaksananya Pembuatan Papan Nomor Rumah	Kegiatan	1	1	100,00%	12,43	10,80	86,92%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100,00%	45,00	40,15	89,22%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	85,00	28,50	33,53%
Dukungan Program Iklim	Tersedianya Dukungan Program Iklim	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	26,63	53,26%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	21,15	84,60%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	13,00	86,67%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tersedianya Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	47,00	37,76	80,34%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	42,03	84,05%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya Pemasangan papan Nama Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	28,94	22,75	78,59%

Program Peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan public yang terbaik kepada masyarakat agar terciptanya tatakelola pemerintah kecamatan dan kelurahan secara transparan, akuntabel, partisipatif, responsive, santun dan berwibawa sehingga diharapkan masyarakat Cilegon sejahtera.

Indikator keberhasilan program peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan yaitu proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel) dan persentase penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di kecamatan. Rata-rata realisasi kinerja capaiannya 97.2% dari yang ditargetkan di Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Citangkil Kota Cilegon sebesar 100%.

Program Peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan terdapat beberapa kendala pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Kecamatan Citangkil

Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, capaian realisasi kinerja 71,43 % dan realisasi anggaran kegiatan ini hanya 55,53%, hal ini dikarenakan kegiatan pawai HUT Kota Cilegon tidak dilaksanakan, sehingga anggaran tidak terserap secara optimal.

2. Kelurahan Citangkil

Kegiatan Pembangunan Tugu Selamat Datang Kelurahan dengan capaian realisasi kegiatan hanya 51,94%, hal ini dikarenakan RAB yang telah disusun oleh Kelurahan tidak sesuai dengan RAB dari Dinas Perkim (Dinas terkait terlambat dalam memberikan RAB ke Kelurahan), sehingga anggaran kegiatan ini tidak terealisasi dengan baik.

3. Kelurahan Deringo

Kegiatan Dukungan Pencapaian Kota Sehat, realisasi anggarannya mencapai 74,60 %. Hal ini dikarenakan permasalahan proses penatausahaan disebabkan dimutasikannya bendahara ke OPD lain. Peningkatan Fungsi dan Peran PKK Kelurahan, dengan capaian realisasi anggaran mencapai 57,80. Alasan tidak optimalnya realisasi anggaran kegiatan ini juga disebabkan terhambatnya penatausahaan keuangan karena dimutasikannya bendahara ke OPD lain. Penyebab ini juga menjadi alasan kurang optimalnya serapan di kegiatan lain yakni kegiatan Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan dengan realisasi anggaran 68,57 %, kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kelurahan dengan realisasi anggaran 33,53 %, dan kegiatan Dukungan Program Iklim dengan realisasi anggaran 53,26%.

4. Kelurahan Kebonsari

- a. Kegiatan Dukungan Pencapaian Kota Sehat dengan realisasi anggaran 51,35% dikarenakan sudah terakomodir oleh OPD lain dalam hal ini adalah Puskesmas.
- b. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan yang tidak terlaksana, hal ini dikarenakan belanja sewa gerai UKM tidak direalisasikan, disebabkan UKM tidak berkembang.

- c. Kegiatan Pemasangan Papan Nama Kelurahan dengan realisasi kegiatan 74,93%, disebabkan RAB yang telah disusun tidak sesuai dengan RAB dari Dinas Perkim (Dinas terkait terlambat dalam memberikan RAB ke Kelurahan).

Keberhasilan kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan dengan capaian 99,80% untuk lingkup OPD Kecamatan Citangkil dikarenakan:

1. Pengalokasian anggaran dan pelaksanaan kegiatan teknis sesuai dengan perencanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.
2. Kegiatan ini didukung oleh masyarakat dan beberapa elemen serta stakeholder OPD terkait dalam mendampingi kegiatan yang dimaksud.

Tabel B.10f.1
Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWKel 2019
Kecamatan Citangkil

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	DRAINASE	142,47	488,56	M3	CITANGKIL	CITANGKIL
2	TPT	106,00	319,20	M3	CITANGKIL	CITANGKIL
3	PAVING BLOK	982,30	5806,91	M2	CITANGKIL	CITANGKIL
4	POSYANDU	1,00	2,00	UNIT	CITANGKIL	CITANGKIL
5	RTLH	0,00	2,00	UNIT	CITANGKIL	CITANGKIL
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	CITANGKIL	CITANGKIL
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	CITANGKIL	CITANGKIL
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	CITANGKIL	CITANGKIL
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	CITANGKIL	CITANGKIL
10	NORMALISASI SALURAN	1,00	1,00	LOKASI	CITANGKIL	CITANGKIL
1	DRAINASE	142,66	766,03	M3	KEBONSARI	CITANGKIL
2	TPT	0,00	0,00	M3	KEBONSARI	CITANGKIL
3	PAVING BLOK	1860,60	7389,07	M2	KEBONSARI	CITANGKIL
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	KEBONSARI	CITANGKIL
5	RTLH	1,00	1,00	UNIT	KEBONSARI	CITANGKIL
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	KEBONSARI	CITANGKIL
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	KEBONSARI	CITANGKIL
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	KEBONSARI	CITANGKIL
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	KEBONSARI	CITANGKIL
10	NORMALISASI SALURAN	1,00	1,00	LOKASI	KEBONSARI	CITANGKIL
1	DRAINASE	38,50	287,13	M3	WARNASARI	CITANGKIL
2	TPT	48,66	48,66	M3	WARNASARI	CITANGKIL
3	PAVING BLOK	986,36	7058,13	M2	WARNASARI	CITANGKIL
4	POSYANDU	0,00	1,00	UNIT	WARNASARI	CITANGKIL
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	WARNASARI	CITANGKIL
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	WARNASARI	CITANGKIL
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	WARNASARI	CITANGKIL
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	WARNASARI	CITANGKIL
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	WARNASARI	CITANGKIL
10	NORMALISASI SALURAN	3,00	3,00	LOKASI	WARNASARI	CITANGKIL
1	DRAINASE	121,69	874,95	M3	SAMANGRAYA	CITANGKIL



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
2	TPT	97,01	267,83	M3	SAMANGRAYA	CITANGKIL
3	PAVING BLOK	1573,45	6415,26	M2	SAMANGRAYA	CITANGKIL
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	SAMANGRAYA	CITANGKIL
5	RTLH	2,00	2,00	UNIT	SAMANGRAYA	CITANGKIL
6	JAMBAN	5,00	5,00	UNIT	SAMANGRAYA	CITANGKIL
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	SAMANGRAYA	CITANGKIL
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	SAMANGRAYA	CITANGKIL
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	SAMANGRAYA	CITANGKIL
10	NORMALISASI SALURAN	0,00	0,00	LOKASI	SAMANGRAYA	CITANGKIL
1	DRAINASE	36,73	443,99	M3	LEBAK DENOK	CITANGKIL
2	TPT	225,00	401,86	M3	LEBAK DENOK	CITANGKIL
3	PAVING BLOK	1893,04	6823,73	M2	LEBAK DENOK	CITANGKIL
4	POSYANDU	1,00	1,00	UNIT	LEBAK DENOK	CITANGKIL
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	LEBAK DENOK	CITANGKIL
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	LEBAK DENOK	CITANGKIL
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	LEBAK DENOK	CITANGKIL
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	LEBAK DENOK	CITANGKIL
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	LEBAK DENOK	CITANGKIL
10	NORMALISASI SALURAN	0,00	0,00	LOKASI	LEBAK DENOK	CITANGKIL
1	DRAINASE	57,21	347,13	M3	TAMAN BARU	CITANGKIL
2	TPT	297,98	683,88	M3	TAMAN BARU	CITANGKIL
3	PAVING BLOK	1489,30	5715,46	M2	TAMAN BARU	CITANGKIL
4	POSYANDU	0,00	1,00	UNIT	TAMAN BARU	CITANGKIL
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	TAMAN BARU	CITANGKIL
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	TAMAN BARU	CITANGKIL
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	TAMAN BARU	CITANGKIL
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	TAMAN BARU	CITANGKIL
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	TAMAN BARU	CITANGKIL
10	NORMALISASI SALURAN	3,00	3,00	LOKASI	TAMAN BARU	CITANGKIL
1	DRAINASE	194,97	565,29	M3	DERINGO	CITANGKIL
2	TPT	350,60	1045,51	M3	DERINGO	CITANGKIL
3	PAVING BLOK	1467,00	5038,95	M2	DERINGO	CITANGKIL
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	DERINGO	CITANGKIL
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	DERINGO	CITANGKIL
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	DERINGO	CITANGKIL
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	DERINGO	CITANGKIL
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	DERINGO	CITANGKIL
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	DERINGO	CITANGKIL
10	NORMALISASI SALURAN	0,00	0,00	LOKASI	DERINGO	CITANGKIL
1	DRAINASE	734,23	3773,07	M3	JUMLAH	CITANGKIL
2	TPT	1125,24	2766,94	M3	JUMLAH	CITANGKIL
3	PAVING BLOK	10252,05	44247,49	M2	JUMLAH	CITANGKIL
4	POSYANDU	2,00	5,00	UNIT	JUMLAH	CITANGKIL
5	RTLH	3,00	5,00	UNIT	JUMLAH	CITANGKIL
6	JAMBAN	5,00	5,00	UNIT	JUMLAH	CITANGKIL
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	JUMLAH	CITANGKIL
8	PEMAGARAN MAKAM	3,00	3,00	UNIT	JUMLAH	CITANGKIL
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	JUMLAH	CITANGKIL
10	NORMALISASI SALURAN	8,00	8,00	LOKASI	JUMLAH	CITANGKIL

Permasalahan

1. Minimnya pengetahuan aparatur tentang tatakelola perencanaan terutama dalam pengelolaan alokasi anggaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan;
2. Masih kurangnya koordinasi lini PPTK dalam mencari dan mengatasi masalah di lingkup OPD Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.

Solusi

1. Perlunya peningkatan pengetahuan para aparatur dengan dilaksanakannya bintek (bimbingan teknis) yang bekerja sama dengan OPD terkait secara berkala tentang tatakelola perencanaan dan alokasi anggaran.
2. Meningkatkan koordinasi antar lini PPTK dengan cara menyelenggarakan rapat koordinasi teknis (rakortek) secara berkala untuk mengevaluasi dan mencari solusi permasalahan dalam lingkup OPD kecamatan Citangkil.

A.10g KECAMATAN JOMBANG

Tabel B.10g

Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jombang beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KECAMATAN JOMBANG)						1.146,69	1.124,77	98,09%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	90	99,60	110,66%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	100	111,11%			
Dialog/audiensi dengan Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat	Terlaksanannya Dialog/audiensi dengan Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat	kegiatan	1	1	100,00%	143,25	142,58	99,53%
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	terlaksananyaPeningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	kegiatan	6	6	100,00%	160,10	158,52	99,01%
Pembinaan Administrasi Kelurahan	Terlaksanannya Pembinaan Administrasi Kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	16,57	16,57	100,00%
Pelaksanaan Jumat Bersih Kecamatan	Tersedianya Pelaksanaan Jumat Bersih Kecamatan	kegiatan	7	7	100,00%	14,95	14,95	100,00%
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	Terlaksanannya Peningkatan Kegiatan PKK kecamatan dan kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	58,91	58,91	100,00%
Pelaksanaan Musrenbangcam	Terlaksananya Musrenbangcam	kegiatan	1	1	100,00%	23,32	23,32	100,00%
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	Terlaksananya Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	keg	6	6	100,00%	48,20	46,70	96,89%
Penyelenggaraan Paten Edukation	Tesediannya Peralatan Edukation	jenis	1	1	100,00%	47,56	46,70	98,19%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon	terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Cilegon	kegiatan	1	1	100,00%	44,95	37,90	84,32%
Monitoring DPW Kelurahan	Terlaksananya Monitoring Keg DPWKel	Bulan	12	12	100,00%	12,80	12,80	100,00%
Pengelolaan Bank Sampah	Terlaksananya keg Pengelolaan Bank Sampah	kegiatan	1	1	100,00%	11,95	11,95	100,00%
Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan	terlaksananya Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan	kegiatan	1	1	100,00%	81,18	78,06	96,16%
Pembinaan dan Monitoring Penerapan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Penerapan Teknologi Tepat Guna	Bulan	12	12	100,00%	10,28	10,28	100,00%
Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Tersediannya Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Bulan	12	12	100,00%	44,00	43,80	99,54%
Pembinaan dan Monitoring Linmas	terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Linmas	bulan	12	12	100,00%	43,96	43,66	99,32%
Dukungan penyelenggaraan PHBI/PHBN	terlaksananya Dukungan penyelenggaraan PHBI/PHBN	Bulan	12	12	100,00%	384,71	378,06	98,27%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN JOMBANG WETAN)						1.590,64	1.517,66	95,41%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	85	99,60	110,66%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	100	111,11%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	12	12	100,00%	201,95	198,38	98,23%
Dukungan pencapaian kota sehat	Tersediannya Dukungan Pencapaian Kota Sehat	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	49,33	98,65%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Fungsi dan Peran PKK Kelurahan	bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	Lokasi	9	9	100,00%	394,00	393,90	99,97%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Plang Nama Jalan Lingkungan Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	28,64	95,47%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya Peningkatan Kordinasi Kelembagaan Masyarakat(RT/RW/LPM)	Bulan	12	12	100,00%	494,00	493,97	99,99%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersediannya Pakaian Petugas Paten	stel	6	6	100,00%	15,00	14,50	96,67%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Tersediannya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terlaksananya Pembuatan Partisi Pelayanan Paten	Paket	1	-	0,00%	20,00	0,00	0,00%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terselenggaranya Peningkatan Sarana Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	-	0,00%	27,75	0,00	0,00%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan	Terlaksananya Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN	Kegiatan	4	4	100,00%	85,00	82,78	97,38%
Dukungan Program Iklim	Tersediannya Dukungan Program Iklim	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	43,00	86,00%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Tersediannya Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	24,97	99,88%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tersedianya Fasilitas Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	49,90	99,79%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terselenggaranya Program Keahlian Masyarakat	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	43,53	87,06%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Papan Nama Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	27,94	24,78	88,69%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN MASIGIT)						1.574,02	1.518,77	96,49%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	90	99,60	110,66%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	100	111,11%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Tersedianya Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	214,89	212,72	98,99%
Dukungan pencapaian kota sehat	Tersedianya Dukungan pencapaian kota sehat	kegiatan	1	1	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Tersedianya Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Tersedianya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Paket	1	1	100,00%	496,85	496,85	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Tersedianya Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan	unit	40	40	100,00%	30,00	28,96	96,54%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tersedianya Fasilitas koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Bulan	12	12	100,00%	334,34	328,33	98,20%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersedianya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tahun	1	1	100,00%	15,00	14,99	99,93%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Tersedianya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	kegiatan	1	1	100,00%	77,94	48,00	61,58%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Tersedianya Fasilitas peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	85,00	84,63	99,56%
Dukungan Program Iklim	Tersedianya Program Iklim	Tahun	1	1	100,00%	50,00	49,39	98,79%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaa	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Kegiatan Kepemudaaa	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tersedianya Fasilitas Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tersedianya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	50,00	49,30	98,60%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Tersedianya Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga Kerja	kegiatan	1	1	100,00%	50,00	43,83	87,65%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Tersedianya Pemasangan papan Nama Kelurahan	kegiatan	1	1	100,00%	30,00	21,77	72,58%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN SUKMAJAYA)						1.581,94	1.564,36	98,89%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	90	99,60	110,66%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	100	111,11%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terpenuhinya Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Bulan	12	12	100,00%	141,00	138,00	97,87%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terpenuhinya Dukungan Pencapaian Kota Sehat	Kegiatan	3	3	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terpenuhinya Peningkatan Fungsi dan Peran PKK Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	Paket	1	1	100,00%	696,35	696,35	100,00%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terpenuhinya Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Orang	90	90	100,00%	186,65	186,65	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Paket	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Bulan	12	12	100,00%	30,00	27,75	92,50%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terpenuhinya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Paket	1	1	100,00%	80,00	73,40	91,75%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Terpenuhinya Pembuatan Papan Nomor Rumah	Buah	450	450	100,00%	15,00	14,03	93,50%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terpenuhinya Peningkatan Sarana Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Paket	2	2	100,00%	45,00	41,80	92,89%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terpenuhinya Peningkatan Fasilitasi Kehidupan Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	4	4	100,00%	82,75	82,75	100,00%
Dukungan Program Iklim	Terpenuhinya Dukungan Program Iklim	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Terpenuhinya Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	2	2	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terpenuhinya Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Bulan	12	12	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terpenuhinya Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja	Paket	1	1	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Papan Nama Kelurahan	Paket	1	1	100,00%	25,19	23,64	93,84%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN PANGGUNG RAWI)						1.434,79	1.403,58	97,82%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	90	99,60	110,66%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	100	111,11%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Tahun	1	1	100,00%	131,40	130,68	99,45%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya Kota Sehat	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	49,32	98,64%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Tata boga dan Daur Ulang	Kegiatan	2	2	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	420,25	410,35	97,64%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Tersedianya Plang Nama Jalan Lingkungan Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	29,50	98,33%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tahun	1	1	100,00%	300,20	300,20	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Melalui Website, Penyusunan Profil dan Banner	Kegiatan	2	2	100,00%	23,94	23,91	99,87%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Meningkatnya Sarpras Pelayanan Publik	Kegiatan	1	1	100,00%	80,00	76,30	95,38%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Tersedianya Papan Nomor Rumah	Paket	1	1	100,00%	15,00	14,57	97,16%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya Pengadaan sarana prasarana Ketentraman dan ketertiban umum	Paket	1	1	100,00%	45,00	44,00	97,78%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Kelurahan (PHBI/PHBN dan Majelis Ta'lim)	Kegiatan	2	2	100,00%	85,00	85,00	100,00%
Dukungan Program Iklim	Terlaksananya Dukungan Program Iklim	Kegiatan	3	3	100,00%	44,00	43,93	99,84%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	2	2	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tersedianya Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	49,75	99,50%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Tersedianya Pelatihan Las dan Sertifikasi Tukang	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	41,19	82,38%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Tersedianya Papan Nama Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	24,88	82,93%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN GEDONG DALEM)						1.377,09	1.350,58	98,07%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	90	99,60	110,66%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	90	100	111,11%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Program Monitoring Trantibum	Bulan	12	12	100,00%	107,40	107,02	99,65%
Dukungan pencapaian kota sehat	Tersedianya Pencapaian Kota Sehat di Lingkungan Kelurahan	Kegiatan	4	4	100,00%	33,50	33,50	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Fungsi dan Peran PKK	Bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terselenggaranya Pembangunan Infastuktur kegiatan Pembangunan wilayah Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	516,45	516,44	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Tersediannya Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	41 unit	90	90	100,00%	30,00	28,64	95,47%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPMK)	Tersediannya Peningkatan koordinasi Kelembagaan Masyarakat RT/RW/LPMK	Kegiatan	3	3	100,00%	249,80	249,80	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Paket	1	1	100,00%	10,00	10,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terselenggaranya Proses Penyusunan Pogram kegiatan Kelurahan	tw	4	4	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terselenggaranya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik di Kelurahan	Unit	2	2	100,00%	58,35	50,40	86,38%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Terselenggaranya Peningkatan Sarpras Trantibum Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	40,50	37,40	92,35%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terselenggaranya Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	85,00	84,65	99,59%
Dukungan Program Iklim	Terselenggaranya Program Dukungan Program Iklim Kebersihan Lingkungan	Kegiatan	1	1	100,00%	43,00	40,53	94,25%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Tersediannya Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan (Karang taruna)	Kegiatan	1	1	100,00%	20,00	20,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terselenggaranya Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya Peningkatan dan Pembinaan dan Pelatihan UMKM Kepada Masyarakat	Kegiatan	3	3	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Teselenggrannya Program Keahlian masyarakat	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	43,30	86,60%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Tersediannya Pembuatan Papan nama kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	28,09	23,90	85,08%

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang berisi satu atau lebih indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan memperoleh alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah untuk mendukung kegiatan non generik (program teknis) guna memenuhi kebutuhan kegiatan teknis yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Program tersebut, merupakan strategi yang dicanangkan agar mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya dibuat kebijakan berupa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pulomerak agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana berpedoman berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Berdasarkan

beberapa hal tersebut diatas, maka Kecamatan Jombang untuk tetap berkomitmen dengan terus meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepuasan publik.

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel);
2. Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan.

Adapun capaian program dari beberapa indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program untuk mengukur proporsi ketercapaian pelaksanaan realisasi anggaran Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) dengan target anggaran Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) yang dana penggunaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon, untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana lokal di lingkungan Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut merupakan sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Kota untuk mengalokasikan anggaran 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi DAK, kepada Kelurahan. Sehingga sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cilegon untuk menginisiasi program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan yang bersumber dari APBD. Adapun tujuan diberikannya Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) ini agar meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan daerah dan mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan daerah.

Maka untuk mengetahui Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) pada Kelurahan Se-Kecamatan Jombang yang merupakan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan, sehingga diperlukan perumusan atau perhitungannya yaitu; jumlah realisasi anggaran DPWKel dibagi per anggaran DPWKel dikali 100% (seratus) persen. Maka jumlah total pagu anggaran DPWKel yang terealisasi Pada Kelurahan Se-Kecamatan Jombang sebesar Rp. 2.513.884.500,- dibagi jumlah total pagu per anggaran DPWKel pada Kelurahan Se-Kecamatan Jombang sebesar Rp. 2.523.900.000,- dikali 100% (seratus) persen, maka capaiannya 99,60%. Sehingga Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) realisasi kinerjanya mencapai 99,60%, dari yang ditargetkan 90%, maka capaiannya 110,66%. Ketercapaian tersebut, melebihi dari yang ditargetkan dan berhasil dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum dan perbaikan infrastruktur jalan lingkungan Kelurahan. Hal ini dikarenakan rencana program pembangunan di lingkungan Kelurahan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selain itu juga adanya koordinasi yang baik antara aparaturnya Kecamatan dan Kelurahan yang terus memantau dan mengawasi perkembangan pembangunan agar sesuai dengan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikerjakan secara swakelola oleh Anggota Tim Kelompok Masyarakat (Pokmas). Adapun beberapa jenis pekerjaan pembangunan diantaranya; Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok, Pembangunan Drainase, Pembangunan Pemagaran Makam, Normalisasi Saluran Air Drainase dan Pembangunan Posyandu.

2. Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program untuk mengukur tingkat persentase dari beberapa jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Jombang yang telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat dijadikan sebagai serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas perangkat daerah, yang berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh aparaturnya untuk melaksanakan/menyelenggarakan tugas pekerjaannya. Sehingga dalam Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebuah keharusan sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Selain itu juga, penerapan SOP AP ini juga didukung dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya, untuk mengetahui Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Jombang, diperlukan perumusan atau perhitungannya yaitu; jumlah pelayanan yang memiliki SOP dibagi per jumlah pelayanan yang ada di Kecamatan dikali 100% (seratus) persen. Kecamatan Jombang memiliki 2 (dua) jenis pelayanan yaitu; Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan. Maka kedua Jenis Pelayanan tersebut yang memiliki SOP sebanyak 28 SOP dari 28 Pelayanan yang ada pada unit kerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jombang dengan capaiannya 100%. Adapun Jenis Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan yang memiliki SOP, yang meliputi; SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB), SOP Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), SOP Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang Bebas Gangguan dan Tidak Berbadan Hukum, SOP Daftar Ulang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang Bebas Gangguan dan Tidak Berbadan Hukum, SOP Balik Nama Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang Bebas Gangguan dan Tidak Berbadan Hukum, SOP Perluasan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang Bebas Gangguan dan Tidak Berbadan Hukum, SOP Izin Gangguan (HO) Terhadap Usaha Dengan Intensitas Kecil, SOP Daftar Ulang Izin Gangguan (HO), SOP Balik Nama Izin Gangguan (HO), SOP Perluasan Izin Gangguan (HO), SOP Rekomendasi Izin Pendidikan Dasar dan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, SOP Rekomendasi Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, SOP Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL), SOP Izin Penyelenggaraan Hiburan Keliling, SOP Izin Pemasangan Reklame (Spanduk, Umbul-Umbul dan Stiker Selain di Jalan Protokol), SOP Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Selain yang Menjadi Kewenangan Camat, SOP Rekomendasi Izin Gangguan (HO) Selain

yang Menjadi Kewenangan Camat, SOP Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), SOP Rekomendasi Izin Keramaian, SOP Pengantar Rekomendasi Izin Menara Telekomunikasi, SOP Surat Keterangan Pindah Penduduk WNA/WNI Antar Kecamatan Dalam Wilayah Kota Cilegon, SOP Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI/WNA Antar Kecamatan Dalam Wilayah Kota Cilegon, SOP Pengantar Permohonan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), SOP Pengantar Permohonan Kartu Keluarga (KK), SOP Surat Keterangan Tidak Sengketa, SOP Surat Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan (SPH), SOP Surat Pengantar SKCK dan SOP Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Maka untuk mengetahui Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Jombang diperoleh realisasi kinerjanya mencapai 100%, dari yang ditargetkan 90%, maka capaiannya 111,11%. Sehingga ketercapaian tersebut, melebihi dari yang ditargetkan dikarenakan Kecamatan Jombang belum melaksanakan penghapusan beberapa jenis Pelayanan Perizinan yang memiliki SOP sebagaimana dengan adanya regulasi Peraturan Walikota Cilegon Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Keputusan Walikota Cilegon Nomor 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada DPMPTSP Kota Cilegon. Meskipun demikian, Kecamatan Jombang berhasil dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur pada setiap jenis pelayanan yang ada pada unit kerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jombang secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur agar terciptanya lingkungan pelayanan yang efektif, efisien, tertib dan teratur.

Selanjutnya, Kecamatan Jombang capaian kinerja atau capaian realisasi anggarannya rata-rata diatas 80%. Sedangkan pada Kelurahan Se-Kecamatan Jombang, terdapat beberapa kegiatan yang capaian kinerja atau capaian realisasi anggarannya di bawah 80%, diantaranya :

Kelurahan Jombang Wetan kegiatan di bawah 80%, sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pembuatan partisi pelayanan PATEN. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 0 Paket dari yang ditargetkan 1 Paket, dengan penyerapan anggarannya 0,00%. Kegiatan tersebut tidak diserap dikarenakan anggaran tidak mencukupi sehingga tidak lanjutnya agar pagu anggaran disesuaikan pada tahun berikutnya;
2. Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengontrol lingkungan Kelurahan dengan meningkatkan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum agar lingkungan aman dan nyaman yang didukung dengan peralatan komunikasi yang memadai. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 0 Kegiatan dari yang ditargetkan 1 Kegiatan, dengan penyerapan anggarannya 0,00%. Kegiatan tersebut tidak diserap dikarenakan barang yang dibutuhkan tidak sesuai dengan spesifikasi.

Kelurahan Masigit kegiatan di bawah 80%, sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pengadaan peralatan kantor. Kegiatan ini

realisasi kinerjanya 1 Kegiatan dari yang ditargetkan 1 Kegiatan, dengan penyerapan anggarannya 61,58%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan kesalahan kode rekening untuk belanja Alat Peraga Edukasi (APE) untuk sarana bermain anak-anak. Sehingga tindak lanjutnya agar dikoordinasikan dengan pihak Asset BPKAD Kota Cilegon;

2. Pemasangan Papan Nama Kelurahan. Kegiatan ini bertujuan agar memberikan identitas pentunjuk alamat Kantor Kelurahan dengan melaksanakan Pemasangan Papan Nama Kelurahan Masigit. Kegiatan ini realisasi kinerjanya 1 Kegiatan dari yang ditargetkan 1 Kegiatan, dengan penyerapan anggarannya mencapai 72,58%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran tersebut, dikarenakan disesuaikan dengan Standar RAB. Maka tindak lanjutnya agar dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, untuk ketercapaian kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan rata-rata realisasi kinerjanya mencapai 108,48% dan sedangkan realisasi anggarannya mencapai 97,46%. Maka dapat disimpulkan bahwa berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diselenggarakan Kecamatan Jombang dan Kelurahan secara efektif dan efisien dengan meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan publik secara profesional dan akuntabel baik dari segi aspek pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan ketertiban umum dengan mengoptimalkan pelayanan prima kepada masyarakat terutama pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Meskipun saat ini belum menyesuaikan untuk melaksanakan penghapusan beberapa jenis Pelayanan Perizinan yang memiliki SOP, sehubungan dengan adanya regulasi Peraturan Walikota Cilegon Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Keputusan Walikota Cilegon Nomor 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada DPMPTSP Kota Cilegon. Sedangkan untuk pembangunan wilayah kelurahan meningkat dengan terbangunnya beberapa fasilitas sarana dan prasarana umum seperti; pembangunan infrastruktur jalan lingkungan, Pembangunan Drainase, Pemagaran Makam, dan Normalisasi Saluran Air/Drainase dan Pembangunan Posyandu dan sebagainya.

Tabel B.10g.1
Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWKel 2019
Kecamatan Jombang

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	DRAINASE	188,24	375,23	M3	JOMBANG WETAN	JOMBANG
2	TPT	0,00	0,00	M3	JOMBANG WETAN	JOMBANG
3	PAVING BLOK	568,43	6869,49	M2	JOMBANG WETAN	JOMBANG
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	JOMBANG WETAN	JOMBANG



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
5	RTLH	0,00	9,00	UNIT	JOMBANG WETAN	JOMBANG
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	JOMBANG WETAN	JOMBANG
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	JOMBANG WETAN	JOMBANG
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	JOMBANG WETAN	JOMBANG
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	JOMBANG WETAN	JOMBANG
10	NORMALISASI SALURAN	2,00	2,00	LOKASI	JOMBANG WETAN	JOMBANG
1	DRAINASE	51,00	500,35	M3	MASIGIT	JOMBANG
2	TPT	266,00	266,00	M3	MASIGIT	JOMBANG
3	PAVING BLOK	3628,98	6215,64	M2	MASIGIT	JOMBANG
4	POSYANDU	0,00	2,00	UNIT	MASIGIT	JOMBANG
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	MASIGIT	JOMBANG
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	MASIGIT	JOMBANG
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	MASIGIT	JOMBANG
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	MASIGIT	JOMBANG
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	MASIGIT	JOMBANG
10	NORMALISASI SALURAN	1,00	1,00	LOKASI	MASIGIT	JOMBANG
1	DRAINASE	53,09	347,01	M3	SUKMAJAYA	JOMBANG
2	TPT	228,32	576,90	M3	SUKMAJAYA	JOMBANG
3	PAVING BLOK	543,15	3850,34	M2	SUKMAJAYA	JOMBANG
4	POSYANDU	1,00	2,00	UNIT	SUKMAJAYA	JOMBANG
5	RTLH	6,00	12,00	UNIT	SUKMAJAYA	JOMBANG
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	SUKMAJAYA	JOMBANG
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	4,00	4,00	UNIT	SUKMAJAYA	JOMBANG
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	SUKMAJAYA	JOMBANG
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	SUKMAJAYA	JOMBANG
10	NORMALISASI SALURAN	0,00	0,00	LOKASI	SUKMAJAYA	JOMBANG
1	DRAINASE	70,69	224,77	M3	PANGGUNGRAWI	JOMBANG
2	TPT	0,00	126,37	M3	PANGGUNGRAWI	JOMBANG
3	PAVING BLOK	1299,64	4092,65	M2	PANGGUNGRAWI	JOMBANG
4	POSYANDU	0,00	3,00	UNIT	PANGGUNGRAWI	JOMBANG
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	PANGGUNGRAWI	JOMBANG
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	PANGGUNGRAWI	JOMBANG
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	PANGGUNGRAWI	JOMBANG
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	PANGGUNGRAWI	JOMBANG
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	PANGGUNGRAWI	JOMBANG
10	NORMALISASI SALURAN	3,00	3,00	LOKASI	PANGGUNGRAWI	JOMBANG
1	DRAINASE	5,69	91,65	M3	GEDONG DALEM	JOMBANG
2	TPT	0,00	365,95	M3	GEDONG DALEM	JOMBANG
3	PAVING BLOK	250,42	5066,06	M2	GEDONG DALEM	JOMBANG
4	POSYANDU	3,00	3,00	UNIT	GEDONG DALEM	JOMBANG
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	GEDONG DALEM	JOMBANG
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	GEDONG DALEM	JOMBANG
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	GEDONG DALEM	JOMBANG
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	GEDONG DALEM	JOMBANG
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	GEDONG DALEM	JOMBANG
10	NORMALISASI SALURAN	1,00	1,00	LOKASI	GEDONG DALEM	JOMBANG
1	DRAINASE	368,71	1539,01	M3	JUMLAH	JOMBANG
2	TPT	494,32	1335,22	M3	JUMLAH	JOMBANG
3	PAVING BLOK	6290,62	26094,18	M2	JUMLAH	JOMBANG

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
4	POSYANDU	4,00	10,00	UNIT	JUMLAH	JOMBANG
5	RTLH	6,00	21,00	UNIT	JUMLAH	JOMBANG
6	JAMBAN	0,00	0,00	UNIT	JUMLAH	JOMBANG
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	4,00	4,00	UNIT	JUMLAH	JOMBANG
8	PEMAGARAN MAKAM	4,00	4,00	UNIT	JUMLAH	JOMBANG
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	JUMLAH	JOMBANG
10	NORMALISASI SALURAN	7,00	7,00	LOKASI	JUMLAH	JOMBANG

Permasalahan

1. Keterbatasan pemahaman strategi perencanaan keuangan dengan perencanaan teknis kegiatan;
2. Kurangnya wadah pengevaluasian progres kegiatan di lingkup Kecamatan Jombang dalam bentuk Rakortek PPTK yang diinisiasi oleh Kecamatan Jombang.
3. Kurangnya koordinasi dengan Instansi Vertikal dalam rangka pemecahan masalah, dalam upaya terbentuknya sinergitas kegiatan yang terfokus pada akar masalah lingkungan sosial Kecamatan Jombang;
4. Masih tingginya permasalahan sosial Kemasyarakatan dikarenakan lingkungan Kecamatan Jombang dengan jumlah perkembangan penduduk terbanyak se Kota Cilegon.

Solusi

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas/kualitas pegawai dalam bentuk bintek yang bekerjasama dengan OPD teknis terkait;
2. Perlu adanya kegiatan Rapat Koordinasi Teknis yang dilaksanakan (dua) kali dalam setahun dalam rangka mengevaluasi capaian realisasi dan progres fisik kinerja di lingkup Kecamatan Jombang.
3. Meningkatkan koordinasi teknis kegiatan dengan Instansi Vertikal Kecamatan dalam rangka memetakan permasalahan dan mencari pembagian tugas, sehingga dicapai permasalahan yang tepat sasaran dan efektif serta efisien;
4. Perlu adanya kegiatan Forum Group Discuss (FDG's) atau dikenal "Temu Saran" ataupun "Konsultasi Publik" dengan didampingi pakar Sosialisasi Kemasyarakatan, sehingga didapatkan akar masalah sosial sebenarnya beserta rekomendasi solusinya oleh Para Pakar.



A.10h KECAMATAN PURWAKARTA

Tabel B.10h

Target dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Purwakarta beserta Kelurahan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KECAMATAN PURWAKARTA)						1.584,80	1.558,10	98,32%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	92	100	108,70%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	98,17	106,71%			
Dialog/audiensi dengan Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat	Terselenggaranya kegiatan dialog/audiensi dengan pimpinan/anggota organisasi sosial dan tokoh masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	115,40	103,94	90,07%
Penyusunan Profil Kecamatan	Tersedianya dokumen profil Kecamatan Purwakarta	Dokumen	1	1	100,00%	4,50	4,50	100,00%
Pembinaan Administrasi Kelurahan	Terbinanya administrasi kelurahan	Kelurahan	6	6	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Pelaksanaan Jumat Bersih Kecamatan	Pelaksanaan Jum'at Bersih	Kegiatan	12	12	100,00%	20,00	20,00	100,00%
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	Terlaksananya pembinaan anggota TP PKK Kecamatan	Kegiatan	12	12	100,00%	29,58	29,58	100,00%
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Koordinasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Cilegon	Terlaksananya koordinasi pembangunan wilayah Kecamatan Purwakarta	Kegiatan	6	6	100,00%	21,95	21,95	100,00%
Pelaksanaan Musrenbangcam	Pelaksanaan Musrenbangcam	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	Terlaksananya kegiatan penindakan pelanggaran Perda dan Perundang-undangan lingkungan kecamatan	Kegiatan	4	4	100,00%	25,00	25,00	99,98%
Penyelenggaraan Paten	Penyelenggaraan Pedoman Administrasi Terpadu Kecamatan	Kegiatan	1	1	100,00%	177,60	168,60	94,93%
Pengajian Rutin	Terlaksananya pengajian rutin kecamatan	Kegiatan	12	12	100,00%	28,48	28,48	100,00%
Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN	Terselenggaranya kegiatan PHBI dan PHBN	Kegiatan	7	7	100,00%	449,16	445,88	99,27%
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon	Terlaksananya MTQ Tingkat Kota Cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%	351,88	349,29	99,26%
Pembinaan Kewilayahan Kecamatan	Pembinaan Kewilayahan	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Monitoring Kewilayahan Kecamatan	Monitoring Kewilayahan Kecamatan	Kegiatan	1	1	100,00%	16,00	16,00	100,00%
Pembinaan Ekonomi Kerakyatan Dan UMKM Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Ekonomi Kerakyatan	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terselenggaranya Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kegiatan	1	1	100,00%	18,75	18,75	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pembinaan Peserta Kafilah MTQ	Pembinaan Peserta Kafilah MTQ	Kegiatan	1	1	100,00%	38,00	38,00	100,00%
Pembinaan Linmas	Pembinaan Linmas	Kegiatan	1	1	100,00%	35,00	35,00	100,00%
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Kegiatan	1	1	100,00%	23,00	23,00	100,00%
Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Kegiatan	1	1	100,00%	23,00	23,00	100,00%
Lomba Kelurahan	Lomba Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (Tomaliga)	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (Tomaliga)	Kegiatan	1	1	100,00%	72,50	72,14	99,50%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN RAMANUJU)						1.313,94	998,52	75,99%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)	%	92	61,58	66,93%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	88,3	95,98%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya kegiatan monitoring di link. kelurahan	bulan	12	12	100,00%	63,80	63,80	100,00%
Dukungan pencapaian kota sehat	Tersedianya Dukungan Pencapaian Kota Sehat	keg	2	2	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	keg	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Pemasangan Paving Block,	keg	1	1	100,00%	577,25	372,69	64,56%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tersedianya Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	RT/RW/LPMK	25	25	100,00%	129,95	129,95	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersedianya layanan public berbasis teknologi (aplikasi simpul paten);	keg	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Profil Kelurahan	dok	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Ruang layanan public yang representative	Kegiatan	1	1	100,00%	80,00	42,45	53,07%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya Sarpras Ketentraman dan Ketertiban Umum	pkt	1	-	0,00%	45,00	0,00	0,00%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Tersedianya Pelaksanaan PHBI dan PHBN	keg	8	8	100,00%	80,00	80,00	100,00%
Dukungan Program Iklim	Tersedianya Jumsih, PenanamanPohon, dan Pengadaan Sarpras Kebersihan	Keg	3	3	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Tersedianya Peningkatan kapasitaskepemudaan	keg	2	2	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tersedianya Fasilitasi GerakanPerlindungan Anak Terpadu BerbasisMasyarakat	keg	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Facilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Pelatihan Menjahit	keg	1	1	100,00%	50,00	49,88	99,75%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Pelatihan Las dan Manajemen Perbenkekelan kerja	keg	2	2	100,00%	50,00	49,75	99,50%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Tersedianya Pembangunan Papan Nama Kelurahan	unit	1	-	0,00%	27,94	0,00	0,00%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN KEBONDALEM)						1.467,94	1.417,24	96,55%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	92	98,98	107,59%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	95,59	103,90%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	bulan	12	12	100,00%	164,40	144,96	88,18%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya kegiatan senam untuk masyarakat	bulan	12	12	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Meningkatnya fungsi dan peran PKK Kelurahan	keg	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	pembangunan paving block	paket	1	1	100,00%	356,75	356,75	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Tersedianya plang nama jalan	paket	1	1	100,00%	30,00	29,94	99,80%
Facilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	tersedianya fasilitas untuk RT RW	bulan	12	12	100,00%	373,85	355,50	95,09%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya peningkatan kualitas layanan publik	bulan	12	12	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya peningkatan kualitas data kewilayahan	bulan	12	12	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terlaksananya peningkatan sarpras pelayanan publik	bulan	12	12	100,00%	80,00	78,30	97,88%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Terlaksananya pembuatan papan nomor rumah	bulan	12	12	100,00%	15,00	14,86	99,05%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	meningkatnya sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	bulan	12	12	100,00%	45,00	44,97	99,92%
Facilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	tersedianya fasilitas kualitas kehidupan bermasyarakat	tahun	1	1	100,00%	65,50	65,40	99,84%
Dukungan Program Iklim	Terlaksananya program dukungan iklim	keg	12	12	100,00%	50,00	49,90	99,80%
Facilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	tersedianya fasilitas kepemudaan	tahun	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Facilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya kegiatan gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	bulan	12	12	100,00%	15,00	13,95	93,00%
Facilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	terlaksananya kegiatan fasilitas peningkatan perekonomian masyarakat kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	48,81	97,62%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	tersedianya kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	45,63	91,25%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	tersedianya papan nama kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	27,44	23,29	84,89%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN KOTABUMI)						1.320,29	1.268,87	96,10%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	92	99,77	108,45%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	94,35	102,55%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Pembinaan LINMAS	Kegiatan	1	1	100,00%	117,75	117,39	99,69%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya dukungan pencapaian kota sehat di kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	35,00	35,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya PKK Kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana wilayah kelurahan	paket	1	1	100,00%	371,05	371,05	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya pemasangan plang nama jalan lingkungan di kelurahan	Unit	40	40	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terpenuhinya kesejahteraan RT/RW/LPM	Kegiatan	2	2	100,00%	313,55	284,45	90,72%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya peningkatan kualitas layanan publik	Tahun	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terlaksananya peningkatan Sarpras pelayanan publik	Tahun	1	1	100,00%	45,00	42,45	94,33%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Terlaksananya Pembuatan Papan Nomor Rumah	Buah	355	355	100,00%	15,00	14,34	95,60%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Paket	1	1	100,00%	45,00	45,00	100,00%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	70,00	70,00	100,00%
Dukungan Program Iklim	Terlaksananya dukungan program iklim di Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	41,00	40,53	98,84%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan Terfasilitasinya Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	2	2	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	13,20	88,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Paket	3	3	100,00%	50,00	43,46	86,92%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Tercapainya Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	41,06	82,12%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Tercapainya pemasangan papan nama kelurahan	Paket	1	1	100,00%	26,94	25,94	96,29%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN PABEAN)						1.344,94	1.344,30	99,95%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	92	100	108,70%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	96,33	104,71%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Tahun	1	1	100,00%	85,80	85,66	99,84%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya kegiatan senam untuk masyarakat	Tahun	1	1	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Meningkatnya fungsi dan peran PKK Kelurahan	Keg	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	paket	1	1	100,00%	569,85	569,85	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terpenuhinya pemasangan plang nama jalan lingkungan kelurahan	Unit	15	15	100,00%	10,00	10,00	100,00%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tersedianya honor RT/RW/LPM	Tahun	1	1	100,00%	136,35	136,35	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	orang	2	2	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Keg	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terlaksananya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tahun	1	1	100,00%	80,00	79,65	99,57%
Pembuatan Papan Nomor Rumah	Terlaksananya Pembuatan Papan Nomor Rumah	unit	355	355	100,00%	10,00	10,00	100,00%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	paket	2	2	100,00%	45,00	44,97	99,92%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Pelaksanaan PHBI/PHBN	Keg	3	3	100,00%	75,00	75,00	100,00%
Dukungan Program Iklim	pelaksanaan jum'at bersih	keg	12	12	100,00%	45,00	45,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Terlaksananya program kerja karang taruna	Tahun	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Tahun	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Tahun	1	1	100,00%	50,00	49,88	99,76%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Pelatihan las	Keg	1	1	100,00%	50,00	50,00	100,00%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya pemasangan papan nama kelurahan	paket	1	1	100,00%	27,94	27,94	100,00%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN TEGAL BUNDER)						1.425,94	1.424,84	99,92%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	%	92	99,96	108,65%			
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	99,88	108,57%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Kegiatan	2	2	100,00%	76,60	76,46	99,81%
Dukungan pencapaian kota sehat	Tersedianya Kegiatan Dukungan Pencapaian Kota Sehat	Kegiatan	4	4	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Terlaksananya Fungsi dan Peran PKK Kelurahan	Orang/Bulan	25	25	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Pembangunan Drainase	Lokasi	3	3	100,00%	657,25	657,25	100,00%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Tersedianya Fasilitas Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Kegiatan	4	4	100,00%	164,15	164,15	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersedianya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Bulan	12	12	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Tersedianya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Org	50	50	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Tersedianya Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Jenis	4	4	100,00%	80,00	79,82	99,78%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya Sarana Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	100,00%	45,00	44,84	99,63%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	75,00	75,00	100,00%
Dukungan Program Iklim	Tersedianya Dukungan Program Iklim	Kegiatan	2	2	100,00%	45,00	44,80	99,56%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	2	2	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Kegiatan	2	2	100,00%	45,00	44,93	99,84%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan dan Kualitas Tenaga Kerja	Orang	10	10	100,00%	50,00	49,90	99,80%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Tersedianya Papan Nama Kelurahan	Paket	1	1	100,00%	27,94	27,70	99,14%
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (KELURAHAN PURWAKARTA)						1.404,94	1.397,36	99,46%
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana	%	92	99,03	107,64%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel)							
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	%	92	99,88	108,57%			
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat	Org	22	22	100,00%	97,80	97,65	99,84%
Dukungan pencapaian kota sehat	Terlaksananya Dukungan Pencapaian Kota Sehat	Kegiatan	4	4	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	Meningkatnya fungsi dan peran PKK Kelurahan	Bulan	12	12	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	paket	1	1	100,00%	644,65	644,65	100,00%
Pemasangan Plang Nama Jalan lingkungan kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Plang Nama Jalan Lingkungan	buah	25	25	100,00%	18,83	18,83	100,00%
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat	Bulan	12	12	100,00%	169,55	169,55	100,00%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersedianya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	bulan	12	12	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	Dokumen	3	3	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	49,55	99,10%
Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1	100,00%	40,00	39,85	99,63%
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	Kegiatan	5	5	100,00%	75,00	75,00	100,00%
Dukungan Program Iklim	Terlaksananya Kegiatan Dukungan Program Iklim	kegiatan	1	1	100,00%	30,00	30,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	kegiatan	1	1	100,00%	15,00	15,00	100,00%
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	Adanya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	kegiatan	2	2	100,00%	39,12	39,02	99,74%
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Tersedianya Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	49,97	99,95%
Pemasangan papan Nama Kelurahan	Terlaksananya Pemasangan Papan Nama Kelurahan	Kegiatan	1	1	100,00%	30,00	23,29	77,65%

Program Peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan public yang terbaik kepada masyarakat agar terciptanya tatakelola pemerintah kecamatan dan kelurahan secara transparan, akuntabel,

partisipatif, responsif, santun dan berwibawa sehingga diharapkan masyarakat Cilegon sejahtera.

Indikator keberhasilan dukungan layanan pemerintahan yaitu persentase ketersediaan data informasi sektoral, persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik, tingkat disiplin aparatur serta kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas), rata-rata realisasi kinerja capaiannya 95.18% dari yang ditargetkan di Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon sebesar 84%.

Indikator keberhasilan program peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan yaitu proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel) dan persentase penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di kecamatan. Rata-rata realisasi kinerja capaiannya 96.78% dari yang ditargetkan di Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon sebesar 92%.

Program peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan terdapat beberapa kendala pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Kel Ramanuju:
 - a. **Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan** dengan serapan anggaran hanya 64,56%, hal ini dikarenakan hal ini karena titik lokus berbenturan dengan kepemilikan lahan dari pihak lain (PJKA, KS dll);
 - b. **Peningkatan Sarpras Pelayanan Publik** hal ini dikarenakan landscape ruang kel ramanuju kurang memadai dalam menerapkan kegiatan ini, sehingga pengalokasian anggarannya tidak terealisasi seluruhnya;
 - c. Kegiatan **Peningkatan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum** tidak terserap karena wacana perpindahan Gedung kantor sehingga anggaran tidak dapat diserap;
 - d. Kegiatan **Pemasangan papan Nama Kelurahan** karena terbentur kepemilikan lahan dan asset.

Tabel B.10h.1
Capaian Realisasi Sarpras Lokal Kelurahan DPWKel 2019
Kecamatan Purwakarta

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	DRAINASE	164,71	273,43	M3	RAMANUJU	PURWAKARTA
2	TPT	0,00	289,75	M3	RAMANUJU	PURWAKARTA
3	PAVING BLOK	31,00	540,00	M2	RAMANUJU	PURWAKARTA



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	RAMANUJU	PURWAKARTA
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	RAMANUJU	PURWAKARTA
6	JAMBAAN	0,00	0,00	UNIT	RAMANUJU	PURWAKARTA
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	4,00	4,00	UNIT	RAMANUJU	PURWAKARTA
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	RAMANUJU	PURWAKARTA
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	RAMANUJU	PURWAKARTA
10	NORMALISASI SALURAN	2,00	2,00	LOKASI	RAMANUJU	PURWAKARTA
1	DRAINASE	96,79	513,13	M3	KEBONDALEM	PURWAKARTA
2	TPT	0,00	0,00	M3	KEBONDALEM	PURWAKARTA
3	PAVING BLOK	1028,70	2951,56	M2	KEBONDALEM	PURWAKARTA
4	POSYANDU	0,00	1,00	UNIT	KEBONDALEM	PURWAKARTA
5	RTLH	2,00	9,00	UNIT	KEBONDALEM	PURWAKARTA
6	JAMBAAN	0,00	0,00	UNIT	KEBONDALEM	PURWAKARTA
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	KEBONDALEM	PURWAKARTA
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	KEBONDALEM	PURWAKARTA
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	KEBONDALEM	PURWAKARTA
10	NORMALISASI SALURAN	0,00	0,00	LOKASI	KEBONDALEM	PURWAKARTA
1	DRAINASE	53,22	322,77	M3	KOTABUMI	PURWAKARTA
2	TPT	0,00	75,00	M3	KOTABUMI	PURWAKARTA
3	PAVING BLOK	0,00	1527,20	M2	KOTABUMI	PURWAKARTA
4	POSYANDU	1,00	2,00	UNIT	KOTABUMI	PURWAKARTA
5	RTLH	0,00	2,00	UNIT	KOTABUMI	PURWAKARTA
6	JAMBAAN	0,00	0,00	UNIT	KOTABUMI	PURWAKARTA
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	KOTABUMI	PURWAKARTA
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	KOTABUMI	PURWAKARTA
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	KOTABUMI	PURWAKARTA
10	NORMALISASI SALURAN	0,00	0,00	LOKASI	KOTABUMI	PURWAKARTA
1	DRAINASE	120,95	571,23	M3	PABEAN	PURWAKARTA
2	TPT	0,00	807,27	M3	PABEAN	PURWAKARTA
3	PAVING BLOK	0,00	1975,26	M2	PABEAN	PURWAKARTA
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	PABEAN	PURWAKARTA
5	RTLH	15,00	15,00	UNIT	PABEAN	PURWAKARTA
6	JAMBAAN	0,00	0,00	UNIT	PABEAN	PURWAKARTA
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	5,00	5,00	UNIT	PABEAN	PURWAKARTA
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	PABEAN	PURWAKARTA
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	PABEAN	PURWAKARTA
10	NORMALISASI SALURAN	1,00	1,00	LOKASI	PABEAN	PURWAKARTA
1	DRAINASE	191,26	801,41	M3	TEGAL BUNDER	PURWAKARTA
2	TPT	116,67	924,70	M3	TEGAL BUNDER	PURWAKARTA
3	PAVING BLOK	839,78	1526,16	M2	TEGAL BUNDER	PURWAKARTA
4	POSYANDU	0,00	0,00	UNIT	TEGAL BUNDER	PURWAKARTA
5	RTLH	6,00	6,00	UNIT	TEGAL BUNDER	PURWAKARTA
6	JAMBAAN	0,00	0,00	UNIT	TEGAL BUNDER	PURWAKARTA
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	TEGAL BUNDER	PURWAKARTA
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	TEGAL BUNDER	PURWAKARTA
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	TEGAL BUNDER	PURWAKARTA
10	NORMALISASI SALURAN	1,00	1,00	LOKASI	TEGAL BUNDER	PURWAKARTA
1	DRAINASE	23,00	434,50	M3	PURWAKARTA	PURWAKARTA
2	TPT	322,47	734,58	M3	PURWAKARTA	PURWAKARTA

NO	PEKERJAAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TOTAL	SATUAN	KELURAHAN	KECAMATAN
3	PAVING BLOK	772,40	5692,24	M2	PURWAKARTA	PURWAKARTA
4	POSYANDU	1,00	1,00	UNIT	PURWAKARTA	PURWAKARTA
5	RTLH	0,00	0,00	UNIT	PURWAKARTA	PURWAKARTA
6	JAMBAAN	0,00	0,00	UNIT	PURWAKARTA	PURWAKARTA
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	0,00	0,00	UNIT	PURWAKARTA	PURWAKARTA
8	PEMAGARAN MAKAM	0,00	0,00	UNIT	PURWAKARTA	PURWAKARTA
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	PURWAKARTA	PURWAKARTA
10	NORMALISASI SALURAN	1,00	1,00	LOKASI	PURWAKARTA	PURWAKARTA
1	DRAINASE	649,93	2916,48	M3	JUMLAH	PURWAKARTA
2	TPT	439,14	2831,30	M3	JUMLAH	PURWAKARTA
3	PAVING BLOK	2671,88	14212,42	M2	JUMLAH	PURWAKARTA
4	POSYANDU	2,00	4,00	UNIT	JUMLAH	PURWAKARTA
5	RTLH	23,00	32,00	UNIT	JUMLAH	PURWAKARTA
6	JAMBAAN	0,00	0,00	UNIT	JUMLAH	PURWAKARTA
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	9,00	9,00	UNIT	JUMLAH	PURWAKARTA
8	PEMAGARAN MAKAM	1,00	1,00	UNIT	JUMLAH	PURWAKARTA
9	KAMPUNG MERAH PUTIH	0,00	0,00	PAKET	JUMLAH	PURWAKARTA
10	NORMALISASI SALURAN	5,00	5,00	LOKASI	JUMLAH	PURWAKARTA

Permasalahan

1. Tatakelola pengadministrasian dokumen serta pelaksanaan kegiatan teknis masih ada yang belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan sering terhambat oleh persiapan dan perencanaan yang kurang baik dalam kegiatan, sehingga beberapa anggaran pun tidak terserap secara optimal;
2. Masih kurangnya monitoring internal Kecamatan Purwakarta terhadap kelurahan sehingga perencanaan kegiatan hingga capaian realisasi kinerja dan anggaran masih tidak terlaksana secara optimal.

Solusi

1. Agar ditingkatkan kinerja aparatur dalam lingkup Kecamatan dan Kelurahan di Purwakarta, peningkatan kinerja ini dapat dilakukan melalui bintek yang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan OPD teknis dan terkait. Selain itu dapat dilakukan FGD atau konsultasi public dengan didampingi pakar Bersama masyarakat agar didapatkan rekomendasi langsung untuk masalah sosial;
2. Perlunya dilaksanakan rapat evaluasi internal setiap triwulan atau semester untuk mengevaluasi kegiatan dan capaian realisasi anggaran dalam lingkup Kecamatan dan Kelurahan di Purwakarta.

A.11 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Badan Kesbangpol)

Tabel 3.4.1m

Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan						800,00	348,58	43,57%
	Cakupan pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	%	70,00	45,45	64,93%			
	Cakupan penerapan bela negara	%	80,00	80,00	100,00%			
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Bela Negara	Bertambahnya jumlah Kader/anggota Forum Bela Negara Kota Cilegon	orang	51	51	100,00%	200,00	153,42	76,71%
	Pelaksanaan peringatan HUT RI dan Bela Negara Tingkat Kota Cilegon Tahun 2019	Orang	50	50	100,00%			
Lomba Kampung Merah Putih Se-Kota Cilegon	Meningkatnya semangat cinta tanah air dan partisipasi masyarakat dalam memperingati HUT RI demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI secara baik	kel/kec	43	6	13,95%	300,00	93,80	31,27%
Fasilitasi Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Merah Putih	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan semangat cinta tanah air masyarakat melalui pembentukan dan pemberdayaan Kampung Merah Putih	kel/kec	43	6	13,95%	250,00	53,81	21,52%
Peningkatan Kesadaran Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa bagi Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kesadaran Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa bagi Masyarakat	Orang	30	30	100,00%	50,00	47,55	95,10%

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang kesatuan bangsa, maka dicanangkanlah Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan. Program ini berisikan program dan kegiatan mengenai peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat Kota Cilegon.

Dalam program ini didapat data ukuran tingkat pembauran dan cakupan lainnya yang berhubungan dengan kesatuan bangsa. Dalam program ini didapat data ukuran tingkat pembauran dan cakupan lainnya yang berhubungan dengan kesatuan bangsa. Berikut penjelasan mengenai capaian Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2019.

a. Cakupan pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Indikator program ini dapat disebut juga sebagai Pokja Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) merupakan indikator yang berasal dari kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan pemberdayaan dan pembinaan forum-forum kebangsaan. Masyarakat Kota Cilegon yang sangat heterogen yang terdiri dari berbagai macam ras, agama dan suku daerah, membutuhkan sebuah wadah atau sarana/prasarana serta forum-forum kebangsaan yang berkaitan dengan upaya pembinaan ideologi Pancasila, peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan, bela negara dan pembauran kebangsaan. Pada indikator ini,

program atau kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Merah Putih dan Kegiatan Lomba Kampung Merah Putih yang merupakan *Program Inovasi Daerah/OPD* sebagai suatu wadah dan/atau sarana komunikasi dalam rangka pemeliharaan persatuan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Di Kota Cilegon.

Program Kampung Merah Putih dapat terwujud bilamana di suatu lingkungan RT/RW/Kelurahan telah memiliki Gerbang atau Gapura Kampung Merah Putih dan menyediakan dan/atau memiliki Poskamling aktif sebagai Sarang Merpati Watu dengan melibatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat langsung sebagai suatu wadah refleksi dan aktualisasi nilai-nilai kebangsaan NKRI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara bertanggungjawab.

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pembangunan atau rehabilitasi aspek prasarana/sarana Pendidikan Wawasan Kebangsaan di masyarakat berupa Bangunan Gapura dan Bangunan Poskamling sebagai Sarana Kebangsaan untuk Memelihara Persatuan, Keamanan dan Ketertiban demi Warga Bersatu (Sarang Merpati Watu). Sarang Merpati Watu yang berbentuk bangunan Poskamling atau Pos Ronda, yang dapat dijadikan sebagai wadah refleksi dan pusat kegiatan kebangsaan warga masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara persatuan, keamanan dan ketertiban kampung atau lingkungannya masing-masing.

Sejak diluncurkan secara resmi oleh Bapak Plt. Walikota Cilegon sebagai *Pilot Project* Program Kampung Merah Putih (KMP) pada Desember 2017, sampai dengan Tahun 2019 ini, Badan Kesbangpol Kota Cilegon baru (telah) membentuk sebanyak 14 (empat belas) Kampung Merah Putih (KMP) yang sebelumnya telah berjumlah 8 (delapan) Lokasi KMP di Tahun 2018 dan 6 (enam) Lokasi KMP di Tahun 2019. Sumber dana kegiatan tersebut dari APBD Kota Cilegon yang terdiri dari Kegiatan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) dan Anggaran Badan Kesbangpol Kota Cilegon sebagai OPD Penggagas/Innovator.

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Merah Putih Tahun Anggaran 2019 memiliki target/sasaran berupa terlaksananya Pembangunan Gapura Kampung Merah Putih sebanyak 43 (empat puluh tiga) kelurahan/unit dan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Poskamling sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) Lokasi/RT di setiap Lingkungan/RW/KMP sebagai **Sarang Merpati Watu** (*Sarana Kebangsaan untuk Memelihara Persatuan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat demi Warga Bersatu*)".

Namun berdasarkan tabel realisasi kegiatan diatas, dapat dilihat bahwa target capaian program/kegiatan pada Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan ini hanya mencapai 45,45% sehingga dinilai masih rendah dari rencana target sebesar



70% dari total 100% pada TA. 2020. Dan sangat minimnya serapan anggaran (realisasi) terutama pada Kegiatan Fasilitas Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Merah Putih (21,53%) dan Kegiatan Lomba Kampung Merah Putih (31,27%).

Sehubungan hal tersebut, terdapat beberapa sebab/penjelasan yang menjadi alasan minimnya serapan anggaran (realisasi) khususnya pada 2 (dua) Kegiatan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak masuknya Kegiatan KMP sebagai mandatory wajib dalam Perwal Juknis Kegiatan DPWKel TA. 2019 namun menjadi kegiatan pilihan oleh Kelurahan;
 - Dalam proses penyusunan dan verifikasi anggaran / RKA TA. 2019, Badan Kesbangpol Kota Cilegon telah meminta bantuan dan/atau mengajukan usulan kepada Tim TAPD, agar Kegiatan KMP mendapat dukungan secara baik dan masif untuk menjadi *program / mandatori wajib* pada Juknis DPWKel sehingga wajib dianggarkan dan dilaksanakan oleh *Lurah dhi. Kasi. Ekonomi Pembangunan* dalam Program DPWKel di seluruh Kelurahan sebagai wujud dukungan dan implementasi program / kegiatan Fasilitas Pembentukan dan Pemberdayaan KMP yang sudah dianggarkan pada OPD Badan Kesbangpol sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Cilegon Nomor 55 Tahun 2017; Namun faktanya Kegiatan Pembangunan Sarpras Gapura KMP dan Pembangunan/Rehabilitasi Poskamling menjadi program/kegiatan pilihan dalam Juknis DPWKel sehingga tidak semua Kelurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan KMP tersebut secara maksimal pada Kegiatan DPWKel nya dengan alasan masih ada kegiatan pilihan lain yang lebih penting.
 - Pada DPA TA. 2019 Badan Kesbangpol Kota Cilegon telah menganggarkan untuk 43 Lokasi/KMP, namun karena Kelurahan yang mengusulkan Kegiatan KMP hanya sebanyak 6 (enam) Kel/KMP, maka hal tersebut secara langsung sangat berdampak pada minimnya penyerapan / realisasi anggaran Kegiatan Fasilitas Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Merah Putih dan Kegiatan Lomba Kampung Merah Putih secara keseluruhan. Sehingga Badan Kesbangppol tidak bisa merealisasikan anggaran tersebut secara maksimal sebagaimana yang telah dianggarkan untuk 43 Kelurahan/KMP pada DPA.
2. Oleh karena Kegiatan KMP tidak menjadi kegiatan mandatori wajib dalam Juknis DPWKel TA. 2019, maka sangat berdampaknya pada kurangnya minat, semangat dan partisipasi Kelurahan/Lurah/Camat dalam memasukan program KMP tersebut sebagai salah satu kegiatan wajib yang

ada di Kegiatan DPWKel masing-masing sebagai fasilitator dalam mendukung pembentukan Kampung Merah Putih di Kota Cilegon;

3. Camat/Lurah sebagai Pengurus Pokja PPWK Tingkat Kecamatan dinilai belum siap merespon dan menampung tingginya minat dan ekspektasi masyarakat dalam pembentukan dan pemberdayaan Kampung Merah Putih di Kelurahan/Kecamatan masing-masing. Padahal, Program Kampung Merah Putih ini dapat dan telah menjadi sarana Wisata Kebangsaan alternatif bagi masyarakat Kota Cilegon maupun masyarakat dari luar Kota, salah satu contohnya pada Tahun 2018, Sutradara dan seluruh artis Film Preman Pensiun mengunjungi salah satu lingkungan Kampung Merah Putih yang ada di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dengan memberikan apresiasi yang tinggi atas telah terbangunnya suatu wadah komunikasi warga dan partisipasi masyarakat secara baik.

b. Cakupan pemberdayaan Bela Negara

Indikator ini meliputi cakupan diklatsar Bela Negara dan pemberdayaan kader Bela Negara. Untuk meningkatkan pembinaan karakter bangsa dan pemeliharaan semangat bela Negara masyarakat dan ASN di Kota Cilegon, Badan Kesbangpol telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan Kader Bela Negara yang sudah ada dan membentuk kader Bela Negara yang baru melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Bela Negara yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Kota Cilegon. Target utama indikator setiap tahunnya yaitu sebanyak 48 Kader/Orang (80%) dari target tambahan yaitu 60 kader Bela Negara (100%). Realisasi target pada Tahun Anggaran 2019 yaitu 51 kader Bela Negara (85.55%). Secara kuantitas, kader Bela Negara sudah berjumlah 138 orang tersebut dinilai masih sangat minim dari target total sebanyak 500 orang pada tahun 2021. Apalagi pada TA. 2020 kegiatan Diklatsar Bela Negara tidak terakomodir usulan anggarannya untuk dilaksanakan. Namun demikian, target Tahun 2019 ini dinilai sangat baik karena dipengaruhi oleh adanya minat dan respon yang tinggi ASN/PNS Kota Cilegon dalam mengikuti Diklatsar Bela Negara. Dimana kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum di seluruh Kecamatan/Kelurahan se Kota Cilegon sebagai ujung tombak pemeliharaan kondisi Kamtrantibmas di wilayah Kota Cilegon.

Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesbangpol Kota Cilegon bertujuan untuk terus meningkatkan dan merawat pengetahuan wawasan kebangsaan serta semangat kebangsaan bagi masyarakat Kota Cilegon. Capaian realisasi anggaran seluruh anggaran pada program ini mencapai Rp348.577.900,- dari target Rp800.000.000,- dengan presentase realisasi mencapai 43.57%. Selain

capaian pelaksanaan kegiatan yang efektif, beberapa kegiatan pada program ini mengalami capaian realisasi anggaran dan kegiatan kurang dari 80%. Kegiatan tersebut yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Bela Negara (76,71%)

Capaian realisasi kegiatan ini dikarenakan tidak terealisasinya beberapa rincian objek pada DPA pendidikan dan pelatihan dasar Bela Negara. Tindak lanjut untuk mengatasi realisasi anggaran yang belum maksimal pada tahun anggaran yang akan datang yaitu akan dilakukan perencanaan keuangan dan realisasi yang lebih baik pada TA 2020 agar sesuai cash budget;

2. Lomba Kampung Merah Putih Se-Kota Cilegon (31,27%)

Capaian realisasi kegiatan ini dinilai sangat minim dikarenakan adanya dampak korelatif dari kurang maksimalnya capaian target/sasaran pada Kegiatan Fasilitas Pembentukan dan Pemberdayaan KMP sehingga beberapa kelurahan tidak siap / tidak bisa mengikuti Kegiatan Lomba KMP Tahun 2019 dalam rangka memeriahkan HUT RI Ke-74 Tingkat Kota Cilegon Tahun 2019. Selain itu beberapa kampung yang ditargetkan tidak memasukan dalam program DPWKel nya karena kegiatan ini merupakan program pilhan dan bukan mandatori wajib dalam kegiatan juknis DPWKel. Serta usulan masyarakat yang menginginkan ikut serta dalam kegiatan ini namun koordinasi yang belum baik antara Kesbangpol dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan. Tindak lanjut untuk mengatasi realisasi anggaran yang belum maksimal pada tahun anggaran yang akan datang yaitu Mendorong kegiatan kampung merah putih menjadi mandatori pada program DPWKel;

3. Fasilitas Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Merah Putih (21,52%)

Capaian realisasi anggaran kegiatan ini dinilai sangat minim, dikarenakan belum optimalnya dukungan aturan dalam Juknis DPWKel TA. 2019 sehingga beberapa Kelurahan tidak siap dalam memfasilitasi kegiatan Pembentukan Kampung Merah Putih pada anggaran DPWKel TA. 2019 dengan alasan sebagaimana telah dijelaskan diatas. Tindak lanjut untuk mengatasi realisasi anggaran yang belum maksimal pada tahun anggaran yang akan datang yaitu Mendorong kegiatan kampung merah putih menjadi mandatori pada program DPWKel.

A.12 Program Peningkatan LSM dan ORMAS (Badan Kesbangpol)

Tabel 3.4.1n

Target dan Realisasi Program Peningkatan LSM dan ORMAS Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program peningkatan LSM dan ORMAS						2.416,80	2.300,88	95,20%
	Tingkat Kondusifitas Kota melalui KOMINDA	%	80,00	75,00	93,75%			
	Proporsi lembaga di bidang kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan	%	60,00	34,00	56,67%			
	Cakupan pendataan dan pembinaan ormas dan LSM	%	100,00	100,00	100,00%			
	Indeks demokrasi Kota Cilegon	poin	80,00	73,78	92,23%			
	Tingkat Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Antar Umat Beragama dan Antar Etnis di Kota Cilegon	%	60,00	40,00	66,67%			
	Cakupan pembinaan penanganan konflik	%	100,00	100,00	100,00%			
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Penanganan Konflik Sosial	Terlatihnya Pemetaan Wilayah Rawan Konflik di Kota Cilegon terhadap tenaga Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Lainnya	orang	60	60	100,00%	232,45	212,92	91,60%
	Peningkatan kapasitas tenaga dalam melakukan deteksi dini dan penanganan korban Konflik sosial di Masyarakat	Orang	60	60	100,00%			
	Peningkatan Kapasitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Cilegon	Kegiatan	4	4	100,00%			
	Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Kota Cilegon	Orang	100	100	100,00%			
Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Terlaksananya Kegiatan Sweeping Narkoba	Kegiatan	4	4	100,00%	200,00	178,49	89,24%
	Terlaksananya Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tingkat Kota Cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya Pembentukan Kelurahan Anti Narkoba	Kelurahan	3	3	100,00%			
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Duta Anti Narkotika Tingkat Pelajar SLTP dan SLTA	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Terlaksananya Pelaksanaan media promosi dan stikerisasi tentang Anti Narkoba di Tempat-umum di Kota Cilegon	Tempat	8	8	100,00%			
Koordinasi Unsur Pengamanan Wilayah di Kota Cilegon	Terlaksananya keselarasan kegiatan pengamanan wilayah di Kota Cilegon	Kegiatan	100	100	100,00%	976,34	972,54	99,61%
Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi	Terlaksananya sistem pelaporan situasi politik di daerah	Kegiatan	6	6	100,00%	118,81	112,40	94,60%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Perkembangan politik di daerah								
	Terlaksananya Evaluasi situasi Politik di Daerah	Kegiatan	2	2	100,00%			
Peningkatan Kapasitas Tim Gerakan Nasional Revolusi Mental	Terlaksananya sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental Tingkat Kota Cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%	91,00	61,63	67,72%
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Revolusi Mental Tingkat Kota Cilegon	Kegiatan	2	2	100,00%			
	Tersedianya Dokumen Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Cilegon	Buku	6	6	100,00%			
Fasilitasi Partai Politik, Pendidikan Budaya Politik, dan Pemilu	Terlaksananya pendidikan budaya politik bagi masyarakat, Mahasiswa serta pemilih pemula	Kegiatan	5	5	100,00%	160,05	155,97	97,45%
	Terlaksananya fasilitasi bantuan keuangan kepada Partai Politik	Kegiatan	1	1	100,00%			
	Terlaksananya verifikasi administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Kegiatan	9	9	100,00%			
Pemantauan Tenaga Kerja Asing dan Pemberi Kerja di Kota Cilegon	Terlaksananya Pemantauan Tenaga Kerja Asing, Warga Negara Asing dan Lembaga Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon	Orang	100	100	100,00%	70,00	62,50	89,29%
Fasilitasi, Pembinaan, dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi	4	4	100,00%	149,80	148,32	99,01%
	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi	35	35	100,00%			
Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan di Kota Cilegon	Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Kewaspadaan Dini di Daerah	Kegiatan	1	1	100,00%	198,35	178,87	90,18%
	Terlaksananya Kegiatan koordinasi tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kota Cilegon	Kegiatan	4	4	100,00%			
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	4	4	100,00%			
Pengembangan Budaya dan Etika Politik	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Budaya dan Etika Politik	Kegiatan	2	2	100,00%	50,00	50,00	100,00%
Penguatan Peran Partai Politik dalam Persiapan Pilkada Kota Cilegon	Meningkatnya peran Partai Politik dalam pelaksanaan Pilkada Kota Cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	49,94	99,88%
Diseminasi Tata Cara Pengajuan, Pengelolaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Tersosialisasikannya Tata Cara Pengajuan dan Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Partai Politik	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	25,00	100,00%
FGD Antar Umat Beragama	Terlaksananya FGD Antar Umat Beragama Se-Kota Cilegon	Kegiatan	1	1	100,00%	25,00	23,93	95,70%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Penyusunan Sistem Informasi Ormas Kota Cilegon	Terlaksananya Penyusunan Sistem Ormas Kota Cilegon	Paket	1	1	100,00%	70,00	68,40	97,71%

Program Peningkatan LSM dan Ormas merupakan program yang disediakan oleh Badan Kesbangpol Kota Cilegon dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang politik. Program ini berisi tentang kegiatan-kegiatan dalam bidang penanganan konflik sosial dan fasilitasi LSM, Ormas, dan Parpol di Kota Cilegon.

Dalam menjaga kondusifitas politik, pemeliharaan ekonomi, sosbud, FKUB, dan pembinaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, Badan Kesbangpol Kota Cilegon mengadakan Program Peningkatan LSM dan Ormas. Dalam program ini, didapat data berkaitan dengan fasilitasi kegiatan politik, fasilitasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosbud, FKUB, dan pembinaan penanganan konflik serta kewaspadaan dini. Berikut penjelasan mengenai capaian Program Peningkatan LSM dan Ormas pada tahun 2019:

A. Indeks demokrasi Kota Cilegon

Badan Kesbangpol Kota Cilegon melaksanakan kegiatan yang berkaitan dalam memelihara demokrasi yang ada di Kota Cilegon. Hal itu dapat diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia. Indikator ini merupakan indikator yang diukur oleh BPS Provinsi Banten. Indikator ini juga berdasarkan nilai yang dimiliki oleh Indeks Demokrasi Provinsi Banten. Badan Kesbangpol Kota Cilegon turut serta dalam menyumbangkan komponen perhitungan IDI yaitu Fasilitasi Peran Parpol di Kota Cilegon, Pendidikan Politik Masyarakat, Fasilitasi FKUB dan Ormas, dan komponen lainnya. Nilai yang dicapai yaitu 73.78 point.

B. Proporsi lembaga di bidang kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan

Indikator ini didapat berdasarkan partai politik pemenang Pemilu Tahun 2019 yang ada di Kota Cilegon yang melaporkan laporan keuangannya dan terfasilitasi pada Badan Kesbangpol Kota Cilegon. Dari sembilan partai (Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PPP) yang harus melaporkan laporan keuangannya, keseluruhan partai melaporkannya kepada Badan Kesbangpol Kota Cilegon. Persentase indikator ini mencapai 100.00%.

C. Tingkat Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Antar Umat Beragama dan Antar Etnis di Kota Cilegon

Dalam memelihara pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosbud, dan FKUB. Badan Kesbangpol Kota Cilegon melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pada tahun 2019, Badan Kesbangpol Kota Cilegon telah melaksanakan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, namun dalam hal pemeliharaan ketahanan

ekonomi dan sosbud, Badan Kesbangpol Kota Cilegon belum menyelenggarakannya. Pada indikator ini mencapai target 50% dari target 60%.

D. Cakupan pendataan dan pembinaan ormas dan LSM

Dalam memfasilitasi Ormas dan LSM yang ada di Kota Cilegon, Badan Kesbangpol Kota Cilegon melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pada Tahun ini, persentase yang dicapai pada tahun ini mencapai 100%. Dari target 39 organisasi yang akan dilakukan pembinaan, secara keseluruhan organisasi tersebut telah terbina pada tahun ini. Hal ini tidak lepas dari keseriusan Badan Kesbangpol dalam menjaga hak-hak masyarakat Kota Cilegon untuk berkelompok. Selain itu, Badan Kesbangpol juga telah merancang aplikasi yang dapat mendukung keberadaan aktivitas ormas dan LSM yang ada di Kota Cilegon.

E. Cakupan pembinaan penanganan konflik

Untuk menjaga kondusifitas keamanan yang ada di Kota Cilegon, membuat Badan Kesbangpol melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan penanganan konflik. Pada tahun ini, indikator cakupan pembinaan penanganan konflik mencapai persentase 100%. Hal itu didapat dari target unsur Kamtibmas Kelurahan di Kota Cilegon pada tahun ini (60 Orang) dapat terpenuhi. Sehingga, kapasitas unsur Kamtibmas dalam pencegahan dan penanganan konflik dapat meningkat dan bermanfaat bagi lingkungannya.

F. Cakupan pembinaan penanganan konflik

Untuk menjaga kondusifitas keamanan yang ada di Kota Cilegon, membuat Badan Kesbangpol melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan penanganan konflik. Pada tahun ini, indikator cakupan pembinaan penanganan konflik mencapai persentase 100%. Hal itu didapat dari target unsur Kamtibmas Kelurahan di Kota Cilegon pada tahun ini (60 Orang) dapat terpenuhi. Sehingga, kapasitas unsur Kamtibmas dalam pencegahan dan penanganan konflik dapat meningkat dan bermanfaat bagi lingkungannya.

G. Tingkat kondusifitas Kota Melalui KOMINDA

Dalam memelihara kondusifitas Kota Cilegon dalam gangguan peredaran gelap Narkotika dan gangguan keamanan lainnya, Badan Kesbangpol Kota Cilegon melaksanakan kegiatan Sweeping Narkotika, Pemantauan Tenaga Kerja Asing, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Koordinasi Kominda. Namun dalam hal koordinasi Kominda karena terkait regulasi yang sudah berubah, maka mulai tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan kembali pada Badan Kesbangpol Kota Cilegon. Persentase yang dicapai pada indikator ini mencapai 75% dari target 80%.

Program Peningkatan LSM dan Ormas pada Badan Kesbangpol Kota Cilegon bertujuan untuk terus memelihara demokrasi, ketahanan ekososbu dan FKUB, serta

memelihara kondusifitas keamanan di Kota Cilegon. Capaian realisasi anggaran program ini mencapai Rp2,300,878,850,- dengan persentase realisasi 95,20%. Selain capaian kegiatan yang efektif, beberapa kegiatan pada program ini mengalami capaian realisasi anggaran kurang dari 80%, yaitu kegiatan *Peningkatan Kapasitas Tim Gerakan Nasional Revolusi Mental*, hal ini dikarenakan Capaian realisasi kegiatan ini dikarenakan tidak terealisasinya beberapa rincian objek pada DPA Peningkatan Kapasitas Tim Gerakan Nasional Revolusi Mental. Serta kegiatan *Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Cilegon* yang tidak terlaksana karena memang tidak direncanakan pada DPA TA 2019.

Permasalahan

1. Berubahnya regulasi pusat terkait dasar hukum kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol Kota Cilegon dan mempengaruhi capaian indikator Program, salah satu contohnya yaitu Kegiatan KOMINDA.
2. Masih adanya realisasi target indikator kegiatan dan anggaran di bawah 80%.
3. Aset gedung kantor yang dimiliki Dinas Satpol PP mengakibatkan terkendalanya realisasi kegiatan seperti pengadaan instalasi listrik.

Solusi

1. Berkoordinasi dengan pihak terkait perubahan regulasi sehingga akan meningkatkan kinerja OPD Kesbangpol kedepannya.
2. Melakukan evaluasi perencanaan kegiatan dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan evaluasi kegiatan setiap triwulannya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Satpol PP dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung kantor.

A.13 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Tabel 4.4.1o

Target dan Realisasi Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						498,85	462,02	92,62%
	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	86	85,71	100,00%			
	Persentase meningkatnya peralatan kesiapsiagaan bencana daerah	%	86	57,14	66,67%			
Sosialisasi Informasi Kebencanaan melalui Radio, Media Cetak/Elektronik dan Plang Himbauan/Larangan	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Kebencanaan melalui Radio, Media Cetak/Elektronik, dan Plang Himbauan/Larangan	Kegiatan	1	1	100,00%	103,90	103,66	99,77%
Sosialisasi Pencegahan Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Bencana	Kegiatan	1	1	100,00%	42,75	39,69	92,84%
Mitigasi Bencana	Terlaksananya Mitigasi Bencana	Kegiatan	1	1	100,00%	75,42	73,01	96,81%
Apel Siaga Bencana	Terlaksananya Apel Kesiapsiagaan	Kegiatan	1	1	100,00%	76,77	71,87	93,62%
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Kebencanaan	Tersedianya Sarana Pendukung Kebencanaan pada Pusdalops - PB	Kegiatan	1	1	100,00%	200,00	173,78	86,89%

Indikator Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dan Persentase meningkatnya peralatan kesiapsiagaan bencana daerah. Capaian kinerja pada indikator tersebut di atas sepanjang tahun 2019 adalah :

1. Realisasi indikator Persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dihitung dari prosentase kelompok aparatur pemerintah dan masyarakat yang terlatih dalam penanggulangan bencana. Pada tahun 2019 capaian indikator sebesar 85,71% yakni sebanyak 6 (enam) kelompok masyarakat telah dilatih dari target 7 (tujuh) kelompok masyarakat sampai dengan tahun 2021.

Tujuh kelompok aparatur dan masyarakat adalah sbb:

- 1) Kelompok Pemuda; (Tahun Anggaran 2018)
- 2) Kelompok Wanita (Tahun anggaran 2016)
- 3) Kelompok Buruh/Karyawan
- 4) Kelompok Pelajar/Mahasiswa (Tahun Anggaran 2018)
- 5) Kelompok Aparatur (PNS/Non PNS) (Tahun Anggaran 2019)
- 6) Kelompok Guru (Tahun anggaran 2016)
- 7) Kelompok RT/RW (Tahun anggaran 2017)

Dari 7 (tujuh) kelompok aparatur dan masyarakat yang belum dilakukan adalah kelompok buruh / karyawan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Target kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 85,71% dan realisasi sebesar 85,71% sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%.

2. Realisasi indikator Persentase meningkatnya peralatan kesiapsiagaan bencana daerah dihitung dari prosentase jumlah peralatan kesiapsiagaan bencana. Pada tahun 2019 capaian indikator Persentase meningkatnya peralatan kesiapsiagaan bencana daerah sebesar 57,14% dari target sebesar 85,71% sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 66,67%. Hal ini disebabkan dari target pemenuhan peralatan kesiapsiagaan sebanyak 6 (enam) peralatan baru terpenuhi 4 (empat) peralatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) SirineTsunami,
- 2) Rambu Evakuasi (Tahun Anggaran 2018)
- 3) Rambu Bencana,
- 4) Analisa Bencana/Aloha (Tahun anggaran 2016)
- 5) CCTV Zona Industri
- 6) Alat Pelindung Diri (Tahun anggaran 2016)
- 7) CCTV Zona Kota (Tahun anggaran 2017)

Dari 7 (tujuh) jenis peralatan kesiapsiagaan yang belum dipenuhi adalah Sirine Tsunami, Rambu Bencana dan CCTV Zona Industri

Secara keseluruhan sepanjang tahun 2019 semua kegiatan yang dapat mendukung capaian indikator pada Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari serapan anggaran sepanjang tahun 2019 adalah sebesar 92,62%.

A.14 Program Kedaruratan dan Logistik (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Tabel 4.4.1p

Target dan Realisasi Program Kedaruratan dan Logistik Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Kedaruratan dan Logistik						285,79	181,98	63,68%
	Persentase distribusi logistik terhadap kawasan rawan bencana	%	100	100	100,00%			
	Persentase Penanganan bencana	%	100	100	100,00%			
Operasional Tanggap Darurat	Terlaksananya pelayanan tanggap darurat bencana	Tahun	1	1	100,00%	133,31	63,71	47,79%
Operasional Pendistribusian Logistik dan Peralatan Pendukung Kebencanaan	Terlaksananya Kegiatan Distribusi Logistik dan Peralatan pendukung kebencanaan	Tahun	1	1	100,00%	36,76	11,87	32,29%
Penyediaan Dukungan Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Tersedianya Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Kegiatan	1	1	100,00%	115,72	106,40	91,95%

Program Kedaruratan dan Logistik memiliki 2 (dua) indikator yaitu persentase distribusi logistik terhadap kawasan rawan bencana dan persentase penanganan bencana. Capaian kinerja pada indikator tersebut di atas sepanjang tahun 2019 adalah :

1. Realisasi indikator persentase distribusi logistik terhadap kawasan rawan bencana tahun 2019 sebesar 100% dari target 100% berarti bahwa distribusi logistik sudah ditangani dengan baik. Dari 40 bencana, semua kejadian sudah didistribusikan kebutuhan logistiknya.
2. Realisasi indikator persentase penanganan bencana tahun 2019 sebesar 100% dari target 100% berarti bahwa penanganan bencana sudah ditangani sepenuhnya dengan baik. Kejadian Bencana di Kota Cilegon selama Tahun 2019 yang berjumlah **40 (empat puluh) kejadian** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Bencana Banjir sebanyak 10 (sepuluh) kejadian
 - 2) Bencana Longsor sebanyak 1 (satu) kejadian
 - 3) Bencana Kegagalan Teknologi sebanyak 3 (tiga) kejadian
 - 4) Bencana angin puting beliung sebanyak 4 (empat) kejadian
 - 5) Bencana Kekeringan sebanyak 6 (enam) kejadian
 - 6) Kebakaran Lahan sebanyak 16 (enam belas) kejadian

Seluruh kejadian bencana tersebut dapat ditangani dengan baik. Dalam pelaksanaan tugas penanganan bencana, BPBD Kota Cilegon dibantu oleh Unsur OPD Terkait, TNI/Polri, Pihak kecamatan dan kelurahan, Unsur Relawan dari PMI, Tagana, Kelurahan tangguh Bencana, unsur akademisi dan masyarakat. Untuk distribusi

bantuan logistik selama tahun 2019 terdapat 24 (dua puluh empat) titik yang terdampak bencana di Kota Cilegon.

Secara keseluruhan pada tahun 2019 semua kegiatan yang dapat mendukung capaian indikator pada Program Kedaruratan dan Logistik ini dapat terlaksana dengan baik. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya masih di bawah 80 % yakni :

1. Kegiatan Operasional Tanggap Darurat sebesar 47,79% yang disebabkan karena disesuaikan dengan jumlah kejadian bencana di wilayah Kota Cilegon dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan tugas tanggap darurat Bencana, sehingga anggaran yang tersedia dalam DPA tidak dapat diserap seluruhnya.
2. Kegiatan Operasional Pendistribusian Logistik dan Peralatan Pendukung Kebencanaan 32,29 % yang disebabkan karena disesuaikan dengan jumlah kejadian bencana di wilayah Kota Cilegon dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan Operasional Pendistribusian Logistik dan Peralatan Pendukung Kebencanaan, sehingga anggaran yang tersedia dalam DPA tidak dapat diserap seluruhnya

A.15 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Tabel 4.4.1q

Target dan Realisasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi						92,50	65,77	71,10%
	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%	80	60	75,00%			
Penyusunan Baseline DALA (Damage And Loss Assesment)	Tersusunnya Baseline DALA	Tahun	1	1	100,00%	37,50	25,13	67,01%
Penyelenggaraan Komunikasi Bencana Lintas Lembaga	Terselenggaranya komunikasi Bencana Lintas Lembaga	Kegiatan	1	1	100,00%	20,00	15,35	76,74%
Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana	Tercapainya Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana	kegiatan	2	2	100,00%	35,00	25,29	72,26%

Indikator pada Program rehabilitasi dan rekonstruksi adalah persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dihitung dari persentase jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Capaian indikator persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2019 sebesar 60% dari target 80 %. Hal ini disebabkan karena sampai dengan Tahun 2019 terlaksana 12 (dua belas) kegiatan/kejadian dari 12 kejadian (dua belas) kejadian yang membutuhkan rehabilitasi pada Program rehabilitasi dan rekonstruksi. Realisasi Capaian kinerja Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2019 sebesar 100%.

Secara keseluruhan pada tahun 2019 semua kegiatan yang dapat mendukung capaian indikator pada Program rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat terlaksana dengan baik. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya masih di bawah 80 % yakni :

1. Kegiatan Penyusunan Baseline DALA (Damage And Loss Assesment) sebesar 67,01 % dikarenakan Kegiatan ini dilakukan setelah terjadi bencana (Berupa Survey dan Rapat Koordinasi) sehingga realisasi sangat tergantung pada intensitas kejadian bencana di Kota Cilegon dimana dari target 440 OH survey hanya terlaksana 194 OH survey.
2. Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana sebesar 72,27% disebabkan karena biaya perjalanan dinas tidak terserap.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Komunikasi Bencana Lintas Lembaga sebesar 76,74% dikarenakan biaya transportasi dan penginapan untuk narasumber tidak terealisasi sebab narasumber berasal dari Kota Cilegon.

Permasalahan

1. Indeks Risiko Bencana (IRB) untuk Kota Cilegon pada tahun 2019 adalah 141,24 artinya kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana adalah sedang. Pemerintah Kota Cilegon masih perlu melakukan upaya-upaya yang lebih besar guna menurunkan angka IRB tersebut pada setiap tahunnya.
2. Program dan rencana kerja masih belum berdasarkan analisa tingkat potensi risiko bencana per wilayah.

Solusi

1. Untuk meningkatkan kapasitas katahanan daerah terhadap risiko bencana sebagai sasaran penanggulangan bencana dan upaya penurunan risiko bencana perlu melingkupi : Perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan system informasi, diklat dan logistic, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, pengembangan system pemulihan bencana.
2. Kegiatan dalam program penanggulangan risiko bencana harus didetailkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) yang harus segera dibuat berdasarkan analisa tingkat potensi risiko bencana per wilayah, serta mempersiapkan pendanaan untuk pencapaiannya.

A.18 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Seluruh Kecamatan/Kelurahan, Bag. Umum, Sekretariat DPRD, Badan Kesbangpol, BPBD)

Tabel 4.4.1r

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 Seluruh Kecamatan/Kelurahan, Bag. Umum, Sekretariat DPRD, Badan Kesbangpol, BPBD)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Bagian Umum)						32.890,95	30.402,30	92,43%
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	85	26,30	30,94%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	95	96,16	101,22%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (SEKRETARIAT DPRD)						27.716,69	23.410,28	84,46%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	94,08	94,08%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	94,08	94,08%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	94,08	94,08%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	94,08	94,08%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KECAMATAN CILEGON)						1.934,23	1.879,47	97,17%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	80	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	87	80	100,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	94	80	100,00%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN CIWADUK)						516,70	500,76	96,91%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	84	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	84	100,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	84	100,00%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN BENDUNGAN)						581,86	557,90	95,88%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	84	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	84	100,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	84	100,00%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN BAGENDUNG)						528,20	462,46	87,55%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	84	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	84	100,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	84	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN KETILENG)						481,48	448,83	93,22%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	84	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	84	100,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	84	100,00%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN CIWEDUS)						503,64	489,94	97,28%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	84	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	84	100,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	84	100,00%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KECAMATAN CIWANDAN)						1.541,90	1.487,47	96,47%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	75	89,29%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	84	100,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	83	98,81%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN RANDAKARI)						404,37	397,53	98,31%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	84	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	85	80	94,12%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	81	96,43%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	98,86	98,86%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN KEPUH)						445,60	424,70	95,31%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	84	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	85	83	97,65%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	80	95,24%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	94,86	94,86%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN GUNUNGSUGIH)						484,90	452,19	93,25%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	80	95,24%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	85	83	97,65%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	83	98,81%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	97,73	97,73%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN BANJARNEGARA)						388,94	376,86	96,89%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	80	95,24%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	85	83	97,65%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	83	98,81%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	97,47	97,47%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN TEGAL RATU)						465,60	417,40	89,65%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	82	97,62%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	85	80	94,12%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	80	95,24%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	90,17	90,17%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN KUBANGSARI)						512,30	498,85	97,37%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	84	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	85	83	97,65%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	80	95,24%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	97,88	97,88%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KECAMATAN CIBEBER)						2.288,37	2.216,32	96,85%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	82	97,62%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	82	97,62%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	82	97,62%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN KEDALEMAN)						497,64	481,34	96,73%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	82	97,62%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	82	97,62%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	82	97,62%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN KALITIMBANG)						503,85	480,59	95,38%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	82	97,62%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	82	97,62%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	82	97,62%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN KARANG ASEM)						412,15	400,88	97,27%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	82	97,62%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	82	97,62%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	82	97,62%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN CIKERAI)						405,20	382,88	94,49%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	82	97,62%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	82	97,62%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	82	97,62%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN BULAKAN)						521,95	521,39	99,89%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	82	97,62%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	82	97,62%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	82	97,62%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN CIBEKER)						540,95	535,34	98,96%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	82	97,62%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	82	97,62%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	82	97,62%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KECAMATAN GROGOL)						1.576,24	1.518,14	96,31%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	86	90	104,65%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	86	76,20	88,60%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	89	87,35	98,15%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	89	86,64	97,35%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN KOTASARI)						605,54	598,33	98,81%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	86	90	104,65%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	86	76,20	88,60%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	89	87,35	98,15%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	89	86,64	97,35%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN RAWA ARUM)						424,41	360,40	84,92%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	86	90	104,65%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	86	76,20	88,60%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	89	87,35	98,15%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	89	86,64	97,35%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN GEREM)						482,80	444,12	91,99%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	86	90	104,65%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	86	76,20	88,60%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	89	87,35	98,15%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	89	86,64	97,35%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN GROGOL)						421,84	374,99	88,89%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	86	90	104,65%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	86	76,20	88,60%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	89	87,35	98,15%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	89	86,64	97,35%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KECAMATAN PULOMERAK)						1.935,99	1.863,60	96,26%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	85	93,53	110,04%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	90	93,53	103,92%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	93,53	93,53%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	93,53	93,53%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN LEBAK GEDE)						605,46	585,29	96,67%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	85	96,67	113,73%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	90	96,67	107,41%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	96,67	96,67%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	96,67	96,67%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN TAMAN SARI)						568,20	534,19	94,02%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	85	98,39	115,75%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	90	98,39	109,32%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	98,39	98,39%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	98,39	98,39%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN MEKAR SARI)						574,13	568,66	99,05%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	85	99,05	116,53%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	90	99,05	110,06%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	99,05	99,05%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	99,05	99,05%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN SURALAYA)						604,65	584,00	96,58%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	85	96,58	113,62%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	90	96,58	107,31%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	96,58	96,58%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	96,58	96,58%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KECAMATAN PURWAKARTA)						2.325,70	2.294,22	98,65%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	97,12	115,62%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	97,21	115,73%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	99,39	118,32%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	99,72	117,32%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN RAMANUJU)						425,95	411,27	96,55%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	94,19	112,13%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	90,24	107,43%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	100	119,05%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	100	117,65%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN KEBONDALEM)						400,25	387,14	96,72%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	88,85	105,77%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	93,17	110,92%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	100	119,05%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	100	117,65%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN KOTABUMI)						483,35	461,21	95,42%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	90,13	107,30%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	92,8	110,48%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	100	119,05%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	100	117,65%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN PABEAN)						530,15	525,84	99,19%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	94,6	112,62%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	97,37	115,92%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	100	119,05%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	100	117,65%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN TEGAL BUNDER)						459,20	457,56	99,64%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	98,84	117,67%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	98,36	117,10%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	100	119,05%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	100	117,65%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN PURWAKARTA)						444,45	437,56	98,45%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	98,47	117,23%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	84	95,79	114,04%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	84	100	119,05%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	100	117,65%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KECAMATAN JOMBANG)						2.828,02	2.557,93	90,45%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	90	107,14%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	87	98,82	113,59%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	94	93,57	99,54%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	96,22	113,20%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN JOMBANG WETAN)						627,65	605,30	96,44%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	90	107,14%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	87	98,82	113,59%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	94	93,57	99,54%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	96,22	113,20%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN MASIGIT)						614,22	592,32	96,43%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	90	107,14%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	87	98,82	113,59%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	94	93,57	99,54%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	96,22	113,20%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN SUKMAJAYA)						511,35	484,71	94,79%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	90	107,14%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	87	98,82	113,59%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	94	93,57	99,54%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	96,22	113,20%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN PANGGUNG RAWI)						660,90	651,22	98,54%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	90	107,14%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	87	98,82	113,59%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	94	93,57	99,54%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	96,22	113,20%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN GEDONG DALEM)						542,95	540,76	99,60%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	84	90	107,14%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	87	98,82	113,59%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	94	93,57	99,54%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	96,22	113,20%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KECAMATAN CITANGKIL)						2.700,52	2.591,35	95,96%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	94,20	94,20%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	94,36	94,36%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	95,01	95,01%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	94,44	94,44%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN CITANGKIL)						409,21	401,96	98,23%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	96,26	96,26%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	97,3	97,30%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	99,39	99,39%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	100,00	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN KEBONSARI)						483,95	460,22	95,10%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	95,35	95,35%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	83,85	83,85%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	92	97,46	105,93%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	100	117,65%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN WARNASARI)						439,66	420,83	95,72%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	97,23	97,23%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	84,18	84,18%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	99,6	99,60%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	100	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN SAMANGRAYA)						392,50	365,78	93,19%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	84,1	84,10%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	84,56	84,56%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	98,93	98,93%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	100	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN LEBAK DENOK)						444,70	421,69	94,82%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	83,63	83,63%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	99,69	99,69%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	99,77	99,77%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	100	100,00%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN TAMAN BARU)						385,96	355,68	92,16%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	89,58	89,58%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	86,79	86,79%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	99,69	99,69%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	98,39	98,39%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (KELURAHAN DRINGO)						369,87	306,70	82,92%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	82,11 %	82,11%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	36,41 %	36,41%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	98,01 %	98,01%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	95,71 %	95,71%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)						1.421,53	1.168,48	82,20%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	95,00	95,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	100,00	100,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	95,00	95,00%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	88,03	88,03%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)						2.675,16	2.397,29	89,61%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	90	80	88,89%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	90	96	106,67%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	95	85	89,47%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	90	100	111,11%			

3.4.2 Bidang Urusan Pengawasan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah (Inspektorat)

Tabel 3.4.2a

Target dan Realisasi Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah						4.151,82	4.008,53	96,55%
	Meningkatnya pengawasan pembangunan pemerintahan daerah	%	100	100	100,00%			
Rapat koordinasi dan pengawasan	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan	Kegiatan	2	2	100,00%	295,00	294,99	100,00%
Peningkatan kualitas aparatur pengawas internal pemerintah	Terlaksananya BinteK peningkatan kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Kegiatan	3	3	100,00%	90,08	87,48	97,11%
BinteK sistem pengendalian intern	Terlaksananya kegiatan BinteK Sistem Pengendalian Intern	Kegiatan	1	1	100,00%	142,80	140,97	98,72%
Penyusunan PKPT Inspektorat	Tersedianya Keputusan Inspektur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan	Dokumen	1	1	100,00%	143,56	143,35	99,85%
Evaluasi roadmap reformasi birokrasi	Terlaksananya kegiatan evaluasi roadmap reformasi birokrasi Pemerintah Kota Cilegon	Dokumen	1	1	100,00%	42,00	42,00	100,00%
Evaluasi Maturitas SPIP	Terlaksananya kegiatan evaluasi maturitas SPIP	Dokumen	1	1	100,00%	50,00	49,56	99,12%
Up Grade SIM HP	Terlaksananya kegiatan Up Grade SIM HP	Dokumen	1	1	100,00%	40,00	39,85	99,63%
Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Terlaksananya kegiatan peningkatan level Kapabilitas APIP	Dokumen	1	1	100,00%	70,00	69,90	99,86%
Pemantauan Tindak Lanjut: Konsumsi BPKP dan Renaksi KPK	Terlaksananya pemantauan Tindak Lanjut: Internal dan Eksternal	Dokumen	1	1	100,00%	38,04	32,00	84,13%
Pengawasan Pembangunan Kota Cilegon	Terlaksananya kegiatan Kas dan opname Barang	Dokumen	17	17	100,00%	3.070,34	2.981,71	97,11%
Pengawasan Pembangunan Daerah Bidang P2UPD	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pembangunan Kota Cilegon oleh P2UPD	Kegiatan	4	3	75,00%	100,00	58,22	58,22%
Unit Pengendalian Gratifikasi dan Satuan Tugas Saber Pungli	Terbentuknya SATGAS SABER PUNGLI	Kegiatan	1	1	100,00%	70,00	68,50	97,86%

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah merupakan salah satu program yang terdiri dari beberapa kegiatan dalam meningkatkan perencanaan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sekaligus pengawal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mengembangkan dan menerapkan tertib administrasi melalui system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam upaya mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan dan hambatan dalam mencapai tujuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah agar terselenggaranya tata kelola pemerintahan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Salah satu indikator keberhasilan Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan – aturan yang berlaku sehingga meningkatnya kualitas kinerja OPD di Kota Cilegon.

Terdapat 1 (satu) kegiatan pada **Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah** yang mempunyai serapan anggaran kurang dari 75% yaitu Pengawasan Pembangunan Bidang P2UPD, Capaian realisasi sebanyak 58% dari Pagu Anggaran Rp.100.000.000,- yang terserap hanya Rp.58.218.500,- dimana rencana kegiatan 4 kegiatan hanya terlaksana 3 kegiatan, ini disebabkan karena jadwal BinteK P2UPD pada triwulan IV yang sudah direncanakan dalam PKPT terdapat jadwal yang bersamaan dengan Diklat P2UPD sebanyak 10 orang yang dilaksanakan di Semarang selama 3 minggu, sehingga sudah tidak ada lagi jadwal dalam PKPT Inspektorat Kota Cilegon untuk melaksanakan BinteK juga tidak adanya waktu Narasumber dari Irjen Kemendagri selaku Instansi Pembina P2UPD.

A.2 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Inspektorat)

Tabel 3.4.2b

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Inspektorat)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (INSPEKTORAT)						1.628,17	1.566,62	96,22%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	100	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	67	67,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	85	85,00%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	96,5	96,50%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**B.1 Permasalahan**

1. Untuk melaksanakan TUSI Inspektorat belum memiliki tempat kerja/gedung yang representatif, belum memiliki ruang rapat khusus maupun klinik Consulting untuk OPD yang membutuhkan pendampingan maupun konsultasi mengenai hal-hal yang harus ditindak lanjuti,
2. Dengan bertambahnya Jabatan Fungsional P2UPD masih dibutuhkan alat perlengkapan kantor dan Kendaraan Operasional dalam rangka menunjang pelaksanaan TUSI
3. Profesionalisme APIP masih perlu ditingkatkan berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas maupun integritasnya;
4. Dalam upaya peningkatan profesionalisme APIP, APIP memerlukan peningkatan kualitas setiap tahunnya, sedangkan Inspektorat belum mempunyai anggaran sendiri untuk kegiatan tersebut, yang sudah berjalan masih menggunakan anggaran diklat dari BKPP, sehingga adanya keterbatasan dalam pengirimannya
5. Belum maksimalnya OPD dalam menindaklanjuti temuan eksternal maupun internal

B.2 Solusi

1. Penataan gedung kantor Inspektorat yang lebih representatif.
2. Pengadaan Alat perlengkapan kantor dan Kendaraan Operasional sesuai dengan rencana kebutuhan dalam rangka menunjang TUSI.
3. Mengajukan Pengelolaan anggaran diklat APIP yang dikelola sendiri oleh Inspektorat sehingga peningkatan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai harapan.
4. Meningkatkan koordinasi dan publikasi serta pemantauan Tindak Lanjut: hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) dan Pemeriksaan Internal (Inspektorat, Inspektorat Provinsi, BPKP & Ijen Kemendagri).
5. Memaksimalkan koordinasi dengan OPD dalam menindaklanjuti temuan eksternal maupun internal.

3.4.3 Bidang Urusan Perencanaan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi

Tabel 3.4.3a
Target dan Realisasi Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi						2.200,00	2.134,74	97,03%
	Tingkat tata kelola proses/tahapan/mechanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi jangka panjang, menengah dan tahunan yang komprehensif, partisipatif, handal, responsif dan tepat waktu	%	100	100	100,00%			
	Persentase kesesuaian antara muatan perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan tingkat propinsi dan tingkat nasional (pusat)	%	80	100	125,00%			
	Persentase jumlah usulan musrenbangkel yang diakomodir dalam RKPD (Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang tercakup dalam dokumen penganggaran	%	50	56,6	113,20%			
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD (Tahun n+1)	Terlaksananya Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	Kegiatan	1	1	100,00%	85,00	74,73	87,91%
	Tersampainya substansi Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 kepada Pemangku Kepentingan	Kecamatan	8	8	100,00%			
Penyusunan RKPD (Tahun n+1)	Tersusunnya RKPD Tahun 2020	Dokumen	1	1	100,00%	109,55	106,36	97,08%
	Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2020 sebagai acuan proses perencanaan sesuai dengan regulasi	Dokumen	1	1	100,00%			
Penyusunan Rancangan Awal RKPD (Tahun n+2)	Tersusunnya Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	Dokumen	1	1	100,00%	141,84	135,69	95,66%
	Tersusunnya Dokumen Analisa Dasar Spasial RKPD Tahun 2021	Dokumen	1	1	100,00%			
	Tersedianya Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 sesuai dengan regulasi	Dokumen	1	1	100,00%			
	Tersedianya Dokumen Analisa Dasar Spasial RKPD Tahun 2021	Dokumen	1	1	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Penyusunan RKPD Perubahan (Tahun n)	Tersusunnya Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019	Dokumen	1	1	100,00%	60,90	60,57	99,46%
	Tersedianya Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019 sesuai dengan regulasi	Dokumen	1	1	100,00%			
Penyusunan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Perubahan Tahun 2019	Dokumen	1	1	100,00%	35,90	27,58	76,81%
	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Tahun 2020	Dokumen	1	1	100,00%			
	Tersedianya Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah sesuai dengan regulasi	Dokumen	2	2	100,00%			
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Cilegon	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Cilegon Tahun 2018	dokumen	1	1	100,00%	150,00	146,37	97,58%
	Tersampainya Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah tentang Hasil Pembangunan Tahun n-1 Kepada OPD	opd	38	38	100,00%			
	Tersampainya Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah tentang Hasil Pembangunan Tahun n-1 Kepada DPRD	anggota	35	35	100,00%			
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Daerah	Tersedianya Laporan Triwulanan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD	Dokumen (Triwulan)	4	4	100,00%	250,00	242,85	97,14%
	Tersedianya Laporan Triwulanan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari TP, DAK dan Bankeu	dok	4	4	100,00%			
	Tersedianya Laporan Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran	dok	2	2	100,00%			
	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan RKPD pada tahun berkenaan sehingga mencapai hasil yang optimal	%	100	100	100,00%			
Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Musrenbangcam/Musrenbangkel)	Jumlah Kecamatan yang dilakukan monitoring musrenbangcam	Kecamatan	8	8	100,00%	130,00	122,31	94,09%
	Jumlah Kelurahan yang dilakukan monitoring musrenbangkel	Kel	43	43	100,00%			
	Jumlah Peserta Pembekalan Musrenbangcam/kel	Peserta	200	200	100,00%			
	Meningkatnya keterlaksanaan monitoring	%	100	100	100,00%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	musrenbangcam dan musrenbangkel se-Kota Cilegon Tahun 2018							
Evaluasi Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel)	Terlaksananya evaluasi program DPW Kel	Kegiatan	1	1	100,00%	100,00	94,73	94,73%
Penyusunan Juknis DPW Kel (Tahun n+1)	Tersedianya Juknis DPW Kel	Dokumen	1	1	100,00%	75,00	74,71	99,62%
Bimbingan Teknis Pengelolaan data, Perencanaan dan Pengendalian dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya bimtek tentang Datin, Rendalev	Kegiatan	2	2	100,00%	200,00	197,71	98,86%
	Terlaksananya bimtek dana kewilayahan	Kegiatan	1	1	100,00%			
Penyajian Data Kinerja Pembangunan Daerah	Tersedianya Data Kinerja Pembangunan Daerah	%	100	100	100,00%	61,50	61,27	99,63%
Pemutakhiran Data Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014	Data Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri 8 Tahun 2014 Terkini	Kegiatan	1	1	100,00%	108,50	107,67	99,24%
Pelaporan Data Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	PElaporan Data Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Kegiatan	1	1	100,00%	75,00	74,63	99,51%
Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Pengendalian RKPd Tahun n+1	Dokumen	1	1	100,00%	75,00	74,89	99,85%
	Tersedianya Dokumen Pengendalian RKPd perubahan tahun n	dok	1	1	100,00%			
	Meningkatnya kualitas pengendalian dokumen RKPd Tahun n+1	%	1	1	100,00%			
	Meningkatnya kualitas pengendalian dokumen RKPd Perubahan Tahun n	%	1	1	100,00%			
Penyusunan Pedoman Pagu DPWkel (tahun n+2)	Tersusunnya Pedoman Pagu DPWkel	Dokumen	1	1	100,00%	50,00	48,03	96,05%
Sosialisasi Petunjuk Teknis DPWkel (tahun n)	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis DPWkel	Kegiatan	1	1	100,00%	50,00	49,52	99,04%
Dokumentasi Data Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumentasi Data Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100,00%	75,00	74,35	99,13%
Penyusunan Rancangan KUA PPAS Reguler dan Perubahan	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rancangan KUA PPAS Reguler dan Perubahan	Kegiatan	2	2	100,00%	216,81	213,20	98,33%
	Tersedianya dokumen KUA tahun 2020	dok	1	1	100,00%			
	Tersedianya dokumen PPAS tahun 2020	dok	1	1	100,00%			
	Tersedianya dokumen KUA Perubahan tahun 2019	dok	1	1	100,00%			
	Tersedianya dokumen PPAS Perubahan tahun 2019	dok	1	1	100,00%			
	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS sebagai kerangka acuan proses penganggaran	kegiatan	2	2	100,00%			
Evaluasi Pencapaian SDGs	Tersedianya Laporan Hasil Pencapaian SDGs Kota Cilegon	Dokumen	1	1	100,00%	150,00	147,57	98,38%
	Tersedianya Dokumen Analisis Time Series	dok	1	1	100,00%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Indikator Makro Kota Cilegon 2010-2019							
	Terlaksananya Evaluasi Pencapaian SDGs Sebagai Dasar Perencanaan tahun n+1	dok	1	1	100,00%			
	Tersedianya Data Dan Informasi Pencapaian Indikator Makro Kota Cilegon Sepanjang Tahun 2010-2019 Sebagai Salah Satu Dasar Perencanaan Teknokratik Periode RPJMD 2021-2026	dok	1	1	100,00%			
	Tersedianya Analisis Pencapaian SDGs dan capaian indikator makro pembangunan secara runtun waktu (time series) untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode mendatang.	dok	2	2	100,00%			

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi merupakan bagian dari upaya Bappeda Kota Cilegon dalam Mengoptimalkan keterlaksanaan dan integrasi program pembangunan melalui mekanisme pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta Meningkatkan kinerja penyediaan data-data dan perencanaan sectoral. Indikator keberhasilan dari Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi dapat dilihat dari capaian beberapa indikator berikut:

1. Tingkat tata kelola proses/tahapan/mechanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi jangka panjang, menengah dan tahunan yang komprehensif, partisipatif, handal. Capaian kinerjanya sebesar 100%.

Dokumen perencanaan yang disusun di tahun 2019 adalah sebanyak 8 Dokumen, Yaitu :

- (1) Dokumen RKPD Tahun 2020,
- (2) Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019.
- (3) Dokumen KUA Tahun 2020
- (4) Dokumen PPAS Tahun 2020
- (5) Dokumen KUA Perubahan Tahun 2019
- (6) Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2019
- (7) Dokumen Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah Tahun 2020
- (8) Dokumen Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah Perubahan Tahun 2019

Dari keseluruhan dokumen perencanaan dan penganggaran di atas, seluruh

tahapan dan mekanisme pelaksanaan/penyusunannya sudah sesuai *timeline* dan tepat waktu, sudah sesuai tahapan, substansi dan instrumen yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

2. Persentase kesesuaian antara muatan perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan tingkat propinsi dan tingkat nasional (pusat). Capaian kinerjanya sebesar 100%. Hasil sinkronisasi perencanaan dengan tingkat pusat/nasional, dari 100 program yang tertuang dalam RKPD Kota Cilegon Tahun Perencanaan 2020, seluruhnya sudah selaras dan mendukung 5 Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP Nasional Tahun 2020. Sedangkan hasil sinkronisasi dengan dokumen perencanaan provinsi, dari 100 program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kota Cilegon 2020
3. Persentase jumlah usulan musrenbangkel yang diakomodir dalam RKPD (Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran), capaian kinerjanya sebesar 113,2 %. Usulan-usulan masyarakat tertuang dalam rekapitulasi usulan Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTKec) yang merupakan akumulasi dari usulan-usulan di tingkat kelurahan (RPTKel) berdasarkan hasil musrenbangkel dan musrenbangcam. Jumlah seluruh usulan yang tertuang dalam modul musrenbang di 8 kecamatan (pada Simral) untuk tahun perencanaan 2020 adalah sebanyak 3124 usulan/lokasi. Sedangkan yang diakomodir dalam Rencana Kerja (Renja) Kelurahan (melalui DPWKel) adalah sebanyak 1769 usulan/lokasi atau 56,6 % dari total usulan yang tercatat dalam sistem perencanaan pembangunan Kota Cilegon (Simral)

Seluruh kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi memiliki ketercapaian output kegiatan sebesar 100 % dengan serapan belanja mencapai 97.03%. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya adalah untuk mendukung pencapaian indikator program tersebut di atas.

Adapun kegiatan Penyusunan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah meski realisasi outputnya 100%, serapan belanjanya hanya sebesar 76,81%. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja makan minum lebih besar dari jumlah undangan rapat yang diselenggarakan.

A.2 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan

Tabel 3.4.3b Target dan Realisasi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan						1.347,35	1.278,97	94,92%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan	%	90	100	111,11%			
	Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang Sosial Pemerintahan	%	90	100	111,11%			
Verifikasi Dokumen Perencanaan OPD	Terlaksananya Verifikasi Dokumen Perencanaan OPD	Kegiatan	4	4	100,00%	70,00	68,96	98,51%
	Tersinkronisasinya Antara Renja dan Renstra	dok	3	3	100,00%			
Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD	Kegiatan	1	1	100,00%	47,35	46,35	97,89%
	Tersinkronisasinya Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019	kegiatan	1	1	100,00%			
Pelaksanaan rapat koordinasi Teknis Pemerintah Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Pemerintah Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Kegiatan	2	2	100,00%	55,00	45,30	82,37%
	Meningkatnya efektivitas pemeliharaan daerah di bidang sosial dan pemerintahan	%	100	100	100,00%			
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pembangunan Manusia	Kegiatan	6	6	100,00%	300,00	270,55	90,18%
	mensinkronkan Rencana Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019	kegiatan	6	6	100,00%			
Evaluasi Kinerja Pembangunan (Tahun n-1)	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2018	Dokumen	1	1	100,00%	114,90	114,60	99,74%
	Tersedianya Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 sebagai bahan masukan perencanaan selanjutnya	dok	1	1	100,00%			
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Sosial	Terlaksananya Rakor Perencanaan Kegiatan bersumber dana dari APBD Kota APBD Prov/ APBN	Kegiatan	6	6	100,00%	245,10	222,79	90,90%
	Terciptanya Perencanaan yang terintegrasi baik yang bersumber dana APBD Kota/ APBD Provinsi dan APBN	%	100	100	100,00%			
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pemerintahan	Kegiatan	6	6	100,00%	150,00	148,52	99,01%
	Terlaksananya Rapat koordinasi Perencanaan Kegiatan Bersumber Dana Dari APBD	kegiatan	6	6	100,00%			
Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Kegiatan	8	8	100,00%	365,00	361,90	99,15%
	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	kegiatan	4	4	100,00%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Perencanaan terhadap Sarpras Kelurahan / Kecamatan Sesuai Permendagri No. 81 Th. 2015	kegiatan	1	1	100,00%			
	Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan	kegiatan	8	8	100,00%			
	Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan	triwulan	4	4	100,00%			
	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Perencanaan terhadap Sarpras Kelurahan / Kecamatan sesuai Permendagri No. 81 Th. 2015	dok	1	1	100,00%			

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan merupakan bagian dari upaya Bappeda Kota Cilegon dalam Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektoral pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang pembangunan sosial dan budaya. Indikator keberhasilan dari Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan dapat dilihat dari capaian beberapa indikator berikut:

1. Tingkat Efektifitas Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program pada Perangkat Daerah di Bawah koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan. Capaian kinerjanya sebesar 100%.

Jumlah dokumen rancangan renja perangkat daerah (Renja-PD) Tahun 2020 yang menjadi mitra kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) adalah sebanyak 25 OPD, dimana seluruhnya telah dilakukan verifikasi sesuai dengan instrumen/ tata cara yang diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 dan Perwal Kota Cilegon No. 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kota Cilegon.

2. Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan capaian kinerjanya sebesar 100%. Analisis data sektoral dilakukan melalui aktivitas rapat koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi yang dilakukan sebanyak 4 triwulan. Dari jumlah OPD mitra kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) sebanyak 25 perangkat daerah, seluruhnya telah dilakukan analisis data sektoral untuk mendukung pengendalian dan perumusan dokumen perencanaan di setiap perangkat daerah dimaksud.

Seluruh kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan memiliki ketercapaian output kegiatan sebesar 100 % dengan serapan

belanja mencapai 94.92%. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan salah satunya adalah untuk mendukung pencapaian indicator program tersebut di atas.

A.3 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan

Tabel 3.4.3c Target dan Realisasi Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan						1.155,06	1.044,09	90,39%
	Persentase substansi dokumen Perencanaan Tata Ruang yang ditindaklanjuti	%	90	81,25	90,28%			
	Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	%	90	90	100,00%			
	Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	%	90	90	100,00%			
Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD	Terlaksananya pelaksanaan trilateral meeting RKPD 2020	opd	13	13	100,00%	100,00	91,01	91,01%
	Diketahuinya RENJA RKPD 2020 mitra OPD Bidang Perekonomian, Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan	opd	13	13	100,00%			
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah	Terlaksananya rapat perencanaan kerja pembangunan di mitra koordinasi sub daya saing ekonomi daerah	rapat	1	1	100,00%	34,06	6,26	18,38%
	Terlaksananya rapat pembahasan hasil pembangunan tahun 2019	opd	4	1	25,00%			
	Terkordinasinya rapat perencanaan pada mitra koordinasi sub bidang daya saing ekonomi daerah	rapat	1	1	100,00%			
	Diketahuinya capaian pembangunan mitra sub bidang daya saing ekonomi	opd	4	1	25,00%			
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi mitra kerja sub bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	kegiatan	4	1	25,00%	30,00	25,42	84,73%
	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi mitra kerja sub bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	kegiatan	4	1	25,00%			
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang LH, SDA dan Kebencanaan	Terlaksananya rapat koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas sub bidang LH, SDA dan kebencanaan	kegiatan	3	3	100,00%	35,00	27,95	79,86%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Terjalinnnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas sub bidang LH, SDA dan kebencanaan	kegiatan	3	3				
Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	Penyusunan kinerja pemabangunan Th 2018 OPD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	OPD	13	13	100,00%	86,00	82,04	95,39%
	Diketahui kinerja pembangunan mitra OPD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	opd	13	13	100,00%			
Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah bidang PSIK	tw	4	2	50,00%	20,00	15,43	77,13%
	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah bidang PSIK	triwulan	4	2	50,00%			
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan SPAM dan Sanitasi Kota Cilegon	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pengembangan Spam dan sanitasi Kota Cilegon	Dokumen	1	1	100,00%	25,00	16,77	67,06%
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Spam dan Sanitasi Kota Cilegon	dok	1	1	100,00%			
Review Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Kota Cilegon	Dokumen Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Kota Cilegon	dokumen	1	1	97,43%	75,00	73,07	97,43%
	Terealisasinya Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Kota Cilegon	dok	1	1	100,00%			
Rencana Penanganan Sarana Prasarana Permukiman (Drainase dan Jalan)	Jumlah dokumen rencana penanganan sarana prasarana permukiman (Drainase dan jalan)	Dokumen	1	1	100,00%	100,00	97,82	97,82%
	Terealisasinya dokumen rencana penanganan sarana prasarana permukiman (Drainase dan jalan)	dok	1	1	100,00%			
Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Cilegon	Jumlah dokumen SSK yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100,00%	75,00	73,02	97,36%
	Terealisasinya dokumen ssk	dok	1	1	100,00%			
Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Kota Cilegon	Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Kota Cilegon	dok	1	1	100,00%	75,00	69,90	93,20%
	Diketahui strategi dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi daerah	dok	1	1	100,00%			
Penyusunan Review Rencana Induk Persampahan	Tersedianya dokumen review rencana induk persampahan	dokumen	1	1	100,00%	60,00	50,61	84,34%
	Tersusunnya review rencana induk persampahan	dok	1	1	100,00%			
Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Tersedianya dokumen perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani	dokumen	1	1	100,00%	115,00	110,83	96,37%
	Tersusunnya perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani	dok	1	1	100,00%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Tersedianya dokumen perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan	dokumen	1	1	100,00%	110,00	108,30	98,45%
	Tersusunnya perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan	dok	1	1	100,00%			
Sinkronisasi antar RPJMD dengan RTRW Kota Cilegon	Terlaksanannya Kegiatan Sinkronisasi Pogram dalam RTRW Kota Cilegon 2010-2030 dengan RPJMD Kota Cilegon 2016-2021	1 Kegiatan	1	1	100,00%	75,00	71,59	95,45%
Rapat Koordinasi Teknis Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Terselenggaranya rapat koordinasi teknis pemerintah daerah bidang PSIK	kegiatan	2	1	50,00%	40,00	29,90	74,74%
	Terselenggaranya rapat koordinasi teknis pemerintah daerah bidang PSIK	keg	2	1	50,00%			
Penataan Kawasan Medaksa Kota Cilegon	Tersusunnya site plan Kawasan Medaksa Kota Cilegon	Dokumen	1	1	100,00%	100,00	94,21	94,21%
	Mengalokasikan ruang untuk : TPI dan kawasan perniagaan dalam kawasan terminal terpadu Merak (site plan)	hektar	2	2	100,00%			
	Memberikan akses kepada aktifitas nelayan terhadap rencana pengembangan kawasan perniagaan di dalam kawasan terminal terpadu Merak	hektar	2	2	100,00%			
	Tertatanya kawasan Medaksa Kota Cilegon	hektar	2	2	100,00%			

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan merupakan bagian dari upaya Bappeda Kota Cilegon dalam Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektor pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang ekonomi dan infrastruktur. Indikator keberhasilan dari Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan dapat dilihat dari capaian beberapa indikator berikut:

1. Persentase substansi dokumen Perencanaan Tata Ruang yang ditindaklanjuti.
Di Tahun 2019, dokumen tata ruang yang disusun adalah dokumen revisi RTRW 2010 – 2030, dimana sebagian tahapannya sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sampai dengan persetujuan substansi revisi RTRW 2010 – 2030. Dimana tahap selanjutnya adalah legalisasi revisi RTRW Kota Cilegon melalui Peraturan Daerah. Sehingga dari 16 tahapan penyusunan RTRW, sudah dilaksanakan 13 tahapan, sehingga realisasinya adalah 81,25 %. Dengan demikian, dibandingkan dengan target 2019, maka realisasi kinerjanya sebesar 90,27 %.

2. Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan (Bidang PSIK). Capaian kinerjanya sebesar 100%. Jumlah dokumen rancangan renja perangkat daerah (Renja-PD) Tahun 2020 yang menjadi mitra kerja Bidang PSIK adalah sebanyak 12 OPD, dimana seluruhnya telah dilakukan verifikasi sesuai dengan instrumen/ tata cara yang diamanatkan dalam permendagri 86 Tahun 2017 dan perwal No. 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kota Cilegon.
3. Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan. Capaian kinerjanya sebesar 100%. Analisis data sektoral dilakukan melalui aktivitas rapat koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi yang dilakukan sebanyak 4 triwulan. Dari jumlah OPD mitra kerja Bidang PSIK sebanyak 12 perangkat daerah, seluruhnya telah dilakukan analisis data sektoral untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan.

Seluruh kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan memiliki ketercapaian output kegiatan sebesar 100 % dengan serapan belanja mencapai 90.39%. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan salah satunya adalah untuk mendukung pencapaian indikator program tersebut di atas.

Adapun realisasi kegiatan yang outputnya tidak tercapai atau serapan belanjanya di bawah 80 % adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah. Realisasi belanjanya hanya 18,38%. Hal ini terjadi dikarenakan rencana waktu pelaksanaan pada triwulan IV, namun pada saat akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan (SP verifikasi DPA 2020), disamping tersebut untuk konfirmasi narasumber tidak mendapatkan dikarenakan kesibukannya akhir tahun.
2. Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang LH, SDA dan Kebencanaan. Realisasi belanjanya hanya 79,86%. Hal ini dikarenakan anggaran untuk penyediaan tenaga ahli tidak terserap seluruhnya karena tidak semua rapat koordinasi menggunakan tenaga ahli.
3. Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan. Realisasi belanjanya hanya 77,13%. Hal tersebut karena evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan prioritas daerah pada OPD mitra kerja bidang Perekonomian Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda sebagian dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
4. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan SPAM dan Sanitasi Kota Cilegon. Realisasi belanjanya hanya 67,06%. Hal tersebut

terkendala oleh kesalahan uraian belanja makan dan minum pelaksanaan rapat kegiatan

5. Rapat Koordinasi Teknis Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan. Realisasi belanjanya hanya 74,74%. Hal ini dikarenakan anggaran untuk penyediaan tenaga ahli tidak terserap seluruhnya karena tidak semua rapat koordinasi menggunakan tenaga ahli.

A.3 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (BAPPEDA)

Tabel 3.4.3d Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (BAPPEDA)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (BAPPEDA)						5.658,39	5.068,37	89,57%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	85	85	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	85	85	100,00%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	80	85	106,25%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85	85	100,00%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Kualitas dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan dari sisi ketepatan, keterukuran dan konsistensi.
2. Pemahaman SDM perencana di OPD terhadap prinsip-prinsip perencanaan yang masih harus ditingkatkan, khususnya terkait dengan substansi dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B.2 Solusi

1. Meningkatkan pendampingan dan verifikasi proses perencanaan dan produk perencanaan di OPD secara berkesinambungan, serta peningkatan pemanfaatan data sektoral sebagai input proses perencanaan di tingkat perangkat daerah.
2. Memberikan bimbingan teknis khusus perencanaan bagi seluruh SDM perencana di seluruh OPD, khususnya bagi ASN yang menduduki jabatan kasubag program dan evaluasi, serta mendorong keberadaan ASN fungsional Perencana di tiap-tiap OPD untuk mendukung proses perencanaan di tiap-tiap perangkat daerah

3.4.4 Bidang Urusan Keuangan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Tabel 3.4.4 a
Target dan Realisasi Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Tahun
Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah						19.076,08	17.105,24	89,67%
	Proporsi SKPD yang menerapkan tata kelola aset secara baku dengan baik	%	100	100	100%			
	Tingkat pengelolaan barang aset daerah	%	100	100	100%			
penyedia jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan asuransi kendaraan dinas dan bangunan gedung pemerintah Kota Cilegon	Jenis Asuransi	3	2	66,67%	1.832,00	1.470,78	80,28%
penyusunan standar barang dan standar kebutuhan	Tersedianya updating penyusunan standar barang dan standar kebutuhan kota Cilegon	program	1	1	100,00%	50,00	49,40	98,80%
penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan kebutuhan BMD dan Tersedianya Dokumen perencanaan Terlaksananya pengamanan aset daerah secara administrasi kepemilikan hukum dan fisik aset tetap kota Cilegon dan Terpenuhinya pengamanan aset daerah secara administratif kepemilikan hukum dan fisik aset tetap kota Cilegon	kegiatan	2	2	100,00%	135,70	130,61	96,25%
		Sertipikat Tanah	30	7	23,33%			
		Patok Tanah	300	300	100,00%			
		Tugu Pengaman Aset	20	20	100,00%			
		Cat Semprot	1.000	1.000	100,00%			
		Plang Papan Nama	20	20	100,00%			
pengamanan aset tetap kota cilegon	Terlaksananya pengamanan aset daerah secara administrasi kepemilikan hukum dan fisik aset tetap kota Cilegon	sertifikat	30	7	23,33%	617,02	391,45	63,44%
		patok	300	300	100,00%			
pemanfaatan barang milik daerah	terfasilitasi usulan pemanfaatan barang milik daerah	%	100	80	80,00%	74,25	58,95	79,39%
pemindahtanganan barang milik daerah	terfasilitasi usulan pemindahtanganan barang milik daerah	%	100	80	80,00%	122,25	110,20	90,14%
penghapusan barang - barang inventaris dan barang lainnya	terfasilitasinya usulan penghapusan barang milik daerah	%	100	80	80,00%	353,50	318,76	90,17%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
pembinaan dan monitoring penatausahaan aset	Terlaksananya Pembinaan Pengurus Barang di Kota Cilegon	Orang	160	160	100,00%	357,99	331,44	92,58%
inventarisasi dan pelaporan aset/ BMD kota cilegon	Tersedianya Data Aset Daerah yang Akuntabel	KIB	6	6	100,00%	1.338,50	1.272,52	95,07%
	Meningkatnya Kinerja Pengurus Barang Se-Kota Cilegon	SKPD/UPB	275	250	90,91%			
Validasi data tanah pemerintah kota cilegon	Terlaksananya Validasi Tanah milik Pemerintah Kota Cilegon	kegiatan	1	1	100,00%	216,90	108,47	50,01%
Pengadaan Kendaraan Sarana Mobilitas	Tersedianya kendaraan roda empat	Unit	59	58	98,31%	13.977,97	12.862,69	92,02%
	Tersedianya kendaraan roda dua	Unit	34	34	100,00%			

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Peningkatan kinerja pengelola aset daerah merupakan sebuah upaya perbaikan capaian kinerja organisasi. Capaian kinerja diharapkan, berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja yang diharapkan dapat melalui peningkatan SDM serta kualitas aparatur pemerintah. Pengelolaan Barang khususnya Milik Daerah yang baik tentunya akan memudahkan penatausahaan aset daerah dan merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai dan akurat. Dalam hal pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pembangunan yang dilakukan program peningkatan pengelolaan aset daerah yaitu mengelola barang milik daerah untuk dijadikan pendukung pembangunan-pembanguna diberbagai sektor. Capaian pembangunan pengelolaan aaset yang dijadikan keberhasilan dalam program terdiri dari dua indikator, yaitu :

- 1). Proporsi SKPD yang menerapkan tata kelola aset secara baku dengan baik

Indikator ini bermaksud mengukur pemerintah daerah melalui perangkat-perangkat daerah dalam memanagemen aset pemerintah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Tata kelola aset mengacu pada Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Realisasi pada capaian indikator ini sebesar 100%, dimana perangkat daerah yang menerapkan tata kelola aset secara baku dan sesuai aturan/regulasi sebanyak 37 OPD terhadap seluruh OPD di lingkungan

pemerintahan Kota Cilegon sebanyak 37 OPD, dimana seluruh perangkat daerah telah melakukan tata kelola asset sesuai dengan regulasi.

2). Tingkat pengelolaan barang aset daerah

Indikator ini bermaksud mengelola barang aset daerah berdasarkan jenis golongan melalui sistem sehingga setiap unit barang asset diketahui status asset tersebut. Adapun capaian yang dihasil dari indikator sebesar 100% dimana Jumlah aset dan barang milik daerah yang tercatat sampai dengan tahun 2019 sebanyak 977.794 unit , dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Aset yang Tercatat dan Belum Tercatat Tahun 2019

Golongan Jenis Barang	Satuan	Jumlah aset daerah	Tercatat	Belum Tercatat
Tanah	bidang	1.103	1.103	0
Peralatan dan Mesin	unit	280.457	280.457	0
Gedung dan Bangunan	unit	2.036	2.036	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	unit	5.178	5.178	0
Aset Tetap Lainnya	buah	688.845	688.845	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	unit	175	175	0
Total		977.794	977.794	0

Sumber : BPKAD, Unaudited 2019

Berdasarkan tabel program dan kegiatan dalam mendukung capaian di dukung beberapa kegiatan, namaun terdapat kegiatan yang serapannya tidak optimal yaitu :

1. Pengamanan aset tetap Kota Cilegon dengan serapan anggaran 53,44%, tidak tercapainya dikarenakan proses dari para pihak terkait terhambat, baik dari pihak OPD terkait dan pihak luar Pemerintah Kota Cilegon.
2. Validasi data tanah pemerintah kota cilegon dengan serapan anggaran 50,01% hal ini dikarenakan proses dari para pihak terhambat, baik dari pihak OPD terkait dan pihak luar Pemerintah Kota Cilegon.

A.2 Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Tabel 3.4.4 b

Target dan Realisasi Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan						4.072,07	3.634,94	89,27%
	Tingkat Realisasi Belanja APBD	%	95,00	88,32	92,97%			



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Realisasi pendapatan daerah terhadap target APBD	%	95,00	93,92	98,86%			
	Laju realisasi pendapatan daerah	%	5,00	8,4	168,05%			
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan anggaran	%	100,00	100,00	100,00%			
	tingkat ketersediaan dokumen penyusunan cashbudget dan surat penyediaan dana (SPD)	%	100,00	100,00	100,00%			
verifikasi dan penelitian RKA - DPA dan RKAP - DPPA	Terlaksananya verifikasi dan penelitian RKA dan DPA perubahan Ta.2019 dan RKA - DPA APBD TA. 2020 serta tersedianya DPPA dan DPA yang sah	Verifikasi ; Dokumen	4	4	100,00%	1.100,20	984,07	89,44%
Penyusunan perubahan APBD (Tahun n) dan APBD (Tahun n+1)	Penyusunan Perubahan APBD tahun Anggaran 2019 dan APBD tahun Anggaran 2020 Tepat Waktu	dokumen	2	2	100,00%	554,13	473,10	85,38%
pembahasan raperda APBD kota cilegon	Terlaksananya kegiatan Pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2020	Rapat pembahasan	2	2	100,00%	759,86	693,76	91,30%
bintek penganggaran keuangan	terlaksananya bintek tentang penganggaran keuangan daerah	orang	300	300	100,00%	116,95	83,86	71,70%
pembahasan perencanaan anggaran	Terlaksananya Pembahasan Perencanaan Anggaran	Rapat Pembahasan	2	2	100,00%	722,75	694,86	96,14%
peningkatan kapasitas TAPD	Terlaksananya bimtek peningkatan kapasitas TAPD	orang	75	75	100,00%	47,12	25,38	53,87%
penyusunan pedoman analisis standar belanja	Terlaksananya dokumen Pedoman ASB	Dokumen	1	1	62,36%	89,60	82,18	91,72%
pedoman penyusunan RKA SKPD/PPKD	Terlaksananya dokumen Pedoman RKA APBD	Kegiatan	1	1	85,72%	59,26	50,80	85,72%
penyusunan pedoman pelaksanaan DPA APBD kota cilegon	Terlaksananya dokumen pedoman DPA APBD	Kegiatan	1	1	84,80%	59,26	50,25	84,80%
penyusunan standar biaya dan standar satuan harga (SSH)	Terlaksananya Draft Rancangan Standar Biaya dan SSH	Draft	2	2	100,00%	270,97	253,84	93,68%
	- Terlaksananya dokumen standar biaya dan SSH	Dokumen	2	2	100,00%			
monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Terlaksananya monitoring Penerimaan sektor objek/subjek Pendapatan Daerah	Objek/hari	20	20	100,00%	82,26	58,84	71,53%
	- Terlaksananya evaluasi penerima PAD selama per triwulan	Rapat	4	3	75,00%			
verifikasi dan proyeksi pendapatan daerah	Terlaksananya Rapat Penyusunan Proyeksi Pendapatan APBD Reguler 2020 dan APBD Perubahan 2019	Rapat	2	2	100,00%	80,70	70,90	87,86%
Perporasi benda berharga retribusi daerah	Terlaksananya Pengawasan peredaran benda berharga yang dikelola OPD Pengelola PAD	Rapat Per Triwulan	4	4	100,00%	25,76	25,76	100,00%
Konseling teknis pemungutan	Terlaksananya bimbingan/pendampingan dan	Rapat	2	2	100,00%	61,30	46,45	75,77%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
pendapatan asli daerah	Pemecahan permasalahan pemungutan PAD							
	- Terlaksananya penyusunan daftar resiko permasalahan pemungutan pendapatan asli daerah	Periode Triwulan	2	2	100,00%			
Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan asli daerah	Terlaksannnya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi terkait Pembahasan Pendapatan Asli Daerah	Rapat Kegiatan	3	3	100,00%	41,95	40,90	97,50%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Merupakan Perencanaan keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan indikator pembangunan Program Peningkatan Pajak Daerah yaitu :

1) Tingkat Realisasi Belanja APBD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan target persentase untuk realisasi Belanja sebesar 95,%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi target kinerja yang ditetapkan tidak dapat tercapai karena realisasi belanja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran *unaudited* sebesar 88,32%. Berarti capaiannya sebesar 93,97%. Realisasi belanja sebesar 88,32% dengan total realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp. 1.823.308.111.142,00 dari target sebesar Rp. 2.064.351.720.317,00 akan tetapi data realisasi tersebut masih bersifat *unaudited*. Realisasi Belanja Daerah tahun 2019 terdiri dari serapan Belanja Langsung dengan realisasi 86,93% atau sebesar Rp. 1.086.384.918.213 dari anggaran Rp. 1.249.706.724.020,00 dan Belanja Tidak Langsung dengan serapan mencapai 90,46% dengan realisasi Rp. 736.923.192.929,00 dari anggaran Rp. 814.644.996.297,00. Untuk mengetahui anggaran belanja yang belum baik realisasinya, maka perlu diuraikan mengenai komponen belanja Pemerintah Kota Cilegon pada Tahun 2019. Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 (*unaudited*), didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen belanja sebagai berikut :

Data Belanja Per Komponen Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019

NO (1)	KOMPONEN (2)	ANGGARAN (3)	REALISASI (4)	% (5)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	814.644.996.297,00	736.923.192.929,00	90,43
	- Belanja Pegawai	750.625.913.914,00	681.225.108.290,00	90,75
	- Belanja Hibah	53.371.238.000,00	52.488.994.040,00	98,35
	- Belanja bantuan social	5.171.113.784,00	2.232.360.000,00	43,17
	- Belanja Bantuan Keuangan kepada Parpol	976.730.599,00	975.730.599,00	100,00
	- Belanja tak terduga	4.500.000.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA LANGSUNG	1.249.706.724.020,00	1.086.384.918.213,00	86,93
	- Belanja Pegawai	123.017.067.778,00	113.783.452.413,00	89,94
	- Belanja Barang dan Jasa	621.808.344.063,00	559.267.279.355,00	89,24
	- Belanja Modal	504.881.312.179,00	413.334.186.445,00	81,87
3	JUMLAH BELANJA	2.064.351.720.317,00	1.823.308.111.142,00	88,32

Sumber: LRA Tahun 2019 BPKAD unaudited

Tidak tercapainya target kinerja sebesar 92,97% dikarenakan Kurangnya kepatuhan OPD dalam melaksanakan kegiatan terhadap anggaran kas yang telah ditetapkan.

2) Realisasi pendapatan daerah terhadap target APBD

Secara umum Pendapatan Daerah dapat uraikan sebagai berikut Target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.881.449.605.475,- dengan realisasi sebelum audit oleh BPK-RI sebesar Rp. 1.766.980.559.475,- atau mencapai 93,92%, dengan sisa anggaran pendapatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 114.469.046.000,-. Dalam target indikator bidang anggaran menetapkan tercapai 95% namun capaian realisasi 2019 hanya mencapai 93,92%. Hal tersebut dipengaruhi dari pencapaian penerimaan sektor Pendapatan Asli Daerah dengan capaian sebesar **92,26%** tidak terlampaui sebesar **Rp. 53.282.238.388,-**, sektor Dana Perimbangan dengan capaian mencapai **95,00%** tidak terlampaui sebesar **Rp. 45.647.068.980,-** dan Sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan capaian mencapai **94,47%** tidak terlampaui sebesar **Rp. 15.539.738.632,-**. Ketidaktercapaian tersebut dikarenakan :

- Terdapat salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang tidak dilaksanakan pemungutannya yang terjadi pada Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.
- Capaian Realisasi BPHTB yang sifatnya transaksional mengikuti iklim investasi dan pembangunan Kota.
- Terdapat salah satu BUMD Kota Cilegon dalam status pengawasan intensif keuangan. Yakni PT. BPRS CM.



- Terdapat Beberapa Komponen PAD yang tidak terproyeksikan dalam Target Pendapatan Asli Daerah namun terdapat Penerimaan diantaranya Sektor Penjualan atas Aset Tetap Pemerintah Kota Cilegon.
- Terdapat penyaluran Dana Bagi Hasil pada Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2019 tidak disalurkan/ditransfer.
- Transfer DAK Fisik disalurkan sesuai dengan data kontrak yang disampaikan ke Kementerian Keuangan pada tanggal 21 Juli 2019

3) Laju realisasi pendapatan daerah

Berdasarkan undang-undang, Pendapatan Daerah bersumber dari Komponen:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- Dana Perimbangan, dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dari ketiga komponen pendapatan daerah tersebut, jumlah realisasi pendapatan daerah di Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.766.980.559.475. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 136,96 milyar dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018 = Rp. 1.630.020.024.950). Dengan capaian tersebut, maka tingkat pertumbuhan pendapatan Kota Cilegon di Tahun 2019 adalah 8,4 %. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan di tahun 2019 (target 2019 adalah 5 %), sehingga capaian kinerja indikator ini di 2019 adalah 168 %.

4) Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan anggaran

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan anggaran sebesar 100% dimana realisasi dokumen yang dibutuhkan sebanyak 13 dokumen perencanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. SK TPP
2. SK Hibah Bansos
3. SK Bansos
4. SK Tim ASB
5. SK Tim SSH
6. SK Tim SB
7. SK Tim Domlak RKA
8. SK Tim Domlak DPA
9. Perwal ASB
10. Perwal SB
11. Perwal Domlak RKA
12. Perwal Domlak DPA
13. SK SSH

Pelaksanaan Program perencanaan anggaran, pengendalian, dan evaluasi pendapatan yang mana di dukung kegiatan, hasil keluaran (output) kegiatan yang dicapai secara keseluruhan sebesar 100% dengan serapan anggaran 89,20%, dari serapan anggaran program tersebut adanya kegiatan pendukung dengan serapan dibawah 75% yaitu :

- 1) Bintel penganggaran keuangan serapan anggaran 71,70% dikarenakan terdapat kode belanja Narasumber yang direncanakan sebanyak 3 Narasumber tetapi yang direalisasikan hanya 1 Narasumber. Solusi pada kegiatan yang akan datang adalah menyesuaikan jadwal dan waktu Narasumber sehingga perencanaan yang sudah dituangkan di DPA bisa terealisasikan 100%.
- 2) Peningkatan kapasitas TAPD, dengan serapan 53,87 % hal ini dikarenakan adanya efesiensi anggaran kegiatan yang dilakasnakan dalam satu hari dari rencana pelaksanaan dua hari.
- 3) Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
Realisasi anggaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp 58.835.000,- dari target Rp 82.255.000,- dengan persentase capaian anggaran 71,53%. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dari Narasumber untuk kegiatan evaluasi PAD Triwulan IV, sehingga tidak terlaksananya kegiatan rapat evaluasi PAD triwulan IV Tahun Anggaran 2019. Solusi pada kegiatan yang akan datang adalah menyesuaikan jadwal/waktu Narasumber dan lebih diprioritaskan

A.3 Program Peningkatan Pajak Daerah

Tabel 3.4.4 c

Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pajak daerah Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Pajak Daerah (BPKAD)						6.116,64	5.512,60	90,12%
	Proporsi peningkatan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah	%	5,00	12,17	243,40%			
	Realisasi pendapatan pajak	%	100,00	90,43	90,43%			
	Proporsi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu	%	80,00	105,70	132,13%			
pemberian penghargaan bagi WP daerah yang lunas pajak	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada WP daerah yang lunas pajak	Wajib Pajak	150	150	100,00%	546,48	528,98	96,80%
bulan panutan pajak bumi dan bangunan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada WP Potensial PBB Sebelum Jatuh Tempo	Wajib Pajak	100	100	100,00%	435,42	426,31	97,91%



BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
bintek tentnag pajak daerah	Terciptanya Aparatur Pemungut Pajak Daerah Yang Lebih Berkompeten, Akuntabel dan Profesional	Pegawai	47	38	80,85%	414,90	350,50	84,48%
pemeriksaan objek dan subjek pajak daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Objek dan Subjek Pajak Daerah	Objek dan Subjek	12	16	133,33%	121,93	110,56	90,68%
pendataan dan penilaian individual objek PBB	Tersedianya Data Nilai Bangunan dan Lahan, dan Data Potensi Wajib Pajak PBB Individual	Dokumen	15	12	80,00%	135,39	110,94	81,94%
pengolahan, pemutakhiran dan pemeliharaan SIMPAD, SIM PBB dan BPHTB	Terpeliharanya Pengolahan, Pemutakhiran, dan Pemeliharaan SIMPAD, SIM PBB dan BPHTB	Sistem	2	3	150,00%	217,95	215,78	99,00%
pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah	Terlaksananya Pemutakhiran Data Subjek dan Objek Pajak Daerah	Objek dan Subjek	8.100	14.538	179,48%	45,65	44,88	98,32%
sosialisasi pajak daerah	Tersosialisasinya pajak daerah melalui mas media elektronik dan cetak	media elektronik dan cetak	12	12	100,00%	615,55	587,22	95,40%
rekonsiliasi BPHTB dan PBB	Terlaksananya Rekonsiliasi BPHTB dan PBB	Dokumen	6	6	100,00%	28,83	23,29	80,80%
penagihan langsung pajak daerah	Tertagihnya piutang pajak daerah	Jenis Pajak Daerah	10	8	82,59%	32,30	26,68	82,59%
peningkatan berkala sistem manajemen mutu ISO	Diperolehnya ISO 9001:2015 (Management Pajak) dan sertifikasi SMM ISO 9001:2015	Sertifikat	1	1	100,00%	163,92	149,94	91,47%
cetak massal SPPT PBB	Terlaksananya cetak massal SPPT PBB P2	OP	160.000	160.000	100,00%	220,50	158,99	72,10%
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pengenaan Pajak Daerah (DID)	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan pengenaan pajak daerah	kegiatan	6	6	100,00%	1.606,07	1.387,44	86,39%
Pendataan dan Penilaian Massal Objek PBB (DID)	Terlaksananya pendataan dan penilaian masal objek PBB P2	Kecamatan	3	3	100,00%	1.481,75	1.343,07	90,64%
Kajian Potensi Pajak Daerah Non PBB (DID)	Data potensi pajak daerah non PBB dan BPHTB (DID)	Objek pajak	8	8	100,00%	50,00	48,03	96,06%
Program Peningkatan Pajak Daerah (UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I)						479,86	450,00	93,78%
penyampaian SPPT PBB TA 2018	Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB Tahun 2019	Wajib Pajak	24.800	24.800	100,00%	175,00	173,82	99,33%
penyuluhan pajak daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pajak Daerah	Wajib Pajak	100	100	100,00%	304,86	276,18	90,59%
Program Peningkatan Pajak Daerah (UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II)						408,12	405,62	99,39%
penyampaian SPPT PBB TA 2018	Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB Tahun 2019	Wajib pajak	35.622	35.622	100,00%	180,61	180,61	100,00%
penyuluhan pajak daerah	Tercapainya Penyuluhan Pajak Daerah UPT Wilayah II	WP	400	400	100,00%	227,51	225,01	98,90%
Program Peningkatan Pajak Daerah (UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III)						468,02	441,88	94,42%
penyampaian SPPT PBB TA 2018	Terlaksananya penyampaian SPPT PBB Tahun 2019	lembar	27.084	26.963	99,55%	256,82	233,81	91,04%
penyuluhan pajak daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pajak Daerah	Wajib Pajak	300	300	100,00%	211,20	208,07	98,52%
Program Peningkatan Pajak Daerah (UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV)						473,26	464,08	98,06%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
penyampaian SPPT PBB TA 2018	Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB Tahun 2019	lembar	26.000	26.000	100,00%	134,00	134,00	100,00%
penyuluhan pajak daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pajak Daerah	Wajib Pajak	350	350	100,00%	339,26	330,08	97,30%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program peningkatan pajak daerah dimaksudkan untuk mengelola pendapatan daerah, yang mana sebagai pendapatan asli daerah melalui sumber-sumber pajak. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

1) Proporsi peningkatan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah

Indikator ini menunjukkan pembangunan pada bidang urusan keuangan tentang pengelolaan pendapatan daerah yang mana bertujuan untuk menggali potensi-potensi sumber pajak sebagai pembiayaan-pembiayaan pembangunan Kota Cilegon, adapun hasil atau realisasi pembangunan pada tahun 2019 berdasarkan indikator dapat disampaikan sebagai berikut :

Definisi operasional Proporsi peningkatan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah adalah realisasi pendapatan tahun 2019 - realisasi tahun 2018 terhadap Realisasi tahun 2018, dengan perhitungan Pendapatan pajak tahun 2019 sebesar Rp. 488.718.178.869 – sedangkan realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 429.234.596.141, pendapatan daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp.59.483.582.728 atau 114%, dengan laju peningkatan pendapatan daerah Tahun 2018-2019 sebesar 12,17 % sedangkan Target yang akan dicapai sebesar 5%, sehingga kinerja yang diperoleh sebesar 243,43%,

Tabel pendapatan pajak Tahun 2018 dan 2019

NO	JENIS PAJAK	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	PROSENTASE	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4	5=4/3 x 100	6	7	8=7/6 x 100
1	HOTEL	10,000,000,000	10,876,293,966	108.76	10,425,000,000	11,251,118,434	107.92
2	RESTORAN	19,150,000,000	23,883,033,469	124.72	24,876,000,000	32,119,241,400	129.12
3	HIBURAN	5,275,000,000	5,851,872,506	110.94	5,423,000,000	6,395,835,058	117.94
4	REKLAME	2,100,000,000	1,829,458,581	87.12	1,260,000,000	1,891,936,109	150.15
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	207,300,000,000	222,826,606,981	107.49	209,000,000,000	209,190,428,545	100.09
6	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM&BATUAN	1,230,000,000	1,299,030,000	105.61	9,300,000,000	8,144,706,900	87.58
7	PAJAK PARKIR	720,000,000	751,451,601	104.37	1,700,000,000	2,222,628,156	130.74
8	PAJAK AIR TANAH	2,000,000,000	1,839,638,931	91.98	1,500,000,000	1,575,066,769	105.00
9	BPHTB	221,124,302,929	78,158,078,866	35.35	188,869,611,122	129,473,718,426	68.55
10	PBB	83,500,000,000	81,919,131,240	98.11	88,072,000,000	86,453,499,072	98.16
	TOTAL	552,399,302,929	429,234,596,141	77.70	540,425,611,122	488,718,178,869	90.43

Pencapaian Proporsi realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 243%. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Dari 10 jenis pajak yang dikelola oleh Kota Cilegon, 2 (dua) jenis pajak yang mengalami penurunan realisasi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2018, diantaranya yaitu Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah. Akan tetapi terdapat 8 (delapan) jenis pajak yang mengalami kenaikan realisasi yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, BPHTB dan PBB. Penurunan realisasi terbesar terjadi pada Pajak Penerangan Jalan, penurunan realisasi tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 13.636.178.436,- atau menurun sebesar 6,52%. Akan tetapi peningkatan realisasi juga terjadi pada tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi 2018 yaitu sebesar Rp.73.384.333.326,- atau meningkat sebesar 26,40%.

2) Realisasi pendapatan pajak

Realisasi pendapatan dari sektor pajak daerah pada tahun 2019 terealisasi sebesar 90,43 % dari target yang diberikan yaitu sebesar 100%. Realisasi tersebut didapatkan dari target pajak daerah pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 540.425.611.122,- dan terealisasi sebesar Rp. 488.718.178.869,-.

Tabel Realisasi pendapatan Th 2019

NO	JENIS PAJAK	2019		PROSENTASE
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5=4/3 x 100
1	HOTEL	10,425,000,000	11,251,118,434	107.92
2	RESTORAN	24,876,000,000	32,119,241,400	129.12
3	HIBURAN	5,423,000,000	6,395,835,058	117.94
4	REKLAME	1,260,000,000	1,891,936,109	150.15
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	209,000,000,000	209,190,428,545	100.09
6	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM&BATUAN	9,300,000,000	8,144,706,900	87.58
7	PAJAK PARKIR	1,700,000,000	2,222,628,156	130.74
8	PAJAK AIR TANAH	1,500,000,000	1,575,066,769	105.00
9	BPHTB	188,869,611,122	129,473,718,426	68.55
10	PBB	88,072,000,000	86,453,499,072	98.16
	TOTAL	540,425,611,122	488,718,178,869	90.43

Dari data tersebut di atas terdapat beberapa jenis pajak yang melebihi target dan adapula yang tidak mencapai target. Beberapa jenis pajak yang melebihi target yaitu:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah

Sedangkan yang tidak mencapai target yaitu :

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- BPHTB, dan
- PBB

Beberapa jenis pajak daerah yang melebihi target dipengaruhi oleh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan, berikut ini beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah :

❖ Pelaksanaan Intensifikasi

Pelaksanaan intensifikasi pajak daerah dilakukan terhadap objek pajak yang sudah menjadi wajib pajak daerah.

- Pajak Hotel

Pelaksanaan intensifikasi dari pajak hotel dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak hotel.
- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak hotel.
- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak hotel yang menunggak.
- Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak hotel.
- Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (tapping box) pada beberapa hotel.
- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
- Memberikan apresiasi kepada konsumen berupa undian/doorprize.

- Pajak Restoran

Pelaksanaan intensifikasi dari pajak restoran dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak restoran.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak restoran.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak restoran yang menunggak.
 - Melakukan pemasangan tapping box pada beberapa restoran/rumah makan.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak restoran.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
 - Memberikan apresiasi kepada konsumen berupa undian/doorprize.
- **Pajak Hiburan**
Pelaksanaan intensifikasi dari pajak hiburan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak hiburan.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak hiburan.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak hiburan yang menunggak.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak hiburan.
 - Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (tapping box) pada beberapa wajib pajak hiburan.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
 - Memberikan apresiasi kepada konsumen berupa undian/doorprize.
 - **Pajak Penerangan Jalan**
Pelaksanaan intensifikasi dari pajak penerangan jalan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak penerangan jalan.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak penerangan jalan.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.

- **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pelaksanaan intensifikasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak mineral bukan logam dan batuan.
- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak mineral bukan logam dan batuan.
- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yang menunggak.
- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.

- **Pajak Parkir**

Pelaksanaan intensifikasi dari pajak parkir dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak parkir.
- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak parkir.
- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak parkir yang menunggak.
- Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak parkir.
- Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (tapping box).
- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.

- **Pajak Air Tanah**

Pelaksanaan intensifikasi dari pajak air tanah dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak air tanah.
- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak air tanah.
- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak air tanah yang menunggak.
- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.

- ❖ **Pelaksanaan Ekstensifikasi**

Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan terhadap objek pajak yang belum menjadi wajib pajak.



- **Pajak Hotel**
Pelaksanaan ekstensifikasi dari pajak hotel yaitu dengan melakukan pendataan pada objek-objek pajak hotel serta melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
- **Pajak Restoran**
Pelaksanaan ekstensifikasi dari pajak restoran yaitu dengan melakukan pendataan pada objek-objek pajak restoran serta melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
- **Pajak Hiburan**
Pelaksanaan ekstensifikasi dari pajak hiburan yaitu dengan melakukan pendataan pada objek-objek pajak hiburan serta melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
- **Pajak Reklame**
Melakukan pendataan reklame indoor terhadap objek-objek media reklame yang berada di Kota Cilegon.
- **Pajak Penerangan Jalan**
Pelaksanaan ekstensifikasi dari pajak penerangan jalan yaitu dengan melakukan pendataan pada objek-objek pajak penerangan jalan serta melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
- **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**
Pelaksanaan ekstensifikasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu dengan melakukan pendataan pada objek-objek pajak mineral serta melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
- **Pajak Parkir**
Pelaksanaan ekstensifikasi dari pajak parkir yaitu dengan melakukan pendataan pada objek-objek pajak parkir serta melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
- **Pajak Air Tanah**
Pelaksanaan ekstensifikasi dari Pajak Air Tanah yaitu dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pendataan pada objek-objek pajak air tanah serta melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
- **BPHTB**
Mencari informasi pada pihak lain terkait potensi peralihan hak yang terjadi di Kota Cilegon.

- PBB

Melakukan pendataan dan pemutakhiran massal PBB pada 3 (tiga) Kecamatan

3) Proporsi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu

Proporsi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu pada tahun 2019 sebesar 105,7%. Data tersebut didapatkan dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak daerah (SSPD yang terbit) yaitu sebesar 96.979 SSPD dibagi dengan jumlah wajib pajak dan objek pajak sebesar 91.745 WP/OP.

Bidang Pajak Daerah memiliki kegiatan sebanyak 15 (lima belas) dengan ketercapaian kegiatan sebesar 100 % dengan rata-rata serapan belanja di kisaran 90.12 persen. Beberapa kegiatan di bidang pajak daerah terdapat kegiatan yang pencapaian anggaran di bawah 75%, capaian kinerja dibawah 100% dan 1 kegiatan yang terdapat kesalahan target kinerja, kegiatan-kegiatan tersebut yaitu : 1) Kegiatan Cetak Massal SPPT PBB, hal tersebut dikarenakan belanja suku cadang peralatan yang direncanakan untuk pembelian beberapa suku cadang UPS ICA SIN 7501 CI tidak dapat direalisasikan dikarenakan kesalahn pada satuan di DPA nya, seharusnya satuannya 1 paket sedangkan di DPA tertulis 1 unit.

A.4 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah

Tabel 3.4.4 d

Target dan Realisasi Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah						1.904,80	1.278,87	67,14%
	Tingkat keoptimalan penyediaan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	100	100	100%			
rekonsiliasi akuntansi penerimaan	Terlaksananya Rekonsiliasi Akuntansi Penerimaan	Laporan	12	12	100,00%	144,60	73,86	51,08%
	- Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan piutang pajak reklame dan pajak air tanah	Laporan	2	-	0,00%			
penyusunan data akuntansi penerimaan	Tersusunnya Data Akuntansi Penerimaan	Dokumen	4	4	100,00%	77,10	27,66	35,88%
penyusunan data akuntansi pengeluaran	Tersusunnya Data Akuntansi Pengeluaran	Dokumen	7	7	100,00%	82,09	50,39	61,39%
rekonsiliasi data akuntansi pengeluaran	Terlaksananya Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran	Laporan	12	12	100,00%	124,34	94,21	75,77%
evaluasi dan analisa laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	Terlaksananya Evaluasi dan Analisa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Laporan	12	12	100,00%	131,31	83,46	63,56%
bintek tentang akuntansi	Terlaksananya Bintek Akuntansi	orang	200	200	100,00%	72,56	71,50	98,54%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
evaluasi laporan keuangan SKPD	Terlaksananya Evaluasi Laporan Keuangan SKPD/OPD	Dokumen	2	2	100,00%	157,20	109,00	69,34%
pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Cilegon	Terselenggaranya Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cilegon	Dokumen	1	1	100,00%	336,49	272,14	80,88%
penyusunan laporan intern realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Interim Realisasi Anggaran	Dokumen	4	4	91,99%	266,30	167,03	62,72%
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	3	3	100,00%	284,61	148,70	52,25%
penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota cilegon	Terlaksanakannya Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cilegon	Raperda Perda, Raperwal Perwal	4	4	100,00%	228,22	180,93	79,28%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program pengelolaan akuntansi keuangan daerah dimaksudkan membuat pelaporan keuangan berdasarkan tatakelola pelaporan keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah sebagai informasi yang diperlukan bagi pihak dalam dan luar entitas dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomisnya.

Keberhasilan pembangunan capaian program Perbendaharaan Keuangan Daerah di indikasikan dengan tiga indikator yaitu :

- 1) Tingkat keoptimalan penyediaan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Keberhasilan program dapat dinyatakan dengan tercapainya indikator pelaksanaan program berupa indikator pembangunan. Indikator pembangunan Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah adalah Tingkat Keoptimalan Penyediaan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, realisasi capaian indikator ini sebesar 100% yang mana tujuh penyediaan laporan akuntansi yang dilaporkan dari tujuh laporan yang ditetapkan. Adapun jenis laporan keuangan yang wajib di laporan untuk penilaian adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengukuran Capaian opini tersebut merupakan hasil terbaik yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon. Tentunya tingkat keoptimalan penyediaan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon sudah memadai.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah yang mana di dukung kegiatan, hasil keluaran (output) kegiatan yang dicapai secara keseluruhan sebesar 100% dengan serapan anggaran 68,45%, dari serapan anggaran program tersebut adanya kegiatan pendukung dengan serapan dibawah 75% yaitu :

1) Rekonsiliasi akuntansi penerimaan 51,08%

Output dari kegiatan ini adalah 2 kegiatan salah satunya adalah terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan Piutang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah sebanyak 1 (satu) kegiatan dan tidak direalisasikan. Adapun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena data Piutang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah telah disediakan sepenuhnya dari Program Peningkatan Pajak Daerah dengan menggunakan aplikasi SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah). Adapun serapan anggaran sebesar Rp 73.859.000,- dari target Rp 144.603.000,- dengan persentase capaian anggaran 51,08 %, hal ini dikarenakan: Tidak terserapnya anggaran pada kegiatan rekonsiliasi data penerimaan piutang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah pada Belanja Cetak Rp 800.000,- , Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Rp 7.020.000,-. Sedangkan karena sebagian besar kegiatan pada kegiatan Rekonsiliasi Akuntansi Penerimaan telah dilakukan secara online sehingga ada beberapa rincian belanja yang tidak diserap yaitu belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Makan Minum.

2) Penyusunan data akuntansi penerimaan dengan

Output dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Data Akuntansi Penerimaan 4 buah dokumen terealisasi sebanyak 4 buah dokumen. Adapun serapan anggaran sebesar Rp 55.324.000,- dari target Rp 77.100.000,- dengan persentasi capaian anggaran 35,88 %, hal ini dikarenakan ada beberapa rincian belanja yang tidak diserap yaitu Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Makan Minum.

3) Penyusunan data akuntansi pengeluaran

Output dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Data Akuntansi Pengeluaran 7 buah dokumen terealisasi sebanyak 7 buah dokumen. Adapun serapan anggaran sebesar Rp 50.393.000,- dari target Rp 82.085.000,- dengan persentasi capaian anggaran 61,39%, hal ini dikarenakan karena efisiensi Belanja Cetak dan Belanja Mamin.

4) Evaluasi dan analisa laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Evaluasi dan Analisa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 12 buah Laporan terealisasi sebanyak 12 buah Laporan. Adapun serapan anggaran sebesar Rp 83.456.000,- dari target Rp 131.305.000,- dengan persentasi capaian

anggaran 63,56%, hal ini dikarenakan ada beberapa rincian belanja yang tidak seluruhnya diserap yaitu belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Makan Minum.

5) Evaluasi laporan keuangan SKPD

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Evaluasi Laporan Keuangan OPD 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen. Adapun serapan anggaran sebesar Rp 109.000.000,- dari target Rp 157.200.000,- dengan persentasi capaian anggaran 69,34%, hal ini dikarenakan ada beberapa rincian belanja yang tidak seluruhnya diserap yaitu Belanja Makan Minum.

6) Penyusunan laporan intern realisasi anggaran

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Intern Realisasi Anggaran 4 dokumen terealisasi sebanyak 4 dokumen. Adapun serapan anggaran sebesar Rp 167.025.000,- dari target Rp 266.295.000,- dengan persentasi capaian anggaran 62,72%, hal ini dikarenakan ada beberapa rincian belanja yang tidak diserap yaitu Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, dan sebagian Belanja Cetak.

7) Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen. Adapun serapan anggaran sebesar Rp 148.700.000,- dari target Rp 284.610.000,- dengan persentasi capaian anggaran 52,25%, hal ini dikarenakan ada beberapa rincian belanja yang tidak diserap yaitu Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, Belanja Jasa tenaga ahli/narasumber/pakar/praktisi/pembicara khusus dan pendukungnya dan Belanja Sewa Penginapan.

A.5 Program Perbendaharaan Keuangan Daerah

Tabel 3.4.4e

Target dan Realisasi Program perbendaharaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Perbendaharaan Keuangan Daerah						926,71	769,40	83,03%
	Persentase proses pelayanan pembiayaan dengan durasi sesuai dengan peraturan perundangan	%	100	100	100,00%			
	Persentase proses pencairan anggaran belanja dengan	%	100	100	100,00%			

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	durasi sesuai dengan peraturan perundangan							
	Tingkat pelayanan kas daerah	%	100	100	100,00%			
	Tingkat Ketersediaan dokumen penyusunan cashbudget dan surat penyediaan dana (SPD)	%	100	100	100,00%			
aplikasi sim gaji pemerintah kota cilegon	Terlaksananya SIM Gaji Pemerintah Kota Cilegon	Bulan	12	12	100,00%	101,63	100,76	99,15%
	Terlaksananya pelaksanaan gaji ke-13 dan gaji ke-14	OPD	56	56	100,00%			
bintek tentang penatausahaan keuangan daerah	Terlaksananya Kegiatan Bintek Tentang Penatausahaan Keuangan Daerah	OPD	56	56	100,00%	165,77	143,45	86,53%
penyelesaian SP2D	Terselenggaranya Penerbitan SP2D untuk masing-masing OPD	OPD	56	56	100,00%	124,92	123,57	98,92%
	Tersusunnya buku register SP2D	Dokumen	4	4	100,00%			
penentuan uang persediaan	Tersedianya Uang Persediaan pada masing-masing OPD	OPD	56	56	100,00%	55,55	40,68	73,23%
penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah	Terlaksananya Penyusunan buku Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah	Laporan	12	12	100,00%	110,24	78,12	70,86%
laporan pajak yang bersumber dari SP2D	Tersedianya buku Laporan Pajak yang bersumber dari SP2D	Laporan	12	12	100,00%	65,73	42,02	63,93%
monitoring evaluasi pengendalian dana perimbangan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan	Triwulan	4	4	100,00%	16,42	2,18	13,28%
pelaksanaan pengumpulan data dana perimbangan	Terlaksananya Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data Dana Perimbangan	Triwulan	4	4	100,00%	29,41	7,52	25,57%
Penyusunan SP2D belanja tidak langsung	Terselenggaranya Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung untuk masing-masing OPD	OPD	56	56	100,00%	88,77	88,05	99,19%
	Tersusunnya buku register SP2D belanja tidak langsung	Dokumen	4	4	100,00%			
Penyusunan Cash Budget dan Surat Penyediaan Dana	Terlaksananya Penyusunan Cash Budget dan Surat Penyediaan Dana	Laporan	7	7	100,00%	158,99	140,91	88,63%
Monitoring dan evaluasi implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kota Cilegon	Terlaksananya Keg. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kota Cilegon	Triwulan	4	4	100,00%	9,30	2,17	23,33%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program Perbendaharaan Keuangan Daerah merupakan program tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Perbendaharaan Daerah mengenai sistem dan prosedur yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan bendahara pemerintah daerah dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bendahara daerah yang dimaksud adalah mulai dari bendahara SKPD, bendahara PPKD hingga BUD.

Keberhasilan pembangunan capaian program Perbendaharaan Keuangan Daerah di indikasikan dengan tiga indikator yaitu :

- 1) Persentase proses pelayanan pembiayaan dengan durasi sesuai dengan peraturan perundangan

Indikator bermaksud mengetahui efektifitas pelayanan pembiayaan dengan durasi sesuai dengan perundang-undangan, hal ini adanya dampak pada pelaksanaan program-program pembangunan dalam pembiayaan. capaian realisasi yang diperoleh sebesar 100%, dimana jumlah pelayanan proses pelayanan dari SPM sebanyak 33.729 surat yang vervikasikan ke SP2D sebanyak 33.729.

Bulan	SPM	SP2D
(1)	(2)	(3)
Januari	409	409
Februari	1803	1803
Maret	2481	2481
April	2776	2776
Mei	3766	3766
Juni	1512	1512
Juli	2825	2825
Agustus	2733	2733
September	2560	2560
Oktober	2588	2588
November	3724	3724
Desember	6552	6552
Jumlah	33.729	33.729

- 2) Persentase proses pencairan anggaran belanja dengan durasi sesuai dengan peraturan perundangan

Yaitu Jumlah penerbitan SP2D sebanyak 33.729 terhadap yang diposting 33.729 atau 100%

Jumlah SP2D yang diposting

Bulan	SP2D	POSTING
(1)	(2)	(3)
Januari	409	409
Februari	1803	1803
Maret	2481	2481
April	2776	2776
Mei	3766	3766
Juni	1512	1512
Juli	2825	2825
Agustus	2733	2733
September	2560	2560
Oktober	2588	2588
November	3724	3724
Desember	6552	6552
Jumlah	33.729	33.729

3) Tingkat pelayanan kas daerah

Tingkat pelayanan dalam hal penerimaan jumlah SP2D yang Diterima + STS yang Diterima sebanyak 38.229 terhadap SP2D yang Diposting + STS yang Diterima 38.229

Bulan	SP2D	STS
Januari	409	468
Februari	1803	377
Maret	2481	439
April	2776	441
Mei	3766	397
Juni	1512	367
Juli	2825	519
Agustus	2733	432
September	2560	442
Oktober	2588	477
November	3724	463
Desember	6552	578
Jumlah	33.729	5.400

4) Tingkat Ketersediaan dokumen penyusunan cashbudget dan surat penyediaan dana (SPD)

Dokumen yang tersedia adalah Anggaran cash rutin, Anggaran cash perubahan, serta Surat Penyediaan Dana Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, Triwulan IV dan SPD Perubahan.

Kegiatan-kegiatan yang tingkat realisasi anggarannya di bawah 75%, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah

Pagu anggaran = Rp 55.550.000, realisasi keuangan = Rp 40.678.000 (73,23 %), realisasi kinerja = 100%. Permasalahan Terkait capaian realisasi kegiatan yang hanya 73,23 %, hal tersebut dikarenakan optimalisasi dan efisiensi anggaran sehingga menyebabkan rendahnya realisasi capaian kegiatan. Solusi ke depan akan menyesuaikan anggaran yang dipandang lebih prioritas.

2. Kegiatan Laporan pajak yang bersumber dari SP2D

Pagu anggaran = Rp 65.725.000, realisasi keuangan = Rp 42.015.000 (63,93 %), realisasi kinerja = 100%. Permasalahan Terkait capaian realisasi kegiatan yang hanya 63,93 %, hal tersebut dikarenakan optimalisasi dan efisiensi anggaran sehingga menyebabkan rendahnya

realisasi capaian kegiatan. Solusi ke depan akan mengoptimalkan/menyesuaikan pagu anggaran agar tidak terjadi capaian/realisasi yang rendah.

3. Kegiatan Monitoring evaluasi pengendalian dana perimbangan

Pagu anggaran = Rp 16.420.000, realisasi keuangan = Rp 2.180.000 (13,28 %), realisasi kinerja = 100%. Permasalahan hal ini dikarenakan pelaporan dana perimbangan sudah berbasis aplikasi sehingga Daerah tidak perlu lagi ke Jakarta, efisiensi yang dilakukan Pemerintah pusat sehingga menyebabkan rendahnya realisasi capaian kegiatan. Solusi ke depan akan mengoptimalkan/menyesuaikan pagu anggaran agar tidak terjadi capaian/realisasi yang rendah.

4. Kegiatan pengumpulan data dana perimbangan

Pagu anggaran = Rp 29.410.000, realisasi keuangan = Rp 7.520.000 (25,57 %), realisasi kinerja = 100%. Permasalahan hal ini dikarenakan pelaporan dana perimbangan sudah berbasis aplikasi sehingga Daerah tidak perlu lagi ke Jakarta dan Pemprov Banten, efisiensi yang dilakukan Pemerintah pusat dan Pemprov Banten sehingga menyebabkan rendahnya realisasi capaian kegiatan. Solusi ke depan akan mengoptimalkan/menyesuaikan pagu anggaran agar tidak terjadi capaian/realisasi yang rendah.

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kota Cilegon

Pagu anggaran = Rp 9.300.000, realisasi keuangan = Rp 2.170.000 (23,33 %), realisasi kinerja = 100%. Permasalahan efisiensi dan optimalisasi anggaran serta mendahulukan belanja yang prioritas pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kota Cilegon TA 2019 yang berpengaruh pada capaian/realisasi. Solusi ke depan akan menyesuaikan pagu anggaran agar tidak terjadi capaian/realisasi yang rendah.

A.6 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (BPKAD)

Tabel 3.4.4f

Target dan Realisasi Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun 2019 (BPKAD)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (BPKAD)						16.954,80	12.506,98	73,77%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100,00	100,00	100,00%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	80,00	97,40	121,75%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	90,00	89,92	99,91%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	85,00	66,75	78,53%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I)						293,00	270,39	92,28%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II)						282,87	229,05	80,97%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III)						316,81	305,09	96,30%
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV)						326,75	295,41	90,41%

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Penyampaian laporan keuangan per bulan dari sebagian besar OPD tidak ontime, karena lampiran untuk laporan keuangan belum lengkap.
2. Terdapat salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang tidak dilaksanakan pemungutannya yang terjadi pada Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.
3. Capaian Realisasi BPHTB yang sifatnya transaksional mengikuti iklim investasi dan pembangunan Kota.
4. Terdapat salah satu BUMD Kota Cilegon dalam status pengawasan intensif keuangan. Yakni PT. BPRS CM.
5. Terdapat Beberapa Komponen PAD yang tidak terproyeksikan dalam Target Pendapatan Asli Daerah namun terdapat Penerimaan diantaranya Sektor Penjualan atas Aset Tetap Pemerintah Kota Cilegon.
6. Terdapat penyaluran Dana Bahi Hasil pada Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2019 tidak disalurkan/ditransfer.
7. Transfer DAK Fisik disalurkan sesuai dengan data kontrak yang disampaikan ke Kementerian Keuangan pada tanggal 21 Juli 2019.
8. Munculnya peraturan perundang-undangan tentang penganggaran yang berubah-ubah.
9. OPD tidak konsisten dalam merealisasikan anggaran kegiatan dengan cash budget yang ditargetkan

B.2 Solusi

1. Mengintensifkan koordinasi dengan OPD, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah melalui perbaikan system dan prosedur serta perbaikan administrasi;
3. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek/subjek, peningkatan pengawasan dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah dan penyehatan keuangan BUMD khususnya PT. BPRS CM.
5. Peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak sesuai. Termasuk penyesuaian tarif pemungutan sektro Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Kedepan adanya sinkronisasi data kontrak yang akan disampaikan kepada Kementrian terkait.
7. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Alokasi Dana Transfer Pusat dan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2019.
8. Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk regulasi maupun sistem monitoring realisasi kepada OPD

3.4.5 Bidang Urusan Kepegawaian

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA) (BKPP)

Tabel 3.4.5a
Target dan Realisasi Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA) Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA)						1.809,54	926,57	51,20%
	Prosentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS	%	85	75	88,24%			
	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	143	143,49%			
	Prosentase ketersediaan ASN Pemerintah Kota Cilegon	%	95	-	0,00%			
	Cakupan pemberian bantuan pendidikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan bantuan pendidikan	%	100	100	100%			
	Tingkat Kelengkapan dalam Penyajian Data dan informasi Kepegawaian	%	100	100	100%			
	Prosentase SKPD yang Online Data Kepegawaian	%	70	46	65,06%			
Pengolahan Administrasi Pemberhentian Pegawai (pensiun)	Terkelolanya administrasi pemberhentian pensiun	SK Pensiun	110	95	86,30%	98,76	85,23	86,30%
Pengelolaan Identitas Pegawai	Terlaksananya pemberian identitas pegawai	identitas pegawai	150	150	100,00%	19,38	19,03	98,24%
Pengambilan Sumpah dan Janji PNS	Terlaksananya dan meningkatnya status CPNS menjadi PNS	orang	250	-	0,00%	21,63	0,00	0,00%
Persiapan dan Pelaksanaan CASND Kota Cilegon	Terlaksananya pelaksanaan CASN Kota Cilegon Tahun 2019	CASN	900	653	72,51%	1.300,21	538,01	41,38%
Penegakan Disiplin Aparatur	Terlaksananya penegakan disiplin aparatur dan penanganan kasus-kasus disiplin	bulan	12	9	72,68%	101,48	90,56	89,24%
Pengelolaan LHKPN	Jumlah peserta asistensi pengisian LHKP	orang	63	63	100,00%	25,42	24,91	98,00%
Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya	Medali	300	300	100,00%	39,61	38,25	96,55%
Bantuan Tugas Belajar dan Bantuan Pendidikan S1, S2 dan S3	Terlaksananya bantuan tugas belajar dan bantuan pendidikan S1 dan S2	orang	28	20	70,90%	151,96	91,20	60,01%
Rekonsiliasi Data Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai	Database Kepegawaian Pegawai Non PNS	Dokumen dan Sistem Aplikasi	1	1	77,08%	51,09	39,38	77,08%



Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan, Administrasi Umum dan Kesejahteraan Pegawai (P3KA) mempunyai fungsi pengelolaan pegawai dalam kaitannya peningkatan kedisiplinan pegawai, pemenuhan kebutuhan pegawai Pemerintah kota Cilegon serta bertanggung jawab dalam administrasi umum dan kesejahteraan pegawai.

Indikator yang menggambarkan keberhasilan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam mengupayakan Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA) pada tahun 2019 :

1. Tingkat pembinaan terhadap pegawai pemerintah kota Cilegon dengan capaian realisasi 75% dari target RPJMD 85%, capaian ini terukur melalui jumlah pelanggaran yang diselesaikan terhadap pelanggaran yang di inventarisasi. Kasus pelanggaran yang terinventarisasi sebanyak 4 kasus, namun penyelesaian dengan putusan hanya 3 kasus, hal ini dikarenakan 1 kasus masih dalam proses penyelesaian.;
2. Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian dengan capaian realisasi 143,49% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah pelayanan yang diselesaikan dengan jumlah pelayanan administrasi kepegawaian Pelayanan yang dilakukan diantaranya kartu identitas pegawai (Karis, Karsu ,Karpeg dan Taspen) yang ditargetkan sebanyak 150 dan realisasi 154, Pelayanan pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang ditargetkan 300 dan realisasi 618. Pelayanan Pensiun yang ditargetkan 110 dan realisasi 134.;
3. Prosentase ketersediaan ASN Pemerintah Kota Cilegon dengan capaian realisasi 0% dari target RPJMD 95%, hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pusat mengenai rekrutmen yang dialihkan ke tahun 2020;
4. Cakupan pemberian bantuan pendidikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan bantuan pendidikan dengan capaian realisasi 100% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah pegawai yang mendapatkan bantuan dan tugas belajar terhadap jumlah yang diinventarisasi yaitu sebanyak 21 Aparatur yang menerima bantuan tugas belajar dan izin belajar;
5. Tingkat penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat dan informatif dengan capaian realisasi 143,49% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui data yang disajikan terhadap data yang diminta yaitu terdapat 16 jenis data informasi kepegawaian yang ada di BKPP terhadap data yang diminta;
6. Persentase mesin absensi finger print dalam kondisi baik dengan capaian realisasi 45,54% dari target RPJMD 70%, hal ini terjadi karna dalam tahun 2019 belum ada perbaikan mesin yang cukup berarti jadi penyerapan anggaran tidak semuanya terserap hal ini terjadi karna dalam tahun 2019 belum ada perbaikan mesin yang cukup berarti jadi penyerapan anggaran tidak semuanya terserap.

Adapun beberapa kegiatan penunjang indikator Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA) diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Identitas Pegawai dengan *output* Terlaksananya pemberian identitas pegawai sebanyak 150 Identitas Pegawai dengan capaian persentasi pagu anggaran 98,24%;
2. Pengelolaan LHKPN dengan *output* Terlaksananya Jumlah peserta asistensi pengisian LHKP sebanyak 63 Orang dengan capaian persentasi pagu anggaran 98%;
3. Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya dengan *output* Terlaksananya Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya sebanyak 300 Medali dengan capaian persentasi pagu anggaran 96,55%;

Adapun beberapa kegiatan yang penyerapan pagu anggarannya masih belum optimal diantaranya sebagai berikut :

1. Pengambilan Sumpah dan Janji PNS;
Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya dan meningkatnya status CPNS menjadi PNS, dengan target RPJMD 250 Aparatur dan realisasi 0 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 0,- dari target Rp. 21,629,500,- dengan persentasi capaian anggaran 0%, hal ini disebabkan tidak adanya aparatur yang berubah statusnya dari Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Persiapan dan Pelaksanaan CASND Kota Cilegon Tahun 2019;
Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya persiapan dan pelaksanaan CPNSD umum dan honorer kota Cilegon tahun 2019, dengan target RPJMD 300 CPNS,600 PPPK dan realisasi 0 CPNS,PPPK. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 538,010,842,- dari target Rp. 1,300,210,000,- dengan persentasi capaian anggaran 41,38%, hal ini disebabkan kebijakan pusat yang mengatur terkait dengan pelaksanaan tes yang berlangsung dipindahkan untuk tahun berikutnya;
3. Sosialisasi Penyusunan Bezzeting dan Formasi;
Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya sosialisasi penyusunan bezzeting dan formasi, dengan target RPJMD 150 Pengelola Kepegawaian dan realisasi 0 Pengelola Kepegawaian. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 0,- dari target Rp. 0,- dengan persentasi capaian anggaran 0%, hal ini disebabkan di alihkan terhadap kegiatan yang lain;
4. Bantuan Tugas Belajar dan Bantuan Pendidikan S1, S2 dan S3;
Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya bantuan tugas belajar dan bantuan pendidikan S1, S2 dan S3, dengan target RPJMD 21 Orang dan realisasi 21 Orang. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 91,199,200,- dari target Rp. 151,961,500,- dengan persentasi capaian anggaran 60,01%, hal ini dilihat dari usulan penerima dari bantuan tugas belajar yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan;

5. Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Kehadiran Pegawai;

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya rekonsiliasi dan pencocokan data kehadiran pegawai, dengan target RPJMD 12 Bulan dan realisasi 12 Bulan. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 0,- dari target Rp. 0,- dengan persentasi capaian anggaran 0%, hal ini disebabkan pengalihan anggaran terhadap kegiatan yang lain;

6. Rekonsiliasi Data Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai;

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengelolaan database kepegawaian Non PNS, dengan target RPJMD 1 Aplikasi dan Dokumen dan realisasi 1 Aplikasi dan Dokumen. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 39,375,000,- dari target Rp. 51,085,880,- dengan persentasi capaian anggaran 77,08%, disebabkan karena ada beberapa kode rekening yang tidak terserap dengan maksimal;

7. Manajemen Aplikasi Absensi Finger Print.

Output dari kegiatan ini adalah Tertata dan Tersimpannya Data Absensi Mesin Fingerprint Pegawai Dengan Baik, dengan target RPJMD 40 OPD dan realisasi 40 OPD. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 16,000,000,- dari target Rp. 23,000,000,- dengan persentasi capaian anggaran 69,57%, hal ini disebabkan %, hal ini terjadi karna dalam tahun 2019 belum ada perbaikan mesin yang cukup berarti jadi penyerapan anggaran tidak semuanya terserap.

A.2 Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara (BKPP)

Tabel 3.4.5b

Target dan Realisasi Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara						1.310,01	1.143,69	87,30%
	Proporsi jumlah jabatan struktural yang sesuai dengan kompetensi aparatur	%	95	100	105,26%			
	Tingkat penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi	%	85	87	102,35%			
	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	97	97%			
Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Terkelolanya administrasi kenaikan gaji berkala pegawai	SK	1.350	1.350	100,00%	0,69	0,69	100,00%
Peningkatan Administrasi Kepegawaian (KP PNS)	Terkelolanya pelayanan proses kenaikan pangkat PNS tepat waktu	SK	1.500	1.500	100,00%	196,72	194,37	98,81%
Penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS	Terkelolanya penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu	SK	1.500	1.500	100,00%	9,34	8,02	85,82%
Pembinaan Jabatan Fungsional tertentu	Terlaksananya pembinaan jabatan fungsional tertentu	PNS	100	100	100,00%	68,66	67,63	98,49%

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jabatan Fungsional	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan jabatan fungsional	PNS	100	100	100,00%	65,86	65,26	99,09%
Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Terlaksananya ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	orang	75	75	100,00%	18,64	18,64	100,00%
Peningkatan Karir Aparatur Berdasarkan Kompetensi (BAPERJAKAT)	Terisinya jabatan struktural sesuai dengan kompetensi	kegiatan	4	3	83,79%	218,43	164,09	75,12%
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Terpilainya jabatan pimpinan tinggi dan pelaksanaan pansel untuk JPT: 11 kegiatan	jabatan	6	6	100,00%	661,45	604,43	91,38%
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional	Terisinya jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi	kegiatan	6	2	33,31%	70,23	20,57	29,28%

Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara adalah program yang bertanggung jawab terhadap analisis dan verifikasi dalam hal kepangkatan, Mutasi, rotasi dan promosi pegawai serta berperan penting dalam pengembangan karir aparatur.

Seluruh Indikator yang menjadi tolak ukur pencapaian selama Tahun Anggaran mampu tercapai dengan baik. Adapun program ini terlihat dalam 3 Indikator yaitu Proporsi Jumlah jabatan struktural yang sesuai dengan kompetensi aparatur, tingkat penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi, Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian.

Indikator yang menggambarkan keberhasilan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam mengupayakan Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara pada tahun 2019:

1. Proporsi jabatan ASN yang sesuai standar kompetensi dengan capaian realisasi 100% dari target RPJMD 95%, hal ini melebihi dari target yang ditetapkan karena faktor sistem teknologi yang digunakan yaitu penggunaan aplikasi e-baperjakat yang mampu membantu dalam penempatan jabatan ASN dalam struktur organisasi berdasarkan kompetensinya. Capaian ini terukur melalui jumlah penempatan pejabat struktural berbanding dengan jumlah Proporsi jabatan yang harus diisi;
2. Tingkat penempatan SDM ASN sesuai formasi dan kompetensi dengan capaian realisasi 87% dari target RPJMD 85%, faktor peningkatan indikator ini diantaranya mulai dari sistem rekrutmen yang mewajibkan kesesuaian formasi dengan kompetensinya baik secara background pendidikan maupun pengalaman yang dimiliki selain itu dalam penempatan SDM saat ini sudah dirintis sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Capaian ini terukur melalui

jumlah aparatur yang sesuai dengan komptensinya berbanding dengan kebutuhan ASN di OPD;

3. Cakupan pelayanan mutasi dan promosi kepegawaian dengan capaian realisasi 97% dari target RPJMD 100%, hal ini diakibat peralihan sistem ujian yang akan beralih ke sistem CAT (Computer Assisted Test). Capaian ini terukur melalui jumlah realisasi pelayanan terhadap jumlah pelayanan yang diterima.

Keberhasilan tersebut didukung dengan beberapa kegiatan penunjang sehingga indikator Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara tersebut dapat tercapai dari target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, adapun alokasi pagu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1,310,008,500,- dengan capaian serapan pagu anggaran Rp. 1,143,686,111,- dan capaian persentasi 87,30% dimana serapan pagu anggaran pada program ini dapat terrealisasi secara cukup optimal.

Adapun beberapa kegiatan penunjang indikator Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan Administrasi Kepegawaian (KP PNS) dengan *output* Terkelolanya pelayanan proses kenaikan pangkat PNS tepat waktu sebanyak 1.500 SK dengan capaian persentasi pagu anggaran 98,81%;
2. Pembinaan Jabatan Fungsional tertentu dengan *output* Terlaksananya pembinaan jabatan fungsional tertentu sebanyak 100 PNS dengan capaian persentasi pagu anggaran 98,49%;
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jabatan Fungsional dengan *output* Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan jabatan fungsional sebanyak 100 PNS dengan capaian persentasi pagu anggaran 99,09%;
4. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dengan *output* Terlaksananya ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah sebanyak 75 Orang dengan capaian persentasi pagu anggaran 100%;
5. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan *output* Terpilihnya jabatan pimpinan tinggi dan pelaksanaan pansel untuk JPT: 11 kegiatan sebanyak 6 Jabatan dengan capaian persentasi pagu anggaran 91,38%.

Adapun beberapa kegiatan yang penyerapan pagu anggarannya masih belum optimal diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan Karir Aparatur Berdasarkan Kompetensi (BAPERJAKAT);
Output dari kegiatan ini adalah Terisinya jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan kompetensi, dengan target RPJMD 2 Kegiatan dan realisasi 2 Kegiatan. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 164,089,500,- dari target Rp. 218,426,000,- dengan persentasi capaian anggaran 75,12%, hal ini disebabkan terdapat kode rekening yang tidak terserap dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di akhir tahun anggaran;

2. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional.

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional, dengan target RPJMD 6 Kegiatan dan realisasi 3 Kegiatan. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 20,565,000,- dari target Rp. 70,230,000,- dengan persentasi capaian anggaran 29,28%, hal ini disebabkan proses rekomendasi jabatan fungsional yang diusulkan ke instansi Pembina masih dalam proses penetapan;

A.3 Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN (Sekretariat KORPRI)

Tabel 3.4.5c

Target dan Realisasi Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN
Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN						1.186,36	1.093,08	92,14%
	Prosentase purna ASN yang telah mendapatkan pembekalan	%	100	70	69,57%			
	Prosentase ASN yang memahami kode etik KORPRI	%	100	115	115%			
	Prosentase kasus terkait ASN yang difasilitasi	%	100	80	80,01%			
Peringatan Hari Kesadaran Nasional	terlaksananya upacara kesadaran nasional dan pengajian rutin	kali/kegiatan	8	7	87,50%	137,55	115,47	83,95%
Penyelenggaraan Rapat Kerja KORPRI Kota Cilegon	Terlaksananya penyelenggaraan rapat kerja anggota korpri	peserta	65	65	100,00%	8,03	8,03	100,00%
Penyelenggaraan HUT Korpri Kota Cilegon	Terlaksananya penyelenggaraan HUT Korpri Kota Cilegon	jenis/kegiatan	5	5	100,00%	280,00	276,65	98,80%
Pelatihan kewirausahaan bagi anggota korpri pra purnabhakti	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi anggota korpri pra purnabhakti	keg	2	2	100,00%	357,93	332,27	92,83%
Bantuan Hukum dan Konsultasi Bagi Anggota KORPRI	Terlaksananya bantuan hukum dan konsultasi bagi anggota korpri	tahun	1	1	100,00%	194,20	155,37	80,01%
Pembinaan Kode Etik jiwa Korsa	Terlaksananya pembinaan kode etik dan jiwa korsas	peserta	1.600	1.600	100,00%	208,65	205,30	98,39%

bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karir dan kesejahteraan pegawai Kota Cilegon yang berbasis standar kinerja dimana program ini mempunyai sasaran meningkatkan sistem pengembangan dan kesejahteraan pegawai melalui sistem reward and punishment, terwujudnya pola pengembangan dan pembinaan pegawai melalui sistem standar kinerja, sesuai dengan Peraturan Walikota, dibentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Cilegon. kedudukan, tugas pokok dan Sekretariat Dewan pengurus korpri Kota Cilegon merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah



(SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada dewan pengurus korpri Kota Cilegon dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Walikota;

Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya Pegawai ASN yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, Pegawai ASN dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.

Adapun capaian indikator yang menggambarkan keberhasilan Sekretariat KORPRI Kota Cilegon dalam mengupayakan Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN pada tahun 2019:

Ketercapaian Indikator :

1. Prosentase purna ASN yang telah mendapatkan pembekalan dengan capaian realisasi 69,57% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti pembekalan terhadap jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada mengikuti diklat, bintek dan workshop terhadap jumlah yang telah ditetapkan;
2. Prosentase ASN yang memahami kode etik KORPRI dengan capaian realisasi 115% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bintek dan workshop terhadap jumlah yang telah ditetapkan;
3. Prosentase kasus terkait ASN yang difasilitasi dengan capaian realisasi 80,01% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bintek dan workshop terhadap jumlah yang telah ditetapkan.

Keberhasilan tersebut didukung dengan beberapa kegiatan penunjang sehingga indikator Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN tersebut dapat tercapai dari target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, adapun alokasi pagu pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.186.360.000,- dengan capaian serapan pagu anggaran Rp. 1.093.077.706,- dan capaian persentasi 92,14% dimana serapan pagu anggaran pada program ini dapat terrealisasi secara optimal.

Adapun beberapa kegiatan penunjang indikator Program Diklat Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara diantaranya sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Rapat Kerja Korpri Kota Cilegon dengan *output* Terlaksananya penyelenggaraan rapat kerja anggota korpri sebanyak 65 Peserta dengan capaian persentasi pagu anggaran 100%;
2. Penyelenggaraan HUT Korpri dengan *output* Terlaksananya penyelenggaraan HUT Korpri Kota Cilegon sebanyak 5 Jenis/Kegiatan dengan capaian persentasi pagu anggaran 98,80%;
3. Pelatihan Kewirausahaan bagi anggota Korpri Pra Purnabhakti dengan *output* Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi anggota korpri pra purnabhakti sebanyak 2 Kegiatan dengan capaian persentasi pagu anggaran 92,83%;

4. Pembinaan Kode Etik Jiwa Korsa dengan *output* Terlaksananya pembinaan kode etik dan jiwa korsa sebanyak 1.600 Peserta dengan capaian persentasi pagu anggaran 98,39%.

Adapun beberapa kegiatan yang capaian serapan anggarannya masih belum optimal diantaranya sebagai berikut :

1. Peringatan Hari kesadaran Nasional

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya upacara kesadaran nasional dan pengajian rutin, dengan target RPJMD 8 Kali/Kegiatan dan realisasi 7 Kali/Bulan. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 115,470,000,- dari target Rp. 137,550,000,- dengan persentasi capaian anggaran 83,95%, hal ini disebabkan karena satu kali pelaksanaan tidak dilaksanakan dikarenakan berbarengan dengan peringatan hari besar nasional serta Hari HUT Kota Cilegon;

2. Bantuan Hukum dan Konsultasi Bagi Anggota Korpri.

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya bantuan hukum dan konsultasi bagi anggota korpri, dengan target RPJMD 1 Tahun dan realisasi 1 Tahun. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 155,370,406,- dari target Rp. 194,200,000,- dengan persentasi capaian anggaran 73,15%, hal ini disebabkan tidak adanya kasus yang menyangkut hukum bagi ASN Kota Cilegon sehingga tidak diperlukan pendampingan.

A.4 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (BKPP dan Sekretariat KORPRI)

Tabel 3.4.5d

Target dan Realisasi Program Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (BKPP dan Sekretariat KORPRI)

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (BKPP)						2.099,74	1.962,75	93,48%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	100	100%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	90	90	100%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	95	99	104%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	75	88	117%			
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Sekretariat KORPRI)						785,53	771,05	98,16%
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	%	100	70	70%			
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	96,97	97%			
	Tingkat disiplin aparatur	%	100	80	80%			
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	%	100	46,97	47%			

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**B.1 Permasalahan****BKPP**

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan masih terdapat Permasalahan, setelah melakukan Identifikasi yang mendalam terdapat beberapa hal yang menjadi *Strategic Issued* dalam BKPP adalah sebagai berikut :

1. Tidak konsistennya kebijakan program Pemerintah Pusat yang dinilai sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah Daerah;
2. Dinamika perubahan mekanisme Pelayanan Administrasi Kepegawaian berbasis Teknologi informasi;
3. Belum disesuaikannya pemberian *Reward* dan *Punishment* pegawai dengan Sistem Tunjangan Kinerja;

Sekretariat KORPRI

1. Masih kurangnya kesadaran ASN yang hadir dalam Upacara Kesadaran Nasional;
2. Masih adanya ASN yang belum mengetahui bahwa Sekretariat Korpri sudah adanya LKBH (lembaga konsultasi bantuan hukum Korpri);
3. Masih kurangnya tenaga operator yang berstatus ASN untuk membantu dalam administrasi serta dalam pelaksana kegiatan.

B.2 Solusi**BKPP**

Dari Permasalahan yang muncul ada beberapa solusi yang bisa di ambil dalam mengatasinya, diantaranya sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi dan konsultasi dengan beberapa instansi vertikal, baik skala nasional maupun Provinsi, seperti BKN, MENPAN RB dan Pemerintah Provinsi Banten;
2. Perlunya sosialisasi terkait teknologi informasi dalam pelayanan, seperti KGB Online;
3. Perlunya koordinasi dengan Bidang LITBANG pada Bappeda terkait dengan kajian *Reward and Punishment*;

Sekretariat KORPRI

1. Perlunya koordinasi melalui BKPP setiap adanya acara Upacara Kesadaran Nasional diadakan Finger Print;
2. Perlunya sosialisasi terkait adanya LKBH (lembaga konsultasi bantuan hukum Korpri);
3. Perlunya koordinasi terkait permohonan tenaga operator melalui BKPP.

3.4.6 Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Diklat Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara (BKPP)

Tabel 3.4.6

Target dan Realisasi Program Diklat Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Diklat Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara						5.756,70	5.021,92	87,24%
	Prosentase Pelaksanaan Diklat Bimtek, Workshop, sosialisasi bagi ASN untuk meningkatkan kompetensinya	%	100	101	100,71%			
	Rasio keikutsertaan aparatur dalam diklat struktural	%	90	99	109,67%			
	Rasio keikutsertaan aparatur dalam evaluasi dan pengembangan kompetensi	%	90	99	109,80%			
Pengiriman Diklatpim Tingkat II	Terlaksananya pengiriman Diklatpim Tk.II	aparatur	3	3	93,04%	147,75	137,47	93,04%
Pengiriman Diklat Pim Tingkat III	Terlaksananya pengiriman diklatpim Tk.III	aparatur	11	11	100,00%	335,75	333,68	99,38%
Pengiriman Diklat Pim Tingkat IV	Terlaksananya pengiriman diklatpim Tk.IV	aparatur	24	24	100,00%	804,17	667,24	82,97%
Pengiriman Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Tertentu	Terlaksananya pengiriman diklat penjenjangan jabatan fungsional tertentu	aparatur	20	15	75,59%	193,75	146,45	75,59%
Pengiriman Aparatur dalam Bimtek, Diklat, Workshop dll	Terlaksananya pengiriman aparatur dalam bimtek, diklat, workshop dll	aparatur	70	70	99,62%	608,45	574,57	94,43%
Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	Terlaksananya pengiriman aparatur dalam diklat penyusunan laporan keuangan berbasis akrual	aparatur	30	26	88,06%	203,50	179,20	88,06%
Diklat Manajemen PUSKESMAS	Terlaksananya pengiriman aparatur dalam diklat manajemen PUSKESMAS	aparatur	24	24	99,97%	183,50	172,53	94,02%
Diklat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya pengiriman aparatur dalam diklat pengelolaan keuangan dan aset daerah	aparatur	30	30	100,00%	203,50	193,33	95,00%
Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya pengiriman aparatur dalam diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa	aparatur	30	29	97,12%	208,50	200,02	95,93%
Diklat Manajemen ASN	Terlaksananya pengiriman aparatur dalam diklat manajemen ASN	aparatur	30	30	99,60%	203,50	202,63	99,57%
Pengiriman Aparatur dalam Seminar, Magang dan Kursus	Terlaksananya pengiriman aparatur dalam seminar dan magang di OPD lingkungan pemerintah kota Cilegon	aparatur	10	6	58,09%	25,70	14,93	58,09%
Tes Kompetensi Jabatan	Tersedianya calon pejabat yang berkompeten dan tersedianya database jabatan	Pejabat Esselon II	29	13	45,21%	285,44	129,05	45,21%
Pengiriman Latsar CPNS	Terlaksananya pengiriman diklat prajabatan	%	100	100	100,00%	2.353,20	2.070,85	88,00%

Program Diklat Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara mempunyai peranan penting untuk menciptakan aparatur yang kompeten melalui penyelenggaraan diklat-diklat seperti diklat struktural, penjenjangan, assessment, diklat tekni, bintek, workshop, seminar, magang dan diklat-diklat lainnya.

Dalam pencapaian keberhasilan dilihat dari indikator-indikator sasaran, diantaranya prosentase pelaksanaan diklat, bintek, workshop, dan sosialisasi bagi ASN untuk kompetensinya, Rasio keikutsertaan aparatur dalam diklat struktural, Rasio keikutsertaan aparatur dalam evaluasi dan pengembangan kompetensi.

Adapun capaian indikator yang menggambarkan keberhasilan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam mengupayakan Program Diklat Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada tahun 2019:

1. Prosentase pelaksanaan diklat, bintek, workshop dan sosialisasi bagi ASN untuk meningkatkan kompetensinya dengan capaian realisasi 100,71% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bintek dan workshop terhadap jumlah yang telah ditetapkan;
2. Rasio keikutsertaan aparatur dalam diklat struktural dengan capaian realisasi 98,70% dari target RPJMD 90%, capaian ini terukur melalui pengiriman aparatur yang mengikuti diklat struktural mulai dari tingkat II, III dan IV terhadap jumlah pengiriman yang telah ditetapkan;
3. Rasio keikutsertaan aparatur dalam evaluasi dan pengembangan kompetensi dengan capaian realisasi 98,82% dari target RPJMD 90%, capaian terukur dari perbandingan antara jumlah aparatur yang mengikuti assessment terhadap jumlah yang telah ditetapkan.

Keberhasilan tersebut didukung dengan beberapa kegiatan penunjang sehingga indikator Program Diklat Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara tersebut dapat tercapai dari target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, adapun alokasi pagu pada tahun 2019 sebesar Rp. 5,756,700,000,- dengan capaian serapan pagu anggaran Rp. 5,021,918,932,- dan capaian persentasi 87,24% dimana serapan pagu anggaran pada program ini dapat terrealisasi secara cukup optimal.

Adapun beberapa kegiatan penunjang indikator Program Diklat Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara diantaranya sebagai berikut :

1. Pengiriman Diklatpim Tk.II dengan *output* Terlaksananya pengiriman diklatpim Tk.II sebanyak 3 Aparatur dengan capaian persentasi pagu anggaran 93,04%;
2. Pengiriman Diklat Pim Tingkat III dengan *output* Terlaksananya pengiriman diklatpim Tk.III sebanyak 11 Aparatur dengan capaian persentasi pagu anggaran 99,38%;
3. Pengiriman Diklat Pim Tingkat IV dengan *output* Terlaksananya pengiriman diklatpim Tk.IV sebanyak 24 Aparatur dengan capaian persentasi pagu anggaran 82,97%;
4. Pengiriman Aparatur dalam Bintek, Diklat, Workshop dll dengan *output* Terlaksananya pengiriman aparatur dalam bintek, diklat, workshop dll sebanyak 70 Aparatur dengan capaian persentasi pagu anggaran 94,43%;

5. Diklat Manajemen ASN dengan *output* Terlaksananya pengiriman aparatur dalam diklat manajemen ASN sebanyak 30 Aparatur dengan capaian persentasi pagu anggaran 99,57%.

Adapun beberapa kegiatan yang penyerapan pagu anggarannya masih belum optimal diantaranya sebagai berikut :

1. Pengiriman Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Tertentu;
Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengiriman diklat penjenjangan jabatan fungsional tertentu, dengan target RPJMD 20 Aparatur dan realisasi 20 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 146,449,101,- dari target Rp. 193,750,000,- dengan persentasi capaian anggaran 75,59%, hal ini disebabkan nilai satuan uang saku perorang yang dibayarkan lebih rendah dari yang ditetapkan, dikarenakan perbedaan golongan;
2. Pengiriman Aparatur Dalam Seminar dan Magang;
Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengiriman aparatur dalam seminar dan magang di OPD lingkungan pemerintah kota Cilegon, dengan target RPJMD 10 Aparatur dan realisasi 10 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 14,928,000,- dari target Rp. 25,700,000,- dengan persentasi capaian anggaran 58,09%, hal ini disesuaikan dengan penyesuaian harga perorang dalam mengikuti seminar yang lebih rendah dari yang ditetapkan;
3. Penilaian Kompetensi / Assesment Kompetensi Untuk Penempatan Dalam Jabatan;
Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya calon pejabat yang berkompeten dan tersedianya database jabatan, dengan target RPJMD 29 Aparatur dan realisasi 28 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp. 129,049,773,- dari target Rp. 285,435,000,- dengan persentasi capaian anggaran 45,21%, hal in disebabkan oleh perubahan objek yang di assesment yang awalnya direncanakan untuk eselon III dan IV, namun karna terdapat perubahan kebijakan dari pusat yang mensyaratkan untuk eselon II di Assesment sebelum dilakukan mutasi.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Kualitas SDM ASN harus sesuai dengan Dinamika Perubahan lingkungan Pelayanan dan Peraturan Perundang-undangan.

B.2 Solusi

1. Perlunya pengembangan dan peningkatan kualitas ASN melalui Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis.

3.4.7 Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A.1 Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Tabel 3.4.7

Target dan Realisasi Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019

Program / Kegiatan	Indikator Program / Output	Satuan	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah						1.650,00	1.633,85	99,02%
	Persentase cakupan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah (litbang)	%	80	80	100,00%			
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti (litbang)	%	50	50	100,00%			
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	2	2	100,00%	600,00	597,74	99,62%
	Tersedianya Policy Brief	policy brief	4	4	100,00%			
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Tersedianya Dokumen penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan	Dokumen	2	2	100,00%	450,00	446,23	99,16%
	Tersedianya Policy Brief	policy brief	4	4	100,00%			
	Terlaksananya Seminar Diseminasi Subid Sosial Budaya dan Pemerintahan	keg	1	1	100,00%			
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Dokumen	2	2	100,00%	450,00	448,88	99,75%
	Tersedianya Policy Brief	policy brief	4	4	100,00%			
	Terselenggaranya fasilitasi Laboratorium Inovasi	keg	1	1	100,00%			
	Terselenggaranya Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik	keg	1	1	100,00%			
Analisa Investasi Daerah (DID)	Tersedianya dokumen analisis Investasi Daerah	dok	1	1	100,00%	150,00	141,00	94,00%

Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari upaya Bappeda Kota Cilegon dalam Meningkatkan inovasi daerah melalui penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan lembaga penelitian atau instansi lainnya. Indikator keberhasilan dari Program Penelitian Pengembangan

Kebijakan Pembangunan Daerah dapat dilihat dari capaian beberapa indikator berikut:

1. Persentase Cakupan Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah. Capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini ditandai oleh cakupan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah mencapai 80%.
2. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti. Capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini ditandai dengan tindaklanjut hasil penelitian dalam mendukung pembangunan daerah mencapai 50%.

Seluruh kegiatan pada Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah memiliki ketercapaian output kegiatan sebesar 100 % dengan serapan belanja mencapai 99.02%. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan salah satunya adalah untuk mendukung pencapaian indikator program tersebut di atas.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan

1. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Cilegon. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya pemahaman pentingnya SIDa di Kota Cilegon, khususnya di OPD-OPD Pemerintah Kota Cilegon.
2. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain adalah hasil-hasil penelitian masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

B.2 Solusi

1. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Cilegon. Adapun solusi dan tindak lanjut yang direncanakan adalah pada Tahun Anggaran 2020 akan dilaksanakan sinkronisasi Dokumen Penguatan SIDa dengan RPJMD Teknokratik Kota Cilegon, Monev pelaksanaan Penguatan SIDa Kota Cilegon, serta Diseminasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan narasumber dari pusat, provinsi, dan atau daerah lain sebagai best practice; sehingga diharapkan akan ada penguatan kapasitas SDM dalam pemahaman dan penerapan SIDa serta fasilitasi dan koordinasi Penguatan SIDa Kota Cilegon (TKK, Tim Pokja, dan Sekretariat).
2. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga. Adapun solusi dan tindak lanjut yang direncanakan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian, beserta publikasi dan sosialisasi (termasuk hasil kelitbangan dari luar Pemerintah Kota Cilegon).

3.5 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP CAPAIAN LKPI TAHUN 2019

3.5.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan artinya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, tanggap, murah dan akurat melalui aplikasi teknologi informasi (IT) yang berbasis komputer (elektronik) dan penyampaian informasi kepada wajib pajak dengan aplikasi berbasis jaringan web, smartphone android, dan menggunakan sistem aplikasi penyampaian SPTPD secara online melalui aplikasi E-SPTPD dan pembayaran on-line, serta SMS billing yang berfungsi untuk mengetahui informasi tagihan PBS melalui short message service (SMS).

Tindak Lanjut:

BPKAD Kota Cilegon dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, telah menyiapkan pelaporan pajak secara elektronik sehingga mengurangi tingkat bertemu langsung antara fiskus dengan wajib pajak. saat ini kami telah menyediakan media untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, yaitu pelaporan Pajak Daerah secara elektronik (e sptpd), demi terus meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, pada tahun 2019 kami telah meluncurkan aplikasi pelaporan BPHTB secara online (SIMBOCIL) yang akan memudahkan PPAT/PPATS untuk mendaftar, melaporkan dan memvalidasi secara elektronik dan kedepannya Kami akan meluncurkan e sppt. Untuk pembayaran online khusus untuk PBB-P2 dapat dilakukan melalui gerai Indomaret dan Online shop sedangkan untuk informasi tagihan PBB-P2 dapat dilakukan melalui web maupun Layanan Pesan Singkat (SMS)

- 2) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur, melalui pelatihan maupun bimbingan teknis tentang pengelolaan pendapatan daerah

Tindak Lanjut:

BPKAD Kota Cilegon dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur. Kami telah mengirimkan petugas pajak untuk diklat terkait pemeriksaan Pajak Daerah pada Politeknik Keuangan Negara STAN.

- 3) Peningkatan tertib administrasi pemungutan pajak dan meninjau kembali PERDA dan peraturan walikota tentang pendapatan daerah yang tidak produktif. Serta penyusunan sistem dan prosedur

pengelolaan pajak daerah yang dibakukan dalam standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2008

Tindak Lanjut:

BPKAD Kota Cilegon dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemungutan pajak daerah. Kami akan melakukan perubahan peraturan-peraturan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah dan akan diselaraskan dengan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, serta sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah telah dibakukan dalam standar ISO yaitu ISO 9001:2015.

4) Optimalisasi hasil usaha badan usaha milik daerah

Tindak Lanjut:

1. Sejak 2019, Pemerintah Kota Cilegon melalui Bagian Perekonomian & Pembangunan pada Sekretariat Daerah secara rutin telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD, baik monitoring kinerja maupun monitoring penerapan Good Corporate Governance.
 2. Pemerintah Kota Cilegon sudah menyusun juknis, yang akan diperkuat payung hukum regulasi Peraturan Walikota yang mengatur tentang Renbis/RKAP, Indikator, Monitoring, Evaluasi Penilaian dan Pelaporan Kinerja BUMD Milik Pemerintah Kota Cilegon.
 3. Di Tahun 2020, Pemerintah Kota Cilegon akan menginisiasi pola perjanjian kinerja tahunan antara Direksi BUMD dengan Walikota Cilegon setiap tahunnya yang memuat sanksi apabila kinerja BUMD tidak mencapai target yang dicanangkan.
- 5) Perluasan obyek dan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah melalui sosialisasi, dan peningkatan pengawasan

Tindak Lanjut:

BPKAD Kota Cilegon dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak daerah serta peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak daerah. Kami telah melakukan pemutakhiran data (up dating) wajib pajak secara periodik dan berkala. Untuk PBB-P2, Kami telah memutakhirkan data Objek dan Subjek PBB-P2 seluruh wilayah Kota Cilegon melalui Penilaian Massal dan untuk objek-objek pajak tertentu dilakukan melalui penilaian individual objek PBB serta melakukan pelayanan PBB keliling yang dilakukan oleh UPT Pajak Daerah. Untuk peningkatan

kesadaran dan ketaatan wajib pajak, Kami telah melakukan pengendalian dan pengawasan pajak daerah baik secara tertib administrasi melalui pengendalian langsung ke wajib pajak daerah maupun melalui pemasangan alat perekam data transaksi yang dipasang pada wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir yang terkoneksi pada sistem monitoring yang ada di BPKAD Kota Cilegon. Pengawasan juga dilakukan melalui pemeriksaan pajak daerah. Demi meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak daerah, Kami melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung pada wajib pajak daerah dilakukan oleh UPT Pajak Daerah, sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media cetak maupun elektronik demi meningkatkan kesadaran dari masyarakat atau pelaku usaha dan juga melakukan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya penerimaan retribusi daerah terhadap pembangunan Kota Cilegon serta melakukan kajian untuk melakukan evaluasi atau revisi atas Peraturan daerah dan Peraturan Walikota.

3.5.2 Penyelenggaraan Urusan Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Penanggulangan **angka kemiskinan**, DPRD meminta kepada walikota Cilegon beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membuat program dan kegiatan untuk mengatasi masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan sistematis, meskipun persentase kemiskinan di kota Cilegon mengalami penurunan. Namun untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut data (RTS) rumah tangga sasaran agar diperbaiki kembali, dikarenakan masih ditemukan adanya salah sasaran, dan selain itu pula dibutuhkan anggaran yang cukup memadai untuk mengangkat perekonomian mereka bukan hanya sekedar memberikan bantuan

Tindak Lanjut:

Terkait Pembaruan Data RTS, pada Tahun 2019 Dinas Sosial telah melakukan Perubahan data RTS dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Untuk data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dapat diusulkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. pada tahun 2019 sudah melakukan verifikasi dan validasi data melalui kegiatan Penyusunan Data sektoral Bidang Kesejahteraan Sosial dengan output kegiatan 1 data PBI, 1 data PMKS

dan data Fakir Miskin. selain itu juga verifikasi dan validasi sudah dilakukan melalui SIKS-NG berbasis android dengan harapan keakuratan bisa dilihat secara visual

Selain program bantuan Dinas Sosial sudah melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemandirian bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui pembinaan keterampilan dasar, pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pada Tahun 2020 melalui Dinas Sosial telah menganggarkan dalam menyelesaikan Penanggulangan angka kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi Produktif

Terkait dengan upaya mengangkat perekonomian RTS, rangkaian program pengentasan kemiskinan Kota Cilegon selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dalam setiap penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang juga tertuang dalam Dokumen RPJMD 2016-2021.

Strategi, arah kebijakan dan pendekatan pengentasan kemiskinan di Kota Cilegon dilakukan melalui berbagai sektor dan stakeholder, beberapa diantaranya yaitu perluasan dan pengembangan usaha mikro bagi masyarakat (diutamakan) RTS oleh Dinas Koperasi dan UMK, melalui pelaksanaan kegiatan : Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Keterampilan CWUB di tahun anggaran 2019 dan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Keterampilan CWUB di 2020.

- 2) Sebagai upaya pengurangan pengangguran, tingginya angka pengangguran di kota Cilegon masih memerlukan penajaman program-program yang jelas dan terukur seperti: Perlunya dibuat MOU antara pemerintah daerah dengan pihak industri atau calon investor terkait dengan kuota jumlah tenaga kerja lokal yang lebih banyak, dan bila perlu dituangkan di dalam PERDA

Tindak Lanjut:

Yang dilakukan oleh disnaker kota cilegon adalah mensosialisasikan pada perusahaan untuk menjalankan aturan tentang wajib lapor lowongan yang didalamnya terkait dengan mekanisme penempatan tenaga kerja yaitu perusahaan melaporkan lowongan dan disiapkan data pencari kerja dari database disnaker, namun dari tindak lanjut tersebut terdapat permasalahan antara lain Terkait dengan MOU antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Industri belum ada dan terkait

prosentase tenaga kerja lokal tidak dapat dituangkan dalam Perda karena bertentangan dengan UU 13 tentang Ketenagakerjaan, solusi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon terkait permasalahan tersebut yaitu: Setiap Rekrutmen, Disnaker selalu mendahulukan data warga lokal untuk dikirim ke perusahaan; Mengajukan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan dunia industri; dan akan terus disosialisasikan ke perusahaan agar menjalankan aturan wajib lapor lowongan

- 3) Mendorong kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing.

Tindak Lanjut:

Pada Tahun 2019 upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar mampu bersaing di Dunia Industri yaitu dengan melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan berbasis kewirausahaan mandiri dan pelatihan berbasis kompetensi yang diakhiri dengan uji kompetensi bersertifikasi profesi diantaranya sertifikasi lisensi Kemenaker dan sertifikasi BNSP. Jenis pelatihan yang dilaksanakan diantaranya:

Pelatihan Menjahit; Pelatihan Security; Pelatihan Forklift; Pelatihan Tata Rias Pengantin; Pelatihan Alat Berat; Pelatihan Tata Rias Rambut; Pelatihan Komputer; Pelatihan Sulam Pita; Pelatihan Otomotif Mobil/Motor; Pelatihan Mc/ Public Speaking; Pelatihan Pertukangan Kayu alumunium; Pelatihan Bordir; Pelatihan Body Repair; Pelatihan Kelistrikan. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia guna mempersiapkan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing yaitu dengan melaksanakan pelatihan yang berbasis kompetensi dan berwawasan kewirausahaan mandiri. Adapun kegiatan pelatihan yang dilakukan pada tahun 2020 sama dengan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya walaupun ada beberapa jenis pelatihan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2020. Dalam melaksanakan tindak lanjut tersebut, terdapat permasalahan antara lain: Tingginya minat masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi pada kejuruan tertentu (Pelatihan Forklift) tidak sebanding dengan paket pelatihan yang tersedia, solusi yang dilaksanakan terkait permasalahan tersebut yaitu: mengajukan Program Pelatihan ke Kementrian Ketenagakerjaan melalui BBPLK Serang dan mengajukan

tambahan pake pelatihan forklift pada APBDP 2020 dan melakukan seleksi untuk menyaring pendaftar yang melebihi kuota pelatihan

- 4) Mendorong berkembangnya home industri dan mengupayakan untuk terus memberi kemudahan kepada para investor yang akan berinvestasi di kota Cilegon dengan memberikan proses perijinan yang cepat dan akuntabel sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal serta mengurangi angka pengangguran

Tindak Lanjut:

Dinas Tenaga Kerja: Dalam upaya mendorong berkembangnya Home Industri di Kota Cilegon, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon melaksanakan program/kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam bidang usaha mandiri dengan menyelenggarakan pelatihan sablon, pelatihan kerajinan acrylic, pelatihan tata boga

Pada Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam bidang usaha mandiri akan melaksanakan kegiatan pelatihan barbershop

DPMPTSP: Dalam rangka percepatan dan kemudahan pelayanan perizinan di Kota Cilegon, DPMPTSP telah melakukan pemutakhiran aplikasi SIPECI dengan menambah fitur digital signature (penandatanganan digital/elektronik). Sehingga proses perizinan tidak akan terhambat, apabila kepala dinas sedang tidak ada ditempat atau dinas luar daerah.

Dinas Koperasi dan UMK: Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha rumahan dengan memberikan kemudahan pengurusan perizinannya, akes pasar dan permodalan serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari para pelaku usaha rumahan.

- 5) Penyelenggaraan bidang ekonomi dengan mendorong usaha mikro kecil dan menengah Sebagai pendukung industri besar yang banyak terdapat di kota cilegon terutama industri makanan dan minuman, restoran serta perhotelan dan koperasi sebagai pendorong perekonomian rakyat, dengan memberikan akses modal, pasar serta pembinaan yang terus ditingkatkan. Maka peranan perusahaan-perusahaan besar untuk turut melakukan pemberdayaan bagi kelompok petani dan nelayan melalui pelatihan, pendampingan serta bantuan alat, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani dan nelayan melalui berbagai program kemitraan seperti CCSR.

Tindak Lanjut:

Dinas Koperasi dan UMK: Melaksanakan fasilitasi dengan industri terkait bantuan alat untuk usaha mikro kecil yang sudah berkembang untuk potensi ekspor. Fasilitasi kurasi terhadap produk-produk unggulan umk agar bisa mengakses pasar industri makanan dan minuman

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:

Pemberdayaan petani dan nelayan yang dilakukan pemerintah selama ini sudah berjalan walaupun keterlibatan CCSR masih sedikit sekali. Selain upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah selama ini yaitu: pelatihan, penyuluhan, pendampingan juga diperlukan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan. Jika ingin melibatkan CCSR maka perlu upaya perlindungan nelayan dan petani yang meliputi : penyediaan sarana dan prasarana dan jaminan kepastian usaha.

- 6) Peningkatan efektivitas pemantauan harga dan operasi pasar sebagai upaya menjamin ketahanan pangan di masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga pangan pokok di pasar

Tindak Lanjut:

Dinas Perdagangan dan Perindustrian: Melaksanakan Pemantauan harga setiap hari di 3 pasar melalui Sistem Harga Cilegon (SHAGON). Dengan adanya pemantauan harga kita dapat mengetahui harga barang pokok setiap hari, sehingga jika terjadi lonjakan harga dapat segera dicari penyebabnya dan segera untuk dilakukan stabilisasi harga .

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:

Penjaminan ketersediaan dan distribusi pangan sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini terutama untuk ketersediaan energi dan protein yang pada tahun 2019 mencapai 113,69% dan 113,09%. Untuk stabilitas harga pangan terutama beras sepanjang tahun 2019 menunjukkan kestabilan harga, yang ditunjukkan dengan nilai CV (coefficient variability) maksimal 5,578%.

- 7) Perbaikan kondisi fisik infrastruktur pasar tradisional untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing pasar tradisional di tengah era global sekaligus memberikan rasa nyaman dan aman bagi pedagang dan konsumen. Serta perlunya pembatasan keberadaan mall dan toko-toko besar, baik jumlah maupun jarak, untuk melindungi pedagang tradisional

Tindak Lanjut:

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam menindaklanjutinya yaitu dengan melaksanakan Pengadaan sarana prasarana penunjang pasar dan pekerjaan perawatan gedung di pasar rakyat agar memberikan rasa nyaman kepada para pedagang dan konsumen yang melakukan aktivitas didalamnya.

Serta melaksanakan Survey keberadaan toko modern/swalayan sebanyak 195 gerai dan rapat dengan delegasi resmi dari manajemen masing masing toko modern/swalayan dan manajemen pusat perbelanjaan dalam rangka pemenuhan komitmen dalam pengurusan perizinannya yang terintegrasi dengan sistem perizinan OSS

- 8) Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh petugas pelayanan kesehatan baik di tingkat Puskesmas, Poskesdes maupun RSUD mengenai pentingnya memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada masyarakat, dengan tidak membedakan antara pasien masyarakat kurang mampu dan masyarakat mampu, melalui pelatihan-pelatihan serta pengawasan yang ketat terhadap petugas pelayanan kesehatan.

Tindak Lanjut:

Dinas Kesehatan: Upaya Dinas Kesehatan dalam Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya pada UPTD Puskesmas, Poskesdes melalui peningkatan SDM khususnya bagi tenaga medis UPTD Kesehatan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan seminar, sehingga mampu memberikan pelayanan sekaligus tindakan bagi pasien, dan melaksanakan Akreditasi Puskesmas agar pembinaan peningkatan mutu dan kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program serta penetapan manajemen resiko. Adapun kegiatan Tahun 2019 adalah Melalui pendampingan Akreditasi di 8 puskesmas dan Workshop Pemahaman standar dan instrumen Akreditasi.

RSUD: Pada Tahun 2019 RSUD Kota Cilegon dalam peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yaitu dengan Pelaksanaan InHouse Training dan pelatihan-pelatihan kepada seluruh petugas pelayanan kesehatan sesuai Regulasi SOP

Pada Tahun 2020 Upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh RSUD Kota Cilegon dalam Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima kepada

masyarakat yang ramah, tulus dan ikhlas agar tugas yang diberikan dapat dirasakan oleh pasien sehingga merasa nyaman terhadap masyarakat akan terus selalu ditingkatkan melalui InHouse Training dan pelatihan-pelatihan kepada seluruh petugas medis pelayanan kesehatan dan dilakukannya survey akreditasi merupakan upaya agar terwujudnya pelayanan yang berkualitas dalam rangka perbaikan mutu peningkatan kinerja dan profesionalitas.

- 9) Mempermudah akses masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai

Tindak Lanjut:

Pada Tahun 2019 upaya dinas kesehatan dalam meningkatkan akses layanan masyarakat melalui sarana kesehatan yang memadai telah membangun

- Pembangunan Puskesmas Cilegon DTP di Kelurahan Ciwedus ± 300 meter dari jls
- Pembangunan Puskesmas Citangkil DTP di kelurahan lebak denok kecamatan citangkil ± 100 meter dari jls
- Pembangunan Puskemas Purwakarta menjadi 2 lantai sesuai Permenkes RI nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat
- Pembangunan puskesmas jombang menjadi 2 lantai sesuai Permenkes RI nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat

- 10) Peningkatan jumlah petugas kesehatan, seperti dokter dan tenaga kesehatan sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Tindak Lanjut:

Pada Tahun 2019 Jumlah tenaga dokter dan tenaga kesehatan berdasarkan Permenkes RI nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat sudah terpenuhi sesuai dengan standar minimal pelayanan

- 11) Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan berperilaku hidup bersih.

Tindak Lanjut:

Pada Tahun 2019 upaya dinas kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat menjaga lingkungan dan PHBS telah dilakukan kegiatan antara lain :

- Kegiatan program pengendalian penyakit menular ISPA



- HPISP Refresting DDHB pada kader kelurahan (40 org)
- Kegiatan program pengendalian penyakit menular bersumber binatang
 - Pertemuan sosialisasi leptospirosis pada kader (50 org).
 - Kegiatan gerakan serentak psn dbd (75 org, 8 kecamatan)
 - Peningkatan Kapasitas kader (75 org)

Pada Tahun 2020 Kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat menjaga lingkungan dan PHBS melalui kegiatan antara lain:

- Kegiatan program pengendalian penyakit menular ISPA
 - Sosialisasi hepatitis di perguruan tinggi (90 org)
- Kegiatan program pengendalian penyakit menular bersumber binatang
 - Kegiatan gerakan serentak PSN DBD (68 org, 8 kecamatan)
 - Kegiatan pemantauan gerakan PSN DBD (5 org, 8 kecamatan)
- Kegiatan program pengendalian penyakit menular TB pertemuan kampanye TB ke OPD (280 org), pelaksanaan hari TB (350 org)

- 12) Perlunya sosialisasi dan tindakan preventif dalam mencegah dan memperkecil angka kematian bagi ibu hamil dan penderita penyakit HIV atau AIDS.

Tindak Lanjut:

Pada Tahun 2019 upaya dinas kesehatan dalam mencegah angka kematian bagi ibu hamil dan penderita HIV/AIDS melalui kegiatan antara lain:

- Kegiatan program pengendalian penyakit menular HIV
 - Hari AIDS sedunia (340 org).
 - Monev pendampingan ODHA (34 org).
 - Monev duta TB-HIV (32 org).
 - Sosialisasi TB HIV di perusahaan (50 org).
 - Sosialisasi TB HIV pada kader (50 org)
 - Sosialisasi/ survay komprehensif HIV (46 org)
 - Mensosialisasikan Ante Natal Care dengan sesuai standar 10 t yang di dalamnya ada item pemeriksaan lab wajib periksa hiv aids dalam masa kehamilan sehingga terjaring adanya ibu hamil dengan HIV/AIDS. dan pelaksanaan ini berlanjut sampai 2020

- 13) Menggratiskan seluruh biaya kesehatan bagi masyarakat kota Cilegon di Puskesmas dan RSUD tanpa ada kelas.



Tindak Lanjut:

Pemerintah Kota Cilegon Melalui Perwal Cilegon Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 13 Ayat(1) Menyebutkan, Bagi Warga Masyarakat Kota Cilegon Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas dan Jaringannya Dibebaskan Dari Pungutan Retribusi Yang Dibuktikan Dengan Kartu Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Atau Kartu Keluarga (KK) Bagi Masyarakat Yang Tidak Memiliki Kartu Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

- 14) Mendorong seluruh masyarakat kota Cilegon untuk mengikuti program BPJS dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.

Tindak Lanjut:

1. Upaya Dinas Kesehatan Mendorong seluruh masyarakat Kota Cilegon untuk mengikuti program BPJS dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal terus dilakukan dengan mengacu kepada Regulasi Permendagri No.33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Pasal Lamp Hal 37 Menyebutkan Dalam Rangka Mewujudkan Universal Health Coverage, Pemerintah Daerah Melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Dengan JKN
 2. PKS (perjanjian kerjasama) antara Pemkot Cilegon dengan BPJS Kesehatan memuat tentang tugas bersama untuk sosialisasi terkait Program
 3. Sosialisasi dilakukan melalui UPTD JPKM dibawah Dinkes ke RT, RW kelurahan & kecamatan tentang BPJS Kesehatan & memohonkan masyarakat cilegon yang kurang & tidak mampu menurut peraturan yang berlaku untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari Pemerintah ke dinsos sesuai wilayah masing-masing
 4. Sosialisasi melalui Mandiri FM & Banten Radio tentang BPJS Kesehatan & Program-Programnya
 5. Sosialisasi melalui media cetak & elektronik tentang BPJS Kesehatan & Program-Programnya
 6. Sosialisasi BPJS Kesehatan & Program-Programnya melibatkan kader kesehatan & kelompok-kelompok potensial dimasyarakat
- 15) Penyelenggaraan bidang pendidikan, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di kota Cilegon, DPRD merekomendasikan: Peningkatan kesejahteraan guru dengan peningkatan pelayanan mutu

pendidikan bagi anak didik disetiap tingkatan pendidikan serta memberi kemudahan akses masyarakat untuk mengenyam pendidikan baik itu pendidikan formal maupun non formal.

Tindak Lanjut:

Tahun 2019 upaya peningkatan kesejahteraan guru dan anggaran BOSDA telah diusulkan ke pemerintah daerah Tapi belum terealisasi. Tahun 2020 telah diusulkan penambahan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, kepala sekolah, pengawas, penilik dan tenaga kependidikan serta BOSDA demi peningkatan mutu pendidikan kota cilegon. Dalam melaksanakan tindak lanjut tersebut terdapat permasalahan antara lain belum adanya payung hukum dari pemerintah daerah tentang pemberian BOSDA, solusi yang diusulkan agar tindak lanjut dapat terlaksana yaitu Dibuatkan payung hukum yang mengatur pemberian BOSDA.

- 16) DPRD meminta kepada dinas pendidikan Cilegon untuk melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi Banten agar sekolah kejuruan (SMK) dapat menyesuaikan program jurusan/kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang ada di Cilegon:

Tindak Lanjut:

Dinas Pendidikan kota Cilegon akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi Banten untuk mengusulkan pembukaan jurusan pada SMK di kota Cilegon yang link and match dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha yang ada di kota Cilegon. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut yaitu terkait Peralihan kewenangan pendidikan atas implementasi dari UU 23 Tahun 2014 solusi yang dapat dilaksanakan yaitu Dibuatkan rekomendasi pembukaan jurusan yang sesuai dengan pasar kerja yang ada di Kota Cilegon.

- 17) DPRD meminta kepada dinas pendidikan agar memperhatikan siswa/i yang berprestasi untuk diberikan program beasiswa dan jumlah anggaran untuk diperbanyak

Tindak Lanjut:

Tahun 2019 sudah dilaksanakan pemberian beasiswa untuk siswa miskin dan hadiah serta uang pembinaan bagi siswa pemenang lomba non akademik. Tahun 2020 Dinas pendidikan akan mengusulkan anggaran untuk beasiswa bagi anak berprestasi. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tindak lanjut ini yaitu terkait Mekanisme penyaluran beasiswa melalui sistem yang mengacu pada tahun anggaran sehingga sekolah agak kesulitan untuk mengusulkan karena

mengacu pada tahun ajaran. Solusi yang diusulkan dalam pelaksanaan tindak lanjut ini yaitu agar mekanisme penyaluran beasiswa dapat dilaksanakan secara non sistem

3.5.3 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang Infrastruktur, Penataan Ruang dan Permukiman

- 1) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis, prioritas dan dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang menyangkut pelayanan publik, antara lain jalan kecamatan, jalan kelurahan dan jalan lingkungan, gedung-gedung sekolah, prasarana kesehatan, terminal dan pembenahan pasar tradisional.

Tindak Lanjut:

Dinas Pendidikan: Tahun 2019 dilaksanakan Renovasi dan rehabilitasi gedung sekolah untuk memaksimalkan proses pembelajaran dan untuk kemudahan akses pelayanan pendidikan pada tahun 2020 Dinas Pendidikan akan melaksanakan pengadaan lahan SMPN 12. Dalam melaksanakan tindak lanjut ini terdapat permasalahan yaitu adanya hambatan pada pengadaan lahan SMPN 12 yang direncanakan. Solusi yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan tindak lanjut ini yaitu perlu kerja sama berbagai stakeholder agar terselenggaranya pembangunan SMPN 12 di Kota Cilegon

Dinas Tenaga Kerja: Pada Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon melalui UPTD Latihan Kerja sudah melaksanakan Program/Kegiatan Pengembangan BLK diantaranya : Pembangunan hanggar alat berat, renovasi mushola, pembangunan gapura, serta renovasi mushola guna menunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan yang ada di Dinas Tenaga Kerja

Melanjutkan Program/Kegiatan Pengembangan BLK, Pada Tahun 2020 akan dilaksanakan Renovasi Workshop Las di UPTD Latihan Kerja serta perencanaan pembangunan workshop listrik (DED) dalam pelaksanaan tindak lanjut terdapat permasalahan yaitu Untuk kegiatan pengembangan BLK (renovasi workshop las) pada tahun 2020 belum bisa dilaksanakan pada triwulan I dikarenakan belum adanya master plan kantor dinas tenaga kerja solusi yang dilaksanakan yaitu Dimunculkannya kegiatan master plan gedung kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon di APBDP 2020.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang: Program pembangunan jalan masih menjadi prioritas Dinas PUPR dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Pada tahun 2019 telah dilakukan peningkatan

jalan sebanyak 5 ruas dengan total penanganan kurang lebih 4,572km. Pemeliharaan berkala sebanyak 34 ruas sepanjang 17km, serta pemeliharaan rutin jalan sebanyak 27 ruas, dan pematangan lahan JLU sepanjang 1,5m. Selain itu Dinas PUPR juga memprioritaskan pembangunan Gedung Setda 6 lantai untuk memenuhi kebutuhan gedung dinas untuk OPD yang belum memiliki kantor. Pada tahun 2019 progres pembangunan gedung setda sudah 4 lantai, sisanya akan diselesaikan pada tahun 2021. Salah satu permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tindak lanjut ini adalah Pembangunan JLU dan pelebaran jalan terkendala dengan proses pengadaan tanah solusi yang dapat dilaksanakan yaitu untuk usulan pembangunan/pelebaran jalan yang membutuhkan pengadaan lahan diupayakan usulan pengadaan lahan dilaksanakan satu tahun sebelumnya sebelum pekerjaan fisik.

Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait pengadaan lahan dan pendekatan persuasif dengan masyarakat.

Dinas Perhubungan: Pada tahun 2018 Dishub sudah melakukan rehab Terminal Seruni dan kajian teknis terminal type C yang eksisting. Permasalahan pada pelaksanaan tindak lanjut ini yaitu Belum adanya kajian kebutuhan terminal type C sehingga solusi yang akan dilaksanakan yaitu Mengadakan kajian kebutuhan terminal type C di wilayah Kota Cilegon

Dinas Perdagangan dan Perindustrian: Semenjak tahun 2018 telah dilakukan pembangunan pasar rakyat di 3 kecamatan yaitu pasar rakyat Kecamatan Cibeer, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Citangkil. Dengan terbangunnya 3 pasar rakyat tersebut maka terpenuhinya program walikota tentang pembangunan pasar di 8 kecamatan

Dinas Kesehatan: Pada Tahun 2019 upaya dinas kesehatan dalam meningkatkan akses layanan masyarakat melalui sarana kesehatan yang memadai telah membangun:

- Pembangunan Puskesmas Cilegon DTP di Kelurahan Ciwedus ± 300 meter dari jls
- Pembangunan Puskesmas Citangkil DTP di kelurahan lebak denok kecamatan Citangkil ± 100 meter dari jls
- Pembangunan Puskemas Purwakarta menjadi 2 lantai sesuai Permenkes RI nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat
- Pembangunan puskesmas jombang menjadi 2 lantai sesuai Permenkes RI nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat

- 2) Dalam rangka penanggulangan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan waduk, pembuatan tandon, serapan air serta perbaikan sanitasi air dan merevitalisasi sepanjang aliran sungai dari hulu sampai ke hilir.

Tindak Lanjut:

Salah satu kegiatan prioritas daerah dalam RPJMD Kota Cilegon 2016-2021 adalah Pembangunan Tandon. Tandon berfungsi sebagai tampungan air ketika musim penghujan dan dapat juga berfungsi sebagai sumber air permukaan. Direncanakan Kota Cilegon memiliki 5 Tandon pada akhir tahun 2021, yaitu : (1) Tandon Metro, (2) Tandon Sukmajaya I, (3) Tandon Sukmajaya II, (4) Tandon Cibuntu, dan (5) Tandon Bulakan. Dari kelima tandon tersebut, Tandon Metro sudah selesai dan berfungsi. Dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut terdapat permasalahan yaitu dalam pembangunan Tandon, mengalami keterlambatan dalam proses pengadaan lahannya, namun pada tahun anggaran 2019 sudah dapat terselesaikan.

Sementara dalam hal Revitalisasi Saluran/Drainase, kendala yang dihadapi adalah banyaknya bangunan milik warga yang berada ditepi Saluran/Drainase yang menyebabkan pemeliharaan Saluran/Drainase sulit untuk dilakukan. Selain itu, untuk menambah kapasitas Saluran/Drainase, diperlukan pengadaan lahan/pembebasan lahan milik warga disepanjang Saluran/Drainase, dimana proses pengadaan lahan saat ini memerlukan proses yang cukup lama. Solusi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan tindak lanjut ini adalah Melakukan koordinasi dengan pejabat setempat (Lurah/Camat) untuk memberikan pemahaman kepada warga bahwa dalam hal Pemerintah Kota memerlukan lahan untuk kepentingan umum (pembangunan tandon, pelebaran saluran/drainase) maka diperlukan dukungan dari warga sekitar. Selain itu, diharapkan peran serta dari masyarakat untuk sama-sama menjaga saluran/drainase agar berfungsi secara optimal, antara lain dengan tidak membuang sampah di saluran/drainase, dan bangunan yang berdiri disepanjang saluran/drainase dapat menyesuaikan guna kepentingan pemeliharaan saluran/drainase dan revitalisasi saluran/drainase.

- 3) Rencana pembangunan pelabuhan Warnasari, dan rencana jalan lingkar utara serta pembenahan di sepanjang jalan lingkar selatan hendaknya juga menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing dan investasi daerah.

Tindak Lanjut:

Program Prioritas Daerah yang dicanangkan Pemerintah Kota Cilegon memerlukan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Untuk mewujudkan rencana besar perlu persiapan yang matang dan terukur. Apabila kita mengambil contoh Jalan Lingkar Utara, untuk mewujudkan pembangunan Jalan Lingkar Utara maka terlebih dahulu dilakukan persiapan pengadaan tanah, yang kemudian dilanjutkan dengan pengadaan tanah. Setelah pengadaan tanah selesai maka tahapan selanjutnya adalah pematangan lahan, setelah itu tahapan konstruksi pembangunan Jalan Lingkar Utara.

Setiap tahapan memerlukan waktu yang tidak instan. Sejatinya, dokumen RPJMD Kota Cilegon 2016-2021 disusun pada tahun 2015 dengan asumsi yang berlaku pada saat itu. Dalam RPJMD Kota Cilegon 2016-2021, pembangunan Jalan Lingkar Utara direncanakan selesai pada tahun 2021. Namun dalam pelaksanaannya, kita dihadapkan pada banyak yang memerlukan waktu penanganan yang lebih lama dibandingkan dengan asumsi awal perencanaan. Hal yang demikian berlaku pula untuk kegiatan prioritas daerah yang lain, semata karena terdapat perbedaan dalam asumsi awal perencanaan dengan realita pada saat kegiatan itu dilaksanakan.

Pada pelaksanaan tindak lanjut ini ditemukan permasalahan antara lain Permasalahan JLU terkendala dengan pengadaan tanah wakaf dan tanah swasta yang dokumen kepemilikan tanahnya tidak lengkap serta tanah-tanah sengketa. Selain itu, Penataan JLS terkendala dengan masih lemahnya pengawasan dan kesadaran masyarakat yang menggunakan trotoar untuk tempat parkir kendaraan.

Solusi yang dilaksanakan terkait permasalahan tersebut yaitu Terkait pengadaan tanah wakaf, dilakukan koordinasi yang intens dengan nadhir, kemenag dan BPN. Serta kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penataan JLS dengan membentuk Tim Penataan jalan Aat-Rusli.

- 4) Pembenahan sistem dan sarana transportasi diharapkan bisa meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi kemacetan, serta memberi manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, dengan membuat jalur angkutan ke setiap kecamatan dan pelebaran ruas jalan.

Tindak Lanjut:

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang: Dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mengurangi kemacetan, Dinas PUTR pada tahun 2019

telah menyelesaikan pembangunan jalan Bonakarta-Masigit dan jalan tembus akses kelurahan Panggungrawi, selain itu pada tahun 2019 untuk perencanaan pelebaran jalan telah disusun FS Pembangunan Jalan Sambironyok – Nagreg, FS Pelebaran Jalan Bagendung Raya (Curug Katimaha(JLS) - Krotek (JLS)), FS Pelebaran Ciberko – JLS, DED Pelebaran Jalan Buah Kopek - Dringo – JLS, DED Pelebaran Jalan Kebanjiran – JLS, dan FS Pelebaran Jalan Sultan. Dalam pelaksanaan tindak lanjut ini terdapat permasalahan yaitu Pelebaran jalan seringkali terkendala oleh proses pengadaan tanah.

Dinas Perhubungan: Melakukan sinergi antara SAUM dengan hasil kajian feeder (pengumpan) angkutan umum. Terdapat permasalahan yaitu Terjadinya konflik sosial dengan angkutan umum yang ada. Solusi yang dilaksanakan terkait permasalahan tersebut yaitu: Evaluasi kinerja jaringan jalan, Penataan jaringan trayek, dan Mengalihkan angkot sebagai feeder (pengumpan) SAUM ke setiap kecamatan dengan diberikan subsidi sementara oleh Pemerintah.

- 5) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan memerlukan pembangunan yang terintegrasi, dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan konservasi lingkungan hidup melalui peningkatan kapabilitas dan aksesibilitas wilayah serta modernisasi sarana dan sistem transportasi dengan mengintegrasikan konsep ramah lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan serta upaya penanggulangan bencana.

Tindak Lanjut:

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang: Dalam setiap pembangunan jalan baru yang membutuhkan lahan lebih dari 5 Ha akan dibuatkan Amdal Jalan. Dan kegiatan pelebaran atau peningkatan jalan yang tidak membutuhkan pengadaan lahan untuk tahun ke depan akan diupayakan dibuat dokumen lingkungan /SPPL. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut yaitu Belum ada Perwal yang mengatur tentang kewajiban menyusun SPPL dalam setiap pekerjaan jalan, sehingga solusi yang diusulkan dalam pelaksanaan tindak lanjut ini yaitu Perwal harus segera ditetapkan dan disosialisasikan, sehingga OPD yang akan melakukan pembangunan yang harus membuat dokumen lingkungan dapat mengacu pada perwal tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup: Dalam hal mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan diperlukan upaya perlindungan dan



pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi : perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. Sejak tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang hingga pada tahun 2020 ini direncanakan akan segera diperda-kan, bertujuan sebagai dasar penyusunan bagi pemerintah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga *sustainable development* dapat terwujud.

Dinas Perhubungan: Pada bulan Februari 2019 telah dilakukan upaya peningkatan pelayanan angkutan umum dengan menyediakan Bus Trans Cilegon untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tindak lanjut ini yaitu Kurang tepatnya penerapan prinsip SAUM dan solusi yang dilaksanakan yaitu Diadakan evaluasi/review prioritas jaringan pelayanan Bus Trans Cilegon.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

Pemerintah kota telah melakukan pemetaan risiko bencana yang menjadi dasar dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, meliputi : peta kerentanan, peta bahaya dan peta kapasitas.

Selain itu, BPBD juga merupakan anggota dalam Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Cilegon sehingga BPBD berperan serta dalam setiap perencanaan infrastruktur di Kota Cilegon, hal ini dilakukan dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana.

- 6) Perlunya penambahan gedung sekolah baru, seperti SD, SMP, SMA dan SMK, hal ini karena hampir diseluruh sekolah jumlah siswa tidak sesuai dengan kapasitasnya.

Tindak Lanjut:

Telah dilaksanakan di Tahun 2019 Penambahan RKB Baru baik di Sekolah Dasar Negeri maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk peningkatan pelayanan pendidikan di Kota Cilegon permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan tindak lanjut ini yaitu Ketersediaan Anggaran sehingga penambahan sarana dan prasarana sekolah di kota cilegon dilakukan secara simultan. Solusinya yaitu dengan Penganggaran sarana - prasarana sesuai sekala prioritas berdasarkan kondisi bangunan dan daya tampung sekolah.

- 7) Mendorong pembangunan alun alun di setiap kecamatan dan fasilitas umum lainnya serta ruang terbuka hijau

Tindak Lanjut:**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:**

Pembangunan ruang terbuka hijau publik telah disinergikan dengan pembangunan DPWkel dimana mulai tahun 2020 disetiap kelurahan ada kegiatan pilihan yaitu pembangunan Taman Bermain Anak. Pada tahun 2019 Dinas Perkim telah menargetkan pembangunan Taman Cibeber seluas 2 ha, namun terkendala dengan gagal lelang.

- 8) Perlunya pembenahan dan penataan terminal seruni yang sering menimbulkan kemacetan, diantaranya perlu dibuat akses jalan baru untuk mengurangi tingkat kemacetan diakses tol Cilegon timur dan sekitarnya.

Tindak Lanjut:

Dinas Perhubungan: Sudah menempatkan petugas Dishub untuk mengatur kendaraan pada simpang akses tol Cilegon Timur. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tindak lanjut ini yaitu: adanya kewenangan wilayah yang berbeda antara kota, kabupaten, provinsi dan pusat dan kemacetan yang terjadi pada simpang ruas jalan akses tol Cilegon Timur. Solusi yang diusulkan dalam pelaksanaan tindak lanjut ini yaitu perlu adanya kajian Simpang tiga Bojonegara; Melakukan pembangunan simpang susun (fly over) Cilegon Timur agar tidak ada lagi crossing kendaraan yang menyebabkan kemacetan; Koordinasi dengan PT.MMS, Pemkab Serang, Serta Pemerintah Pusat untuk segera melakukan pembangunan simpang susun (fly over).

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang: Pemerintah Kota Cilegon telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk dapat menata di sekitar akses Pintu Tol Cilegon Timur. Segera setelah direalisasikan konstruksi fisik nya diharapkan masalah kemacetan di Pintu Tol Cilegon Timur dapat diatasi

- 9) Penataan kawasan terpadu dengan memperhatikan daya dukung pertumbuhan, dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan rakyat banyak. Seperti pemetaan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan industri dan tempat hiburan agar tercipta rasa aman dan berkeadilan.

Tindak Lanjut:

Secara umum, penataan Kawasan sudah terakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon. Namun sebagai suatu rencana umum tata ruang, RTRW Kota Cilegon belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar operasionalisasi bagi penyelenggaraan penataan

ruang sehingga perlu diperinci dalam suatu rencana rinci tata ruang yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam pelaksanaan tindak lanjut ini ditemukan permasalahan yaitu Saat ini belum tersedia dokumen RDTR Kota Cilegon. Pada Tahun 2019, Kota Cilegon mendapatkan Bantek RDTR OSS dari Kementerian ATR/BPN berupa Penyusunan RDTR BWP Kecamatan Ciwandan dan Citangkil, dimana saat ini tahapannya sudah akan Lintas Sektor dan diharapkan dapat diperdakan pada bulan Mei 2020. Pada tahun 2020 pun telah dianggarkan Kegiatan Penyusunan RDTR untuk Kecamatan Purwakarta dan Jombang. Apabila kedua RDTR ini telah selesai disusun, maka masih terdapat 4 kecamatan lagi yang perlu dibuatkan Dokumen RDTR.

Solusi yang diusulkan untuk dilaksanakan yaitu Penganggaran untuk Penyusunan Dokumen RDTR bagi 4 kecamatan (Pulomerak, Grogol, Cilegon, dan Cibeber), dan proses legalisasi seluruh Dokumen RDTR.

- 10) DPRD terus mendorong pemerintah daerah melalui PDAM untuk meningkatkan sarana air bersih agar masuk seluruh pelosok Cilegon.

Tindak Lanjut:

Terkait peningkatan cakupan air bersih di Kota Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon memiliki permasalahan dalam ketersediaan air baku. Sumber air baku di Kota Cilegon sangat terbatas sehingga perlu mengupayakan mencari dari luar Kota Cilegon yaitu Proyek Strategis Nasional di Propinsi Banten terkait pembangunan waduk karian dan sindang heula. Pemerintah Kota Cilegon berharap dapat memperoleh kuota air baku dari program tersebut sehingga dapat meningkatkan cakupan air bersih di seluruh wilayah Kota Cilegon.

Upaya lain yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan PDAM Cilegon Mandiri dengan kondisi terbatasnya ketersediaan air baku di Kota Cilegon, maka langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Mengupayakan Penurunan tingkat kehilangan air / *Non Revenueable Water* paling tidak sampai level "*acceptable*". Saat ini tingkat kehilangan air di kisaran 24%. PDAM harus diupayakan setidaknya tingkat kehilangan air berada di angka di bawah 20%.
2. Mengusahakan penambahan kuota air curah dari PT. Krakatau Tirta Industri (Renegosiasi).
3. Pembangunan sumur sintesis / *Deep well* di titik-titik potensi air khususnya di wilayah Kota Cilegon bagian selatan.
4. Mendorong Kerjasama dgn pihak swasta pengelola air bersih di cilegon selain PT. Krakatau Tirta Industri.

5. Mendorong percepatan pelimpahan realisasi Kuota air bersih waduk Sindangheula dan Karian.
6. Setelah permasalahan Sumber Air Baku teratasi, maka Pemerintah Daerah perlu mendorong peningkatan cakupan pelayanan kepada masyarakat melalui Penyertaan Modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan rencana bisnis PDAM Cilegon Mandiri.

3.5.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang Perencanaan Pembangunan

- 1) DPRD meminta percepatan pembahasan perubahan RPJMD tahun 2016-2021, sehingga target program pembangunan lebih terarah, terukur dan sistematis.

Tindak Lanjut:

Bappeda Kota Cilegon telah melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 dengan menghasilkan Berita Acara dan Nota Kesepakatan hasil Rancangan Awal Perubahan Kota Cilegon Tahun 2016-2021. Dilanjutkan dengan melayangkan surat No: 050/1282/Bapp Tanggal 28 Mei 2019 tentang Konsultasi Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Cilegon 2016-2021 kepada Gubernur Banten. Rekomendasi Konsultasi Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 dibalas melalui Surat Kepala Bappeda Provinsi Banten No: 005/1014.2-Bapp/2019 Tanggal 12 Juni 2019, yang menyatakan bahwa Proses Perubahan Peraturan Daerah Tentang Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021 tidak dapat dilanjutkan. Dengan memperhatikan surat Rekomendasi tersebut, maka Pemerintah Kota menerbitkan Perwal Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 agar target program pembangunan lebih terarah, terukur dan sistematis.

- 2) DPRD meminta pembahasan perubahan perda tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota Cilegon agar diprioritaskan, sehingga di dalam pemetaan pembangunan lebih terarah sesuai dengan peruntukannya

Tindak Lanjut:

Bappeda Kota Cilegon sudah mendorong percepatan pembahasan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 Kota Cilegon. Sampai dengan akhir Tahun 2019, Rancangan Perubahan RTRW 2010-2030 Kota Cilegon sudah mendapat rekomendasi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Tahap selanjutnya adalah

menetapkan/mengesahkan revisi RTRW Kota Cilegon Tahun 2010-2030 melalui Peraturan Daerah pada semester awal Tahun 2020.

- 3) Perlunya optimalisasi dalam membuat proses perencanaan dari bawah (bottom up planning), hal ini belum memberikan akses yang optimal kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Tindak Lanjut:

Pada Tahun 2019, sudah mulai diwajibkan bagi seluruh kelurahan untuk melaksanakan tahapan pra musrenbangkel untuk dokumen perencanaan 2021, hal ini untuk menghimpun usulan dari lingkungan terkecil, yaitu RT, dan juga meiningkatakan represenatasi masyarakat. Fasilitator musrenbangkel juga dibekali pengetahuan dalam menggali aspirasi masyarakat, sehingga pada proses musrenbangkel usulan-usulan masyarakat lebih mudah untuk dipetakan dan disusun skala prioritas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, isu permasalahan, potensi dan karakteristik wilayah musrenbangkel.

Dengan adanya DPWKel di tahun 2019 dan 2020 yang cakupan dan lingkup kegiatannya terus diperluas (melalui Kepwal Pedum DPWKel), maka usulan masyarakat lebih besar peluangnya untuk diakomodir oleh pemerintah.

Di sisi lain, pemetaan usulan masyarakat sebagai input perencanaan pembangunan terus Pemkot sempurnakan dalam sistem perencanaan Kota Cilegon (SIMRAL) melalui integrasi data usulan hasil musrenbangkel, musrenbangcam, forum perangkat daerah, reses DPRD, musrenbang RKPD, hingga pada tahap akhir penganggaran.

Bappeda Kota Cilegon telah memberikan mandatory kepada Kelurahan untuk melaksanakan Kegiatan Pramusrenbang. Hal ini untuk memberikan akses yang optimal kepada seluruh masyarakat tingkat Rukun Tangga (RT) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

- 4) Meningkatkan akurasi dan ketersediaan data sektoral masih perlu ditingkatkan dan diintegrasikan dalam pengelolaan agar menjadi input yang tepat dalam penyusunan perencanaan serta terintegrasinya perencanaan dan penganggaran melalui penggunaan SIMRAL agar dapat dilaksanakan secara optimal

Tindak Lanjut:

Pemerintah Kota Cilegon melalui Bappeda terus meningkatkan ketersediaan dan kualitas data sektoral. Di Tahun 2019, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan data, Perencanaan dan

Pengendalian dan Pembangunan Daerah, yang dilanjutkan di Tahun 2020. Di sisi lain, pengelolaan data capaian indikator program pembangunan daerah (yang juga merupakan data sektoral di setiap perangkat daerah) mulai akhir Tahun 2019 sudah dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sudah terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi (Simral) Kota Cilegon, sehingga ke depannya, hasil evaluasi data sektoral (khususnya kinerja sasaran dan program) dapat dimanfaatkan secara realtime sebagai basis data untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan.

3.5.5 Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Empatik dan Bertanggung Jawab

- 1) Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur serta ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi termasuk sistem pengawasan dan pertanggung jawaban anggaran yang transparan dan akuntabel melalui akses *smart city*.

Tindak Lanjut:

Sesuai dengan arahan dan himbauan Tim Korsupgah, KPK RI, yang menyarankan bahwa proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah harus terintegrasi, Pemkot Cilegon telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan BPPT untuk mengimplementasikan aplikasi SIMRAL sejak Tahun Anggaran 2017. Aplikasi SIMRAL tersebut mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan hingga pelaporan (akuntansi) Keuangan Pemkot Cilegon. Tujuan implementasi aplikasi SIMRAL adalah demi terwujudnya pertanggungjawaban keuangan daerah yang akurat, efektif, transparan dan akuntabel. Bahkan aplikasi SIMRAL ini dikembangkan lebih jauh untuk dapat diintegrasikan dengan Sistem Pendapatan Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa serta Aset Daerah. Dengan demikian seluruh kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kota Cilegon diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara efektif dan akurat, seperti yang diharapkan oleh tim Korsupgah KPK RI.

- 2) Peningkatan manajemen birokrasi dengan mengoptimalkan program key performant indeks (KPI) untuk menilai kinerja aparatur, dan masing-masing instansi hendaknya memiliki dan melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) terutama standar biaya dalam

melayani masyarakat serta peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan memberikan pelayanan prima (*customer care*).

Tindak Lanjut:

BAPPEDA: Pemerintah Kota Cilegon telah menginisiasi sistem pengukuran kinerja secara realtime melalui Modul SAKIP yang terintegrasi pada SIMRAL, yang nantinya akan digunakan untuk menetapkan kinerja serta mengukur realisasi kinerja baik dari Pejabat Eselon II, III, dan IV serta terintegrasi terhadap dokumen-dokumen Perencanaan Perangkat daerah dan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

Bagian Organisasi dan RB SETDA: Pemerintah Kota Cilegon saat ini telah mengintegrasikan modul SAKIP (SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) ke dalam aplikasi SIMRAL. Sehingga perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja menjadi terintegrasi. Pada awal tahun 2020, sudah disosialisasikan proses pengisian target kinerja Esselon 4 (Kegiatan), 3 (Program) dan 2 (Sasaran) selama 12 bulan kedepan. Setiap bulan hasil pengisian akan dievaluasi karena memuat kinerja Program/Kegiatan yang dilaksanakan level manajerial sehingga dapat juga menjadi cerminan kinerja instansi.

Bagian Pemerintahan SETDA: Guna Mencapai Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat Melaksanakan Monev Penyelenggaraan Paten Dan Pembinaan Dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan (Permendagri 81/2015)

- 3) Memperbaiki kinerja birokrasi sehingga dapat menurunkan berbagai temuan BPK pada pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD dengan mengoptimalkan kinerja aparatur pengawas internal pemerintah daerah

Tindak Lanjut:

Inspektorat: Inspektorat sebagai perangkat daerah yg membantu wali kota dalam melakukan pengawasan telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Bagian Organisasi dan RB SETDA: Setiap tahun dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ada di Pemerintah Kota Cilegon. Proses Reformasi Birokrasi saat ini berjalan dalam kaitannya memenuhi aspek Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang berdasarkan PERMENPAN NOMOR 8 TAHUN 2019, yang akan di input melalui <http://pmpbrb.menpan.go.id> dan ditutup pada Tanggal 31 April 2020. Disamping hal tersebut, untuk perbaikan kinerja, Pemerintah

Kota Cilegon melalui Bagian Organisasi Reformasi Birokrasi melakukan proses diseminasi budaya kerja melalui berbagai cara untuk mengenalkan budaya kerja “MANDIRI” kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

- 4) Mendorong walikota agar memfungsikan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan PAD, meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai PERDA dan PERWAL serta menertibkan perijinan

Tindak Lanjut:

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan: Pada Tahun 2019 Upaya yang dilakukan pengiriman pembentukan PPNS sejumlah 2 orang dari dinas Satpol PP. Pada Tahun 2020 Disediakan anggaran diklat bagi pembentukan PPNS sesuai kebutuhan OPD. Dalam pelaksanaan tindak lanjut ini ditemui permasalahan antara lain biaya pengiriman diklat PPNS mempunyai nilai yg cukup besar, sehingga pengiriman diklatnya tidak bisa dilakukan sekaligus dan harus bertahap, mengingat kebutuhan diklat lainnya, solusi yang dilaksanakan selanjutnya adalah menganalisa kebutuhan pembentukan PPNS di beberapa OPD, yang kemudian di rencanakan pelaksanaan kegiatannya untuk di anggarakan ditahun berikutnya.

Satuan Polisi Pamong Praja: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya ketentuan Bab II pasal 7, yang memuat ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP bahwa untuk terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah terhadap para pelanggar perda yang dilakukan oleh masyarakat, warga, aparatur maupun badan hukum dapat dilakukan penindakan melalui pembinaan hukum serta melakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan oleh PPNS. Dalam hal ini dapat kami sampaikan proses penindakan dan optimalisasi kinerja PPNS yang dihadapi pada program kerja tahun 2018 dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan perencanaan kinerja Bidang Penegakan Perundang-Undangan, telah melakukan Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dengan pola Penindakan Prefentif Non Yustisial, dengan melakukan :
 - Pembinaan dan penyuluhan hukum, untuk keta’atan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah;



- Membuat Surat Pernyataan kepatuhan terhadap peraturan daerah;
 - Menindak setiap pelanggar peraturan daerah secara administrasi, dengan menandatangani berita acara;
- b. Bahwa dalam rangka untuk optimalisasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini telah dirubannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011, tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP perlu dilakukan evaluasi dan kajian Perda Nomor 13 tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. Bahwa sebagaimana disebutkan pada huruf “b”, untuk optimalisasi kinerja PPNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya telah dilakukan regulasi peraturan daerah Nomor 8 tahun 2018, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Bahwa untuk mendukung sinergisitas dan integritas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon, perlu dibentuk Sekretariat PPNS sebagai wadah untuk melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan daerah;
- e. Bahwa masih minimnya petugas Penyidik (PPNS) di Satpol PP Kota Cilegon, yaitu hanya ada 1 (satu) orang (bersertifikasi Penyidik), belum secara optimal melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan tugas dan fungsi;
- f. Bahwa alokasi anggaran khusus untuk kegiatan tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan oleh PPNS belum memadai sekala kebutuhan operasional tim penyidik/korwas, kejaksaan dan pengadilan agar proses Tipiring dapat berjalan optimal;
- g. Bahwa untuk penambahan petugas penyidik (PPNS) di Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan (BKPP), baru dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2019 sebanyak 2 orang, dan ini masih kurang;
- h. Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, berdasarkan nilai pagu indikatif pada alokasi kegiatan bidang penegakan perundang-undangan, perencanaan tindak pidana ringan (tipiring) akan dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan dengan target kinerja sebanyak 100 atau lebih menindak bagi para

pelanggar perda. Dengan asumsi hasil kegiatan dapat menyumbang pendapatan kas daerah;

- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan disertai dengan keterbukaan informasi publik, untuk memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kepercayaan pada pemerintah.

Tindak Lanjut:

Seluruh proses dalam perencanaan selalu dilakukan tahapan *bottom up* beberapa diantaranya adalah Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum PD dan Musrenbang Kota, dimana dalam setiap proses tersebut selalu melibatkan unsur masyarakat. Selain itu, proses penganggaran dalam hibah dan bansos pun sudah melibatkan masyarakat melalui sistem aplikasi e-hibah bansos dimana masyarakat yang mengajukan hibah/bansos dapat melihat proses validasi hibah/bansos yang mereka ajukan.

Di sisi lain, pemerintah senantiasa berupaya untuk menampung aspirasi, aduan atau keluhan masyarakat secara *realtime* melalui Aplikasi Qlue atau menghubungi Call Center 112 yang berada di Dinas Kominfo, Sandi dan Statistik.

Pada aspek keterbukaan informasi publik, Kota Cilegon memiliki situs/website cilegon.go.id sebagai domain utama yang memuat hampir seluruh informasi terkait aktivitas penyelenggaraan pemerintah yang didukung pula oleh subdomain milik berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang berisikan berbagai informasi terkait pelayanan, pelaksanaan pembangunan, dokumen administrasi pemerintahan, data/informasi sektoral, dan lain sebagainya.

3.5.6 Penyelenggaraan Urusan bidang Budaya, Agama dan Sosial

- 1) Perlunya pembinaan terhadap generasi muda, karena generasi muda merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia dimasa yang akan datang. Dengan melakukan pembangunan karakter generasi muda kota Cilegon yang berideologi Pancasila dengan harapan akan menjadi generasi yang mampu mengamalkan dan melestarikan ideologi bangsa serta budaya sebagai pedoman hidup kelangsungan berbangsa dan bernegara.

Tindak Lanjut:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Dalam melakukan pembinaan terhadap generasi muda dengan melakukan pembangunan karakter

generasi muda Kota Cilegon yang berideologi Pancasila serta berbudaya sebagai pedoman hidup kelangsungan berbangsa dan bernegara, Badan Kesbangpol Kota Cilegon telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Kesadaran Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa Bagi Masyarakat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 pemuda yang berasal dari pelajar dan mahasiswa yang ada di Kota Cilegon. Bentuk kegiatan ini yaitu dengan memberikan pemahaman dan mengunjungi situs yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa seperti Lubang Buaya dan Monumen Nasional. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memelihara semangat perjuangan bangsa dan terus membangun karakter pemuda yang berideologi Pancasila. Selain itu, pada tahun anggaran 2020 telah direncanakan juga kegiatan pembinaan karakter pemuda yang tertuang dalam DPA kegiatan FGD Penguatan Wawasasn Kebangsaan Pemuda di Kota Cilegon.

Dinas Pemuda dan Olahraga mendukung pembinaan terhadap generasi muda dengan melakukan pembangunan karakter generasi muda kota Cilegon yang beridologi Pancasila melalui Kegiatan yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 dan Tahun 2020 berupa:

- (1) Kegiatan Pelatihan Karakter Building dan Kepemimpinan, yang diikuti oleh 110 pemuda, yang bertujuan membangun karakter pemuda dan membangkitkan kemauan dan keyakinan untuk berubah menjadi lebih baik sehingga tercipta motivasi dan kesadaran diri untuk lebih hebat dan bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Kegiatan Paskibraka meliputi (2) Seleksi Paskibraka, (3) Pra Pemusatan Paskibraka, dan (4) Pemusatan Paskibraka. Paskibraka bertujuan Membina pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, setia dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi Pandu Ibu Pertiwi
- 2) Perlunya pembinaan kerukunan antar umat beragama dengan perbedaan keyakinan beragama tersebut bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan demi terwujudnya pembangunan yang merata.

Tindak Lanjut:

Dalam memelihara kerukunan anatar umat beragama di Kota Cilegon, Badan Kesbangpol Kota Cilegon telah melaksanakan kegiatan FGD Antar Umat Beragama yang tertuang dalam DPA Tahun Anggaran 2019.



Bentuk kegiatan ini yaitu forum diskusi yang dihadiri oleh para tokoh masing-masing agama. Dalam kegiatan ini, Badan Kesbangpol turut melakukan kerjasama dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Cilegon

Di sisi lain, melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Kesbangpol peran Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah sebagai unsur yang mendukung Keberlanjutan Harmonisasi Kehidupan Beragama, dengan menggambarkan mayoritas Agama Islam. Bagian Kesra berinisiatif melaksanakan Pembinaan Keagamaan dan SDM yang berisi Pengajian Ulama Umara dan Majelis Taklim guna menjaga Kerukunan Beragama dan Kehidupan yang Madani di Kota Cilegon

- 3) Perlunya penanganan serius terhadap permasalahan sosial yang semakin beragam seperti kriminalitas, anak jalanan, gepeng dan penyakit masyarakat lainnya serta dengan membuat rumah singgah, rumah rehabilitasi dan gedung budaya.

Tindak Lanjut:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Untuk terus memelihara kondusifitas stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Cilegon, pada tahun 2019 Badan Kesbangpol Kota Cilegon telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kamtibmas (Keamanan ketertiban masyarakat) di Kota Cilegon. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Badan Kesbangpol melakukan kerjasama dengan unsur vertikal lainnya. Kegiatan yang dimaksud yaitu Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Koordinasi Unsur Pengamanan Wilayah di Kota Cilegon, dan Pemantauan Tenaga Kerja Asing dan Pemberi Kerja di Kota Cilegon. Ketiga kegiatan tersebut telah terlaksana pada DPA Tahun 2019, kegiatan itu pula telah terencana pada DPA Tahun 2020. Selain itu, untuk mendukung kegiatan tersebut, Badan Kesbangpol Kota Cilegon juga telah melaksanakan pembinaan dalam pencegahan dan penanganan konflik dan kewaspadaan dini masyarakat, seperti kegiatan Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan di Kota Cilegon dan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Penanganan Konflik Sosial.

Dinas Sosial: Pada Tahun 2019 Upaya Dinas Sosial Penanganan permasalahan Anak Jalanan, Gepeng dan penyakit masyarakat lainnya, Dinas Sosial sudah melakukan beberapa langkah dari adanya SATGAS Anjal dan Gepeng yang bertugas monitoring anjal dan gepeng di Kota Cilegon, melakukan pembinaan dan memberikan keterampilan,

menyediakan rumah Singgah serta Pusat kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) yang merupakan pusat pembinaan dan peningkatan keterampilan bagi PMKS yang terletak di Cikerei. Kegiatan yang mendukung : 1) Penanganan Anjal, Gepeng dan WPS; 2) Pembinaan dan peningkatan kapasitas PMKS; 3) Pengelolaan Pondok Sosial. adapun regulasi yang mendukung adalah Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Pemulangan Orang Terlantar di Perjalanan, Wanita Pekerja Seks, Bekas Narapidana, Gelandangan dan Pengemis, Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Terlantar dan Peraturan Daerah No 5 tahun 2016 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pada Tahun 2020 Upaya dinas Sosial dalam menyelesaikan permasalahan sosial seperti kriminalitas, anak jalanan, gepeng dan penyakit masyarakat sudah di anggarkan melalui kegiatan Penanganan Anjal, Gepeng dan WPS, Pembinaan dan peningkatan kapasitas PMKS

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:

DED Pembangunan gedung budaya sudah dianggarkan pada tahun 2020, tetapi kode rekeningnya masuk ke belanja jasa, seharusnya belanja modal. Selain itu, terkait dengan rencana penggunaan lahan untuk pembangunan gedung budaya, dari arahan Dinas PUTR tidak diperkenankan dibangun di lokasi itu karena dalam RTRW nya masuk dalam RTH.

- 4) Perlu ketegasan PERDA no 2 tahun 2003 tentang penyelenggaraan hiburan, guna menyelesaikan masalah tempat hiburan yang sudah meresahkan masyarakat dan perlunya relokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat.

Tindak Lanjut:

Sesuai dengan perencanaan program kerja bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Cilegon, dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta menyikapi situasi sosial yang berkembang dimasyarakat, bahwa Satpol PP telah melaksanakan kegiatan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003 tentang Perijinan Penyelenggaraan Hiburan, dengan langkah dan hasil kegiatan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada pelaksanaan program penindakan pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2018, khususnya Perda Nomor 2 tahun 2003, telah menindak penyelenggaraan tempat hiburan malam

yang berada di Kota Cilegon sebanyak 32 tempat yang tersebar di 5 Kecamatan yaitu Cibeber, Jombang, Purwakarta, Grogol dan Pulomerak, dengan hasil identifikasi temuan pelanggaran :

- Penyelenggaraan hiburan malam tidak memiliki ijin dari Pemerintah Kota Cilegon;
 - Ditemukan banyak kamar/room tempat karaoke yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 2 tahun 2003;
 - Penyelenggaraan Hiburan malam sering melanggar jam operasional;
 - Sering ditemukan penjualan/peredaran minuman keras;
- b. Telah melaporkan dugaan tindak pidana pelanggaran Peraturan Perda Nomor 2 tahun 2003, kepada pimpinan (Walikota), dengan tembusan kepada Ketua DPRD dan OPD terkait dan tindaklanjutnya;
- c. Tidak bisa dilakukan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap penyelenggaraan hiburan malam yang tidak memiliki ijin. Pada prinsipnya seharusnya dilakukan penutupan, atau dibuatkan perijinan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh OPD yang terkait agar memiliki ketetapan hukum;

Terkait penataan Ruang, Dalam rencana tata ruang Kota Cilegon, tempat hiburan di alokasikan di kawasan pariwisata dan kawasan perdagangan dan jasa. Tempat hiburan tidak diperkenankan dibangun pada kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, dan kawasan ruang terbuka hijau.

3.5.7 Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

- 1) Melakukan upaya dalam mengatasi alih fungsi lahan maka kepada dinas PUTR, dinas lingkungan hidup, dan dinas perumahan dan kawasan pemukiman agar meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan industri, karena selama ini banyak keluhan dari masyarakat yang merasakan dampak pencemaran industri diantaranya berupa polusi udara dan air sebagai akibat dari produksi industri.

Tindak Lanjut:

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang: Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, khususnya terkait dengan pengawasan terhadap kegiatan industri, dilakukan melalui upaya pengendalian pemanfaatan lahan yaitu berupa evaluasi terhadap

alokasi dan proporsi RTH dalam tapak industri. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tindak lanjut ini yaitu Keterbatasan SDM, belum tersedianya dokumen rencana rinci tata ruang dan tidak tersedianya aturan mengenai juklak/juknis pengendalian pemanfaatan ruang menjadi kendala untuk melakukan pengawasan secara langsung. Solusi yang dapat dilaksanakan dalam melaksanakan tindak lanjut ini antara lain Menyusun dokumen rencana rinci tata ruang dan juklak/juknis pengendalian pemanfaatan ruang serta membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan secara regular.

Di dalam rencana tata ruang, kawasan industri harus menyediakan ruang terbuka hijau dan buffer zone (ruang penyangga/ green belt) di sekitar kawasan industri untuk mereduksi polusi udara yang berbatasan langsung kawasan permukiman.

Dinas PUTR akan mengupayakan evaluasi setiap siteplan kawasan industri apakah sudah sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Pemerintah Kota Cilegon di tahun 2020 dan 2021

Dinas Lingkungan Hidup:

Status Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2018, 2019 berstatus WASPADA. Status tersebut menggambarkan kualitas air, udara dan tutupan lahan. Dari data tersebut menjelaskan bahwa pencemaran air dan udara bukan berasal dari industri. Justru penurunan kualitas air pada seluruh sungai disebabkan oleh sampah, limbah domestik (tinja) dan lumpur. Hal ini diduga disebabkan karena adanya pemukiman dan aktifitas jenis usaha/kegiatan yang memanfaatkan ruang sempadan sungai, yg justru seharusnya menjadi daerah RTH atau bahkan daerah perlindungan setempat. Sedangkan penurunan kualitas udara dominasi disebabkan dari transportasi/kendaraan bermotor. Untuk tutupan lahan vegetasi pun telah terjadi penurunan. Hal ini yg menyebabkan penyedia jasa ekosistem utk pengaturan dan penyedia air semakin menurun daya dukungnya.

DLH telah berupaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum pada setiap tahunnya. Di tahun 2019 dan 2020, Kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup secara rutin terhadap sumber-sumber pencemaran di seluruh wilayah Kota Cilegon

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

Untuk mereduksi polusi lingkungan, maka Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di 2019 membangun ruang-ruang terbuka hijau (RTH Publik) diantaranya taman kota, taman kecamatan dan taman tematik, yang terus berlanjut di tahun 2020.

- 2) Dengan banyaknya alih fungsi lahan yang kurang terkendali di wilayah Cilegon termasuk galian C, DPRD meminta walikota untuk mendorong dan meningkatkan pengawasan OPD secara terpadu dan lintas sektoral

Tindak Lanjut:

Dinas Lingkungan Hidup:

Kota Cilegon telah terjadi degradasi kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan salah satunya oleh usaha/kegiatan pertambangan batuan (galian C) yang tidak berizin, dan ini sudah termasuk unsur pidana. Pemerintah kota telah melakukan koordinasi dan jalur komunikasi dengan aparat hukum terhadap tindakan ini. Khusus untuk kegiatan pertambangan batuan (galian C) yang berizin, saat ini izin usaha/kegiatan tersebut menjadi kewenangan pemerintah propinsi melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Banten, dan pemerintah Kota Cilegon harus memberikan rekomendasi terhadap penetapan wilayah dan kapasitas pertambangan batuan yang diizinkan sebagai upaya pengendalian fungsi lahan. Terdapat 4 (empat) kecamatan yang saat ini dilakukan pengawasan oleh Dinas LH dalam usaha/kegiatan pertambangan batuan tersebut.

- 3) Perlu adanya peninjauan kembali PERDA no 2 tahun 2003 tentang penyelenggaraan hiburan, dimana hampir seluruh tempat hiburan sering melanggar PERDA itu sendiri, selain itu perlu adanya regulasi pemerintah daerah yang mengatur retribusi penyelenggaraan tempat hiburan, sehingga dapat menyumbang terhadap pendapatan asli daerah.

Tindak Lanjut:

Satuan Polisi Pamong Praja mendukung perlu adanya perubahan atau regulasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003, mengingat penyelenggaraan hiburan malam sudah tidak relevan dengan prinsip muatan dan ketentuan aturan dalam Perda Nomor 2 tahun 2003 tersebut; oleh karena itu kami mendorong/mengusulkan kepada OPD terkait, agar melakukan evaluasi dan kajian/peninjauan kembali terhadap pokok-pokok ketentuan Perda tersebut, untuk dilakukan perubahan atau regulasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan muatan materi dalam pasal tertentu

memperhatikan situasi dan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat dengan sanksi pelanggaran yang tegas serta sinergis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Produk Hukum Daerah, agar penyelenggaraan hiburan malam ta'at aturan dan bisa ditindak atau dilakukan tindakan prefentif yustisial oleh PPNS;

BPKAD: Yang dilakukan oleh BPKAD Kota Cilegon saat ini melakukan pemungutan pajak daerah pada tempat-tempat hiburan seperti diskotik, karaoke dan kelab malam, terbatas pada makanan, minuman, reklame, Pajak Penerangan Jalan serta PBB-P2 nya.

- 4) Perlu mewaspadai tingkat kerawanan bencana dengan menyiapkan program-program secara terpadu. Karena Cilegon termasuk daerah rawan bencana tsunami, bencana industri dan banjir, masyarakat perlu juga diberikan pelatihan-pelatihan yang memadai mengingat Cilegon merupakan salah satu kawasan "ring of fire" yang sarat akan bencana yang mengancam.

Tindak Lanjut:

Pada Tahun 2019 Upaya Dinas Sosial Dalam Pengelolaan Kebencanaan, Dinas Sosial memiliki Standar Pelayanan Minimal untuk memberikan perlindungan bagi korban bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam rangka pemenuhan dasar bagi korban Bencana Dinas Sosial menyediakan Buffer stock yang siap disalurkan jika terdapat bencana serta adanya relawan Taruna Siaga bencana (TAGANA) yang sudah mendapatkan pelatihan dalam penanggulangan bencana. kegiatan yang tahun 2019 sebagai berikut : 1) Buffer Stock; 2) Pemantapan Kampung Siaga Bencana; 3) Pelatihan Tagana.

Pada Tahun 2020 Upaya Dinas Sosial telah menganggarkan melalui kegiatan Buffer Stock, Pemantapan KSB, Pelatihan Tagana.

3.5.8 Saran-saran Lainnya.

- 1) Mendorong walikota agar menekankan kepada para OPD untuk menyelesaikan target RPJMD tahun 2016-2021 dilaksanakan secara maksimal.

Tindak Lanjut:

BAPPEDA: Berkaitan dengan percepatan pelaksanaan pembangunan dalam rangka optimalisasi pencapaian target RPJMD 2016-2017, pemerintah kota cilegon telah menyusun regulasi perwal nomor 45 tahun 2019 tentang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang didukung dengan sistem SAKIP yang terintegrasi dalam simral

termasuk dilengkapi dengan SOP penggunaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemeeerintah yang dapat di lihat seara realtime perencanaan yang akan direalisasikan

- 2) Walikota Cilegon perlu menyusun cetak biru (blue print) potensi pendapatan daerah (pajak dan retribusi daerah) agar kinerja pelayanan OPD terkait lebih maksimal.

Cetak biru (*blue print*) adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja. BPKAD dalam mengoptimalkan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- Berkoordinasi dengan DPMPTSP Propinsi Banten, DPMPTSP Kota Cilegon dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Banten terkait perijinan yang telah dikeluarkan oleh instansi tersebut untuk kemudian kami tindak lanjuti dengan memberikan surat pemberitahuan untuk melakukan pendaftaran wajib pajak.
 - Kami juga memiliki Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan 4 (empat) UPT yang memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dan juga memberikan informasi terkait objek pajak yang belum menjadi wajib pajak.
 - Menginventarisir aset pemerintah daerah baik aset tetap maupun yang lainnya.
 - Mengoptimalkan upaya penerapan Perwal terkait pemungutan retribusi.
 - Mengembangkan pembayaran melalui sistem online untuk mempermudah pembayaran retribusi pada wajib retribusi.
- 3) Mendorong walikota agar meningkatkan peran controlling dan mengevaluasi kinerja para kepala OPD yang kurang maksimal serta diperlukan ketegasan walikota terhadap kinerja OPD yang tidak mencapai target / serapan anggaran rendah agar tidak diberikan anggaran yang besar atau tambahan anggaran.

Tindak Lanjut:

Pada Tahun 2020, BAPPEDA bekerjasama dengan SETDA melalui Instrumen SAKIP pada SIMRAL terus melakukan evaluasi secara kontinyu dengan menjadikan hasil evaluasi kinerja dalam rapat dinas

yang melibatkan seluruh kepala perangkat daerah dan dipimpin langsung oleh Walikota

- 4) Meminta kepada walikota agar segera melakukan penyegaran birokrasi dengan melakukan mutasi dan rotasi namun perlu kami ingatkan agar dalam prosesnya tidak boleh terjadi jual beli jabatan serta perlu memberikan punishment atau reward bagi OPD yang baik dan kurang baik khususnya dalam capaian RPJMD.

Tindak Lanjut:

Pemerintah Kota Cilegon telah melakukan Mutasi dan Rotasi Birokrasi bagi Ess. II, III, dan IV semua tertuang dalam keputusan Walikota Cilegon, yaitu :

1. Nomor : 820/ Kep.708-BKPP/2019 Tahun 2019 Tentang Perpanjangan masa Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
2. Nomor : 821.2/ Kep.707-BKPP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
3. Nomor : 820/ Kep.706-BKPP/2019 Tahun 2019 Tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
4. Nomor : 820/ Kep.709-BKPP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Alih tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

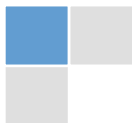
Seluruh Kegiatan Mutasi dan Promosi tersebut dilakukan berdasarkan PP No.11 Tahun 2019, tentang manajemen PNS dan Untuk Jabatan Tinggi Pratama berdasarkan Permenpan RB. No.15 tahun 2019 tentang pengisian Jabatan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

- 5) DPRD mempertanyakan kepada walikota terkait rencana pembangunan Warnasari tidak masuk ke dalam 7 (tujuh) prioritas yang meleset dari RPJMD

Tindak Lanjut:

BAPPEDA: Pembangunan warna sari menjadi prioritas dalam RPJMD kota cilegon 2016-2021, namun konsep pembangunannya tidak menggunakan dana APBD melainkan rencana KPBU

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN



4.1 TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah pelimpahan tugas dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pemberian Tugas Pembantuan untuk meningkatkan efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai oleh APBD. Hal tersebut dikarenakan tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

Pada tahun 2019, Kota Cilegon tidak memperoleh Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga pada Sub Bab ini tidak akan dijabarkan lebih jauh terkait dengan Tugas Pembantuan.



4.2 TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Salah satu substansi penting dalam elemen penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada substansi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah adalah Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan meliputi:

1. Kerjasama daerah;
2. Pembinaan batas wilayah;
3. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
4. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
6. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

4.2.1 KERJASAMA DAERAH

Berdasarkan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Oleh karena itu untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.

Kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon pada Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Cilegon dengan PT. Chandra Asri Petrochemical TBK tentang Pengelolaan Limbah Plastik sebagai bahan Campuran aspal dengan Nomor 64.2/01-Pemt/2019 dan Nomor PL-CR/19-017 pada tanggal 14 Februari 2019
2. Perjanjian antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Serang tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Kota Cilegon dalam Rangka Universal Health Coverage Tahun 2019 dengan Nomor 440/02-Pemt/2019, dan 355/KTR/XIII-01/J)319
3. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Cilegon dengan PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten tentang Kerjasama Pemanfaatan Hak Pengelolaan Nomor 13 Tahun 2013 atas nama Pemerintah Kota Cilegon untuk Pembangunan Terminal Umum Warnasari dengan Nomor 032/03/Sanprajwil/2019, Nomor 054/HK-PCM/III/2019 dan Nomor HK.107/1/6/KCOP.Btn-19 pada tanggal 22 Maret 2019
4. Kerjasama antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Nomor Perjanjian 100/01-Pemt/2018 dan



BAB IV - PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- 001/UN43/MoU.KL/II/2018 tentang Kerjasama Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Sumber Daya Manusia pada tanggal 25 Maret 2019.
5. Perjanjian antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Banten dengan nomor perjanjian 08/SKB-36/V/2019 dan Nomor 590/05-HUK/2019 mengenai Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pertahanan di Kota Cilegon pada tanggal 13 Mei 2019
 6. Kerjasama antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nomor perjanjian 100/06-Diskominfo/2019 dan Nomor 34/KOM INFO/HK. 03.02/04/2019 mengenai Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kota Cilegon pada tanggal 15 Mei 2019
 7. Kerjasama antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Lembaga Administrasi Negara RI dengan nomor perjanjian 073/07-Pemt/2019 dan 18/KTT I/HKM.03.01 mengenai Penguatan Kapasitas Pemerintah Kota Cilegon melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi pada tanggal 21 Mei 2019.
 8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kota Cilegon tentang Pengembangan Potensi Daerah dengan Nomor 102/10-MoU/Kerda/2019 dan 134.4/08-Pemt/2019 pada tanggal 17 Juni 2019.
 9. Kerjasama antara Pemerintah Kota Cilegon dan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk. dengan Nomor Perjanjian 580/09-Bpkad/2019 dan 017/CLG-MOU/2019 tentang Jaya Layanan Perbankan pada tanggal 23 Agustus 2019
 10. Kerjasama antara Pemerintah Kota Cilegon dan PT. Growth Java Industry dengan Nomor Perjanjian 604.3/10-Pemt/2019 dan A/19/IX/GJI-KTR/001 tentang Pemanfaatan Limbah Slag Nikel sebagai Bahan Material Konstruksi Jalan pada tanggal 11 September 2019
 11. Kerjasama antara Pemerintah Kota Cilegon dan Kantor Berita Nasional ANTARA dengan Nomor Perjanjian 480.12/11-Pemt/2019 dan 220A/MOU/DIR-AP/IX/2019 tentang Media Layanan Informasi Publik pada tanggal 13 September 2019
 12. Kerjasama antara Pemerintah Kota Cilegon dan Badan Pusat Statistik Kota Cilegon dengan Nomor Perjanjian 130.07/12-Pemt/2019 dan 092/BPS/3672.0/10/2019 tentang Penyelenggaraan Statistik di Kota Cilegon pada tanggal 10 Oktober 2019
 13. Kerjasama antara Pemerintah Kota Cilegon dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Serang dengan Nomor Perjanjian 440/13-Pemt/2019 dan 1110/KTR/XIII-01/1219 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan



Nasional Bagi Penduduk Kota Cilegon Dalam Rangka Universal Health Coverage Tahun 2019 (Addendum) pada tanggal 11 Desember 2019

14. Kerjasama antara Pemerintah Kota Cilegon dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cilegon dengan Nomor Perjanjian 540/14-Bpkad/2019 dan CGN/BNI-PKS/005/2019 tentang Kerja Sama Layanan Jasa Perbankan) pada tanggal 31 Desember 2019

4.2.2 INOVASI DAERAH

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tools* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing nasional. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil harus melakukan Inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah memiliki urgensi yang tinggi, karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan Inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di sektor publik melalui pembaharuan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan public, dan mindset serta cultural set aparatur).

Kesadaran pentingnya Inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan Inovasi, tepatnya pasal 386 yang menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut : peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai – nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pelaksanaan Inovasi tidak hanya sebatas pembuatan sistem informasi, akan tetapi juga menyangkut aspek lain yang bertujuan untuk pemecahan masalah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 menjelaskan bahwa segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbentuk tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya, sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam implementasinya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) mencanangkan program “*one agency one innovation*” bagi setiap lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah. Proses dan tata kelola inovasi di suatu daerah juga menjadi bagian dari indikator perhitungan dana insentif daerah (DID) yang digulirkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Berikut adalah inovasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Cilegon, dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2019:

Tabel 4.1 Matriks Inovasi Daerah Kota Cilegon Tahun 2019

No	Unit Kerja	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Sasaran/Masalah
1	UPTD Puskesmas Purwakarta	Maphiv Bumil	Pemetaan HIV Pada Ibu Hamil	Menurunkan Resiko Penyebaran HIV
2	UPTD Puskesmas Purwakarta	Posila	Pelayanan Khusus Pasien Lanjut Usia	Layanan Afirmatif
3	UPTD Puskesmas Purwakarta	Zona Bebas Jentik	Kerjasama Masyarakat Dan Juga Rskm Dalam Pemberantasan Jentik Nyamuk	Menurunkan Resiko Klb Dbd
4	UPTD Puskesmas Purwakarta	Gerakan Penyelamatan Gigi Molar 1	Imunisasi Gigi Pada Usia Dini	Menurunkan Resiko Gigi Graham Rusak Pada Anak Di Usia Dini
5	UPTD Puskesmas Cilegon	Si Pingkan	Awasi Dampingi Dan Selamatkan Ibu Hamil	Menurunkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi
6	UPTD Puskesmas Cilegon	Sowan Pati Dengan Permata	Sodakoh Karyawan Untuk Pasien TBC Dengan Pemberian Makanan Tambahan	Mempercepat Pemulihan Pasien TB Paru
7	UPTD Puskesmas Cilegon	Gerakan Mitamas	Minum Obat Tablet Tambah Darah Dan Asam Folat	Menurunkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi
8	UPTD Puskesmas Cilegon	Komunitas Kancil	Kelompok Anak Cinta Lingkungan Sehat	Meningkatkan Kesadaran PHBS
9	UPTD Puskesmas Cilegon	Pulas Jati Juhari	Pos UKK Palas Sejati Menjadi Sehat Mandiri	Meningkatkan Kesehatan Pekerja Di Lingkungan Yang Beresiko
10	UPTD Puskesmas Cilegon	Tabulir	Tabungan Ibu Bersalin Dengan Air	Membantu Persalinan Ibu Hamil Di Daerah Marginal
11	UPTD Puskesmas Cilegon	Posbindu Srikandi Muri	Masa Tua Mandiri	Meningkatkan Kemandirian Lansia
12	UPTD Puskesmas Cilegon	Asman Toga Sirih	Pemanfaatan Kebun Toga, Pengelolaan Puskesmas Kelurahan	Meningkatkan Pemahaman Dan Pemanfaatan Toga
13	UPTD Puskesmas Citangkil	Ayo Mam	Ayo Makan Makanan Anti Malnutrisi	Memproduksi Makanan Murah Bergizi Dalam Peningkatan Berat Badan Penderita Gizi Kurang Dan Buruk
14	UPTD Puskesmas Citangkil	CFD	<i>Citangkil Food Delivery</i>	Meningkatkan Asupan Gizi Penderita Gizi Kurang Dan Buruk, Serta Peningkatan Pengetahuan Orang Tua Dalam Pengasuhan



BAB IV - PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

No	Unit Kerja	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Sasaran/Masalah
15	UPTD Puskesmas Purwakarta	Gimil Sehat	Pemeriksaan Gigi Ibu Hamil, Beriringan K1	Menurunkan Resiko Kerusakan Gigi Pada Ibu Hamil Akibat Peningkatan Hormon
16	UPTD Puskesmas Purwakarta	Poporu	Pelayanan Khusus Pasien TB Paru	Layanan Afirmatif
17	UPTD III Pajak	Layanan PBB Keliling	Loket Pembayaran PBB Di Kelurahan	Layanan Prima
18	UPTD III Pajak	Pembayaran PBB Indomaret	Kerjasama Indomaret	Layanan Prima
19	BPKAD	Pengelolaan Pajak Daerah	Penggunaan Sistem Informasi	Peningkatan Pendapatan Daerah
20	BPKAD	Pawagon	Pelayanan Warga Cilegon Melalui Yan Ling	Peningkatan Pendapatan Daerah
21	BPKAD	Tapping Box	Penambahan Alat Di Cash Register Tenant	Peningkatan Pendapatan Daerah
22	DKPS	Semedi	Sepuluh Menit Jadi	Mempercepat Pelayanan Dokumen Kependudukan
23	BPBJ/ Bagian Pengadaan Barang Jasa	Simbarja	Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Mempercepat Layanan Pengadaan B/J
24	UPT PDB	Insentif Realisasi Penarikan Pinjaman Macet	Insentif 10 % / Realisasi Dari Kepala, Bagi Pendamping Yang Berhasi Menarik Tunggakan 2002-2010	Meningkatkan Realisasi Pembayaran Pada Tunggakan Mitra 2002-2010
25	Disnaker	Pasar Kerja Cilegon	Fasilitasi Rekrutmen Dan Pelamar Melalui Media Sosial	Meningkatkan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal
26	UPT Kebersihan IV	Pasukan Pemburu Sampah	Layanan Pengaduan Sampah	Mengatasi Secara Cepat Timbulan Sampah
27	UPT PLGDT	119	LAYANAN KEGAWATDARURATAN, AMBULAN GRATIS DAN LAYANAN RUJUKAN LUAR DAERAH	LAYANAN PRIMA DAN AFIRMATIF
28	UPT Pengelolaan Radio	Radio Streaming Android	Aplikasi Android Mandiri Fm	Propaganda Pemerintah
29	DPMPSTP	Layanan Antar Ijin (Rencana)	Pengantaran Ijin	Layanan Prima
30	DPMPSTP	One Day Service (Lagi Off)	3 Jenis Layanan Perpanjangan Dapat Selesai Satu Hari	Layanan Prima
31	DPMPSTP	Peta Investasi	Informasi Bagi Investor Terkait Data Tanah	Layanan Prima
32	UPT Rumah Potong Hewan	Pengelolaan Limbah RPH	Produksi Pupuk Dan Poc Dari Limbah RPH, Bernilai Jual Dan Menjalin Kemitraan	Mengatasi Timbulan Limbah Rph Secara Swadaya
33	Dinas Pendidikan	Sipinter	Pusat Layanan Data Pendidikan	Pengelolaan Data
34	Dinas Pendidikan	Simtubagus	Layanan Usulan Bantuan Gedung Sekolah	Pengelolaan Data
35	Dinas Pendidikan	E-Learning	Fasilitas E-Learning 2 Smp (Sekolah Mantap)	Layanan Prima
36	DPAD	Inlislite	Manajemen Pengelolaan Perpustakaan By Sistem	LAYANAN PRIMA
37	DPAD	Icilegon	Aplikasi Android Untuk E-BOOK Yang Dibeli Oleh DPAD	LAYANAN PRIMA
38	Dinas Perhubungan	Saum (Sarana Angkutan Umum Massal) Trans Cilegon Mandiri, Meriki Ning Cilegon	Belum Tersedianya Trayek Jls	Layanan Prima

No	Unit Kerja	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Sasaran/Masalah
39	Dinas Perhubungan	Layanan Penerangan Jalan Umum (Pantang Pulang Sebelum Terang)	Informasi PJU Terbatas	Layanan Prima
40	Dinas Perhubungan	Help Desk (Pengaduan Kir & Pengaduan Pju)	Layanan Pengaduan	Layanan Prima
41	Dinas PUTR	Simanja	Manajemen Jalan	Layanan Prima
42	Dinas PUTR	Sipolwan Asik (Sistem Pengawasan Fisik Konstruksi)	Pengawasan Fisik Konstruksi Belum Efektif Efisien	Layanan Prima
43	Dinas PUTR	Sertifikasi Tenaga Terampil	Daya Saing Tukang Lokal Rendah	Layanan Prima
44	Satpol PP	Pos Monyet		
45	Kecamatan Citangkil	Simpel	Sipp Paten (Siap Replikasi Di Kecamatan Lain)	Layanan Prima
46	Kecamatan Cilegon	Aplikasi Arsip Pertanahan Ppats	Pengelolaan Data Ppats	Pengelolaan Data
47	Kecamatan Purwakarta	Layanan Hari Libur	Memfaatkan Car Free Day	Layanan Prima
48	Kecamatan Jombang	Sitar	Siap Antar (Dokumen Kependudukan)	Layanan Prima
49	Kecamatan Cibeber	Sejen	Siap Anter Jemput Paten (Dokumen Kependudukan)	Layanan Prima
50	Kecamatan Cibeber	Sticker Dokumen Perizinan	Pembeda Dokumen Perizinan (Legalistas Dan Keamanan)	Layanan Prima
51	Kecamatan Cibeber	Aplikasi Paten Android	(Sudah Off)	Layanan Prima
52	Kecamatan Pulomerak	Layanan Hari Libur	Pembuatan Skck (Karena Polsek Buka Di Hari Sabtu)	Layanan Prima

4.2.3 PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Batas wilayah Kota Cilegon tidak berubah dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan pembinaan batas wilayah di Kota Cilegon berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Cilegon adalah upaya pembinaan batas wilayah yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Serang. Secara yuridis saat ini batas daerah Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon Provinsi Banten telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batas Wilayah Kota Cilegon dengan Kabupaten Serang, sehingga pada tahun 2019 dilakukan rencana perapatan/pendetailan batas wilayah mengacu Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang perlu disepakati antar dua daerah dalam Kesepakatan Bersama. Sedangkan pada Tahun 2018, telah ditetapkan batas wilayah dalam di Kota Cilegon yang menetapkan batas-batas antar wilayah kecamatan dan kelurahan termasuk



pulau-pulau di Kota Cilegon melalui Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon.

4.2.4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Secara umum, Pada tahun 2019 Kota Cilegon mengalami bencana relatif sedang dan ringan. Berdasarkan data dari BPBD Kota Cilegon, bencana yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Bencana banjir telah terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kejadian pada ± 18 (delapan belas) lokasi yang tersebar di ± 11 (sebelas) kelurahan. Kejadian banjir terbanyak di Kelurahan Tamansari jumlah keluarga terdampak sebanyak 496 KK, Kelurahan Kubangsari jumlah keluarga terdampak sebanyak 150 KK, Kelurahan Cibeber jumlah keluarga terdampak sebanyak 100 KK, dengan rata-rata ketinggian air 50 – 60 cm. Akibat dari hujan ekstrem ini menyebabkan tanggul jebol akibat aktifitas galian C di Kelurahan Bulakan Kecamatan Cilegon.
- b. Bencana longsor terjadi di 1 (Satu) lokasi yaitu pada tanggal 03 Januari 2019 di Link. Cirubuh Rt 06/03 Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan yang mengakibatkan tembok 2 unit rumah warga ambruk akibat longsor pondasi rumah warga.
- c. Bencana angin puting beliung 5 (lima) lokasi yaitu Jalan Ahmad Yani (jalan protokol) depan Toko Semi Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang dengan kerusakan 1 unit mobil tronton tertimpa pohon tumbang. Kejadian kedua terjadi di SD Lebak Gebang Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon yang mengakibatkan atap bangunan sekolah tertimpa pohon yang tumbang. Kejadian ketiga terjadi di Lingk. Lapangan Cokelat Kelurahan Jombang Wetan, terjadi pohon tumbang akibat cuaca ekstrem. Kejadian keempat di Jalan Gerem Raya, Lingk. Jambu Gg. Jambu, Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol, akses jalan tertutup karena adanya pohon tumbang. Kejadian kelima terjadi di Jl. KH. Yasin Beji, Peruamahan KS, pohon tumbang yang menutupi jalur acara Car Free Day. Tindakan pencegahan berupa pemangkasan pohon-pohon besar yang tapuh dan berpotensi tumbang.
- d. Bencana Kekeringan terjadi di 3 (tiga) kelurahan yang tersbear di 11 lingkungan, yaitu Lingk. Watu Lawang, Lingk. Pasir Salam, dan Lingk. Kewiste di Kelurahan



Gerem. DI Kelurahan Mekarsari tepatnya di Lingk. Tembulun, Lingk. Sumur Pring, dan Lingk. Ciporong, Lingk. Gunung Batur 1, Lingk. Gunung Batur 2 serta yang terakhir adalah bencana kekeringan di Lingk. Kedurung dan Lingk. Cipedede di Kelurahan Pabean. Masyarakat terdampak kekeringan ini paling banyak terjadi di Lingk. Gunung batur 1 dan Gunung batur 2 Kelurahan Mekarsari sebanyak 325 KK, dan Lingk. Watu Lawang Kelurahan Gerem sebanyak 210 KK kesulitan air bersih.

- e. Untuk bencana Kebakaran terjadi 171 kali kebakaran akibat kelalaian warga yang didominasi akibat dari pembakaran sampah (56 kasus) dan ilalang (36 kasus) serta konsleting (34 kasus). Kerugian total dari bencana kebakaran Kejadian sepanjang tahun 2019 adalah Rp. 8, 37 Milyar dan tidak terdapat korban jiwa. Kebakaran paling massive terjadi di TPSA Bagendung yang memakan waktu cukup lama (8 hari) untuk pemadaman dan mengakibatkan sebanyak 37 KK mengungsi. Untuk kecepatan waktu sampai kebakaran (respon time) dibawah waktu 15 menit sebanyak 87 kejadian, serta 84 kejadian dengan waktu lebih dari 15 menit.
- f. Bencana Kegagalan Teknologi sebanyak 3 kejadian, yaitu adanya kebocoran pipa gas dari PT. Dover Chemical, yang mengakibatkan 2 orang warga keracunan.

Antisipasi dan penanganan dari Pemerintah Kota Cilegon terkait dengan bencana tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pada sektor infrastruktur didorong dengan kegiatan penanggulangan banjir pada program Pembangunan, Peningkatan/Normalisasi, Pemeliharaan Sungai, Saluran/Drainase, dan Jaringan Irigasi, serta program/kegiatan yang sifatnya pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan, termasuk pada upaya penambahan daerah resapan air dan ruang terbuka hijau.
- b. Pelatihan Pencegahan Penanggulangan Bencana, Sosialisasi informasi bencana melalui media cetak dan elektronik, Sosialisasi peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Pengadaan Peta Rawan Bencana, Penyusunan Renkon Kegagalan Teknologi, Pengadaan dan Pemeliharaan Saranan Prasarana dan Peralatan Pendukung Kebencanaan pada Pusdalops-PB.
- c. Sosialisasi Informasi Pencegahan Bencana dan juga pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dari BNPB.

Dalam pelaksanaan tugas penanganan bencana, BPBD Kota Cilegon dibantu oleh Unsur TNI/Polri, Pihak kecamatan dan kelurahan, Pelaku industri, Unsur Relawan dari PMI, Tagana, Kelurahan tangguh Bencana, unsur akademisi dan masyarakat yang peduli dengan kebencanaan. Adapun tabel rekapitulasi kejadian bencana Kota Cilegon tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Rincian Kejadian Bencana di Kota Cilegon Tahun 2019

No	Hari, Tanggal	Lokasi	Jenis Kejadian/ Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Kerusakan/ Kerugian	Sumber Bantuan (Instansi/ Dinas/ Perusahaan)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kamis, 03 Januari 2019	Link. Cibeber Barat RT. 01 SD 05 RW. 02 dan Cibeber Timur RT. 01 S/D 07 RW. 02 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber	Banjir	Cuaca Ekstrem	Nihil	Rumah warga yang terdampak banjir sebanyak 50 KK dan ketinggian air mencapai 50 cm	BPBD Kota Cilegon, Tagana Kota Cilegon, PMI Kota Cilegon dan Pihak kepolisian	Perlu adanya pelebaran dan normalisasi drainase
2	Kamis, 03 Januari 2019	Link. Cirubuh RT. 06/03 Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan	Longsor	Cuaca Ekstrem	Nihil	Tembok rumah warga ambruk akibat longsor pondasi rumah warga yang berada diatas (jumlah 2 KK/ 9 Jiwa)	BPBD Kota Cilegon, Tagana Kota Cilegon, & PMI Kota Cilegon	-
3	Senin, 21 Januari 2019	Link. Cibeber Barat RT. 01 SD 05 RW. 02 dan Cibeber Timur RT. 01 S/D 07 RW. 02 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber	Banjir	Cuaca Ekstrem	Nihil	Rumah warga yang terdampak banjir sebanyak 50 KK dan ketinggian air mencapai 50 - 60 cm	BPBD Kota Cilegon, Tagana Kota Cilegon, PMI Kota Cilegon dan Pihak kepolisian	Perlu adanya pelebaran dan normalisasi drainase
		Jl. Raya Anyer - Ciwandan Depan Kelurahan Tegal Ratu		Cuaca Ekstrem	Nihil	Jalan Raya serta kantor Kelurahan dan Koramil tergenang air mencapai 50 - 70 cm	BPBD Kota Cilegon, Tagana Kota Cilegon, PMI Kota Cilegon dan Pihak kepolisian	Merelokasi Kantor Kelurahan dan Koramil ke tempat yang lebih representatif dan aman dari bencana banjir, serta adanya normalisasi drainasi dan saluran pembuangan air
4	Sabtu, 16 Februari 2019	Link. Cigading Pasar RT. 001/002 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan	Banjir	Cuaca Ekstrem	Nihil	Rumah Warga sebanyak 37 KK/ 132 Jiwa terendam air	BPBD Kota Cilegon	Perlu adanya pelebaran dan normalisasi drainase serta dibuatnya daerah serapan air atau tandon
		Link. Kebanjiran RT. 002/002 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan				Rumah Warga sebanyak 34 KK/160 Jiwa terendam air		
		Link. Pintu Air RT. 001/004 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan				Rumah Warga sebanyak 47 KK/185 Jiwa terendam air		
		Link. Penauan RT. 004/001 Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan				Rumah Warga sebanyak 32 KK/136 Jiwa terendam air		



BAB IV - PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

No	Hari, Tanggal	Lokasi	Jenis Kejadian/ Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Kerusakan/ Kerugian	Sumber Bantuan (Instansi/ Dinas/ Perusahaan)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Link. Cilurah RT. 006/002 Link. Cilurah I RT. 06/02 - Link. Ciwandan RT. 02/01 - Link. Kaserangan I RT. 08/01 - Link. Umbul Jabar RT. 04/01 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan - Link. Warung Juet RT. 04/02 - Link. Kalentemu Barat RT. 02/01 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil				Rumah Warga sebanyak 24 KK/ 93 Jiwa terendam air Rumah Warga sebanyak 40 KK/ 159 Jiwa terendam air	BPBD Kota Cilegon BPBD Kota Cilegon	Perlu adanya pelebaran dan normalisasi drainase serta dibuatnya daerah serapan air atau tandon Perlu adanya pelebaran dan normalisasi drainase serta dibuatnya daerah serapan air atau tandon
					Nihil			
5	Senin, 18 Februari 2019	Link. Bulakan RT. 007/001 Kelurahan Bulakan Kecamatan Cilegon	Banjir	Tanggul Jebol akibat galian C	Nihil	Lokasi tempat produksi Batu Bata terendam air dan sebanyak ± 80.000 batu bata siap bakar gagal diproduksi kerugian ditaksir ± Rp. 30.000.000,-	-	
6	Selasa, 05 Maret 2019	Link. Kaligandu RT. 010/004 Kel. Purwakarta Kec. Purwakarta	Banjir	Cuaca Ekstrem	Nihil	17 KK/ 71 Jiwa rumah warga tergenang air setinggi 40 - 50 cm dan tembok dapur rumah milik Bpk. Surohman Roboh	BPBD Kota Cilegon	Perlu dibangun TPT disepanjang Kali di Link. Kaligandu RT. 010/004
		- Link. Jerang Barat RT. 002, 003, 005 RW. 001 - Link. Jerang Ilir RT. 003/003 Kelurahan Karang asem Kec. Cibeber				Jalan raya depan workshop di Jerang Ilir tergenang air ketinggian mencapai 50 cm, sedangkan di Link. Jerang Barat ada 3 rumah 5 KK/ 26 Jiwa rumahnya tergenang air setinggi 50 - 70 cm		Drainase kurang memadai sehingga debit air yang tinggi tidak bisa tertampung sehingga laju air kurang baik
7	Rabu, 06 Maret 2019	Link. Kaligandu RT. 010/004 Kel. Purwakarta Kec. Purwakarta	Banjir	Cuaca Ekstrem	Nihil	17 KK/ 71 Jiwa rumah warga tergenang air setinggi 40 cm	BPBD Kota Cilegon	Perlu dibangun TPT disepanjang Kali di Link. Kaligandu RT. 010/004
8	Selasa, 04 Juni 2019	PT. Dover Chemical Jl. Raya Merak Kel. Gerem Kec. Grogol	Kegagalan Teknologi	Human Error	Nihil	2 Warga sempat dilarikan ke RS dan hampir seluruh warga Link. Kali Baru mengalami Perih Mata dan mual	BPBD Kota Cilegon	Proses investigasi Pihak DLH dan Polres Cilegon dan Instansi terkait lainnya
9	Senin, 24 Juni 2019	Link. Watulawang RT. 01.09 dan Link. Pasir Salam RT. 02/09 Kel. Gerem Kec. Grogol	Kekeringan	Cuaca Ekstrem	Nihil	130 KK warga Link. Watulawang dan 80 KK Warga Link. Pasir Salam mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih akibat	BPBD Kota Cilegon	Perlu dibuat sumur bor dan berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait



BAB IV - PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

No	Hari, Tanggal	Lokasi	Jenis Kejadian/ Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Kerusakan/ Kerugian	Sumber Bantuan (Instansi/ Dinas/ Perusahaan)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Jum'at 05 Juli 2019	Link. Tembulun RT. 01/04, Sumur Pring RT. 02/04, dan Ciporong RT. 03/04 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak	Kekeringan	Cuaca Kestrim	Nihil		PDAM Kota Cilegon	Perlu dibuat sumur bor dan berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait
11	Jum'at 26 Juli 2019	Link. Ciberko RT. 03/02 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	-	DAMKAR kota Cilegon dan BPBD Cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya di musim kemarau
12	Sabtu, 27 Juli 2019	Link. Sukajadi Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	-	DAMKAR kota Cilegon dan BPBD Cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya di musim kemarau
13	Minggu, 28 Juli 2019	Lahan Kawasan Perumahan KIEC	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	-	DAMKAR kota Cilegon dan BPBD Cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya di musim kemarau
14	Minggu, 04 s/d 11 Agustus 2019	TPSA Bagendung Kel. Bagendung Kec. Cilegon	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil		DAMKAR kota Cilegon, BPBD Cilegon & PMI cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya di musim kemarau
16	Minggu, 25 Agustus 2019	Pulo Merak Besar Kec. Pulomerak	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Terbakar dan menjalarnya api ke lahan sekitar Pulo Merak Besar akibat diduga adanya salah seorang warga yang membakar ranting ranting yang kering	DAMKAR kota Cilegon, BPBD Cilegon & PMI cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya di musim kemarau



BAB IV - PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

No	Hari, Tanggal	Lokasi	Jenis Kejadian/ Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Kerusakan/ Kerugian	Sumber Bantuan (Instansi/ Dinas/ Perusahaan)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sabtu, 31 Agustus 2019	Link. Sukajadi RT. 06/02 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Rumput dan pepohonan yang kering terbakar ± 4000 m persegi hingga mendekati pemukiman warga, diduga ada warga yang membakar barang bekas yg ditinggal pergi	DAMKAR kota Cilegon, BPBD Cilegon & PMI cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya di musim kemarau
18	Selasa, 16 September 2019	Sebrang Kantor Kel. Taman Baru Kec. Citangkil	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Terbakarnya lahan ilalang ± 5000 m ² sebrang kantor Kelurahan Taman Baru	DAMKAR kota Cilegon, BPBD Cilegon & PMI cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya di musim kemarau
19	Sabtu, 21 September 2019	Link. Cilurah Kel. Kepuh Kec. Ciwandan	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Terbakarnya lahan ilalang ± 3000 m ² diduga ada warga yang membakar barang bekas yg ditinggal pergi	DAMKAR kota Cilegon, BPBD Cilegon & PMI cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya di musim kemarau
20	Senin, 23 September 2019	Link. Kewiste RT. 04/06 Kel. Gerem Kec. Grogol	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Terbakarnya lahan ilalang ± 300 m ² diduga ada warga yang membakar barang bekas yg ditinggal pergi	DAMKAR kota Cilegon, BPBD Cilegon & PMI cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya di musim kemarau
21	Sabtu, 28 September 2019	Link. Kaserangan Baru RT. 02/04 Kel. Rawa Arum Kec. Grogol	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Terbakarnya lahan ilalang ± 2500 m ² diduga ada warga yang membakar barang bekas yg ditinggal pergi	DAMKAR kota Cilegon, BPBD Cilegon & PMI cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya di musim kemarau
22	Selasa, 01 Oktober 2019	Areal Perkebunan Berdekatan dengan Kantor Kel. Gerem Kec. Grogol Jl. H. Leman Pintu Air RT. 01/01	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Terbakarnya lahan ilalang ± 300 m ² persegi diduga ada warga yang membakar ilalang	DAMKAR kota Cilegon, BPBD Cilegon & PMI cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas



BAB IV - PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

No	Hari, Tanggal	Lokasi	Jenis Kejadian/Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Kerusakan/Kerugian	Sumber Bantuan (Instansi/ Dinas/ Perusahaan)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								atau ilalang sejenis lainnya di musim kemarau
23	Minggu, 06 Oktober 2019	Link. Sambirata RT. 03/05 Kel. Cibeber Kec. Cibeber	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Terbakarnya lahan ilalang ± 5000 m ² diduga ada warga yang membakar barang bekas dan api merambat membakar ilalang yang mendekati pemukiman warga	DAMKAR kota Cilegon, BPBD Cilegon & PMI cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya di musim kemarau
24	Rabu, 09 Oktober 2019	Link. Kedurung RT. 012/001 Kel. Pabean Kec. Purwakarta	Kekeringan	Cuaca Ekstrem	Nihil	25 KK/ 150 Jiwa warga Link. Kedurung RT. 012/001 Kel. Pabean Kec. Purwakarta mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih akibat kemarau panjang	BPBD Kota Cilegon dan PDAM Kota Cilegon	Perlu dibuat sumur bor dan berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait
25	Jum'at 11 Oktober 2019	Link. Kwiste RT. 03/11 Kel. Gerem Kec. Grogol	Kekeringan	Cuaca Ekstrem	Nihil	275 KK warga Link. Kwiste RT. 03/11 Kel. Gerem Kec. Grogol mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih akibat kemarau panjang	PDAM Kota Cilegon	Perlu dibuat sumur bor dan berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait
26	Kamis, 17 Oktober 2019	Link. Cipede Kel. Pabean Kec. Purwakarta	Kekeringan	Cuaca Ekstrem	Nihil	4 KK/12 Jiwa warga Link. Cipede Kel. Pabean Kec. Purwakarta mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih akibat kemarau panjang	PDAM Kota Cilegon	Perlu dibuat sumur bor dan berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait
27	Sabtu, 19 Oktober 2019	Link. Gunung Batur I dan II RW. 03 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak	Kekeringan	Cuaca Ekstrem	Nihil	326 KK/1.048 Jiwa warga Link. Gunung Batur I dan II RW. 03 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih akibat kemarau panjang	PDAM Kota Cilegon	Perlu dibuat sumur bor dan berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait
28	Selasa, 22 Oktober 2019	Wilayah Taman Cilegon Indah Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	Kebakaran Lahan	Cuaca Ekstrem	Nihil	Terbakarnya lahan ilalang/rumput ± 1 hektare diduga ada warga yang membakar barang bekas dan api merambat membakar tumpukan ban bekas yang	DAMKAR kota Cilegon, BPBD Cilegon & PMI cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang



BAB IV - PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

No	Hari, Tanggal	Lokasi	Jenis Kejadian/ Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Kerusakan/ Kerugian	Sumber Bantuan (Instansi/ Dinas/ Perusahaan)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						mendekati pemukiman warga		sejenis lainnya di musim kemarau
		Bukit Perumahan Palm Hills Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta				Terbakarnya lahan ilalang ± 400 m ² persegi diduga ada warga yang membakar barang bekas dan api merambat membakar ilalang yang mendekati pemukiman warga	DAMKAR kota Cilegon, BPBD Cilegon & PMI cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya di musim kemarau
		Link. Cupas Kulon Kel. Gerem Kec. Grogol				Terbakarnya lahan ilalang diduga ada warga yang membakar barang bekas dan api merambat membakar ilalang	DAMKAR kota Cilegon, BPBD Cilegon & PMI cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya di musim kemarau
29	Sabtu, 26 Oktober 2019	PT. Dover Chemical Kel. Gerem Kec. Grogol	Kegagalan Teknologi	Human Error	Nihil	Diduga bocornya Pipa Gas Plant B PT. Dover Chemical ada dua warga keracunan bernama Sifa dan Ibunya RT. 04/02 langsung dibawa ke RSKM	BPBD Cilegon, DLH Cilegon & Pihak Kepolisian	Proses investigasi Pihak DLH dan Polres Cilegon dan Instansi terkait lainnya
30	Minggu, 10 November 2019	Lapangan Halaman Kampus Al-Khairiyah Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Terbakarnya lahan ± 1.000 m ² diduga ada warga yang membakar barang bekas kemudian api merambat	DAMKAR kota Cilegon, BPBD Cilegon & PMI cilegon	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya
31	Rabu, 13 November 2019	SD Lebak Gebang Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon	Angin Puting Beliung	Cuaca Ekstrem	Nihil	Genteng (atap bangunan) SD Lebak Gebang tertimpa pohon yang tumbang	DAMKAR kota Cilegon, BPBD Cilegon & PMI cilegon	Perlu adanya pemangkasan pohon yang rapuh dan berpotensi tumbang
32	Kamis, 21 November 2019	PT. Dover Chemical Kel. Gerem Kec. Grogol	Kegagalan Teknologi	Human Error	Nihil	Diduga bocornya Pipa Gas Plant B Pt. Dover Chemical ada warga sekitar Lingkungan Kali Baru RT. 04/02 mencium bau yang menyengat dan mengganggu pernafasan	BPBD Cilegon, DLH Cilegon & Pihak Kepolisian	Proses investigasi Pihak DLH dan Polres Cilegon dan Instansi terkait lainnya
33	Selasa, 26 November 2019	Bukit Indil Link. Cipinang Atas Kel. Grogol Kec. Grogol	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Lahan sekitar bukit indil terbakar api akibat diduga	DAMKAR kota Cilegon, BPBD	Perlu adanya himbauan kepada

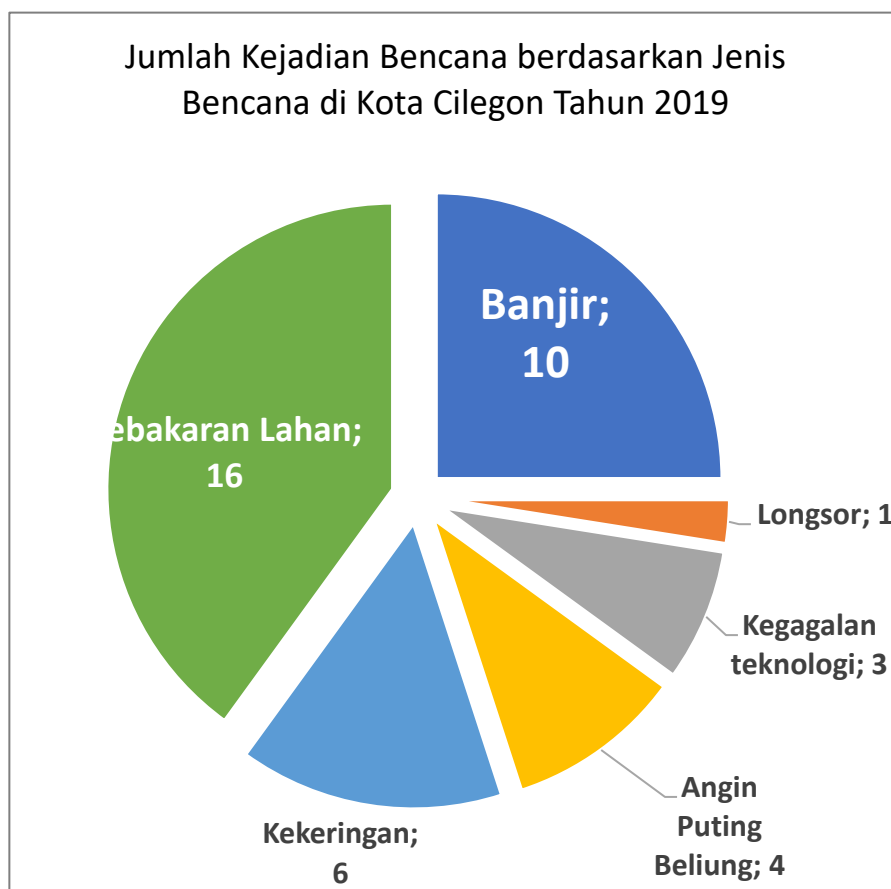


BAB IV - PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

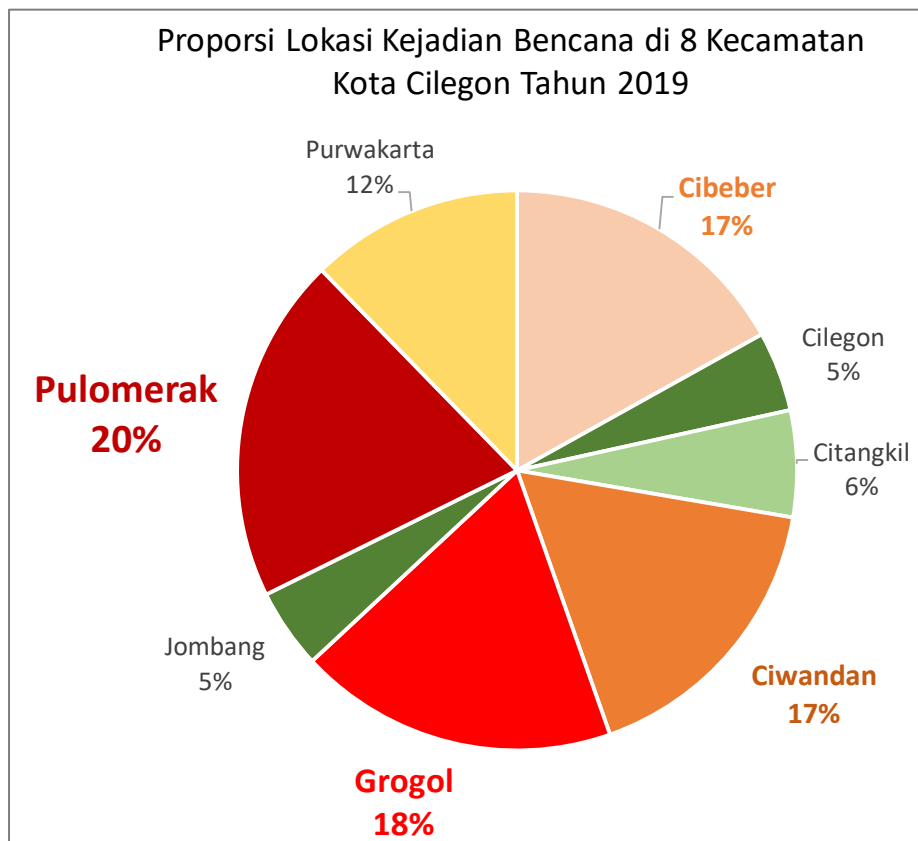
No	Hari, Tanggal	Lokasi	Jenis Kejadian/ Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Kerusakan/ Kerugian	Sumber Bantuan (Instansi/ Dinas/ Perusahaan)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						adanya warga yang membakar rumput/ilalang kering.	Cilegon & PMI cilegon	masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya
34	Minggu, 15 Desember 2019	Link. Lapangan Cokelat Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang	Angin Puting Beliung / Pohon Tumbang	Cuaca Ekstrem	Nihil	Telah terjadi pohon tumbang minggu 15 desember 2019, pukul 06.30 wib di lingkungan Pegantungan Baru Kel. Jombang Wetan RT. 03/06 Kec. Jombang	BPBD Kota Cilegon, Tagana Kota Cilegon dan BABINKABTIMAS	Perlu adanya pemangkasan pohon yang rapuh dan berpotensi tumbang
35	Senin, 16 Desember 2019	Wilayah Kel. Tamansari	Banjir	Cuaca Ekstrem	Nihil	Telah terjadi banjir diakibatkan hujan deras yang turun di wilayah Kel. Tamansari dengan jumlah warga sebanyak 496 KK rumah milik warga terendam air dengan ketinggian mencapai 50 - 80 cm	BPBD Kota Cilegon, Unsur Kelurahan, Tagana Kota Cilegon, BABINKABTIMAS dan masyarakat	Perlu adanya normalisasi kali medaksa, serta pelebaran drainase yang sempit
35	Jum'at, 20 Desember 2019	Link. Kali Timbang RT. 04/03 Kel. Kali Timbang Kec. Cibeber	Kebakaran Lahan	Human Error	Nihil	Lahan yang berlokasi sekitar Link. Kali Timbang RT. 04/03 Kel. Kali Timbang Kec. Cibeber terbakar api seluas ± 3000 m ²	DAMKAR Kota Cilegon, BPBD Kota Cilegon, PMI Kota Cilegon, POLSEK Cibeber, IEA Kota Cilegon dan unsur masyarakat	Perlu adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar barang bekas atau ilalang sejenis lainnya
37	Senin, 21 Desember 2019	Lingkungan Sukajadi RT. 06/02 Kelurahan Mekarsari	Banjir	Cuaca Ekstrem	Nihil	Telah terjadi banjir di Kec. Pulo merak . Wilayah terdampak Mekarsari mengakibatkan 1 rumah rusak berat	BPBD Kota Cilegon, Tagana Kota Cilegon, PMI Kota Cilegon dan Pihak kepolisian	Bangunan Rumah Menutupi Aliran Air
		Lingkungan Sawah RT. 01 & 02 RW. 05 Lingkungan Sudimampir RT. 01, 02, 03, & 04 RW. 04 Lingkungan Baru RT. 03/03 Lingkungan Bumi Waras RT. 07/02 Kelurahan Taman sari		Cuaca Ekstrem	Nihil	Telah terjadi banjir di Kec. Pulo merak . Wilayah terdampak Tamansari ketinggian air mencapai 30 cm dan mengakibatkan 1 rumah rusak berat	BPBD Kota Cilegon, Tagana Kota Cilegon, PMI Kota Cilegon dan Pihak kepolisian	Drainase kurang memadai sehingga debit air yang tinggi tidak bisa tertampung sehingga laju air kurang baik
38	Rabu, 25 Desember 2019	jl. Gerem raya Link. Jambu Gg. Jambu Kel. Gerem Kec. Grogol	Angin Puting Beliung / Pohon Tumbang	Cuaca Ekstrem	Nihil	Telah terjadi pohon tumbang yang mengakibatkan akses jalan sempat tertutup	BPBD Cilegon	Perlu adanya pemangkasan pohon yang rapuh dan berpotensi tumbang

No	Hari, Tanggal	Lokasi	Jenis Kejadian/ Bencana	Penyebab Bencana	Korban Bencana	Kerusakan/ Kerugian	Sumber Bantuan (Instansi/ Dinas/ Perusahaan)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Sabtu, 28 Desember 2019	Wilayah Kel. Jombang Wetan & Kel. Sukmajaya	Banjir	Cuaca Ekstrim	Nihil	Telah terjadi banjir di link. Kel. Sukmajaya & Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang	BPBD Kota Cilegon, Tagana Kota Cilegon dan PMI Kota Cilegon	Drainase kurang memadai sehingga debit air yang tinggi tidak bisa tertampung sehingga laju air kurang baik
40	Minggu, 29 Desember 2012	Wilayah Kec. Purwakarta link. Kel. Purwakarta, Kel. Tegal bunder dan Kel. Pabean	Banjir	Cuaca Ekstrim	Nihil	Telah terjadi banjir di Wilayah. Kel. Purwakarta. Diantaranya Link. Kel. Purwakarta, Kel. Paben dan Kel. Tegal bunder.	BPBD Kota Cilegon, Aparatur Kel. Purwakarta dan Unsur Masyarakat	Drainase kurang memadai sehingga debit air yang tinggi tidak bisa tertampung sehingga laju air kurang baik
		Jl. Kh Yasin Beji Perumahan KS	Angin Puting Beliung / Pohon Tumbang	Cuaca Ekstrim	Nihil	Telah terjadi pohon tumbang minggu 29 Desember 2019, pukul 06.30 wib di Jalur Car Free day (CFD) Kel. Kota Bumi Kec. Purwakarta	BPBD Kota Cilegon, Porles Cilegon, Tagana Cilegon & PMI Cilegon.	Perlu adanya pemangkasan pohon yang rapuh dan berpotensi tumbang

Gambar 6.1 Jumlah Bencana berdasarkan Jenis Bencana di Kota Cilegon Tahun 2019



Gambar 6.2 Proporsi Lokasi Kejadian Bencana di Kota Cilegon Tahun 2019



Terkait dengan bencana kebakaran, berdasarkan data dari Kantor Pemadam Kebakaran Kota Cilegon, dalam kurun waktu tahun 2019 terdapat bencana kebakaran dengan data rekapitulasi kebakaran per wilayah sebagai berikut :

Tabel 6.3 Data Rekapitulasi Kejadian Kebakaran berdasarkan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon Tahun 2018

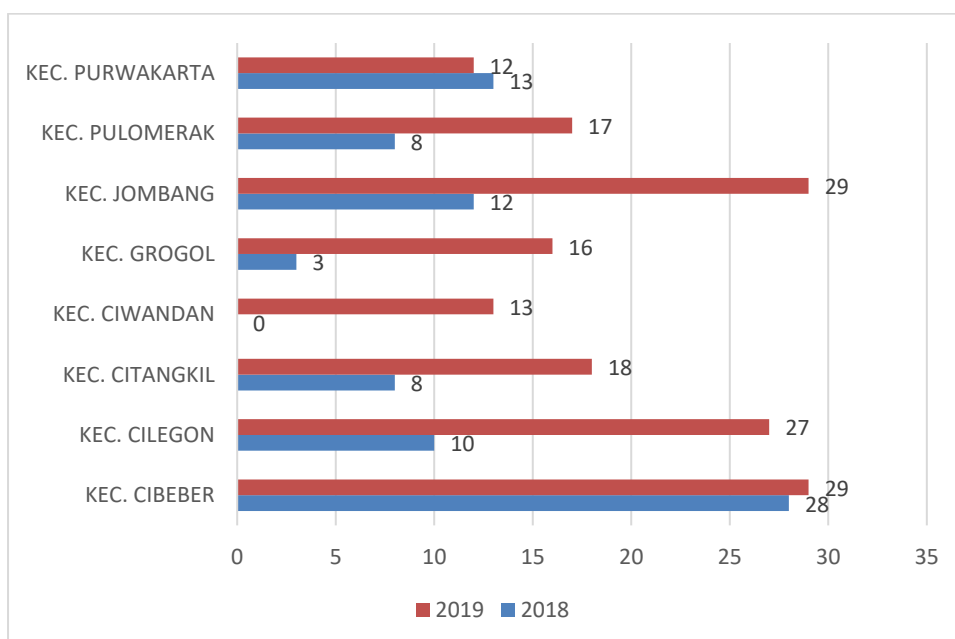
No	KECAMATAN / KELURAHAN	JUMLAH KEJADIAN	No	KECAMATAN / KELURAHAN	JUMLAH KEJADIAN
I	KEC. CIBEBER		V	KEC. GROGOL	
1	Kedaleman	5	1	Grogol	2
2	Cibeber	13	2	Kota Sari	5
3	Kalitimbang	9	3	Rawa Arum	4
4	Karang Asem	2	4	Gerem	5
5	Bulakan			JUMLAH	16
6	Cikerai		VI	KEC. JOMBANG	
	JUMLAH	29	1	Jombang Wetan	11
II	KEC. CILEGON		2	Panggung Rawi	2
1	Ciwaduk	4	3	Gedong Dalem	9
2	Ketileng	2	4	Masigit	4
3	Bendungan	1	5	Sukmajaya	3
4	Ciwedus	4		JUMLAH	29

No	KECAMATAN / KELURAHAN	JUMLAH KEJADIAN	No	KECAMATAN / KELURAHAN	JUMLAH KEJADIAN
5	Bagendung	16	VII	KEC. PULOMERAK	
	JUMLAH	27	1	Lebak Gede	
III	KEC. CITANGKIL		2	Mekarsari	10
1	Citangkil	6	3	Taman Sari	6
2	Taman Baru	7	4	Suralaya	1
3	Kebonsari	2			
4	Lebak Denok			JUMLAH	17
5	Samangraya	2	VIII	KEC. PURWAKARTA	
6	Warnasari	1	1	Ramanuju	
7	Deringo		2	Kebon Dalem	3
	JUMLAH	18	3	Kotabumi	4
IV	KEC. CIWANDAN		4	Pabean	
1	Banjarnegara	1	5	Purwakarta	5
2	Kubangsari	2	6	Tegalbunder	
3	Tegal Ratu	6		JUMLAH	12
4	Kepuh	1		JUMLAH SE-KOTA CILEGON	161
5	Randakari	1			
6	Gunung Sugih	2			
	JUMLAH	13			

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran, 2019

Berikut disampaikan grafik atas rekapitulasi kebakaran yang terjadi di tahun 2019 berdasarkan wilayah kecamatan.

Gambar 6.3 Rekapitulasi Kebakaran Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2019



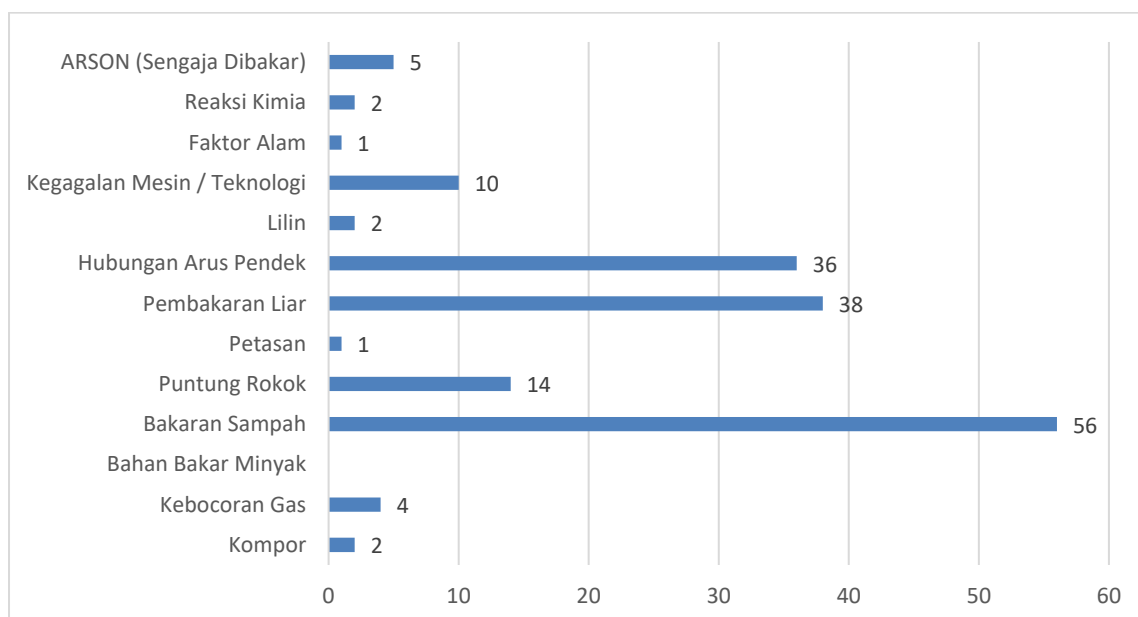
Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang sangat tinggi terjadi

pada kecamatan Jombang dan Cilegon yang mengalami peningkatan sebesar 17 kasus dalam 1 tahun, ini juga harus dievaluasi agar dilakukan penyuluhan terhadap pencegahan terjadinya kebakaran di wilayah/area yang rentan terjadinya kebakaran. Jumlah kasus kebakaran pada tahun 2019 adalah 161 kasus, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (82 kasus kebakaran di tahun sebelumnya). Adapun penyebab bencana kebakaran di Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.4 Data Rekapitulasi Penyebab Kebakaran Di Kota Cilegon Tahun 2019

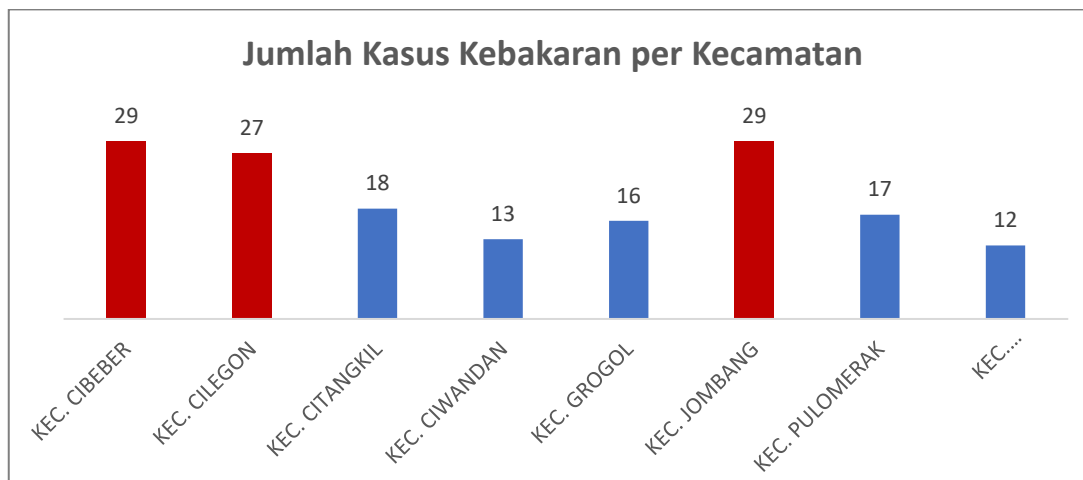
NO	PENYEBAB	JUMLAH PENYEBAB	KETERANGAN
1	Kompor	2	- Kejadian Untuk Wilayah Kota Cilegon Sebanyak 101 (Seratus Satu) Kejadian dengan Total Kerugian ± Rp. 8.376.900.000
2	Kebocoran Gas	4	
3	Bahan Bakar Minyak		
4	Bakaran Sampah	56	
5	Puntung Rokok	14	
6	Petasan	1	
7	Pembakaran Liar	38	
8	Hubungan Arus Pendek	36	
9	Lilin	2	
10	Kegagalan Mesin / Teknologi	10	
11	Faktor Alam	1	
12	Reaksi Kimia	2	
13	ARSON (Sengaja Dibakar)	5	
TOTAL KEJADIAN		171	Rp 8.376.900.000

Gambar 6.4 Penyebab Kebakaran Di Kota Cilegon Tahun 2019



Dari grafik terlihat penyebab tertinggi kebakaran didominasi oleh Bakaran Sampah

Gambar 6.4 Jumlah Kasus Kebakaran per Kecamatan di Kota Cilegon Tahun 2019



B. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana pada APBD Tahun 2019 meliputi :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana sebesar Rp 498.845.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 462.020.200,00 (92,62 %),
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Program Kedaruratan dan Logistik dengan rencana sebesar Rp 285.788.000,00 realisasi sebesar Rp 181.979.530,00 (63,68 %),
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Program Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan rencana sebesar Rp 92.500.000,00 realisasi sebesar Rp 65.769.000,00 (71,10 %),
4. Dinas Sosial di program Perlindungan Jaminan Sosial dalam tiga kegiatan yaitu Buffer Stock, Pemantapan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dengan anggaran sebesar Rp. 925.125.967,- dengan realisasi sebesar Rp. 836.748.200,- (90,44%),
5. Bantuan Sosial berupa bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dianggarkan sebesar Rp. 2.407.413.784,- dengan realisasi sebesar Rp. 540.000.000,- (22,43%),
6. Dinas Pemadam Kebakaran menganggarkan penanganan bencana pada Program Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran dengan rencana

- sebesar Rp 2.273.385.000,00 Realisasi sebesar Rp 2.222.173.000,00 (97,75%),
7. Dinas Pemadam Kebakaran menganggarkan penanganan bencana pada Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dengan rencana sebesar Rp 575.550.100,00 Realisasi sebesar Rp 564.137.750,00 (98,02 %).

C. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana (DIBI) serta kondisi wilayah di Kota Cilegon, maka potensi bencana yang mengancam Kota Cilegon sebanyak 11 jenis bencana yaitu banjir, kegagalan teknologi, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, tanah longsor, gempabumi, tsunami, banjir bandang dan gelombang ekstrim dan abrasi. Jenis potensi bencana terdiri dari bencana yang pernah terjadi dan yang belum terjadi. Bencana yang belum pernah terjadi di Kota Cilegon dikategorikan berpotensi berdasarkan analisa dari pengkajian risiko bencana yang dilakukan. Pengkajian risiko bencana di Kota Cilegon akan dilakukan terhadap 11 jenis bencana.

Tabel Potensi Luas Bahaya di Kota Cilegon

NO	JENIS BAHAYA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	BANJIR	7.813	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	1.530	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	13.404	TINGGI
4	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	1.822	RENDAH
5	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	736	SEDANG
6	GEMPABUMI	17.551	SEDANG
7	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	5.472	SEDANG
8	KEGAGALAN TEKNOLOGI	5.175	TINGGI
9	KEKERINGAN	17.551	RENDAH
10	TANAH LONGSOR	4.536	TINGGI
11	TSUNAMI	1.023	TINGGI

Hasil rekapitulasi potensi luas bahaya setiap bencana di Kota Cilegon di atas menentukan kelas bahaya untuk setiap bencana. Kelas bahaya dominan berada pada kelas **tinggi**. Kelas bahaya tinggi terdapat pada bencana banjir bandang, banjir, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, tsunami dan tanah longsor. Kelas bahaya sedang pada gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi dan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, kekeringan dan epidemi dan wabah penyakit memiliki kelas bahaya rendah.

Beberapa rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana telah dilakukan oleh pemerintah kota Cilegon baik yang bersifat administratif dan kebijakan teknis, yaitu:

A. KEBIJAKAN ADMINISTRATIF

1. Penguatan Kerangka Hukum Penanggulangan Bencana
 - Memiliki Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - Menjamin pembangunan wilayah permukiman penduduk sesuai tata guna lahan dan izin mendirikan bangunan yang telah terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana daerah
 - Memperkuat ketersediaan cadangan anggaran untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana daerah sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok-kelompok rentan terhadap dampak bencana.
2. Peningkatan Kemitraan Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana
3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 - Membangun pusat data dan informasi bencana yang mudah diakses oleh seluruh komunitas dalam maupun komunitas luar daerah
 - Mendayagunakan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana
4. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
 - Membangun system peringatan dini untuk bencana-bencana berisiko tinggi
 - Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
5. Peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana
 - Mengoptimalkan kemitraan antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat

B. KEBIJAKAN TEKNIS

1. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Pengurangan risiko bencana ini dititikberatkan terhadap upaya pencegahan, pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah. Beberapa upaya pencegahan telah dilakukan untuk beberapa bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan kegagalan teknologi. Sedangkan beberapa bencana yang tidak dapat dilakukan pencegahan adalah gempa bumi dan tsunami.

2. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Beberapa program dan kegiatan rutin telah dilakukan pemerintah Kota Cilegon pada setiap tahunnya dalam hal penanganan bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan kegagalan teknologi dengan melibatkan semua unsur melalui koordinasi dan kerjasama dalam upaya pemulihan yang cepat dan efektif.

3. Peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana

Optimalisasi pemulihan dampak bencana dilakukan melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap infrastruktur. Selain itu, juga diperlukan pemulihan terhadap kondisi sosial dan psikologis masyarakat terhadap dampak bencana, pengkajian terhadap kerusakan dan kerugian dari dampak bencana agar pemulihan sarana dan prasarana public serta rekonstruksi rumah korban bencana dilakukan secara efektif dan efisien.

4.2.5 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**A. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)**

Secara umum, kondisi Kota Cilegon pada tahun 2019 dapat dikategorikan kondusif, aman dan terkendali, tidak terdapat suatu tindak gangguan keamanan yang sifatnya serius yang berlandaskan SARA ataupun tindakan anarkisme, separatisme atau yang lainnya.

B. Organisasi Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

OPD yang menangani ketentraman dan ketertiban umum adalah:

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Organisasi Perangkat Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dan Perlindungan Masyarakat.

Sesuai dengan tugasnya kedua OPD ini mempunyai posisi yang strategis sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan ketertiban umum ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah.

2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Potensi sumber daya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dijelaskan dalam tabel :

Tabel 6.5

Distribusi Personil Satpol PP Kota Cilegon Berdasarkan Eselon dan Pendidikan

No	Uraian	Pendidikan					Jumlah
		S2	S1/ D3	SMA/ sederajat	SMP	SD	
1	Eselon I	-	-	-	-	-	-
2	Eselon II	1	1	-	-	-	2
3	Eselon III	3	5	2	-	-	10

No	Uraian	Pendidikan					Jumlah
		S2	S1/ D3	SMA/ sederajat	SMP	SD	
4	Eselon IV	-	27	2	-	-	29
5	Staff	-	2	55	2	-	59
6	Staff Non PNS	-	12	87	1	-	100
Jumlah							200

C. Sumber dan Jumlah Anggaran

Penganggaran untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada

- Satpol PP melalui Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rencana sebesar Rp. 7.219.977.270,00 realisasi sebesar Rp. 6.781.842.743,00 (93,93%).

D. Penanggulangan dan Kendalanya

Berikut adalah data rekapitulasi penanganan kasus ketertiban, terutama yang terkait dengan pelanggaran Perda di Kota Cilegon sepanjang Tahun 2019 :

Tabel 6.6 Rekapitulasi Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Jumlah pelanggaran perda/ kasus yang ditangani pada tahun 2019	jumlah pelanggaran perda/ kasus yang terjadi pada tahun 2019	Persentase Penanganan	Keterangan Pelanggaran Perda
1	Tingkat penyelesaian jumlah pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	1108	1183	93,66%	Perda No. 5 Tahun 2003 = 174 Kasus Perda No. 6 Tahun 2003 = 77 Kasus Perda No. 5 Tahun 2001 = 191 Kasus Perda No. 2 Tahun 2003 = 276 Kasus Perda No. 7 Tahun 2015 = 462 Kasus Perda No. 9 Tahun 2012 = 1 Kasus Perda No. 5 Tahun 2012 = 2 Kasus

Capaian penanganan atau tindaklanjuti terhadap kasus pelanggaran peraturan daerah 93,66 % ditangani (dari total 1.183 kasus, 93,66% tertangani/ditindaklanjuti). Namun, Kota Cilegon belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dimana target yang dicapai harus mencapai 100%. Sedangkan Kota Cilegon Capaian tingkat penyelesaian jumlah pelanggaran perda yang di tindaklanjuti hanya mencapai 93.66%.



Di sisi lain, Pemerintah Kota Cilegon selalu berusaha untuk menjaga kondusivitas daerah dengan beberapa langkah diantaranya adalah :

1. Memfasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, TNI dan aparat pemerintah daerah terkait, sehingga tercipta hubungan kerja secara terpadu dan serasi.
2. Memfasilitasi dan mendukung kelembagaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat agama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
3. Melakukan pembinaan dan pelatihan anggota Linmas Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota dengan jumlah anggota Linmas sebanyak 1560 orang dengan jenis kegiatan meliputi pembinaan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota Linmas, serta pemberian honorarium kepada 1560 anggota Linmas se-Kota Cilegon selama 12 bulan.
4. Penguatan persatuan dan kesatuan bangsa melalui penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan
5. Penguatan kewaspadaan dini masyarakat melalui Sosialisasi Permendagri Nomor 12 tahun 2016 tentang kewaspadaan dini masyarakat.
6. Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan wawasan kebangsaan melalui Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan wawasan kebangsaan serta Sosialisasi Permendagri No 38 Tahun 2011 tentang pedoman Peningkatan bela negara di daerah.
7. Melakukan Pemantauan Orang asing, NGO (non government organization) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta lembaga asing di Kota Cilegon
8. Sosialisasi Penyalahgunaan, Pencegahan, Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba bekerja sama dengan BNN Kota Cilegon di sekolah- sekolah.
9. Penertiban administrasi kependudukan serta antisipasi indikasi terorisme, kriminalitas dan migrasi penduduk asing melalui operasi razia yustisi yang bekerja sama dengan petugas Satpol PP, TNI, Polri dan petugas terkait.

Secara umum, upaya-upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tidak menemui kendala yang berarti dan dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat dikatakan upaya-upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Cilegon sepanjang Tahun 2019 berjalan dengan baik dan optimal.

Tabel 6.7 Cakupan Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2019

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	TARGET	RUMUS	DATA DASAR					JUMLAH	
										Perhitungan Rumus	Hasil
2	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari target mengacu pada peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 69 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 62 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota	Banyaknya kelompok patroli x Jumlah patroli dalam sehari (P1) dibagi jumlah wilayah kecamatan dalam wilayah kabupaten /kota (P2)	1	Kelompok 1	2	2 kec	2	=2/2 x 100	100
					2	Kelompok 2	2	2 kec	2	=2/2 x 100	100
					3	Kelompok 3	2	2 kec	2	=2/2 x 100	100
					4	Kelompok 4	2	2 kec	2	=2/2 x 100	100
					Jumlah Total P1		8		8	=8/8x100	100

Tabel 6.8 Cakupan Rasio Petugas Linmas di Kota Cilegon Tahun 2019

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	TARGET	RUMUS	DATA DASAR					JUMLAH	
										PERHITUNGAN RUMUS	HASIL
3	Perlindungan Masyarakat	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	1 RT Memiliki 1 Org Anggota Satlinmas Target Mengacu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota	Jumlah RT memiliki anggota Satlinmas dalam satu kota (P1) dibagi Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten / kota (P2)	1	Kec. Cilegon	77	Kec.Cilegon	110	=77/110	0.7
					2	Kec, Cibeber	116	Kec,Cibeber	169	= 116/169	0.7
					3	Kec, Jombang	126	Kec,Jombang	174	=126/174	0.7
					4	Kec. Purwakarta	78	Kec.Purwakarta	134	=78/134	0.6
					5	Kec. Citangkil	177	Kec.Citangkil	207	=177/207	0.9
					6	Kec. Grogol	53	Kec.Grogol	103	=53/103	0.5
					7	Kec. Ciwandan	92	Kec.Ciwandan	121	=92/121	0.8
					8	Kec.Pulo merak	120	Kec.Pulo merak	131	=120/131	0.9
					Jumlah Total P1		839		1149	=839/1149	0.7

Capaian penanganan terhadap ketentraman dan ketertiban umum dari tabel diatas adalah sebesar 100%. Ini dapat dilihat bahwa setiap 8 kecamatan yang ada di Kota Cilegon dibagi menjadi 4 kelompok patroli yang disetiap kelompok patroli yang diisi



oleh 2 anggota patroli yang disebar kedalam 2 kecamatan dan dimasing-masing kecamatan disebar masing-masing 1 anggota patroli. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap kecamatan memiliki 1 anggota patroli dengan melakukan 2 kali patroli dalam sehari sehingga capaian siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat mencapai hasil 100%. Namun, hasil capaian siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yang pada targetnya minimal harus melakukan 3 x patroli dalam sehari. Sehingga Kota Cilegon belum mencapai target dari Permendagri yang sudah ditetapkan.

Capaian rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota Cilegon sebesar 0.7 dengan mekanisme perhitungan sebagai berikut bahwa dalam se-Kota Cilegon seluruhnya terdapat 1149 RT dengan perbandingan anggota linmas yang tersedia hanya 839 orang. Dengan demikian dari jumlah RT/jumlah anggota linmas yang tersedia maka cakupan rasio terhadap perlindungan masyarakat (linmas) di kota cilegon sebesar 0.7 ini mencerminkan bahwa anggota satlinmas yang tersedia di Kota Cilegon belum mencukupi target yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota dimana batas cakupan rasio minimal harus mencapai 1.0 Namun, Cakupan rasio terhadap Kota Cilegon masih mengalami kekurangan sebesar 0.3 yang mengindikasikan bahwa Kota Cilegon belum memenuhi kebutuhan anggota satlinmas yang ada.

E. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Pemerintah Kota Cilegon selalu mengupayakan keikutsertaan aparat keamanan. Sehingga berkat koordinasi lintas sektoral yang mantap maka tidak terdapat gangguan yang disebabkan konflik berbasis sara, anarkis, separatisme maupun lainnya. Misalnya Kegiatan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Pemerintah Daerah.



BAB V PENUTUP



Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah beserta pelaksanaan prioritas pembangunan daerah di Tahun 2019 tercapai dengan baik. Dari aspek kinerja makro pembangunan serta kinerja program dan kegiatan, pencapaian di tahun anggaran 2019 juga lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2019 tentunya merupakan tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cilegon tahun sebelumnya (2018). Berbagai rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun sebelumnya (LKPJ 2018) sebagian besar sudah dijadikan acuan dalam tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pencapaian kinerja program dan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2019, dan juga sebagai salah satu instrumen atau acuan dalam menyusun kebijakan dokumen perencanaan tahun 2020 (yang disusun di tahun anggaran 2019).

Dari aspek tolok ukur pencapaian kinerja indikator makro pembangunan, di Tahun 2019 Kota Cilegon memperoleh capaian yang baik pada aspek pertumbuhan ekonomi (laju PDRB dan investasi) dan berbagai aspek kesejahteraan sosial seperti indeks pembangunan manusia, kemiskinan dan ketenagakerjaan. Pada aspek ketenagakerjaan, meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) sedikit meningkat sebesar 0,35%, namun masih bisa dijaga di bawah 10% (TPT 2019 = 9,68%) mengingat resesi yang terjadi pada salah satu industri besar di Kota Cilegon yang mengakibatkan terjadinya pemutusan tenaga kerja secara masif di pertengahan tahun 2019. Adapun perekonomian di Kota Cilegon mengalami pertumbuhan dengan akselerasi yang positif, dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,65 % yang didukung pula oleh pertumbuhan investasi di 2019 sebesar 8,4 trilyun atau meningkat sebesar 4,93 %. Pertumbuhan ekonomi diiringi pula oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia yang direpresentasikan oleh indikator IPM Kota Cilegon sebesar 73,01 di 2019 (meningkat 0,36 poin dibanding tahun sebelumnya). Tingkat kemiskinan Kota Cilegon juga berhasil tereduksi sebesar 0,22 %, dengan angka kemiskinan di 2018 sebesar 3,25 persen turun menjadi 3,03 persen di 2019.

Pencapaian indikator makro pembangunan didukung dari pencapaian indikator program pembangunanyang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan Kota Cilegon. Secara umum, pencapaian target indikator program di tahun 2019 sudah cukup baik. Dari 810 indikator program yang ditargetkan, sebanyak 79,75 % capaiannya “sangat tinggi” (nilai kinerja $\geq 91\%$); 11,73% capaiannya “tinggi” (nilai kinerja 76% - 90%); 2,96% “sedang” (nilai kinerja 66% - 75%); 2,22% “rendah” (nilai kinerja 51% - 65%), dan 3,33% “sangat rendah” (nilai kinerja $\leq 50\%$). Dengan demikian, kinerja pencapaian target indikator program di Tahun 2019 yang memiliki rata-rata kinerja pencapaian “sangat tinggi” dan “tinggi” adalah sebesar 91,49%. Pencapaian indikator program tentu saja dipengaruhi/didukung oleh pencapaian indikator kegiatan (*output* kegiatan), dari 2597 indikator kegiatan, 93,69% capaiannya “sangat tinggi”; 1,89% “tinggi”; 0,77% “sedang” dan sebanyak 3,66% yang capaian output kegiatannya diklasifikasi rendah. Dengan demikian, kinerja pencapaian target indikator (*output*) kegiatan di Tahun 2019 yang memiliki rata-rata kinerja pencapaian “sangat tinggi” dan “tinggi” adalah sebesar 95,58 %.

Realisasi **total belanja** pada tahun 2019 adalah sebesar 88,32%, jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya (2018 = 80,5%). Adapun realisasi **belanja langsung** yang mendukung secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan secara teknis adalah sebesar 86,93 %, jauh lebih baik dibandingkan capaian belanja langsung pada tahun sebelumnya (realisasi belanja langsung 2018 = 74,96%. Kondisi ini merupakan implikasi dari berbagai upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara kontinyu sepanjang tahun anggaran oleh berbagai *stakeholder* pengendali pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, demi menjaga dan mendukung ketercapaian *outcome* dan *output* pembangunan di Kota Cilegon.

Beralih pada aspek tata kelola pemerintahan, beberapa indikasi positif dari pencapaian kinerja Pemerintah Kota Cilegon di tahun 2019 adalah perolehan apresiasi untuk Pemerintah Kota Cilegon dari berbagai *stakeholder* eksternal dalam bentuk penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2019 Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
2. Penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Baik" Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia



3. Penghargaan TOP 100 Smart City dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
4. Penghargaan Kota Sehat Kategori Swasta Saba Wistara II dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 Kader Gegana Pedes dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
6. Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 Kader Gegana Pedes dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
7. Penghargaan Paramakarya Penganugerahan Produktifitas Tahun 2019 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
8. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
9. Piagam Penghargaan Kota Sebagai Metode Computer Assisted Test (CAT) BKN Dalam Pelaksanaan Seleksi CPNS dari Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia
10. Penghargaan Pencapaian Responsivitas Penggunaan Aplikasi Mang Asep By Arek Proses Pelayanan Kepegawaian dari Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia
11. Piagam Penghargaan Lomba Lembaga Kearsipan Daerah dari Arsip Nasional Republik Indonesia
12. Penghargaan Pencapaian Tinggi Pembinaan dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dari Ombudsman Republik Indonesia.
13. Penghargaan Kearsipan Tingkat Nasional (Kategori A / Memuaskan) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Arsip Nasional Republik Indonesia
14. Top 10 Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Se-Indonesia dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas RI.
15. Piagam Penghargaan Kota Cilegon Atas Partisipasi Aktif Mendukung Sukses Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Berbagai pengakuan eksternal dalam bentuk penghargaan tersebut merupakan implikasi positif dari keberhasilan Pemerintah Kota Cilegon dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sektor pembangunan di Kota Cilegon.



Sebagai penutup, dengan disampaikannya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cilegon Tahun 2019 ini, diharapkan seluruh proses dan *output* pelaksanaan pembangunan Kota Cilegon sepanjang Tahun Anggaran 2019 dapat tergambarkan dengan baik, sebagai salah satu instrumen evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah Kota Cilegon ke depannya.

Pemerintah Kota Cilegon secara terbuka menerima masukan dan rekomendasi terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertuang dalam dokumen LKPJ Wali Kota Cilegon Tahun 2019 ini. Adapun hasil rekomendasi terhadap LKPJ ini secara khusus akan kami jadikan *input* utama untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan yang akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan manusia di Kota Cilegon.

Cilegon, Maret 2020

WALI KOTA CILEGON

ttd

Drs. H. EDI ARIADI, M.Si